LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024

2024

PEMERINTAHAN PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-undang Pembentukan Daerah 1
b. Data Geografis Wilayah 3
c. Informasi Umum Data Penduduk..... 7
d. Jumlah Kabupaten/Kota……..... 7
e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah..... 8
f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah …… 14
g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..... 16
h. Pelaksanan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja …… 18

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah 39
b. Visi dan Misi kepala Daerah 71
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menegah 75
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan 75

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal 96

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro 99

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil…….... 101
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 110
2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 112

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan..... 320
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi Bengkulu……..... 320
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan 323
3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi
3.1.1. Target Kinerja ……..... 323
3.1.2. Realisasi……..... 328
3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota..... 354
3.3. Permasalahan dan Kendala 354
3.4. Saran dan Tidak Lanjut..... 356

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan 358
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar…….... 358
4.1.2 Target Pencapaian ……. 358
4.1.3 Realisasi …….. 359
4.1.4 Alokasi Anggaran …… 360
4.1.5 Dukungan Personil …….. 360
4.1.6 Permasalahan Solusi…… 361
4.2. Urusan Kesehatan …… 363
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar…….... 363
4.2.2 Target Pencapaian ……. 364
4.2.3 Realisasi …….. 365
4.2.4 Alokasi Anggaran …… 365
4.2.5 Dukungan Personil …….. 365
4.2.6 Permasalahan Solusi…… 366
4.3. Urusan Pekerjaan Umum..... 367
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar…….... 367
4.3.2 Target Pencapaian ……367

4.3.3 Realisasi …….. 368
4.3.4 Alokasi Anggaran …… 370
4.3.5 Dukungan Personil …….. 370
4.3.6 Permasalahan Solusi……..…… 370
4.4. Urusan Perumahan Rakyat..... 371
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar…..…….. 371
4.4.2 Target Pencapaian …….. 372
4.4.3 Realisasi …… 372
4.4.4 Alokasi Anggaran …… 373
4.4.5 Dukungan Personil …… 373
4.4.6 Permasalahan Solusi…….. 374
4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat …. 374
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar…..…… 374
4.5.2 Target Pencapaian …… 375
4.5.3 Realisasi …….. 375
4.5.4 Alokasi Anggaran …….. 376
4.5.6 Dukungan Personil …… 376
4.5.6 Permasalahan Solusi…….. 377
4.6. Urusan Sosial..... 377
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar…..…… 377
4.6.2 Target Pencapaian …… 378
4.6.3 Realisasi …….. 378
4.6.4 Alokasi Anggaran …… 379
4.6.5 Dukungan Personil …… 379
4.6.6 Permasalahan Solusi……... 380
4.7. Program dan Kegiatan 382

BAB V PENUTUP 392

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaannirrohiim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami sampaikan ke hadirat Allah SWT Penguasa Semesta Alam atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2024 ini diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 70 ayat (4) yang berbunyi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2024 ini berpedoman kepada Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.7/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 hal Penyampaian Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 dengan menguraikan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2024 yang mencakup penyelenggaraan Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum, Tugas Pembantuan, serta Tugas Umum Pemerintahan sebagai wujud laporan dari penyelenggaraan pemerintahan terhadap periode RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintahan Provinsi Bengkulu dan Pemerintahan Pusat dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah.

Demikian, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi petunjuk, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

GUBERNUR BENGKULU

H. HELMI HASAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Provinsi Bengkulu awalnya merupakan sebuah karesidenan yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dengan status Daerah Administrasi di bawah Koordinasi Gubernur Sumatera Selatan. Pada tanggal 18 November 1968 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Karesidenan Bengkulu diresmikan menjadi salah satu Provinsi di Republik Indonesia yang ke-26.

Semula Provinsi Bengkulu terdiri dari 3 Kabupaten dan 1 Kota, akan tetapi semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu, Provinsi Bengkulu terbagi menjadi 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.

Selanjutnya pada tahun 2008, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu, membagi Provinsi Bengkulu menjadi 9 Kabupaten (3 kabupaten induk dan 6 kabupaten pemekaran) dan 1 Kota yang terdiri dari 129 Kecamatan dan Desa/Kelurahan 1.514 Desa/Kelurahan.

Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dapat dilihat pada Tabel 1.1 sedangkan Peta Administratif Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan per Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Nama Ibu Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
Bengkulu Selatan	Manna	11	158
Rejang Lebong	Curup	15	156
Bengkulu Utara	Arga Makmur	19	220
Kaur	Bintuhan	15	195
Seluma	Tais	14	202
Mukomuko	Mukomuko	15	152
Lebong	Tubei	12	104
Kepahiang	Kepahiang	8	117
Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	11	143
Kota Bengkulu	Bengkulu	9	67
Provinsi Bengkulu		**129**	**1.514**

Sumber : Kepmendagri Nomor 050.145 Tahun 2022.

Gambar 1.1
Peta Administratif Provinsi Bengkulu

Sumber : Perda Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043.

b. Data Geografis Wilayah

1. Geografis

Provinsi Bengkulu terletak pada 101°01 - 103°41 Bujur Timur serta 2° 16 - 3°31 Lintang Selatan dan terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera, membujur dari Utara ke Selatan, sepanjang Bukit Barisan yang merupakan hutan suaka alam dan hutan lindung di sebelah Timur dan Samudera Indonesia di sebelah Barat dan dataran tinggi yang membentang dari ujung utara sampai ujung selatan dengan lebar ± 50 km. Dataran tinggi merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan.

Provinsi Bengkulu memiliki bentuk wilayah relatif memanjang sejajar garis pantai, dengan panjang garis pantai ± 525 km. Wilayah Provinsi Bengkulu memiliki kontur yang bergelombang dengan ketinggian tempat (altitude) berkisar antara 0 - 1.938 meter di atas permukaan laut (dpl).Titik terendah dijumpai di sepanjang pantai sedang titik tertinggi terletak di Puncak Gunung Kaba.

Ditinjau berdasarkan kelas ketinggian tempat, maka wilayah Provinsi Bengkulu dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Wilayah dengan ketinggian tempat 0 - 250 m dpl, meliputi areal seluas 976.624 ha yang menyebar disepanjang pantai dari utara sampai bagian selatan yang merupakan dataran *aluvium*.
2) Wilayah dengan ketinggian tempat >250 - 500 m dpl, meliputi areal seluas 338.365 ha yang menyebar disepanjang pantai dari utara sampai bagian selatan yang merupakan peralihan dari *aluvium* ke perbukitan.
3) Wilayah dengan ketinggian tempat >500 - 750 m dpl, meliputi areal seluas 228.881 ha yang menyebar disebagian besar Kabupaten Lebong dan Rejang Lebong.
4) Wilayah dengan ketinggian tempat >750 - 1000 m dpl, meliputi areal seluas 181.548 ha yang menyebar di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Kaur yang merupakan Taman Nasional.
5) Wilayah dengan ketinggian tempat >1.000 - 1.250 m dpl, meliputi areal seluas 128.664 ha di sepanjang bagian bawah pegunungan bukit barisan yang merupakan Taman Nasional.

6) Wilayah dengan ketinggian tempat >1.250 - 1.500 m dpl, meliputi areal seluas 78.630 ha yang sebagian besar menyebar di sepanjang bagian bawah pegunungan bukit barisan di Kabupaten Lebong, Rejang Lebong dan Kaur.
7) Wilayah dengan ketinggian tempat >1.500 - 2.000 m dpl, meliputi areal seluas 70.338 ha yang merupakan puncak gunung-gunung di sepanjang pegunungan Bukit Barisan.

Adapun data ketinggian tempat di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 1.1
Ketinggian Tempat di Provinsi Bengkulu

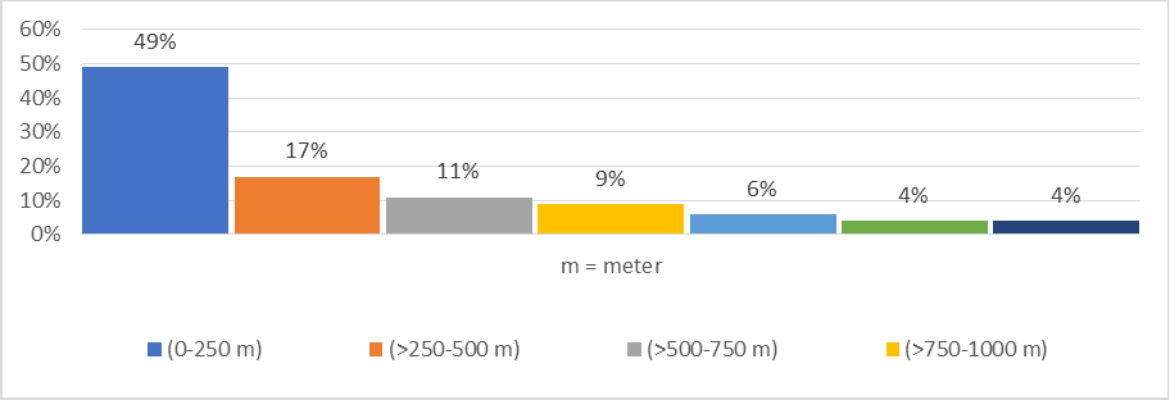

Sumber : Bengkulu Dalam Angka Tahun 2024, BPS 2024.

2. Batas Administrasi Daerah

Secara administratif Provinsi Bengkulu berbatasan dengan:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat;
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Lampung;
3) Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia;
4) Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan

3. Luas Wilayah

Adapun luas wilayahnya sendiri mencapai ± 32.365,7 Km² dengan luas daratan ± 20.030,5 Km² dan luas perairan (laut)

mencapai ± 12.335,2 Km² dengan panjang garis pantai mencapai ±525 Km yang seluruhnya terletak di bagian barat Provinsi Bengkulu.

Selain itu, Provinsi Bengkulu memiliki beberapa pulau kecil baik yang berpenghuni seperti Pulau Enggano, serta pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni seperti Pulau Dua, Pulau Merbau, Pulau Bangkai, Pulau Satu, Pulau Mega dan Pulau Tikus.

Luas wilayah Provinsi Bengkulu menurut luas Kabupaten dan Kota disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Luas Wilayah Provinsi Bengkulu

No.	Kabupaten / Kota	Luas darat (km²)	Luas Laut (km²)
1.	Bengkulu Selatan	1.218,5	307,7
2.	Rejang Lebong	1.506,8	0,0
3.	Bengkulu Utara	4.392,96	1.495,93
4.	Kaur	2.547,0	606,0
5.	Seluma	2.461,5	422,7
6.	Mukomuko	4.143,7	862,2
7.	Lebong	1.672,2	0,0
8.	Kepahiang	713,1	0,0
9.	Kota Bengkulu	151,7	387,6
10.	Bengkulu Tengah	1.223,94	622,27
	Provinsi Bengkulu	20.030,5	12.335,2

Sumber : Perda Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043.

4. Topografi

Berdasarkan topografinya Provinsi Bengkulu terletak pada tiga jalur dengan luas wilayah sebagai berikut :

1) Jalur Pertama

Daerah ini terletak pada ketinggian 0 – 100 m diatas permukaan laut dengan luas mencapai 708.133 Ha (35,78%) diklasifikasikan sebagai daerah *low land.*

2) Jalur Kedua

Daerah ini terletak pada ketinggian 100-1000 m diatas permukaan laut, posisinya berada di sebelah timur dari jalur pertama, daerah tersebut merupakan lereng pegunungan Bukit Barisan dan terklarifikasi sebagai daerah *Bukit Range.* Pada jalur ini Provinsi Bengkulu dibagi dalam kedua kelompok yaitu daerah dengan

ketinggian antara 100 – 500 m di atas permukaan laut dengan luas mencapai 625.399 ha (31,60%) dan ketinggian antara 500 – 1.000 m di atas permukaan laut dengan luas mencapai 406.044 ha (20,52%).

3) Jalur Ketiga

Daerah ini terletak pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, posisinya berada di sebelah Timur jalur kedua sampai ke puncak pegunungan Bukit Barisan, daerah tersebut umumnya merupakan daerah kegiatan vulkanis dan tektonis. Luas daerah pada ketinggian ini mencapai 239.924 ha (12,09%).

5. Klimatologi

1) Suhu dan Kelembaban

Temperatur rata-rata suhu udara tertinggi di Wilayah Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 yang terjadi pada bulan Mei di angka 27,7˚ C dengan temperatur rata-rata suhu terendah di angka 26,3˚ C, sedangkan kelembaban di Provinsi Bengkulu tergolong tinggi yaitu berkisar antara 83-86%.

2) Curah Hujan

Iklim di Provinsi Bengkulu menurut Schmid dan Ferguson diklasifikasikan ke dalam tipe iklim B, dengan curah hujan di atas 3.500 mm per tahun dan merupakan salah satu daerah terbasah di Indonesia.

6. Flora dan Fauna

Hutan tropis Provinsi Bengkulu memiliki sumber kekayaan flora dan fauna yang dapat dikembangkan menjadi obyek wisata.Kekayaan flora hutan tropis Provinsi Bengkulu yang sudah terkenal dan telah menjadi objek wisata hutan adalah bunga Rafflesia Arnoldi yang terdapat di hutan Provinsi Bengkulu.

Kekayaan flora yang lain yang cukup menarik dan berpotensi untuk dijadikan objek wisata hutan karena kelengkapannya yaitu : bunga Anggrek Vanda, bunga Bangkai, dan kayu Mermabu. Sementara itu kekayaan fauna yang berpotensi untuk dikembangkan

menjadi objek wisata adalah Harimau Sumatera, Siamang, Tapir, Kerbau Liar, Rusa, serta penangkaran Gajah Sumatera

c. Informasi Umum Data Penduduk

Berdasarkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bengkulu, jumlah penduduk Provinsi Bengkulu pada akhir tahun 2024 sebanyak **2.127.957** jiwa.

- **Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki sebanyak **1.086.715** jiwa dan **1.041.242** jiwa penduduk perempuan. Sebaran jumlah penduduk Provinsi Bengkulu menurut Kabupaten/Kota dan jenis kelamin pada tahun 2023 dapat dijelaskan dalam tabel ini :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Provinsi Bengkulu menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Laki – laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Keterangan
1.	BENGKULU SELATAN	90.004	87.133	177.137	Data Kependudukan Semester II Tahun 2024
2.	REJANG LEBONG	147.374	141.208	288.582	
3.	BENGKULU UTARA	158.297	151.476	309.773	
4.	KAUR	70.220	66.313	136.533	
5.	SELUMA	111.327	104.701	216.028	
6.	MUKOMUKO	105.858	99.744	205.602	
7.	LEBONG	59.153	56.367	115.520	
8.	KEPAHIANG	78.369	73.541	151.910	
9.	BENGKULU TENGAH	64.656	61.683	126.339	
10.	KOTA BENGKULU	201.457	199.076	400.533	
Jumlah		**1.086.715**	**1.041.242**	**2.127.957**	

Sumber : Data Kependudukan Semester II Tahun 2024, Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu, 2025.

d. Jumlah Kabupaten/Kota

Jumlah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan per-Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

No.	Kabupaten/Kota	Nama Ibu Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Bengkulu Selatan	Manna	11	158
2.	Rejang Lebong	Curup	15	156
3.	Bengkulu Utara	Arga Makmur	19	220
4.	Kaur	Bintuhan	15	195
5.	Seluma	Tais	14	202
6.	Mukomuko	Mukomuko	15	152
7.	Lebong	Tubei	12	104
8.	Kepahiang	Kepahiang	8	117
9.	Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	11	143
10	Kota Bengkulu	Bengkulu	9	67
Provinsi Bengkulu			**129**	**1.514**

Sumber : Kepmendagri Nomor 050.145 Tahun 2022.

e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dsar Hukum Pembentukan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didukung oleh 35 perangkat daerah (PD), yang terdiri dari 24 PD berbentuk Dinas, 7 PD berbentuk Badan, 2 PD berbentuk Sekretariat, 1 PD berbentuk Inspektorat.

No	Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1.	Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2.	Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

3.	Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5.	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7.	Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas

	Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
10.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
11.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
12.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
13.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
14.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
15.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8

		Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
16.	Dinas Sosial Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
17.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
18.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
19.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
20.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
21.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

22.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
23.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
24.	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
25.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
26.	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
27.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
28.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas

		Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
29.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
30.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
31.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
32.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
33.	Badan Penghubung Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
34.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

		Perangkat Daerah
35.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk dapat mewujudkan visi dan misi suatu organisasi tidak terlepas dari peran serta aktif dari Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi tersebut, demikian pula halnya dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang merupakan satu kesatuan individu yang melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan untuk secara bersama-sama mencapai tujuan yang ditetapkan.

Salah satu prasyarat utama untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan tersedianya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dariu PNS dan PPPK yang terampil, mampu, kompeten dan berdayaguna. Berikut disajikan keadaan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu menurut tingkat pendidikan, umur dan jenis kelamin.

1) Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 1.4
Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Bengkulu Menurut Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	TOTAL (orang)
1.	Sekolah Dasar	14
2.	SLTP	13
3.	SLTA	522
4.	Diploma I	6
5.	Diploma II	14
6.	Diploma III/Sarjana Muda	533
7.	Diploma IV/S-1	7.589
8.	S-2	1.885
9.	S-3/Doktor	20

TOTAL	10.596

Sumber : BKD Provinsi Bengkulu, 2025.

Dari tabel 1.4 tersebut diketahui bahwa secara umum kondisi ASN Pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan yaitu sebanyak 7.589 orang adalah berpendidikan Sarjana (S1) dan 1.885 orang adalah berpendidikan Magister/Pasca Sarjana (S2) serta 20 orang berpendidikan S-3/Doktor.

Dengan kata lain bahwa pengetahuan, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah cukup baik dan potensial.

2) Jumlah ASN Menurut Tingkat Usia

ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang berusia diantara 41 s/d 45 tahun masih merupakan kelompok terbesar atau mayoritas yakni sebanyak 2.775 orang atau 26,18 % dari seluruh jumlah ASN yang ada, artinya pelaksanaan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sangat ditunjang oleh SDM aparatur yang relatif masih produktif serta etos kerja tinggi yang umumnya ada pada rentang usia tersebut. Jumlah ASN Pemerintrah Provinsi Bengkulu menurut tingkat usia dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5
Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Bengkulu Menurut Tingkat Usia

NO.	KELOMPOK UMUR	TOTAL (orang)
1.	18-20	0
2.	21-25	46
3.	26-30	391
4.	31-35	776
5.	36-40	2.136
6.	41-45	2.775
7.	46-50	2.092
8.	51-55	1.368
9.	56-60	1.002
10.	>60	10
TOTAL		10.596

Sumber : BKD Provinsi Bengkulu, 2025.

3) Jumlah ASN Menurut Jenis Kelamin

Keberadaan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu bila dikaitkan dengan isu pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*), maka perbandingan jumlah pegawai laki-laki dengan perempuan menunjukkan angka yang cukup proporsional dan berimbang, yakni : 4.402 orang pegawai laki-laki atau 41,54 % dan 6.194 orang pegawai perempuan atau 58,46 % dari 10.596 jumlah seluruh ASN. Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Bengkulu menurut jenis kelamin tersaji pada tabel berikut :

Tabel 1.6
Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Bengkulu
Menurut Jenis Kelamin

PRIA (orang)	WANITA (orang)	TOTAL (orang)
4.402	**6.194**	**10.596**

Sumber : BKD Provinsi Bengkulu, 2025.

g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (T.A) 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu T.A 2024. Realisasi pencapaian target kinerja APBD T.A 2024 dan 2023, diikhtisarkan sebagai berikut :

Tabel 1.7
Laporan Realisasi Anggaran T.A 2024 dan 2023 *(dalam Rupiah)*

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran				% Naik/ (tu-run) 2024 dan 2023
	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	
1	2	3	4	5	6
Pendapatan	3.183.123.966.400,-	3.120.215.806.815,45	98,2	2.991.013.990.544,34	4,32
Belanja Daerah	3.252.071.723.464,-	3.073.443.325.390,41	94,51	3.123.418.880.970,81	-1,60
Surplus/ (Defisit)	-68.947.757.064,-	46.772.481.425,04	(-67,84)	-132.404.890.426,47	64,67

Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	68.947.757.064,-	68.947.757.064,21	100	201.348.447.490,58
Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0
Pembiayaan Neto	68.947.757.064,-	68.947.757.064,21	100	201.348.447.490,58
SiLPA	0	115.720.238.489,25		68.947.757.064,21

Sumber : LKPD Provinsi Bengkulu TA 2024, 2005.

Tabel di atas menunjukkan pencapaian target APBD T.A 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan T.A 2024 terealisasi belum mecapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp 3.183.123.966.400,- dengan realisasi sebesar Rp 3.120.215.806.815,45,- atau 98,2 % dari anggaran.
2. Realisasi belanja T.A 2024 dibawah pagu anggaran belanja. Pagu belanja T.A 2024 sebesar Rp 3.252.071.723.464,- dengan realisasi belanja sebesar Rp 3.073.443.325.390,41 atau 94,51 % dari anggaran. Realisasi belanja T.A 2024 turun sebesar 1,60 % dibandingkan dengan T.A 2023.
3. Penerimaan Pembiayaan T.A 2024 dianggarkan sebesar Rp 68.947.757.064,- sedangkan realisasinya sebesar Rp 68.947.757.064,21,- atau 100 % dari anggaran.
4. SiLPA T.A 2024 sebesar Rp 115.720.238.489,25,-

Tabel 1.8
Realisasi Pendapatan dan Belanja T.A 2024, 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Pendapatan	3.120.215.806.815,45	2.991.013.990.544,34	2.953.744.560.516,20
Belanja Daerah	3.073.443.325.390,41	3.123.418.880.970,81	3.026.385.524.150,94

Sumber : LKPD Provinsi Bengkulu TA 2024, 2025.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terjadi fluktuasi pendapatan dan belanja pada APBD Pemerintah Provinsi Bengkulu.

- Ikhtisar Perkembangan Realisasi dan Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024

Perkembangan realisasi dan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.9

Rincian Laporan Realisasi Anggaran TA 2024 dan 2023 (dalam Rupiah)

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran		Kenaikan/Penurunan antara Realisasi 2024 dan 2023	% Naik/ (Turun)
	Realisasi 2024	Realisasi 2023		
Pendapatan Asli Daerah	1.064.700.837.650,45	1.033.849.518.692,34	30.851.318.958,11	2,98
Pendapatan Transfer	2.019.290.812.165,00	1.955.995.641.852,-	63.295.170.313,00	3,24
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	36.224.157.000,-	1.168.830.000,-	35.055.327.000,00	-
Jumlah	**3.120.215.806.815,45**	**2.991.013.990.544,34**	**129.201.816.271,11**	**4,32**
Belanja Operasi	2.348.319.941.251,41	2.124.124.055.499,56	224.195.885.751,85	10.55
Belanja Modal	413.712.288.429,-	586.890.214.822,25	-173.177.926.393,25	-
Belanja Tak Terduga	0	26.609.031,00	-26.609.031,00	-
Transfer	311.411.095.710,-	412.378.001.618,00	-100.966.905.908,00	-
Jumlah	**3.073.443.325.390,41**	**3.123.418.880.970,81**	**-49.975.555.580,40**	**-**
Surplus / (Defisit)	**46.772.481.425,04**	**(132.404.890.426,47)**	**-85.632.409.001,43**	**-**

Sumber : LKPD Provinsi Bengkulu TA 2024, 2025.

h. Pelaksanan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Hubungan antara Prioritas Nasional, Program Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Pembangunan Daerah dalam RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2022 dapat di gambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.11
Kegiatan Prioritas Pembangunan pada RKPD Tahun 2022

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan	Peningkatan Pemenuhan Energi Domestik	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Dinas ESDM

Berkualrtas dan Berkeadrlan	Energi Baru Terbarukan (EBT)			
		Peningkatan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Dinas ESDM
	Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	Program Pengelolaan Hutan	Dinas LHK
		Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Program Pengelolaan Hutan	Dinas LHK
		Penyediam Air untuk Pertanian	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas PUPR
		Penyediaan Air Baku untuk Kawasan Prioritas	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
		Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastrukrur Hijau	Program Pengelolaan Hutan	Dinas LHK
			Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Dinas LHK
	Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan

			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedalulatan dan kemandirian pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Peningkatan ketersedian pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas TPHP, Dinas Peternakan dan Keswan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas TPHP
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas KP
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas KP
		Peningkatan Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Perikanan dan Kepastran Pasar	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas TPHP
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas TPHP
		Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Peningkatan	Program	Dinas KP

		Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Perikanan Tangkap	
			Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Dinas KP
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas KP
		Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir serta Pengelolaan Ruang Laut	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Dinas KP
		Peningkatan Ekosistem Kelautan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Dinas KP
		Penlngkatan Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas KP
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas KP
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas KP
		Peningkatan Fasrlitasi	Program Pengolahan dan	Dinas KP

		Usaha, Pembiayaan, dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan dan Perikanan Skala Kecil serta Akses terhadap Pengelolaan Sumber Daya	Pemasaran Hasil Perikanan	
	Penguatan Keurausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan UMKM
			Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
		Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi dan UMKM
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi dan UMKM
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM
		Peningkatan Penciptaan Start- Up dan Peluang Usaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan UMKM
	Peningkatan Nilar Tambah, Lapangan Ker1a, dan Investasi di Sektor Riil, dan	Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemilitrman, dan Non Agro	Program Perencanaan dan Pembanguanan Industri	Dinas Perindag

	Industrialisasi	yang Terintegrasr Hulu-Hilir		
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Perindag
		Penrngkatan Industrialisasi Berbasrs Hilirisasi Sumber Daya Alam, Temasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa	Program Perencanaan dan Pembanguanan Industri	Dinas Perindag
		Peningkatan Daya Salng Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwsata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi	Dinas Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI	Dinas Pariwisata

			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
		Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasl, termasuk Reformasr Ketenaga-Kerjaan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindag
		Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspo	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindag
	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digltal dan Industri 4.O	Program Pengelolaan Sistim Informasi Industri Nasional	Dinas Perindag
		Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perindag
			Program	Dinas

			Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perindag
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
Mengembang-kan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Wilayah Sumatera	Pengembmgan Kawasan Strategis	Pengembangan Kawasan Industri Pulau Baai	PT. Pelindo II
			Penataan Kawasan Pariwisata Unggulan Pantai Panjang dan Danau Dendam Tak Sudah	BPPW dan Dinas PUPR
		Pengembangan Sektor Unggulan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas TPHP
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas TPHP
		Pengembangan Kawasan Perkotaan	Program Penataan Bagunan Gedung	Dinas PUPR
			Program Penataan Bagunan dan Lingkungannya	Dinas PUPR
		Pengembangm Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmrgrasi	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas PMD
			Program Penataan Desa	Dinas PMD
			Program Pengembangan	Disnaker-trans

			Kawasan Transmigrasi	
		Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah
			Program Penataan Organisasi	Sekretariat Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKD
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKD
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	Dukcapil
			Program Pencatatan Sipil	Dukcapil
		Integrasi Sistem Administrasr Kependudukm	Program Pengelolaan Informasi Admistrasi Kependudukan	Dukcapil
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dukcapil
		Pendampingan dan Layanan Terpadu	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD
	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan	Sistem Jaminan Sosial Nasional	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial

	Sosial			
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Perlindungan Sosial Adaptif	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		Kesejahteraan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Pengendalian Penduduk	DP3PPKB
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	DP3PPKB
		Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Pengendalian Penyakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan

		Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Pemerataan tayanan Pendidikan Berkualitas	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Program pengelolaan Pendidikan	Dinas DIKBUD
		Afimasi Akses dan Percepatan Wajib Belalar 12 Tahun	Program pengelolaan Pendidikan	Dinas DIKBUD
		Peningkatan Pengelolaan dm Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program pengelolaan Pendidikan	Dinas DIKBUD
		Penjaminan Mutu Pendidikan	Program pengelolaan Pendidikan	Dinas DIKBUD
		Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	Program pengelolaan Pendidikan	Dinas DIKBUD
	Perungkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak	DP3APPKB
			Program Perlindungan Khusus Anak	DP3APPKB
		Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DP3APPKB
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DP3APPKB

		Kualitas Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	DISPORA
	Pengentasan Kemiskinan	Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD
			Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat di bidang kehutanan	DLHK
		Reforma Agraria	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD
			Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dinas Perkim
		Perhutanan Sosial	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat di bidang kehutanan	DLHK
	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	Pendidikan dan Pelatlhan Vokasi Berbasis Kerja	Program pengelolaan Pendidikan	Dinas DIKBUD

		sama Industn		
		Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi	Program Pengembangan dan Penelitian Daerah	Bappeda
		Prestasi Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	DISPORA
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusr Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila	Program Pemberdayaan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi UKM
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kesbangpol
		Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegara an, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionahsme dan Patriotisme	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol
	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestrian Kebudayaan untuk Memperkuat	Revitahsasi dan Aktualisasl Nilai Budaya dan Kearifan Lokal	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas DIKBUD

	Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkm Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia			
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas DIKBUD
			Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas DIKBUD
		Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan KeseJahteraan Rakyat	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas DIKBUD
			Program Pembinaan Sejarah	Dinas DIKBUD
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas DIKBUD
		Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas DIKBUD

		Inklusif		
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD
		Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas DIKBUD
	Memperkuat Moderasi Beragma untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial	Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktrk Beragama Dalam Perspektif Jalan Tengah Untuk Memantapkan Persaudaraan Dan Kebersamaan dari Kalangan Umat Beragama	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas serta fasilitasi penanganan konflik sosial	Kesbangpol
		Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas serta fasilitasi penanganan konflik sosial	Kesbangpol
		Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas serta fasilitasi penanganan konflik sosial	Kesbangpol
		Peningkatan Kualitas Pelaynan Kehidupan Beragama	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas serta fasilitasi penanganan konflik	Kesbangpol

			sosial	
		Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kesbangpol
	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagl Terwujudnya Masyarakat Berpengeta-huan, dan Berkarakter	Peningkatan Budaya Literasi	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpus dan Arsip
		Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Aksara Daerah, serta Sastra	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah kuno	Dinas Perpus dan Arsip
		Pengembangan Budaya Iptek, Inovasi, Kreativitas, dan Daya Cipta	Program Pengembangan dan Penelitian Daerah	Bappeda
		Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustaka-an dan Arsip
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengemba-ngan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perkim
			Program Kawasan Permukiman	Dinas Perkim
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perkim

		Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Permukiman	Dinas PUPR
		Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan	Dishub
			Program Pengelolaan Pelayaran	Dishub
		Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Infrastruktur Ekonomi	Konektivitas Jalan	Program Penyelenggaran Jalan	Dinas PUPR
		Konektivrtas Laut	Program Pengelolaan Pelayaran	Dishub
		Konektivitas Darat	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dishub
	Infrastruktur Perkotaan	Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfotik
		Penyediaan Akses Air Minum dan Sanrtasi Layak dan Aman dan Perkotaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Permukiman	Dinas PUPR
		Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau dari Perkotaan	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perkim
			Program Kawasan	Dinas Perkim

			Permukiman	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perkim
	Energi dan Ketenaga listrikan	Keberlanlutan Penyediaan Energi dan Ketenaga Listrikan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Dinas ESDM
		Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenaga listrikan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Dinas ESDM
		Kecukupan Penyediam Energi dan Tenaga Listrik	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Dinas ESDM
	Transformasi Digital	Penuntasan Infrastruktur TIK	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfotik
		Pemanfaatan Infrastruktur TIK	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfotik
		Fasilitas Pendukung Transformasi Digtal	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfotik
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hrdup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hrdup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Lingkungan Hidup	DLHK
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya B3 dan Limbah Bahan berbahaya dan racun (Limbah B3)	DLHK
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
		Penanggu-	Program	DLHK

		langan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hrdup	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
			Program Pengelolaan Persampahan	DLHK
		Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lrngkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Lingkungan Hidup	DLHK
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya B3 dan Limbah Bahan berbahaya dan racun (Limbah B3)	DLHK
			Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	
		Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hrdup	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) ,Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	DLHK
	Penrngkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Penanggu-langan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Peningkatan Ketahanan Iklim	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Lingkungan Hidup	DLHK
		Pembangunan Rendah Karbon	Program Pengendalian	DLHK

			Pencemaran dan/atau Lingkungan Hidup	
		Pembangunan Energi BerkelanJutan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Dinas ESDM
		Pengelolaan Limbah	Program Pengendalian Bahan Berbahaya B3 dan Limbah Bahan berbahaya dan racun (Limbah B3)	DLHK
Memperkuat Stabilttas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Kesbangpol
		Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Kesbangpol
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	Kesbangpol
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DP3APPKB
		Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komuniskasi Publik	Diskominfotik
		Penguatan Integritas NKRI dan	Program Hubungan Industrial	Dinakertrans

		Perlindungan WNI di Luar Negeri		
	Penegakan Hukum Nasional	Penataan Regulasi	Program fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Sekretariat Daerah
		Penguatan Sistem Anti Korupsi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
		Peningkatan Akses terhadap Keadilan	Program fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Sekretariat Daerah
	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Program Kepegawaian Daerah	BKD
		Transformasi Pelayanan Publik	Program Penataan Organisasi	Sekretariat Daerah
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
		Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis	Program Penataan Organisasi	Sekretariat Daerah
		Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Program Penataan Organisasi	Sekretariat Daerah
			Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat
		Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Satpol PP
			Program peningkatan	Kesbangpol

			kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
		Penguatan Keamanan laut	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyaakat	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Satpol PP
			Program peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol
		Penguatan Keamanan dan Ketahanan Syber	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan,dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Penyelenggaraan pembangunan Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi untuk pembangunan ke depan masih terdapat permasalahan dan tantangan dari berbagai dimensi pembangunan. Berbagai permasalahan

yang dihadapi Provinsi Bengkulu dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor baik pada skala lokal kabupaten/kota, provinsi maupun nasional. Permasalahan–permasalahan tersebut timbul karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, adanya kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil evaluasi umum kondisi di Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

1) Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Pertumbuhan Ekonomi Cenderung Stagnan

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tumbuh fluktuaktif selama kurun waktu tahun 2017-2020. Pada tahun 2017, ekonomi Bengkulu tumbuh sebesar 4,99 persen dan relatif stagnan sebesar 4,96 persen pada tahun 2019. Dalam kurun waktu tersebut, ekonomi Bengkulu masih berada dibawah capaian nasional. Hal ini menggambarkan bahwa kontribusi Bengkulu masih cukup kecil dalam pertumbuhan ekonomi Nasional.

Pada tahun 2019 perekonomian Provinsi Bengkulu tumbuh sebesar 4,96 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, angka ini masih lebih rendah karena pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,02 persen. Pada kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 dan 2018 pertumbuhan ekonomi mengalami percepatan, sedangkan pada 2017 dan 2019 mengalami perlambatan. Kondisi eksternal seperti krisis dan ketidakpastian ekonomi global dimana salah satu

indikatornya adalah melemahnya harga komoditas utama global seperti batubara juga turut mempengaruhi perekonomian daerah.Faktor cuaca juga mempengaruhi kategori pertanian, padahal kategori tersebut merupakan kategori dengan kontribusi terbesar. Pengaruh masyarakat dalam perekonomian juga mempengaruhi perekonomian daerah, langsung maupun tidak langsung.

Sejak tahun 2017, perekonomian Provinsi Bengkulu selalu berada dibawah rata-rata nasional. Terlebih, pada tahun 2020-2021, akibat pandemi Covid-19 dan dampaknya, ekonomi Bengkulu tertekan sangat dalam hingga mencapai minus 0,02% pada tahun 2020. Dampak pandemi Covid-19 mungkin akan terus berlanjut selama beberapa tahun mendatang. *Baseline* capaian pembangunan Bengkulu dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dimulai pada titik yang sangat rendah. Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu dalam FGD RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 menyampaikan bahwa data *Economic Recovery Index* Provinsi Bengkulu masih cukup rendah yaitu sebesar 49, masih berada dibawah rata-rata nasional yang sebesar 56. Bahkan ERI Bengkulu tersebut berada pada posisi terendah di Sumatera. Aspek yang masih berkontribusi terhadap rendahnya ERI Bengkulu adalah *Economic Resilience* yang sebesar 41,55 dan *Absortive Capacity* yang sebesar 40,11.

b. Pembangunan Manusia yang Belum Optimal

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu selama kurun waktu 2016-2020 terus tumbuh, namun melambat. IPM Provinsi Bengkulu selama kurun waktu tersebut selalu di bawah capaian rata-rata IPM nasional. Pada tahun 2018, IPM Provinsi Bengkulu baru berhasil masuk dalam kategori IPM TINGGI yang sebesar 70,64. Mengingat SDM merupakan salah satu modal pembangunan, maka kebijakan yang tepat untuk peningkatan kualitasnya pun sangat dibutuhkan. Dengan jumlah penduduk yang relatif lebih sedikit, perlu mendorong Provinsi Bengkulu untuk dapat memanfaatkan kondisi ini menjadi potensi dan bukan menjadi hanya masalah. Bila ditelaah sampai ke kabupaten/kota, sebaran IPM pada

tahun 2020 menunjukkan terdapat 7 (tujuh) kabupaten yang IPM-nya masuk dalam KATEGORI SEDANG dan hanya 1 kota yang IPM-nya berada di atas capaian provinsi.

Gambar 1.2
IPM Kabupaten Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020

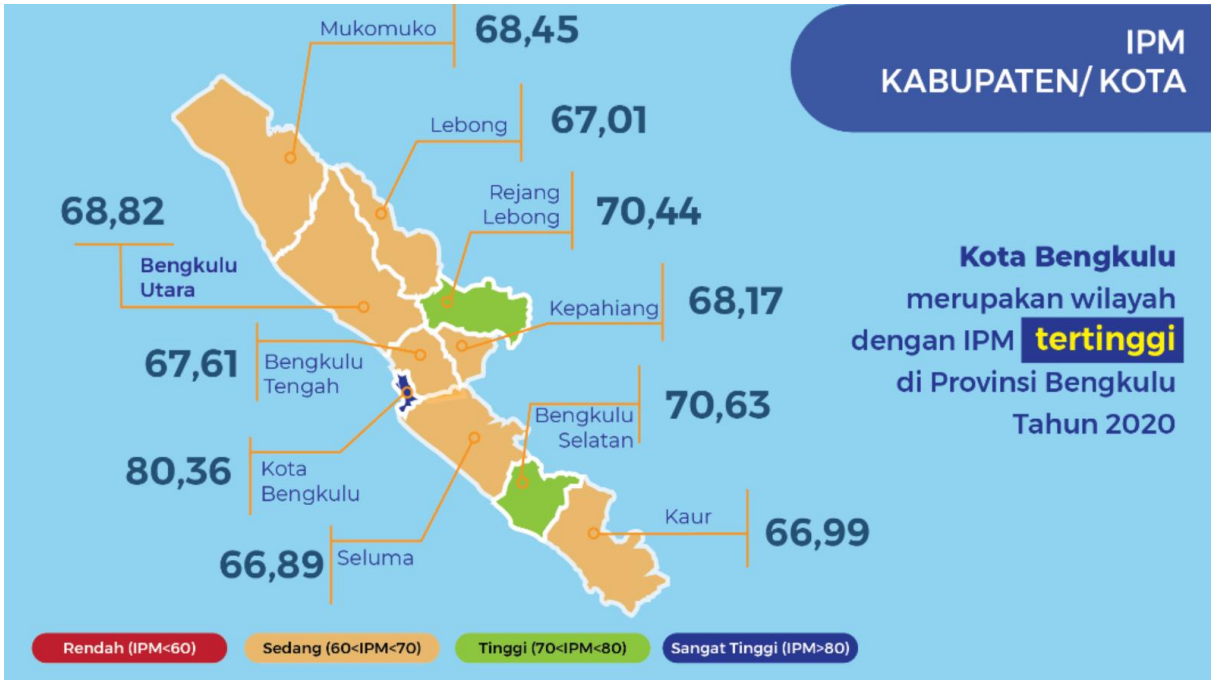

Sumber : Bappeda Provinsi Bengkulu, 2022.

c. Pemenuhan Infrastruktur Dasar Belum Optimal

Pemenuhan infrastruktur dasar di Provinsi Bengkulu masih belum memenuhi kebutuhan dan akses masyarakat. Infrastruktur dasar tersebut adalah air minum layak, sanitasi layak dan perumahan layak. Akses masyarakat terhadap rumah layak huni, sanitasi layak dan air minum layak masih di bawah nasional. Persentase rumah layak huni, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan persentase rumah tangga dengan air minum layak tahun 2020 berturut-turut sebesar 53,3%, 78,1% dan 62,47% dan masih berada dibawah rata-rata nasional.

d. Kemiskinan yang Masih Cukup Tinggi

Pada bulan Maret 2021, persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu mencapai 15,22 persen, turun 0,19 persen poin dari Maret 2020. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu pada Maret 2021 mencapai 306.000 orang. Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 3.420 orang dibandingkan Maret 2020. Sementara dengan September 2020 jumlah penduduk miskin relatif tetap. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2020-Maret 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 1.913 orang, begitu juga di daerah perdesaan naik sebesar 1.507 orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 14,77 persen menjadi 15,10 persen. Begitu juga dengan perdesaan mengalami peningkatan dari 15,16 persen menjadi 15,28 persen.

Kemiskinan di Provinsi Bengkulu terus menunjukan tren penurunan jika dilihat dari tahun 2014-2021. Namun, kontribusi kemiskinan Bengkulu terhadap kemiskinan nasional masih cukup tinggi. Selama periode tersebut, kemiskinan di Provinsi Bengkulu terus berada di atas capaian kemiskinan nasional.

Tabel 1.10
Angka Kemiskinan Provinsi Bengkulu Tahun 2014 – 2020

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Provinsi Bengkulu	17,48	17,88	17,32	16,45	15,43	15,23	15,03	15,22
Nasional	10,96	11,13	10,70	10,04	9,82	9,22	9,78	10,14

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2020.

Kinerja penurunan kemiskinan di Provinsi Bengkulu sudah mengarah ke perbaikan tingkat kesejahteraan. Namun, penurunan kemiskinan di Provinsi Bengkulu, masih menempatkan Provinsi Bengkulu sebaga provinsi termiskin kedua di Sumatera pada tahun 2021. Lebih lanjut, data Tahun 2020 menunjukkan ada 4 kabupaten/kota di Bengkulu memiliki persentase penduduk miskin lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Provinsi Bengkulu dan nasional yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma

dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Hanya ada 1 kabupaten yang tingkat kemiskinannya berada di bawah provinsi dan nasional, yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu berfokus kepada program-program yang langsung dapat mengintervensi indikator kemiskinan untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Berdasarkan data tersebut, tergambar bahwa program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bengkulu masih belum optimal dan belum terintegrasi.

e. **Konektivitas dan Pengembangan Infrastruktur Strategis Masih Terbatas**

Konektivitas masih menjadi tantangan bagi Provinsi Bengkulu. Belum optimalnya integrasi konektivitas intrawilayah dan antar-wilayah baik darat, laut dan udara dan belum optimalnya hubungan internasional sebagai pintu gerbang perdagangan barang dan jasa. Secara geografis, Bengkulu terletak di sisi barat Pulau Sumatera, yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sisi barat, dan dipagari oleh jajaran Bukit Barisan di sebelah timur. Bengkulu juga dikelilingi oleh kawasan-kawasan hutan baik itu Hutan Lindung maupun Taman Nasional, seperti Taman Nasional Kerinci Sebelat dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Aksesibilitas dari dan menuju Bengkulu melalui darat hanya dilalui melalui 5 (titik) pintu keluar yaitu Kabupaten Mukomuko-Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Rejang Lebong-Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Kepahiang-Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan-Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kaur-Provinsi Lampung. Posisi Provinsi Bengkulu yang terisolir memerlukan upaya ekstra untuk membuka konektivitas baik dari sisi darat, laut maupun udara. Pembukaan ruas jalan baru, keterhubungan dengan jaringan tol dan jalur kereta api Trans Sumatera, pengembangan pelabuhan laut dan Bandara merupakan prioritas untuk pengembangan ekonomi Provinsi Bengkulu.

f. **Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Pengembangan Pariwisata Masih Belum Optimal**

Bengkulu memiliki banyak sumber daya alam yang menjadi komoditas unggulan daerah. Sawit, karet, kopi, perikanan merupakan komoditas unggulan yang berpengaruh cukup besar dalam perekonomian Bengkulu. Namun kontribusi komoditas tersebut masih minim dan belum optimal. Hal ini dikarenakan komoditas unggulan daerah belum memiliki nilai tambah yang baik, sehingga belum memberikan kontribusi yang optimal dalam pertumbuhan ekonomi Bengkulu.

Selain itu, sektor pariwisata juga potensial untuk dikembangkan namun belum dapat dikelola dengan baik. Bengkulu memiliki potensi dan sumberdaya wisata yang belum memberikan manfaat yang optimal. Kontribusi sektor pariwisata terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto relatif kecil. Permasalahan utama yang dihadapi adalah terkait dengan belum tersedianya konsep dan arahan implementatif pembangunan pariwisata Provinsi Bengkulu, sehingga upaya-upaya pembangunan cenderung tidak terintegrasi, diperlukan satu rencana yang komprehensif dan implementatif untuk setiap aksi pembangunan pariwisata dalam jangka waktu tertentu. Disamping itu, permasalahan lain di sektor wisata adalah terkait dengan aksesibilitas yang terbatas, terbatasnya pengelolaan dan manajemen atraksi, terbatasnya kualitas SDM pariwisata serta promosi dan pemasaran objek wisata potensial yang belum optimal.

2) Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

a. Pelayanan Umum Urusan Wajib Pelayanan Dasar

(1) Pendidikan

Permasalahan pendidikan di Provinsi Bengkulu antara lain :

1. Tingkat Pendidikan yang masih rendah, pada tahun 2020 baru mencapai 8,94 tahun;
2. Masih banyak penduduk usia sekolah yang belum dapat mengakses pendidikan. Pada tahun 2019 masih terdapat sebanyak 0,17% penduduk usia 7-24 yang sama sekali belum

sekolah, dan 24,61% penduduk pada usia tersebut yang tidak lagi bersekolah;

3. Masih banyak ruang kelas dalam kondisi yang tidak baik;
4. Masih banyak sekolah yang akreditasinya masih rendah dan belum terakreditasi. Pada tahun 2020, untuk jenjang SMA masih terdapat 5% sekolah yang belum terakreditasi dan jenjang SMK sebanyak 9%;
5. Masih banyak guru yang belum sertifikasi. Pada tahun 2020 sebanyak 50,5% guru SMA belum sertifikasi dan 58,79% guru SMK belum sertifikasi;
6. Belum *link and match* lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha.

(2) Kesehatan

Sektor kesehatan berkontribusi penuh dalam penyiapan sumber daya manusia yang sehat, produktif dan mampu berkontribusi dalam pembangunan. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah berusaha optimal. Namun, pembangunan kesehatan masih menyisakan permasalahan pokok, yaitu :

1. Angka kesakitan yang masih tinggi mencapai 29,77% pada tahun 2019;
2. Masih banyak balita yang mengalami stunting yaitu sebesar 8,13% pada tahun 2020;
3. Masih banyak balita yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Pada tahun 2019, baru sebesar 48,22% balita yang mendapat imunisasi lengkap;
4. Masih banyak Puskesmas dengan status Akreditasi Dasar yaitu sebanyak 70 puskesmas dari 179 puskesmas pada tahun 2019.

(3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang masih dihadapkan pada beberapa permasalahan mendasar. Hal tersebut mengacu pada persoalan perlu ditingkatkannya akses

dan kualitas jaringan jalan, rendahnya kualitas bangunan, belum optimalnya pemanfaatan ruang dengan aturan tata ruang, serta belum optimalnya kelayakan hunian. Permasalahan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

1. Konektivitas daerah yang masih rendah;
2. Masih banyak jalan provinsi dalam kondisi kurang baik yaitu sebesar 31,86% pada tahun 2020;
3. Masih banyak jaringan irigasi dalam kondisi kurang baik, yaitu sebesar 33% pada tahun 2020;
4. Masih banyak rumah tangga yang tidak terlayani pengolahan persampahan yaitu sebesar 51,51% pada tahun 2020;
5. RTRW belum menjadi acuan/pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan atau pelaksanaan pembangunan oleh seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan peninjauan kembali RTRW Provinsi Bengkulu sebagian besar indikasi program belum dilaksanakan, dan disamping itu terdapat pelaksanaan pemanfaatan ruang(pembangunan) yang tidak tercantum dalam RTRW Provinsi Bengkulu.

(4) Permukiman dan Perumahan Rakyat

Belum optimalnya akses pemukiman layak huni menjadi masalah pokok yang dihadapi oleh urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni baru mencapai 53,33% tahun 2020;
2. Persentase rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi layak baru mencakup 78,10% tahun 2020;
3. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak baru mencapai 62,47% tahun 2020.

(5) Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Keamanan dan ketertiban masih menjadi salah satu kendala utama Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan

pembangunan dan pelayanan publik. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kerawanan gangguan keamanan yang masih relatif tinggi dan masih tingginya tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah. Menjaga keamanan dan ketertiban umum merupakan pra-syarat bagi terlaksananya kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Permasalahan pembangunan daerah dalam bidang ini adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya pelanggaran terhadap Perda
2. Lemahnya pencegahan terhadap gangguan keamanan.

(6) Sosial

Urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembangunan sosial dijalankan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak individu warga negara, dan menjamin akses masyarakat untuk mendapat pelayanan sosial. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah berusaha maksimal dalam memberikan layanan sosial. Namun, pembangunan sosial di Provinsi Bengkulu masih memiliki beberapa permasalahan pokok, yaitu tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Masalah pokok tersebut dapat disebabkan oleh beberapa masalah berikut :

1. Belum optimalnya ketersediaan pelayanan sosial dalam menjangkau penerima layanan;
2. Rendahnya pendapatan PMKS;
3. Belum optimalnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;
4. Masih tingginya Indeks Resiko Bencana yang sebesar 153,42 pada tahun 2019.

b. Pelayanan Umum Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

(1) Ketenagakerjaan

Masalah pokok yang dihadapi urusan wajib non-pelayanan dasar tenaga kerja adalah masih rendahnya kualitas tenaga kerja. Pada Februari 2021, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Atas

(SMA) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 7,04 persen. Sedangkan TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 1,62 persen.

Dibandingkan Februari 2020, TPT hampir semua kategori pendidikan mengalami peningkatan kecuali untuk tamatan Diploma I/II/III dan tamatan SMK yaitu turun sebesar 6,04 persen poin dan 1,54 persen poin. Namun jika dibandingkan Agustus 2020 masing-masing kategori pendidikan mengalami penurunan, diantaranya SD ke bawah, tamatan SMK, dan tamatan DiplomaI/II/III masing-masing sebesar 0,62 persen poin, 3,09 persen poin dan 1,20 persen poin. Selain mengalami penurunan, juga ada beberapa jenjang pendidikan yang mengalami peningkatan. Peningkatan paling besar adalah pada tamatan Universitas yaitu sebesar 0,98 persen poin.

(2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan peran perempuan pada sektor formal di Provinsi Bengkulu masih relatif rendah. Selain itu, perempuan juga relatif tidak mempunyai akses yang setara dalam pendidikan dan mengakses pekerjaan-pekerjaan di sektor formal. Oleh karena itu, kesetaraan dan kesejahteraan perempuan merupakan isu krusial di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan analisis singkat tersebut, permasalahan pembangunan perempuan adalah pada sektor pemberdayaan perempuan yang masih cukup moderat yaitu diukur dari IDG Tahun 2020 yang mencapai 70,48, disebabkan oleh :

1. Rendahnya kapasitas SDM perempuan
2. Belum optimalnya kecakapan hidup perempuan
3. Belum optimalnya kapasitas SDM lembaga yang bergerak di perlindungan perempuan dan anak

4. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media.

(3) Ketahanan Pangan

Masalah pokok yang dihadapi urusan wajib non-pelayanan dasar ketahanan pangan adalah perlu ditingkatkannya ketahanan pangan yang di ukur dari Skor PPH pada tahun 2020 adalah sebesar 82 untuk PPH Ketersediaan Pangan dan 82,6 untuk PPH Konsumsi Pangan. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut :

1. Terbatasnya stok cadangan pangan daerah
2. Panjangnya rantai distribusi pangan
3. Belum optimalnya diversifikasi pangan lokal non-beras

(4) Lingkungan Hidup

Masalah pokok yang dihadapi urusan wajib non-pelayanan dasar lingkungan hidup adalah semakin menurunnya tingginya pencemaran air dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Pada tahun 2020, Indeks Kualitas Air mencapai sebesar 50,83%, sedangkan lahan kritis masih sebesar 363 ribu hektar. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan;
2. Menurunnya kualitas udara ambien akibat emisi kendaraan bermotor dan cerobong industri, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaanlimbah domestik;
3. Menurunnya fungsi layanan jasa ekosistem DAS Bengkulu yang ditandai dengan menurunnya kuantitas air akibat berkurangnya daerah resapan air, berkurangnya tutupan vegetasi, dan meningkatnya alih fungsi lahan produktif;
4. Meningkatnya kerusakan sumber daya alam, ekosistem, dan keanekaragaman hayati akibat kerusakan lahan;

5. Meningkatnya risiko bencana akibat belum optimalnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana.

(5) Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan dan catatan sipil merupakan urusan wajib pemerintahan yang penting dalam pembangunan daerah. Salah satu kebutuhan mendasar yang dibutuhkan dalam pembangunan adalah akurasi data kependudukan. Pelaksanaan urusan ini masih terdapat permasalahan, yaitu masih rendahnya tingkat kepemilikan dokumen kependudukan. Pada tahun 2020, penduduk yang memiliki Akta Kelahiran baru mencapai 97,83% dan penduduk usia anak yang memiliki KIA baru mencapai 49,5%. Permasalahan pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM jemput bola di kabupaten/kota, menyebabkan proses pelayanan dokumen administrasi kependudukan terhambat, dalam menjangkau daerah terpencil/pelosok;
2. Keterbatasan SDM ASN yang berkompeten menjadi administrator data base;
3. Kompetensi SDM dalam hal memberikan pelayanan masih belum merata. Sehingga perlu dilakukan pembinaan yang lebih intensif, untuk meminimalkan terjadinya kasus pungli di area pelayanan;
4. Aksesibilitas jaringan komunikasi data dari kabupaten/kota yang akan melakukan perekaman kurang merata;
5. Sarana berupa peralatan perekaman/pencetakan di kabupaten/kota banyak yang rusak dan tidak layak operasi;
6. Ketergantungan logistik perekaman dan pencetakan (blanko KTP EL) masih tersentralisasi, sehingga keterlambatan pengadaan dan distribusi ke daerah akan mengganggu kecepatan proses di daerah;

(6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Desa Membangun Provinsi Bengkulu tahun 2020 baru mencapai sebesar 0,6417. Selain itu pada tahun 2020 masih terdapat 290 desa tertinggal dan 5 desa sangat tertinggal di Provinsi Bengkulu. Permasalahan tersebut diakibatkan :

1. Belum sinergisnya program/kegiatan pembangunan daerah berlokasi desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu maupun dengan kabupaten/kota, masih bersifat parsial/sektoral;
2. Masih belum optimalnya infrastruktur dasar dan ekonomi dalam mendukung perekonomian perdesaan antara lain: 1) belum seluruh desa memiliki BUMDes; 2) masih adanya desa blankspot; dan 3) belum optimalnya pemanfaatan potensi desa untuk mendorong OVOP (One Village One Product);
3. BUMDes belum dioptimalisasi sebagai katalis perekonomian desa;
4. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes belum memahami pengelolaan BUMDes (pelaksana teknis hingga kepaladesa);
5. Belum optimalnya pemahaman dan pemanfaatan IT untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian desa;
6. Belum optimalnya pembangunan desa mencakup: 1) peningkatan pelayanan dasar; 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan; 3) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; 4) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; dan 5) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa;
7. Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong dalam bentuk interaksi secara langsung pada masyarakat desa dan perkotaan yang diindikasikan oleh mulai berubahnya bentuk partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan;

8. Belum optimalnya penganggaran CSR dan crowdfunding untuk memberikan alternatif metode penganggaran pada program-program perdesaan melalui dana CSR dan penggalangan dana melalui jaringan internet; dan
9. Lemahnya pengelolaan profil desa dan kelurahan sebagai bahan penyusunan perencanaan.

(7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan usaha pemerintah untuk mempengaruhi pola pertumbuhan penduduk ke arah pertumbuhan yang diinginkan melalui suatu kebijakan pemerintah di bidang kependudukan. Masalah pokok yang terjadi pada sektor pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu Belum optimalnya akses pelayanan KB. Pada tahun 2020, TFR mencapai 2,24 yang berarti setiap pasangan memiliki anak lebih dari 2 orang, *unmeet need* KB yang mencapai 7,17% dan angka pemakaian kontrasepsi yang baru mencapai 65,09%. Permasalahan pokok tersebut dapat disebabkan oleh beberapa masalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah PUS yang menggunakan alat kontrasepsi (alkon);
2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung program KKBPK (Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga);
3. Belum optimalnya advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang KB dan kesehatan reproduksi;

(8) Perhubungan

Penyelenggaraan bidang urusan perhubungan dihadapkan pada permasalahan utama, yaitu masih rendahnya konektivitas perhubungan antar daerah di Provinsi Bengkulu. Permasalahan tersebut terjadi karena kapasitas dan kualitas pelabuhan dan banda udara belum memadai serta terbatasnya akses layanan transportasi umum yang sesuai standar kelayakan.

(9) Komunikasi dan Informasi

Capaian pembangunan bidang urusan komunikasi dan informasi sudah baik. Indeks SPBE terus meningkat menjadi sebesar 2,9 pada tahun 2020 dan Indeks keterbukaan Informasi Publik meningkat menjadi 88,2 pada tahun 2020. Namun masih ada beberapa permasalahan dibidang ini, meliputi:

1. Penerapan *e-Government* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum ditindaklanjuti dengan kebijakan/aturan hukum daerah;
2. Belum ada rencana induk/strategicplan/masterplan/blueprint teknologi informasi;
3. Belum adanya standar pembangunan/pengembangan aplikasi/sistemInformasi/website, data, serta infrastruktur TI;
4. Belum adanya standar keamanan informasi;
5. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada beberapalayanan TI;
6. Kurangnya kuantitas, kualitas dan peningkatan kompetensi SDM pengelola TI;
7. Keterbukaan informasi publik mh harus terus ditingkatkan;
8. Website opd banyak yang tidak aktif;
9. Distribusi jaringan internet terutama untuk opd perlu dioptimalkan;
10. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan terhadap akses informasi yang lebih beragam dan cepat, namun kelemahannya berdampak pada akurasi dari informasi tidak menjadi prioritas. Tantangan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk kembali menata pengelolaan komunikasi dan informasi; dan
11. Belum ada regulasi terbaru seiring dengan perkembangan teknologi informasi tentang pengembangan kelompok informasi masyarakat, pembinaan komunitas komunikasi dan informatika serta pembinaan media tradisional.

(10) Koperasi dan UMKM

Capaian pembangunan bidang urusan koperasi dan UMKM sudah baik, namun masih terdapat beeberapa permasalahan yang dihadapi koperasi dan usaha kecil danmenengah (KUKM), yaitu:

1. Akses pembiayaan bagi KUKM khususnya terhadap dunia perbankan masih minim;
2. Masih rendahnya kucuran kredit yang diterima pelaku UMKM;
3. Masih banyak koperasi yang berstatus tidak aktif dan belum bersertifikat NIK. Pada tahun 2020, koperasi yang belum memiliki NIK ada sebanyak 532 koperasi.
4. Persentase koperasi aktif yang masih terbilang kecil baru sebesar 1.947 koperasi dari 2.771koperasi;
5. Menurunnya Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha

(11) Penanaman Modal

Dalam urusan penanaman modal, bedasarkan hasil evaluasi capaian sudah cukup baik yang ditandai dengan meningkatnya nilai investasi dari 1,6 triliun pada tahun 2016 menjadi 8,16 triliun pada tahun 2020. Namun dalam pelaksanaanya masih terdapat beberapa permasalahan, yaitu:

1. Realisasi investasi di kabupaten/kota belum merata masih terkonsentrasi di daerah Kota Bengkulu;
2. Belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN; dan

Adapun akar permasalahan yang menyebabkan hal tersebut, yaitu:

1. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata;
2. Belum sesuainya kualifikasi angkatan kerja lokal dengan pasar tenaga kerja; dan
3. Dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha.

(12) Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dna olahraga di Provinsi Bengkulu sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Rendahnya partisipasi pemuda Bengkulu dalam lapangan dan kesempatan kerja;
2. Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam organisasi dan kepemimpinan
3. Belum optimalnya penanganan kesetaraan dan diskriminasi gender.
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga yang ditandai dengan rendahnya persentase penduduk Bengkulu yang melakukan kegiatan olahraga;
5. Belum optimalnya peran sentra keolahragaan (Sekolah Khusus Olahraga, PPLP, dan Puslatda) guna pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
6. Terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan;
7. Belum adanya sinergi antara industri olahraga, pariwisata dan industrilainnya untuk mendukung prestasi olahraga dan perekonomian di Bengkulu;
8. Masih rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan;
9. Terbatasnya jumlah dan kualitas sentra pembinaan olahraga di Bengkulu yang memenuhi standar nasional dan internasional; dan
10. Kurangnya sarana terbuka publik yang dapat digunakan untuk berolahraga di kota/kabupaten di Bengkulu.

(13) Statistik

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan statistik yaitu:

1. Masih rendahnya ketersediaan data dan informasi statistik sektoral

2. Belum maksimalnya pengelolaan data di perangkat daerah dan kabupaten/kota sehingga supply data ke provinsi masih rendah;
3. Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola database dan belum tersosialisasi; dan
4. Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan statistik sektoral sehingga berdampak pada masih rendahnya data terolah spasial dan aspasial.

(14) Persandian

Pada saat membahas tentang persandian, maka tidak lepas dengan aspek keamanan informasi sebab dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 53 tentang Badan Siber dan Sandi negara (BSSN) maka ruang lingkup persandian saat ini tidak hanya sekedar pengiriman dan penerimaan surat melalui radiogram atau sejenisnya saja tapi lebih luas lagi ke arah pengamanan informasi. Indeks Persandian Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 baru mencapai sebesar 66,35%. Saat ini berkenaan dengan persandian terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran aparatur maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (security awarness) antara lain ditandai dengan makin maraknya informasi yang disebarkan kepada masyarakat melalui dokumen-dokumen pemerintah yang diragukan keasliannya, dan penyebaran informasi di masyarakat yang belum diketahui kebenarannya;
2. Sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi yang relatif masih terbatas, yaitu:
   a. Belum mempunyai perangkat pendukung kontra penginderaan;
   b. Jamming yang tersedia terbatas jumlahnya (1 jamming); dan
   c. Jaring komunikasi sandi belum dilaksanakan.

d. Belum ada ruangan Security Operating Centre (SOC) yang dapat memonitor lalu lintas data/informasi di Bengkulu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak lazim atau mengantisipasiadanya serangan dari pihak luar.

3. Permasalahan VA (vurnerability assesment) pengamanan informasi baik jaringan maupun aplikasi;
4. Pengamanan aset-aset dan ruangan pimpinan yang perlu disterilkan dari upaya-upaya penyadapan informasi oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab masih relatif terbatas jumlahnya;
5. Pengamanan dokumen-dokumen penting dari pemalsuan dan peningkatan upaya pelayanan lebih efektif dan efisien belum optimal;
6. Sumber daya manusia persandian dan keamanan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu masih sedikit;

(15) Kebudayaan

Secara umum, capaian urusan kebudayaan Provinsi Bengkulu sudah baik yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan yang mencapai sebesar 59,95 tahun 2018 yang lebih tinggi dari capaian nasional. Namun masih terdapat beberapa kendala yaitu:

1. Masih rendahnya perlindungan terhadap budaya lokal;
2. Masih rendahnya apresiasi terhadap budaya lokal;
3. Kurang optimalnya promosi budaya lokal di dalam dan luar negeri;
4. Kuatnya pengaruh budaya asing terhadap budaya lokal;
5. Kurangnya penguatan pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal;
6. Belum optimalnya apresiasi terhadap kebudayaan lokal;
7. Terbatasnya infrastruktur perlindungan dan pelestarian cagar budaya dan situs sejarah di Provinsi Bengkulu;

(16) Perpustakaan

Permasalahan di bidang perpustakaan dapat dilihat dari aspek kelembagaan teknis dan aspek pembudayaan kegemaran budaya masyarakat. Secara umum permasalahan di bidang perpustakaan diuraikan sebagai berikut:

1. Permasalahan kelembagaan teknis perpustakaan di Bengkulu, yaitu:
   a. Penyelenggaraan perpustakaan belum mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan yang meliputi pengembangan koleksi;
   b. SOTK, sarana dan prasarana, anggaran, layanan, bahan perpustakaan, tenaga perpustakaan, kerja sama, penyelenggaraan perpustakaan, dan pengelolaan perpustakaan;
   c. Perpustakaan Umum kabupaten/kota masih ada yang belum memiliki prasarana gedung permanen;
   d. Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia Perpustakaan baik tenaga Fungsional Pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan; dan
   e. Kegiatan layanan perpustakaan belum menjangkau daerah tertinggal, terjauh dan terluar.
2. Permasalahan pembudayaan kegemaran membaca di Bengkulu, yaitu:
   a. Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan;
   b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan perpustakaan sebagai tempat berkegiatan;
   c. Kurangnya promosi dan publikasi pemanfaatan perpustakaan dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat;
   d. Gerakan membaca dalam kegiatan literasi belum masif dan masih bersifat parsial belum terintegrasi; dan

e. Pemaknaan membaca masih berorientasi kepada baca dan tulis belum kepada pemaknaan holistik dan komprehensif.

(17) Kearsipan

Urusan kearsipan sebagai urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar masih dilaksanakan belum optimal. Hal ini ditandai dengan akses penggunaan arsip belum efektif; penelusuran dan identifikasi arsip kesejarahan belum efektif; pengelolaan arsip perangkat daerah atau pencipta arsip belum tertib; dan pemahaman sumber arsip bersejarah masih rendah. Adapun akar masalah dari permasalahan tersebut yaitu ketersediaan fasilitas dan sumber daya kearsipan yang belum layak sesuai standar kearsipan, serta keterbatasan sumber informasi arsip kesejarahan.

c. Pelayanan Umum Urusan Pilihan

(1) Kelautan dan Perikanan

Permasalahan di bidang kelautan dan perikanan dapat dilihat dari Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang belum mencapai 100 yaitu sebesar 99,25% pada tahun 2020. Selain itu belum maksimalnya produksi perikanan tangkap dari yang semula 67,5 ribu ton pada tahun 2017 menjadi 72,75 ribu ton pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Secara umum akar permasalahan, antara lain:

1. Eksploitasi ruang laut yang berlebihan dan tingginya tingkat pencemaran mengakibatkan penurunan laju tangkapan (fish landing) dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir;
2. Pelabuhan perikanan belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terbatasnya pemenuhan sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap (lahan, kapal, dll);
3. Pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematik antara hulu dan hilir;
4. Masih rendahnya tingkat pengguasaan teknologi oleh nelayan;

5. Pencemaran perairan umum dan laut;
6. Belum optimalnya kapasitas pengelolaan zonasi wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil 0-12 mil;
7. Masih belum optimalnya produksi perikanan tangkap (perbandingan data potensi dan produksi perikanan tangkap);
8. Belum maksimalnya produksi perikanan budidaya;
9. Kurangnya armada / kapal penangkap ikan (di bawah 3 GT);
10. Kurangnya sarana dan prasarana alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan;
11. Terbatasnya kapasitas SDM dan sumber daya nelayan;
12. Rendahnya akses pembudidaya ikan terhadap bantuan permodalan;
13. Kurangnya standarisasi produk pengolahan hasil perikanan;
14. Lemahnya strategi pemasaran terhadap produk olahan hasil perikanan;
15. Terbatasnya kapasitas SDM pengolah dan pemasar hasil perikanan.

(2) Pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB yang dilihat dari sektor Konsumsi Akomodasi dan Jasa Lainnya masih cukup kecil. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pengembangan sektor pariwisata sudah sangat baik, namun masih menyisakan beberapa permasalahan yaitu:

1. Kurangnya pengembangan sarana prasarana destinasi wisata;
2. Kurangnya pengembangan infrastruktur pendukung wisata;
3. Kurangnya pemberdayaan kelompok sadar wisata;
4. Terbatasnya pengembangan atraksi budaya pendukung wisata;
5. Rendahnya kapasitas SDM pelaku wisata;
6. Belum optimalnya sistem pemasaran wisata berbasis teknologi;

7. Belum optimalnya sinergi kerjasama antara pelaku bisnis wisata, masyarakat dan pemerintah daerah;
8. Belum semua kabupaten/kotamemiliki dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda) Kabupaten/Kota;
9. Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta dukungan amenitas pariwisata (rumah makan, restoran, toko cenderamata, dan fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan, taman, dan lain-lain);
10. Belum terintegrasinya promosi pariwisata yang dilakukan antara provinsi dan kabupaten/kota; dan
11. Kelembagaan dan sumber daya pengelola destinasi wisata kurang profesional, terlihat dari masih adanya pungli atau pungutan liar didestinasi wisata.

(3) Pertanian

Permasalahan pokok terkait pertanian di Bengkulu, yaitu kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dan cenderung menurun; menurunnya pertumbuhan Subsektor Tanaman Pangan; dan masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian. Secara umum, akar permasalahan di bidang pertanian, yaitu:

1. Belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir;
2. Menurunnya luas lahan pertanian dan terganggunya ekosistem pertanian sebagai konsekuensi dari intensitas pembangunan sektornon-pertanian yang sangat tinggi;
3. Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian;
4. Tingginya gangguan hama dan penyakit tanaman pertanian dan perkebunan, serta peternakan;
5. Rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian;
6. Rendahnya regenerasi petani;
7. Rendahnya akses permodalan;

8. Kurang optimalnya pemakaian bibit unggul ternak;
9. Kurangnya sumber daya penyuluh peternakan;

(4) Kehutanan

Urusan kehutanan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bengkulu. Luas lahan kritis pad atahun 2020 tercatat sebesar 363 ribu hektar dan laju Deforstasi menjadi 0,22. Permasalahan di urusan kehutanan adalah:

1. Tingkat degradasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) masih tinggi, yang disebabkan oleh perubahan tutupan lahan, akibat alih fungsi lahan. Hal ini juga mengakibatkan banyaknya lahan kritis di luas kawasan hutan;
2. Pengelolaan hutan belum optimal;
3. Rendahnya produksi hasil hutan kayu dan non kayu;

Secara umum akar permasalahan bidang kehutanan, antara lain:

1. Tingginya aktivitas ekonomi secara berlebihan di kawasan hulu DAS;
2. Meningkatnya gangguan ekosistem;
3. Jumlah masyarakat miskin di sekitar hutan masih tinggi; dan
4. Rendahnya teknologi pemanfaatan sumberdaya hutan.

(5) Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja urusan ESDM di Provinsi Bengkulu sudah baik, dilihat dari meningkatnya rasio elektrifikasi mencapai 99,99% pada tahun 2020. Selain itu luas lahan yang direklamasi meningkat menjadi 69,24%. Namun masih ada beberapa catatan permasalahan, yaitu :

1. Masih ditemukan aktivitas pertambangan yang tidak mengikuti kaidah usaha pertambangan yang baik (good mining practise);
2. Meningkatnya penggunaan air tanah;
3. Instalasi tenaga listrik belum terstandardisasi;
4. Belum meratanya akses terhadap layanan listrik; dan
5. Pemanfaatan energi final belum efisien dan minimnya pemanfaatan baru dan terbarukan.

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1)Ketidakseimbangan antara jumlah personil inspektur tambang beserta perlengkapan kerjanya dengan luas wilayah usaha pertambangan; (2)Meningkatnya penggunaan air tanah akibat air permukaan yang belum mampu memenuhi kebutuhan air untuk masyarakat baik kebutuhan domestik maupun industri; (3) Belum ada perangkat untuk mensertifikasi instalasi tenaga listrik; (4) Basis data terpadu yang menjadi dasar pemberian bantuan sambungan instalasi listrik rumah tangga miskin belum sinkron antara TNP2K, PT PLN (Persero) dan Pemerintah Daerah; dan(5) Keterbatasan peran pemda dalam mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dan inefisiensi penggunaan energi.

(6) Perdagangan

Urusan Perdagangan sudah menunjukan hasil yang baik. Neraca perdagangan Provinsi Bengkulu terus mengalami surplus. Total ekspor Provinsi Bengkulu pada bulan Juni 2021 mencapai US$ 24,83 juta. Nilai ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 81,46 persen jika dibandingkan dengan bulan Mei 2021 yang tercatat sebesar US$ 13,68 juta dan meningkat sebesar 85,66 persen apabila dibandingkan dengan bulan Juni 2020 yang tercatat US$ 13,37 juta. Pada bulan April hingga Juni 2021, tidak ada impor barang ke Provinsi Bengkulu. Nilai impor pada Juni 2021 mengalami penurunan sebesar 100 persen jika dibandingkan dengan impor pada bulan Juni 2020 yang tercatat sebesar US$ 0,21 juta. Neraca perdagangan Provinsi Bengkulu bulan Juni 2021 surplus sebesar US$ 24,83 juta, sedangkan neraca perdagangan bulan Januari - Juni 2021 mengalami surplus sebesar US$ 98,88 juta.

Selain itu permasalahan lain sektor perdagangan adalah:

1. Dominasi barang impor;
2. Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok;

3. Promosi produk industri lokal masih dirasa kurang;
4. Persaingan antara UMKM/pasar tradisional dengan pasar modern;
5. Kualitas dan kuantitas Infrastruktur pasar tradisional belum memadai;
6. Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan;
7. Rendahnya kualitas sarana infrastruktur transportasi distribusi barang perdagangan;
8. Kurangnya jaringan pemasaran produk perdagangan;
9. Terbatasnya sarana prasarana perdagangan dan tertib niaga;
10. Rendahnya kualitas manajemen usaha perdagangan pasar tradisional dan pasar wisata;
11. Kurangnya akses permodalan bagi pedagang pasar tradisional dan pasar wisata;
12. Kurangnya penataan pedagang kaki lima dan asongan;

(7) Perindustrian

Kontribusi sektor industri dalam PDRB Provinsi Bengkulu masih cukup rendah yaitu berkisar antara 5-6 persen. Beberapa permasalahan sektor Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Industri hilirisasi komoditas unggulan belum berkembang dan belum mampu menampung hasil produksi barang mentah;
2. Infrastruktur pendukung kawasan industri yang belum terintegrasi mengakibatkan tingginya biaya logistik dan ketimpangan pengembangan kawasan industri;
3. Bahan baku industri mayoritas impor mengakibatkan biaya produksi tinggi;
4. Peranan industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri; dan
5. Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi;
6. Kurangnya akses permodalan bagi IKM;

(8) Transmigrasi

Secara umum permasalahan pada bidang transmigrasi, sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi transmigran;
2. Persepsi penerimaan masyarakat lokal terhadap transmigran;
3. Pengawasan dan pendataan transmigrasi lokal; dan
4. Penguatan sistem dan pengelolaan transmigrasi.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

(1) Kesekretariatan Daerah

Urusan kesekretariatan Daerah sudah baik yang dilihat dari meningkatnya Nilai SAKIP menjadi 68,98 pada tahun 2020 dan meningkatnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi menjadi 63,34 pada tahun 2020. Namun, urusan Kesekretariatan masih memiliki beberapa masalah yaitu:

1. Masih adanya tumpang tindih antara tugas dan fungsi sekretariat daerah dengan perangkat daerah teknis/sektoral;
2. Belum optimalnya kemampuan pelaksanaan kebijakan daerah;

(2) Kesekretariatan DPRD

Permasalahan pada urusan Kesekretariatan DPRD adalah :

1. Belum optimalnya fasilitasi dalam perumusan peraturan daerah
2. Belum optimalnya fasilitasi dalam tindak lanjut aspirasi dan pengaduan masyarakat

e. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

(1) Perencanaan

Kinerja urusan perencanaan daerah di Provinsi Bengkulu sudah baik, dibuktikan dengan prestasi perencanaan daerah Provinsi Bengkulu sebagai Terbaik II Nasional PPD Tahun 2020. Namun, Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan perencanaan, memiliki masalah pokok berupa belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Masalah pokok

tersebut dibentuk oleh masalah dan akar masalah sebagai berikut:

1. Perencanaan sektoral pada masing-masing perangkat daerah yang belum berbasis pada perencanaan jangka menengah dan panjang daerah;
2. Ketersediaan data perencanaan pembangunan yang belum optimal;
3. Belum optimalnya kapasitas aparatur perencana;
4. Belum terwujudnya sinkronisasi dokumen perencanaan dengan KUA-PPAS dan APBD;
5. Belum optimalnya Tindak lanjut aspirasi masyarakat dalam musrenbang;
6. Belum optimalnya pengendalian realisasi pembangunan;

(2) Keuangan

Kapasitas fiskal Provinsi Bengkulu masih cukup rendah. Berdasarkan data, peranan PAD dalam Pendapatan Daerah masih berkisar sebesar 28% (Rendah) yang berarti PAD belum signifikan dalam peningkatan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu dan masih memiliki pola hubungan konsultatif (mana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi). Permasalahan urusan Keuangan adalah:

1. Belum optimalnya kemampuan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Belum optimalnya kemampuan aparatur pelayanan pajak dan retribusi daerah;
3. Belum optimalnya fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
4. Belum optimalnya identifikasi aset daerah yang belum memiliki kejelasan status;

(3) Kepegawaian

Permasalahan urusan kepegawaian adalah:

1. Peraturan perundang-undangan masih menjadi kendala dalam hal pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang aparatur. Pengadaan CPNS yang terkonsentrasi oleh pemerintah pusat menyebabkan kekurangan pegawai terutama berkaitan hal yang sifatnya teknis. E-formasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terkadang tidak mampu mengisi kekurangan pegawai yang dialami provinsi. Seiring dengan pemberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, memang terjadi pelimpahan pegawai yang sangat signifikan, namun penambahan tersebut tidak dapat menutupi kekurangan pegawai dalam hal teknis, mengingat hampir 80 persen pegawai yang dialih kelola ke provinsi adalah guru;
2. Reformasi birokrasi terutama dari parameter manajemen kepegawaian masih memerlukan peningkatan. Perlu dilakukan secara khusus program-program yang menunjang reformasi birokrasi sehingga amanat undang-undang tentang harus terlaksananya reformasi birokrasi bisa tercapai;
3. Belum adanya perencanaan manajemen kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, ditemui juga kondisi belum sesuainya antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai jaminan profesionalisme Aparatur Sipil Negara;
4. Belum optimalnya sistem seleksi terbuka bagi jabatan struktural;
5. Belum optimalnya sistem informasi manajemen kepegawaian;

(4) Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan pelatihan seharusnya menjadi ‘mesin cetak’ ASN yang berkualitas dan profesional. Permasalahan urusan pendidikan dan pelatihan adalah:

1. Belum semua PNS memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai Jaminan Profesionalisme PNS;
2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang belum efektif;

3. Belum optimalnya beasiswa pendidikan dan tugas belajar berdasar kebutuhan daerah;

(5) Penelitian dan Pengembangan

Capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan sudah sangat baik. Nilai Indeks Inovasi Daerah meningkat dari sebesar 280 menjadi 5.269 pada tahun 2020 dengan kategori Sangat Inovatif. Namun, beberapa permasalahan di sektor ini adalah:

1. Persentase Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) belum optimal;
2. Masih rendahnya tindak lanjut hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan;
3. Jumlah karya IPTEK yang didaftarkan HAKI Provinsi Bengkulu belum optimal; dan
4. Persentase hasil riset dan IPTEK yang diterapkan belum optimal;

(6) Penghubung

Permasalahan urusan penghubung adalah: (1) masih rendahnya giat promosi daerah; (2) masih minimnya kontribusi pendapatan dari sewa kamar perwakilan; (3) masih belum maksimal pemeliharaan dan perawatan aset daerah.

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

(1) Pengawasan

Pembangunan daerah urusan pengawasan terkait upaya meningkatkan integritas ASN dan sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern di Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menunjukkan perbaikan, salah satunya ditandai dengan kapabilitas APIP yang mencapai level 3, meskipun masih disertai catatan. Kondisi tersebut belum disertai dengan capaian maturitas SPIP yang masih pada level 2 serta tindak lanjut hasil pemeriksaan yang menurun dari tahun 2016 sebesar 70,3 persen menjadi 64,99 persen pada tahun 2019. Permasalahan urusan pengawasan di Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah:

1. Inisiatif perangkat daerah dan keterlibatan masyarakat dalam membangun sistem pengaduan yang belum optimal;
2. Belum optimalnya perangkat daerah yang menjalankan SPIP;
3. Masih kurangnya peningkatan kapasitas bagi APIP;
4. Masih terdapat OPD yang belum menjalankan manajemen resiko;
5. Perangkat daerah yang belum menjalankan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
6. Belum optimalnya fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan MPTGR;

g. Unsur Pemerintahan Umum

(1) Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah menunjukan capaian yang baik. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bengkulu terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, IDI Provinsi Bengkulu sebesar 74,23 dan meningkat menjadi 78,79 pada tahun 2019. Namun beberapa permasalahan yang masih ditemui adalah:

1. Masih terjadi konflik horizontal antar kelompok masyarakat;
2. Masih terjadi konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah;
3. Rentannya Provinsi Bengkulu disusupi ideologi radikal;
4. Masih ada ditemukan pelanggaran dalam kebebasan berkeyakinan;
5. Masih tingginya konflik politik terutama menjelang Pilkada;

3) Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah

Pada Aspek Daya Saing Daerah terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Masih rendahnya kemampuan ekonomi daerah yang dilihat dari capaian Pengeluaran per Kapitan dan Nilai Tukar Nelayan;
2. Masih rendahnya kapasitas SDM yang dilihat dari masih rendahnya kualifikasi tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SLTA keatas.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

1) Visi

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Bengkulu 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Bengkulu. Pernyataan visi Provinsi Bengkulu periode 2021-2026 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Bengkulu sampai denganTahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi.

Sebelum menjabarkan mengenai Visi RPJMD, terlebih dahulu akan ditelaah Visi Jangka Panjang Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah periode 2005-2025. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kesinambungan pembangunan selama lima tahun ke depan. Adapun Visi RPJPD Provinsi Bengkulu adalah "*Provinsi Bengkulu yang sejahtera, adil dan demokrasi bertumpu pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh*". Substansi Visi RPJPD Provinsi Bengkulu di atas menjadi pijakan dalam penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih agar sasaran pokok RPJPD di tahun berkenaan dapat dijabarkan menjadi Arah Kebijakan dan ProgramPembangunan Daerah. Adapun Visi pembangunan Provinsi Bengkulu dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai berikut :

"***BENGKULU MAJU, SEJAHTERA DAN HEBAT"***

Visi tersebut merupakan kelanjutan dari cita-cita pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021. Visi di atas memiliki substansi nilai (*value*) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi Pembangunan. Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 untuk mencapai:

1. ***BENGKULU SEMAKIN MAJU*** dengan mewujudkan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan infrastruktur dasar yang berkualitas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan dan berintegritas menjadikan Provinsi Bengkulu sejajar dengan provinsi-provinsi maju di Indonesia.

2. ***BENGKULU SEMAKIN SEJAHTERA*** dengan mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, serta kebijakan pembangunan yang adil serta kemudahan akses. menjamin rasa aman dan nyaman dalam keberagaman, toleransi yang kuat dengan landasan keimanan dan ketaqwaan.
3. Dan pada tujuan akhir, ***BENGKULU MENJADI HEBAT*** dengan mewujudkan Bengkulu yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang didukung dengan kebanggaan terhadap potensi yang dimiliki, optimisme dan rasa percaya diri masyarakat, berintegritas serta bermartabat. Mendorong serta melibatkan kaum muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan (SDM maupun Infrastruktur).

2) Misi

Untuk mewujudkan Visi Provinsi Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat, maka Misi yang diemban lima tahun ke depan yang menjadi pedoman dalam pembangunan Provinsi Bengkulu adalah :

Misi I : ***Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif;***

Pembangunan infrastruktur di Bengkulu ke depan akan dilanjutkan dengan lebih cepat dan masif dengan pembangunan infrastruktur strategis seperti Jalan Tol, Jalur Kereta Api, Pelabuhan, Bandara, jalan dan jembatan yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, membuka akses lebih luas terhadap kawasan pariwisata, memantapkan pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat, memacu pertumbuhan lapangan kerja baru serta mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian berbasis potensi daerah.

Misi II : ***Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan***

bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan;

Pembangunan Provinsi Bengkulu perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pengelolaan dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam harus memperhatikan aspek keberlanjutan, sehingga potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Bengkulu akan tetap dapat dirasakan oleh generasi penerus. Selain itu, pembangunan yang dilakukan harus tetap mengedepankan aspek kesiapsiagaan terhadap bencana (*disaster preparedness*). Semua pemanfaatan SDA Bengkulu dilakukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi III : ***Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik;***

Kapasitas kelembagaan pemerintahan yang ada di Bengkulu diperkuat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan tetap mengedepankan kerjasama antar instansi agar dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi Provinsi Bengkulu ke depan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, manajemen sumber daya manusia aparatur, peningkatan akuntabilitas pemerintahan serta *zero tolerance* terhadap praktik-praktik korupsi. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif dilakukan dengan penerapan pelayanan yang cepat, ramah, murah, mudah, berkualitas, serta didukung dengan pemanfaatan inovasi dan teknologi informasi.

Misi IV : ***Membangun Sumber Daya Manusia menjadi berkualitas, berdaya saing dan berbudaya serta toleran dan religius;***

Sumber Daya Manusia di Provinsi Bengkulu dibentuk dan dibangun

agar dapat menjadi manusia yang kuat, sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, beradab-budaya, menguasai teknologi, berkarakter, sejahtera sehingga mampu memiliki daya saing yang tinggi. Kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup mulai dari kandungan hingga tumbuh, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas. Selanjutnya pembangunan manusia dilakukan dalam kondisi lingkungan yang aman, nyaman, dan mengimplementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat yang religius dan toleran dengan menciptakan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Misi V : ***Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kelompok Disabilitas secaraTerpadu;***

Perempuan di Provinsi Bengkulu diberikan akses dan kontrol yang sama dalam setiap bidang pembangunan serta berhak memperoleh manfaat tanpa terkecuali sehingga tujuan dari kesetaraan gender dapat dicapai. Selain itu pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan dan memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anakdiperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, Pemerintah bersama dengan masyarakat secara terpadu akan hadir untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Tidak hanya perempuan dan anak, Misi kelima ini juga ditujukan untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Bengkulu. Pemenuhanhak-hak disabilitas tersebut merupakan suatu pengarusutamaan yang harus ada dalam setiap aspek pembangunan di Provinsi Bengkulu selama 5 (lima) tahun mendatang.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program pembangunan daerah berdasarkan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran yang disertai pagu indikatif, dapat dilihat pada tabel berikut :

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Hubungan antara Prioritas Nasional, Program Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Pembangunan Daerah dalam RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2022 dapat di gambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.11
Kegiatan Prioritas Pembangunan pada RKPD Tahun 2022

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualrtas dan Berkeadrlan	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Peningkatan Pemenuhan Energi Domestik	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Dinas ESDM
		Peningkatan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Dinas ESDM
	Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	Program Pengelolaan Hutan	Dinas LHK
		Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Program Pengelolaan Hutan	Dinas LHK
		Penyediam Air untuk Pertanian	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas PUPR
		Penyediaan Air Baku untuk Kawasan Prioritas	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Penyediaan	Dinas PUPR

			Air Minum	
		Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastrukrur Hijau	Program Pengelolaan Hutan	Dinas LHK
			Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Dinas LHK
	Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedalulatan dan kemandirian pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Peningkatan ketersedian pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas TPHP, Dinas Peternakan dan Keswan

			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas TPHP
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas KP
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas KP
		Peningkatan Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Perikanan dan Kepastran Pasar	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas TPHP
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas TPHP
		Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas KP
			Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Dinas KP
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas KP
		Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Dinas KP

		dan Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir serta Pengelolaan Ruang Laut		
		Peningkatan Ekosistem Kelautan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Dinas KP
		Penlngkatan Produksi, Produktivitas, Standarisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas KP
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas KP
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas KP
		Peningkatan Fasrlitasi Usaha, Pembiayaan, dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan dan Perikanan Skala Kecil serta Akses terhadap Pengelolaan Sumber Daya	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas KP
	Penguatan Keurausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM),	Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan UMKM

	dan Koperasi	Menengah Besar		
			Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
		Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi dan UMKM
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi dan UMKM
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM
		Peningkatan Penciptaan Start- Up dan Peluang Usaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan UMKM
	Peningkatan Nilar Tambah, Lapangan Ker1a, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemilitrman, dan Non Agro yang Terintegrasr Hulu-Hilir	Program Perencanaan dan Pembanguanan Industri	Dinas Perindag
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Perindag
		Penrngkatan Industrialisasi Berbasrs Hilirisasi Sumber Daya Alam, Temasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa	Program Perencanaan dan Pembanguanan Industri	Dinas Perindag

		Peningkatan Daya Salng Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwsata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi	Dinas Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
		Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasl, termasuk Reformasr Ketenaga-Kerjaan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP

			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindag
		Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspo	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindag
	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digltal dan Industri 4.O	Program Pengelolaan Sistim Informasi Industri Nasional	Dinas Perindag
		Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perindag
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindag
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
Mengembang-kan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Wilayah Sumatera	Pengembmgan Kawasan Strategis	Pengembangan Kawasan Industri Pulau Baai	PT. Pelindo II
			Penataan Kawasan Pariwisata Unggulan Pantai Panjang dan	BPPW dan Dinas PUPR

			Danau Dendam Tak Sudah	
		Pengembangan Sektor Unggulan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas TPHP
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas TPHP
		Pengembangan Kawasan Perkotaan	Program Penataan Bagunan Gedung	Dinas PUPR
			Program Penataan Bagunan dan Lingkungannya	Dinas PUPR
		Pengembangm Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmrgrasi	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas PMD
			Program Penataan Desa	Dinas PMD
			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Disnaker-trans
		Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah
			Program Penataan Organisasi	Sekretariat Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKD
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKD
			Program	Dinas

			Pelayanan Penanaman Modal	PMPTSP
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	Dukcapil
			Program Pencatatan Sipil	Dukcapil
		Integrasi Sistem Administrasr Kependudukm	Program Pengelolaan Informasi Admistrasi Kependudukan	Dukcapil
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dukcapil
		Pendampingan dan Layanan Terpadu	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD
	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Sistem Jaminan Sosial Nasional	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Perlindungan Sosial Adaptif	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		Kesejahteraan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Dinas Kesehatan

		(KB), dan Kesehatan Reproduksi	Masyarakat	
			Program Pengendalian Penduduk	DP3PPKB
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	DP3PPKB
		Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Pengendalian Penyakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Pemerataan tayanan Pendidikan Berkualitas	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Program pengelolaan Pendidikan	Dinas DIKBUD
		Afimasi Akses dan Percepatan Wajib Belalar 12 Tahun	Program pengelolaan Pendidikan	Dinas DIKBUD

		Peningkatan Pengelolaan dm Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program pengelolaan Pendidikan	Dinas DIKBUD
		Penjaminan Mutu Pendidikan	Program pengelolaan Pendidikan	Dinas DIKBUD
		Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	Program pengelolaan Pendidikan	Dinas DIKBUD
	Perungkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak	DP3APPKB
			Program Perlindungan Khusus Anak	DP3APPKB
		Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DP3APPKB
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DP3APPKB
		Kualitas Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	DISPORA
	Pengentasan Kemiskinan	Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD
			Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan	DLHK

			Pemberdayaan Masyarakat di bidang kehutanan	
		Reforma Agraria	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD
			Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dinas Perkim
		Perhutanan Sosial	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat di bidang kehutanan	DLHK
	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	Pendidikan dan Pelatlhan Vokasi Berbasis Kerja sama Industn	Program pengelolaan Pendidikan	Dinas DIKBUD
		Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi	Program Pengembangan dan Penelitian Daerah	Bappeda
		Prestasi Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	DISPORA
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusr Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk	Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila	Program Pemberdayaan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi UKM

	Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter			
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kesbangpol
		Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegara an, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionahsme dan Patriotisme	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol
	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestrian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkm Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	Revitahsasi dan Aktualisasl Nilai Budaya dan Kearifan Lokal	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas DIKBUD
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas DIKBUD
			Program	Dinas

			Pengelolaan Permuseuman	DIKBUD
		Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan KeseJahteraan Rakyat	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas DIKBUD
			Program Pembinaan Sejarah	Dinas DIKBUD
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas DIKBUD
		Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas DIKBUD
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD
		Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas DIKBUD
	Memperkuat Moderasi Beragma untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial	Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktrk Beragama Dalam Perspektif Jalan Tengah Untuk	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas serta fasilitasi penanganan konflik	Kesbangpol

		Memantapkan Persaudaraan Dan Kebersamaan dari Kalangan Umat Beragama	sosial	
		Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas serta fasilitasi penanganan konflik sosial	Kesbangpol
		Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas serta fasilitasi penanganan konflik sosial	Kesbangpol
		Peningkatan Kualitas Pelaynan Kehidupan Beragama	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas serta fasilitasi penanganan konflik sosial	Kesbangpol
		Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kesbangpol
	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagl Terwujudnya Masyarakat Berpengeta-huan, dan Berkarakter	Peningkatan Budaya Literasi	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpus dan Arsip
		Pengembangan, Pembinaan,	Program Pelestarian Koleksi	Dinas Perpus dan Arsip

		dan Pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Aksara Daerah, serta Sastra	Nasional dan Naskah kuno	
		Pengembangan Budaya Iptek, Inovasi, Kreativitas, dan Daya Cipta	Program Pengembangan dan Penelitian Daerah	Bappeda
		Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustaka-an dan Arsip
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengemba-ngan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perkim
			Program Kawasan Permukiman	Dinas Perkim
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perkim
		Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Permukiman	Dinas PUPR
		Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan	Dishub
			Program Pengelolaan Pelayaran	Dishub
		Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Infrastruktur	Konektivitas	Program	Dinas PUPR

	Ekonomi	Jalan	Penyelenggaran Jalan	
		Konektivrtas Laut	Program Pengelolaan Pelayaran	Dishub
		Konektivitas Darat	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dishub
	Infrastruktur Perkotaan	Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfotik
		Penyediaan Akses Air Minum dan Sanrtasi Layak dan Aman dan Perkotaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Permukiman	Dinas PUPR
		Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau dari Perkotaan	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perkim
			Program Kawasan Permukiman	Dinas Perkim
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perkim
	Energi dan Ketenaga listrikan	Keberlanlutan Penyediaan Energi dan Ketenaga Listrikan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Dinas ESDM
		Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenaga listrikan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Dinas ESDM
		Kecukupan Penyediam Energi dan	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Dinas ESDM

		Tenaga Listrik		
	Transformasi Digital	Penuntasan Infrastruktur TIK	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfotik
		Pemanfaatan Infrastruktur TIK	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfotik
		Fasilitas Pendukung Transformasi Digtal	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfotik
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hrdup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hrdup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Lingkungan Hidup	DLHK
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya B3 dan Limbah Bahan berbahaya dan racun (Limbah B3)	DLHK
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
		Penanggu-langan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hrdup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	DLHK
			Program Pengelolaan Persampahan	DLHK
		Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lrngkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Lingkungan Hidup	DLHK
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya	DLHK

			B3 dan Limbah Bahan berbahaya dan racun (Limbah B3)	
			Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	
		Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hrdup	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) ,Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	DLHK
	Penrngkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Penanggu-langan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Peningkatan Ketahanan Iklim	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Lingkungan Hidup	DLHK
		Pembangunan Rendah Karbon	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Lingkungan Hidup	DLHK
		Pembangunan Energi BerkelanJutan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Dinas ESDM
		Pengelolaan Limbah	Program Pengendalian Bahan Berbahaya B3 dan Limbah Bahan berbahaya dan racun (Limbah B3)	DLHK
Memperkuat Stabilttas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan	Kesbangpol

			pengembangan etika serta budaya politik	
		Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Kesbangpol
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	Kesbangpol
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DP3APPKB
		Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komuniskasi Publik	Diskominfotik
		Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	Program Hubungan Industrial	Dinakertrans
	Penegakan Hukum Nasional	Penataan Regulasi	Program fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Sekretariat Daerah
		Penguatan Sistem Anti Korupsi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
		Peningkatan Akses terhadap Keadilan	Program fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Sekretariat Daerah
	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Program Kepegawaian Daerah	BKD
		Transformasi	Program Penataan	Sekretariat

		Pelayanan Publik	Organisasi	Daerah
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
		Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis	Program Penataan Organisasi	Sekretariat Daerah
		Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Program Penataan Organisasi	Sekretariat Daerah
			Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat
		Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Satpol PP
			Program peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol
		Penguatan Keamanan laut	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyaakat	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Satpol PP
			Program peningkatan kewaspadaan Nasional dan	Kesbangpol

			Peningkatan Kualitas serta fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
		Penguatan Keamanan dan Ketahanan Syber	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiapWarga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Penerapan SPM di pemerintah daerah mengacu kepada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan. Dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021, penerapan SPM merupakan startegi pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan pemenuhan kewajiban yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yaitu terkait dengan perencanaan

dan penganggaran progam/kegiatan dalam konteks belanja daerah. Terhadap belanja daerah maka ditentukan secara tegas dan dengan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM, artinya sejak dari proses awal perencanaan program di daerah, harus memberikan prioritas kepada program-program pelayanan dasar dalam konteks SPM untuk memastikan SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat untuk menerima pelayanan dasar dalam tingkatan minimal. Hal ini mempertegas bahwa kinerja pemerintah daerah diukur dari sejauh mana program dan kegiatan dapat terlaksana dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara, dengan kata lain yang menjadi prioritas utama adalah bukan kinerja Pemerintah daerah maupun kinerja kementerian tetapi terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara.

Adapun Standar Pelayanan Minimal yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memastikan akses masyarakat pada pendidikan menengah;
2. Menyiapkan pendidikan khusus bagi masyarakat yang membutuhkan;
3. Memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
4. Memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
5. Memenuhi kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
6. Menyediakan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;
7. Menyediakan dan merehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
8. Memberikan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
9. Memberikan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
10. Merehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
11. Merehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
12. Merehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
13. Merehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan

14. Memberikan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

BAB II
CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Indikator kinerja makro merupakan gambaran pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2024. Capaian kinerja makro secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*). Indikator kinerja makro dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Indikator capaian makro meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu : aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah.

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, penentuan capaian indikator tiap tahunnya meliputi : pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Atau dengan kata lain dapat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial seperti : Persentase penduduk miskin terhadap total penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan lain – lain.

Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan provinsi.

Pada aspek daya saing daerah penentuan capaian indikator tiap tahunnya mencakup pada kemampuan ekonomi, fasilitas wilayah / infrastruktur, iklim berinvestassi dan sumber daya manusia. Indikator yang diukur antara lain : laju pertumbuhan investasi, pendapatan perkapita, laju pertumbuhan ekspor, laju pertumbuhan PMA, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Makro Provinsi Bengkulu

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	74,30	74,91	0,82
2.	Angka Kemiskinan (%)	14,04	13,56	-3,42
3.	Angka Pengangguran (%)	3,42	3,11	-9,06
4.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,28	4,62	7,94
5.	Pendapatan/PDRB Perkapita (Rp)	46.300.486	49.233.121	6,33
6.	Ketimpangan Pendapatan/Pengeluaran (*Gini Ratio*)	0,330	0,342	3,62

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2025.

Uraian dari Capaian Kinerja Makro Provinsi Bengkulu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bengkulu tahun 2024 mencapai 74,91 meningkat 0,61 poin atau 0,82 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,30.
2. Persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu pada Maret 2024 sebesar 13,56 persen, berkurang sebesar 0,48 persen poin atau 3,42 persen dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang sebesar 14,04 persen.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bengkulu kondisi Agustus 2024 sebesar 3,11 persen, berkurang 0,31 persen poin atau 9,06 persen dibandingkan kondisi Agustus 2023 yang sebesar 3,42 persen.
4. Pada tahun 2024, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu tumbuh sebesar 4,62 persen, atau mengalami percepatan dibandingkan tahun 2023 yang hanya tumbuh sebesar 4,28 persen.
5. Nilai PDRB Perkapita Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 sebesar Rp.49.233.121- meningkat 6,33 persen dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp.46.300.486.
6. Pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Bengkulu yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,342. Angka ini meningkat 0,009 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,333.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kunci

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
1.a.1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	99,9431698	
1.a.2	Pendidikan	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	81,2900927	
1.b.1	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1,2902217	
1.b.2	Kesehatan	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	96,1538462	
1.b.3	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	
1.b.4	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100	
1.c.1.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	6,2884053	
1.c.1.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	6,8403132	
1.c.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	47,8744304	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	17,0910717	
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPALD Regional	0	belum tersedia data yang dimaksudkan
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kemantapan jalan	62,8208367	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	11,2164948	
1.d.1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	pada tahun 2024 tidak terjadi bencana skala provinsi yang ditetapkan dengan SK Gubernur
1.d.2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	pada tahun 2024 tidak ada warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi
1.d.3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentasi Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	1,3120131	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
1.d.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	11,8110236	
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	100	
1.e.2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Defenisi: Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	
1.e.3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan pra bencana	20	
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	
1.f.1	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	
1.f.2	Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	
1.f.3	Sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	
1.f.4	Sosial	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
1.f.5	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100	
2.a.1.1	Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	100	
2.a.1.2	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2,0852663	
2.a.2	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	7,8581485	
2.a.3	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	31,7144501	
2.a.4	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	31,5730856	
2.a.5	Tenaga Kerja	Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	14,7137789	
2.b.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	7,8733297	
2.b.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	2,7082025	
2.b.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	9,1349318	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
2.c.1	Pangan	Persentase cadangan pangan	163,620455	
2.d.1	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	
2.d.2	Pertanahan	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100	
2.d.3	Pertanahan	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota.	100	
2.e.1	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	73,45	
2.e.2	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	0	
2.f.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	100	
2.f.1.2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemanfaatan data kependudukan	41,6666667	
2.g.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	58,6666667	
2.g.2	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	20,5607477	
2.h.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,23	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
2.h.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	43,2556822	
2.h.3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	6,3499335	
2.i.1	Perhubungan	Rasio konektivitas Provinsi	0,85	
2.i.2	Perhubungan	V/C Ratio di Jalan Provinsi	0,32	
2.j.1	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	94,4444444	
2.j.2	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	
2.j.3	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	97,6840131	
2.k.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	76,4705882	
2.k.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	56,0552476	
2.l	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	11,2469899	
2.m.1	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,6431097	
2.m.2	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	5,5727375	
2.m.3	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	60	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
2.n.1	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	
2.n.2	Statistik	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	
2.o	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	48,9922481	
2.p	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100	
2.q.1	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	68,83	
2.q.2	Perpustakaan	Indeks Pembangun an Literasi Masyarakat	65,96	
2.r.1	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	72,651	
2.r.2	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	98,92	
3.a.1	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	36,9683917	
3.a.2	Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	67	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
3.b.1	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	19,9743508	
3.b.2	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	102,1189227	
3.b.3	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	55,2400249	
3.b.4	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2,6401373	
3.c.1	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	575,8175109	
3.c.2	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	32,8432594	
3.d.1	Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	82,5581395	
3.d.2	Kehutanan	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)	15,1780483	
3.d.3	Kehutanan	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	2,1351041	
3.e.1	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	100	
3.e.2	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	100	
3.f.1	Perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	-21,2420622	
3.f.2	Perdagangan	Persentase penanganan pengaduan konsumen	0	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
3.f.3	Perdagangan	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	100	
3.f.4	Perdagangan	Tertib Usaha	0	Penerbitan SIUP MB TBB bukan merupakan tugas dan kewenangan Disperindag Provinsi bengkulu, sehingga tidak melakukan penerbitan dan hanya mengeluarkan rekomendasi saja
3.f.5	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	84,806152	
3.f.6	Perdagangan	Persentasebarang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	
3.f.7	Perdagangan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	7,9	
3.g.1	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	1,5625	
3.g.2	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100,2	
3.g.3	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	200	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
3.g.4	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	tidak ada data karena tidak ada pengajuan
3.g.5	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	tidak ada data karena tidak ada pengajuan
3.g.6	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	82	
3.h	Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Provinsi	100	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
4.a.1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	15,4612705	
4.a.2	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	33,2501865	
4.a.3	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	69,4017202	
4.a.4	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	8	
4.a.5	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
4.a.6	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	
4.i.1	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	
4.i.2	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	0	
4.i.3	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	0	
4.i.4	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	0	
4.j.1	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	90,6543713	
4.j.2	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	23,5325412	
4.j.3	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	66,7671439	
4.k.1	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	5,492757	
4.k.2	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	2,9321593	
4.k.3	Manajemen Keuangan	Assets management	0	

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Keterangan
4.k.4	Manajemen Keuangan	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	0	
4.l.1	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	98,0444464	
4.l.2	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	0	

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

2.3.1 Capaian Kinerja Utama

Berdasarkan Penetapan Kinerja Gubernur Bengkulu Tahun 2022 dan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : i.306.BAPPEDA Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2026, maka capaian kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

CAPAIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				CAPAIAN	PERSEN TASE
1.	Tujuan 1: Meningkatkan Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	4,7-5,3	4,62	98,29
1.1	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi (Triliun)	7,5 T	9,34	124,5
1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Sektor Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase Pertumbuhan sektor industri dan sektor perdagangan terhadap PDRB	5,8 %	2,83	48,79
2.	Tujuan 2: Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur	Persentase Ketercapaian pemenuhan	77	68,05	88,37

	Wilayah	Infrastruktur Wilayah			
2.1	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah	Persentase ketercapaian pemenuhan infrastruktur setrategis	73 %	58,64	80,32
		Persentase ketercapaian pemenuhan infrastruktur Dasar	81 %	77,46	95,62
3	Tujuan 3 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata	Indeks Gini	0,312-0,313	0,356	41,02
3.1	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	13,50-13,90 %	12,52	109,92
3.2	Menurunnya Pengangguran	Angka Pengangguran	3,0-3-5 %	3,11/agus	111,14
4.	Tujuan 4 : Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	4,7-5,3	4,62	98,29
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,09	73,45	103,3
4.1	Meningkatnya pertumbuhan Sektor Unggulan terhadap pertumbuhan Perekonomian Daerah	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pariwisata, sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB	5,2	34,03	654,42
4.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,09	73,45	103,3
5.	Tujuan 5 : Meningkatnya kuaitas layanan dan tata kelola pemerintah	Penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A	BB	96,06
5.1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	BB	B	98,64

		Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100
		Indeks Profesionalitas ASN	76	64,23	84,51
		Nilai indeks e – Govermen (SPBE)	3,2	3,92	122,5
5.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Pelayanan Publik	A-	B	96,09
6.	Tujuan 6 : Meningkatnya kualitas SDM dan Kesejahteraan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,0-75,5	74,91	99,88
6.1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,8	13,75	99,63
		Angka Rata-rata Lama sekolah	9,10	9,04	99,34
6.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,50	73,31	99,74
6.3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pengeluaran per kapaita	11,1	11,733	105,70
		Angka kemiskinan	13,50-13,90	12,52	109,92
7.	Tujuan 7: Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	74	73,31	99,06
	Meningkatnya toleransi umat beragama	Persentase Penyelesaian konflik antar umat beragama	100	100	100
8.	Tujuan 8 : Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan gender	71,5	70,06	97,98

		Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	2,5	2,7	108
	Meningkatnya Pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan Indeks pemberdayaan gender	0,05	-0,07	40
		Persentase penanganan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	97,5 %	100	102
9.	Tujuan 9 : Meningkatnya pemenuhan hak penyandang disabilitas	Persentase pemenuhan hak penyandang disabilitas yang difasilitasi	100	100	100
9.	Sasaran 9.1 Meningkatnya pemenuhan hak penyandang disabilitas	Persentase Pemenuhan hak penyandang disabiliats yang di fasilitasi	100	100	100
	Capaian Kinerja Provinsi Bengkulu tahun 2024				122,09

Tujuan 1
Meningkatnya Perekonomian Daerah

No	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja			
			Tahun 2023		Tahun 2024	
			Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,7-5,3	3,96	--	4,62	98,29

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025.

Perekonomian Daerah Berkelanjutan (PDB) adalah konsep perekonomian yang memadukan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan pelestarian lingkungan hidup. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya alam.

Pada RPJMD Provinsi Bengkulu 2021-2026, pada tujuan meningkatnya Perekonomian Daerah yang berkelanjutan dibentuk dengan 2 indikator yaitu; Indikator Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan 2 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) adalah tingkat peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu negara atau daerah selama jangka waktu tertentu yang dihitung secara tahunan. Laju ini dihitung sebagai persentase perubahan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan data BPS, Perekonomian Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang positif. Pada triwulan II tahun 2024, ekonomi Provinsi Bengkulu tumbuh sebesar 4,62%, pertumbuhan ini belum memenuhi target pada RPJMD 2021-2026 yaitu 4,7 - 5,3. Hal ini dapat dilihat pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bengkulu pada triwulan II tahun 2024 mencapai Rp 26,50 triliun, dan Rp13,91 triliun.

Sedangkan pada triwulan ke-III tahun 2024, ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan sebesar 4,57 persen meningkat sebesar 0,61 persen dari Triwulan III 2023 yaitu 3,96 persen. Pertumbuhan terjadi pada 16 lapangan usaha; tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,68 persen; diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,32 persen; dan Jasa Lainnya sebesar 9,24 persen serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan sebesar 2,62 persen.

Secara nasional pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu masih lebih redah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II tahun 2024 adalah 5,17 % sedangkan Provinsi Bengkulu triwulan II tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,62 %, namun demikian pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu masih menunjukan tren yang posistif dan stabil.

Beberapa sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada triwulan II tahun 2024 adalah:

- Sektor Transportasi dan Pergudangan: mengalami pertumbuhan sebesar 14,73%
- Sektor Pengeluaran Konsumsi Pemerintah: mengalami pertumbuhan sebesar 12,12%

Dalam analisisnya, perlu diingat bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti inflasi, pengangguran, dan kinerja sektor riil. Oleh karena itu, perlu dilakukan

evaluasi dan analisis yang lebih mendalam untuk memahami dinamika pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu

Sasaran 1.1
Meningkatnya Nilai Investasi

No	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja			
			Tahun 2023		Tahun 2024	
			Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Nilai Investasi	7.5 T	8 T	106,66	9,34 T	124,5

Sumber : DPMPTSP Prov. Bengkulu

Nilai Investasi (*investmen value*) adalah nilai dari suatu perusahaan atau saham (*business interest*) atau kepentingan dalam perusahaan yang bersifat spesifik terhadap seorang investor. Semakin naiknya investasi maka ekonomi daerah semakin meningkat Berdasarkan Tabel di atas, bahwa Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi diukur dengan indikator kinerja Nilai Investasi di Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2024 Niilai investasi yang masuk ke provinsi Bengkulu sebesar 9,34 T sedangkan pada tahun 2023 Nilai investasi di Provinsi Bengkulu sebesar 8 T di bandingkan dengan tahun lalu Nilai Investasi di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan sebesar 1,34 T, Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Penanaman modal dan Pelayananan terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota terus meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam melayani perizinan secara baik (memberikan karpet merah) kepada investor, selain itu juga interkoneksi penyelenggaran perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Sub mission (OSS) antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu juga di beri mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari

dalam maupun luar negeri melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Kenaikan

Nilai investasi di Provinsi Bengkulu berasal dari investor perusahaan baru atau investasi perusahaan lama yang melakukan penambahan modal di provinsi Bengkulu yaitu terutama di bidang perkebunan (karet, sawit) ,pertambangan(batu bara) dan kelistrikan.

Tabel 1.1.1

NILAI INVESTASI PROVINSI BENGKULU DARI TAHUN 2018 S.D 2024

NO	PERIODE	REALISASI INVESTASI PROVINSI BENGKULU	PERSENTASE PENINGKATAN
1	2018	6,7 T	219 %
2	2019	7,6 T	113,43 %
3	2020	8,16 T	107,3 %
4	2021	5,16 T	-63,24 %
5	2022	7,7 T	149,22 %
6	2023	8 T	103,89 %
7	2024	9,34 T	124 %

Sumber data : Release resmi BKPM RI

Ada beberapa hal yang telah di lakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menarik investor yang masuk ke provinsi Bengkulu yaitu :

a. Mempromosikan potensi-potensi yang ada di Provinsi Bengkulu untuk di kembangkan di dalam Negeri maupun luar negeri
b. Iklim berusaha yang kondusif yaitu menyangkut gangguan keamanan dan juga dengan peraturan peraturan yang jelas dan tidak merugikan Pembinaan terhadap Dunia usaha dan masyarakat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia

c. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui informasi realisasi penanaman modal sesuai format LKPM tiap tiga bulan sekali (triwulanan yang akan memudahkan pemerintah atau masyarakat memantau perkembangan penanaman modal.
d. Memberikan pelayanan perizinan prima dengan aparatur yang profesional dengan memberikan kemudahan ,kepastian dan transparansi proses perizinan dan non perizinan.

Pemerintah Provinsi Bengkulu melaui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan Program untuk indikator nilai investasi yaitu :

Program Pengembangan iklim Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal, Program Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dengan annggaran sebagai berikut :

- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 12.845.543.736,00 dan realisasi sebesar Rp. 12.391.715.758,00 (96,45%).

- Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari BKPM yaitu Program Penanaman Modal sebesar Rp. 234.407.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 226.614.000,00 (96,58%)

- Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari dana Dekon Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah di Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 94.253.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 94.199.450,00 (99,99%)

Sasaran 1.2

Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

No	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja			
			Tahun 2023		Tahun 2024	
			Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri dan sektor perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	5,8	5,7	105,55	3,4	58,62

Sumber : Badan Pusat Statistik

Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Sektor Industri terhadap PDRB. Jika dibandingkan Target Persentase Pertumbuhan Sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2024 sebesar 5,8 % dengan realisasi yang didapat sebesar 3,4% pada posisi triwulan III maka persentasi capaiannya tidak mencapai 100% yang artinya distribusi PDRB pada Sektor Industri di Provinsi Bengkulu belum mencapai target.

Sektor unggulan adalah sektor yang mampu mendorong pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang mensuplai inputnya maupun sektor yang memanfaatkan outputnya sebagai input dalam proses produksinya (Tri Widodo, 2006). Sektor unggulan sebagai sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak hanya mengacu pada lokasi secara geografis saja melainkan merupakan suatu sektor yang menyebar

dalam berbagai saluran ekonomi sehingga mampu menggerakkan ekonomi secara keseluruhan.

Sektor-sektor industri unggulan di Provinsi Bengkulu memberikan efek besar terhadap perekonomian daerah, namun dalam perkembangannya sektor ini membutuhkan kemampuan untuk berkembang dan menjadi lokomotif pertumbuhan bagi sektor-sektor lainnya. Dorongan pasar yang tinggi terutama dalam memenuhi permintaan ekspor akan mendorong sektor unggulan untuk dapat tumbuh lebih tinggi dan mendorong sektor lainnya untuk berkembang.

Pemerintah Provinsi Bengkulu pada Tahun 2024 melalui Dinas Peridustrian dan Perdagangan menetapkan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah dengan indikator persentase pertumbuhan sektor industri dan perdagangan dan ini merupakan indikator

baru dapat di jelaskan dengan sasaran-sasaran yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu :

1. Meningkatnya Nilai Produksi Industri dengan indikator nilai produksi industri besar dan nilai produksi industri kecil dan menengah.
2. Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri dengan indikator nilai perdagangan besar dan eceran
3. Meningkatnya Nilai perdagangan Luar Negeri dengan indikator Nilai Expor dan Persentase Peningkatan Nilai Expor.

Nilai Produksi Industri

Sektor industri konsisten memainkan peranan pentingnya sebagai penggerak dan penopang utama bagi perekonomian nasional. Bahkan dapat menyatakan bahwa sektor industri manufaktur merupakan sektor pendorong utama bagi Indonesia untuk keluar dari resesi. Pada tahun 2024 geliat sektor industri mulai bangkit kembali. Hal ini terlihat dari sejumlah kinerja baiknya antara lain realisasi investasi, capaian ekspor, kontribusi pajak, kontribusi terhadap PDB, dan peringkat Purchasing Managers Index (PMI). Meningkatnya Nilai Produksi Industri Besar", diukur dengan menggunakan dua indikator Kinerja yakni Nilai Produksi

Industri Besar dan Nilai Produksi Industri Kecil Menengah. Adapun pemaparan capaian kinerja sasaran dengan menggunakan masing – masing indikator akan dituangkan dalam tabel sebagai berikut ;

Tabel 1.2.1
NILAI PRODUKSI INDUSTRI

No	Uraian / Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi Th. 2023	Realisasi Th. 2024	% Capaian 2023
1	Nilai Produksi Industri Besar	Milyar Rupiah	11.700	9.576	5,360	55,97%
2	Nilai Produksi Industri Kecil Menengah	Milyar Rupiah	250	579	343	100%

a. Nilai Produksi Industri Besar

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor industri merupakan penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yaitu sekitar 50%. Sektor industri manufaktur merupakan subsektor industri yang paling dominan di Indonesia. Pada awal tahun 2024, Kementerian Perindustrian memproyeksikan pertumbuhan industri manufaktur mencapai 4,57%. Sektor industri manufaktur terdiri dari beberapa subsektor, diantaranya adalah industri tekstil, pakaian jadi, kulit dan barang dari kulit, kayu dan produk kayu, barang dari logam, mesin, dan lain-lain. Sektor industri di Indonesia masih cenderung terfokus pada industri pengolahan. Hanya sekitar 20% dari total produksi industri Indonesia yang merupakan produk jadi, sisanya merupakan bahan baku atau produk setengah jadi.

Jumlah Perusahaan dibidang Industri Besar di Provinsi Bengkulu per Desember Tahun 2024 adalah sejumlah 50 perusahaan. Dilihat dari Tabel 3.1 Mengingkatnya Nilai Produksi Industri Besar dengan uraian indikator sasaran Nilai Produksi Industri

Besar Tahun 2024 jika dibandingkan antara Target sebesar Rp.11.700 Milyar dengan Realisasi sebesar Rp. 5.360 Milyar maka persentasi Capaiannya adalah sebesar 55,97% artinya Nilai Produksi Industri Besar tidak mencapai Target 100%. Sedangkan jika dibandingkan antara Realisasi Tahun 2024 yang nilainya Rp. 5.360 Milyar dengan Realisasi Tahun 2023 yang nilainya Rp. 9.576 Milyar dan Tahun 2022 yang nilainya Rp. 11.500 Miliyar artinya Nilai Produksi Industri Besar Tahun 2024 mengalami penurunan. Tidak terdapat target jangka menengah maupun standar nasional untuk perbandingan realisasi nilai produksi industri besar. Analisis penyebab Nilai Produksi Industri Besar Tahun 2024 tidak mencapai 100% dari Target atau mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Menurunnya kinerja industri makanan dan minuman, khususnya CPO karena terbatasnya Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Nilai Produksi Industri Besar adalah sebagai berikut :

- Program/ kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian target Nilai Produksi Industri Besar yakni Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Unit Industri Besar yang targetnya sebesar 11,1 % namun realisasinya hanya sebesar 10,45 % atau 94,14 % dari target. Kegagalan tersebut dikarenakan faktor pendorong berupa adanya Adanya perlambatan perekonomian global yang berimbas pada nilai produksi industri akibat dipengaruhi oleh penurunan nilai IKI (Indeks Kepercayaan Industri) dan Jumlah Produksi sawit dan karet menurun dikarenakan faktor iklim yang kurang baik sehingga jumlah hasil produksi industri CPO, karet dan produk turunannya ikut turun yang semua itu berimbas pada kecilnya nilai persentase pertumbuhan unit industri besar di Provinsi Bengkulu.

- Program/ kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian target Nilai Produksi Industri Besar yakni Program Pengelolaan Sitem Informasi Nasional dengan indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Unit Industri Besar yang targetnya sebesar 39 % namun realisasinya hanya sebesar 39 % atau 100 dari target.

b. Analisis Indikator Sasaran Nilai Produksi Industri Kecil Menengah

Jumlah Industri Kecil Menengah di Provinsi Bengkulu yang terdaftar di SIINAS per 31 Desember 2024 adalah sejumlah 535 IKM. Dilihat dari Tabel 3.1 Indikator Sasaran 1 Meningkatnya Nilai Produksi Industri Besar dengan uraian indikator sasaran Nilai Produksi Industri Kecil Menengah Tahun 2024 jika dibandingkan antara Target sebesar Rp. 200 Milyar dengan Realisasi sebesar Rp. 579 Milyar maka persentasi Capaiannya adalah sebesar 100% artinya Nilai Produksi Industri Kecil Menengah telah mencapai Target 100%.

Sedangkan jika dibandingkan antara Realisasi Tahun 2024 yang nilainya Rp.579,8 Milyar dengan Realisasi Tahun 2023 yang nilainya Rp.105,5 Milyar serta Tahun 2022 yang nilainya Rp. 101 Milyar artinya Nilai Produksi Industri Kecil Menengah Tahun 2024 mengalami peningkatan yang tinggi.

Selain itu jika dibandingkan Realisasi tahun 2024 yang nilainya 579,8 Milyar dengan target jangka menengah yang nilainya Rp.350 Milyar artinya realisasi Nilai Produksi Industri Kecil Menengah tahun 2024 telah mencapai 100% dari target jangka menengah OPD. Tidak terdapat standar nasional secara khusus untuk perbandingan realisasi nilai produksi industri besar tahun 2024 karena hanya terdapat penjelasan secara umum mengenai jumlah SNI (Standar Nasional Indonesia) bidang industri yang telah ditetapkan yakni sebanyak 5.062 atau 37% dari total jumlah SNI sebanyak 13.518.

Analisis penyebab Nilai Produksi Industri Kecil Menengah Tahun 2024 telah mencapai 100% dari Target atau mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

- Dukungan persebaran Jumlah Kelompok Pengrajin dan Usaha Bersama yang dibina (Dekranasda).
- Jumlah IKM dan sentra yang Berpotensi yang di bina sehingga hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan IKM di provinsi Bengkulu secara signifikan.
- Jumlah SDM IKM yang ditingkatkan kapasitasnya sehingga kualitas dan kuantitas yang dihasilkan IKM tersebut juga meningkat di berbagai jenis IKM yang meliputi Pangan, Kimia Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang, Logam, Mesin Elektronika, dan Alat Angkut.
- Dukungan persebaran dan penguatan industri. Merupakan indikator dalam rangka melakukan kegiatan pembinaan industri Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Dengan target sebanyak 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang terealisasi semuanya, dimana pembinaan industri di Provinsi Bengkulu dilakukan baik melalui APBD dan APBN dengan tetap memperhatikan asas pemerataan. Diharapkan melalui pembinaan yang merata ini dapat mendorong persebaran pengembangan industri di Provinsi Bengkulu terutama IKM dan industri unggulan Provinsi Bengkulu kedepan.
- Dukungan kebijakan pengembangan industri yang disediakan. Dengan telah rampungnya naskah akademis PERDA RPIP Bengkulu 2017 – 2037 maka pada tahun 2018 telah dilakukan beberapa kali sidang dengan Komisi terkait rancangan PERDA RPIP Bengkulu. Selanjutnya telah dilaksanakan uji materi di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Dalam Negeri dimana pada saat ini Rancangan PERDA RPIP dalam tahap perampungan final dengan beberapa perbaikan dari hasil uji materi. Diharapkan dengan disahkannya PERDA RPIP Bengkulu 2017-2037.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan adalah dengan memberikan dukungan Fasilitasi Industri, Akses Pasar Nasional dan Internasional melaui Pameran produk IKM tingkat daerah, nasional maupun tingkat Internasional. Dengan adanya kegiatan pameran maka pemasaran dan promosi produk IKM yang ada di Provinsi Bengkulu akan lebih mudah dilaksanakan sehingga produk IKM dapat lebih dikenal pasar

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yakni efisiensi dalam penggunaan bahan baku seperti kayu, logam, besi dan lainnya yang diolah menjadi produk IKM atau menjadi alat- alat dalam menghasilkan produk jadi. Dengan adanya efisiensi bahan baku maka jumlah hasil produksi akan semakin optimal. Selain itu efisiensi sumber daya manusia juga harus ditingkatkan melalui pembinaan- pembinaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah baik pemerintah kabupaten, kota, provinsi atau kementerian terkait kepada para pengrajin IKM sehingga kemampuan dan kreatifitas pengrajin akan terus meningkat yang berimbas pada hasil produksi yang juga optimal.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Nilai Produksi Industri Kecil Menengah adalah sebagai berikut :

- Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target Nilai Produksi Kecil Menengah yakni Program Kegiatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan Realisasi sebesar 100 WUB (Wirausaha Baru) dan Target sebesar 100 WUB artinya sudah tercapai 100%. Keberhasilan tersebut dikarenakan faktor pendorong berupa adanya Fasilitasi dan Pembinaan

  Industri yang baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah baik pemerintah kabupaten, kota, provinsi atau kementerian terkait kepada para pengrajin IKM.

Gambar 2. Jumlah Perusahaan Industri Pengolahan Besar dan Sedang Provinsi Bengkulu Tahun 2023 dan 2024 Menurut Kabupaten/Kota

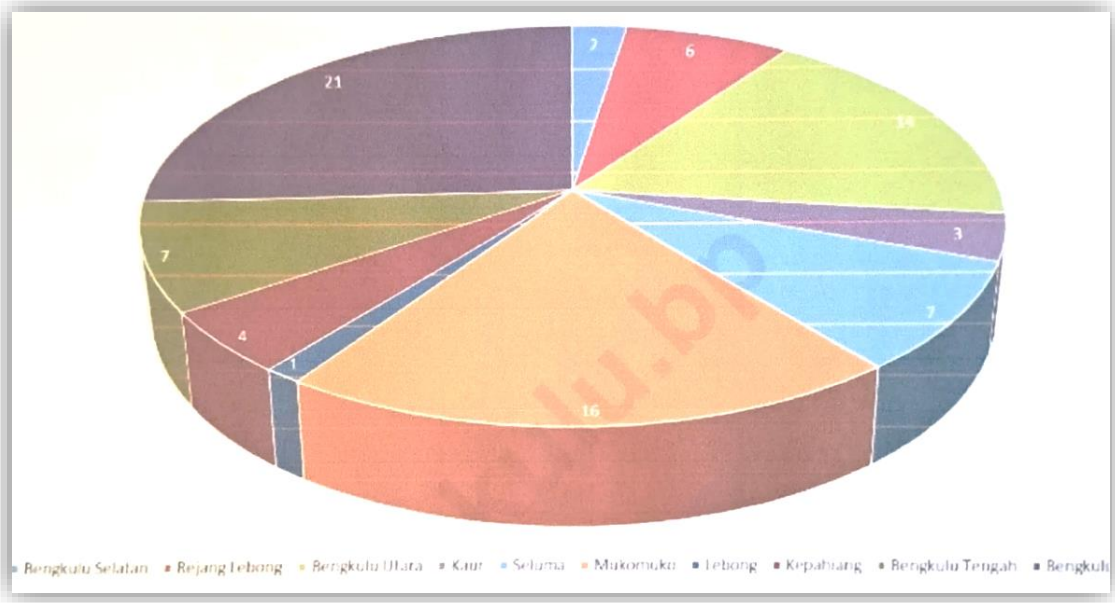

Sumber data : BPS Tahun 2024

Gambar 3. Jumlah Perusahaan Industri Pengolahan Besar dan Sedang Provinsi Bengkulu Tahun 2023 dan 2024 Menurut KBLI (Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia)

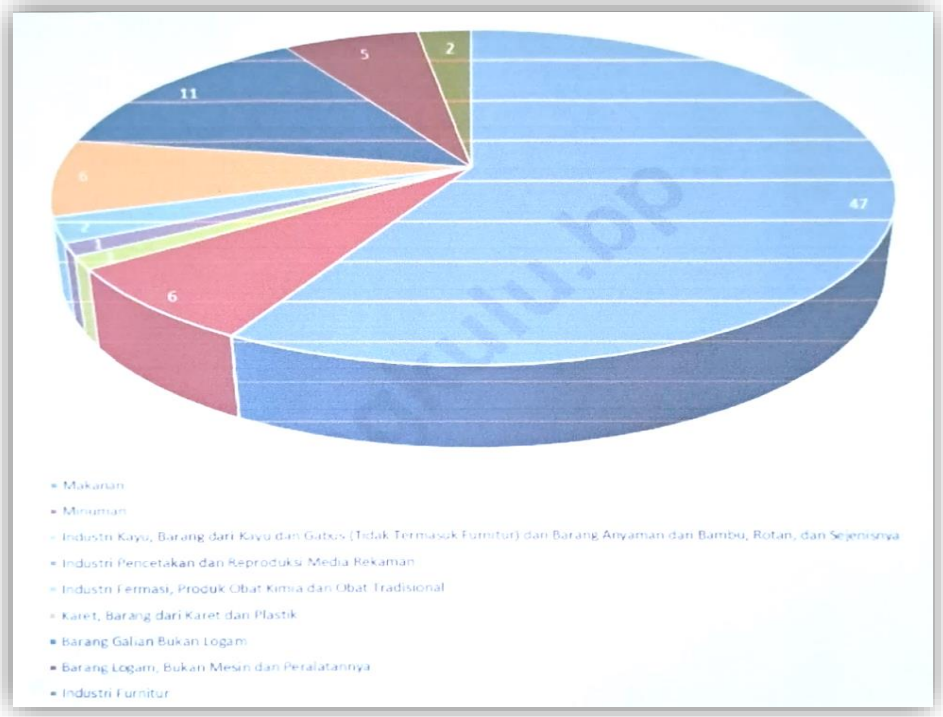

Sumber data : BPS Tahun 2024

Meningkatnya Nilai Perdagangan

Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB. Jika dibandingkan Target Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2024 sebesar 2,4% dengan realisasi yang didapat sebesar 2,9% maka persentasi capaiannya sebesar 100% yang artinya distribusi PDRB pada Sektor Perdagangan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai target.Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri" dan "Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri". Tahun 2024 akan dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2.2

Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri

No	Uraian / Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi Th. 2023	Realisasi Th. 2023
1	Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	Milyar Rupiah	6.000	7.232	7.983

Peranan sektor perdagangan antara lain memperlancar arus barang dan jasa, mengusahakan dan menjaga tingkat harga menjadi relatif stabil dan peningkatan nilai tambah yang dihasilkan serta kemampuannya menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Sektor perdagangan besar meliputi perusahaan atau industri yang cenderung membeli dalam jumlah besar dan langsung dari pabrik untuk dijual kembali seperti grosir, eksportir, dan importir. Sedangkan pedagang eceran membeli dari pedagang besar dan menjualnya secara langsung ke konsumen secara eceran.

a. Analisis Indikator Sasaran Nilai Perdagangan Besar dan Eceran

Dilihat dari Tabel 3.2 Indikator Sasaran 2.1 Mengingkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri dengan uraian indikator sasaran Nilai Perdagangan Besar dan Eceran Tahun 2024 jika dibandingkan antara Target sebesar Rp.6.000 Milyar dengan Realisasi sebesar Rp.7.983 Milyar maka persentasi Capaiannya adalah sebesar 100% artinya Nilai Perdagangan Besar dan Eceran telah mencapai Target 100%.

Sedangkan jika dibandingkan antara Realisasi Tahun 2024 yang nilainya Rp.7.983 Milyar dengan Realisasi Tahun 2023 yang nilainya Rp.7.232 Milyar serta Tahun 2022 yang nilainya Rp.9.215 Milyar artinya Nilai Perdagangan Besar dan Eceran Tahun 2024 mengalami penurunan. Selain itu jika dibandingkan Realisasi tahun 2024 yang nilainya Rp.7.983 Milyar dengan target jangka menengah yang nilainya Rp.7.000 Milyar artinya realisasi Nilai Perdagangan Besar dan Eceran tahun 2024 telah mencapai 100% dari target jangka menengah OPD. Tidak terdapat standar nasional secara khusus untuk perbandingan realisasi Nilai Perdagangan Besar dan Eceran tahun 2024 karena hanya ada penjelasan secara umum mengenai Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh produsen atau pelaku perdagangan baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja perdagangan.

Analisis penyebab Nilai Perdagangan Besar dan Eceran Tahun 2024 mencapai 100% dari Target adalah sebagai berikut :

- Tersedianya Data Harga dan Stock, Bapok dan Banting di Kab/ Kota se-Provinsi Bengkulu
- Jumlah Barang Pokok dan Barang penting yang di pantau tercapai sesuai target yakni sebanyak 47 jenis barang dengan pemantauan secara konsisten dan berkesinambungan.
- Jumlah Pasar Murah yang dilaksanakan sesuai target yakni sebanyak 10 kali penyelenggaraan pasar murah dalam satu tahun.
- Konsistensi Kegiatan Pelaksanaan Pasar Murah menghadapi Hari Besar Keagamaan setiap tahunnya.

- Melakukan monitoring Stok Bahan Pokok Strategis yang aktif dilaksanakan setiap hari selama 5 (lima) hari kerja.
- Melakukan Pembinaan Pasar secara berkala.

Adapun analisis penyebab Nilai Perdagangan Besar dan Eceran Tahun 2024 nilai realisasinya turun jika dibandingkan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Ditahun 2024 terjadi inflasi dari ambang batas yang ditetapkan 0,84 % karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,27 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,74 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,28 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,32 persen; kelompok transportasi sebesar 0,38 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,60 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,91 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,80 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,44 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,42 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,71 persen.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan adalah penyelenggaraan pasar murah yang menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (pra sejahtera) pada saat menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan nasional. Kegiatan ini sekaligus merupakan bentuk kepedulian Pemerintah dalam membantu dan menjaga daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah, sekaligus sebagai upaya untuk menekan dampak kenaikan harga barang kebutuhan pokok menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yakni memaksimalkan sumber daya manusia seperti melakukan kerjasama dengan pihak distributor dan Bulog dalam pemenuhan barang-barang kebutuhan pokok yang akan dipasarkan kepada masyarakat melalui kegiatan pasar murah.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Nilai Perdagangan Besar dan Eceran adalah sebagai berikut :

- Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target Nilai Perdagangan Besar dan Eceran yakni Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan realisasi pencapaiannnya sebesar 100%.

  Keberhasilan tersebut dikarenakan faktor pendorong berupa adanya kegiatan pengawasan Barang Beredar/ Jasa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Melalui pengawasan tersebut maka perlindungan konsumen jg tercapai optimal. Kegiatan yang dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup, diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masing-masing. Pengawasan barang dan/atau jasa dilaksanakan oleh Tim Operasional dan Tim Terpadu di pasar tradisional dan pasar modern. Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian atau pemenuhan terhadap persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI), label, serta mengawasi produk yang tidak layak konsumsi, misalnya dalam bentuk kemasan yang sudah rusak ataupun kadaluarsa.

  Pengawasan Barang sesuai SNI dalam hal barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan faktor sebagai berikut :

- Jumlah Produk Unggulan yang diuji sesuai dengan target

  Adapun produk unggulan yang diuji terdiri dari beberapa komoditi yang terdiri dari CPO, SIR (karet), biji kopi, biji kakao, dan karet konfensional. Hal yang meliputi pengujian mutu yakni memberikan pelayanan pengujian mutu barang, serta pelaksanaan kegiatan pengujian, pelaporan hasil pelaksanaan pengujian mutu barang dan perencanaan pengembangan laboratorium pengujian mutu barang.

- Jumlah Mutu Produk yang di verifikasi sesuai dengan target

  Untuk tarif verifikasi pengujian mutu produk agar mendapat sertifikat jaminan mutu yakni sebagai berikut :

- Komoditi SIR tarifnya : Rp. 500.000,-
- Komoditi Karet Konvensional : Rp. 150.000,-
- Komoditi CPO : Rp. 750.000,-
- Komoditi Biji Kopi : Rp. 250.000,-
- Komoditi Biji Kakao : Rp. 250.000,-

Tercapainya Peningkatan Pengawasan Barang sesuai SNI ini terlaksana pada UPTD PPMB (Pembinaan dan Pengawasan Mutu Barang) yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pengendalian dan pengawasan standarisasi laboratorium, penjaminan dan pengawasan pelaksanaan pengujian mutu barang serta pengembangan ruang lingkup pelayanan pengujian terstandar sesuai dengan undang-undang yang berlaku. UPTD menerapkan standar SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) menjadi LP-025-IDN. Adapun proses untuk Perusahaan mendapat sertifikat pengujian bisa dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dapat mendatangi perusahaan (jemput bola) atau bisa juga pihak perusahaan yang langsung mendatangi kantor UPTD PPMB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi untuk menyerahkan sampel komoditi perusahaan yang akan diuji mutunya.

- Program/ kegiatan yang menunjang penurunan pencapaian realisasi Nilai Perdagangan Besar dan Eceran jika dibandingkan tahun lalu yakni Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, hal tersebut dikarenakan faktor pendorong berupa tidak tersedianya sarana dan prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi.

Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri

Peranan perdagangan luar negeri dalam proses pembangunan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan penghasilan devisa, mentransfer modal dan teknologi dari luar negeri dan dapat mengembangkan industri baru di dalam negeri atau industriliasi.

Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri”, sasaran ini diukur dengan menggunakan dua indikator yakni Persentase Peningkatan Nilai Ekspor dan Nilai Ekspor. Adapun pemaparan capaian kinerja sasaran dengan menggunakan indikator tersebut sesuai Perjanjian Kinerja Kepala PD Tahun 2024 akan dituangkan dalam tabel sebagai berikut ;

Tabel 3.3 Indikator Kinerja
Sasaran 2.2 Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri

No	Uraian / Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi Th. 2023	Realisasi Th. 2024
1	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	Persen (%)	12,2 %	9,5 %	7,62 %
2	Nilai Ekspor	Juta Dolar ($)	275	213	173

Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri

Jumlah pengusaha Eksportir di Provinsi Bengkulu per Desember Tahun 2024 adalah sejumlah 21 Eksportir. Dilihat dari Tabel 3.3 Indikator Sasaran 2.2 Mengingkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri terdapat dua uraian indikator sasaran yakni “Persentase Peningkatan Nilai Ekspor” dan “Nilai Ekspor”. Untuk uraian indikator sasaran Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Tahun 2024 jika dibandingkan antara Target sebesar 12,2 % dengan Realisasi sebesar 7,62 % maka persentasi Capaiannya adalah sebesar 62,45 % artinya Persentase Peningkatan Nilai Ekspor tidak mencapai Target 100%. Sedangkan jika dibandingkan antara Realisasi Tahun 2024 yang nilainya 7,62 % dengan Realisasi Tahun 2023 yang nilainya 9,5% serta Tahun 2022 yang nilainya 10 % artinya Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Tahun 2024 mengalami penurunan. Kemudian jika dibandingkan Realisasi tahun 2024 yang nilainya 7,62 % dengan target jangka menengah yang nilainya 32.5% artinya realisasi Persentase Peningkatan Nilai Ekspor tahun 2024 belum mencapai target jangka menengah OPD.

Selain itu untuk uraian indikator sasaran Nilai Ekspor Tahun 2024 jika dibandingkan antara Target sebesar US$.275 Juta dengan Realisasi sebesar US$.173 Juta maka persentasi Capaiannya adalah sebesar 62,90 % artinya Nilai Ekspor tidak mencapai Target 100%. Sedangkan jika dibandingkan antara Realisasi Tahun 2024 yang nilainya US$.173 Juta dengan realisasi Tahun 2023 yang nilainya US$.213 Juta artinya Nilai Ekspor Tahun 2024 juga mengalami penurunan dan jika dibandingkan realisasi Tahun 2024 dengan realisasi Tahun 2022 yang nilainya US$.267 Juta artinya Nilai Ekspor Tahun 2024 mengalami penurunan. Kemudian jika dibandingkan Realisasi tahun 2024 yang nilainya US$.173 Juta dengan target jangka

menengah yang nilainya US$.220 Juta artinya realisasi Nilai Ekspor tahun 2024 belum mencapai target jangka menengah OPD.

Tidak terdapat standar nasional secara khusus untuk perbandingan realisasi Nilai Perdagangan Luar Negeri tahun 2024 karena hanya ada penjelasan secara umum mengenai Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh produsen atau pelaku perdagangan baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja perdagangan.

Analisis penyebab Persentase Peningkatan Nilai Ekspor dan Nilai Ekspor Tahun 2024 tidak mencapai 100% dari Target atau mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

- Jumlah permintaan Ekspor Cangkang sawit dan batu bara yang menurun
- Harga ekspor batu bara turun secara global sehingga para eksportir menahan untuk tidak mengekspor karena akan mengalami kerugian bagi Perusahaan Eksportir.
- Belum ada komoditi tambahan yang lain dan komoditi yang ada masih bahan mentah.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan adalah melaksanakan pameran produk Ekspor, mengikuti misi dagang, melakukan pembinaan baik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, kota ,provinsi maupun Kemeterian Perdagangan untuk menembus pasar ekspor baru.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yakni memaksimalkan efisiensi dalam penggunaan bahan cangkang sawit, batu bara dan lainnya yang diolah menjadi produk ekspor. Dengan adanya efisiensi bahan baku maka jumlah hasil produksi akan semakin optimal. Selain itu efisiensi sumber daya manusia juga harus ditingkatkan melalui pembinaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah baik pemerintah kabupaten, kota, provinsi atau kementerian terkait kepada para eksportir dan melibatkan para eksportir dalam Pameran dan Misi Dagang baik di taraf Nasional maupun Internasional sehingga kemampuan eksportir akan terus meningkat yang berimbas pada hasil produksi yang juga optimal.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Persentase Peningkatan Nilai Ekspor dan Nilai Ekspor adalah sebagai berikut :

Program/ kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian target Persentase Peningkatan Nilai Ekspor dan Nilai Ekspor yakni Program Pengembangan Ekspor dimana realisasinya tidak mencapai 100%. Kegagalan tersebut dikarenakan faktor pendorong berupa Jumlah permintaan Ekspor Cangkang sawit dan batu bara yang menurun dan harga ekspor batu bara juga turun secara global sehingga para eksportir menahan untuk tidak mengekspor karena akan mengalami kerugian bagi Perusahaan Eksportir.

Berikut faktor- faktor yang dapat mendorong produsen atau pelaku usaha melakukan kegiatan ekspor melalui pameran produk ekspor antara lain:

1. Komoditas Tradisional

   Biasanya sebuah perusahaan memproduksi suatu komoditas sebagai lanjutan atau sisa-sisa peninggalan ekonomi jaman kolonial seperti karet, kopi, teh, lada, tengkawang, timah, tembaga dan hasil tambang sejenis lainnya. Hal ini kemungkinan berlanjut menjadi kegiatan ekspor belakangan ini.

2. Optimalisasi Laba

   Selain menjual suatu produk dalam negeri, dengan ekspor, sebuah perusahaan mampu memperluas daerah penjualan sampai ke luar negeri, selain itu jenis barang yang ditawarkan menjadi tidak terbatas untuk konsumen dalam negeri saja.

3. Penelusuran Pasar

   Bagi perusahaan yang mempunyai pasar domestik yang kuat, ekspor merupakan peluang untuk melakukan diversifikasi pasar yang dapat memperkuat kedudukan komoditas yang diperdagangkan.

4. Pemanfaatan kelebihan kapasitas (*Excess Capacity*)

   Jika kapasitas produksi suatu industri masih belum melebih kapasitas mesin maka sisa kapasitasnya (*idle capacity*) dapat digunakan untuk memenuhi pasar ekspor.

5. *Export Oriented Products*

   Terdapat industri-industri padat karya yang sengaja dipindahkan dari Negara-negara industri seperti Jepang, Korea, Taiwan atau Singapura ke Indonesia dengan tujuan relokasi industri pabrik sepatu, *garment*, dan sejenisnya.

6. Wisma Dagang atau *Trading House*

   Saat ini Pemerintah mengembangkan konsep *trading house*, seperti yang dikembangkan Jepang, sehingga akan memudahkan eksportir dalam melakukan penetrasi pasar Internasional. *Trading House* ini akan membantu eksportir menganalisis pasar atau mengidentifikasi Pembeli dan memberikan informasi lainnya yang bermanfaat terkait dengan kondisi pasar di Negara di mana wisma tersebut berada.

7. Komoditas Berdaya Saing Tinggi

   Produk-produk yang berbahan asli Indonesia dan mempunyai keunggulan tersendiri (*absolute advantage*) atau produk lain yang memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) memiliki peluang untuk pasar ekspor. Misalnya bahan-bahan seperti karet alam, kayu hutan tropis, agrobisnis, kerajinan dan lainnya, semua memiliki daya saing yang cukup tinggi di pasar ekspor.

Tujuan 2
Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah

No	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja			
			Tahun 2023		Tahun 2024	
			Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Persentase ketercapaian pemenuhan infrastruktur wilayah	77	-	-	68,05	88,37

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel diatas, tolak ukur pencapaian Tujuan Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah dapat diukur melalui indikator Persentase ketercapaian pemenuhan infrastruktur wilayah, dengan analisis sebagai berikut :

Infrastruktur wilayah adalah semua fasilitas dan prasarana yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah atau swasta untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan di suatu wilayah. Infrastruktur wilayah dapat mencakup; Jalan dan jembatan, Bandara dan pelabuhan, Sistem transportasi umum, Jaringan listrik dan telekomunikasi, Sistem penyediaan air bersih, Sistem pengelolaan limbah, Fasilitas kesehatan dan pendidikan, Fasilitas rekreasi dan pariwisata dan Sistem keamanan dan keselamatan.

Infrastruktur wilayah memiliki peran penting dalam Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas, Meningkatkan efisiensi dan produktivitas, Meningkatkan kualitas hidup penduduk, Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Infrastruktur wilayah Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 mengalami beberapa perkembangan. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2024, tema yang diusung adalah Penguatan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Infrastruktur Ekonomi dan Pengembangan Komoditas Unggulan didukung oleh SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Beberapa prioritas pembangunan yang dilakukan Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 antara lain:

1. Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing
2. Pengembangan Infrastruktur yang Tangguh dan Berkelanjutan serta Perluasan Konektivitas untuk Pemerataan
3. Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi
4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintah
5. Natural Bengkulu (Pengembangan Pariwisata yang Integratif dan Kompetitif) dan Ekonomi Kreatif Mempercepat Transformasi

Pada tahun 2024 target capaian Wilayah Provinsi Bengkulu adalah 77 dengan capaian 68,05 atau tercapai 88,37 %. Capaian infrastruktur wilayah provinsi Bengkulu menurun 1,97 poin dari capaian tahun sebelumnya, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pada capaian sektor-sektor pendukungnya.

Secara nasional tidak ditemukan data secara spesifik tentang data infrastruktur wilayah sekala nasioanal, sehingga tidak ada data yang bisa dibandingkan dengan indikator persentase ketercapaian pemenuhan infrastruktur wilayah provinsi Bengkulu. Namun perbandingan data dapat dilihat pada setiap sektor pada capaian infrastruktur bendukungnya.

Provinsi Bengkulu menetapkan tujuan meningkatnya pemenuhan Infrastruktur wilayah dengan sasaran yang sama diukur dengan 2 indikator, yaitu persentase ketercapaian pemenuhan infrastrukur strategis dan persentase ketercapaian pemenuhan infrastrukut dasar.

Sasaran 2.1

Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah

No	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja			
			Tahun 2023		Tahun 2024	
			Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Persentase ketercapaian pemenuhan infrastruktur strategis	73 %	63,41	91,89	58,64	80,32
2.	Persentase ketercapaian pemenuhan infrastruktur dasar	81 %	76,64	99,53	77,46	95,62

Sumber : Dinas PUPR dan Perkim

Berdasarkan tabel di atas, tolak ukur pencapaian sasaran meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah dapat diukur melalui indikator antara lain sebagai berikut :

1. Persentase Pemenuhan ketercapaian Infrasturuktur Strategis

Berdasarkan RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2021 – 2026, target pada indikator persentase pemenuhan ketercapaian infrastrutur strategis tahun 2024 dinaikan 4 % dari tahun 2023 manjadi 73 %. Dari target tersebut capaian tahun 2024 adalah 58,64 %, capaian ini menurun dari capaian tahun yang lalu. Untuk mengukur ketercapaian target indikator tersebut didukung oleh 2 komponen, yaitu Persentase Pemenuhan Pengembangan, Pelayanan Transfortasi dan persentase jalan provinsi kondisi mantap.

Pesentase pemenuhan Pengembangan dan Pelayanan Transportasi

Untuk mengukur ketercapaian persentase pemenuhan pengembangan dan pelayanan tranfortasi Pemerintah Provinsi Bengkulu dilihat dari penyelenggaraan aktifitas transportasi antar wilayah baik lokal, dalam daerah maupun luar daerah.

Di Provinsi Bengkulu ada tiga pelabuhan laut yaitu pelabuhan Pulau Baai, pelabuhan malakoni dan pelabuhan penyeberangan kahyapu; ketiga pelabuhan laut ini selalu ditingkatkan sarana dan prasarana serta fasiitasnya karena mengingat hanya 3 titik inilah keluar dan masuknya transportasi dari sisi transportasi laut yang ada di provinsi Bengkulu. Selain itu untuk menunjang trasportasi udara dalam wilayah provinsi ada bandara Enggano dan Bandara di Kabupaten Mukomuko.

Untuk meningkatkan manfaat pelabuan dan bandara tersebut Provinsi Bengkulu berupaya melakukan pengembangan dengan meningkatkan fasilitas transportaasi udara, laut maupun darat (akses jalan) dan peningkatan fasilitas keselamatan dengan tujuan agar terpenuhinya pelayanan transportasi terhadap masyarakat dan distribusi logistik provinsi Bengkulu.

Pada tahun 2024 persentase Pemenuhan pengembangan dan pelayanan trasnportasi di Provinsi Bengkulu mencapai 65,80 % meningkat 1,27 % dari tahun 2023. Peningkatan ini didukung dengan berita resmi statistik bahwa terjadi peningkatan jumlah layanan trasnportasi laut maupun udara secara signifikan di wilayah provinsi Bengkulu. Indikator ini merupakan indikator daerah khusus daerah Provinsi Bengkulu, sedangkan daerah lain tidak menjadikan indikator ini menjadi ukuran keberhasilan pembangunan infrastruktur wilayah maka referensi perbadingan data pada inidkator ini tidak ada.

Berdasarkan data BPS, Jumlah **lalu lintas angkutan laut** di Provinsi Bengkulu selama tahun 2024 adalah 2.115 kapal naik 8,91 persen persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Begitupun dengan jumlah jumlah penumpang angkutan laut meningkat sebanyak sebanyak 20.803 orang atau naik 6,11 persen dibandingkan jumlah penumpang tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk lalu lintas barang yang dibongkar-muat melalui Pelabuhan Pulau Baai tahun 2024 sebanyak 4.371.382 ton sedangkan pada tahun 2023

adalah 3.348.850 ton sehingga ada peningkatan bongkar-muat barang pada tahun 2024 sebesar 0,41 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.1.1 Perkembangan Lalu Lintas Kapal Laut, Penumpang, dan Barang Melalui Pelabuhan Pulau Baai, Desember 2024

Rincian	Satuan	Desember 2023	November 2024	Desember 2024	Perubahan Des '24 terhadap Nov '24 (%)	Perubahan Des '24 terhadap Des '23 (%)	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kapal Laut	Unit	203	241	192	-20,33	-5,42	1.942	2.115
Penumpang								
Datang	Orang	1.116	573	645	12,57	-42,20	8.718	9.031
Berangkat	Orang	1.192	704	512	-27,27	-57,05	10.888	11.772
Total	Orang	2.308	1.277	1.157	-9,40	-49,87	19.606	20.803
Barang								
Bongkar	Ton	31.258	31.175	33.369	7,04	6,75	473.526	284.859
Muat	Ton	494.852	442.068	420.314	-4,92	-15,06	3.880.053	4.086.523
Total	Ton	526.110	473.243	453.683	-4,13	-13,77	4.353.579	4.371.382

Sumber data: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Grafik. 2.1.1

Lalu Lintas Penumpang Angkutan Laut di Provinsi Bengkulu 2022–2024(Orang)

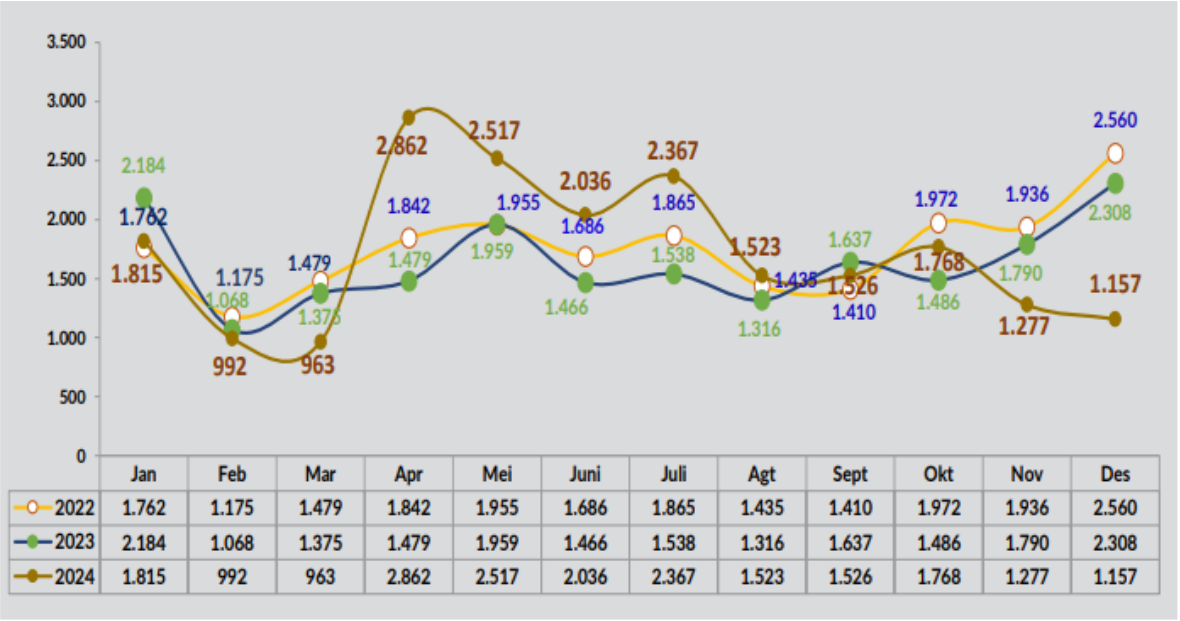

Untuk transportasi udara di Provinsi Bengkulu yang beroperasi di bandara Fatmawati selama tahun tahun 2024 sebanyak 4.780 penerbangan atau naik 2,66

persen dibandingkan taun 2023 yaitu sebanyak 4.656 penerbangan, namun Lalu lintas penumpang di Bandara Fatmawati Soekarno mengalami penurunan sebanyak 1,21 persen, jumlah lalu lintas penumpang tahun 2024 sebanyak 600.215 orang sedangkan tahun 2023 adalah 607.539 orang. Selanjutnya untuk bongkar-muat barang melalui transportasi udara Bandara Fatmawati Soekarno pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.743.698 kg atau naik 5,00 persen dibandingkan jumlah barang yang dibongkar-muat pada periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 1.660.740 kg.

Sedangkan transportasi udara yang dikelolah oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu yaitu melalui bandara Mukomuko pada bulan Desember 2024, terdapat 36 penerbangan dengan jumlah penumpang 298 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan november ditahun yang sama.

Untuk transportasi udara pada Bandara Enggano pada Desember 2024 terdapat 18 penerbangan dengan jumlah penumpang sebanyak 209 orang naik sebesar 41,22 % dibanding bulan november tahun yang sama yaitu sebanyak 148 orang.

Tabel 2.1.2

Perkembangan Lalu Lintas Angkutan Udara dan Penumpang Melalui Bandara Mukomuko dan Bandara Enggano, Desember 2024

Rincian	Satuan	Desember 2023	November 2024	Desember 2024	Perubahan Des '24 terhadap Nov '24 (%)	Perubahan Des '24 terhadap Des '23 (%)	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Bandara Mukomuko								
Penerbangan								
Berangkat	Unit	17	18	18	0,00	5,88	212	209
Datang	Unit	17	18	18	0,00	5,88	212	208
Total	Unit	34	36	36	0,00	5,88	424	417
Penumpang								
Berangkat	Orang	160	186	155	- 16,67	- 3,13	1 835	1 979
Datang	Orang	137	163	143	- 12,27	4,38	1 416	1 621
Total	Orang	297	349	298	- 14,61	0,34	3 251	3 600
Bandara Enggano								
Penerbangan								
Berangkat	Unit	6	8	9	12,50	50,00	103	107
Datang	Unit	6	8	9	12,50	50,00	103	107
Total	Unit	12	16	18	12,50	50,00	206	214
Penumpang								
Berangkat	Orang	67	86	114	32,56	70,15	1.126	1.181
Datang	Orang	60	62	95	53,23	58,33	1.016	1.005
Total	Orang	127	148	209	41,22	64,57	2.142	2.186

Sumber data: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Grafik. 2.1.2

Infografis Perkembangan Transportasi Provinsi Bengkulu, Desember 2024

Sumber data: Badan Pusat Statistik

Sebagai upaya pengembangan dan meningkatkan pelayanan trasportasi, Provinsi Bengkulu melalui Dinas Perhubungan didukung oleh program

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi dengan output persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ provinsi
2. Penyediaan perlegkapan jalan di jalan provinsi
3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jalan provinsi

Adapun dukungan anggaran dari APBD Provinsi untuk program tersbeut adalah sebesar RP. 1.087.000.000,- dengan realisasi Rp. 1.054.547.509,-

Ada beberapa hal yang sudah dilakukan untuk ketercapaian pemenuhan fasilitas darat, yaitu :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelabuhan-pelabuhan dan terminal-terminla teknis
2. Melakukan pengawasan terhadap kapal pelayaran rakyat
3. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha di pelabuhan
4. Melakukan pengawasan terhadap perizinan kapal
5. Melakukan rapat dan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pemenuhan infrastruktur setrategis terhadap perhubungan laut dan penyebrangan
6. Telah di lakukannnya peningkatan Dermaga Kayapu dan Malakoni dari kapal 1000 kt menjadi 2.000 Kt oleh Kementerian Perhubungan RI

Pesentase Jalan Provinsi Kondisi Mantap

Persentase jalan provinsi kondisi mantap merupakan salah satu komponen pembentuk indikator pesentase ketercapaian pemenuhan infrastruktur strategis. ketercapaian pesentase jalan provinsi kondisi mantap di Pemerintah Provinsi Bengkulu dilihat dari indikator berikut:

1. Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi baik
2. Persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi sedang
3. Persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi rusak ringan
4. Persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi berat

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: D.468.DPUPR. Tahun 2022 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu total panjang jalan kewenangan provinsi adalah 1.330.166 KM, dengan realisasi capaian target persentase jalan mantab 3 (tiga) tahun terakhir berdasarkan kategori dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.1.3

Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap

No	Kategori	Tahun			
		2021	2022		2023
1.	Persentase panjangjalan provinsi dalam kondisi baik	67,28	49,62	54,69	51,49
2.	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi sedang	9,64	7,63	7,61	11,35
3.	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi rusak ringan	6,82	25,75	12,93	8,34
4	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondidi rusak berat	16,25	17,01	24,77	28,83

Sumber : Dinas Pekerjaaan Umum dan Tata Ruang

Dari tabel diatas, dapat dilihat penyelenggraaan jalan di Provinsi Bengkulu dalam 4 tahun berjalan dengan baik. Persentase Jalan Mantap yang menjadi kewenangan provinsi adalah sepanjang 1.330,166 Km dengan total penanganan jalan tahun 2024 adalah sepanjang 37,63 Km. Pada tahun 2024 persentase jalan provinsi dalam kondisi baik adalah 51,49 persen terjadi penurunan sebesar 3,2 Persen dari tahun 2023.

Kondisi Jalan Provinsi Bengkulu masih lebih buruk dibandingkan dengan kondisi jalan nasional. Kondisi jalan nasional mantab tahun 2024 adalah 97,56 % sedangkan jalan mantab provinsi adalah 64,31%. Hal ini didukung dengan jalan nasional memiliki persentase jalan aspal yang lebih tinggi 83,35% dibandingkan dengan jalan aspal provinsi benghkulu hanya 44,71%. Hal ini menunjukkan bahwa jalan nasional lebih banyak menggunakan material aspal yang lebih tahan lama, begitupun dengan panjang Jalan Provinsi Bengkulu relatif lebih pendek dibandingkan dengan panjang jalan nasional (3.444,50 km vs 47.291 km).

Kondisi jalan Provinsi Bengkulu masih perlu ditingkatkan untuk mencapai standar kondisi jalan nasional. Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk perawatan dan pembangunan jalan, serta meningkatkan kualitas material jalan untuk mencapai kondisi jalan yang lebih baik.

Berikut adalah panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantab yang tersebar di sepuluh Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Bengkulu:

Grafik. 2.1.3

Jalan Provinsi Kondisi Mantap berdasarkan Kabupaten/Kota

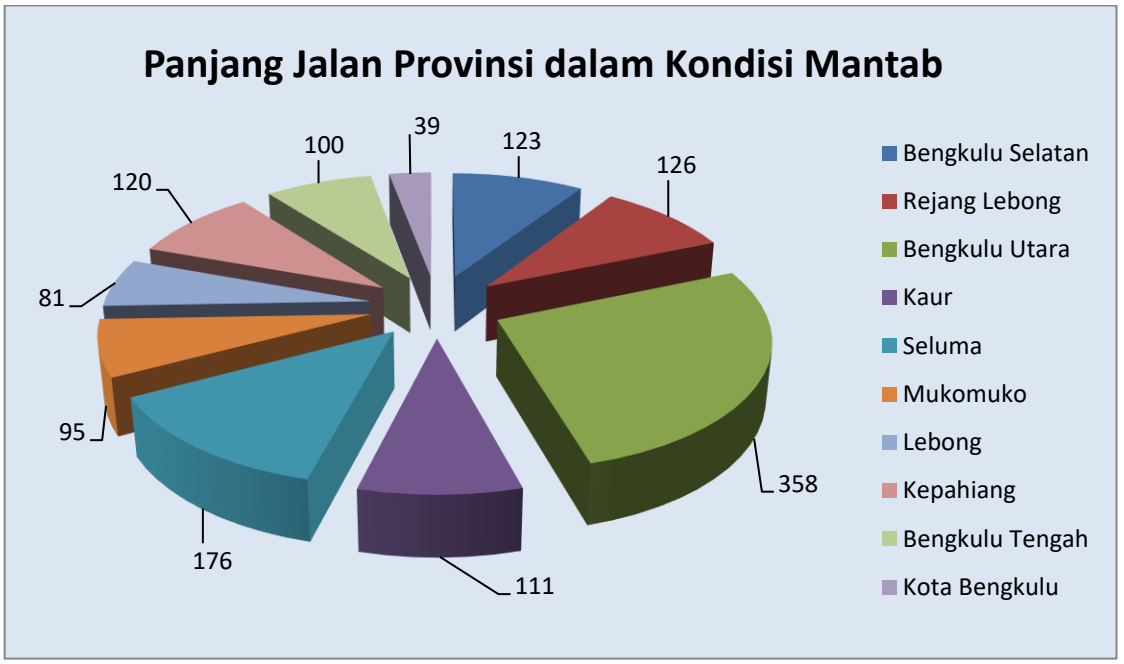

Sumber data: BPS

Selanjutnya dalam pencapaian jalan provinsi kondisi mantap didukung oleh program penyelenggaraan jalan dengan beberapa sub kegiatan yang ada di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Provinsi Bengkulu seperti; penyusunan rencana kebijakan, strategis pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan, suvey kondisi jalan/jembatan, pembangunan jalan, rekonstruksi jalan, pemeliharaan berkala jalan, pemeliharaan rutin jalan, pembangunan jembatan, rehabilitasi jalan, pemeliharaan rutin jembatan, penanggulangan bencana/tanggap darurat dan pengawasan teknis penyelenggaraan jalan/jembatan dengan pagu sebesar RP. 2.889.534.300,-

dengan realisasi Rp. 2.449.953.152,- atau 84,78 %, ada efisisnsi sebesar 15,22 % dari program Penyelenggaraan Jalan.

2. Persentase Pemenuhan Infrastruktur Dasar

Infrastruktur Dasar merupakan fasilitas dasar baik itu fisik maupun sosial yang di butuhkan untuk operasional aktifitas masyarakat maupun perusahaan sebagai mediator atau sistem ekonomi yang sangat penting. Pada RPJMD Provinsi Bengkulu Bengkulu tahun 2021-2026 persentase pemenuhan infrastruktur dasar ditentukan oleh:

1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum (terpeliharanya akses masyarakat terhadap air minum jaringan perpipaan dan air minum non perpipaan)
2. Pesentase cakupan layanan akses sanitasi layak
3. Pesentase rumah tangga layak huni
4. Rasio Elektrifikasi

Pada tahun 2024, Target atas capaian kinerja yang ditetapkan adalah 81 % dengan realisasi 77,46 % atau 95,62% meningkat sebesar 0,82 persen dari tahun sebelumnya, untuk mengukur ketercapaian target tersebut didasarkan pada capaian masing-masing indikator- berikut:

A. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum (terpeliharanya akses masyarakat terhadap air minum jaringan perpipaan dan air minum non perpipaan)

Air tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Air menjadi kebutuhan dasar dan digunakan untuk minum, memasak, mencuci, mandi dan kegiatan lain yang bergantung pada air bersih sehingga air sangat penting bagi kehidupan manusia, bahkan makhluk hidup lainnya. Selain itu juga, sumber air layak menjadi salah satu dari indikator utama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada tujuan 6 yaitu Sumber air dapat berpengaruh terhadap perekonomian dan juga terhadap kesehatan. Semakin baik kualitas air yang digunakan, maka akan berpengaruh secara langsung terhadap baiknya

kualitas kesehatan dan juga berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian.

Berdasarkan visi dan misi Gubernur pada RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2021 -2026 yang diperkuat dengan Peraturan Guberbur nomor 11 tahun 2022 tentang kebijakan dan strategi daerah pengembangan sistem penyediaan air minum provinsi Bengkulu tahun 2022-2026 adalah mewujudkan Masyarakat Provinsi Bengkulu yang Maju dan Sejahtera dengan Pola Hidup Sehat Melalui Akses Pelayanan Air Minum 100% berkualitas. Pada tahun 2024 capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum (terpeliharanya akses masyarakat terhadap air minum jaringan perpipaan dan non perpipaan) adalah 73,56 % atau 106,60 % dari target yang ditentukan 69%. Jika dibandingkan dengan capaian nasional 92,64 % maka capaian Provinsi Bengkulu 73,56 masih jauh berada dibawa standar nasional, namun jika mengacu pada target RPJMD yang Akses Pelayanan Air Minum 100% berkualitas maka akses air minum layak sudah tercapai. Berikut peningkatan pelayanan akses air minum layak di Provinsi Bengkulu dalam 4 tahun terakhir.

Grafik. 2.2.1

Capaian Akses Air Minum Layak Provinsi Bengkulu

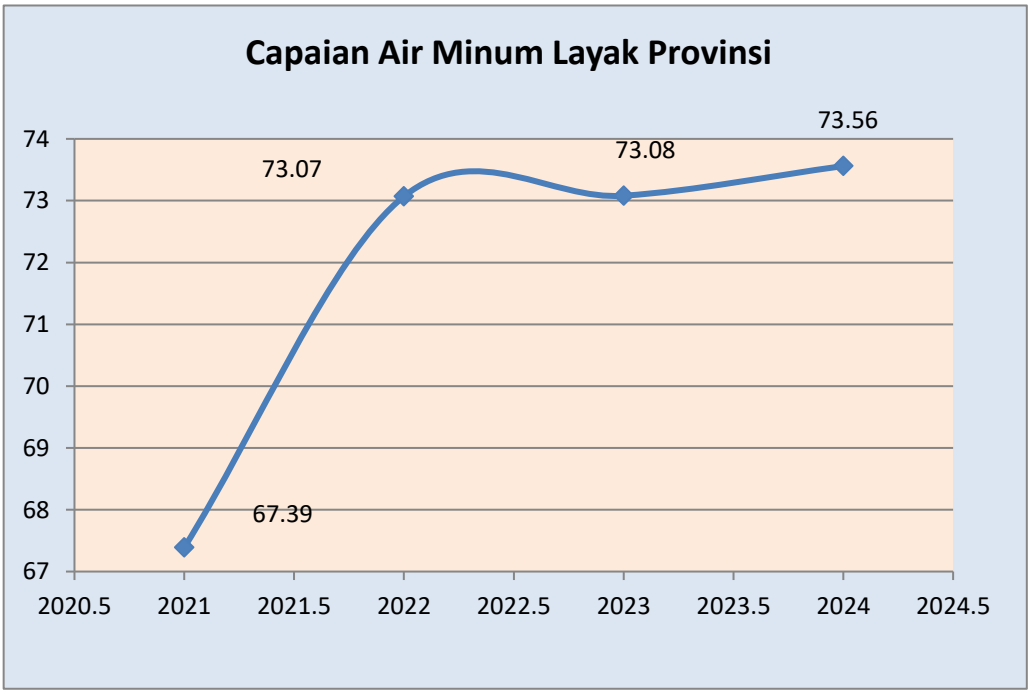

Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Capaian atas Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum berdasarkan atas capaian persentase akses air minum jaringan perpipaan dan non perpipaan. Provinsi Bengkulu mempunyai tugas dan kewenangan dalam pembangunan dan peningkatan sarana air minum dengan sumber air dangkal melalui jalur perpipaan dan pembangunan sistem pelayanan air minum regional atau lintas kabupaten/kota, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu melakukan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas Kabupaten/ Kota melalui beberapa kegiatan seperti; penyusunan rencana kebijakan strategis dan teknis SPAM, pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan, pembinaan teknis SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM provinsi, Fasilitasi kerja sama pengelolaan SPAM regional lintas Kabupaten/Kota, operasi pemeliharaan SPAM lintas Kabupaten Kota dan pembangunan batu SPAM jaringan perpipaan dengan pagu pada tahun 2024 sebesar Rp. 228.022.000 dengan realisasi sebesar RP. 218.078.400 atau 95,63 %, ada efisinsi anggaran 4,63 % dari program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.

B. Persentase Cakupan Layanan Akses Sanitasi Layak

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/ SistemTerpusat.

Berdasarkan data Badan Pusat statistik capaian terhadap rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak wilayah Provinsi Bengkulu tahun 2023 adalah 79,58 sedangkan capaian tahun 2024 adalah 80,28 % meningkat 0,7 % dari tahun sebelumnya. Sedangkan Persentase Rumah tangga yang memiliki sanitasi layak pada pada tahun 2023 di targetkan 85 % dengan realisasi 80,28 maka capaianya adalah 94,44%.

Secara nasioanl, capaian rumah tangga yang memilki akses terhadap sanitasi layak Provinsi Bengkulu masih dibawah capaian nasional yang capainya adalah 83,6. Namun demikian, Capaian layanan akses sanitasi layak Provinsi Bengkulu selalu meningkat dari setiap tahunnya. Berikut persentase cakupan sanitasi layak Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu tahun 2024 :

Grafik 2.2.2

Cakupan Layanan Sanitasi Layak Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak
Bengkulu Selatan	83,81
Rejang Lebong	64,41
Bengkulu Utara	82,84
Kaur	86,43
Seluma	87,17
Mukomuko	80,94
Lebong	55,62
Kepahiang	69,25
Bengkulu Tengah	83,07
Kota Bengkulu	93,94
Bengkulu	80,28

Sumber :
BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/ BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam peningkatan sanitasi layak adalah:

1. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melaksanakan program peningkatan sanitasi melalui pembangunan fasilitas sanitasi layak.
2. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga telah melakukan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi layak.

Sebagai bentuk dukungan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pemenuhan terhadap persentase layanan akses sanitasi layak adalah dengan menyediakan anggaran pada program penataan bangunan gedung dan program penataan bangunan dan lingkungannya dengan PAGU sebesar RP. 23.667.868.120 dengan realisasi sebesar Rp. 23.271.746.541 atau 98,32 %.

B. Persentase Rumah Tangga Layak Huni

Menyediakan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih menjadi permasalahan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Rumah bisa dikatakan layak huni apabila memenuhi persyaratan keselamatan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan para penghuninya. Berdasarkan peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) yang sesuai dengan Kepmen Kimpraswil No.403/KPTS/M/2002 dan Permenpera Nomor 22//Permen/M/2008, untuk menciptakan rumah layak huni, haruslah mempertimbangkan berbagai aspek antara lain faktor kesehatan, faktor keamanan bangunan, dan faktor keindahan dan kenyamanan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menargetkan sebanyak 70 persen rumah tangga menempati hunian layak baik pada tahun 2024 yang tentu dengan intervensi langsung maupun tidak langsung dari pemerintah.

Pesentase rumah layak huni merupakan salah satu pendukung tercapainya persentase ketercapaian pemenuhan infrastruktur dasar. Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan target persentase rumah layak huni adalah sebesar 61,16 % dengan capaian sebesar 56,52% atau 92,41%.

Berdasarkan data susenas Badan Pusat Statistik, persentase rumah layak huni adalah 63,25 sedangkan Capaian Provinsi Bengkulu di tahun yang sama

adalah 56,52, artinya perbadingan atas capaian sub sektor indikator ini provinsi Bengkulu masih berada dibawa nasional.

Berikut beberapa upaya yang dilakukan Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan rumah layak huni pada tahun 2024 adalah melalui :

1. Program Perumahan Rakyat (PPR): Pemerintah Provinsi Bengkulu melanjutkan program PPR untuk membantu masyarakat memperoleh rumah layak huni.
2. Program Bantuan Perumahan (BPP): Pemerintah Provinsi Bengkulu juga melaksanakan program BPP untuk membantu masyarakat yang tidak mampu membeli rumah.
3. Program Penyediaan Perumahan dan Permukiman (P3): Pemerintah Provinsi Bengkulu melaksanakan program P3 untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman di Provinsi Bengkulu.

Selain itu juga Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan kerja Sama dengan Pihak Swasta, yaitu berupa:

1. Kerja sama dengan pengembang perumahan: Pemerintah Provinsi Bengkulu bekerja sama dengan pengembang perumahan untuk meningkatkan penyediaan rumah layak huni.
2. Kerja sama dengan lembaga keuangan: Pemerintah Provinsi Bengkulu juga bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk meningkatkan akses ke pembiayaan perumahan.

Harapannya dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan Provinsi Bengkulu dapat meningkatkan jumlah rumah layak huni dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pada tahun 2024, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bidang Kawasan Permukiman merupakan Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi , melakukan pengukuran terhadap pencapaian pesentase rumah layak huni dengan beberapa indikator:

1. Jumlah Luasan Kumuh yang tertangani sepanjang tahun 2024 adalah sebanyak 2 Ha

2. Jumlah kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha s.d 15 Ha yang ditingkatkan kualitasnya dengan mebangun sebanyak 47 buah rumah layak huni sepanjanjang tahun 2024
3. Jumlah Pembangunan pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha s.d 15 Ha yang dilaksanakan sebanyak 1 kawasan sepanjang tahun 2024

Upaya-upaya yang telah dilakukan pencapaian target indikator ini diantaranya:

- Melakukan rapat Koordinasi dengan masing-masing Dinas Perkim Kabupaten/Kota terkait : Usulan dari masing-masing Kabupaten/ Kota, Pelaksanaan dan Pengawasan untuk pekerjaan Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di ProvinsiBengkulu.
- Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada Masyarakat dan Dinas Perkim Kabupaten/ Kota yang mendapatkan dana bantuan terkait Pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- Melakukan Pengawasan dalam Pelaksaanaan pekerjaan Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- Perencanaan, Pengawasan, dan Pembangunan Bidang Perumahan dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni.
- Mendukung dan membantu Pemerintah Pusat dalam hal Program pemenuhan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu.

Adapun Program dan kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah Program Pengembangan Perumahan, Program kawasan pemukiman, Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum dan Program Penyelesaian sengketa tanah garapan dengan pagu sebesar RP. 1.650.000.000.

C. Rasio Elektrifikasi

Rasio Elektrifikasi (Rumah tangga yang menggunakan listrik) adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga terhadap kesediaan aliran listrik di Provinsi Bengkulu. Indikator ini menjadi alat ukur keberhasilan dalam pembangunan pada sektor kelistrikan. Ratio Elektrifikasi indikator kinerja Gubernur yang ada pada

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang merupakan pendukung indikator persentase pemenuhan infrastruktur dasar di Provinsi Bengkulu.

Rasio elektrifikasi Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2023, rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99,78%. Sementara itu, Provinsi Bengkulu telah mencapai rasio elektrifikasi sebesar 99,96% pada tahun yang sama, dengan penambahan jumlah desa berlistrik.

Target rasio elektrifikasi nasional pada tahun 2024 adalah 100%, dan diharapkan seluruh rumah tangga di Indonesia dapat menikmati aliran listrik. Oleh karena itu, Provinsi Bengkulu diharapkan dapat meningkatkan rasio elektrifikasinya hingga mencapai target nasional tersebut.

Pada tahun 2024 Rasio Elektrifikasi Provinsi Bengkulu ditargetkan sebesar 99,96% dengan realisasai 99,98% atau persentase pencapaian 100,02 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 realisasinya sebesar 99,96% yang mengalami peningkatan sebesar 0,02 %.

Dalam upaya meningkatkan rasio elektrifikasi, Kementerian ESDM telah melaksanakan program-program seperti identifikasi daerah yang belum terjangkau, pembangunan infrastruktur listrik, dan peningkatan kapasitas PLN.

Ratio elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik terhadap jumlah total rumah tangga. Ditahun 2024 RE Provinsi Bengkulu telah mencapai 99,98%, dimana data rasio elektrifikasi ini diperoleh dari PT. PLN cabang Bengkulu, tersaji pada tabel dibawah :

Tabel

Rasio Elektrifikasi Tahun 2024 (sumber dari PT. PLN)

PROVINSI / KABUPATEN	JML PLG RMH TANGGA	JML PLG RMH TANGGA NON PLN	JML PLG RMH TANGGA TOTAL	RE PLN (%)	RE TOTAL (%)
BENGKULU	**566.236**	**5.511**	**571.747**	**98.98**	**99.99**
KOTA BENGKULU	139.937	0	139.937	100.00	100.00
KAB. BENGKULU UTARA	73.134	903	74.037	98.21	99.64

KAB. BENGKULU SELATAN	45.503	41	45.544	99.78	99.87
KAB. KAUR	34.169	565	34.734	99.31	100.00
KAB. REJANG LEBONG	73.894	524	74.418	99.58	100.00
KAB. SELUMA	48.309	249	48.558	99.57	100.00
KAB. MUKO MUKO	50.710	0	50.710	100.00	100.00
KAB. KEPAHIANG	39.930	3.229	43.159	91.17	99.11
KAB. LEBONG	32.382	0	32.382	100.00	100.00
KAB. BENGKULU TENGAH	28.268	0	28.268	100.00	100.00

Untuk persentase Badan Usaha yang patuh terhadap aspek Perizinan dan Keselamatan Ketenagalisrikan tahun 2024 adalah dengan telah dikeluarkan izin sebanyak 233. Selanjutnya hingga Desember 2024 telah dikeluarkan rekomendasi IUPTLS dan IUJPTL sebanyak 44 rekomendasi teknis. Sehingga jumlah badan usaha yang patuh terhadap aspek perizinan menjadi 233+44=277 badan usaha. Pemasangan Listrik Gratis 230 RTM di 6 Kabupaten APBD dan 762 RTM APBN (PLN).

Yang menjadi kendalah adalah masih rendahnya kesadaran pelaku usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan sendiri menyampaikan laporan, dimana sesuai Permen ESDMRI no.11/2021 tentang ketenagalistrikan bahawa penyedia tenaga listrik dengan kapasitas sampai dengan 500 KW wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur Bengkulu melalui Dinas ESDM Prov.BKL.

Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 menetapkan Program dan kegiatan yang menunjang Priroritas Daerah terhadap ketercapaian Rasio Elektrifikasi yaitu Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dengan kegiatan penatausahaan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi dan Penganggaran untuk Kelompok Masy arakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan serta kegiatan penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 1.462.000.000,-

Tujuan 3

Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat yang merata

No	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja			
			Tahun 2023		Tahun 2024	
			Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Indeks Gini	0,312-0,313	0,333	--	0,356	41,02

Sumber : Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel di atas, tujuan Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat yang merata dapat di ukur dengan indikator Indeks Gini, dengan penjelasan sebagai berikut :

Indeks Gini Ratio (IGR) adalah suatu ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan pendapatan atau kekayaan dalam suatu masyarakat atau negara. Indeks Gini Ratio dikembangkan oleh ahli statistik Italia, Corrado Gini, pada tahun 1912.

Indeks Gini Ratio memiliki nilai antara 0 dan 1, di mana :

- Nilai 0 menunjukkan bahwa pendapatan atau kekayaan tersebar secara merata di antara seluruh anggota masyarakat.
- Nilai 1 menunjukkan bahwa pendapatan atau kekayaan terkonsentrasi pada satu orang atau kelompok saja.

Semakin tinggi nilai Indeks Gini Ratio, semakin tinggi pula tingkat ketidaksetaraan pendapatan atau kekayaan dalam suatu masyarakat atau negara. Berikut adalah interpretasi nilai Indeks Gini Ratio : 0-0,2: Ketidaksetaraan rendah Gini Ratio Provinsi Bengkulu pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,342, meningkat 0,009 poin dari Maret 2023 yang sebesar 0,333. Sementara itu, pada Maret 2024, Gini Ratio Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 0,356.[1] [2]

Perlu diingat bahwa Gini Ratio adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan pendapatan atau kekayaan dalam suatu masyarakat atau negara. Semakin tinggi nilai Gini Ratio, semakin tinggi pula tingkat ketidaksetaraan pendapatan atau kekayaan.

Berikut adalah perbandingan nilai Gini Ratio Provinsi Bengkulu pada beberapa periode :

- Maret 2022: 0,315
- Maret 2023: 0,333
- Maret 2024: 0,356

Sebagai pembanding dari privinsi lain seperti provinsi Lampung, Jambi dan Sumatera Selatan sebagai berikut :

Gini Ratio Provinsi Lampung pada Maret 2024 adalah sebesar 0,302, menurut data dari BPS Lampung. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Lampung masih cukup tinggi. Namun, perlu diingat bahwa angka ini telah menurun sebesar 0,022 poin dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Pada September 2024, Gini Ratio Provinsi Lampung telah menurun lagi menjadi sebesar 0,301. Penurunan ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Lampung telah menunjukkan hasil.

Gini Ratio Provinsi Jambi pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,321, menurun 0,022 poin dibandingkan dengan Maret 2023 yang sebesar 0,343. Sementara itu, Gini Ratio Provinsi Sumatera Selatan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,333, turun 0,005 poin dibandingkan dengan Maret 2023 yang sebesar 0,338.[2]

Dampak Gini Ratio terhadap masyarakat Bengkulu dapat dilihat dari beberapa aspek. Gini Ratio yang meningkat, seperti yang tercatat pada Maret 2024 sebesar 0,356, menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Bengkulu semakin tinggi.[1] Hal ini berdampak pada :

- Peningkatan kesenjangan ekonomi: Semakin tinggi Gini Ratio, semakin lebar kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin.
- Menurunnya kualitas hidup: Ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan menurunnya kualitas hidup penduduk miskin, terutama dalam hal akses ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
- Meningkatnya risiko kemiskinan: Penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan akan semakin sulit untuk keluar dari kemiskinan karena ketimpangan ekonomi yang semakin tinggi.

Namun, perlu diingat bahwa Gini Ratio juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah.

Sasaran 3.1
Menurunnya Angka Kemiskinan

No	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja			
			Tahun 2023		Tahun 2024	
			Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Angka Kemiskinan	13,50 -13,90 %	14,04	99,71 %	12,52	109,92%

Sumber : Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel di atas, sasaran menurunya angka kemiskinan dapat di ukur dengan indikator angka kemiskinan.

Angka Kemiskinan

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Isu kemiskinan masih menjadi isu serius yang harus ditangani oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun di daerah. Oleh karenanya, dalam setiap visi misi pemerintah selalu mengutamakan tentang penanganan kemiskinan demi meningatkan tarap hidup masyarakat. Pada saat berakhirnya RPJMN tahun 2020-2024, pemerintah pusat sudah menargetkan tingkat kemiskinan secara nasional turun menjadi 6,0 – 7,0 %, sedangkan pada tahun 2024 target tingkat kemiskinan ditetapkan sebesar 8,57 %.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik september 2024 bahwa angka kemiskinan secara nasional sebesar 8,57 % menurun 0,46 % poin terhadap maret 2024 dan menurun 0,79 % poin terhadap maret 2023, Berikut tren penurunan angka kemiskinan di indonesia dari tahun 2013 - 2024:

Grafik 3.1.1

Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, September 2013 s.d September 2024

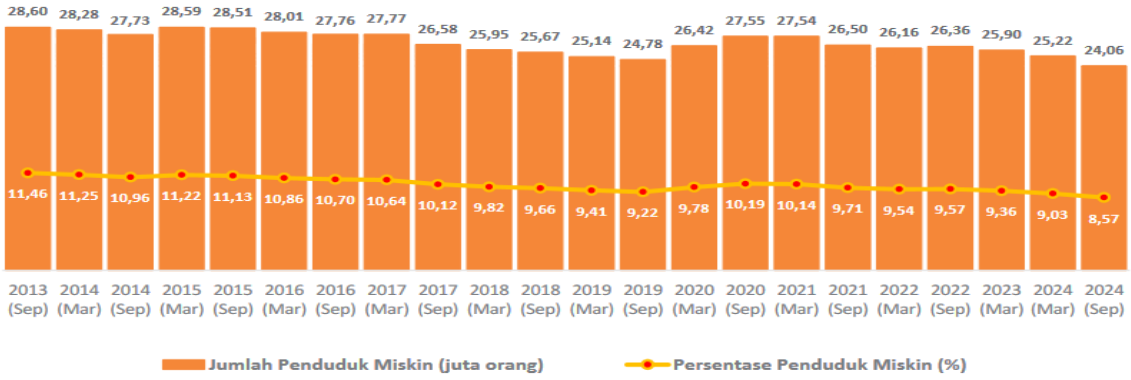

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2013–September 2024

Di Provinsi Bengkulu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) pada september 2024 adalah 12,52 % (261.15 ribu orang), berkurang sebesar 1,04 persen poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2024 yang sebesar 13,56 % (281.36 ribu orang) dan berkurang sebesar 1,52 persen poin di bandingkan dengan kondisi maret 2023 yang sebesar 14,04 % (288,46 ribu orang). Jika dilihat kembali pada penyelarasan target RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2021-2026 target tingkat kemiskinan tahun 2024 adalah 13,50% – 13,90%, bahwa pencapaian tingkat kemiskinan pada tahun 2024 sebesar 12,52% (109,92%) merupakan sebuah keberhasilan dari RPJMD, hal ini ditunjukkan dengan menurunnya angka kemiskinan 1.52 % Poin dibandingkan tahun 2023.

Namun walaupun demikian, Provinsi Bengkulu urutan ke 7 dari 10 Provinsi termiskin di Indonesia dengan perbadingan penurunan angka kemiskianan dari 8,57 ke 12,52 per september 2024 atau 3,95 point dibawah capaian angka kemsikinan nasional.

Selanjutnya dari jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu pada september 2024 mencapai 261,15 ribu orang. Dibandingkan maret 2024, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 20,2 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2023, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 27,31 ribu orang, sehingga Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 12,52 %.

Secara umum selama 5 tahun terakhir tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu cenderung menurun, dari sisi jumlah penduduk maupun persentase, pengecualian pada Maret 2020 s.d Maret 2021 dan Maret 2022 terjadi kenaikan persentase penduduk miskin dipicu oleh mewabahnya virus covid-19 yang mengakibatkan lumpuhnya roda perekonomian secara lokal maupun nasional. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2018 sampai dengan Maret 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. 3.1.2

Persentase Angka Kemiskinan di Provinsi Bengkulu, Maret 2013 – September 2024

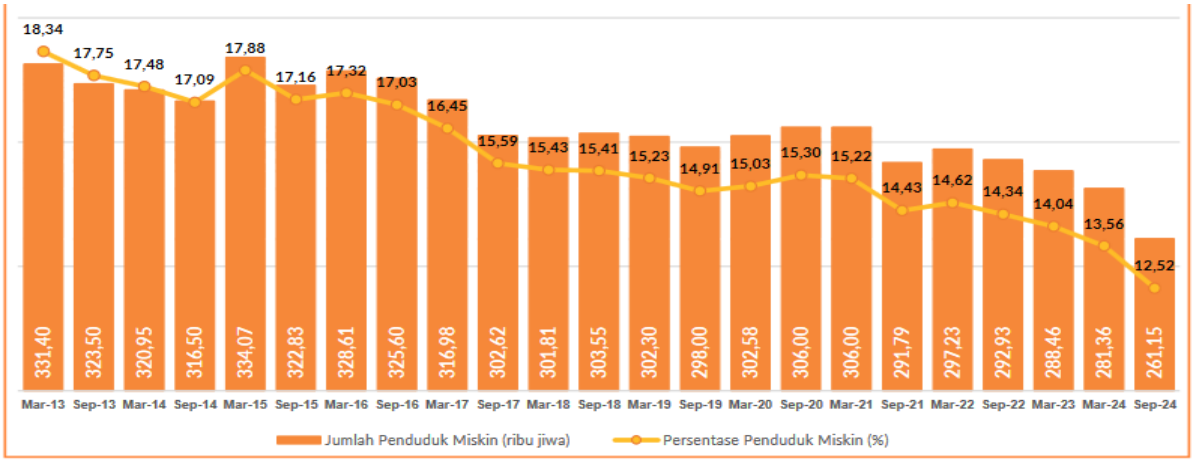

Sumber data: Badan Pusat Statistik

Jika dilihat dari daerah tempat tinggal, pada periode maret 2024 - september 2024, jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu yang tinggal diperkotaan berkurang sekitar 8 ribu orang, sedangkan didaerah perdesaan turun sekitar 12,3 ribu orang. Persentase kemiskinan didaerah perkotaan turun dari 13,56 % menjadi 12,52 %. Sementara itu, di perdesaan turun dari 13,56 % menjadi 12,63 %.

Untuk mengurangi Angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu, Dinas Sosial berupaya meningkatkan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) / masyarakat miskin dengan sasaran pada eselon II-nya adalah sebagai berikut :

I. Meningkatnya penanganan Permasalahan sosial.
II. Meningkatnya kapasitas PSKS dan lembaga kesejahteraan sosial

I. Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial

Pada Sasaran meningkatnya penanganan permasalahan sosial diukur dengan indikator Persentase Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 76,5 % dengan realisasi sebesar 81,6 % atau capaian sebesar 106,6 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian persentase PMKS yang tertangani sudah mencapai target. Untuk mendukung ketercapaian persentase PMKS yang tertangani diukur dari pelaksanaan 3 program yaitu:

1. Program Rehabilitasi Sosial, terdiri dari kegiatan:

- Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti, Pada kegiatan ini pelaksanaan yang dilaksanakan penyediaan permakanan dimana semula melalui APBD dengan target 37 orang, melalui Intensif Fiskal target 100 orang.
- Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar didalam panti, Pada kegiatan ini Dinas Sosial Provinsi Bengkulu melalui UPTD PSBR melakukan rehabilitasi anak terlantar sebanyak 20 orang ,selain itu Dinas Sosial melakukan monitoring dan pendampingan kepada 31 lembaga/LKSA milik masyarakat yang berada pada wewenang provinsi.
- Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar didalam panti kegiatan ini dilaksanakan pada UPTD PSTW Dinas Sosial Provinsi Bengkulu sebanyak 70 orang

2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari kegiatan :

- Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi, Program ini melakukan verifikasi data dan pemantauan penyaluran bantuan sosial, pada kegiatan ini juga dilaksanakan pengadaan alat bantu kesehatan bagi penyandang disabilitas yang tidak mampu target 100 orang/unit dengan realisasi 131 orang/unit.
- Program Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), kegiatan ini memberikan Kartu Bengkulu Sejahtera (KBS) dimana bantuan yang diberikan berupa uang yang direncankan kepada masyarakat miskin diluar penerima bantuan regular seperti bantuan PKH dan BPNT. Bantuan uang yang diberikan dengan target 1500 KPM/keluarga di 10 Kab/kota provinsi Bengkulu dengan besaran Rp.100,000 / bln selama 1 (satu) tahun dan 1000 KPM / Keluarga selama 4 bulan terhitung sejak November hingga Desember melalui dana Intensif Fiskal melalui Bank penyalur yaitu Bank Bengkulu. Dinas Soial Provinsi Bengkulu telah 100 % melaksanakan penyaluran bantuan KBS, akan tetapi berdasarkan triwulan terakhir sebanyak 1.361 KPM / Keluarga yang melakukan pencairan / penarikan di Bank penyalur dan 819 KPM/keluarga melalui dana Intensif Fiskal yang melakukan pencairan/penarikan
- Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kegiatan ini memberikan bantuan pangan yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e warong yang telah bekerjasama dengan Bank yang ditunjuk, dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.

3. Program penanganan Bencana, terdiri dari kegiatan:

- Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi, Pada kegiatan ini Dinas Sosial Provinsi telah melakukan Penanganan bencana baik alam maupun sosial sebesar 100 % melalui pemberian bantuan bahan bangunan bagi korban bencana alam / kebakaran sebanyak 23 orang, Dinas Sosial Provinsi melalui Bidang Penanganan Bencana melaksanakan kebijakan teknis perlidungan sosial korban bencana alam dan sosial serta jaminan

sosial keluarga. Bidang Penaganan Bencana menangani beberapa jenis PPKS diantaranya yaitu korban bencana alam , korban bencana sosial dan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan keluarga miskin.

Dalam melaksanakan upaya diatas, dinas sosial didukung dengan APBD provinsi Bengkulu tahun 2024 sebesar RP. 7.030.089.600 dengan realisasi Rp. 6.034.758.591 atau 85,84%.

II. Meningkatnya Kapasitas PSKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial

Pada Sasaran meningkatnya kapasitas PSKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dengan indikator persentase Persentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggraaan kesejahteraan sosial dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 57 % dengan realisasi sebesar 59,97 % atau capaian sebesar 105,2%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian persentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tercapai melampaui target. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi PSKS tidak terlepas dari peran serta dari ketersediaan potensi sumber daya kesejahteraan sosial (PSKS) sebagai berikut:

Tabel 3.1.1

POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA YANG DIBERDAYAKAN

NO	Jenis PSKS	Jumlah PSKS	Jumlah PSKS yang diberdayakan
1	TKSK	129	129
2	LK3	15	15
3	SLRT	40	40
4	Karang Taruna	1.514	600
5	LKS	56	56
6	Pendamping PKH	465	465
7	Tagana	425	425
8	SAKTI PEKSOS	23	23
9	PSM	1227	500
Total		**3.894**	**2.252**

Tercapainya sasaran strategis PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial ini tidak terlepas dari adanya pembinaan / pelatihan / sosialisasi / pengawasan. Berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh dinas Sosial:

1. Melakukan peningkatan kapasitas potensi terhadap 50 orang pekerja sosial masyarakat kewenangan provinsi
2. Melakukan peningkatan potensi terhadap 128 orang tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan provinsi yang meningkat kapasitasnya.
3. Melakukan peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi terhadap 40 lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan provinsi.

Partisipasi aktif PSKS ini dukungan pembiayaan anggaran, sarana prasarana dan peningkatan kompetensi SDM melalui Dinas Sosial Provinsi yang bersumber pada APBD Provinsi Bengkulu melalui kegiatan-kegiatan: penyelenggaraan bantuan sosial program keluarga harapan dan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi dengan total pagu sebesar RP. 493.800.000 dengan realisasi RP. 482.186.000 atau 97,64%.

Dalam pencapaian kinerja terdapat beberapa permasalahan antara lain :

1. Adanya Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat,Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial menyebabkan belum semua PPKS dapat terlayani, karena kewenangan Provinsi untuk pelayanan dan rehabilitasi PPKS didalam Panti masih belum maksimal disebabkan kurangnya komitmen dan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi.
2. Kewenangan Pemerintah Provinsi untuk Pemenuhan SPM bidang Sosial yaitu memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk PPKS didalam Panti, karena kurangnya SDM dan sarana prasarana panti sosial menyebabkan pelaksanaan kegiatan belum maksimal.
3. Kurangnya data awal klayan yang masuk ke dalam panti dikarenakan klayan yang masuk tidak membawa berkas/data yang lengkap
4. Terhambatnya dalam melakukan rujukan lanjutan untuk pemeriksaan

lanjutan klayan karena tidak memiliki BPJS dan akses internet serta sarana pendukung dalam penggunaan aplikasi mobile JKN

5. Belum adanya MOU dengan Pelayanan Rujukan seperti BPJS, Rumah Sakit M. Yunus, RSJKO dan Pelayanan Rujukan lanjutan lainnya
6. Tidak dianggarkannya dana insentif bagi pendamping PKH sebagai petugas pendataan kelayakan calon penerima bantuan sosial.
7. Kurangnya dukungan anggaran untuk operasional validasi dan monitoring KPM
8. Akurasi dan validasi data DTKS belum maksimal
9. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan
10. Tidak dianggarkannya dana insentif bagi pendamping PKH sebagai petugas p
11. Kurangnya dukungan anggaran untuk operasional validasi dan monitoring KPM
12. Akurasi dan validasi data DTKS belum maksimal
13. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan
14. Terbatasnya bufferstock bencana yang tersedia di gudang bencana dinas Sosial Provinsi Bengkulu
15. Masih terbatasnya relawan bencana yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan dukungan psikososial
16. Terbatasnya fasilitast empat penampungan pengungsi sehingga masih belum memenuhi standar dalam penanganan pengungsi
17. Masih Terbatasnya Jumlah Penyediaan Permakanan bagi masyarakat yang terampak bencana baik itu Bencana Alam mau Bencana Sosial

Ada beberapa rekomendasi dalam upaya penurunan angka kemiskinan, yaitu:

1. Diperlukan sarana dan prasarana dibidang rehabilitasi sosial seperti adanya ruangan konseling yang mendukung sehingga klien merasa nyaman dan aman saat berkonsultasi atau bimbingan
2. Diperlukannya pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM
3. Diperlukan komitmen dan integritas yang tinggi dari berbagai perubahan yang diciptakan dan dilaksanakan secara konsisten, sistematis, terencana dan berkesinambungan sehingga mampu meningkatkan kinerja kepada masyarakat.

Sasaran 3.2

Menurunnya Pengangguran

No	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja			
			Tahun 2023		Tahun 2024	
			Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Angka Pengangguran	3,0 - 3,5	3,42	111,11	3,11	111,14

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel di atas, sasaran menurunnya pengangguran di ukur dengan indikator yaitu angka pengangguran.

Angka Pengangguran

Pengangguran *(unemployment)* didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja *(labor force)* tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan (Nanga, 2001: 253). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk umur 15 tahun ke atas yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum bekerja.

Angka Pengangguran dapat diukur melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu mengukur tenaga kerja yang tidak terserap

oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) n a s i o n a l per Agustus 2024 adalah sebesar 4,91 persen menurun 0,41 poin dari tahun 2023, hal ini dapat dilihat dari partisipasi angkatan kerja sebanyak 152,11 juta orang, naik 4,40 juta orang dibanding Agustus 2023 atau naik sebesar 1,15 persen poin dibanding Agustus 2023.

Namun jika dilihat dari target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2020-2024 bahwa penurunan angka pengangguran secara nasional pada akhir RPJMN adalah 3,6-4,3 persen, maka penurunan angka pengangguran 4,91 persen per Agustus 2024 masih jauh dari target yang ditetapkan.

Di Provinsi Bengkulu, penurunan angka pengangguran **per Agustus 2024 adalah 3,11 persen atau tercapai 111,14 %** dari target yang ditetapkan pada tahun 2024, **Angka pengangguran ini menurun 0,31 poin** dari agustus tahun 2023. Berdasarkan RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2021 – 2026 bahwa target akhir dari menurunnya angka pengangguran adalah 3,2- 3,3, jika dilihat dari pencapaian pada tahun 2024 adalah 3,11 maka jika dilihat dari tren beberapa tahun terakhir angka pengangguran di Provinsi Bengkulu selalu menurun dapat disimpulkan bahwa pencapaian atas penurunan angka penggangguran pada akhir RPJMD dapat tercapai dengan baik.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Berdasarkan data BPS Agustus 2024, dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tiga orang penganggur, ini artinya TPT mengalami penurunan sebesar 0,31 persen poin dibandingkan Agustus 2023. Berikut data TPT di Provinsi Bengkulu :

Tabel 3.2.1

Karakteristik Pengangguran, Agustus 2022—Agustus 2024

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan Ags 2022—Ags 2023	Perubahan Ags 2023—Ags 2024
	persen	persen	persen	persen poin	persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,59	3,42	3,11	-0,17	-0,31
TPT Menurut Jenis Kelamin					
- Laki-laki	3,39	3,06	2,93	-0,33	-0,13
- Perempuan	3,91	3,99	3,38	0,08	-0,61
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal					
- Perkotaan	4,79	4,62	4,17	-0,17	-0,45
- Perdesaan	3,00	2,78	2,52	-0,22	-0,26

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Pada agustus 2024, TPT laki-laki sebesar 2,93 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,38 persen. TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,13 persen poin dan 0,61 persen poin dibandingkan tahun 2023., jika dibandingkan periode Februari 2022 dengan Februari 2021, TPT laki-laki naik sebesar 0,46 persen poin, sedangkan TPT perempuan turun sebesar 1,52 persen poin.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (4,17 persen) lebih tinggi dari TPT di daerah perdesaan (2,52 persen). TPT menurut daerah tempat tinggal memiliki pola yang sama dengan TPT Provinsi yaitu turun dibandingkan Agustus 2023, masing-masing sebesar 0,45 persen poin dan 0,26 persen poin, berikut grafik TPT berdasarkan Jumlah Pendidikan selama 3 tahun terakhir:

Grafik 3.2.1. TPT berdasarkan Jumlah Pendidika dalam 3 tahun terakhir

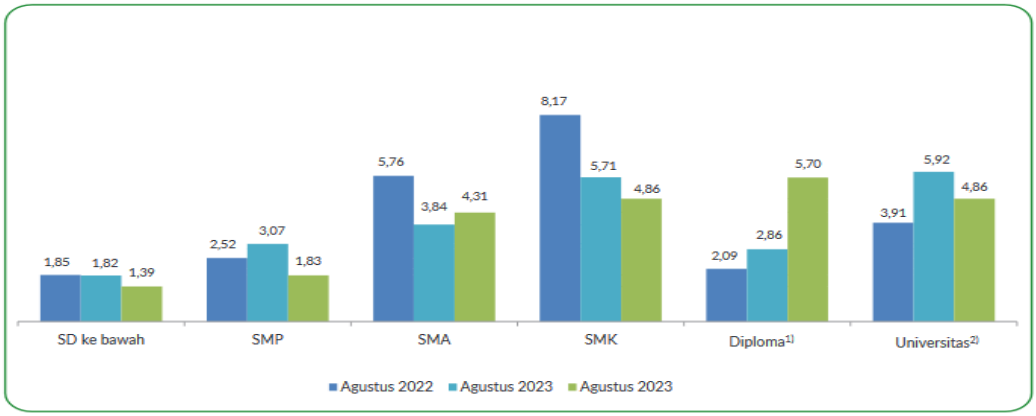

Keterangan: 1) Diploma mencakup Diploma I/II/III
2) Universitas mencakup Diploma IV, S1, S2, S3

Sumber data: Badan Pusat Statistik

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Agustus 2024 mempunyai pola yang berbeda dengan Agustus 2023. Pada Agustus 2024, TPT dari tamatan Diploma I/II/III merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 5,70 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah pada pendidikan SD ke Bawah, yaitu sebesar 1,39 persen. Dibandingkan Agustus 2023, penurunan TPT terjadi pada SD kebawah, SMP, SMK, dan Universitas dengan penurunan tertinggi pada kategori pendidikan SMP. Sedangkan jenjang pendidikan yang mengalami peningkatan tertinggi yaitu

Diploma I/II/III. Berikut gambaran ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu tahun 2024 :

Untuk mencapai sasaran kinerja menurunnya angka pengangguran dengan indikator angka pengangguran Pemerintah Provinsi Bengkulu di ukur dari **TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA**.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Di Provinsi Bengkulu jumlah angkatan kerja pada **Agustus 2024** sebanyak **1.101.234 orang, naik 31.619 orang** dibanding Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ***(TPAK) naik sebesar 0,80 persen poin***.

Jika dilihat dari sektor pekerjaan; sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu sebesar 44,43 persen, sektor perdagangan besar dan eceran,

reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 15,67 persen dan administrasi pemerintah sebesar 6,45 persen, pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan agustus 2023. Dibandingkan Agustus 2023, tiga lapangan pekerjaan dengan peningkatan terbesar, yakni lapangan pekerjaan Jasa Pendidikan (10.656 orang); Jasa Lainnya (5.649 orang); Pertanian, Kehutanan & Perikanan (5.293 orang). Sementara itu lapangan pekerjaan dengan penurunan terbesar yaitu Industri Pengolahan yang turun sebanyak 3.953 orang.

Dilihat dari status pekerjaan utama, penduduk yang bekerja pada Agustus tahun 2024 penduduk bekerja sebagian besar berstatus buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 30,04 persen, sementara status pekerjaan utama yang memiliki persentase terendah yaitu Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar 3,95 persen, bila dibandingkan dengan kondisi Agustus 2023 penduduk yang Buruh/Karyawan/Pegawai mengalami peningkatan terbesar yakni 1,05 persen. Penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yakni Berusaha Sendiri yang turun sebesar 1,01 persen poin.

Pengukuran pencapaian sasaran dalam mengurangi angka pengangguran Provinsi Bengkulu melalui Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi dapat dicapai dengan mengukur capaian dari beberapa indikator-indikator pendukung sebagai berikut:

1. **Indeks Pembangunan Ketenagakerjan**

   Berikut adalah indeks pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu selama 3 tahun berturut-turut dapat dilihat pada Grafik berikut :

Tabel 3.2.2

Indeks Pembangunan ketenagakerjaan

NO.	Uraian / Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi			% Capaian
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Persentase	70,02%	56,49%	59,75%	63,20%	90,25%

Sumber data: Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan memberikan gambaran lengkap mengenai kinerja pembangunan ketenagakerjaan setiap provinsi dan nasional yang disorot menggunakan 9 Indikator Utama dan 25 Subindikator yang merupakan penjabaran dari empat tujuan pokok pembangunan ketenagakerjaan, yaitu pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Tahun 2024 realisasi Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan **ditargetkan sebesar 70,02 persen**, dan tercapai sebesar **63,20 persen**, meningkat apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 dimana realisasi Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan tercapai **sebesar 59,75** persen, dapat dilihat bahwa realisasi Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan **meningkat sebesar 3.45 persen**, apabila dibandingkan dengan Tahun 2023. **Capaian kinerja** pada Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2024 **sebesar 90,25 persen**, sedangkan capaian **Tahun 2023 sebesar 85,00 persen**, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja **meningkat sebesar 5,25 persen**. Salah satu yang mendorong peningkatan indeks ini adalah bertambanhya jumlah provinsi yang telah Menyusun buku Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD).

2. Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang disusun

Persentase Dokumen Rencana Kerja yang disusun pada Tahun 2021 mencapai 50% (kondisi pada awal periode Renstra), target capaian pada Tahun 2022 sebesar 50%, target pada Tahun 2023 sebesar 60%, target pada Tahun 2024 sebesar 70%, Tahun 2025 sebesar 80%, Tahun 2026 sebesar 90%. Provinsi Bengkulu telah menyusun Buku RTK Makro tahun 2021-2024. Sehingga **capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 100 persen**. Hal ini dikarenaka dengan berakhirnya masa berlaku buku RTK Makro ini, maka dapat disusun kembali Buku RTK Makro untuk periode Tahun 2024-2029, dengan melibatkan tim Tenaga Ahli Penyusunan Buku RTK Provinsi dari Bidang Perencanaan Ketenagakerjaan Makro kemnaker RI sebanyak 2 (dua) orang tenaga ahli.

Pada Tahun 2024, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu menyusun kembali Buku Rencana Tenaga Kerja Makro periode Tahun 2024-2029 serta Kabupaten yang telah menyusun Buku RTK Makro pada tahun ini sebanyak 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) telah melaksanakan kegiatan pendampingan penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Kabupaten/Kota dan Provinsi Bengkulu Tahun 2024 di Hotel Nala Sea Side Bengkulu pada tanggal 30 Juli sampai dengan 02 Agustus 2024. Dalam kegiatan ini membahas tentang juknis Penyusunan Buku Rencana Tenaga Kerja Makro Periode Tahun 2024-2029.

Peserta kegiatan pendampingan ini diberikan simulasi dan contoh cara menyusun Buku RTK Makro dari Bab I sampai dengan Bab II oleh narasumber dari Pusat Perencanaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Ibu RIni Nurhayati, S.T., M.T dan tim pendamping lainnya. Untuk kabupaten yang belum menyelesaikan penyusunan Buku RTK tahun ini diharapkan dapat menyelesaikan penyusunan d tahun berikutnya dengan didampingi oleh tim penyusunan Buku RTK Makro dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu dan Tim Pendampin dari Pusat Perencanaan Kementerian Ketenagakerjaan RI. Dari 9 Kabupaten 1 Kota di Tahun 2024 hanya tiga kabupaten yang telah menyelesaikan penyusunan Buku RTK Makro periode

Tahun 2024-2029, untuk kabupaten lainnya masih sampai pada tahap penyusunan bab I dan II dikarenakan masih terbatasnya SDM dan anggaran, diharapkan untuk tahun berikutnya dapat menyelesaikan penyusunan sampai pada bab akhir.

3. Persentase Pencari Kerja yang Dilatih

Pada tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu mengadakan pelatihan yang diikuti oleh **1.930 orang** pencari kerja yang tersebar di 7 UPTD dengan sumber dana dari APBD dan APBN. Berikut data pelatihan kerja bagi tenaga kerja di Provinsi Bengkulu :

Tabel. 3.2.3

Persentase Pencari Kerja Yang Dilatih

Pada UPTD. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu

NO.	PELAKSANA	SATUAN	PESERTA	PENDAFTAR
			2024	2024
1	UPTD. Pelatihan Kerja Bengkulu	Org	496	577
2	UPTD. Pelatihan Kerja Kepahiang	Org	512	583
3	UPTD. Pelatihan Kerja Bengkulu Selatan	Org	298	303
4	UPTD. Seluma	Org	96	123
5	UPTD. Mukomuko	Org	192	233
6	UPTD. Bengkulu Tengah	Org	176	200
7	UPTD. Bengkulu Utara	Org	160	170
	TOTAL	**Org**	**1.930**	**2.189**

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4. Persentase Pencari Kerja Yang Mendapatkan Sertifikasi Kompetensi

Untuk mengetahui pencari kerja yang mendapatkan sertifikasi kompetensi dapat dilihat dari seberapa banyak pencari kerja yang mengikuti uji kompetensi, berikut data pencari kerja yang mengikuti uji kompentensi yang di adakan di UPTD Pelatihan Kerja:

Tabel 3.2.4

Persentase Pencari Kerja Yang Mendapatkan Sertifikasi Kompetensi di Provinsi Bengkulu

NO.	Uraian	Satuan	Jumlah Peserta	Lulus UJK
			2024	2024
1	UPTD. Pelatihan Kerja Bengkulu	Org	496	458
2	UPTD. Pelatihan Kerja Kepahiang	Org	512	454
3	UPTD. Pelatihan Kerja Bengkulu Selatan	Org	298	294
4	UPTD. Seluma	Org	96	56
5	UPTD. Mukomuko	Org	192	133
6	UPTD. Bengkulu Tengah	Org	176	176
7	UPTD. Bengkulu Utara	Org	160	157
	TOTAL		**1.930**	**1.728**

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5. Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Mengikuti bursa kerja adalah sebuah kesempatan bagi para pencari kerja tidak hanya untuk memperoleh pekerjaan namun juga secara langsung bertatap muka menjalin networking dengan HR personalia dari berbagai perusahaan. Selain itu kamu juga dapat berlatih wawancara kerja karena akan berkomunikasi dengan banyak rekruter secara langsung. Mencari lowongan kerja secara online biasanya terbatas dan terkadang tidak cocok dengan pendidikan, keahlian ataupun pengalaman kerjamu sebelumnya.

Dengan mengikuti bursa kerja kamu memiliki kesempatan untuk bertanya langsung dan mengetahui semua jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan tertentu. 50-80 persen pekerjaan diisi melalui networking dan lowongan yang dipasang di media online mungkin hanya sebanyak 30 persen dari total pekerjaan yang dibutuhkan. Bursa kerja bisa menjadi kesempatan bagi para pencari kerja yang belum memiliki networking yang luas untuk meningkatkan peluang berkarir. Selain melalui online, job fair adalah tempat yang efektif bagi detikers untuk mencari dan melamar pekerjaan.

Pasalnya, terdapat sejumlah perusahaan yang biasanya berpartisipasi dalam acara ini. Job fair menjadi tempat yang pas bagi pencari kerja karena perusahaan yang ikut serta biasanya tengah membuka atau tersedia posisi kosong. Karena itu, job seeker yang datang ke job fair dapat langsung melamar posisi terbuka di perusahaan tersebut. Sejumlah perusahaan yang hadir di job fair umumnya diwakilkan oleh para perekrut atau HRD masing-masing. Di sini, mereka mencari kandidat tepat yang cocok untuk mengisi posisi di perusahaan dan memungkinkan untuk mewawancarai langsung calon kandidat di tempat. Job Fair Tahun 2024 dengan jumlah peserta **336 Orang**, lowongan pekerjaan yang tersedia **4900 dari 36 perusahaan** yang mengikuti Job Fair, dan jumlah yang ditempatkan sebanyak **175 Orang** *(data Job Fair Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara).* Persentase pencari kerja yang ditempatkan pada Tahun 2024 sebesar **62,72 persen.**

Jumlah pelamar pada Job Fair tahun 2023 **sebanyak 279 Orang** dan yang ditempatkan sebanyak **72 Orang**, dengan ini dapat dianalisasi jumlah orang yang ditempatkan mengalami kenaikan sebanyak **103 Orang**, hal ini disebabkan **karena** Masyarakat dapat merasakan manfaat dari Job Fair ini yaitu skala perusahaan yang ada di Job Fair biasanya besar, bahkan sebagian jarang didengar. Disinilah dapat eksplor lebih jauh tentang perusahaan, jadi referensi bertambah banyak. Dengan bertambahnya referensi, peluang untuk diterima di suatu perusahaan besar. Tidak hanya swasta, beberapa perusahaan BUMN juga sering bergabung dalam suatu Job Fair.

Tabel 3.2.5

Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan Tahun 2024

No.	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
1	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan	Orang	100	175
2	Jumlah Pencari Kerja terdaftar pada Job Fair	Orang	279	336

Sumber data : Disnakertrans

6. Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu sebagai wadah untuk menyelesaikan perselisihan diantara perusahaan dengan pegawai pada perusahaan tersebut. Pada Tahun 2024 jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial **sebanyak 30 kasus**, yang dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama sebanyak 18 kasus, masih dalam proses 11 kasus dan 1 kasus yang ditutup. Pada Tahun 2024 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial **ditargetkan 10 kasus**, dan dapat diselesaikan sebanyak 18 kasus, sehingga **capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 180 persen.** Pada Tahun 2023 capaian kinerja sebesar 100 persen, dimana jumlah kasus yang dihadapi sebanyak **29 kasus** dan dapat terselesaikan sebanyak **14 kasus.** Target kasus yg terselesaikan pada **Tahun 2023 sebanyak 10 kasus,** yang dapat terselesaikan sebanyak **14 kasus sehingga capaian kinerja sebesar 140 persen**.

Meningkatnya capaian kinerja ini **disebabkan karena** semakin bertambahnya kasus perselisihan pada perusahaan yang dapat diselesaikan, dan pekerja mulai memahami tentang berbagai peraturan perundang-undangan khususnya di bidang ketenagakerjaan dan prosedur tata cara penyelesaian masalah hubungan industrial serta berbagai masalah ekonomi perusahaan.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu pada Tahun 2024 dengan permasalahan perselisihan berupa PHK ada 12 (dua belas) kasus, masalah perselisihan hak sebanyak 7 (tujuh) kasus dan masalah perselisihan kepentingan sebanyak 1 (satu) kasus, diantaranya dapat diselesaikan dengan perjanjian Bersama, penyelesaian dalam proses, Ditutup karena pekerja mencabut surat pengaduan. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terdapat 3 (tiga) langkah penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu melalui upaya bipartit, tripartit dan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. **Perundingan bipartit** adalah perundingan antara pengusaha/gabungan pengusaha dan pekerja/serikat pekerja atau antar serikat pekerja dalam satu perusahaan yang berselisih.

Pada prinsipnya memang ketika terjadi perselisihan, upaya yang wajib diupayakan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara

musyawarah untuk mencapai mufakat. Perundingan bipartit harus diselesaikan dalam waktu maksimal 30 hari. Namun jika dalam jangka waktu tersebut salah satu pihak menolak berunding atau tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.

Apabila perundingan bipartit ternyata mencapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian bersama ini bersifat mengikat dan menjadi hukum sehingga wajib dilaksanakan oleh para pihak. Setelah itu, perjanjian bersama wajib didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan perjanjian bersama.

Sehingga, jika perjanjian tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Hubungan Industrial tersebut, apabila perundingan bipartit gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan dengan perundingan tripartit. **Perundingan tripartit** adalah perundingan antara pekerja dan pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Perundingan tripartit bisa melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase, **gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial** dapat diajukan apabila upaya tripartit yang meliputi mediasi dan konsiliasi gagal. Namun tidak demikian jika perselisihan telah diselesaikan melalui arbitrase, karena tidak dapat diajukan lagi ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Tabel 3.2.6
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

No	Uraian	Satuan	Tahun
			2024
1	Jumlah kasus pada perusahaan	Kasus	30
2	Jumlah penyelesaian kasus	Kasus	30

Sumber data: Disnakertras

7. Persentase Perusahaan Taat NSPK (Norma Standar, Prosedur dan Kriteria)

Perusahaan di Provinsi Bengkulu berjumlah **9.033, yang terdiri dari 8.176 Perusahaan** Mikro, 391 Perusahaan Kecil, 336 Perusahaan Menengah dan 130 Perusahaan Besar. Persentase Perusahaan yang

menerapkan tata kelola kerja yang layak sebesar 100 persen, persentase perusahaan Yang menerapkan Peraturan Perundangan **100 persen**, persentase Perusahaan Yang Terdaftar memalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan 100 persen, persentase jumlah Kasus Yang diselesaikan dengan perjanjian kerja bersama 100 persen. Dibandingkan pada tahun sebelumnya capaian kinerja **meningkat 28 persen, hal ini dikarenakan** perusahaan-perusahaan di Provinsi Bengkulu memahami bahwa dokumen WLKP menjadi salah satu syarat utama sebelum perusahaan dapat mengajukan permohonan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Tabel 3.2.7

***Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja* Perusahaan Taat NSPK**

No	Uraian	Satuan	Jumlah
			2024
1	Jumlah Perusahaan	Perusahaan	9.033
2	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Perusahaan	9.033
3	Jumlah Perusahaan Yang menerapkan Peraturan Perundangan	Perusahaan	9.033
4	Jumlah Peusahaan Yang Terdaftar memalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan	Perusahaan	9.033
5	Jumlah Kasus Industrial Perselisihan Hubungan	Kasus	30
6	Jumlah Kasus Yang diselesaikan dengan Perjanjian Kerja Bersama	Kasus	18

Sumber data ; Disnakertrans

8. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)

- **Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)**

Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu Tahun 2025 Sebesar **Rp. 2.670.039,-** (Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah). Dibandingkan pada tahun sebelumnya Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu **meningkat sebesar Rp. 251.759,-** (Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), dimana Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu Tahun 2024 **sebesar Rp. 2.418.280,-** (Dua Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah). Dengan diteteapkannya Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.632.DKKTRANS.Tahun 2024 tentang Upan Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2025, maka untuk perusahaan yang memberikan upah lebih rendah dari ketentuan Upan Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu, harus menyesuaikan dengan Keputusan Gubernur. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu

sebagai Instansi Teknis akan melakukan sosialisasi terhadap Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu Tahun 2025. Jika upah minimum meningkat maka diharapkan produktivitas tenaga kerja juga akan meningkat.

- **Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)**

  Selain menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), Pemerintah Provinsi Bengkulu juga menetapkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) untuk seluruh kabupaten dan kota.

  Di antara sejumlah kabupaten dan kota yang terdapat di provinsi tersebut, Kabupaten Mukomuko menjadi wilayah dengan UMK terbesar di tahun 2023 ini, yakni sebesar **Rp 3.052.118,-** (Tiga Juta Lima Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah)**,** UMK ini lebih besar dari UMP Provinsi Bengkulu itu sendiri yang jumlahnya **Rp. 2.670.039,-** (Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah). Selain Kabupaten Mukomuko yang mengalami kenaikan UMK, Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara juga dapat meningkatkan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) untuk Tahun 2024. Hal ini tentu dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal, termasuk kondisi perekonomian dan hal lainnya yang berkaitan dengan itu.

  Berikut ini adalah daftar lengkap UMK Tahun 2024 yang berlaku di seluruh kabupaten dan kota yang terdapat di Bengkulu:

  - Kabupaten Mukomuko: Rp 3.052.118,-
  - Kota Bengkulu: Rp 2.930.669,-
  - Kabupaten Bengkulu Tengah: Rp 2.816.835,-
  - Kabupaten Kepahiang: Rp 2.418.280,-
  - Kabupaten Rejang Lebong: Rp 2.418.280,-
  - Kabupaten Lebong: Rp 2.418.280,-
  - Kabupaten Bengkulu Utara: Rp 2.754.653,-
  - Kabupaten Seluma: Rp 2.418.280,-
  - Kabupaten Bengkulu Selatan: Rp 2.418.280,-
  - Kabupaten Kaur: Rp 2.418.280,-

  Kenaikan UMK untuk tahun 2024 ini diharapkan bisa membantu para pekerja di wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih baik. Penerapan UMK yang baru ini akan dimulai sejak awal tahun, tepatnya per tanggal 1 Januari 2024 ini. Keputusan Gubernur Bengkulu NOMOR : M.647.DKKTRANS.TAHUN 2024.

Dalam mencapai target sasaran kinerja penurunan angka pengangguran didukung anggaran APBD Provinsi Bengkulu tahun 2024 yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 9.846.049.000 dengan realisasi Rp. 9.345.054 atau 94,91%.

Tujuan 4

Meningkatnya Perekonomian daerah yang berkelanjutan

No	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2024	
			Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,7 – 5,3	3,96	--	4,62	98,29
2.	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	71,09	72,75	--	73,45	103,3

Sumber : Kementerian LHK

Pada RPJMD Provinsi Bengkulu 2021-2026, pada tujuan meningkatnya Perekonomian Daerah yang berkelanjutan dibentuk dengan 2 indikator yaitu; Indikator Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan 2 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

1. **Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)** adalah tingkat peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu negara atau daerah selama jangka waktu tertentu yang dihitung secara tahunan. Laju ini dihitung sebagai persentase perubahan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun sebelumnya.

   Berdasarkan data BPS, Perekonomian Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang positif. Pada triwulan II tahun 2024, ekonomi Provinsi Bengkulu tumbuh sebesar 4,62%, pertumbuhan ini sudah memenuhi target pada RPJMD 2021-2026 yaitu 4,7 - 5,3. Hal ini dapat dilihat pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bengkulu pada triwulan II tahun 2024 mencapai Rp 26,50 triliun, dan Rp13,91 triliun.

Sedangkan pada triwulan ke-III tahun 2024, ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan sebesar 4,62 persen. Pertumbuhan terjadi pada 16 lapangan usaha; tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,68 persen; diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,32 persen; dan Jasa Lainnya sebesar 9,24 persen serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan sebesar 2,62 persen.

Secara nasional pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu masih lebih redah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II tahun 2024 adalah 5,17 % sedangkan Provinsi Bengkulu triwulan II tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,70 %, namun demikian pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu masih menunjukan tren yang posistif dan stabil.

Beberapa sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada triwulan II tahun 2024 adalah:

- Sektor Transportasi dan Pergudangan: mengalami pertumbuhan sebesar 14,73%
- Sektor Pengeluaran Konsumsi Pemerintah: mengalami pertumbuhan sebesar 12,12%

Dalam analisisnya, perlu diingat bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti inflasi, pengangguran, dan kinerja sektor riil. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan analisis yang lebih mendalam untuk memahami dinamika pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu.

2. **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** merupakan salah satu tolak ukur dari tercapainya tujuan meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan. IKLH adalah indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Provinsi di Indonesia, dimana

IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut.

Dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga didapat gambaran awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada peroide tertentu. IKLH tahun 2020 adalah 69,92 sehingga pada penetapan target pada akhir RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2021-2026 adalah 70-75, dengan capaian pada akhir pada tahun 2024 adalah 73,45.

Dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga didapat gambaran awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada peroide tertentu.

Indeks kualitas lingkungan hidup diukur dari Indeks kualitas Air, Indeks kualitas udara dan Indeks kualitas Tutupan Hutan/Lahan. Propinsi Bengkulu melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup melalui 2 (tiga) indikator yaitu indeks kualitas air dan indeks kualitas udara. Sedangkan indeks kualitas tutupan hutan/lahan dilakukan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ripublik Indonesia.

Berdasarkan surat kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penyampaian hasil terkini nilai IKLH tahun 2024, indek kualitas lingkungan hidup Provinsi Bengkulu tahun 2024 adalah 73,45 pada rating **Baik** dengan capaian 103,3 % dari target yang telah ditetapkan. Berikut IKLH Provinsi Bengkulu dalam kurun 3 (tiga) tahun terkahi :

Grafik 4.2.1. Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2023-2024

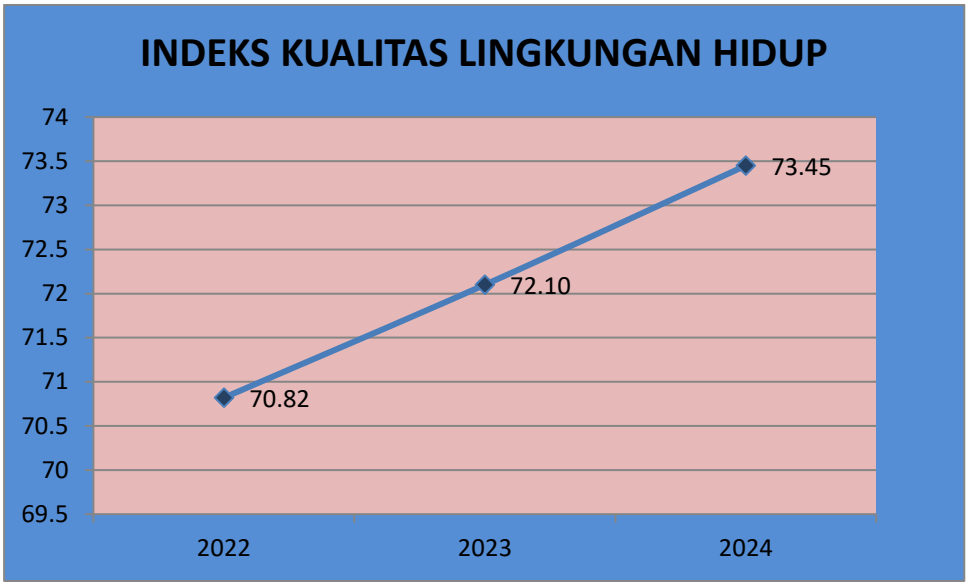

Sumber : Kementerian LHK dan BPS

Berdasarkan grafik di atas, maka nilai IKLH Provinsi Bengkulu cendrung meningkat dari tahun 2022-2024, dimana terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ketahunnya. Dari tahun 2022 ke 2023 terjadi peningkatan sebesar 1,28 dan dari tahun 2023 ke 2024 terjadi peningkatan nilai sebesar 1,35. Namun walaupun demikian nilai IKLH Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 kurang 0,12 poin dari IKLH Nasional yaitu 73,57.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan nilai IKLH Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu, maka ada 3 Kabupaten yaitu; Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Lebong nilai IKLHnya lebih tinggi dari nilai IKLH Provinsi, sedangkan 7 Kabupaten/kota lainnya dibawah nilai IKLH Provinsi. Perbedaan nilai IKLH Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tebal berikut :

Tabel. 4.2.1 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

No	Kabupaten	Nilai IKLH	Rating
1.	Bengkulu Selatan	67,03	Sedang
2.	Bengkulu Tengah	62,56	Sedang
3.	Bengkulu Utara	77,39	Baik
4.	Kaur	78,3	Baik

5.	Kepahiang	63,44	Sedang
6.	Lebong	73,5	Baik
7.	Mukomuko	66,82	Sedang
8.	Rejang Lebong	71,09	Baik
9	Seluma	47,95	Kurang
10	Kota Bengkulu	62,5	Sedang

Sumber data: Kemeterian LHK

Peningkatan nilai IKLH Provinsi Bengkulu ditentukan dari hasil penilaian/pengukuran terhadap indeks kualitas air dan Indeks kualitas/pencemaran Udara.

A. Indeks Kualitas Air

Nilai Indeks Kualitas Air merupakan salah satu penentu peningkatan nilai IKLH Provinsi Bengkulu. Penilaian indeks kualitas air dilakukan terhadap pengambilan sampling air sungai di 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai di wilayah Bengkulu, yang terdiri dari 2 tahap uji sampling tahap 1 (musim kemarau) dan tahap 2 (musim penghujan), dengan masing-masing sample diuji terhadap 3 (tiga) titik uji sample di setiap Daerah Aliran Sungai (Hulu, tengah dan Hilir) dan dibandingkan dengan uji sampling tahap 2 (musim penghujan) telah dilaksanakan. Selanjutnya hasil uji disampaikan kekemnterian LHK.

Tabel 4.2.2 Daerah Aliran Sungai di wilayah Bengkulu yang dilaksanakan uji sampling

NO.	DAERAH ALIRAN SUNGAI	WILAYAH	PERIODE/ TAHAPAN	KETERANGAN
1.	Sungai Bengkulu	Benteng Kota Bengkulu	1	Tim penguji Lab. DLH Kota Bengkulu
2.	Sungai Nelas	Seluma-Kota Bengkulu	1	Tim penguji Lab. DLH Kota Bengkulu
3.	Sungai Ketahun	Kab. Lebong, Kab. Bengkulu Utara	1	Tim penguji Lab. DLH Kota Bengkulu

Sumber Data : DLHK

Hasil indeks kualitas air berdasarkan hasil sampling tahun 2024 adalah 51,99 dari atau 102,86 % dari target 51,44 meningkat dari capaian tahun lalu yaitu 48,98. Berikut grafik indeks kualitas air dalam 4 tahun terakhir.

Grafik 4.2. Indeks Kualitas Air

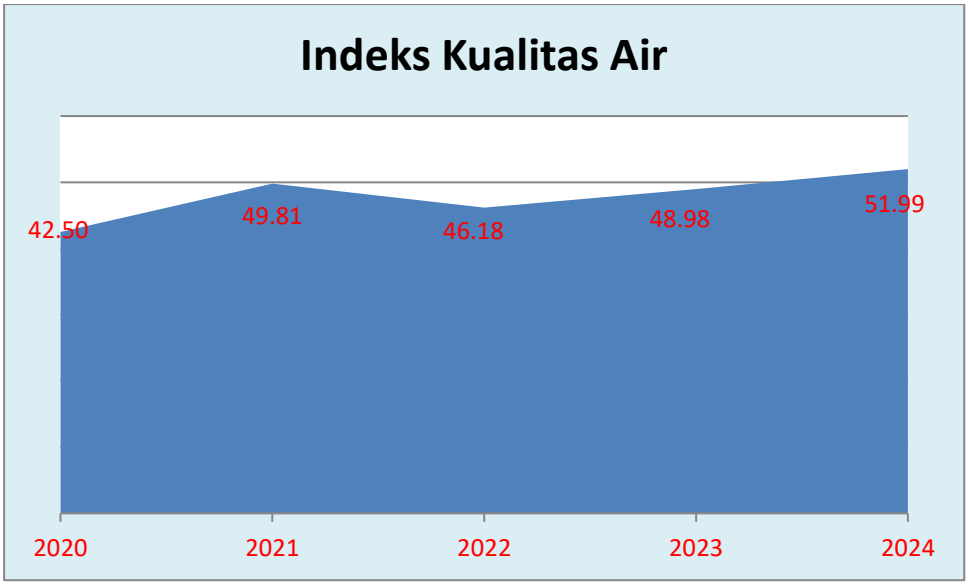

B. Indeks Kualitas / Pencemaran Udara

Indeks kualitas/pencemaran udara juga penunjang hasil nilai IKHL Provinsi Bengkulu yaitu dengan melakukan pemantauan kualitas udara ambien dari semua titik pemantauan di Provinsi Bengkulu masih memenuhi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUA) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Pada tahun 2024 Hasil penghitungan Indeks kualitas Udara mencapai 94,13 dari target 92,00 atau tercapai 102,31 %, capaian ini meningkat 2,86 dari capaian tahun lalu yaitu hanya 91,27.

Ada beberapa Faktor Pendorong peningkatan atas kualitas udara yaitu sebagai berikut :

1. Tidak adanya kebakaran hutan.
2. Adanya Vegetasi hutan yang masih cukup untuk menampung zat atau pertikel pencemar yang diemisikan oleh sumber pencemar.

   Keadaaan hutan memang setiap tahun pasti berkurang karena ini erat kaitannya dengan faktor ekonomi dan sosial. Namun keadaan hutan yang didominasi oleh pohon dan tumbuhan di Provinsi Bengkulu Masih bisa mengabsorbsi zat dan partikel pencemar sehingga kualitas udara di daerah Bengkulu masih tergolong baik.
3. Masih kurangnya sumber utama pencemaran.

4. Pabrik industri dan emisi kendaraan bermotor merupakan sumber utama pencemaran udara. Bengkulu sebagai daerah yang berkembang belum memiliki pabrik dan kendaraan yang padat sehingga zat dan pertikel pencemar dari sumber ini masih dibawah standar Baku Mutu Udara
5. Belum optimalnya kesungguhan para pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan (IPPKH/PPKH) melaksanakan kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai
6. Belum optimal pelaksanakan reklamasi hutan oleh pemegang IUP dalam Kawasan

Tabel 11.

Hasil Pehitungan IKA,IKU,IKL, IKALl, IKLH 2024

KOMPONEN	RUMUS	NILAI
Indeks Kualitas Air		51,99
Indeks Kualitas Udara		94,13
Indeks Kualitas Lahan		55,,6
Indeks Kualitas Air Laut		81,77
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	(0,340xIKA) + (0,428xIKU) + (0,133xIKL) + (0,099xIKAL)	
	(0,340xI51,99) + (0,428x94,13) + (0,133x55,,6) + (0,099x81,77)	73,45

Sumber data : DLHK Provinsi Bengkulu

<u>Berikut beberapa rekomendasi Evaluasi :</u>

Dari hasil capaian indikator kinerja diatas maka ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan agar indikator tersebut dapat tercapai :

- Pemerintah Daerah harus benar-benar memperhatikan masalah lingkungan terutama kualitas air dengan memberikan dana yang cukup dalam memonitor lebih banyak lagi sungai dan titik sampel serta untuk mencari solusi dalam penanganan pencemaran.
- Untuk mengurangi permasalahan pencemaran pada aliran DAS dan Sub-DAS Ulu Musi tersebut disarankan untuk membuat Biodigester, fasilitas umum seperti WC Komunal atau IPAL Komunal, dan tempat pembuangan sampah pada titik – titik tertentu yang lokasinya padat penduduk dan merupakan tempat usaha serta berlokasi di sepanjang aliran sungai

- Terlihat bahwa kebiasaan masyarakat membuang sampah ke badan sungai perlu diatasi secara baik dan terprogram oleh lembaga yang kompeten, dan perlu dilakukan sosialisasi untuk tidak membuang sampah kepada masyarakat yang berada disekitar aliran sungai dengan metode pendekatan kearifan lokal.
- Perlu adanya kegiatan pembinaan terhadap masyarakat sekitar hutan secara terus menerus agar tidak melakukan kegiatan yang dapat melanggar hukum bidang kehutanan.
- Melakukan pemantauan ulang pada waktu yang hampir berdekatan untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai SOP pengambilan sampel kualitas udara.
- Memperbanyak RTH (Ruang Terbuka Hijau)
- Perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaku usaha/industri dalam hal pengendalian pencemaran udara di Provinsi Bengkulu
- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pemegang (IPPKH/PPKH secara berkala (semesteran dan tahunan)
- Meningkatkan anggaran untuk pembinaan dan pengendalian IPPKH/PPKH
- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pemegang IUP Tambang dalam kawasan hutan secara berkala
- Meningkatkan anggaran untuk pembinaan dan pengendalian pemegang IUP tambang dan kawasan hutan dengan target 5 (lima) tahun

C. Kualitas Cakupan Tutupan Lahan/Hutan

Cakupan Tutupan Lahan (CTL) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur luas dan jenis tutupan lahan di suatu wilayah, termasuk hutan, non-hutan, dan lahan lainnya. Persentase kawasan deforestrasi merupakan satu indikator dalam mengukur persentase capaian cakupan tutupan lahan. Berikut cakupan tutupan lahan di Provinsi Bengkulu tahun 2023-2024 :

Tabel 4.2.4 Persentase kawasan Deforestrasi

No	Uraian /Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi		% Capaian 2024
				Thn 2023	Thn 2024	
1	Persentase Kawasan Deforestrasi	%	29,44	30,87 %	15,18	51,56 %
Persentase Capaian Sasaran adalah						51,56 %

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu

Sedangan indeks kualitas tutupan lahan Provinsi Bengkulu 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Indeks Kualitas Tutupan Lahan Provinsi Bengkulu

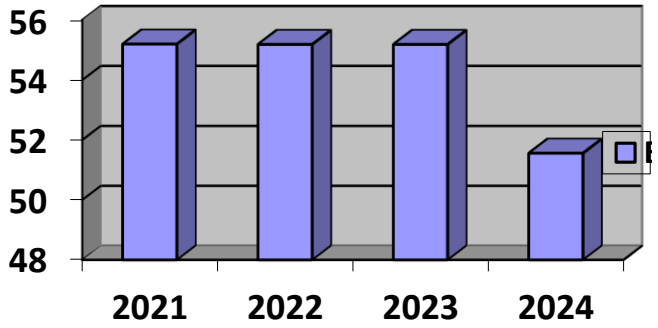

Dari grafik di atas, tahun 2024 indek cakupan lahan di Provinsi Bengkulu mengalami penurunan dari tahun tahun sebelumnya karena terjadi degradasi tutupan lahan yang disebabkan adanya perubahan atau alih fungsi lahan oleh:

1. Pembangunan yang terus meningkat diiringi dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kebutuhan hidup menyebabkan semakin bertambahnya tekanan fisik terhadap kawasan konservasi
2. Masyarakat sekitar hutan banyak yang memenuhi kebutuhan hidupnya seperti bahan makanan, pakaian dan bahan bangunan dari dalam kawasan hutan.
3. keadaan ekonomi yang memicu terjadinya konversi lahan hutan untuk lahan pertanian atau penggunaan lahan lainnya
4. adanya perambahan hutan, kebakaran hutan dan aktivitas destruktif (perusakan) lainnya
5. Meningkatkan kegiatan perambah hutan, kebakaran dan ilegal loging di kawasan hutan lindung dan hutan produksi

Kerusakan hutan adalah berkurangnya luasan areal hutan karena kerusakan ekosistem hutan yang sering disebut degradasi hutan ditambah juga penggundulan dan alih fungsi lahan hutan atau istilahnya deforestasi.

Hutan yang rusak Bengkulu tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di daerah ini, termasuk di Kota Bengkulu, hutan yang rusak tersebut, terdiri dari hutan lindung, Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), hutan produksi terbatas, hutan cagar alam, hutan wisata, hutan taman burung, hutan produksi, dan jenis hutan lainnya. Kerusakan hutan di daerah ini, akibat aksi perambahan yang dilakukan masyarakat untuk dijadikan perkebunan. Selain itu, kerusakan hutan di Bengkulu

juga disebabkan aksi pembalakan liar atau *illegal logging* .Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menghentikan aksi pembalakan kayu liar di sejumlah kawasan hutan di beberapa kabupaten di Bengkulu

Tabel 4.2.5.
Data Kawasan Deforestrasi di Provinsi Bengkulu

No.	Kabupaten/Kota	Kondisi Tutupan Lahan	Fungsi Kawasan (Ha)					Jumlah (Ha)
			KSA/ KPA	HL	HPT	HP	HPK	
1	Kaur	Kritis	-	3.062,13	14.802,04	781,95	3.481,43	22.127,55
		Sangat Kritis	-	4,12	1.635,84		0,91	1.640,87
2	Bengkulu Selatan	Kritis	-	5.607,09	8.877,54	1.421,24	472,41	16.378,28
		Sangat Kritis	-	103,18	51,75		0,81	155,74
3	Seluma	Kritis	-	4.764,64	8.417,72	-	5.411,37	18.593,73
		Sangat Kritis	-	2.102,27	31,56	-	208,62	2.342,45
4	Bengkulu Tengah	Kritis	-	12.400,50	2.362,67	866,95	4.844,14	20.474,26
		Sangat Kritis	-	118,40	17,69	150,77	99,65	386,51
5	Kepahiang	Kritis	-	12,00	-	-	-	12,00
		Sangat Kritis	-	-	-	-	-	-
6	Bengkulu Utara	Kritis	-	2.446,54	10.724,00	-	2.296,53	15.467,07
		Sangat Kritis	-	-	149,21	-	282,98	432,19

7	Mukomuko	Kritis	-	1.902,14	16.120,64	1.009,39	1.005,37	20.037,54
		Sangat Kritis	-	165,53	1.077,85	271,42	39,04	1.553,84
8	Kota Bengkulu	Kritis	-				5,80	5,80
		Sangat Kritis	-					
9	Lebong	Kritis	-	3.430,40	43,71	-	16.654,26	20.128,37
		Sangat Kritis	-	-	-	-	49,88	49,88
10	Rejang Lebong	Kritis	-				554,86	554,86
		Sangat Kritis	-					
	Jumlah		-	36.118,94	64.312,22	4.501,72	35.408,06	140.340,94

Sumber data ; Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hutan & Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)

Rekomendasi Evaluasi :

Penurunan Indeks tutupan lahan merupakan permasalahan yang komplek. Biasanya kenaikan tingkat ekonomi suatu daerah akan berbanding terbalik dengan tutupan lahan. Semakin tinggi perkembangan ekonomi maka akan semakin besar degrdasi lahan. Namun permasalahan ini bukan tanpa solusi ada beberapa rekomendasi untuk mengurangi tingat degradasi lahan:

1. Memberikan sosialisasi pada masyarakat pentingnya dari keberadaan hutan sehingga masyarakat bisa menjadi pelindung dan penjaga hutan dan lahan yang ada disekitarnya.
2. Memberikan solusi ekonomi bagi masyarakat terutama sekitar hutan agar sanggup menafkahi hidup tanpa merusak lingkungan/hutan.
3. Memonitor dan mengaktifkan early warning system untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan yang disebabkan oleh masyarakat yang membuka lahan.

4. Melakukan perbaikan pal batas setiap perbatasan hutan lindung.
5. Memberikan perhatian lebih bagi kelangsungan hutan dan lahan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan prioritas bidang kehutanan seperti pengamanan dan pengawasan hutan.
6. Memfungsikan dengan baik dan benar Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai ujung tombak penjaga kawasan.
7. Melaksanakan patroli dalam upaya pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan
8. Penyediaan sarana dan prasarana tim polhut

Faktor penghambat tidak tercapainya target adalah :

a. Sedikitnya kegiatan dari sektor Pemerintah maupun swasta yang berkontribusi dalam pemeriksaan sampel air dan udara.
b. Sarana dan Prasarana pendukung yang tidak berfungsi dengan baik lagi/Ruask
c. Tidak adanya Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan. Kualitas Laboratorium ditentukan oleh dua hal yaitu Sumber daya Manusia dan Peralatan. Pemenuhan akan dua hal ini tentu dibutuhkan dana dari APBD, namun akibat kebijakan refocusing yang memaksa kita semua untuk. Akibatnya peningkatan kapasitas laboratorium harus kita tunda karena faktor skala prioritas.
d. Adanya Laboratorium lain yang sudah terakreditasi yakni, Pemerintah Kota bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara

Adapun Program yang mendukung indikator ini adalah Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Provinsi sub kegiatan Pengelolaan pengaduan permasalahan dan perusakan lingkungan hidup tingkat provinsi dan kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah provinsi sub kegiatan penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filnatrofi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sumber dana dari APBD Provinsi Bengkulu sebesar RP. 80.000.000,- dengan realisasi Rp. 76.853.523.

Sebagai rekomendasi adalah Perlu adanya *Co & Co Management* yang baik antara DLHK dan Bappeda dalam menentukan program dan kegiatan prioritas dan Pendanaan agar indikator-indikator sasaran dapat dicapai.

Sasaran 4.1

Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

No	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja			
			Tahun 2023		Tahun 2024	
			Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Persentase konstribusi sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pariwisata, Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB	5,2	14	280	34,03	654,42

Sumber : Olahan data Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2024, Provinsi Bengkulu menetapkan target Persentase pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pariwisata; sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB sebesar 5,4 dengan capaian sebesar 10,92, capaian ini merupakan akumulasi dari pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, perikanan, sektor pariwisata dan sektor pertambangan dan galian. Menurun 3,08 persen dari capaian tahun yang lalu, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. adapun indikator ini didukung oleh 3 sektor yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pariwisata; sektor pertambangan dan penggalian.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), **Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan** pada triwulan III tahun 2024 masih mendominasi struktur perekonomian di Provinsi Bengkulu, ini dibuktikan dengan 29,91 persen sektor ini menyumbang terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu dengan pertumbuhan sebesar 1,64 persen, Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan 0,63% dengan pertumbuhan pada tahun 2023 adalah 1.01 persen.

Sub sektor pertanian menjadi *leading sektor* dengan kontribusi terbesar dalam penciptaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bengkulu. Pada tahun

2010, sebesar 32,96% PDRB Provinsi Bengkulu disumbangkan oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Seiring berjalannya waktu dimana telah terjadi pergeseran dan pengalihan fungsi lahan pertanian, peranan sektor pertanian pun mengalami penurunan. Namun demikian, kontribusinya masih tetap yang terbesar melebihi 25% dari total PDRB Provinsi Bengkulu, yakni sebesar 29,91 % pada tahun 2024. Dengan demikian dapat membuktikan seberapa bergantungnya Provinsi Bengkulu terhadap sektor pertanian.

Berdasakan data BPS Produksi padi di Provinsi Bengkulu tahun 2024 diperkirakan 272.177 ton GKG, mengalami penurunan sebanyak 14.507 ton GKG atau 5,06 persen dibandingkan produksi padi di 2023 yang sebanyak 286.684 ton GKG. Produksi padi tertinggi pada 2023 terjadi di bulan Maret sedangkan pada 2024 terjadi di bulan Mei. Berikut perbadingan hasil tanaman padi di Provinsi Bengkulu tahun 2023 dan 2024:

Grafik 4.1.1 Luas Panen dan Produksi Padi Provinsi Bengkulu tahun 2024

Secara nasional capaian produksi padi tidak dapat dibandingkan karena hasil pertanian/ produksi padi dimasing-masing wilayah diindonesia berdeda-beda karena pengaruh cuaca, tanah, dan teknologi pertanian. Namun berikut disampaikan gambaran data produksi padi provinsi Bengkulu dengan Provinsi Lampung tahun 2024 adalah:

- Bengkulu: 55.775,09 hektare, dengan produksi 272.848,55 ton

- Lampung: 531.715,12 hektare, dengan produksi 2.791.347 ton

Hasil pertanian, kehutanan dan perikanan juga berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi Bengkulu dalam menyediakan lapangan usaha yaitu sebesar 30,82 persen. Selanjutnya disusul Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah transportasi dan pergudangan sebesar 14,73 persen, jasa lainnya sebesar 10,87 persen, dan jasa pendidikan sebesar 9,67 persen.

Dalam mengukur capaian kinerja pada sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2024, Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Tamanan Pangan Hultikultura dan Perkebunan melakukan peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan melakukan pegukuran terhadap capaian Produksi pertanian sebagai berikut:

1. Produksi Padi
2. Produksi Jagung
3. Produksi Bawang
4. Produksi Cabai
5. Produksi Jeruk
6. Produksi Kopi
7. Produksi Kepala Sawit Rakyat
8. Produksi Karet Rakyat

Dari ke delapan hasil produksi pertanian diatas tiga tanaman produksi pertanian yang hasil panennya melampaui batas yaitu; Produksi Bawang dengan tingkat capaian 111,97%, Produksi Cabai dengan tingkat

capaian 118,27% dan Produksi Jeruk dengan tingkat capaian 188,27. Berikut tabel capaian produksi pertanian selama 3 tahun terkahir.

Tabel 4.1.1. Tingkat Capaian Produksi Komoditas Unggulan Tahun

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi			% Capaian 2024
				2022	2023	2024	
1)	Produksi Padi	Ton	298.715	281.610	286.684	272.203	91,12
2)	Produksi Jagung	Ton	93.027	128.992	68.206	84.646	90,99
3)	Produksi Bawang	Ton	635	1227,1	686	711	111,97
4)	Produksi Cabai	Ton	74.000	73.558	100.040	87.520	118,27
5)	Produksi Jeruk	Ton	11.487	21.372	23.355	21.684	188,77
6)	Produksi Kopi	Ton	67.660	56.029	50.745	54.084	79,93
7)	Produksi Sawit Rakyat	Ton	1.080.000	1.069.003	998.544	1.000.962	92,68
8)	Produksi Karet Rakyat	Ton	103.345	90.109	91.860	88.040	85,19
	Rata-rata						***107,37***

Sumber data: Dinas Tanaman Pangan Hultikultura dan Perkebunan 2024

Berdasarkan tabel diatas, bahwa produksi pertanian terendah adalah Produksi Kopi, Produksi Karet Rakyat, Produksi Jagung, Produksi Padi, dan Produksi Kelapa Sawit Rakyat. Namun jika dibandingkan dengan Realisasi tahun 2023 hasil produksi pertanian seperti Jagung meningkat sebesar 24,10%, Produksi Kopi meningkat 6,58%, Produksi Bawang meningkat 3,64% dan Produksi Kelapa Sawit Rakyat meningkat 0,24%, hal ini artinya ke-empat hasil produksi pertanian tersebut mengalami peningkatan ditahun 2024.

Sebaliknya ada empat produksi pertanian yang mengalami penurunan ditahun 2024 seperti Produksi Cabai menurun sebesar -12,51%, Produksi Jeruk menurun sebesar -7,15%, Produksi Padi menurun sebesar 5,05% dan Produksi Karet Rakyat menurun sebesar 4,16%. Berikut tabel capaian target jangkah menengah sampai tahun 2024

Tabel 4.1.2.
Tingkat Capaian Target Jangka Menengah sampai dengan tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (2026)	Kondisi Awal Tahun 2021	Realisasi			Selisih 2024 vs 2023 (%)	Tingkat Capaian s.d. tahun 2026	
					2022	2023	2024		Volume	(%)
1)	Produksi Padi	Ton	1.493.614	272.773	281.610	286.684	272.203	-5,05	840.498	56,27
2)	Produksi Jagung	Ton	465.180	83.115	128.992	68.206	84.646	24,10	281.844	60,59
3)	Produksi Bawang	Ton	3.178	1.242	1308,68	686	711	3,64	2.706	85,14
4)	Produksi Cabai	Ton	265.968	64.956	73.558	100.040	87.520	-12,51	261.118	98,18
5)	Produksi Jeruk	Ton	87.793	22.662	21.372	23.355	21.684	-7,15	66.411	75,65
6)	Produksi Kopi	Ton	338.431	62.168	56.029	50.745	54.084	6,58	160.858	47,53
7)	Produksi Sawit Rakyat	Ton	3.980.695	727.269	1.069.003	998.544	1.000.962	0,24	3.068.509	77,08
8)	Produksi Karet Rakyat	Ton	443.539	113.521	90.109	91.860	88.040	-4,16	270.009	60,88
	Rata-rata Sasaran 2							0,71		*70,16*

Sumber Data : Nilai Sakip dari Inspektorat Prov. Bengkulu, Produksi Padi berdasarkan Publikasi BPS, Produksi Jagung Berdasarkan https://sitampan.pertanian.go.id/sipdps-BPS, Produksi Bawang, Cabai dan Jeruk Berdasarkan SIPEDAS Hortikultura-BPS, Produksi Kelapa Sawit, Kopi dan Karet Berdasarkan Hasil Sinkronisasi Ditjen BUN - DATIN Kementan.
Keterangan : Data tahun 2024 merupakan angka sementara.

Jika dilihat dari tabel diatas capaian atas target RPJMD Provinsi Bengkulu pada tahun ke-3 atas indikator sektor pertanian sudah tercapai sesuai target.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan nasional, capaian produksi komoditas unggulan yang masuk dalam 10 besar nasional adalah Sawit, Karet dan Kopi baik di tahun 2022 maupun di tahun 2023. Sedangkan Andil secara nasional yang cukup besar adalah produksi Cabai dan Jeruk walau pun tidak termasuk 10 besar. Sedangkan Padi dan Jagung, andil secara nasional kurang dari 1%. Ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1.3. Posisi Capaian Produksi Komoditas Unggulan Provinsi Bengkulu di Bandingkan dengan Nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Posisi Produksi Secara Nasional	
			2022	2023	2024	2023	2024
1)	Produksi Padi	Ton	281.610	286.684	272.203		
2)	Produksi Jagung	Ton	128.992	68.206	84.646		
3)	Produksi Bawang	Ton	1308,68	686	711		
4)	Produksi Cabai	Ton	73.558	100.040	87.520		

5)	Produksi Jeruk	Ton	21.372	23.355	21.684		
6)	Produksi Kopi	Ton	56.029	50.745	54.084	5 Besar	n/a
7)	Produksi Sawit Keseluruhan	Ton	1.069.003	998.544	1.000.962	10 Besar	n/a
8)	Produksi Karet Keseluruhan	Ton	90.109	91.860	88.040	10 Besar	n/a

Sumber data: Dinas Tanaman Pangan Hultikultura dan Perkebunan

Ada pun faktor menurunnya hasil produksi pertanian seperti produksi padi dan jagung disebabkan terjadi kemarau panjang mulai Juni-Oktober di tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran waktu tanam dan waktu panen sudah terjadi ditahun berikutnya. Walaupun demikian kondisi tersebut dapat diminimalisir karena ada sebagian areal tetap dapat berproduksi didorong oleh efisiensi pemanfaatan waktu dengan adanya bantuan bibit unggul dan alat mesin pertanian terutama pompa air irigasi. Khusus untuk tanaman padi juga disediakan asuransi untuk perlindungan dari gagal panen karena kekeringan. Faktor pendukung lainnya adalah Pengadaan Alsintan Gratis untuk Petani dan Menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi bagi Petani yang merupakan program perioritas RPJMD.

Berikut Beberapa program yang mendukung dalam upaya meningkatkan hasil pertanian di tahun 2024 pada dinas Tanaman Pangan Hultikultura dan Perkebunan yaitu:

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
2. Program penyediaan dan pengembangan PRA sarana pertanian
3. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
4. Program perizinan usaha pertanian
5. Program penyuluhan pertanian

Program-program ini didukung oleh beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Dinas TPHP Provinsi Bengkulu dengan total anggaran RP. 86.265.373,- dengan realisasi RP. 84.736.550,-, terjadi efisensi sebesar 1,78 % di tahun 2024.

Sebagai rekomendasi pada sektor pertanian terhadap PDRB adalah:

1. Menumbuhkembangkankan minat dan aspirasi petani dalam meningkatkan komoditas dan lokasi unggulan.
2. Meningkatkan alokasi untuk mendukung program dan kegiatan.

Sub sektor kehutanan merupakan salah satu sektor yang mendukung tercapainya indikator Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan,

Perikanan, Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata, Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB.

Tabel .4.1.5

Persentase Kontribusi sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB

No	INDIKATOR KINERJA	Target 2024	Realisasi			
			Th.2023		Th.2024	
			Realisasi	%	Realisasi	%
1	Persentase Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	0,55%	0,41 %	82 %	0,41 %	74, %

Sumber Data : BPS Provinsi Bengkulu

Pada tahun 2024, target pemerintah provinsi Bengkulu pada Persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian Daerah adalah 0,5 dengan capaian 0,41 dan realisasi sebesar 0,74 %, capaian ini menurun dibanding capaian tahun 2023 target 0,5 dengan capaian 82 %. Persentase sektor kehutanan terhadap PDRB ini dilihat dari yaitu indikator meningkatnya nilai produksi hasil hutan.

Meningkatnya **nilai produksi hasil hutan** di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada pada tabel berikut:

Tabel .4.1.5

Nilai Produksi Hasil Hutan

No	Uraian /Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi		% Capaian 2024
				Thn 2023	Thn 2024	
1	Volume produksi hasil hutan	M3	1.800 M3	1.718,51	4.081,03	226,72 %
Persentase Capaian Sasaran adalah						226,72 %

Sumber Data : Bidang Perencanaan Pemanfaatan Hutan dan KSDAE Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu

Dari tabel diatas bahwa Nilai Produksi Hasil Hutan diukur dari volume produksi hasil hutan sebesar 226,72 %, hal ini dikarenakan adanya peningkatan

volume produksi hasil hutan di Provinsi Bengkulu. Adapun produksi hasil hutan di provinsi Bengkulu Pada Tahun 2024 adalah Sebagai berikut :

Tabel 4.1.6. Rekapitulasi Produksi Kayu Bulat Provinsi Bengkul Realisasi Tahun 2024

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jl. Pembangunan Simpang Harapan, Bengkulu.
Telp. (0736) 20091; Fax. (0736) 22856; email -

DATA PRODUKSI KAYU BULAT WILAYAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2024

Jenis Izin	Hasil Hutan	Nama Perusahaan	LHP Nomor	LHP Tanggal	LHP Volume	Kabupaten/Kota	BAYAR PSDH TGL	BAYAR PSDH NOMINAL	BAYAR DR TGL	BAYAR DR NOMINAL	BAYAR DENDA PSDH TGL	BAYAR DENDA PSDH NOMINAL	BAYAR DENDA DR TGL	BAYAR DENDA DR NOMINAL
PBPH (IUPHHK-HA)	KAYU	PT BENTARA ARGA TIMBER	18-LHP-BLOKREGULER-KBB-BAT-XII-2023	31-12-2023	104.27	Muko-muko	26-03-2024	7,194,630	26-03-2024	1,511.92	26-03-2024	287,786	26-03-2024	60.48
PBPH (IUPHHK-HA)	KAYU	PT BENTARA ARGA TIMBER	18-LHP-BLOKREGULER-KBS-BAT-XII-2023	31-12-2023	33.89	Muko-muko	26-03-2024	2,270,630	26-03-2024	474.46	26-03-2024	90,826	26-03-2024	18.98
PBPH (IUPHHK-HA)	KAYU	PT BENTARA ARGA TIMBER	19-LHP-BLOKREGULER-KB-BAT-XII-2023-SO	31-12-2023	500.74	Muko-muko	11/7/2024	32,606,160	11/7/2024	7,131.07	11/7/2024	3,912,740	11/7/2024	855.73
PBPH (IUPHHK-HA)	KAYU	PT BENTARA ARGA TIMBER	19-LHP-BLOKREGULER-KBS-BAT-XII-2023-SO	31-12-2023	67.35	Muko-muko	11/7/2024	4,512,450	11/7/2024	942.9	11/7/2024	541,494	11/7/2024	113.15
PBPH (IUPHHK-HA)	KAYU	PT BENTARA ARGA TIMBER	01/LHP-KBB/BAT/VII/2024	30-07-2024	20.79	Muko-muko	31-07-2024	810,810	31-07-2024	259.88				
PBPH (IUPHHK-HA)	KAYU	PT BENTARA ARGA TIMBER	01/LHP-KBS/BAT/VII/2024	30-07-2024	67.31	Muko-muko	31-07-2024	2,490,470	31-07-2024	807.72				
PBPH (IUPHHK-HA)	KAYU	PT BENTARA ARGA TIMBER	02/LHP-KBB/BAT/VIII/2024	14-08-2024	154.8	Muko-muko	15-08-2024	10,681,200	15-08-2024	2,244.60				
PBPH (IUPHHK-HA)	KAYU	PT BENTARA ARGA TIMBER	02/LHP-KBS/BAT/VIII/2024	14-08-2024	69.46	Muko-muko	15-08-2024	4,653,820	15-08-2024	972.44				
PBPH (IUPHHK-HA)	KAYU	PT BENTARA ARGA TIMBER	03/LHP-KBB/BAT/VIII/2024	16-08-2024	74.8	Muko-muko	16-08-2024	2,917,200	16-08-2024	935				
PBPH (IUPHHK-HA)	KAYU	PT BENTARA ARGA TIMBER	03/LHP-KBS/BAT/VIII/2024	16-08-2024	51.33	Muko-muko	16-08-2024	1,899,210	16-08-2024	615.96				
PBPH (IUPHHK-HA)	KAYU	PT BENTARA ARGA TIMBER	04/LHP-KBB/BAT/VIII/2024	26-08-2024	321.94	Muko-muko	26-08-2024	22,213,860	26-08-2024	4,668.13				
PBPH (IUPHHK-HA)	KAYU	PT BENTARA ARGA TIMBER	04/LHP-KBS/BAT/VIII/2024	26-08-2024	105.35	Muko-muko	26-08-2024	7,058,450	26-08-2024	1,474.90				
PHAT	KAYU	PHAT HENNY SUSANTI	01-LHP-KBK-PHAT-IIIV-2024	16-08-2024	2.08	Bengkulu Utara	13-09-2024	64,480	18-09-2024	8.32			18-09-2024	0.17
PHAT	KAYU	PHAT HENNY SUSANTI	01-LHP-KBS-PHAT-IIIV-2024	16-08-2024	48.02	Bengkulu Utara	13-09-2024	2,626,040	18-09-2024	632.86			18-09-2024	12.66
PBPH (IUPHHK-HA)	KAYU	PT BENTARA ARGA TIMBER	05/LHP-KBB/BAT/IX/2024	18-09-2024	190	Muko-muko	18-09-2024	13,110,000	18-09-2024	2,755.00				
PBPH (IUPHHK-HA)	KAYU	PT BENTARA ARGA TIMBER	05/LHP-KBS/BAT/IX/2024	18-09-2024	118.95	Muko-muko	18-09-2024	7,969,650	18-09-2024	1,665.30				
PBPH (IUPHHK-HA)	KAYU	PT BENTARA ARGA TIMBER	06/LHP-KBB/BAT/X/2024	8/10/2024	445.78	Muko-muko	9/10/2024	30,758,820	9/10/2024	6,463.81				
PBPH (IUPHHK-HA)	KAYU	PT BENTARA ARGA TIMBER	06/LHP-KBS/BAT/X/2024	9/10/2024	68.05	Muko-muko	9/10/2024	4,559,350	9/10/2024	952.7				
PBPH (IUPHHK-HA)	KAYU	PT BENTARA ARGA TIMBER	07/LHP-KBB/BAT/X/2024	25-10-2024	506.89	Muko-muko	25-10-2024	31,591,110	25-10-2024	7,124.29				
PBPH (IUPHHK-HA)	KAYU	PT BENTARA ARGA TIMBER	07/LHP-KBS/BAT/X/2024	25-10-2024	124.97	Muko-muko	25-10-2024	7,698,890	25-10-2024	1,704.64				
PBPH (IUPHHK-HA)	KAYU	PT BENTARA ARGA TIMBER	08/LHP/BAT/XI/2024	15-11-2024	474.93	Muko-muko	15-11-2024	30,563,070	15-11-2024	91,689,210				
PBPH (IUPHHK-HA)	KAYU	PT BENTARA ARGA TIMBER	09/LHP/BAT/XII/2024	19-12-2024	529.33	Muko-muko	20-12-2024	36,523,770	20-12-2024	109,571,310				
JUMLAH TOTAL					4,081.03			264,774,070	$	43,346		4,832,846		1,061.17
									Rp.	201,260,520				

PDRB Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan Provinsi Bengkulu

SISTEM NERACA REGIONAL

Lanjutan Tabel/*Continued Table* 13.1.1

Lapangan Usaha/*Industry*		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2 Asuransi dan Dana Pensiun/ *Insurance and Pension Fund*	12,45	12,83	14,60	15,34	16,04
	3 Jasa Keuangan Lainnya/ *Other Financial Services*	469,28	483,78	503,25	548,73	582,35
	4 Jasa Penunjang Keuangan/ *Financial Supporting Service*	1,35	1,40	1,48	1,56	1,63
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	2.752,22	2.797,39	2.842,81	3.000,27	3.232,94
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	1.631,04	1.600,21	1.665,78	1.939,82	2.163,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	7.241,28	7.429,98	7.660,69	7.685,56	8.248,99
P	Jasa Pendidikan/*Education*	4.472,34	4.578,90	4.776,65	5.193,69	5.589,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	1.294,76	1.403,21	1.589,77	1.685,48	1.915,02
R,S,T,U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	633,62	636,74	679,92	761,34	863,26
Produk Domestik Regional Bruto ***Gross Regional Domestic Product***		**72.098,24**	**73.305,27**	**79.602,64**	**90.111,95**	**96.551,38**

Catatan/*Note*: * Angka sementara/*Preliminary figure*
** Angka sangat sementara/*Very preliminary figure*

Sumber/*Source*: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/*BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources*

SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS 583

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu Tahun 2024

Persentase DBH Sumber Daya Alam Kehutanan

Tabel 4.1.7. Persentase DBH Sumber Daya Alam Kehutanan

No.	Penerimaan SDA Kehutanan	Persentase DBH SDA Kehutanan			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota Penghasil	Kab/Kota Lainnya Dalam Satu Provinsi
1 .	IIUPH	20 %	16%	64%	-
2 .	PSDH	20 %	16%	32%	32%
3 .	DR	60 %	-	40%	-

Sumber : Diolah berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2005

Penurunan Pendapatan domestik Regional Bruto bidang Kehutanan ini tidak lepas dari akibat Pertumbuhan ekonomi yang negatif. Pertumbuhan ekonomi ini

memberikan akibat buruk yang sangat luas seperti banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, penjualan perusahaan jauh lebih sedikit, terakhir pengeluaran *(output)* ekonomi daerah secara keseluruhan mengalami penurunan. Realisasi Produksi hasil hutan baik kayu maupun non kayu sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Hal ini diperparah oleh konsolidasi antara pusat dan daerah yang kurang dan terhambat oleh kebijakan pembatasan sosial.

Rekomendasi Evaluasi :

Pendapatan Domestik Regional Brutto (PDRB) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu terhitung sangat kecil. Dari target yang ditetapkan 0,55 % hanya dapat dicapai sebanyak 0,41 %, secara persentase hanya dicapai 74,55 % dari target. Ini dikarenakan pendapatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan hanya dihasilkan dari PNBP Kehutanan. Untuk mencapai hasil PDRB yang lebih baik, ada beberapa rekomendasi yang dapat dijalankan :

1. Menambah Pendapatan Daerah bidang kehutanan dengan mengaktifkan dan mengadakan pendampingan intensif terhadap Perhutanan Sosial. Ini dimaksudkan agar produk kehutanan non kayu dapat diproduksi dan diinventarisasi dengan baik. Banyak sekali potensi kehutanan yang dapat membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Daerah baik Produk Hutan Langsung seperti Madu, Damar, rotan bahkan potensi wisata ataupun produk Perkebunan, Pertanian, Perikanan, dan Peternakan yang dikombinasikan dengan Kehutanan. Dengan adanya perhatian khusus dalam sektor ini diyakini dapat menambah pendapatan bidang kehutanan dan target dapat tercapai.
2. Memperbaiki hubungan antara Perusahaan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengelola data dan informasi mengenai IIUPH, PSDH dan DR. Data yang baik akan menghasilkan informasi yang baik sehingga kebijakan yang akan diambil menjadi tepat.

Adapun Program/kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatnya pertumbuhan sektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah program pengelolaan hutan

dengan kegiatan pengelolaan rencana tata hutan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) kewenangan provinsi pada sub kegiatan koordinasi den singkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan dan kegiatan Pemanfaatan hutan dikawasan hutan produksi dan gutan lindung dengan sub kegiatan koordinasi dan singkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi dengan pagu Rp. 100.000.000,- dengan realisasi Rp. 93.713.100, adanya efisinasi anggraan sebesar 6,29 % dari sektor kehutanan pada tahun 2024.

Sub Sektor Perikanan Sub juga merupakan mendukung tercapainya indikator Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata, Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB. Persentase capaian pada sub sektor perikanan di ukur dari meningkatnya Produksi Ikan di Provinsi Bengkulu.

Untuk mengetahui tingkat produksi ikan di Provinsi Bengkulu diukur melalui; produksi perikanan budidaya, nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi), Produksi perikanan tangkap dan Nilai Tukar Nelayan (NTP). Berikut tabel produksi perikanan selama 3 tahun terakhir.

Tabel 4.1.8 Meningkatnya Produksi Perikanan

Uraian		Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi			% Capaian
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	232.957	212.025,67	160.170.674	144.482.085	62.02
2.	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)		135,56	76,26	101,50	105,64	77,92
3.	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	90.117.67	87.492,89	82.976.90	40.201.807 (data smt 1)	44,61
4.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)		112	106,35	104,12	108,89	97,22
			Persentase capaian sasaran ini adalah				70,44

Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan tabel di atas Persentase capaian produksi **perikanan budidaya** di Provinsi Bengkulu tahun 2024 adalah 62,02 % atau 144.482,085 ton, sedangkan hasil produksi perikanan budidaya tahun 2023 sebanyak 160.170,674 ton, penurunan produksi dikarenakan dikarenakan adanya perbaikan Irigasi di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pengelolaan perikanan budidaya Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu lebih pada Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan dalam Provinsi Bengkulu. selain itu untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya adalah dengan memenuhi kebutuhan pakan ikan sesuai standar sehingga dapat memproduksi calon-calon induk unggul ikan untuk kemudian disebarkan ke Balai Benih Ikan (BBI) yang ada di Kabupaten/Kota Se Provinsi Bengkulu. selain itu induk unggul juga disuplai kepada para UPR atau Unit Perikanan Rakyat untuk mendukung perkembangbiakan ikan air tawar di Provinsi Bengkulu sehingga dengan demikian sepenuhnya dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya dengan optimal.

Nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) untuk target tahun 2024 yaitu 135,56 dan realisasinya sebesar 105,64 dengan capaian nya 77,92 Persen terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. hal ini di karenakan Indeks harga (it) yang di terima oleh petani khususnya subsektor perikanan peningkatan sebesar 1,92 Persen, Indeks harga yang dibayar (ib) subsektor perikanan 0,27 persen. dilihat dari nilai Nilai Tukar Pembudiaya ikan (NTPI) pada bulan Desember mengalami peningkatan sebesar 0,86 persen hal ini terjadi karena It mengalami peningkatan sebesar 0,46 persen sementara dilihat dari Ib mengalmi penurunan sebesar 0.39 persen, peningkatan pada It dikarenakan meningkatnya It kelompok budidaya air tawar sebesar 0,46 persen dan menurunnya Ib disebabkan oleh menurunnya indeks kelompok BPPBM sebesar 0,90 persen, sedangkan indek kelompok Konsumsi Rumah Tangga (KRT) naik sebesar 0.66 persen (sumber data BPS Provinsi Bengkulu)

Selanjutnya capaian **produksi perikanan tangkap** di Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 pada semester I tahun 2024 adalah sebesar 40.201.807 ton (one data, Pusdatin KKP RI

2024). Produksi perikanan tangkap dilakukan dengan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil, Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT, Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil, Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi.

Capaian **Nilai tukar nelayan (NTN)** tahun 2024 adalah 97,22 persen, pencapaian ini dipengaruhi oleh Indeks harga yang diterima oleh petani (It) meningkat 2,76 persen sedangkan Indeks harga yang di bayar oleh petani (Ib) meningkat lebih rendah 0,68 persen peningkatan pada It disebabkan oleh kelompok penangkapan laut sebesar 2,80 persen sementara kelompok penangkapan perairan umum relative tidak mengalami perubahan dari bulan sebelumnya. Kenaikan Ib disebabkan oleh naiknya indeks kelompok KRT dan Indeks kelompok Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) masing–masing sebesar 0,89 persen dan 0,37 persen (sumber data BPS Provinsi Bengkulu).

Pencapaian nilai tukar nelayan tahun 2024 lebih tinggi jika dibanding tahun 2023 yaitu 95,25 Persen. hal ini disebabkan pada kelompok penangapan laut sebesar 2,26 Persen.

Adapun program yang mendukung produksi perikanan pada dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bengkulu adalah Program Pengelolaan perikanan tangkap dengan sasaran meningkatnya produksi perikanan. Beberapa kegiatan yang mendukung meningkatnya produksi perikanan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
2. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
3. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil
4. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

Adapun anggaran yang digunakan untuk meningkatnya produksi perikanan adalah melalui APBD Provinsi Bengkulu dengan total Rp. 9.670.000.000,- dengan realisasi Rp. 9.638.308.108,- atau 99,67%.

Sektor Pertambangan dan Penggalian juga merupakan pendukung tercapainya indikator Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata, Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB dapat dilihat pada hasil Persentase peningkatan pendapatan asli daerah sektor ESDM.

Berdasarkan data dari BPS tahun 2024 bahwa capaian sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB adalah 4,10 meningkat sebesar 0,8 poin dari tahun 2023 yaitu 3,3. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan galian Provinsi Bengkulu memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah.

Pertumbuhan sektor pertambangan dan galian provinsi Bengkulu didukung oleh data dari dinas Energi Sumber Daya Mineral bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu per Desember 2024 bahwa sebanyak 11 perusahaan minerba pemegang IUP yang aktif dari 22 jumlah perusahan minerba pemegang IUP OP, itu artinya jika dipersentasekan baru mencapai 50%. Berikut daftar perusahan minerba pemegang IUP OP yang aktif :

Tabel. 4.1.13

Daftar perusahaan pemegang IUP OP yang Aktif

No	Nama Perusahaan	Komoditas	Lokasi
1.	PT. Cereno Energi Selaras	Batubara	Bengkulu Utara
2	PT. Bara Adhipratama	Batubara	Bengkulu Utara
3	PT. Firman Ketahun	Batubara	Bengkulu Utara
4	PT. Mitra Padjajaran Prima	Batubara	Bengkulu Utara
5	PT. Kaltim Global	Batubara	Bengkulu Utara
6	PT. Jambi Resources	Batubara	Lebong
7	PT. Bengkulu Bio Energi	Batubara	Bengkulu Tengah
8	PT. Cakrawala Dinamika Energi	Batubara	Bengkulu Tengah
9	PT. Inti Bara Perdana	Batubara	Bengkulu Tengah
10	PT. Bara Indah Lestari	Batubara	Seluma
11	PT. Kusuma Raya Utama	Batubara	Bengkulu Tengah

Tabel. 4.1.14 PRODUKSI BATUBARA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024

NO	NAMA PERUSAHAAN	BULAN JANUARI S/D JUNI TAHUN 2024						JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PT BARA ADHI PRATAMA	-	-	-	-	5,858	14,338	20.195,93
2	PT BARA INDAH LESTARI	9,769	10,981	11,367	11,484	12,154	5,429	61.184,96
3	PT BENGKULU BIO ENERGI	3,89	3,897	4,288	14,903	21,656	8,986	57.621,07
4	PT CAKRAWALA DINAMIKA ENERGI	62,838	80,746	40	69,065	75,211	50	377.859,93
5	PT CERENO ENERGI SELARAS	7,896	29,032	28,5	20	36	32,7	154.128,28
6	PT FIRMAN KETAUN	54,578	32,163	37,073	41,946	45,481	-	211.240,84
7	PT INTI BARA PERDANA	70,356	54,085	60,506	68,447	54,761	1,13	309.284,63
8	PT JAMBI RESOURCES	-	-	-	-	-	-	-
9	PT KALTIM GLOBAL	238,748	54,298	-	-	-	-	293.046,00
10	PT. Kusuma Raya Utama	43,332	1,778	-	-	-	-	45.110,25
11	PT PUTRA MAGA NANDITAMA	3,692	13,135	15,968	19,623	21,377	-	73.795,33
12	PT BENCOOLEN MINING	7,929	12,158	16,488	16,079	10,588	4,512	67.752,47
13	PT INDONESIA RIAU SRI AVANTIKA	10,338	11,523	12,758	16,898	10,877	13,646	76.040,20
14	PT INJATAMA	20,976	9,501	36,097	24,227	28,726	735	120.262,48
JUMLAH		**534,342**	**323,3**	**263,05**	**302,672**	**322,69**	**131,476**	**1.867.522,37**

Tabel. 4.1.15 PENJUALAN EKSPOR BATUBARA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024

NO	NAMA PERUSAHAAN	BULAN JANUARI S/D JUNI TAHUN 2024						JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PT BARA ADHI PRATAMA	-	-	-	-	-	-	-
2	PT BARA INDAH LESTARI	-	-	-	-	-	26,72	26.720,00
3	PT BENGKULU BIO ENERGI	-	-	-	-	-	-	-
4	PT CAKRAWALA DINAMIKA ENERGI	-	66,109	-	10,303	9,303	8,95	94.665,00
5	PT CERENO ENERGI SELARAS	-	8,86	10,215	29,349	28,148	9,001	85.573,00
6	PT FIRMAN KETAUN	-	6,824	31,892	49,382	9,102	23,792	120.992,02
7	PT INTI BARA PERDANA	-	31,204	70,399	20,8	-	-	122.402,80
8	PT JAMBI RESOURCES	-	-	-	-	-	-	-

9	PT KALTIM GLOBAL	-	55,226	56,573	111,7	-	51	274.498,80
10	PT. Kusuma Raya Utama	-	10	18,825	-	-	-	28.824,87
11	PT PUTRA MAGA NANDITAMA	-	-	-	-	15,229	-	15.228,50
12	PT BENCOOLEN MINING	-	-	54,043	-	-	27,68	81.723,00
13	PT INDONESIA RIAU SRI AVANTIKA	-	9,015	9,016	8,894	9,14	9,32	45.385,00
14	PT INJATAMA	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			**187,238**	**250,963**	**230,43**	**70,922**	**156,46**	**896.012,99**

Tabel. 4.1.16 PENJUALAN DOMESTIK BATUBARA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024

NO	NAMA PERUSAHAAN	BULAN JANUARI S/D JUNI TAHUN 2024						JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	
1	PT BARA ADHI PRATAMA	1,748	-	-	-	-	-	1.747,94
2	PT BARA INDAH LESTARI	-	8,736	-	8,257	7,204	-	24.197,40
3	PT BENGKULU BIO ENERGI	-	-	-	22,538	18,002	20,302	60.842,21
4	PT CAKRAWALA DINAMIKA ENERGI	8,032	22,305	22,225	29,999	14,838	-	97.398,11
5	PT CERENO ENERGI SELARAS	-	7,506	7,207	8,351	22,686	-	45.751,33
6	PT FIRMAN KETAUN	7,141	7,164	14,492	-	7,151	-	35.948,16
7	PT INTI BARA PERDANA	-	29,6	37,169	36,462	22,319	22,768	148.318,58
8	PT JAMBI RESOURCES	-	7,709	5,515	-	-	-	13.224,00
9	PT KALTIM GLOBAL	46,171	58,327	23,719	15,03	15,817	15,679	174.741,96
10	PT. Kusuma Raya Utama	-	-	-	-	-	-	-
11	PT PUTRA MAGA NANDITAMA	-	4,051	10,603	15,555	5,285	6,514	42.007,39
12	PT BENCOOLEN MINING	-	-	-	7,402	7,152	-	14.554,17
13	PT INDONESIA RIAU SRI AVANTIKA	-	12,06	-	15,118	12,002	-	39.179,85
14	PT INJATAMA	16,204	16,918	24,99	19,352	37,79	7,306	122.559,56
JUMLAH		**79,296**	**174,376**	**145,92**	**178,06**	**170,246**	**72,569**	**820.470,66**

Sementara pendapatan asli daerah pada Dinas ESDM Provinsi Bengkulu meliputi retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi sewa alat laboratorium (analisa air).

Tabel. 4.1.17 Data PAD Tahun 2024

No	Jenis PAD	Jumlah	
		Target	Relisasi
	Retribusi Jasa Umum	68.500.000	138.000.000
	Sewa alat laboratorium	4.000.000	3.375.000
	Jumlah	72.250.000	141.375.000

Adapun program yang mendukung pada sektor pertambangan dan galian adalah Pengelolaan Mineral Dan Batubara dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Penatausahaan Izin Usaha Pertamban gan Miner al Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dal am Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Da erah yang Berada dalam 1(satu) Daerah Provinsi termasuk Wila yah Laut sa mpai dengan 12 Mil Laut.
2. Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan

Beberapa hal yang sudah dilakukan dalam mendukung pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

1. Dikeluarkannya 10 dokumen rekomendasi perizinan, (iup(izin usaha pertambangan operasi produksi 35, sipb (surat izin penambangan batuan 73)
2. Adanya dokumen pengendalikan perizinan IUP Meneral bukan logam dan batuan (5 kabupaten kaur, BS, BT, Muko2, kota bengklu)
3. Dari 12 permohonan IUJP disetujuai 9 rekomendasi dan 3 dokumen tolak karena tidak ada kantor di Bengkulu dan NPWP bukan Bengkulu.
4. Adanya izin yang dibina yaitu 27 pemegang izin /IUP Pertambangan mineral dan batubara lokasi 9 kabupaten.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan diatas dilaksanakan melalui program Program Pengelolaan Mineral dan Batubara dengan anggaran APBD Provinsi bebesar RP. 1.075.000.000,- dengan realisasi Rp. 1.068.276.671 atau 99,37 %.

Sasaran 4.2
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja			
			Tahun 2023		Tahun 2024	
			Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,09	72,75	102,16	73,45	103,3

Sumber : DLHK Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Tabel di atas, Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dijelaskan melalui indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. **IKLH** (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah

1. Indeks Kualitas / Pencemaran Air
2. Indeks Kualitas / Pencemaran Udara
3. Indeks Kualitas Tutupan Hutan/Lahan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut.

Dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga didapat gambaran awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada peroide tertentu. Pada tahun 2020, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu cendrung menurun karena terjadi beberapa titik banjir di Kabupaten Kota. IKLH tahun 2020 adalah 69,92 sehingga pada penetapan target pada akhir RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2021-2026 adalah 70-75, dengan capaian pada akhir adalah 73,45.

Indeks kualitas lingkungan hidup diukur dari Indeks kualitas Air, Indeks kualitas udara dan Indeks kualitas Tutupan Hutan/Lahan. Propinsi Bengkulu melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup melalui 2 (tiga) indikator yaitu indeks kualitas air dan indeks kualitas udara. Sedangkan indeks kualitas tutupan hutan/lahan dilakukan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ripublik Indonesia.

Berdasarkan surat kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penyampaian hasil terkini nilai IKLH tahun 2024, indek kualitas lingkungan hidup Provinsi Bengkulu tahun 2024 adalah 73,45 pada rating **Baik** dengan capaian 103,3 % dari target yang telah ditetapkan. Berikut IKLH Provinsi Bengkulu dalam kurun 3 (tiga) tahun terkahir:

Grafik 4.2.1. Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2023-2024

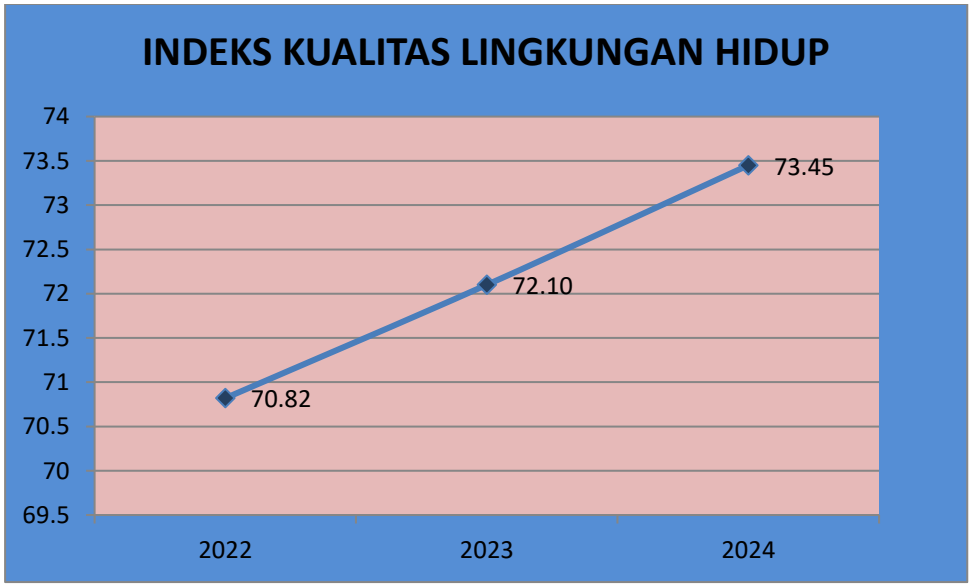

Sumber : Kementerian LHK dan BPS

Berdasarkan grafik di atas, maka nilai IKLH Provinsi Bengkulu cendrung meningkat dari tahun 2022-2024, dimana terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ketahunnya. Dari tahun 2022 ke 2023 terjadi peningkatan sebesar 1,28

dan dari tahun 2023 ke 2024 terjadi peningkatan nilai sebesar 1,35. Namun walaupun demikian nilai IKLH Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 kurang 0,12 poin dari IKLH Nasional yaitu 73,57.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan nilai IKLH Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu, maka ada 3 Kabupaten yaitu; Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Lebong nilai IKLHnya lebih tinggi dari nilai IKLH Provinsi, sedangkan 7 Kabupaten/kota lainnya dibawah nilai IKLH Provinsi. Perbedaan nilai IKLH Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tebal berikut:

Tabel. 4.2.1

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

No	Kabupaten	Nilai IKLH	Rating
1.	Bengkulu Selatan	67,03	Sedang
2.	Bengkulu Tengah	62,56	Sedang
3.	Bengkulu Utara	77,39	Baik
4.	Kaur	78,3	Baik
5.	Kepahiang	63,44	Sedang
6.	Lebong	73,5	Baik
7.	Mukomuko	66,82	Sedang
8.	Rejang Lebong	71,09	Baik
9	Seluma	47,95	Kurang
10	Kota Bengkulu	62,5	Sedang

Sumber data: Kemeterian LHK

Peningkatan nilai IKLH Provinsi Bengkulu ditentukan dari hasil penilaian/pengukuran terhadap indeks kualitas air dan Indeks kualitas/pencemaran Udara.

A. Indeks Kualitas Air

Nilai Indeks Kualitas Air merupakan salah satu penentu peningkatan nilai IKLH Provinsi Bengkulu. Penilaian indeks kualitas air dilakukan terhadap pengambilan sampling air sungai di 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai di wilayah

Bengkulu, yang terdiri dari 2 tahap uji sampling tahap 1 (musim kemarau) dan tahap 2 (musim penghujan), dengan masing-masing sample diuji terhadap 3 (tiga) titik uji sample di setiap Daerah Aliran Sungai (Hulu, tengah dan Hilir) dan dibandingkan dengan uji sampling tahap 2 (musim penghujan) telah dilaksanakan. Selanjutnya hasil uji disampaikan kekemnterian LHK.

Tabel 4.2.2 Daerah Aliran Sungai di wilayah Bengkulu yang dilaksanakan uji sampling

NO.	DAERAH ALIRAN SUNGAI	WILAYAH	PERIODE/ TAHAPAN	KETERANGAN
1.	Sungai Bengkulu	Benteng Kota Bengkulu	1	Tim penguji Lab. DLH Kota Bengkulu
2.	Sungai Nelas	Seluma-Kota Bengkulu	1	Tim penguji Lab. DLH Kota Bengkulu
3.	Sungai Ketahun	Kab. Lebong, Kab. Bengkulu Utara	1	Tim penguji Lab. DLH Kota Bengkulu

Sumber Data : DLHK

Hasil indeks kualitas air berdasarkan hasil sampling tahun 2024 adalah 51,99 dari atau 102,86 % dari target 51,44 meningkat dari capaian tahun lalu yaitu 48,98. Berikut grafik indeks kualitas air dalam 4 tahun terakhir.

Grafik 4.2. Indeks Kualitas Air

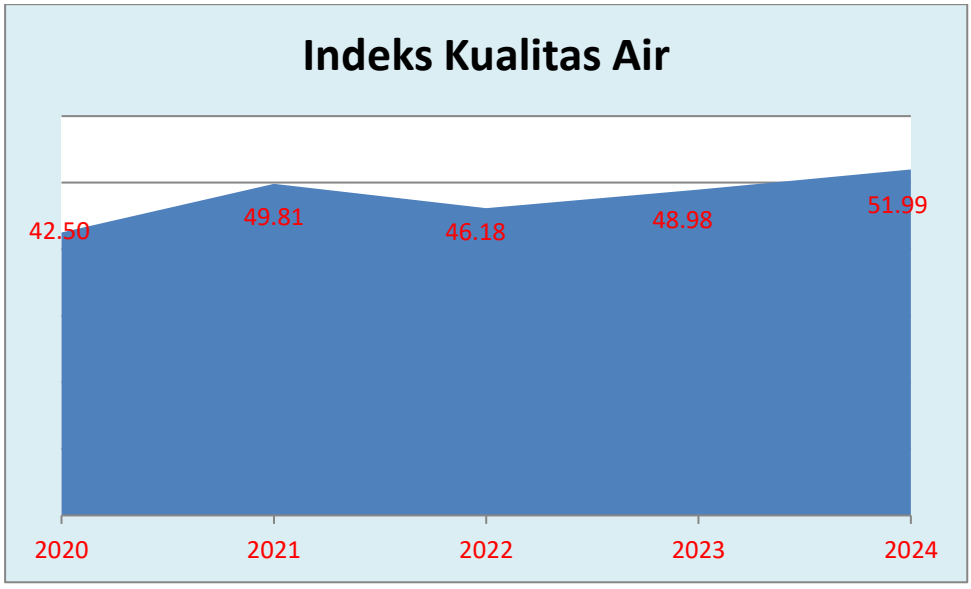

B. Indeks Kualitas / Pencemaran Udara

Indeks kualitas/pencemaran udara juga penunjang hasil nilai IKHL Provinsi Bengkulu yaitu dengan melakukan pemantauan kualitas udara ambien dari semua titik pemantauan di Provinsi Bengkulu masih memenuhi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUA) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Pada tahun 2024 Hasil penghitungan Indeks kualitas Udara mencapai 94,13 dari target 92,00 atau tercapai 102,31 %, capaian ini meningkat 2,86 dari capaian tahun lalu yaitu hanya 91,27.

ada beberapa Faktor Pendorong peningkatan atas kualitas udara yaitu sebagai berikut :

1. Tidak adanya kebakaran hutan.
2. Adanya Vegetasi hutan yang masih cukup untuk menampung zat atau pertikel pencemar yang diemisikan oleh sumber pencemar.
   Keadaaan hutan memang setiap tahun pasti berkurang karena ini erat kaitannya dengan faktor ekonomi dan sosial. Namun keadaan hutan yang didominasi oleh pohon dan tumbuhan di Provinsi Bengkulu Masih bisa mengabsorbsi zat dan partikel pencemar sehingga kualitas udara di daerah Bengkulu masih tergolong baik.
3. Masih kurangnya sumber utama pencemaran.
4. Pabrik industri dan emisi kendaraan bermotor merupakan sumber utama pencemaran udara. Bengkulu sebagai daerah yang berkembang belum memiliki pabrik dan kendaraan yang padat sehingga zat dan pertikel pencemar dari sumber ini masih dibawah standar Baku Mutu Udara
5. Belum optimalnya kesungguhan para pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan (IPPKH/PPKH) melaksanakan kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai
6. Belum optimal pelaksanakan reklamasi hutan oleh pemegang IUP dalam Kawasan

Tabel 11. Hasil Pehitungan IKA,IKU,IKL, IKALl, IKLH 2024

KOMPONEN	RUMUS	NILAI
Indeks Kualitas Air		51,99
Indeks Kualitas Udara		94,13
Indeks Kualitas Lahan		55,,6
Indeks Kualitas Air Laut		81,77
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	(0,340xIKA) + (0,428xIKU) + (0,133xIKL) + (0,099xIKAL)	
	(0,340xI51,99) + (0,428x94,13) + (0,133x55,,6) + (0,099x81,77)	73,45

Sumber data : DLHK Provinsi Bengkulu

Berikut beberapa rekomendasi Evaluasi :

Dari hasil capaian indikator kinerja diatas maka ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan agar indikator tersebut dapat tercapai :

- Pemerintah Daerah harus benar-benar memperhatikan masalah lingkungan terutama kualitas air dengan memberikan dana yang cukup dalam memonitor lebih banyak lagi sungai dan titik sampel serta untuk mencari solusi dalam penanganan pencemaran.
- Untuk mengurangi permasalahan pencemaran pada aliran DAS dan Sub-DAS Ulu Musi tersebut disarankan untuk membuat Biodigester, fasilitas umum seperti WC Komunal atau IPAL Komunal, dan tempat pembuangan sampah pada titik – titik tertentu yang lokasinya padat penduduk dan merupakan tempat usaha serta berlokasi di sepanjang aliran sungai
- Terlihat bahwa kebiasaan masyarakat membuang sampah ke badan sungai perlu diatasi secara baik dan terprogram oleh lembaga yang kompeten, dan perlu dilakukan sosialisasi untuk tidak membuang sampah kepada masyarakat yang berada disekitar aliran sungai dengan metode pendekatan kearifan lokal.
- Perlu adanya kegiatan pembinaan terhadap masyarakat sekitar hutan secara terus menerus agar tidak melakukan kegiatan yang dapat melanggar hukum bidang kehutanan.

- Melakukan pemantauan ulang pada waktu yang hampir berdekatan untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai SOP pengambilan sampel kualitas udara.
- Memperbanyak RTH (Ruang Terbuka Hijau)
- Perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaku usaha/industri dalam hal pengendalian pencemaran udara di Provinsi Bengkulu
- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pemegang (IPPKH/PPKH secara berkala (semesteran dan tahunan)
- Meningkatkan anggaran untuk pembinaan dan pengendalian IPPKH/PPKH
- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pemegang IUP Tambang dalam kawasan hutan secara berkala
- Meningkatkan anggaran untuk pembinaan dan pengendalian pemegang IUP tambang dan kawasan hutan dengan target 5 (lima) tahun

C. Kualitas Cakupan Tutupan Lahan/Hutan

Cakupan Tutupan Lahan (CTL) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur luas dan jenis tutupan lahan di suatu wilayah, termasuk hutan, non-hutan, dan lahan lainnya. Persentase kawasan deforestrasi merupakan satu indikator dalam mengukur persentase capaian cakupan tutupan lahan. Berikut cakupan tutupan lahan di Provinsi Bengkulu tahun 2023-2024 :

Tabel 4.2.4 Persentase kawasan Deforestrasi

No	Uraian /Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi		% Capaian 2024
				Thn 2023	Thn 2024	
1	Persentase Kawasan Deforestrasi	%	29,44	30,87 %	15,18	51,56 %
Persentase Capaian Sasaran adalah						51,56 %

Sumber Data : Bidang Perencanaan Pemanfaatan Hutan dan KSDAE Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu

Sedangan indeks kualitas tutupan lahan Provinsi Bengkulu 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

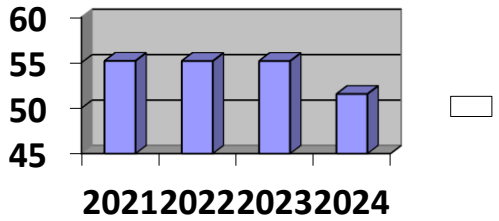

Indeks Kualitas Tutupan Lahan Provinsi Bengkulu

Dari grafik di atas, tahun 2024 indek cakupan lahan di Provinsi Bengkulu mengalami penurunan dari tahun tahun sebelumnya karena terjadi degradasi tutupan lahan yang disebabkan adanya perubahan atau alih fungsi lahan oleh:

1. Pembangunan yang terus meningkat diiringi dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kebutuhan hidup menyebabkan semakin bertambahnya tekanan fisik terhadap kawasan konservasi
2. Masyarakat sekitar hutan banyak yang memenuhi kebutuhan hidupnya seperti bahan makanan, pakaian dan bahan bangunan dari dalam kawasan hutan.
3. keadaan ekonomi yang memicu terjadinya konversi lahan hutan untuk lahan pertanian atau penggunaan lahan lainnya
4. adanya perambahan hutan, kebakaran hutan dan aktivitas destruktif (perusakan) lainnya
5. Meningkatkan kegiatan perambah hutan, kebakaran dan ilegal loging di kawasan hutan lindung dan hutan produksi

Kerusakan hutan adalah berkurangnya luasan areal hutan karena kerusakan ekosistem hutan yang sering disebut degradasi hutan ditambah juga penggundulan dan alih fungsi lahan hutan atau istilahnya deforestasi.

Hutan yang rusak Bengkulu tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di daerah ini, termasuk di Kota Bengkulu, hutan yang rusak tersebut, terdiri dari hutan lindung, Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), hutan produksi terbatas, hutan cagar alam, hutan wisata, hutan taman burung, hutan produksi, dan jenis hutan lainnya. Kerusakan hutan di daerah ini, akibat aksi perambahan yang dilakukan masyarakat untuk dijadikan perkebunan. Selain itu, kerusakan hutan di Bengkulu juga disebabkan aksi pembalakan liar atau *illegal logging* .Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menghentikan aksi pembalakan kayu liar di sejumlah kawasan hutan di beberapa kabupaten di Bengkulu.

tabel 4.2.5. Data Kawasan Deforestrasi di Provinsi Bengkulu

No.	Kabupaten /Kota	Kondisi Tutupan Lahan	Fungsi Kawasan (Ha)					Jumlah (Ha)
			KSA/KPA	HL	HPT	HP	HPK	
1	Kaur	Kritis	-	3.062,13	14.802,04	781,95	3.481,43	22.127,55
		Sangat Kritis	-	4,12	1.635,84		0,91	1.640,87
2	Bengkulu Selatan	Kritis	-	5.607,09	8.877,54	1.421,24	472,41	16.378,28
		Sangat Kritis	-	103,18	51,75		0,81	155,74
3	Seluma	Kritis	-	4.764,64	8.417,72	-	5.411,37	18.593,73
		Sangat Kritis	-	2.102,27	31,56	-	208,62	2.342,45
4	Bengkulu Tengah	Kritis	-	12.400,50	2.362,67	866,95	4.844,14	20.474,26
		Sangat Kritis	-	118,40	17,69	150,77	99,65	386,51
5	Kepahiang	Kritis	-	12,00	-	-	-	12,00
		Sangat Kritis	-	-	-	-	-	-
6	Bengkulu Utara	Kritis	-	2.446,54	10.724,00	-	2.296,53	15.467,07
		Sangat Kritis	-	-	149,21	-	282,98	432,19
7	Mukomuko	Kritis	-	1.902,14	16.120,64	1.009,39	1.005,37	20.037,54
		Sangat Kritis	-	165,53	1.077,85	271,42	39,04	1.553,84
8	Kota Bengkulu	Kritis	-				5,80	5,80
		Sangat Kritis	-					

9	Lebong	Kritis	-	3.430,40	43,71	-	16.654,26	20.128,37
		Sangat Kritis	-	-	-	-	49,88	49,88
10	Rejang Lebong	Kritis	-				554,86	554,86
		Sangat Kritis	-					
	Jumlah		-	36.118,94	64.312,22	4.501,72	35.408,06	140.340,94

Sumber data ; Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hutan & Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)

Rekomendasi Evaluasi :

Penurunan Indeks tutupan lahan merupakan permasalahan yang komplek. Biasanya kenaikan tingkat ekonomi suatu daerah akan berbanding terbalik dengan tutupan lahan. Semakin tinggi perkembangan ekonomi maka akan semakin besar degrdasi lahan. Namun permasalahan ini bukan tanpa solusi ada beberapa rekomendasi untuk mengurangi tingat degradasi lahan:

1. Memberikan sosialisasi pada masyarakat pentingnya dari keberadaan hutan sehingga masyarakat bisa menjadi pelindung dan penjaga hutan dan lahan yang ada disekitarnya.
2. Memberikan solusi ekonomi bagi masyarakat terutama sekitar hutan agar sanggup menafkahi hidup tanpa merusak lingkungan/hutan.
3. Memonitor dan mengaktifkan early warning system untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan yang disebabkan oleh masyarakat yang membuka lahan.
4. Melakukan perbaikan pal batas setiap perbatasan hutan lindung.
5. Memberikan perhatian lebih bagi kelangsungan hutan dan lahan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan prioritas bidang kehutanan seperti pengamanan dan pengawasan hutan.
6. Memfungsikan dengan baik dan benar Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai ujung tombak penjaga kawasan.
7. Melaksanakan patroli dalam upaya pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan

8. Penyediaan sarana dan prasarana tim polhut

Faktor penghambat tidak tercapainya target adalah :

a. Sedikitnya kegiatan dari sektor Pemerintah maupun swasta yang berkontribusi dalam pemeriksaan sampel air dan udara.
b. Sarana dan Prasarana pendukung yang tidak berfungsi dengan baik lagi/Rusak
c. Tidak adanya Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan.

   Kualitas Laboratorium ditentukan oleh dua hal yaitu Sumber daya Manusia dan Peralatan. Pemenuhan akan dua hal ini tentu dibutuhkan dana dari APBD, namun akibat kebijakan refocusing yang memaksa kita semua untuk. Akibatnya peningkatan kapasitas laboratorium harus kita tunda karena faktor skala prioritas.

d. Adanya Laboratorium lain yang sudah terakreditasi yakni, Pemerintah Kota bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara

Adapun Program yang mendukung indikator ini adalah Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Provinsi sub kegiatan Pengelolaan pengaduan permasalahan dan perusakan lingkungan hidup tingkat provinsi dan kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah provinsi sub kegiatan penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filnatrofi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sumber dana dari APBD Provinsi Bengkulu sebesar RP. 80.000.000,- dengan realisasi Rp. 76.853.523.

Sebagai rekomendasi adalah Perlu adanya *Co & Co Management* yang baik antara DLHK dan Bappeda dalam menentukan program dan kegiatan prioritas dan Pendanaan agar indikator-indikator sasaran dapat dicapai.

Tujuan 5
Meningkatnya Kualitas Layanan dan Tatakelola Pemerintahan

No	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja			
			Tahun 2023		Tahun 2024	
			Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A	B	99,01	BB	96.06

Sumber : Biro Organisasi

Dalam rangka memperkuat kelembagaan pemerintah, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transparansi pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Bengkulu merumuskan bahwa penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mencapai tujuan dari meningkatnya kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan *(good governance).* Terselenggaranya *good governance* dapat menciptakan pemerintahan yang lebih baik, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat menciptakan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, efisiensi dan efektifitas pemerintahan, mengurangi birokrasi dan korupsi serta transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Reformasi birokrasi adalah suatu upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam sistem dan struktur birokrasi pemerintahan, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kualitas pelayanan publik.

Reformasi birokrasi dapat mencakup beberapa aspek, seperti:

1. Penataan struktur organisasi pemerintahan

2. Penyederhanaan prosedur dan peraturan

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

4. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi

5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas

6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, reformasi birokrasi dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Capaian hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Bengkulu Tahun 2024 adalah 76,85 dengan kategori ”BB” yang dilakukan terhadap RB General dan RB Tematik, meningkat 11,5 poin dari tahun sebelumnya yaitu 65.00. Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2022-2024 untuk memetakan dan memantau kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu.

Sasaran 5.1
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

No	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja			
			Tahun 2023		Tahun 2024	
			Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Nilai Sakip Daerah	BB	B	99,01	B	98,64
2.	Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100	WTP	100
3.	Indeks Profesionalitas ASN	76	39,99	53,32	64,23	84,51
4.	Nilai E-Goverment (SPBE)	3,2	3,12	103,64	3,92	122,5

Sumber : Dinas terkait
Keterangan : IP ASN Data Tw 3 dibulan Oktober 2023

Dalam rangka memperkuat kelembagaan pemerintah, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transparansi pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Bengkulu merumuskan bahwa penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mencapai tujuan dari meningkatnya kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan (good governance). Terselenggaranya good governance dapat menciptakan pemerintahan yang lebih baik, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat menciptakan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, efisiensi dan efektifitas pemerintahan, mengurangi birokrasi dan korupsi serta transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Reformasi birokrasi adalah suatu upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam sistem dan struktur birokrasi pemerintahan, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kualitas pelayanan publik.

Reformasi birokrasi dapat mencakup beberapa aspek, seperti:

1. Penataan struktur organisasi pemerintahan
2. Penyederhanaan prosedur dan peraturan
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
4. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi
5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, reformasi birokrasi dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Capaian hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Bengkulu Tahun 2024 adalah 65,81 dengan kategori ”B” yang dilakukan terhadap RB General dan RB Tematik, meningkat 0,81 poin dari tahun sebelumnya yaitu 65.00. Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2022-2024 untuk memetakan dan memantau kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu.

Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan digital, efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional didukung oleh sasaran meningkatnya akuntabilitas Pemerintah dengan 4 indikator sebagai berikut :

1. Nilai Sakip Daerah

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcome dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sistem pertanggungjawaban berbentuk pengukuran kinerja merupakan salah satu sisi

penting dari pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebijakan, program, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang efektif dan efisien adalah dengan melakukan penguatan sistem manajemen kinerja yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: T.562.B5 tahun 2021 tentang Tim Pelaksana Sistem Manajemen Kinerja Pemerintah. Sistem manajemen kinerja ini dimaksudkan untuk mempertegas tanggungjawab tugas dan fungsi setiap entitasnya. Pada sistem manajemen kinerja Provinsi Bengkulu terdiri dari 5 (lima) aspek yaitu; Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, evaluasi dan pemenfaat yang menjadi dalam satu kesatuan dan saling keterkaitan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Evluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Penilaian Akuntabilitas Kinerja dinilai dari beberapa Komponen, yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal. Rincian bobot penilaian dari setiap komponen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.5.1.1

Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

NO	KOMPONEN YANG DI NILAI	BOBOT
1.	Perencanaan Kinerja	30
2.	Pengukuran Kinerja	30
3.	Pelaporan Kinerja	15
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25

Sumber data: PermenPAN RB RI

Hasil penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalami stagnan pada kategori “B” selama 5 (lima) tahun terkahir. Pada RPJMD pemerintah Povinsi Bengkulu 2021-2026 sudah menetapkan target bahwa

hasil evaluasi AKIP Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun ke-3 (tahun 2024) naik kategori “BB”, Begitupun dengan penetapan kinerja pada awal tahun 2024 bahwa kategori nilai AKIP Pemerintah Provinsi Bengkulu ditetapkan dengan target “BB”, namun pada hasil evaluasi oleh KemenPAN RB RI tahun 2024 hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Bengkulu masih berada pada kategori “B” dengan nilai 69,05.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya hasil evaluasi AKIP Pemerintah Provinsi Bengkulu masih pada kategori “B” (Baik), walaupun sedikit mengalami menurun nilai sebesar 0,26 poin namun demikian implementasi SAKIP Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah baik pada level Pemerintah Daerah dan sebagai unit kerja utama. Berikut hasil evaluasi AKIP Pemerintah Provinsi Bengkulu 5 Tahun terakhir.

Tabel. 5.1.1 Hasil Evaluasi AKIP tahun 2020-2024

No	Tahun	Nilai	Kategori
1.	2020	68,98	B
2.	2021	69,92	B
3.	2022	69,30	B
4.	2023	69,31	B
5.	2024	69,05	B

Sumber : Hasil Evaluasi dari KemenPAN RB RI

Walaupun hasil evaluasi sakip hingga tahun 2024 belum mampu menembus kategori “BB” karena masih ada beberapa perbaikan pada aspek manajemen dan komitmen dalam manajemen kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu, namun Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah berupaya dalam memperbaiki sistem manajemen kinerja setiap aspeknya. berikut ada beberapa rekomendasi dari KemenPAN RB RI pada evaluasi AKIP Tahun 2024 yang menjadi kendala dalam pencapaian peningkatan nilai AKIP provinsi Bengkulu:

1. Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan cascading kinerja pada seluruh PD dari level jabatan tertinggi hingga level operasional dengan memperhatikan

logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya memanfaatkan hasil penjejangan/cascading kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan secara keseluruhan.

2. Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscuting kinerja dengan tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja
3. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan baik pada Pemda maupun PD dengan memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorentasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result orientad) serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang SMART dan cukup untuk mengawal pencapaian kinerja.
4. Mereviu kembali rencana aksi yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut.
5. Menyampaikan hasil laporan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi PD secara berkala dalam pencapaian kinerja dan melakukan pemantauan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang
6. Memastikan definisi operasional, formula perhitungan dan sumber data yang tertuang dalam IKU tepat serta menjadikan IKU tersebut sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja
7. Memanfaatkan aplikasi manajemen kinerja sebagai alat untuk mornitoring pencapaian kinera Gubernur dan setiap PD sekaligus dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen kinerja lainnya
8. Memastikan laporan kinerja Pemda dan seluruh PD dipublikasikan melalui website resmi pemerintah
9. Menggunakan laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya
10. Meningkatkan kualitas laporan kinerja PD dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi dan informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) pada setiap indikator kinerjanya.
11. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil

evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat memanfaatkan sebagai umpari balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan

12. Melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP PD dilakukan secara berkala, sehingga mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja Pemda dan PD.

Kemudian rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti oleh tim Manajemen Kinerja Provinsi Bengkulu sebagaimana berikut:

1. Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah melakukan penyusunan cascading kinerja pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Cascading kinerja dilakukan pada tahap Rancangan Awal terutama setelah visi, misi, dan tujuan strategis kepala daerah terpilih pada Pilkada Tahun 2024.
2. Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja pada penyusunan Rancangan awal RPJMD
3. Melakukan Reviu dan perbaikan dokumen perencanaan dapat dilakukan pada penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra PD 2025-2029, Perubahan RKPD 2025 dan RKPD 2026, Renja PD 2026 dan Perubahan Renja PD 2025
4. Melakukan penyusunan definisi operasional, formula perhitungan dan sumber data pada saat identifikasi dan pemetaan cascading kinerja pada penyusunan RPJMD 2025-2029
5. Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah menyampaikan surat ke seluruh Perangkat Daerah (PD) terkait publikasi website resmi pemerintah Provisni Bengkulu yang ada di Dinas Komunikasi informasi.
6. Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah menyampaikan surat ke seluruh Perangkat Daerah (PD) terkait penyusunan laporan kinerja sehingga pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi dan informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) pada setiap indikator kinerjanya.

Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu juga dipengaruhi dari nilai capaian kinerja kabupaten/kota. Semakin tinggi capaian kinerja pemerintah kabupaten akan mempunyai kontribusi positif terhadap capaian kinerja Pemerintah Provinsi, pada tahun 2024, hasil evaluasi kabupaten/kota se provinsi Bengkulu sudah pada kategori “B” dan “BB”, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota

se Provinsi Bengkulu

No	KABUPATEN/KOTA	Kategori		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Seluma	B	B	B
2	Kepahiang	CC	B	B
3	Muko-Muko	CC	B	B
4	Bengkulu Utara	B	B	B
5	Bengkulu Selatan	B	B	B
6	Bengkulu Tengah	CC	B	B
7	Kaur	CC	CC	B
8	Rejang Lebong	B	B	B
9	Lebong	B	B	B
10	Kota Bengkulu	B	B	B

Sumber : Hasil Evaluasi dari KemenPAN RB RI

Berdasarkan Pergub nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 bahwa anggaran belanja operasional adalah sebesar Rp. 2.373.376.979.121 (dua triliyun tiga ratus tujuh puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah dan Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 408.446.663.751 (empat ratus delapan milyar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), namun setelah adanya Perda nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024, anggaran pendapatan dan

belaja daerah tahun 2024 bertambah menjadi RP. 3.190.807.232.465 yang bersumber pada PAD, Pendapatan transfer dan lai-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam pelaksanaan perencanaan daerah selama tahun 2024 tidak ada terjadi efisiensi anggaran ataupun recofungsing anggaran, semua perencanaan pada awal tahun 2024 terlaksana seusai dengan perencanaan yang ada, hal ini pun sejalan dengan hasil penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) terhadap Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah 85,19 dengan predikat "Baik". dengan demikian penilaian IPPN pemerintah Provinsi Bengkulu menunjukan adanya sinergi antara dokumen perencanaan, kualitas perencanaan dan keterhubungan antara rencana dan kinerja.

Dalam pelsaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerinta Provinsi Bengkulu didukung oleh program Penataan Organisasi pada biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu kegiatan Reformasi Birokrasi pada sub kegiatan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan Pagu Rp. 125.000.000,- realisasi Rp. 124.687.000,-atau 99,74%.

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan penilaian independen tentang kewajarandan keakuratan dari laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini penting dilakukan; untuk meningkatkan keperca

yaan stakeholders, memastikan bahwa laporan keuangan sudah disajikan secara wajar dan akurat, mendeksi kesalahan dan kecurangan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sudah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang hasil resume atas pemeriksaan sistem pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan pada tanggal 12 mei 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 2 5 .A/LHP/XVIII.BKL/05/2022. Sementara untuk Opini hasil pemeriksan BKP tahun 2024 diestimasikan akan diterbitkan pada pertengahan tahun 2025. Berdasarkan hasil resume tersebut juga bahwa

opini keuangan daerah Provinsi Bengkulu tahun 2023 menunjukkan beberapa perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait opini atas laporan keuangan kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu :

- Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Pemerintah Kabupaten Kepahiang, dan Pemerintah Kabupaten Lebong berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti yang telah diperoleh pada pemeriksaan tahun sebelumnya.
- Bengkulu Selatan meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun anggaran 2023, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dan ini merupakan WTP ketiga yang diraih secara berturut-turut.
- Pemkab Bengkulu Tengah kembali meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 dari BPK Provinsi Bengkulu.

Dari informasi di atas, dapat dilihat bahwa Provinsi Bengkulu dan beberapa kabupatennya telah menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan beberapa di antaranya berhasil mempertahankan atau bahkan meningkatkan opini WTP. Ini menunjukkan bahwa upaya reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola keuangan daerah telah menunjukkan hasil yang positif.

Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan opini yang diberikan BPK atas LKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 mendapatkan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

TABEL 5.1.4
PERKEMBANGAN CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN OPINI PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DI PROVINSI BENGKULU BERDASARKAN TARGET RPJMD

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	2021	WTP	WTP	100
2.	2022	WTP	WTP	100
3.	2023	WTP	WTP	100
4	2024	WTP	WTP	100

Sumber Data : BPKD dan Inspektorat Provinsi Bengkulu ;

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Pemerintah Provinsi Bengkulu tersu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) artinya laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu masih dalam tataran wajar dan bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabel. Berikut adalah beberapa kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam rangka Meningkatkan kualitas tata kelola pelaporan keuangan dan kelola aset daerah diharapkan menjadi point penilaian BPK dalam rangka mencapai / mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) antara lain:

1. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aktual Pada Pemerintah Daerah;
2. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) secara menyeluruh dan terintegrasi, dari mulai penyusunan perencanaan dan penganggaran APBD hingga pertanggungjawaban dan pelaporannya serta terkoneksi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
3. Peningkatan pengelolaan aset daerah dan penatausahaan aset daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD);
4. Pengembangan sistem persediaan / aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah (InventorX);
5. Pengembangan sistem aplikasi untuk mengelola, mencatat, dan menyimpan dan mengarsipkan laporan / data ijin pemakaian tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah.

Adapun program yang mendukung kinerja ini adalah program Penyelenggaraan Pengawasan dan Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang ada di inspektorat dengan anggaran sebesar Rp. 5.671.500.000,- dengan realisasi Sebesar Rp. 4.895.891.887 atau 86,32 % ada efisiensi sebesar 13,68 % atas Program penyelenggaran pengawasan di inspektorat tahun 2024. Selain itu juga didukung juga oleh program pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Pagu RP. 380.000.000 dengan realisasi Rp. 317.286.715 atau 83,49 %, terjadi efiseinsi sebesar 16,51 % dari program pengelolaan keuangan daerah tahun 2024.

3. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah pengukuran secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indeks Profesionalitas ASN (IP- ASN) juga merupakan salah satu cara mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indikator outcome dengan menggunakan *composite index.*

Pemerintah Daerah adalah sebuah organisasi tempat bernaungnya ASN, oleh karenanya Pemerintah Daerah selayaknya menuntut adanya profesionalisme ASN sebagai kunci keberhasilan bagi proses penyelenggaraan pelayanan masyarakat (publik). Tuntutan akan profesionalitas pegawai ASN perlu ditingkatkan dan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Isu negatif terhadap profesionalisme khususnya pada aspek kualitas dan kinerja ASN perlu direspon positif dengan melakukan evaluasi. Publik memandang pada umumnya problem profesionalisme ASN dapat dilihat dari kurangnya integritas, rendahnya kompetensi, lambatnya kinerja, dan banyaknya pelanggaran disiplin.

Adapun premis indikator profesionalitas ASN adalah (individu) pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik, organisasinya semakin modern dan pengawai yang semakin bersih. Data kompetensi seharusnya berasal dari hasil uji kompetensi seluruh PNS, namun karena data ini belum tersedia maka digunakan data proxy yaitu potensi diukur dari kesesuaian pendidikan, pengalaman pendidikan teknis dan manajerial (Diklatpim). Sedangkan data organisasi yang modern adalah tingkat disiplin, dimana pegawai yang tingkat pelanggarannya rendah dianggap sebagai lebih professional.

Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan target Indikator **Indeks Profesionalisme ASN** sebesar 76 % dengan capaian 64,23 atau 84,51 % meningkat 24,24 poin dari tahun sebelumnya. Ada perbedaan yang cukup tinggi dikarenakan perubahan formula perhitungan atas indeks profesionalisme ASN berdasarkan Peraturan Menpan RB No.38 Tahun 2018 tentang pengukuran IP ASN dan Perka BKN No.8 Tahun 2019 tentang tata cara Pelaksanaan pengukuran IP ASN. Perubahan indeks profesionalisme ASN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.5 Indeks Profesionalisme ASN Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2021-2024

Uraian	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalisme ASN	73,89	74,50	39,99	64,23

Sumber Data : BKD Provinsi Bengkulu

Jika dilihat dari tabel di atas terjadi fluktausi yang cukup tinggi pada nilai indeks profesionalisme ASN di tahun 2023. Berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026, target IP ASN pada tahun 2024 adalah 76 artinya target IP ASN berdasarkan target RPJMD tidak tercapai, ini dikarenakan oleh beberapa faktor terutama terkait dengan perubahan cara perhitungan nilai indek profesioanlisme ASN.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan nilai rata-rata per deminsi di instansi wilayah kerja kantor reginoal VII BKN Palembang dengan jumlah instansi sebanyak 49 instansi adalah 75,45 dengan kategori sedang, Provinsi Bengkulu masih berada pada kategori rendah dengan nilai IP ASN sebesar 64,23. Selain adanya perubahan formula perhitungan ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai indeks IP ASN di Provinsi Bengkulu yaitu :

1. Masih kurangnya pelatihan atau pendidikan lanjutan dibidang tertentu
2. Belum adanya upaya untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi profesional.

Sehubungan dengan hal tersebut KASN merekomendasikan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan/penataan aspek-aspek yang terkait dengan pelaksanaan sistem merit sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 24/KEP.ASN/C/IV/2024, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan Nilai Indeks Profesionalitas ASN yaitu sebagai berikut :

1. Permasalahan sosialisasi dan penyampaian informasi akan pentingnya pengembangan kompetensi yang dikaitkan dengan pengukuran Indeks Profesionalisme ASN melalui surat ederan kepada perangkat daerah.

2. Mendorong ASN untuk mengikuti kegiatan Pengembangan kompetensi melalui webinar, coaching dan mentoring dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya dengan pembiayaan yang relatif terjangkau.
3. Menyusun Analisis Kebutuhan Diklat sebagai dasar penganggaran untuk pengembangan Kompetensi ASN.

Untuk mengukur Indeks Profesionalitas ASN ada beberapa indikator yang harus kita penuhi dalam mengisi Aplikasi Pengukuran Indeks Profesionalitas yaitu sebagai berikut:

1. Kualifikasi (Pendidikan Terakhir)
2. Kompetensi (Diklat PIM,Diklat Teknis 20 JP Pertahun dan Seminar/ Workshop/ sejenisnya)
3. Kinerja (Nilai SKP)
4. Disiplin (tidak/pernah terkena hukuman disiplin ringan, sedang, berat).

Standar Kualifikasi dan kompetensi ASN

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi bagi ASN dapat berbentuk pendidikan dan Pelatihan . Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian ASN melalui pendidikan formal. Secara umum Strategi peningkatan Kinerja ASN di Badan Kepegawian Daerah Provinsi Bengkulu dapat dikatakan sudah berjalan denga baik dan sesuai dengan Harapan. Hal ini tergambar dimana persentase ASN yang sesuai dengan Standar Kompetensi pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 88,30 % dengan realisasi sesuai dengan yang diharapakan yaitu 89%. Dengan pelaksanaan pengembangan Komptensi yang merata dan berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pegawai serta Organisasi sehingga kualitas Pelayanan Publik Semakin Prima.

Persentase ASN yang sesuai dengan Standar Kualifikasi; Capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan ini adalah penetapan penempatan jabatan pelaksana sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja PNS yang ideal dalam mendukung kebutuhan organisasi dan penyelesaian proses mutasi/pindah PNS masuk ke Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Terwujudnya dan tersusunnya persentase ASN sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja PNS yang kompeten tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di Provinsi Bengkulu sebanyak 91,86 %.

Meningkatnya Kinerja dan Tingkat Kesiplinana ASN

Indikator Kinerja kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yaitu Persentase peningkatan Kinerja ASN Provinsi Bengkulu yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebesar yaitu sebesar 88,10 %. Dari hasil perhitungan dengan data dukung berupa jumlah SKP yang bernilai baik didapat realisasi sebesar 89,25 %. nilai ini termasuk dalam katagori Capaian Kinerja yang berhasil.

Indikator sasaran ini diukur dengan Jumlah ASN dengan Nilai Predikat Kinerja Minimal Baik dibagi dengan Jumlah Seluruh ASN yang ada dilingkungan Provinsi Bengkulu dikali 100%. Hal ini menggambarkan bahwa ASN Pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki Integritas, Tanggung jawab dan disiplin yang baik.

Selanjutnya Disiplin ASN yaitu persentase peningkatan Disiplin ASN yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah 100 %. Dari hasil perhitungan dengan data dukung berupa jumlah kasus yang selsaikan didapatka realisasi sebesar 100 %. Nilai ini termasuk dalam katagori capaian Kinerja yang berhasil.

Masalah Kesiplinan inilah yang menuntut kepala Birokrasi Kepegawaian dari pusat sampai daerah untuk bertindak tegas, arif dan bijksan dalam mengambil suatu keputusan Hukuman atau Sanksi mengenai pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh ASN. Ketegasan sangat diharpakn dalam memberikan sanksi terhadap ASN yang Indisipliner sebagai sebuah terapi dan pembelajaran juga upaya dalam mewujudkan ASN yang berkualitas dan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap tanggung jawabnya sebagai Abdi Masyarakat.

Ditahun 2024 terdapat ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dijatuhkan hukuman disipilin tingkat sedang dari/ atau berat, dan dan dijatuhi Sanksi Moral Karena pelanggaran Kode Etik, ASN berjumlah 12 (dua belas) ASN dan semuanya sudah dalam penyelesaian SK Gubernur . Sesuai dengan persentase dari kasus yang masuk ke Badan Kepegawian Daerah dan empat kasus tersebut terselesiakan samapai SK Gubernur. Dari kasus yang diselesiakan ini nilai persentase peningkatan Disiplin ASN dalam katagori berhasil.

Untuk kelancaran pelaksanaan pencapaian nilai Indek Profesionalisme ASN didukung beberapa program di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu dengan kegiatan sebagai berikut:

1. kegiatan Pengembangan kompetensi ASN dengan sub kegiatan pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN pagu sebesar RP. 75.000.000 dengan realisasi RP. 69.130.432,-
2. kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur dengan sub kegiatan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur dan Pembinaan disiplin ASN dengan Rp. 300.000.000,- dan realisasi sebesar RP. 346.431.790,-

Selanjutnya untuk beberapa rekomendasi dalam rangka peningkatan SDM aparatur seperti:

1. Untuk mendapatkan capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan standarisasi ukuran kinerja, sehingga ada keseragaman dalam penilaian kinerja;
2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indikator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi misi yang telah ditetapkan;
3. Agar implementasi Sistem Laporan Kinerja benar-benar efektif, perlu adanya sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcome kegiatan yang bersangkutan.

4. Indeks E-Government SPBE

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bentuk implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat

kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Metode Evaluasi SPBE adalah dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapablilitas fungsi teknis SPBE. Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh instansi pusat dan daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian individu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 menetapkan target 3,2 untuk nilai Indeks e- Geverment (SPBE) dengan capaian 3,92 dengan predikat “Sangat Baik” atau 122,5 %. Pencapaianan ini cukup memuaskan karena Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,8 poin atau meningkat hampir 25% dari tahun yang lalu, kondisi ini pun juga sejalan dengan target RPJMD pada tahun yang sama. Berikut peningkatan nilai indeks SPBE selama 5 tahun terakhir.

Grafik. 5.2.

Indeks SPBE Provinsi Bengkulu Tahun 2020 – 2024

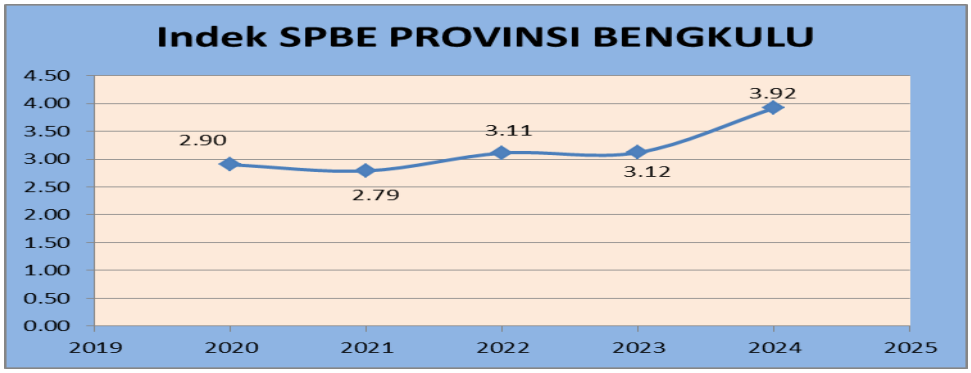

Sumber data: Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu

Berdasarkan grafik peningkatan nilai indeks SPBE meningkat cukup signifigan, apalagi jika dibandingkan secara nasional, Provinsi Bengkulu berada di atas standar nasional. Nilai SPBE secara nasional adalah 3,12 sedangkan Provinsi Bengkulu 3,92 artinya provinsi Bengkulu berada pada 0,80 poin di atas

standar nasional. Namun demikian, jika dilihat ke level Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu masih terdapat 4 Kabupaten nilai indeks SPBE-nya masih cukup. Berikut hasil nilai indeks SPBE Kabupaten Kota:

Tabel 5.1.

Nilai Indeks SPBE Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2024

No	Kabupaten	Nilai	Predikat
1.	Bengkulu Utara	3,28	Baik
2.	Bengkulu Selatan	2,87	Baik
3.	Rejang Lebong	3,24	Baik
4.	Kaur	2,42	Cukup
5.	Seluma	2,26	Cukup
6.	Mukomuko	2,07	Cukup
7.	Kepahiang	2,47	Cukup
8.	Lebong	3,38	Baik
9.	Bengkulu Tengah	2,84	Baik
10	Kota Bengkulu	2,63	Baik

Sumber data: Kementerian PAN RB RI

Selanjutnya dalam pencapaian target nilai indeks SPBE, tentunya ada beberapa faktor yang mempengarui, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya nilai indeks SPBE, yaitu:

1. Adanya kebutuhan untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas, Tuntutan Era Digitalisasi dan Transformasi Teknologi, dan Standarisasi dan Keteraturan Sistem Informasi Pemerintah.
2. Adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas, koordinasi antar instansi, transparansi dan akuntabilitas
3. Terbentuknya Tim Asesor Internal SPBE Pemerintah Provinsi Bengkulu dan

telah ditetapkannnya peraturan Gubernur nomor f.525.DKS Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2028 tanggal 21 Desember 2023

4. Adanya Peningkatan Akses Internet, Dukungan Pimpinan
5. Meningkatnya akses internet, Perkembangan teknologi informasi yang pesat dalam pengembangan aplikasi pemerintahan yang lebih efisien dan inovatif
6. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih cepat,mudah dan transparan dalam pemanfaatan sumber daya teknologi informasi, meningkatnya inovasi publik dalam pelayanan publik

Disamping itu ada juga faktor-faktor penghambat dalam pencapaian nilai indeks SPBE, yaitu:

1. Perubahan teknologi yg cepat, Rentannya keamanan sistem dan Keterbatasan anggaran
2. Masih adanya provider yang terlambat mengajukan tagihan pemakaian internet
3. Belum tesedianya Anggaran untuk peningkatan Kompetensi SDM untuk Pengelola SPBE di Pemerintah Provinsi Bengkulu.
4. Kapasitas Tenaga Ahli di bidang teknologi informasi, keterbatasan anggaran dan risiko kebocoran data dan serangan siber
5. Kurangnnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi menjadi kendala utama dan keterbatasan anggaran
6. Keterbatasan anggaran dan kurangnya tenaga ahli di bidang TIK dalam mengoptimalkan pemanfaatan TIK

Adapun Program yang mendukung nilai indeks SPBE Provinsi Bengkulu adalah Program Pengelolaan AplikasiImformastika yang ada di Dinas Komunikasi dan Informasi melalui kegiatan dan sub kegiatan berikut:

1. Kegiatan pengelolaan nama, domian yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan sub domain di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu dengan sub kegiatan; penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah didukung dengan anggaran APBD Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 5.455.000.000,- dengan realisasi Rp. 5.076.379.352,-

2. Kegiatan Pengelolaan e-Govermment di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub kegiatann; penatausahaan dan pengawasan e-govermment dalam penyelenggaraan pemerintah provinsi, pengelolaan pusat data pemerintah daerah, pengembangan aplikasi dan proses binsnis pemerintah berbasis elektronik dan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah didukung dengan anggaran pemerintah provinsi Bengkulu sebesar RP. 715.000.000,- dengan realisasi Rp. 703.286.413,-

Sasaran 5.2
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja			
			Tahun 2023		Tahun 2024	
			Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Nilai Pelayanan Publik	A-	B	92,5	B	96,09

Sumber : Kemenpan RB RI

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja terhadap sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur melalui indikator kinerja Nilai Pelayanan Publik Provinsi Bengkulu.

Nilai Pelayanan Publik Provinsi Bengkulu

Menurut UU No 25 Tahun 2009, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pembinaan dan penanggung jawab.

Penyelenggaraan pelayanan publik dimaksud adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah dan BUMD yang membawahi pelaksana pelayanan publik yang pada pelaksanaan pelayanannya meliputi; pengelolaan pengaduan masyarakat; pengelolaan informasi; pengawasan internal; penyuluhan kepada masyarakat; dan pelayanan konsultasi pada pelaksanaannya sebagian dilakukan dengan sistem pelayan terpadu.

Untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik maka diadakan kompetisi dan penilaian tingkat nasional berupa:

1. Penghargaan SINOVIK (aplikasi inovasi pelayanan publik) dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Penghargaan Abdibakti dari kementerian pertanian Ripublik Indonesia
3. Evaluasi dan Monitoring oleh Tim KemenPAN RB RI melalui Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik)
4. Penilaian oleh Ombudsman RI untuk seluruh Kabupaten/Kota yang belum di survey pada tahun sebelumnya
5. Pembentukan Mall Pelayanan Publik (MPP) di kabupaten /Kota.

Pemerintah Provinsi Bengkulu notabanenya adalah penyelenggara pelayanan Publik utama dilevel Pemerintahan Wilayah Provinsi Bengkulu, namun pada pelaksanaannya dibagi sesuai dengan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah yang membidangi. Pada tahun 2024, Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) Republik Indonesia sudah melakukan Penilaian terhadap lembaga Pelayanan Publik di Provinsi Bengkulu yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Berdasarkan PERMENPAN RB nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik serta Pedoman Menteri PAN RB RI tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik, aspek-aspek penilaian pada evaluasi capaian kinerja meliputi: kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana pelayanan publik, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi dengan kategori penilaian penilaian sebagai berikut :

Tabel 5.2.1
Kategori Nilai Kinerja unit Pelayanan Publik

NO	RANGE PENILAIAN	KATEGORI	MAKNA
1.	0 - 1,00	F	Gagal
2.	1,01 - 1,50	E	Sangat Buruk
3.	1,51 - 2,00	D	Buruk
4.	2,01 - 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
5.	2,51 - 3,00	C	Cukup
6.	3,01 - 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
7.	3,51 - 4,00	B	Baik
8.	4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik
9.	4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima

Sumber data: KemenPAN RB RI

Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari KEMENPAN RB RI terhadap Provinsi Bengkulu tahun 2023 adalah 3,70 dengan kategori **B "Baik**", sedangkan pada tahun 2024 mendapatkan mendapatkan nilai 3,94 dengan kategori masih **B** "**BAIK",** namun walaupun masih pada reng yang sama, nilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Bengkulu tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,24 poin dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya berdasarkan pantauan hasil untuk wilayah sumatera (wilayah Barat Indonesia) Provinsi Bengkulu berada diperingkat ke-7 setelah Provinsi Lampung dan Riau, namun secara nasional Provinsi Bengkulu berada diurutan ke 21 dari 33 Provinsi yang dilakukan penilaian.

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada lingkup pemerintah daerah tahun 2024 yang dilakukan oleh Kemenpan RB RI terhadap Provinsi Bengkulu dilakukan terhadap 3 lembaga layanan yaitu Dinas Sosial, RSUD M Yunus dan Samsat/Bappenda. Berikut perkembangan capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Bengkulu selama 5 tahun terakhir.

Tabel 5.2.2
Tabel Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Publik Provinsi Bengkulu

No	TAHUN	CAPAIAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK	Nilai	KETERANGAN
1	2020	B	3,94	
2	2021	A-	4,37	
3	2022	A	4,40	
4	2023	B	3,70	
5.	2024	B	3,94	

Sumber data : Hasil Rilis KemenPAN RB RI

Berikut beberapa upaya yang dilkaukan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam rangka meningkatkan penyeleggaraan Pelayanan Publik adalah:

1. Telah diremsikannya Mal Pelayanan Publik yang ada disetiap 10 Kabuapten Kota dalam Provinsi Bengkulu.
2. Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap unit-unit pelayanan publik untuk persiapan inovasi pelayanan publik.
3. Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten Kota terkait kompetisi inovasi

pelayanan publik dan abdi bakti tani.

4. Melakukan penilaian dan survey terhadap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Adanya peningkatan hasil evalusi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik tahun 2024 dengan predikat “Baik” di Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu.
6. Adanya Keputusan KemenPAN RB Ri nomor 815 tahun 2023 tentang hasil pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana ramah kelompok rentan provinsi bengkulu.

Tahun 2024 kemenPAN RB RI masih fokus pada sampel Pilot Project tahun sebelumnya dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Bengkulu. Sebagai bentuk pembinaan Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap penyelenggaran pelayanan adalah dengan dengan ditetapkan arah kebijakan peningkatan Pelayanan Publik melalui program Penataan Organisasi pada kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, sub kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bengkulu yang dibiayai melalui APBD tahun 2024 sebesar Rp. 93.000.000 dengan realisasi Rp. 91.773.000,-. Atau 98,68 % , ada efisiensi sebesar RP. 1,32 % dari Program Penataan Organisasi tahun 2024

Tujuan 6
Meningkatnya Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat

No	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja			
			Tahun 2023		Tahun 2024	
			Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Indek Pembangunan Manusia	75,0 – 75,5	74,30	--	74,91	99,88

Sumber : Badan Pusat Statistik

Didalam RPJMD Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2021 – 2026, Pemerintah Provinsi Bengkulu pada misi ke-4 menetapkan tujuan untuk membangun sumber daya manusia menjadi berkualitas, berdaya saing dan berbudaya serta toleran dan religius pada misi ini Pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki sasaran untuk meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat dengan indikator kinerja indek pembangunan manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 tercatat sebesar 74,91. Ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,61 poin atau 0,82 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IPM ini digunakan untuk mengukur kualitas hidup penduduk berdasarkan tiga dimensi, yaitu :

- Pendidikan diukur berdasarkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah
- Umur Panjang dan Hidup Sehat diukur berdasarkan angka harapan hidup
- Pengeluaran diukur berdasarkan pengeluaran per kapita.

Dengan IPM sebesar 74,91, Provinsi Bengkulu berada pada kategori "tinggi" dalam hal kualitas hidup penduduk.

Sasaran 6.1
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan

No	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja			
			Tahun 2023		Tahun 2024	
			Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Angka Harapan Lama Sekolah	13,80	13,74	100,65	13,75	99,63
2.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	9,10	9,03	99,66	9,04	99,34

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel di atas, tolak ukur pencapaian sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan diukur melalui 2 indikator yaitu Angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Untuk lebih mengetahui sejauh mana fartisipasi setiap indikator mendukung sasaran ini dapat dilihat pada masing masing indikator sebagai berikut :

1. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi

dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Dimensi sehat pengetahuan diukur dari gabungan indikator harapan lama sekolah (HLS) dan Indikator rata-rata lama sekolah. Setiap penambahan harapan lama sekolah maka akan menaikan Indeks Pembangunan Manusia. Berikut grafik Harapan Lama Sekolah Provinsi Bengkulu tahun 2024:

Grafik 6.1.1
Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Bengkulu Dari Tahun 2019 S.D 2024

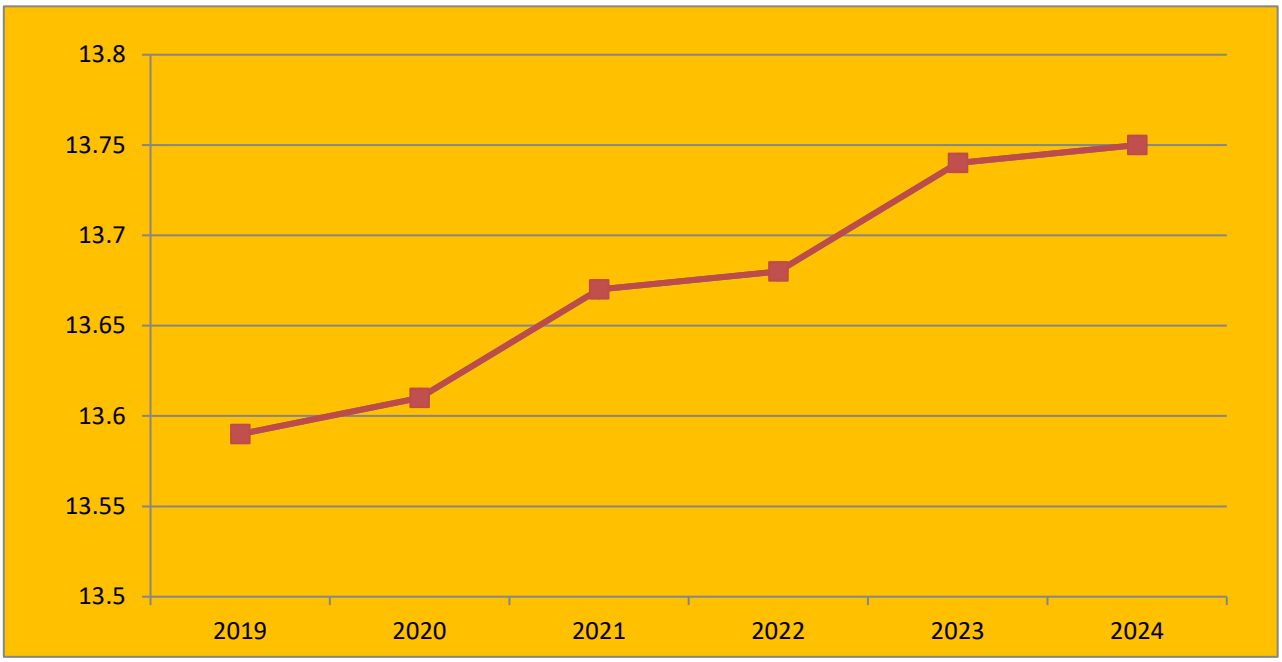

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Grafik diatas dapat dilihat angka harapan lama sekolah ditahun 2021 adalah 13,67 ditahun 2022 meningkat 0,01 menjadi 13,68 atau tercapai 100, 36 %, Ditahun 2023 juga meningkat lebih segnifikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,06 menjadi 13,74 atau 100,65 dan pada tahun 2024 meningkat 0,01 menjadi 13,75, jadi Pada Tahun 2024 ini target capaian Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Bengkulu 13,80 dengan realisasi 13,75 atau 99,63.

Pada tahun 2024, Harapan Lama Sekolah di Indonesia tercatat 13,21 maka Provinsi Bengkulu berada di atas angka harapan lama sekolah Nasional. Kondisi ini bukan berarti Provinsi lebih baik dari Nasional hanya saja Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa anak-anak yang berusia 7 tahun

ke atas memiliki rata- rata peluang untuk menamatkan pendidikan formal setara dengan Diploma 1. Untuk itu sesuai dengan intruksi Bapak Gubernur Bengkulu target disektor Pendidikan bukan sekadar pemerataan akses Pendidikan saja akan tetapi juga pemerataan yang berkualitas. Pemerataan akses Pendidikan diwujudkan dengan memastikan sejumlah program prioritas berjalan dengan baik. Berikut ini tabel angka harapan lama sekolah di kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu.

Tabel 6.1.1
Angka Harapan Sekolah dari tahun 2022 s.d 2024

Wilayah	Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	13,68	13,74	13,75
Bengkulu Selatan	13,63	13,65	13,66
Rejang Lebong	14,01	14,19	14,2
Bengkulu Utara	12,89	12,91	12,92
Kaur	13,07	13,14	13,15
Seluma	13,3	13,32	13,33
Mukomuko	12,76	12,86	12,87
Lebong	12,75	12,9	12,91
Kepahiang	13,13	13,14	13,16
Bengkulu Tengah	13,45	13,46	13,47
Kota Bengkulu	16,04	16,06	16,07

Sumber data: Badan Pusat Statistik

Dari tabel diatas angka Harapan Lama Sekolah dari tahun ke tahun meningkat, artinya bahwa angka harapan lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang di seluruh wilayah provinsi Bengkulu.

2. Angka Rata-Rata lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang

dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 Tahun dan maksimal 15 Tahun.

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) akan menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup di suatu wilayah.

Upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mendorong bertambahnya rata-rata lama sekolah adalah dengan mewajibkan setiap sekolah menerima murid yang berasal dari warga yang tidak mampu. Selain itu perlu juga dilakukan dengan membuat perangkat atau aturan dan petunjuk teknisnya, untuk mendorong setiap warga Provinsi Bengkulu yang berusia sekolah untuk bersekolah dan minimal dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya. Berikut grafik gambaran rata-rata lama sekolah di Provinsi Bengkulu :

Grafik 6.1.2
Grafik Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Bengkulu

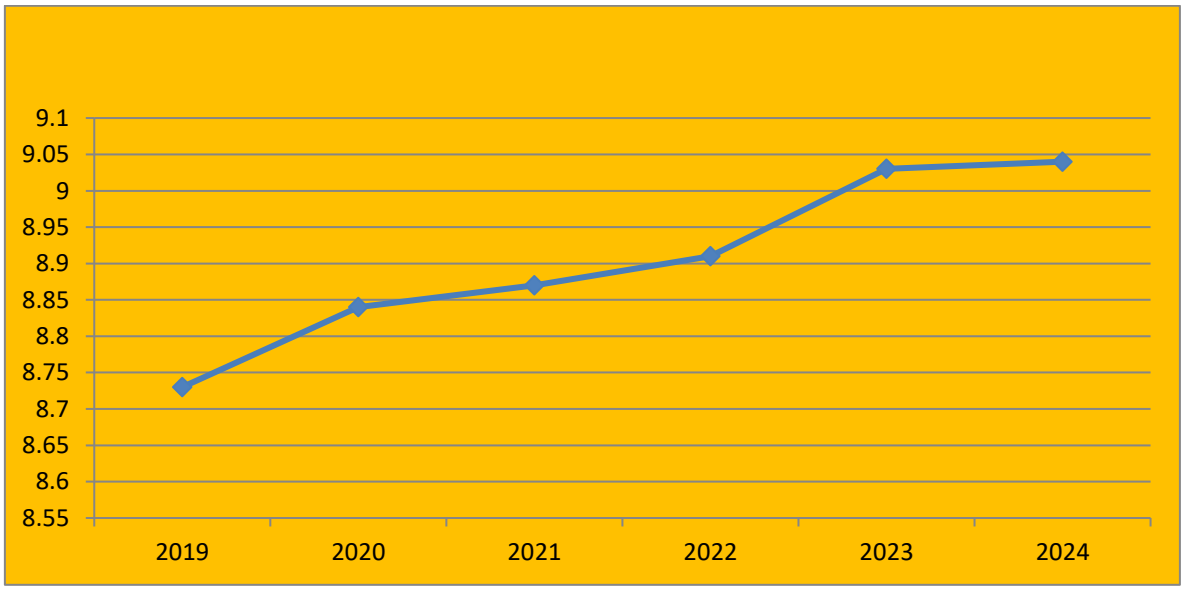

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Dari Grafik dapat dilihat bahwa angka rata-rata lama sekolah Provinsi Bengkulu ditahun 2021 adalah 8,87 ditahun 2022 meningkat 0,04 menjadi 8,91 ditahun 2023 meningkat 0,12 menjadi 9,03 ditahun 2024 meningkat 0,01 menjadi 9,04 dengan persentase 99,34.

Grafik 6.1.3

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Indonesia

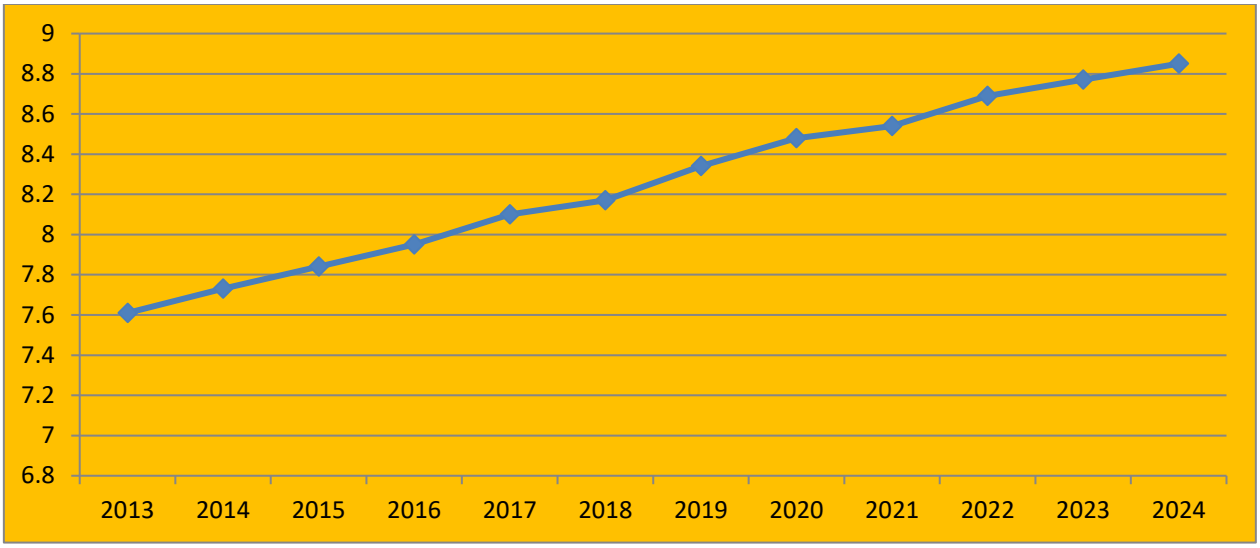

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Jika dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Indonesia pada tahun 2023 adalah 8,77 dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan 8,85, Angka tersebut meningkat 0,08 dari tahun sebelumnya. Walaupun demikian Provinsi Bengkulu masih sangat perlu evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan untuk selalu menumbuhkan angka rata-rata lama sekolah, Pencapaian angka rata-rata lama sekolah 9,04 itu diartikan bahwa rata-rata penduduk di seluruh wilayah provinsi Bengkulu hampir lulus dengan SMP dan tentunya kondisi ini masih harus terus ditingkatkan supaya antara Harapan Lama sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah jaraknya tidak terlalu jauh. Berikut ini tabel rata-rata lama sekolah kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu.

Tabel 6.1.2
Rata Rata Lama Sekolah dari tahun 2022 s.d 2024

Wilayah	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	8,91	9,03	9,04
Bengkulu Selatan	9,39	9,41	9,42
Rejang Lebong	8,55	8,8	8,81
Bengkulu Utara	8,1	8,11	8,32
Kaur	8,39	8,41	8,47
Seluma	8,09	8,13	8,14
Mukomuko	8,31	8,56	8,57
Lebong	8,24	8,26	8,41
Kepahiang	8,3	8,36	8,37
Bengkulu Tengah	7,49	7,51	7,71
Kota Bengkulu	11,82	11,83	11,84

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Jika dilihat pada table diatas bahwa peningkatan angka rata-rata lama sekolah selalu meningkat. Begitupun harapannya di tahun-tahun mendatang pertumbuhan angka rata- rata lama sekolah di provinsi semakin meningkat, tentunya dengan dukungan semua pihak.

Untuk mengukur 2 indikator pada sasaran meningkatnya akses dan kualitas pendidikan di atas didukung oleh program Pengelolaan pendidikan dengan kegiatan Pengelolaan sekolah menengah atas, kegiatan Pengelolaan pendidikan sekolah menengah kejuruan dan kegiatan pengelolaan pendidikan Khusus pada dinas Pendidikan dan kebudayaan pemerintah provinsi Bengkulu melalui APBD sebesar Rp. 848.472.986.096 dengan realisasi Rp. 696.174.606.750 atau 82,050 %.

Selain itu pemerintah provinsi Bengkulu dalam mewujudkan sasaran meningkatnya akses dan kualitas pendidikan melalui program prioritas Gubernur Bengkulu dengan melaksanakan Iuran Pembayaran Pendidikan (IPP) secara gratis bagi siswa/i SMA, SMK dan SLB Negeri di Provinsi Bengkulu.

Sasaran 6.2
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja			
			Tahun 2023		Tahun 2024	
			Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Angka Harapan Hidup	73,50 Tahun	73.11 Tahun	98,76	73,31 Tahun	99,74

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Tabel di atas, sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat keberhasilannya diukur melalui indikator yaitu angka harapan hidup.

1. Angka Harapan Hidup

Usia harapan hidup merupakan merupakan indikator dalam menilai kinerja kesehatan oleh pemerintah. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup atau rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani seseorang hingga akhir hayatnya. Angka harapan Hidup (AHH) dapat juga di maknai lama hidup manusia. Melalui Angka harapan hidup juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil evaluasi juga dapat meningkatkan derajat kesehatan di suatu wilayah dan digunakan sebagai acuan-acuan program kesehatan.

Angka Harapan Hidup merupakan salah satu komponen pembentuk Indek Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karenanya Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam hal kesehatan. Berdasarkan data BPS tahun 2024 sebagaimana grafik di bawah ini, memproyeksi angka harapan hidup di Indonesia mencapai 73,31 tahun.

Grafik 6.2.1

Umur Harapan Hidup Nasional

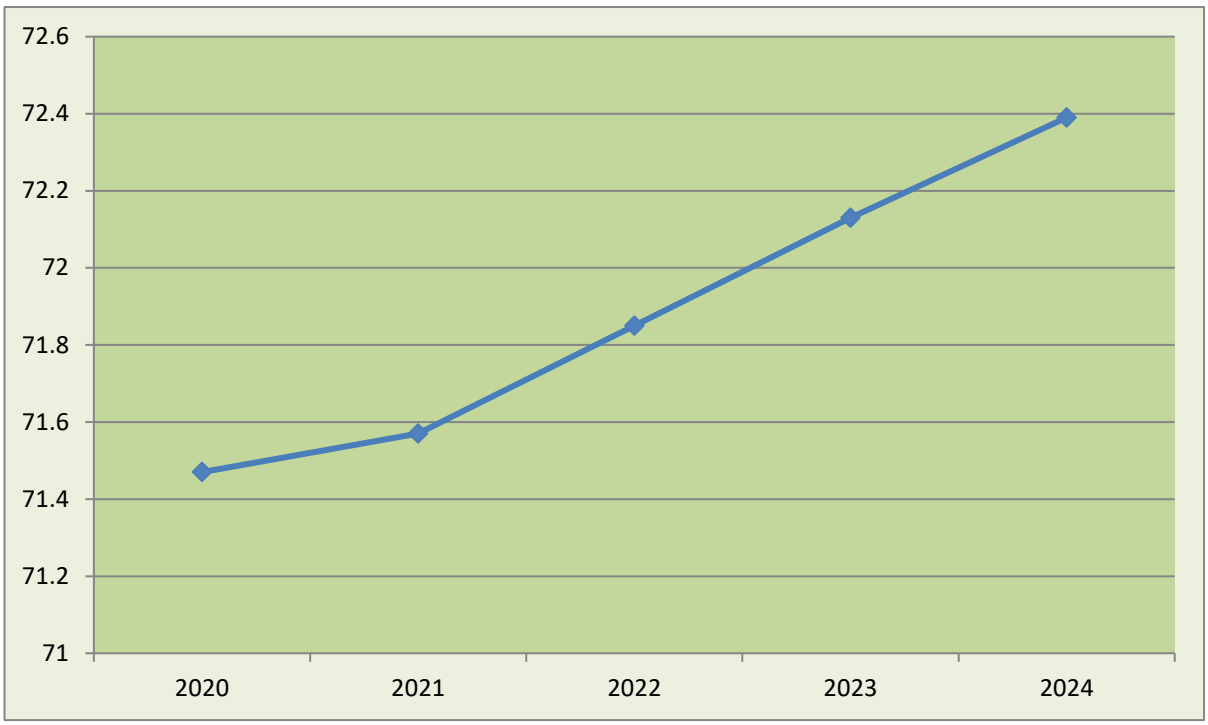

Sumber : Data BPS

Angka Harapan Hidup Provinsi Bengkulu tahun 2024 adalah 73,31 tahun,terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 73,11 tahun, dan apabila dibandingkan target yang ditetapkan dalam RENSTRA Provinsi Bengkulu yaitu 73,50 tahun dapat disimpulkan Angka Harapan Hidup di Provinsi Bengkulu telah mencapai 99,74 %.

Berikut grafik Angka Harapan Hidup Provinsi Bengkulu beberapa tahun terakhir .

Grafik 6.2.2
Angka Harapan Hidup Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

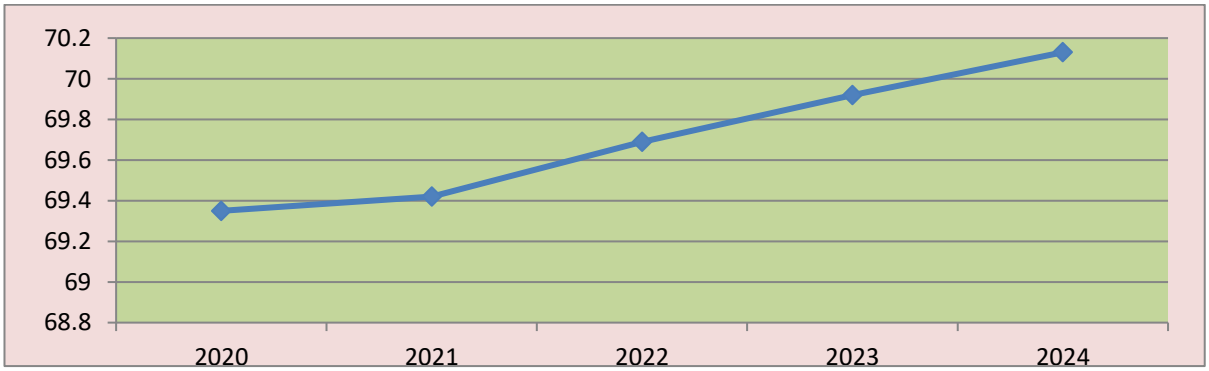

Sumber data: badan Pusat Statistik

Dari grafik diatas dapat dilihat peningkatan angka harapan Hidup di Provinsi Bengkulu setiap tahunnya mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, Angka Harapan Hidup Provinsi Bengkulu sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. UHH di Provinsi Bengkulu dipengaruhi oleh UHH di kabupaten/kotanya.

Selanjutnya jika dibandingkan peningkatan angka harapan hidup provinsi Bengkulu dengan nasional hanya 2,26 tahun selisihnya dibawah nasional, artinya peningkatan angka Harapan Hidup provinsi Bengkulu sedikit tertinggal dari peningkatan angka harapan hidup Nasional. Untuk mencapai target pada peningkatan angka harapan hidup pemerintah provinsi Bengkulu melalui dinas Kesehatan melakukan :

1. Menurunkan angka Kematian
2. Menurunkan angka kematian Kesakitan Akibat Penyakit dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
3. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
4. Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

2. Menurunnya Angka Kematian

Menurunnya angka kematian diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut:

a) Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2024 berhasil ditekan yaitu 92 per 100.000 KH dari target 95 per 100.000 KH dengan persentase capaian target sebesar 103,3%
b) Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2024 yaitu 11,6 per 1000 KH dari target 8 per 1000 KH dengan persentase capaian target 68,96 %.
c) Prevalensi Stunting yaitu 3,80% dari target 6,15% dengan persentase capaian target 161,84%.
d) Prevalensi Wasting 1,62% dari target 1,2% dengan persentase capaian target 74,07%.

Tabel 6.2.1

Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Bayi Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2024.

No.	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi		% Capaian Target
				2023	2024	2024
1.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	Angka	**183** (RPJMN) **95 (RPJMD)**	125	92	103,3
2.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	Angka	**16** (RPJMN) **8 (RPJMD)**	9,77	11,6	68,96
3.	Prevalensi Stunting	%	**14** (RPJMN) **6.15 (RPJMD**	5,02	3,80	161,84
4.	Prevalensi Wasting	%	**7** (RPJMN) **1.2 (RPJMD)**	1,35	1.62	74,07

Ket : Kelahiran Hidup Tahun 2024 : 30.575 Bayi

[Sumber Data : Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Tahun 2024

3. Menurunkan angka kematian Kesakitan Akibat Penyakit dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Tabel 6.2.2

Layanan Krisis Kesehatan dan KLB Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi		% Capaian Target
				2023	2024	2024
1.	Persentase Layanan Krisis Kesehatan dan KLB	%	100	100	100	100

a.	Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan pada kondisi KLB	Jiwa	573	87	573	100
b.	Jumlah pendudukan yang mendapat pelayanan kesehatan yang berdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi	Jiwa	1.950	5.034	1.950	100

Sumber : Sub.Koordinator Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, Tahun 2024

Program Layanan Krisis Kesehatan dan Kejadian Luar Biasa (KLB); realisasi persentase layanan krisis kesehatan Kejadian Luar Biasa sudah tercapai yaitu sebesar 100%.

4. Program Layanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Persentase capaian layanan pencegahan dan pengendalian penyakit sudah berhasil yaitu sebesar 100%. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Tabel 6.2.3

Indeks Keluarga Sehat (IKS) Provinsi Bengkulu Tahun 2024.

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024			
			Tahun 2023		Tahun 2024	
			Realisa	%	Realisasi	%
1.	Indeks Keluarga Sehat	0.223	0,224	100,44	0,227	101,79

Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK Tahun 2024.

Indeks Keluarga Sehat sudah tercapai yaitu sebesar 101,79% dari target 0,223 dan bila dibandingkan capaian realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan yaitu dari 0.224 tahun 2023 menjadi 0.227 tahun 2024.

5. Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Untuk mengukur meningkatnya mutu dan kualitas pelayanan kesehatan dapat diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 6.2.4
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar
Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2024.

No	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi		% Capaian Target
				2023	2024	2024
1.	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar** Diukur dengan Indikator berikut	**%**	**99,5**	**79,23**	**100**	**100**
	▪ Jumlah Puskesmas Terakreditasi Minimal Madya	Unit	179	127	179	100
	▪ Jumlah RS Terakreditasi Minimal Paripurna	Unit	21	21	21	100

Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK,2024

Dari tabel di atas fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar yaitu 100% dimana telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 99,5%,

Tabel 6.2.5

Angka Harapan Hidup kabupaten Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2022 s.d 2024

Wilayah	Umur Harapan Hidup (Tahun)		
	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	69,69	69,92	70,13
Bengkulu Selatan	68,15	68,40	68,53
Rejang Lebong	69,00	69,22	69,42
Bengkulu Utara	68,53	68,77	68,99
Kaur	67,01	67,27	67,51
Seluma	68,13	68,35	68,53
Mukomuko	67,00	67,30	67,57
Lebong	63,68	63,93	64,13
Kepahiang	68,28	68,46	68,61
Bengkulu Tengah	68,37	68,52	68,64
Kota Bengkulu	70,46	70,74	71,03

Sumber data : BPS Bengkulu

Berdasarkan tabel diatas angka harapan hidup. Jika dilihat tingkat angka Harapan Hidup tertinggi adalah kota Bengkulu yaitu 70,46 tahun. Jika peningkatan Angka Harapan Hidup dipengaruhi keadaan hidup masyarakat yang lebih baik, maka dimungkinkan bahwa masyarakat kota Bengkulu mempunyai tarap hidup lebih baik dibandingkan dengan 9 kabupaten lainnya. Sebagai ibu Kota Provinsi Bengkulu, tentunya akses diberbagai sektor lebih mudah dibandingkan kabupaten yang lain; seperti akses kesehatan dikota Bengkulu sudah mempunyai 3 rumah sakit milik pemerintah dan 5 rumah sakit swasta serta beberapa klinik kesehatan lainnya.

Selanjutnya untuk tercapainya target pada indikator angka harapan hidup pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu didukung oleh program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.

Program dan kegiatan di atas merupakan wujud dari upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Provinsi Bengkulu dengan sumber anggaran yang didanai oleh APBD Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 54.725.320.400,- dengan realisasi RP. 51.788.164.517,- atau 94,63 %.

6. Rekomendasi :

1. Sinkronisasi program dari pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/kota sehingga pelaksaan target indikator angka harapan hidup dapat tercapai.
2. Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota agar indikator kinerja dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.
3. Dalam penyusunan rencana program dapat memperhatikan kondisi terkini dengan memanfaatkan peluang dan memperhatikan hambatan-hambatan pada tahun sebelumnya sehingga indikator kinerja dapat tercapai sebaik mungkin.
4. Dukungan dana yang cukup untuk setiap indikator kinerja berdasarkan capaian target yang ingin dicapai.
5. Melakukan inovasi dan terobosan baru dalam pencapaian indikator kinerja
6. Memanfaatkan semaksimal mungkin alokasi pendanaan yang ada sehingga program yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan capaian indikator kinerja.

Sasaran 6.3
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

No	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja			
			Tahun 2023		Tahun 2024	
			Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Pengeluaran Per Kapita	11,1 Juta	11,172 Juta	103,44 %	11,733 Juta	105,40 %
2.	Angka Kemiskinan	13,50 -13,90	14,04	99,71 %	12,52	109,92 %

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel di atas, sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat keberhasilannya diukur melalui dua indikator yaitu angka pengeluaran perkapita dan angka kemiskinan.

1. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita merupakan salah satu dimensi penyusun indeks pembangunan manusia (IPM). IPM bisa menjadi acuan untuk melihat standar atau kualitas hidup layak masyarakat. Provinsi dengan pengeluaran per kapita tertinggi masih dipegang DKI Jakarta sebesar Rp19,95 juta per tahun, Provinsi dengan pengeluaran terbesar kedua ditempati Kepulauan Riau, sebesar Rp15,57 juta per kapita per tahun. Disusul di Yogyakarta di posisi ketiga, yakni Rp15,36 juta per kapita per tahun.

Pengeluaran rata-rata perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Pada perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2022 sudah ditetapkan bahwa indikator pengeluaran perkapita adalah salah satu alat untuk mengukur sasaran Meningkatnya kesejahteraan rakyat dengan target 10,6 juta jiwa pertahun dengan realisai 10,84 juta Jiwa atau 102,26%, Tahun 2023 targetnya 10,8 juta jiwa pertahun dengan realisasi 11,172 juta jiwa atau 103,44% dan pada Tahun 2024 targetnya 11,1 juta jiwa pertahun dengan realisasi 11,733 juta jiwa atau 105,40%, Berikut tren peningkatan pengeluaran perkapita selama 5 tahun di provinsi Bengkulu:

Grafik. 6.3.1

Pengeluaran Perkapita dari tahun 2020 s.d 2024

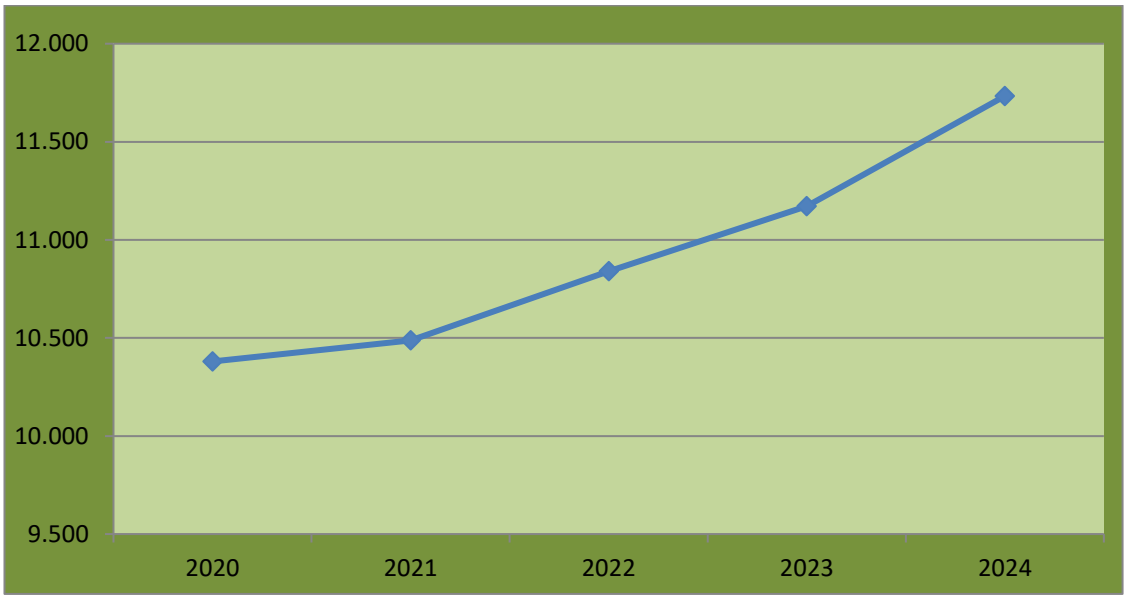

Sumber data : BPS

Berdasarkan gafik di atas dapat dilihat peningkatan pengeluaran perkapita setiap tahunnya. Pada tahun 2021 sampai tahun 2023 provinsi Bengkulu kembali bangkit pasca terjadinya pandemic covid-19 begitu juga di tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut :

1. **Pertumbuhan ekonomi makro di provinsi Bengkulu;**

   Ekonomi Provinsi Bengkulu Triwulan III-2024 secara (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,57 persen. Pertumbuhan terjadi pada 16 lapangan usaha, sementara satu lapangan usaha mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif). Tiga lapangan usaha yang mengalami

pertumbuhan tertinggi adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,66 persen, diikuti jasa lainnya sebesar 9,61 persen dan jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,57 persen, kemudian lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami kontraksi sebesar minus 2,38 persen, adapun lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan sebesar 1,64 persen.

Adapun lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan sebesar 0,44 persen. Sementara itu, Provinsi Bengkulu menempati posisi ke 6 dari 10 provinsi di Pulau Sumatera dengan pertumbuhan (y-on-y) sebesar 4,57 persen. Secara spasial, Provinsi Sumatera utara mengalami pertumbuhan (y-on-y) tertinggi di Pulau Sumatera, yakni sebesar 5,20 persen. Dari sisi Keadaan Tenagakerja, Penduduk usia kerja Provinsi Bengkulu cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk.

Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 1.585.001 orang, naik sebanyak 23.266 orang jika dibanding Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 1.136.573 orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 448.428 orang. Pada Agustus 2024, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 726.941 orang (66,01 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 374.293 orang (33,99 persen). Dibandingkan Agustus 2023, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan sebesar 1,76 persen poin.

2. **Perkembangan laju inflasi**

Pada bulan November 2024, Inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Bengkulu sebesar 0,82 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 105,60. Inflasi y-on-y Kota Bengkulu sebesar 1,13 persen dengan IHK sebesar 106,03 sedangkan Kabupaten Muko Muko deflasi y-on-y sebesar 0,10 persen dengan IHK sebesar 104,31. Inflasi y-on-y di Provinsi Bengkulu terjadi karena adanya kenaikan harga yang

ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,27 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,74 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,28 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,32 persen; kelompok transportasi sebesar 0,38 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,60 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,91 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,80 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,44 persen.

Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,42 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,71 persen. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) pada bulan November 2024 Provinsi Bengkulu sebesar 0,20 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) November 2024 sebesar 0,49 persen.

3. **Meningkatnya pembiayaan daerah, perkembangan akses keuangan dan UMKM**

Kinerja industri perbankan di Provinsi Bengkulu tergolong baik, hal ini tercermin dari pertumbuhan aset perbankan sebesar Rp1,9 triliun atau 7,38 persen menjadi Rp28,5 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp1,7 triliun atau 11,44 persen secara tahunan, penyaluran kredit oleh Bank Umum di Provinsi Bengkulu mencapai Rp28,57 triliun pada Tahun 2024, tumbuh sebesar 7,38 persen (yoy) dengan kualitas kredit yang tetap terjaga, tercermin dari rasio NPL/F sebesar 1,92 persen, menurun dari 2,00 persen pada Tahun 2023.

Pertumbuhan kredit ini didominasi oleh Kredit Investasi yang naik sebesar Rp. 957 miliar atau 20,79 persen (yoy) menjadi Rp5,5 triliun, serta Kredit Konsumsi yang tumbuh sebesar Rp 823 miliar atau 6,06 persen (yoy) menjadi Rp14,4 triliun, sementara itu, Kredit Modal Kerja hanya tumbuh sebesar Rp181 miliar atau 2,16 persen, mencapai Rp8,59 triliu, dari segi sektor ekonomi, pertumbuhan kredit di Provinsi Bengkulu didorong oleh sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan

yang meningkat sebesar Rp694 miliar atau 12,68 persen (yoy), sektor Pemilikan Peralatan Rumah Tangga yang tumbuh sebesar Rp412 miliar atau 6,88 persen (yoy), sektor Pertambangan dan Penggalian yang melonjak sebesar Rp249 miliar atau 314,95 persen (yoy), serta sektor Pemilikan Rumah Tinggal yang naik sebesar Rp244 miliar atau 9,13 persen (yoy).

Penyaluran kredit untuk UMKM di Provinsi Bengkulu mencapai Rp13,31 triliun, atau 46,59 persen dari total penyaluran kredit, dengan pertumbuhan tahunan sebesar Rp. 829 miliar atau 6,64 persen (yoy)., Untuk mendukung pengembangan UMKM, pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp3,4 triliun selama tahun 2024 perbankan di Bengkulu telah menyalurkan KUR sebesar Rp1,77 triliun kepada 24.897 debitur, mencapai 52,03 persen dari target pemerintah, Penyaluran kredit UMKM di Provinsi Bengkulu terus menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencapai Rp13,31 triliun atau 46,59 persen dari total kredit.

Pertumbuhan ini didukung oleh kenaikan DPK sebesar Rp548 miliar atau 8,09 persen, menjadi Rp7,32 triliun. Penyaluran kredit PT BPD Bengkulu juga mengalami peningkatan sebesar Rp376 miliar atau 6,02 persen, mencapai Rp6,2 triliun, dalam upaya mendukung pengembangan UMKM di Provinsi Bengkulu, PT. Bank Bengkulu yang mana merupakan Bank Milik Daerah , telah bekerjasama dengan PT Bank Jabar Banten dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) untuk memperkuat permodalan UMKM.

4. Membaiknya kondisi ketenagakerjaaan dan kesejahteraan

Pada triwulan IV 2022, kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu melanjutkan perbaikan. Hal ini tercermin dari Nilai Tukar Petani yang berada pada tren membaik dan kemiskinan yang menurun sejalan dengan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Sementara, pada Agustus 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bengkulu mengalami penurunan menjadi 0,31 % dibandingkan Agustus 2023.

Nilai Tukar Petani (NTP) melanjutkan tren perbaikan. Nilai tukar petani (NTP) pada triwulan IV 2024 melanjutkan tren peningkatan sejak tahun 2023. NTP rata-rata Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2024 sebesar 202,65 atau naik 0,73 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Peningkatan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 1,39 persen, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) naik lebih rendah sebesar 0,66 persen. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Provinsi Bengkulu Desember 2024 sebesar 202,10 atau naik 1,32 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya.

Tren perbaikan aktivitas ekonomi yang berlanjut mendorong penurunan angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data BPS pada periode September 2024, persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 14,34%, atau menurun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar 14,43%. 12,52 % (261.15 ribu orang), berkurang sebesar 1,04 persen poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2024 yang sebesar 13,56 % (281.36 ribu orang) dan berkurang sebesar 1,52 persen poin di bandingkan dengan kondisi maret 2023 yang sebesar 14,04 % (288,46 ribu orang), namun walaupun demikian, Provinsi Bengkulu urutan ke 7 dari 10 Provinsi termiskin di Indonesia dengan perbadingan penurunan angka kemiskianan dari 8,57 ke 12,52 per september 2024 atau 3,95 point dibawah capaian angka kemsikinan nasional.

Berdasarkan data dari BPS, berikut pengeluaran perkapita10 Kabupaten Kota di Provinsi Bengkulu salama 3 tahun terakhir :

Tabel 6.3.1

Pengeluaran perkapita kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2022-2024

Wilayah	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)		
	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	10.840	11.172	11.733
Bengkulu Selatan	10.318	10.657	11.040
Rejang Lebong	10.547	10.848	11.385
Bengkulu Utara	10.774	11.188	11.715
Kaur	9.009	9.365	9.742
Seluma	8.657	8.949	9.474
Mukomuko	10.747	11.075	11.665
Lebong	11.644	12.012	12.362
Kepahiang	9.708	10.044	10.620
Bengkulu Tengah	9.697	10.114	10.672
Kota Bengkulu	14.503	14.924	15.542

Sumber data: BPS

Jika dilihat dari table di atas, tren peningkatan pengeluaran perkapita diikuti juga oleh Kabupaten/Kota di provinsi Bengkulu, dengan tingkat pengeluaran perkapita tertinggi pada tahun 2024 adalah Kota Bengkulu yaitu 15.542 Juta.

Angka Kemiskinan

Potret penduduk miskin di RI (Foto: Andhika Prasetia)

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak- hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan juga digambarkan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Secara umum kemiskinan dimaknai dengan penduduk yang berada di bawah suatu batas atau satu keadaan dimana seseorang kekurangan bahan-bahan keperluan hidup.

Isu kemiskinan masih menjadi isu serius yang harus ditangani oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun di daerah. Oleh karenanya, dalam setiap visi misipemerintah selalu mengutamakan tentang penanganan kemiskinan demi meningatkan tarap hidup masyarakat. Pada saat berakhirnya RPJMN tahun 2020-2024, pemerintah pusat sudah menargetkan tingkat kemiskinan secara nasional turun menjadi 6,0 - 7,0%, sedangkan pada tahun 2024 target tingkat kemiskinan secara nasional ditetapkan sebesar 8,57%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik September 2024 bahwa angka kemiskinan secara nasional sebesar 8,57 persen menurun 0,46% poin

terhadap Maret 2024 dan menurun 0,79% poin terhadap Maret 2023, Berikut tren penurunan angka kemiskinan di indonesia dari tahun 2013 -2024 :

Grafik 6.3.2
Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, September 2013 s.d September 2024

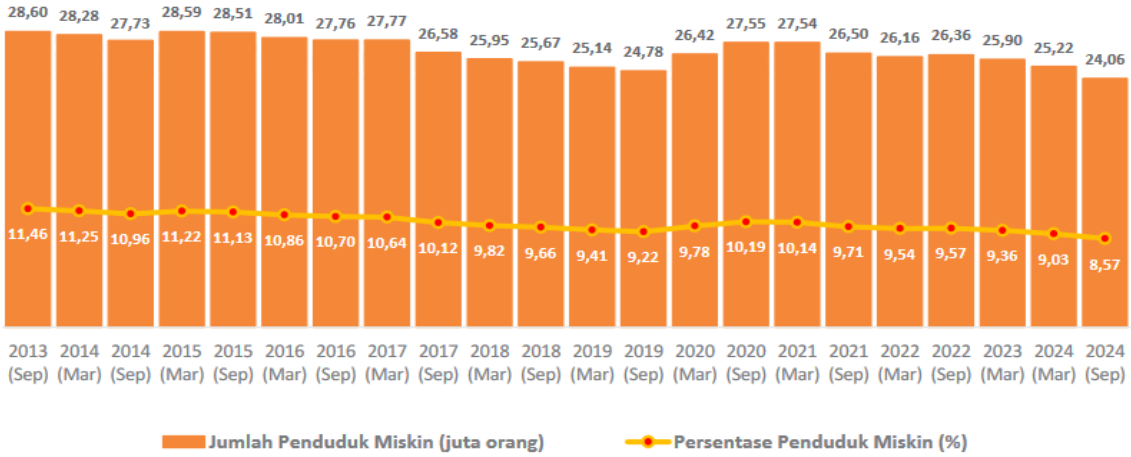

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2013–September 2024

Di Provinsi Bengkulu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) pada september 2024 adalah 12,52 % (261.15 ribu orang), berkurang sebesar 1,04 persen poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2024 yang sebesar 13,56 % (281.36 ribu orang) dan berkurang sebesar 1,52 persen poin di bandingkan dengan kondisi maret 2023 yang sebesar 14,04 % (288,46 ribu orang). Jika dilihat kembali pada penyelarasan target RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2021-2026 target tingkat kemiskinan tahun 2024 adalah 13,50% – 13,90%, bahwa pencapaian tingkat kemiskinan pada tahun 2024 sebesar 12,52% (92,74%) merupakan sebuah keberhasilan dari RPJMD, hal ini ditunjukkan dengan menurunnya angka kemiskinan 1.52 % Poin dibandingkan tahun 2023.

Namun walaupun demikian, Provinsi Bengkulu urutan ke 7 dari 10 Provinsi termiskin di Indonesia dengan perbadingan penurunan angka

kemiskianan dari 8,57 ke 12,52 per september 2024 atau 3,95 point dibawah capaian angka kemsikinan nasional.

Selanjutnya dari jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu pada september 2024 mencapai 261,15 ribu orang. Dibandingkan maret 2024, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 20,2 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2023, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 27,31 ribu orang, sehingga Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 12,52 %.

Secara umum selama 5 tahun terakhir tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu cenderung menurun, dari sisi jumlah penduduk maupun persentase, pengecualian pada Maret 2020 s.d Maret 2021 dan Maret 2022 terjadi kenaikan persentase penduduk miskin dipicu oleh mewabahnya virus covid-19 yang mengakibatkan lumpuhnya roda perekonomian secara lokal maupun nasional. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2018 sampai dengan Maret 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 6.3.3

Persentase Angka Kemiskinan di Provinsi Bengkulu, Maret 2013 – September 2024

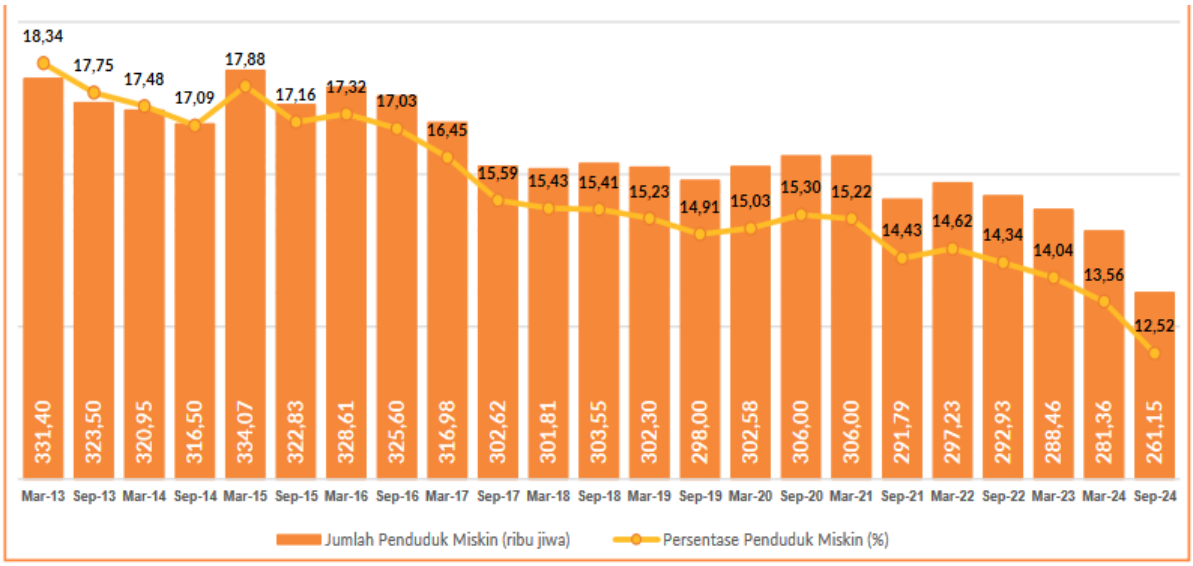

Sumber data: Badan Pusat Statistik

Jika dilihat dari daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2024 - September 2024, jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu yang tinggal diperkotaan berkurang sekitar 8 ribu orang, sedangkan di daerah perdesaan turun sekitar 12,3 ribu orang. Persentase kemiskinan di daerah perkotaan turun dari 13,56 % menjadi 12,52 %. Sementara itu, di perdesaan turun dari 13,56 % menjadi 12,63 %.

Berikut grafik garis kemsikinan yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu berdasarkan tahun 2024:

Grafik 6.3.4

POTRET KEMISKINAN WILAYAH PROVINSI BENGKULU

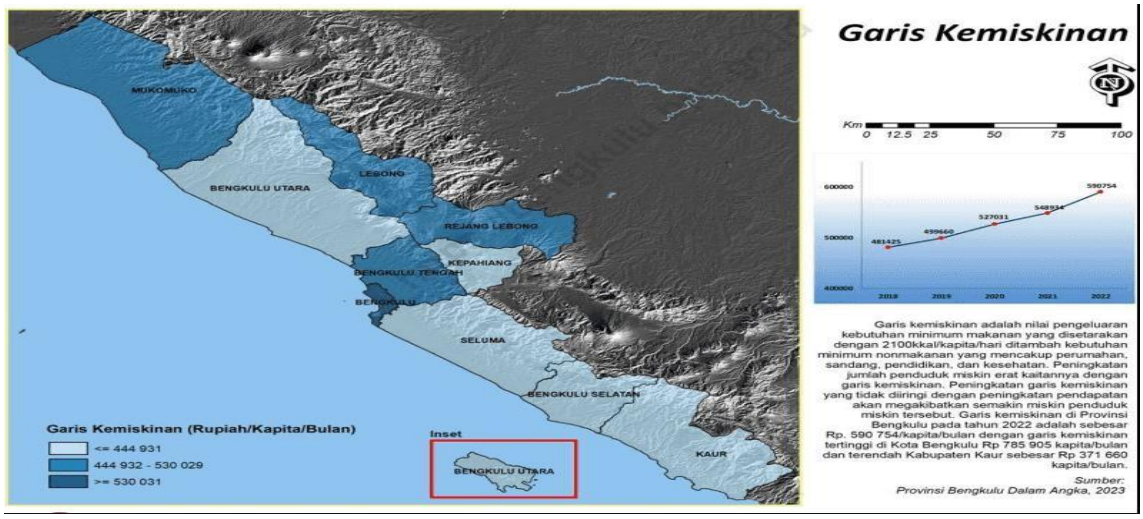

Untuk mengurangi Angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu, Dinas Sosial berupaya meningkatkan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) / masyarakat miskin dengan sasaran pada eselon II-nya adalah sebagai berikut :

III. Meningkatnya penanganan Permasalahan sosial.
IV. Meningkatnya kapasitas PSKS dan lembaga kesejahteraan sosial

III. Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial

Pada Sasaran meningkatnya penanganan permasalahan sosial diukur dengan indikator Persentase Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 76,5 % dengan realisasi sebesar 81,6 % atau capaian sebesar 106,6 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian persentase

PMKS yang tertangani sudah mencapai target. Untuk mendukung ketercapaian persentase PMKS yang tertangani diukur dari pelaksanaan 3 program yaitu :

1. Program Rehabilitasi Sosial, terdiri dari kegiatan:

- Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti, Pada kegiatan ini pelaksanaan yang dilaksanakan penyediaan permakanan dimana semula melalui APBD dengan target 37 orang, melalui Intensif Fiskal target 100 orang.
- Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar didalam panti, Pada kegiatan ini Dinas Sosial Provinsi Bengkulu melalui UPTD PSBR melakukan rehabilitasi anak terlantar sebanyak 20 orang ,selain itu Dinas Sosial melakukan monitoring dan pendampingan kepada 31 lembaga/LKSA milik masyarakat yang berada pada wewenang provinsi.
- Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar didalam panti kegiatan ini dilaksanakan pada UPTD PSTW Dinas Sosial Provinsi Bengkulu sebanyak 70 orang

2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari kegiatan :

- Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi, Program ini melakukan verifikasi data dan pemantauan penyaluran bantuan sosial, pada kegiatan ini juga dilaksanakan pengadaan alat bantu kesehatan bagi penyandang disabilitas yang tidak mampu target 100 orang/unit dengan realisasi 131 orang/unit.
- Program Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), kegiatan ini memberikan Kartu Bengkulu Sejahtera (KBS) dimana bantuan yang diberikan berupa uang yang direncankan kepada masyarakat miskin diluar penerima bantuan regular seperti bantuan PKH dan BPNT. Bantuan uang yang diberikan dengan target 1500 KPM/keluarga di 10 Kab/kota provinsi Bengkulu dengan besaran Rp.100,000 / bln selama 1 (satu) tahun dan 1000 KPM / Keluarga selama 4 bulan terhitung sejak November hingga Desember melalui dana Intensif Fiskal melalui Bank penyalur yaitu Bank Bengkulu. Dinas Soial Provinsi Bengkulu telah 100 % melaksanakan penyaluran bantuan KBS, akan tetapi berdasarkan triwulan terakhir

sebanyak 1.361 KPM / Keluarga yang melakukan pencairan / penarikan di Bank penyalur dan 819 KPM/keluarga melalui dana Intensif Fiskal yang melakukan pencairan/penarikan

- Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kegiatan ini memberikan bantuan pangan yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e warong yang telah bekerjasama dengan Bank yang ditunjuk, dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.

3. Program penanganan Bencana, terdiri dari kegiatan:

- Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi, Pada kegiatan ini Dinas Sosial Provinsi telah melakukan Penanganan bencana baik alam maupun sosial sebesar 100 % melalui pemberian bantuan bahan bangunan bagi korban bencana alam / kebakaran sebanyak 23 orang, Dinas Sosial Provinsi melalui Bidang Penanganan Bencana melaksanakan kebijakan teknis perlidungan sosial korban bencana alam dan sosial serta jaminan sosial keluarga. Bidang Penaganan Bencana menangani beberapa jenis PPKS diantaranya yaitu korban bencana alam , korban bencana sosial dan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan keluarga miskin.

Dalam melaksanakan upaya diatas, dinas sosial didukung dengan APBD provinsi Bengkulu tahun 2024 sebesar RP. 7.030.089.600 dengan realisasi Rp. 6.034.758.591 atau 85,84%.

IV. Meningkatnya Kapasitas PSKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial

Pada Sasaran meningkatnya kapasitas PSKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dengan indikator persentase Persentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggraaan kesejahteraan sosial dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 57 % dengan realisasi sebesar 59,97 % atau capaian sebesar 105,2%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian persentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tercapai melampaui target.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi PSKS tidak terlepas dari peran serta dari ketersediaan potensi sumber daya kesejahteraan sosial (PSKS) sebagai berikut:

Tabel 6.3.2

POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA YANG DIBERDAYAKAN

NO	Jenis PSKS	Jumlah PSKS	Jumlah PSKS yang diberdayakan
1	TKSK	129	129
2	LK3	15	15
3	SLRT	40	40
4	Karang Taruna	1.514	600
5	LKS	56	56
6	Pendamping PKH	465	465
7	Tagana	425	425
8	SAKTI PEKSOS	23	23
9	PSM	1227	500
Total		**3.894**	**2.252**

Tercapainya sasaran strategis PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial ini tidak terlepas dari adanya pembinaan / pelatihan / sosialisasi / pengawasan. Berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh dinas Sosial:

1. Melakukan peningkatan kapasitas potensi terhadap 50 orang pekerja sosial masyarakat kewenangan provinsi
2. Melakukan peningkatan potensi terhadap 128 orang tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan provinsi yang meningkat kapasitasnya.
3. Melakukan peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi terhadap 40 lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan provinsi.

Partisipasi aktif PSKS ini dukungan pembiayaan anggaran, sarana prasarana dan peningkatan kompetensi SDM melalui Dinas Sosial Provinsi yang bersumber pada APBD Provinsi Bengkulu melalui kegiatan-kegiatan: penyelenggaraan bantuan sosial program keluarga harapan dan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi dengan total pagu sebesar RP. 493.800.000 dengan realisasi RP. 482.186.000 atau 97,64%.

Dalam pencapaian kinerja terdapat beberapa permasalahan antara lain :

1. Adanya Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat,Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial
   menyebabkan belum semua PPKS dapat terlayani, karena kewenangan Provinsi untuk pelayanan dan rehabilitasi PPKS didalam Panti masih belum maksimal disebabkan kurangnya komitmen dan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi.
2. Kewenangan Pemerintah Provinsi untuk Pemenuhan SPM bidang Sosial yaitu memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk PPKS didalam Panti, karena kurangnya SDM dan sarana prasarana panti sosial menyebabkan pelaksanaan kegiatan belum maksimal.
3. Kurangnya data awal klayan yang masuk ke dalam panti dikarenakan klayan yang masuk tidak membawa berkas/data yang lengkap
4. Terhambatnya dalam melakukan rujukan lanjutan untuk pemeriksaan lanjutan klayan karena tidak memiliki BPJS dan akses internet serta sarana pendukung dalam penggunaan aplikasi mobile JKN
5. Belum adanya MOU dengan Pelayanan Rujukan seperti BPJS, Rumah Sakit M. Yunus, RSJKO dan Pelayanan Rujukan lanjutan lainnya
6. Tidak dianggarkannya dana insentif bagi pendamping PKH sebagai petugas pendataan kelayakan calon penerima bantuan sosial.
7. Kurangnya dukungan anggaran untuk operasional validasi dan monitoring KPM
8. Akurasi dan validasi data DTKS belum maksimal
9. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan
10. Tidak dianggarkannya dana insentif bagi pendamping PKH sebagai petugas pendataan kelayakan calon penerima bantuan sosial.

11. Kurangnya dukungan anggaran untuk operasional validasi dan monitoring KPM
12. Akurasi dan validasi data DTKS belum maksimal
13. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan
14. Terbatasnya bufferstock bencana yang tersedia di gudang bencana dinas Sosial Provinsi Bengkulu
15. Masih terbatasnya relawan bencana yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan dukungan psikososial
16. Terbatasnya fasilitast empat penampungan pengungsi sehingga masih belum memenuhi standar dalam penanganan pengungsi
17. Masih Terbatasnya Jumlah Penyediaan Permakanan bagi masyarakat yang terampak bencana baik itu Bencana Alam mau Bencana Sosial

Ada beberapa rekomendasi dalam upaya penurunan angka kemiskinan, yaitu:

4. Diperlukan sarana dan prasarana dibidang rehabilitasi sosial seperti adanya ruangan konseling yang mendukung sehingga klien merasa nyaman dan aman saat berkonsultasi atau bimbingan
5. Diperlukannya pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM
6. Diperlukan komitmen dan integritas yang tinggi dari berbagai perubahan yang diciptakan dan dilaksanakan secara konsisten, sistematis, terencana dan berkesinambungan sehingga mampu meningkatkan kinerja kepada masyarakat.

Tuhjuan 7
Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama

No	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja			
			Tahun 2023		Tahun 2024	
			Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Indek Kerukunan Umat Beragama	74	73,3	%	73,31	99.06

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Prov Bengkulu

Pada tujuan meningkatnya Kerukunan Umat Beragama merupakan sasaran baru pada perjanjian kinerja kepala daerah. untuk mengukur pencapaian tujuan ini adalah dilihat dari persentase penyelesaian konflik antar umat beragama.

1. Perbandingan target dan realisasi indikator **Indek Kerukunan Umat Beragama** berdasarkan penetapan target tahun 2024 adalah 74, kemudian setelah dilakukan pengukuran dengan pengolahan data kinerja capaian kinerja indikator tersebut adalah 73,31, sehingga capaian kinerja pada indikator tersebut 99,06 %.
2. Pebandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan capaian tahun 2024, bahwa capaian tahun 2023 adalah 73,11 % dan capaian tahun 2024 adalah 73,31 %, maka capaian indikator persentase Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama yang ditindaklanjuti tahun 2023 dan 2024 mengalami sedikit kenaikan yaitu 0,2.
3. Capaian kinerja indikator **Indek Kerukunan Umat Beragama** tahun 2024 berdasarkan RPJMD adalah sebesar 74 % bahwa berdasarkan pengukuran kinerja tahun 2024 adalah 73,31, maka capaian RPJMD dan capaian penetapan kinerja tahun 2024 telah tercapai 99,06.

Sasaran 7
Meningkatnya Toleransi Umat Beragama

No	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja			
			Tahun 2023		Tahun 2024	
			Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Persentase Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama	100%	100	%	100	%

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Prov Bengkulu

Pada sasaran meningkatnya toleransi umat beragama merupakan sasaran baru pada perjanjian kinerja kepala daerah. untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah dilihat dari persentase penyelesaian konflik antar umat beragama.

1. Perbandingan target dan realisasi indikator Persentase Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama yang ditindaklanjuti berdasarkan penetapan target tahun 2024 adalah 100%, kemudian setelah dilakukan pengukuran dengan pengolahan data kinerja capaian kinerja indikator tersebut adalah 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator tersebut 100%.
2. Pebandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan capaian tahun 2024, bahwa capaian tahun 2023 adalah 100% dan capaian tahun 2024 adalah 100%, maka capaian indikator persentase Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama yang ditindaklanjuti tahun 2023 dan 2024 mengalami konsistensi.
3. Capaian kinerja indikator persentase Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama yang ditindaklanjuti tahun 2024 berdasarkan RPJMD adalah sebesar 100% bahwa berdasarkan pengukuran kinerja tahun 2024 adalah 100%, maka capaian RPJMD dan capaian penetapan kinerja tahun 2024 telah tercapai.

4. Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap indikator persentase Penyelesaian Konflk Antar Umat Beragama yang ditindaklanjuti telah tercapai dengan anggaran pagu 211.006.788.776 dan realisasi 210.195.684.399 sehingga terjadi efisiensi sebesar 99.62%.
5. Program atau kegiatan yang mendukung indikator persentase Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama yang ditindaklanjuti yang menunjang

Persentase Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama kinerja

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tetapi dikenal sebagai bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Kemajemukan (pluralisme) agama di Indonesia telah berlangsung lama dan lebih dahulu dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.

Mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa agama yang dianut masyarakat di Indonesia adalah agama islam (agama yang mayoritas di Indonesia), kristen, katolik, hindu, budha, konghucu dan Agama lainnya yang hidup diyakini masyarakat diwilayah tertentu.

Selanjutnya dalam kehidupan dimasyarakat seringkali terjadi konflik antar umat beragama. Konflik keagamaan didefinsikan sebagai satu perseteruan maupun pertikaian berkaitan dengan aksi damai maupun kekerasan fisik yang berkaitan dengan nilai, klaim, dan identitas yang melibatkan isu, slogan maupun ungkapan keagamaan.

Pada tahun 2024 Provinsi Bengkulu telah menetapkan sasaran Meningkatnya Toleransi Umat Beragama pada Perjanjian Kinerja Kepala Daerah yang diukur dengan indikator persentase penyelesaian konflik antar umat beragama dengan target 100% dan realisasi capaian sebesar 100%. Selanjutnya Indikator tersebut diturunkan di Perjanjian Kinerja (PK) eselon II pada kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu pada sasaran program 1 (satu) yaitu meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan dengan indikator

persentase konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM yang ditangani. Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada sasaran meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan Bangsa yaitu 69%, dan Tingkat capaian dari target sasaran yang ditetapkan yaitu sebesar 100% atau meningkat 1% dari tahun sebelumnya (68%) menjadi 69%, Persentase konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum dan HAM Yang ditangani adalah angka yang menunjukan kemampuan daerah dalam menyelesaikan permasalahan stabilitas kesatuan bangsa.

Situasi dan kondisi keadaan keamanan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 cukup kondusif, akan tetapi kita harus tetap waspada akan berbagai kemungkinan konflik ataupun gangguan keamanan dan kenyamanan dimasyarakat, dalam upaya peningkatan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial, diantaranya :

1. Kegiatan Forkopimda Provinsi Bengkulu.
2. Sosialisasi dan Pendalaman Materi Agen Pengawasan Dini (Wasdin) Kab/Kota.
3. Kegiatan Kewaspadaan Dini Bersama Pelajar SLTA / Sederajat.
4. Fasilitasi Kegiatan Instansi Vertikal.
5. Kegiatan Kewaspadaan menjelang Pemilu Bersama ORMAS.
6. FGD Model Pentahelix dalam menghadapi AncamaN Non Militer di kawasan Wisata Pesisir se Provinsi Bengkulu.
7. Perjalanan Dinas Bersama Tim Kewaspadaan Dini dan Instansi Vertikal.
8. Rapat bersama Tim Kominda Provinsi Bengkulu.

Keadaan kerawanan konflik disuatu daerah secara lengkap dapat dilihat atau terpetakan secara rinci pada peta Rawan Konflik, penyusunan peta tersebut belum dapat dilaksanakan karena memerlukan data yang lengkap dan keterlibatan banyak personil serta dana yang cukup.

Tujuan 8
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan Anak

No	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja			
			Tahun 2023		Tahun 2024	
			Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Indeks Pemberdayaan Gender	71.5	70,13	--	70,06	97,98
2.	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak	2,25	--		2,7	108

Sumber : DP3A&PPKB

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sasaran meningkatnya Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan anak didukung oleh 2 Indikator sasaran sasaran berikut :

1. Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki- laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Sedangkan kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi terhadap laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-

laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 bahwa indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berubah menjadi indikator Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender dengan target 0,05. Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender selanjutnya diturunkan pada perjanjian kinerja eselon 2 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan sasaran meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak dengan indikator indeks pemberdayaan gender (IDG) Berdasarkan Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2022 adalah 70,13 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2023 adalah 70,06 msehingga peningkatan IDG dari tahun 2022 ke tahun 2023 adalah -0,07. Selanjutnya peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2024 belum dapat di ketahui dikarenakan realisasi IDG tahun 2024 diperkirakan rilis oleh BPS pada bulan oktober tahun 2025.

Mengingat bahwa upaya pemberdayaan gender merupakan kebijakan nasional sehingga dengan konsisten pemerintah daerah pun berusaha meningkatkan indeks pemberdayaan Perempuan dengan pengarusutamaan gender terutama memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dalam pelaksanaan pembangunan. untuk menunjukan keterlibatan perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, Dinas DP3AKB Provinsi Bengkulu melakukan pengukuran pencapaian terhadap 3 indikator sasaran berikut :

1. Persentase keterwakilan Perempuan di bidang Politik; dengan target pada tahun 2024 yaitu sebesar 53,13 % dengan realisasi masih menunggu hasil rilis dari BPS sehingga pembanding sementara masih memakai capaian pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 15,56%. Dengan program yang mendukung adalah pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi dengan keluaran terlaksananya Sosialisasi sekolah

perempuan dengan tujuan Peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik yang terdiri dari anggota legeslatif provinsi dan kabupate/kota, Perempuan pengurus partai politik dan organisasi-organisasi perempuan.

2. Persentase keterwakilan perempuan dibidang Profesional dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 53,33%, tahun 2023 sebesar 52,4% dan realisasi tahun 2024 masih menunggu hasil rilis dari BPS sehingga pembanding sementara masih memakai capaian pada tahun 2023 yaitu sebesar 52,4%. Pada indikator ini program yang didukung oleh kegiatan mendukung peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi yang keluaranya sosialisasi pembentukan kepribadian yang terdiri dari perwakilan dari organisasi-organisasi perempuan yang ada di provinsi Bengkulu, Perangkat daerah terkait dan SDM DP3A&KB.
3. Persentase sumbangan pendapatan perempuan; dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 35,26%, tahun 2023 sebesar 34,92%, dan realisasi tahun 2024 masih menunggu hasil rilis dari BPS sehingga pembanding sementara masih memakai capaian pada tahun 2023 yaitu sebesar 34,92%, Untuk mendukung indikator ini adalah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi dengan keluaran pemberdayaan perempuan meningkatan ekonomi kreatif melalui pembuatan produk pangan berbasis potensi lokal yang terdiri dari pelaku UMKM yang ada di provinsi Bengkulu.

Selanjutnya ada beberapa faktor penghambat dalam pencapaian target peningkatan indeks pemberdayaan gender adalah

1. Terbatasnya jumlah perempuan di lembaga legislatif merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang lebih memihak kepada perempuan
2. Kuallitas perempuan dan kepercayaan diri untuk berpartisipasi di dunia politik kurang sehingga perlunya dilaksanakannya bimbingan teknis terhadap perempuan tentang pentingnya partisipasi perempuan di dunia politik

3. Rilis data tentang indeks pemberdayaan perempuan Rilis antara Bulan April – Oktober sehingga analisa terhadap peningkatan indeks pemberdayaan gender belum bisa diketahui.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya peningkatan indeks pemberdayaan gender didukung oleh pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui dana APBD sebesar RP. 1.510.000.000 dengan realisasi RP. 1.495.139.664 atau 99%.

2. Persentase Penanganan Pengaduan KasusKekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak ini merupakan masalah yang sangat serius dan harus diatasi oleh semua Negara. Komitmen dunia untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bahkan secara langsung dituangkan dalam beberapa target secara khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan ditunjang oleh target-target lain yang secara tidak langsung mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 menetapkan target Capaian pada indikator Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak adalah 97,5% dengan realisasi 100 % artinya pencapaian persentase penanganan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2024 tercapai 100%.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu yang masuk dan ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 dengan total 370 kasus, kemudian Tahun 2024 turun menjadi 271 kasus.

Grafik 8.1

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

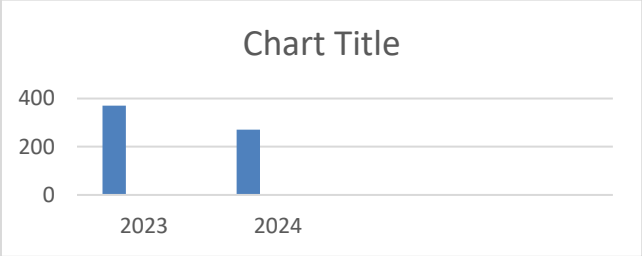

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu yang masuk dan ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Bengkulu dua tahun terakhir mengalami penurunan dari Tahun 2023 dengan total 370 kasus, kemudian Tahun 2024 dengan total kasus 271 kasus. Hal ini menjadi pencapaian bahwa kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak mengalami Penurunan. Dalam pelaksanaan tugas sejak berdirinya UPTD PPA Provinsi Bengkulu pada tahun 2018, UPTD PPA Provinsi Bengkulu telah memberikan layanan pada penanganan kasus berupa penerimaan pengaduan, penjangkauan dan pendampingan, konseling, mediasi serta koordinasi kepada pihak terkait. Berdasarkan data yang dikelola oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada Tahun 2024 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah masuk dan ditangani di Provinsi Bengkulu adalah berjumlah 271 kasus dengan rincian kekerasan terhadap perempuan berjumlah 93 kasus dan kekerasan terhadap anak berjumlah 178 kasus. Hal ini tergambar pada grafik berikut ;

Grafik 8.2

Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Anak

Berdasarkan Kabupaten dan Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2024

Simfoni PPA, 2024

Ada banyak faktor yang menjadi pendukung dalam peningkatan kinerja UPTD PPA Provinsi Bengkulu dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak :

1. Koordinasi lintas sektor yang berjalan dengan baik
2. Sudah adanya inovasi Rumah Konseling Amanah Rafflesia sebagai wadah awal rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban
3. Sudah adanya regulasi Peraturan Gubernur tentang layanan rujukan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu sebagai standar prosedur pelayanan
4. Sudah adanya Satgas PPA
5. Mediasi kasus yang berjalan baik dengan tersedianya mediator yang telah terlatih

Namun pada pelaksanaan tugas dan fungsinya juga terdapat beberapa hambatan yang dialami antara lain :

1. Masih kurangnya jumlah relawan
2. Belum adanya Rumah Aman atau Tempat Penampungan Sementara Korban
3. Jumlah SDM yang masih kurang dan belum adanya tenaga professional konselor

Rekomendasi Evaluasi :

1. Penguatan fungsi kelembagaan UPTD PPA se-Provinsi Bengkulu dengan mendorong pembentukan UPTD PPA Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu
2. Penguatan koordinasi antar lembaga layanan melalui MOU
3. Pembuatan Rumah Aman atau Tempat Penampungan Sementara korban
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sebagai pelaksana layanan, konselor dan mediator dalam penangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Adapun program-program yang menunjang tercapainya tujuan, sasaran dan realisasi sasaran tersebut adalah:

1. Program Perlindungan Perempuan
   - Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
   - Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas

daerah kabupaten/kota

- Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi

2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
   - Kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak
3. Program Pemenuhan Hak Anak
   - Kegiatan Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan provinsi
4. Program Perlindungan Khusus Anak
   - Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota

Untuk mencapai Sasaran "menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan diruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat, kondisi khusus, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Bengkulu pada Tahun 2024 dengan bekerjasama secara berjejaring dengan perwakilan BKKBN Bengkulu.

<u>Rekomendasi Evaluasi:</u>

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu ancaman global terhadap kemanusiaan, dan telah menjadi isu gender yang cukup sentral yang mengharuskan kita untuk mengatasi dan meminimalisir perkembangannya. Beberapa langkah strategis yang penting untuk dilakukan dalam meningkatkan kinerja pemerintah dalam hal mewujudkan meningkatnya layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak yaitu antara lain :

1. Perlu adanya MOU antara pemerintah provinsi dengan OJK dalam bentuk dana-dana CSR pendukung kegiatan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan serta untuk melakukan penguatan dan penambahan intensitas penyuluhan-penyuluhan serta kampanye anti kekerasan terhadap perempuan sehingga diharapkan terwujud peningkatan kualitas hidup perempuan dan pemahaman masyarakat untuk memperlakukan kaum perempuan dan anak dengan baik dan layak.

2. Perlu adanya MOU antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dan institusi pendidikan tentang program pencegahan kekerasan terhadap perempuan sehingga bisa bekerja sama untuk turut mensosialisasikan dan memberikan penguatan materi tentang perlindungan perempuan dan anak serta melakukan penguatan secara fundamental terhadap pendidikan budi pekerti, karakter dan akhlak mulia di lingkungan akademik dan masyarakat.
3. Perlu adanya MOU antar pemerintah provinsi dengan FKPD untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan, serta memberikan pemahaman untuk senantiasa bertindak wajar dan saling menghargai di dalam lingkungan masyarakat.

Indikator utama dalam capaian Pemenuhan hak anak dan perlindungan anak adalah pemenuhan hak sipil anak karena merupakan hak dasar anak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang secara optimal dan adanya pengakuan negara atas keberadaan anak yang terdokumenkan di dalam akte kelahiran.

Indikator kedua dalam pemenuhan hak anak adalah capaian kota/kabupaten Layak anak karena keberhasilan upaya pemenuhan hak anak tergambar dalam perwujudan kota/ kabupaten layak anak di mana untuk perwujudan kabupaten / kota layak anak ini di perlukan dukungan komitmen penuh dari kepala daerah dan perangkat daerah lainya. Serta terpenuhinya unsur – unsur indikator KLA yang di perlukan. Antara lain:

1. Terselenggaranya sekolah yang ramah Anak
2. Tersedianya puskesmas dengan pelayanan ramah anak
3. Terlaksananya perlindungan bagi anak dalam situasi khusus yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam kondisi bencana serta yang membutuhkan pengasuhan yang khusus (anak berkebutuhan khusus)

Kendala yang di hadapi:

1. Kurangnya komitmen kebijakan dari kepala daerah kabupaten
2. Kurangnya Informasi tentang konfersi hak anak yang merupakan landasan pokok dari pelaksanaan Perwujuddan kabupaten/kota layak anak.

bagi SDM penyedia ataupun SDM pelaksana pelayanan yang ramah anak di seluruh Kabupaten/ Kota namun di samping adanya kendala yang tersebut di atas, ada faktor faktor pendukung yang dapat di jadikan kekuatan bagi kami dalam pelaksanaan tugas ini yaitu:

1. Ada forum anak daerah Provinsi Bengkulu, di bawah binaan DP3APPKB Provinsi yang banyak membantu bidang PPHPA dalam pelaksanaan unsur-unsur yang terkait dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan program kerja forum anak yang sangat menyentuh ke sasaran, terkhusus golongan anak remaja. Adapun program kerja forum anak itu sangat menjalankan fungsi mereka sebagai 2P (Pelapor dan Pelopor) dengan program kerja yang inovatif.
2. Tahun 2025 nanti, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran situasi kabupaten/kota dalam persiapan evaluasi kota layak anak untuk di laksanakan setiap tahun. Dengan harapan untuk tahun 2025 dapat mencapai target sasaran.
3. Adapun kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai unsur untuk mendukung indikator evaluasi KLA ini adalah:
   a. Advokasi ke kepala daerah
   b. Rakor gugus tugas KLA kabupaten / Kota
   c. Pelatihan – pelatihan tentang konvensi hak anak atas sebagai landasan untuk melaksanakan kegiatan pendukung bagi SDM pelaksana/ penyelenggara yaitu: pelaksana SRA, DRA, Pengasuhan di LPKA, Pengasuhan di Sekolah luar Biasa.

Kami menyadari bahwa perwujudan Kabupaten/Kota layak Anak ini bukanlah pekerjaan yang gampang/kecil. Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan kebijakan komitmen dari seluruh unsur pemerintah, non pemerintah lembaga/organisasi dan juga masyarakat luas.

Dalam pelaksanaan Penanganan Pengaduan Kasus KekerasanTerhadap Perempuan dan Anak pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan program yang mendukung adalah Program perlindungan perempuan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi Bengkulu dan lintas daerah kabupaten/kota keluarannya adalah
   a) Publikasi dalam bentuk kampanye di media lokal dan baliho tentang penecegahan kekerasan terhadap perempuan.
   b) Kampanye dalam bentuk menyembaran leaflet dan bannerke kabupaten/kota.
   c) Bimbingan teknis tentang pencegahan terhadap perempuan yng diikuti oleh satpas PPA kabupaten Kota
2. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota dilakukan sepanjang tahun 2024
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi
4. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota yang keluarannya adalah
   a) Melakukan sosialisasi HIPORSI (gerakan lanang peduli tino) pecegahan kekerasan terhadap perempuan yang pesertanya semua laki-laki yang berasal dari kabupaten/kota dan lembaga terkait
   b) Sosialisasi partisipasi organisasi perempuan dalam pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari organisasi perempuan dan perangkat daerah terkait.
   c) Himpunan dan koordinasi kebijakan pecegahan terhadap perempuan di kabupaten/Kota
5. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota yang keluarannya adalah:
   a) Melaksanakan rapat teknis internal, bedah kasus ataupun mediasi terkait kasus pelaporan pengaduan pada UPTD PPA Provinsi Bengkulu
   b) Melaksanakan monitoring dan advokasi pembentukan UPTD PPA Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu dalam rangka melaksanakan

amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 060/1416/OTDA tertanggal 10 Maret 2020 tentang Hal HASIL PELAKSANAAN BAB II Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 Pembentukan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak serta arahan Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 14 Januari 2022 agar seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan percepatan pembentukan UPTD PPA di daerahnya masing-masing sebagai salah satu strategi nasional dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan sebagaimana sedang menjadi perhatian presiden.

Dalam pelaksanaannya kegiatan diatas didukung anggaran melalui APBD Provinsi Bengkulu pada Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar RP. 2.129.000.000 dengan realisasi RP. 2.056.002.082 atau 96,57%.

Sasaran 8
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan Anak

No	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja			
			Tahun 2023		Tahun 2024	
			Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender	0,05	-0,07	40	-0,07	40
2.	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	97,5	92,5	100	100	102

Sumber : DP3A&PPKB

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sasaran meningkatnya Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan anak didukung oleh 2 Indikator sasaran sasaran berikut :

3. Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki- laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Sedangkan kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi terhadap laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-

laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 bahwa indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berubah menjadi indikator Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender dengan target 0,05. Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender selanjutnya diturunkan pada perjanjian kinerja eselon 2 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan sasaran meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak dengan indikator indeks pemberdayaan gender (IDG) Berdasarkan Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2022 adalah 70,13 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2023 adalah 70,06 sehingga peningkatan IDG dari tahun 2022 ke tahun 2023 adalah -0,07. Selanjutnya peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2024 belum dapat di ketahui dikarenakan realisasi IDG tahun 2024 diperkirakan rilis oleh BPS pada bulan oktober tahun 2025. Mengingat bahwa upaya pemberdayaan gender merupakan kebijakan nasional sehingga dengan konsisten pemerintah daerah pun berusaha meningkatkan indeks pemberdayaan Perempuan dengan pengarusutamaan gender terutama memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dalam pelaksanaan pembangunan. untuk menunjukan keterlibatan perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, Dinas DP3AKB Provinsi Bengkulu melakukan pengukuran pencapaian terhadap 3 indikator sasaran berikut :

1. Persentase keterwakilan Perempuan di bidang Politik; dengan target pada tahun 2024 yaitu sebesar 53,13 % dengan realisasi masih menunggu hasil rilis dari BPS sehingga pembanding sementara masih memakai capaian pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 15,56%. Dengan program yang mendukung adalah pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi dengan keluaran terlaksananya Sosialisasi sekolah perempuan dengan tujuan Peningkatan partisipasi perempuan dibidang

politik yang terdiri dari anggota legeslatif provinsi dan kabupate/kota, Perempuan pengurus partai politik dan organisasi-organisasi perempuan.

2. Persentase keterwakilan perempuan dibidang Profesional dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 53,33%, tahun 2023 sebesar 52,4% dan realisasi tahun 2024 masih menunggu hasil rilis dari BPS sehingga pembanding sementara masih memakai capaian pada tahun 2023 yaitu sebesar 52,4%. Pada indikator ini program yang didukung oleh kegiatan mendukung peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi yang keluaranya sosialisasi pembentukan kepribadian yang terdiri dari perwakilan dari organisasi-organisasi perempuan yang ada di provinsi Bengkulu, Perangkat daerah terkait dan SDM DP3A&KB.
3. Persentase sumbangan pendapatan perempuan; dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 35,26%, tahun 2023 sebesar 34,92%, dan realisasi tahun 2024 masih menunggu hasil rilis dari BPS sehingga pembanding sementara masih memakai capaian pada tahun 2023 yaitu sebesar 34,92%, Untuk mendukung indikator ini adalah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi dengan keluaran pemberdayaan perempuan meningkatan ekonomi kreatif melalui pembuatan produk pangan berbasis potensi lokal yang terdiri dari pelaku UMKM yang ada di provinsi Bengkulu.

Selanjutnya ada beberapa faktor penghambat dalam pencapaian target peningkatan indeks pemberdayaan gender adalah

1. Terbatasnya jumlah perempuan di lembaga legislatif merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang lebih memihak kepada perempuan
2. Kuallitas perempuan dan kepercayaan diri untuk berpartisipasi di dunia politik kurang sehingga perlunya dilaksanakannya bimbingan teknis terhadap perempuan tentang pentingnya partisipasi perempuan di dunia politik
3. Rilis data tentang indeks pemberdayaan perempuan Rilis antara Bulan

April – Oktober sehingga analisa terhadap peningkatan indeks pemberdayaan gender belum bisa diketahui.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya peningkatan indeks pemberdayaan gender didukung oleh pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui dana APBD sebesar RP. 1.510.000.000 dengan realisasi RP. 1.495.139.664 atau 99%.

4. Persentase Penanganan Pengaduan KasusKekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak ini merupakan masalah yang sangat serius dan harus diatasi oleh semua Negara. Komitmen dunia untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bahkan secara langsung dituangkan dalam beberapa target secara khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan ditunjang oleh target-target lain yang secara tidak langsung mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 menetapkan target Capaian pada indikator Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak adalah 97,5% dengan realisasi 100 % artinya pencapaian persentase penanganan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2024 tercapai 100%.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu yang masuk dan ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 dengan total 370 kasus, kemudian Tahun 2024 turun menjadi 271 kasus.

Grafik 8.1

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

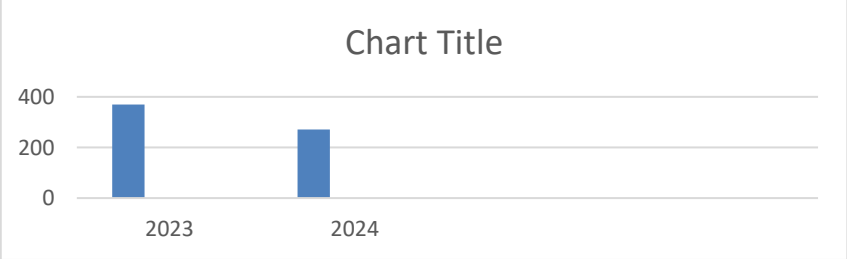

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu yang masuk dan ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Bengkulu dua tahun terakhir mengalami penurunan dari Tahun 2023 dengan total 370 kasus, kemudian Tahun 2024 dengan total kasus 271 kasus. Hal ini menjadi pencapaian bahwa kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak mengalami Penurunan. Dalam pelaksanaan tugas sejak berdirinya UPTD PPA Provinsi Bengkulu pada tahun 2018, UPTD PPA Provinsi Bengkulu telah memberikan layanan pada penanganan kasus berupa penerimaan pengaduan, penjangkauan dan pendampingan, konseling, mediasi serta koordinasi kepada pihak terkait. Berdasarkan data yang dikelola oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada Tahun 2024 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah masuk dan ditangani di Provinsi Bengkulu adalah berjumlah 271 kasus dengan rincian kekerasan terhadap perempuan berjumlah 93 kasus dan kekerasan terhadap anak berjumlah 178 kasus. Hal ini tergambar pada grafik berikut ;

Grafik 8.2

Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Anak

Berdasarkan Kabupaten dan Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2024

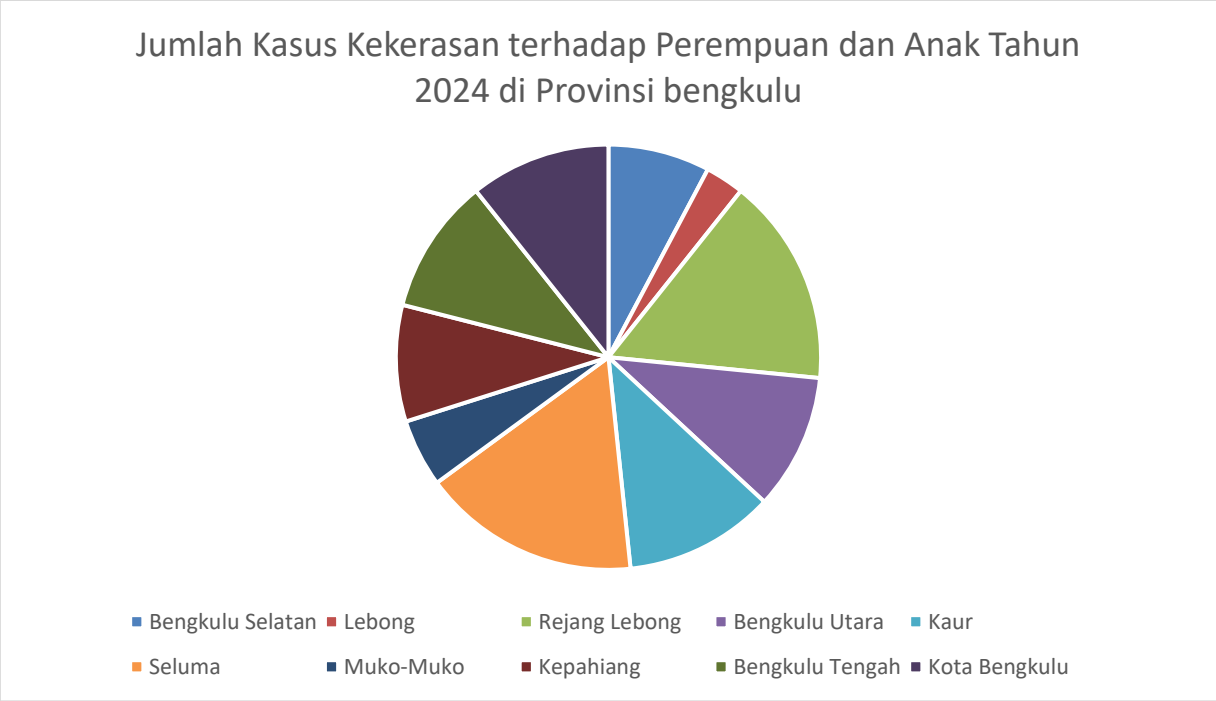

Simfoni PPA, 2024

Ada banyak faktor yang menjadi pendukung dalam peningkatan kinerja UPTD PPA Provinsi Bengkulu dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak :

1. Koordinasi lintas sektor yang berjalan dengan baik
2. Sudah adanya inovasi Rumah Konseling Amanah Rafflesia sebagai wadah awal rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban
3. Sudah adanya regulasi Peraturan Gubernur tentang layanan rujukan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu sebagai standar prosedur pelayanan
4. Sudah adanya Satgas PPA
5. Mediasi kasus yang berjalan baik dengan tersedianya mediator yang telah terlatih

Namun pada pelaksanaan tugas dan fungsinya juga terdapat beberapa hambatan yang dialami antara lain :

1. Masih kurangnya jumlah relawan
2. Belum adanya Rumah Aman atau Tempat Penampungan Sementara Korban
3. Jumlah SDM yang masih kurang dan belum adanya tenaga professional konselor

Rekomendasi Evaluasi :

1. Penguatan fungsi kelembagaan UPTD PPA se-Provinsi Bengkulu dengan mendorong pembentukan UPTD PPA Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu
2. Penguatan koordinasi antar lembaga layanan melalui MOU
3. Pembuatan Rumah Aman atau Tempat Penampungan Sementara korban
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sebagai pelaksana layanan, konselor dan mediator dalam penangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Adapun program-program yang menunjang tercapainya tujuan, sasaran dan realisasi sasaran tersebut adalah:

1. Program Perlindungan Perempuan
   - Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
   - Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota

- Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi

2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
   - Kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak
3. Program Pemenuhan Hak Anak
   - Kegiatan Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan provinsi
4. Program Perlindungan Khusus Anak
   - Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota

Untuk mencapai Sasaran "menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan diruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat, kondisi khusus, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Bengkulu pada Tahun 2024 dengan bekerjasama secara berjejaring dengan perwakilan BKKBN Bengkulu.

<u>Rekomendasi Evaluasi:</u>

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu ancaman global terhadap kemanusiaan, dan telah menjadi isu gender yang cukup sentral yang mengharuskan kita untuk mengatasi dan meminimalisir perkembangannya. Beberapa langkah strategis yang penting untuk dilakukan dalam meningkatkan kinerja pemerintah dalam hal mewujudkan meningkatnya layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak yaitu antara lain :

1. Perlu adanya MOU antara pemerintah provinsi dengan OJK dalam bentuk dana-dana CSR pendukung kegiatan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan serta untuk melakukan penguatan dan penambahan intensitas penyuluhan-penyuluhan serta kampanye anti kekerasan terhadap perempuan sehingga diharapkan terwujud peningkatan kualitas hidup perempuan dan pemahaman masyarakat untuk memperlakukan kaum perempuan dan anak dengan baik dan layak.

2. Perlu adanya MOU antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dan institusi pendidikan tentang program pencegahan kekerasan terhadap perempuan sehingga bisa bekerja sama untuk turut mensosialisasikan dan memberikan penguatan materi tentang perlindungan perempuan dan anak serta melakukan penguatan secara fundamental terhadap pendidikan budi pekerti, karakter dan akhlak mulia di lingkungan akademik dan masyarakat.
3. Perlu adanya MOU antar pemerintah provinsi dengan FKPD untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan, serta memberikan pemahaman untuk senantiasa bertindak wajar dan saling menghargai di dalam lingkungan masyarakat.

Indikator utama dalam capaian Pemenuhan hak anak dan perlindungan anak adalah pemenuhan hak sipil anak karena merupakan hak dasar anak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang secara optimal dan adanya pengakuan negara atas keberadaan anak yang terdokumenkan di dalam akte kelahiran.

Indikator kedua dalam pemenuhan hak anak adalah capaian kota/kabupaten Layak anak karena keberhasilan upaya pemenuhan hak anak tergambar dalam perwujudan kota/ kabupaten layak anak di mana untuk perwujudan kabupaten / kota layak anak ini di perlukan dukungan komitmen penuh dari kepala daerah dan perangkat daerah lainya. Serta terpenuhinya unsur – unsur indikator KLA yang di perlukan. Antara lain:

1. Terselenggaranya sekolah yang ramah Anak
2. Tersedianya puskesmas dengan pelayanan ramah anak
3. Terlaksananya perlindungan bagi anak dalam situasi khusus yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam kondisi bencana serta yang membutuhkan pengasuhan yang khusus (anak berkebutuhan khusus)

Kendala yang di hadapi:

1. Kurangnya komitmen kebijakan dari kepala daerah kabupaten
2. Kurangnya Informasi tentang konfersi hak anak yang merupakan landasan pokok dari pelaksanaan Perwujuddan kabupaten/kota layak anak.

bagi SDM penyedia ataupun SDM pelaksana pelayanan yang ramah anak di seluruh Kabupaten/ Kota namun di samping adanya kendala yang tersebut di atas, ada faktor faktor pendukung yang dapat di jadikan kekuatan bagi kami dalam pelaksanaan tugas ini yaitu:

1. Ada forum anak daerah Provinsi Bengkulu, di bawah binaan DP3APPKB Provinsi yang banyak membantu bidang PPHPA dalam pelaksanaan unsur-unsur yang terkait dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan program kerja forum anak yang sangat menyentuh ke sasaran, terkhusus golongan anak remaja. Adapun program kerja forum anak itu sangat menjalankan fungsi mereka sebagai 2P (Pelapor dan Pelopor) dengan program kerja yang inovatif.
2. Tahun 2025 nanti, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran situasi kabupaten/kota dalam persiapan evaluasi kota layak anak untuk di laksanakan setiap tahun. Dengan harapan untuk tahun 2025 dapat mencapai target sasaran.
3. Adapun kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai unsur untuk mendukung indikator evaluasi KLA ini adalah:
   a. Advokasi ke kepala daerah
   b. Rakor gugus tugas KLA kabupaten / Kota
   c. Pelatihan – pelatihan tentang konvensi hak anak atas sebagai landasan untuk melaksanakan kegiatan pendukung bagi SDM pelaksana/ penyelenggara yaitu: pelaksana SRA, DRA, Pengasuhan di LPKA, Pengasuhan di Sekolah luar Biasa.

Kami menyadari bahwa perwujudan Kabupaten/Kota layak Anak ini bukanlah pekerjaan yang gampang/kecil. Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan kebijakan komitmen dari seluruh unsur pemerintah, non pemerintah lembaga/organisasi dan juga masyarakat luas.

Dalam pelaksanaan Penanganan Pengaduan Kasus KekerasanTerhadap Perempuan dan Anak pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan program yang mendukung adalah Program perlindungan perempuan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

6. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi Bengkulu dan lintas daerah kabupaten/kota keluarannya adalah
   a) Publikasi dalam bentuk kampanye di media lokal dan baliho tentang penecegahan kekerasan terhadap perempuan.
   b) Kampanye dalam bentuk menyembaran leaflet dan bannerke kabupaten/kota.
   c) Bimbingan teknis tentang pencegahan terhadap perempuan yng diikuti oleh satpas PPA kabupaten Kota
7. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota dilakukan sepanjang tahun 2024
8. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi
9. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota yang keluarannya adalah
   a) Melakukan sosialisasi HIPORSI (gerakan lanang peduli tino) pecegahan kekerasan terhadap perempuan yang pesertanya semua laki-laki yang berasal dari kabupaten/kota dan lembaga terkait
   b) Sosialisasi partisipasi organisasi perempuan dalam pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari organisasi perempuan dan perangkat daerah terkait.
   c) Himpunan dan koordinasi kebijakan pecegahan terhadap perempuan di kabupaten/Kota
10. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota yang keluarannya adalah:
    a) Melaksanakan rapat teknis internal, bedah kasus ataupun mediasi terkait kasus pelaporan pengaduan pada UPTD PPA Provinsi Bengkulu
    b) Melaksanakan monitoring dan advokasi pembentukan UPTD PPA Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu dalam rangka melaksanakan

amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 060/1416/OTDA tertanggal 10 Maret 2020 tentang Hal HASIL PELAKSANAAN BAB II Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 Pembentukan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak serta arahan Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 14 Januari 2022 agar seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan percepatan pembentukan UPTD PPA di daerahnya masing-masing sebagai salah satu strategi nasional dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan sebagaimana sedang menjadi perhatian presiden.

Dalam pelaksanaannya kegiatan diatas didukung anggaran melalui APBD Provinsi Bengkulu pada Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar RP. 2.129.000.000 dengan realisasi RP. 2.056.002.082 atau 96,57%.

Tujuan 9
Meningkatnya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

No	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja			
			Tahun 2023		Tahun 2024	
			Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Persentase pemenuhan hak penyandang disabilitas	100%	100	100 %	100	100 %

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

Berdasarkan tabel di atas, tolak ukur pencapaian sasaran Meningkatnya pemenuhan Hak Penyadang Disabilitas dapat diukur melalui Pesentase pemenuhan hak penyandang disabilitas yang difasilitasi.

Persentase Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, Provinsi Bengkulu berinovasi untuk mengoptimalkan dalam memberikan ruang bagi penyandang disabilitas di Provinsi Bengkulu dengan menyediakan layanan-layanan yang membantu dan mempermudah penyandang disabilitas.

Pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan sasaran baru pada Perjanjian kinerja Gunernur yaitu Meningkatnya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan indikator Persentase Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang di Falisitasi dengan target 100%. Menurut data dari Dinas Sosial Provinsi Bengkulu bahwa penyadang disabilitas Provinsi Bengkulu pada saat ini berjumlah 5.306 Jiwa yang terdiri dari 2.762 Jiwa laki-laki dan 2.544 jiwa perempuan yang tersebar di seluruh wilayah provinsi Bengkulu dengan klasifikasi jumlah masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut:

Grafik 9.1
Penyandang Disabilitas berdasarkan wilayah kabupaten kota di provinsi Bengkulu

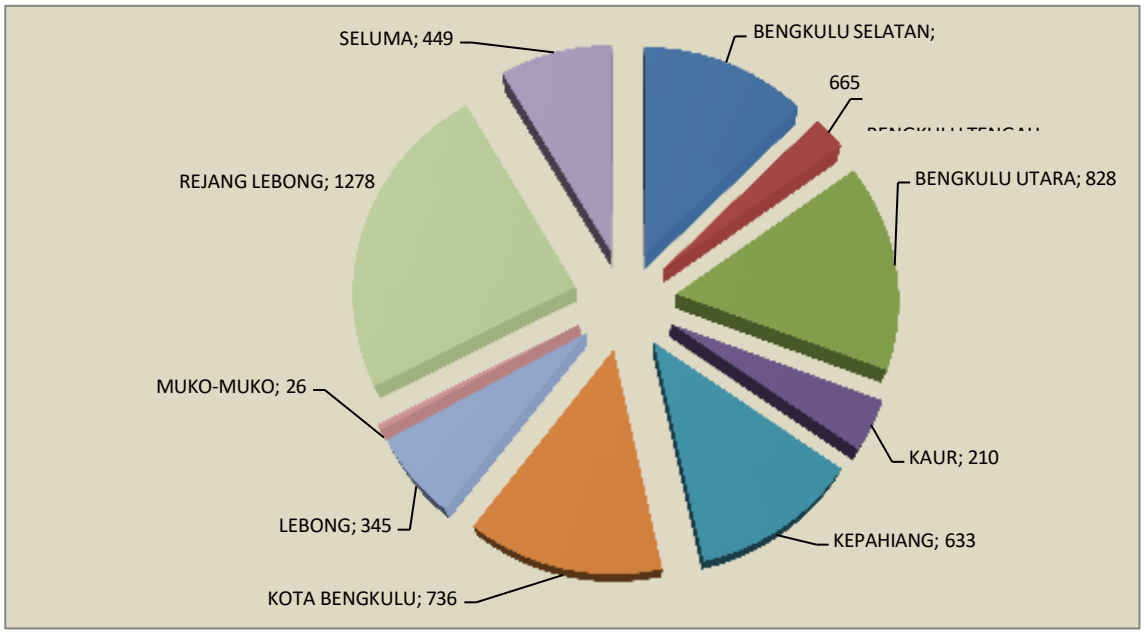

Sumber data: Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

Jika dilihat dari grafik diatas, kabupaten Rejang Lebong merupakan kabupaten yang angka disabilitas tinggi.

Pemenuhan hak terhadap penyadang disabilitas merupakan tanggung jawab masyarakat secara umum dan pemerintah secara khusus. Banyak lembaga-lembaga sosial yang dibentuk yang sudah mempunyai komitmen serta kesadaran yang tinggi dalam menyediakan layanan terhadap penyandang

disabilitas, berikut ini beberapa lembaga yang sudah terdaftar di dinas sosial provinsi Bengkulu yang memfasilitasi kebutuhan penyadang disabilitas:

Table 9.1

Daftar lembaga sosial Mitra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

NO	NAMA LEMBAGA	LOKASI	KET
1.	LKS Amal Mulya	Kota Bengkulu	
2.	LKS Sehati	Bengkulu Selatan	
3.	LKS YDBKS (Yayasan Dna Bhakti Kesejahteraan Sosial)	Kota Bengkulu	
4.	LKS Pijar Kalisa	Kota Bengkulu	

Sumber data: Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

Bentuk pemenuhan kebutuhan terhadap disabilitas yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi Bengkulu adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan terhadap penyandang disabilitas dengan diberikannya kesempatan bekerja di BUMD provinsi Bengkulu. berikut daftar BUMD yang memberikan kesempatan bekerja bagi penyadang disabilitas di provinsi Bengkulu :

Table 9.2

Daftar lembaga sosial Mitra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

No	BUMD	Bidang Usaha / bagian yang pekerjaaan	Ket
1.	PT. Bank Bengkulu	Jasa Perbankan	
2.	PT. Bimex Perseroda	1. Perdagangan Umum 2. Pertanian, Perkebunan 3. Penyewahan Ruko dan Pergudangan	
3.	PT. Bengkulu Mandiri	1. Perdagangan Umum dan Advertising 2. Pertanian, Pertambangan dan Industri 3. Diserfikasi	
4.	PT. Sarana Mandiri Mukti	Perkebunan teh, pengelolaan dan pemasaran hasilnya	
5.	PT. Asurasi Bangun Askira	Jasa Asuransi	

Pada Tahun 2024 Gubernur Provinsi Bengkulu melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu membuka Unit Layanan Disabilitas (ULD), yang mana Unit Layanan Disabilitas ini memberikan bimbingan dan pelatihan kepada para disabilitas agar para disabilitas memperoleh keterampilan sehingga dapat memiliki kesempatan untuk bekerja, adapun nama-nama penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan :

Table 9.3
Daftar nama penyandang Disabilitas yang mengikuti pelatihan

No	Nama	Jenis Kelamin	Ragam Disabilitas	Pelatihan
1.	Yogie Nopriyadi	Laki-laki	Daksa	Komputer di LPK Rahman
2.	Dea Arista	Perempuan	Daksa	Komputer di LPK Rahman
3.	Desi Sumarni	Perempuan	Daksa	Komputer di LPK Rahman
4.	Takrim Nusarto	Laki-laki	Daksa	Komputer di LPK Rahman
5.	Adi M. Hatta	Laki-laki	Daksa	Komputer di LPK Rahman
6.	Hardini Wulandari	Perempuan	Tuna Rungu	Komputer di LPK Rahman
7.	Muhammad Ardika	Laki-laki	Daksa	Komputer di LPK Rahman
8.	Yeni Ernawati	Perempuan	Tuna Rungu	Komputer di LPK Rahman
9.	Raihani Nurfadhilah	Perempuan	Tuna Rungu	Komputer di LPK Rahman
10.	Joni Iskandar	Laki-laki	Daksa	Komputer di LPK Rahman
11.	Faiza Eriya Yuliana	Perempuan	Tuna Rungu	Komputer di LPK Rahman
12.	Erin Dinda Melani	Perempuan	Tuna Rungu	Komputer di LPK Rahman
13.	Samudro Ragil P	Perempuan	Tuna Rungu	Komputer di LPK Rahman
14.	Ahmad Rizky	Laki-laki	Daksa	Komputer di LPK Rahman
15.	M. Reza Syahputra	Laki-laki	Daksa	Komputer di LPK Rahman

Adapun nama-nama penyandang disabilitas yang telah mendapatkan pekerjaan :

Table 9.4

Daftar nama penyandang Disabilitas yang telah mendapatkan pekerjaan

No	Nama	Jenis Kelamin	Ragam Disabilitas	Pekerjaan
1.	Jaka Permana	Laki-laki	Daksa	PNS/Kemenpora RI
2.	Utari	Perempuan	Daksa	Karyawan La Mentique
3.	Ryan Wenang Irman	Laki-laki	Daksa	Guru MAN 1 Kota Bengkulu
4.	Enjellia Clarashita	Perempuan	Daksa	Honorer Dinsos Kota Bengkulu
5.	Rahmad	Laki-laki	Daksa	Honorer Dinsos Kota Bengkulu
6.	Soni Mandala Putra	Laki-laki	Daksa	Waiters Resto Kabayan Bengkulu
7.	Adam Saktian	Laki-laki	Tuna Rungu	Steward Mercure Bengkulu
8.	Beni Saputra	Laki-laki	Tuna Rungu	Steward Mercure Bengkulu
9.	Deby Elsa Tiopang	Perempuan	Tuna Rungu	EDR Staf Mercure Bengkulu
10.	Putri Ulandari	Perempuan	Tuna Rungu	EDR Staf Mercure Bengkulu
11.	Bayu	Laki-laki	Tuna Rungu	Mekanik Toyota Bengkulu
12.	Yopi	Perempuan	Daksa	Pegawai Nayla Buah
13.	Irwanferi Batubara	Laki-laki	Tuna Rungu	Jukir Yodan Group
14.	Hesmie Puspita	Perempuan	Tuna Rungu	Staff TU SLBN 1 Kota Bengkulu
15.	Rina Oktaviana	Perempuan	Tuna Grahita	Pustakawan SLBN 1 Kota Bengkulu
16.	Ilona Hazli Juniati	Perempuan	Daksa	KUA Gading Cempaka Kemenag

Berdasarkan data di atas dapat dibuktikan bahwa para penyandang disabilitas sudah mempunyai kesempatan yang sama atas hak untuk mendapatkan pekerjaan, dengan demikian maka persentase pemenuhan hak penyadang disabilitas yang difasilitasi sudah tercapai sesuai dengan target.

Persentase Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, Provinsi Bengkulu berinovasi untuk mengoptimalkan dalam memberikan ruang bagi penyandang disabilitas di Provinsi Bengkulu dengan menyediakan layanan-layanan yang membantu dan mempermudah penyandang disabilitas.

Pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan sasaran baru pada Perjanjian kinerja Gunernur yaitu Meningkatnya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan indikator Persentase Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang di Falisitasi dengan target 100%. Menurut data dari Dinas Sosial Provinsi Bengkulu bahwa penyadang disabilitas Provinsi Bengkulu pada saat ini berjumlah 5.306 Jiwa yang terdiri dari 2.762 Jiwa laki-laki dan 2.544 jiwa perempuan yang tersebar di seluruh wilayah provinsi Bengkulu dengan klasifikasi jumlah masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut:

Grafik 9.1
Penyandang Disabilitas berdasarkan wilayah kabupaten kota di provinsi Bengkulu

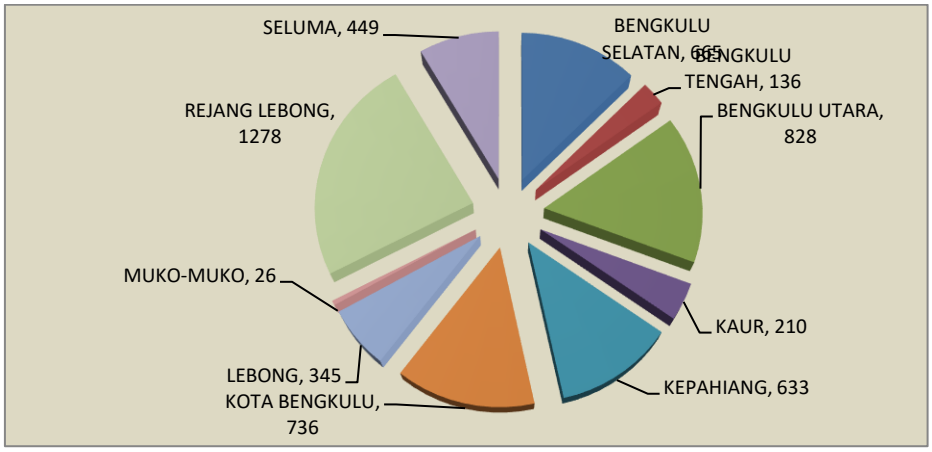

Sumber data: Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

Jika dilihat dari grafik diatas, kabupaten Rejang Lebong merupakan kabupaten yang angka disabilitas tinggi.

Pemenuhan hak terhadap penyadang disabilitas merupakan tanggung jawab masyarakat secara umum dan pemerintah secara khusus. Banyak lembaga-lembaga social yang dibentuk yang sudah mempunyai komitmen serta kesadaran yang tinggi dalam menyediakan layanan terhadap penyadang disabilitas, berikut ini beberapa lembaga yang sudah terdaftar di dinas sosial provinsi Bengkulu yang memfasilitasi kebutuhan penyadang disabilitas:

Table 1.1
Daftar lembaga sosial Mitra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

NO	NAMA LEMBAGA	LOKASI	KET
1.	LKS Amal Mulya	Kota Bengkulu	
2.	LKS Sehati	Bengkulu Selatan	
3.	LKS YDBKS (Yayasan Dna Bhakti Kesejahteraan Sosial)	Kota Bengkulu	
4.	LKS Pijar Kalisa	Kota Bengkulu	

Sumber data: Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

Bentuk pemenuhan kebutuhan terhadap disabilitas yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi Bengkulu adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan terhadap penyandang disabilitas dengan diberikannya kesempatan bekerja di BUMD provinsi Bengkulu. berikut daftar BUMD yang memberikan kesempatan bekerja bagi penyadang disabilitas di provinsi Bengkulu :

No	BUMD	Bidang Usaha / bagian yang pekerjaaan	Ket
1.	PT. Bank Bengkulu	Jasa Perbankan	
2.	PT. Bimex Perseroda	1. Perdagangan Umum 2. Pertanian, Perkebunan 3. Penyewahan Ruko dan Pergudangan	
3.	PT. Bengkulu Mandiri	1. Perdagangan Umum dan Advertising 2. Pertanian, Pertambangan dan Industri	

		3. Diserfikasi	
4.	PT. Sarana Mandiri Mukti	Perkebunan teh, pengelolaan dan pemasaran hasilnya	
5.	PT. Asurasi Bangun Askira	Jasa Asuransi	

Berdasarkan data di atas dapat dibuktikan bahwa pada penyandang disabilitas sudah mempunyai kesempatan yang sama dalam atas hak mendapatkan pekerjaan, dengan demikian maka persentase pemenuhan hak penyadang disabilitas yang difasilitasi sudah tercapai sesuai dengan target.

Sasaran 9
Meningkatnya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

No	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja			
			Tahun 2023		Tahun 2024	
			Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Persentase pemenuhan hak penyandang disabilitas yang difasilitasi	100 %	100 %	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Prov. Bengkulu

Berdasarkan tabel di atas, tolak ukur pencapaian sasaran Meningkatnya pemenuhan Hak Penyadang Disabilitas dapat diukur melalui Pesentase pemenuhan hak penyandang disabilitas yang difasilitasi.

Persentase Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, Provinsi Bengkulu berinovasi untuk mengoptimalkan dalam memberikan ruang bagi penyandang disabilitas di Provinsi Bengkulu dengan menyediakan layanan-layanan yang membantu dan mempermudah penyandang disabilitas.

Pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan sasaran baru pada Perjanjian kinerja Gunernur yaitu Meningkatnya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan indikator Persentase Pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas yang di Falisitasi dengan target 100%. Menurut data dari Dinas Sosial Provinsi Bengkulu bahwa penyadang disabilitas Provinsi Bengkulu pada saat ini berjumlah 5.306 Jiwa yang terdiri dari 2.762 Jiwa laki-laki dan 2.544 jiwa perempuan yang tersebar di seluruh wilayah provinsi Bengkulu dengan klasifikasi jumlah masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut:

Grafik 9.1
Penyandang Disabilitas berdasarkan wilayah kabupaten kota di provinsi Bengkulu

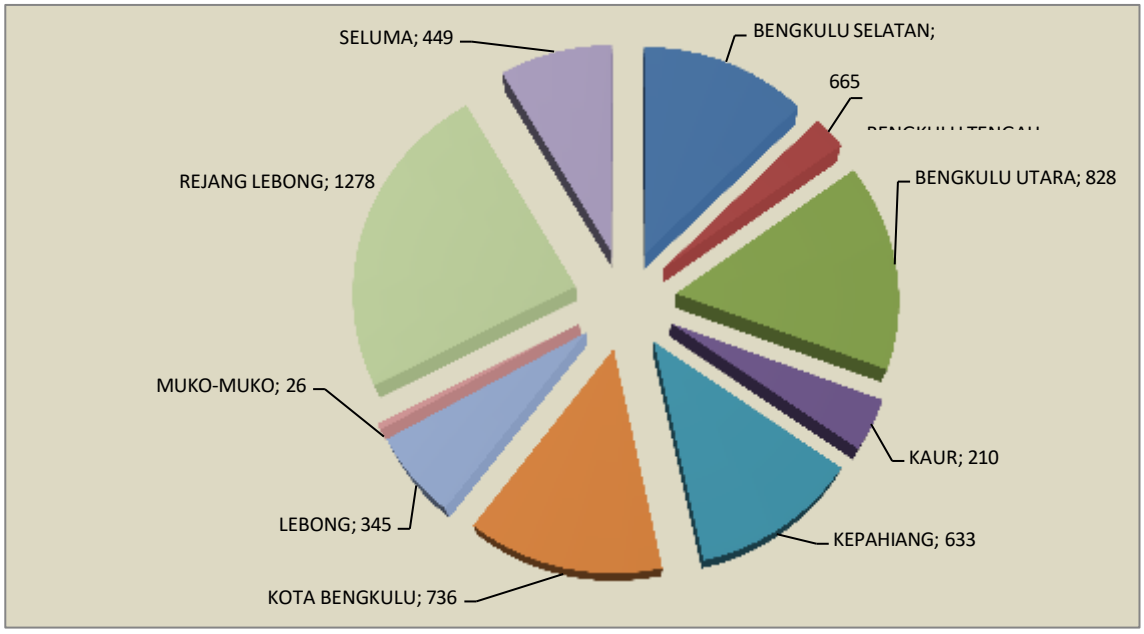

Sumber data: Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

Jika dilihat dari grafik diatas, kabupaten Rejang Lebong merupakan kabupaten yang angka disabilitas tinggi.

Pemenuhan hak terhadap penyadang disabilitas merupakan tanggung jawab masyarakat secara umum dan pemerintah secara khusus. Banyak lembaga-lembaga sosial yang dibentuk yang sudah mempunyai komitmen serta kesadaran yang tinggi dalam menyediakan layanan terhadap penyandang disabilitas, berikut ini beberapa lembaga yang sudah terdaftar di dinas sosial provinsi Bengkulu yang memfasilitasi kebutuhan penyadang disabilitas:

Table 9.1
Daftar lembaga sosial Mitra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

NO	NAMA LEMBAGA	LOKASI	KET
1.	LKS Amal Mulya	Kota Bengkulu	
2.	LKS Sehati	Bengkulu Selatan	
3.	LKS YDBKS (Yayasan Dna Bhakti Kesejahteraan Sosial)	Kota Bengkulu	
4.	LKS Pijar Kalisa	Kota Bengkulu	

Sumber data: Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

Bentuk pemenuhan kebutuhan terhadap disabilitas yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi Bengkulu adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan terhadap penyandang disabilitas dengan diberikannya kesempatan bekerja di BUMD provinsi Bengkulu. berikut daftar BUMD yang memberikan kesempatan bekerja bagi penyadang disabilitas di provinsi Bengkulu :

Table 9.2
Daftar lembaga sosial Mitra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

No	BUMD	Bidang Usaha / bagian yang pekerjaaan	Ket
1.	PT. Bank Bengkulu	Jasa Perbankan	
2.	PT. Bimex Perseroda	4. Perdagangan Umum 5. Pertanian, Perkebunan 6. Penyewahan Ruko dan Pergudangan	
3.	PT. Bengkulu Mandiri	4. Perdagangan Umum dan Advertising 5. Pertanian, Pertambangan dan Industri 6. Diserfikasi	
4.	PT. Sarana Mandiri Mukti	Perkebunan teh, pengelolaan dan pemasaran hasilnya	
5.	PT. Asurasi Bangun Askira	Jasa Asuransi	

Pada Tahun 2024 Gubernur Provinsi Bengkulu melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu membuka Unit Layanan Disabilitas (ULD), yang mana Unit Layanan Disabilitas ini memberikan bimbingan dan pelatihan kepada para disabilitas agar para disabilitas memperoleh keterampilan sehingga dapat memiliki kesempatan untuk bekerja, adapun nama-nama penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan :

Table 9.3
Daftar nama penyandang Disabilitas yang mengikuti pelatihan

No	Nama	Jenis Kelamin	Ragam Disabilitas	Pelatihan
1.	Yogie Nopriyadi	Laki-laki	Daksa	Komputer di LPK Rahman
2.	Dea Arista	Perempuan	Daksa	Komputer di LPK Rahman
3.	Desi Sumarni	Perempuan	Daksa	Komputer di LPK Rahman
4.	Takrim Nusarto	Laki-laki	Daksa	Komputer di LPK Rahman
5.	Adi M. Hatta	Laki-laki	Daksa	Komputer di LPK Rahman
6.	Hardini Wulandari	Perempuan	Tuna Rungu	Komputer di LPK Rahman
7.	Muhammad Ardika	Laki-laki	Daksa	Komputer di LPK Rahman
8.	Yeni Ernawati	Perempuan	Tuna Rungu	Komputer di LPK Rahman
9.	Raihani Nurfadhilah	Perempuan	Tuna Rungu	Komputer di LPK Rahman
10.	Joni Iskandar	Laki-laki	Daksa	Komputer di LPK Rahman
11.	Faiza Eriya Yuliana	Perempuan	Tuna Rungu	Komputer di LPK Rahman
12.	Erin Dinda Melani	Perempuan	Tuna Rungu	Komputer di LPK Rahman
13.	Samudro Ragil P	Perempuan	Tuna Rungu	Komputer di LPK Rahman
14.	Ahmad Rizky	Laki-laki	Daksa	Komputer di LPK Rahman
15.	M. Reza Syahputra	Laki-laki	Daksa	Komputer di LPK Rahman

Adapun nama-nama penyandang disabilitas yang telah mendapatkan pekerjaan:

Table 9.4
Daftar nama penyandang Disabilitas yang telah mendapatkan pekerjaan

No	Nama	Jenis Kelamin	Ragam Disabilitas	Pekerjaan
1.	Jaka Permana	Laki-laki	Daksa	PNS/Kemenpora RI
2.	Utari	Perempuan	Daksa	Karyawan La Mentique
3.	Ryan Wenang Irman	Laki-laki	Daksa	Guru MAN 1 Kota Bengkulu
4.	Enjellia Clarashita	Perempuan	Daksa	Honorer Dinsos Kota Bengkulu
5.	Rahmad	Laki-laki	Daksa	Honorer Dinsos Kota Bengkulu
6.	Soni Mandala Putra	Laki-laki	Daksa	Waiters Resto Kabayan Bengkulu
7.	Adam Saktian	Laki-laki	Tuna Rungu	Steward Mercure Bengkulu
8.	Beni Saputra	Laki-laki	Tuna Rungu	Steward Mercure Bengkulu
9.	Deby Elsa Tiopang	Perempuan	Tuna Rungu	EDR Staf Mercure Bengkulu
10.	Putri Ulandari	Perempuan	Tuna Rungu	EDR Staf Mercure Bengkulu
11.	Bayu	Laki-laki	Tuna Rungu	Mekanik Toyota Bengkulu
12.	Yopi	Perempuan	Daksa	Pegawai Nayla Buah
13.	Irwanferi Batubara	Laki-laki	Tuna Rungu	Jukir Yodan Group
14.	Hesmie Puspita	Perempuan	Tuna Rungu	Staff TU SLBN 1 Kota Bengkulu
15.	Rina Oktaviana	Perempuan	Tuna Grahita	Pustakawan SLBN 1 Kota Bengkulu
16.	Ilona Hazli Juniati	Perempuan	Daksa	KUA Gading Cempaka Kemenag

Berdasarkan data di atas dapat dibuktikan bahwa para penyandang disabilitas sudah mempunyai kesempatan yang sama atas hak untuk mendapatkan pekerjaan, dengan demikian maka persentase pemenuhan hak penyadang disabilitas yang difasilitasi sudah tercapai sesuai dengan target.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Bengkulu yang melaksanakan Tugas Pembantuan adalah : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi Bengkulu

2.1 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu memiliki dana Tugas Pembantuan (TP) dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dana Tugas Pembantuan (TP) ini dipergunakan di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi melalui Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Adapun tujuan dari program ini yaitu terwujudnya kawasan transmigrasi yang berkembang menjadi embrio kota-kota kecil. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi juga melaksanakan rapat koordinasi dengan melakukan fasilitasi Penyelesaian Sertifikat Hak Milik (SHM)

2.2 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu

Pada Tahun 2024 Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu memperoleh Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian.Tugas Pembantuan ini bertujuan untuk mendukung target kinerja prioritas nasional pada sub-sektor peternakan yaitu :

1. Peningkatan Populasi dan Produksi Ternak (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam dan babi);
2. Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular.

2.3 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Tahun 2024 melaksanakan program/kegiatan dana Tugas Pembantuan (TP) dari Kementerian Pertanian. Dana TP ini bersumber dari 3 (tiga) Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian dan 3 (tiga) Program dengan Jumlah sebesar Rp. 12.482.616.000,-. Masing-masing Sumber anggaran TP yaitu Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen serta Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen.

2.4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu mendapatkan dana Tugas Pembantuan (TP) dari Kementerian Pekerjaan Umum RI.

2.5 Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu memiliki dana Tugas Pembantuan (TP) dari Kermenterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Dana Tugas Pembantuan (TP) ini terdiri dari 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan yakni:

1) Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
   a. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata
   b. Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

c. Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata
d. Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)
e. Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen

2) Program Dukungan Manajemen
- Pengembangan Perencanaan dan Keuangan.

Adapun tujuan dari program di atas adalah :

1. Peningkatan kapasitas SDM baik Masyarakat Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Bengkulu dan aparatur pengelola Tugas Pembantuan.
2. Peningkatan Keakuratan Data dan Stakeholder kepariwisataan selaku penyedia data kepariwisataan Provinsi Bengkulu.
3. Penguatan pelaksanaan event seni budaya daerah di Provinsi Bengkulu.

2.6 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

Kementerian yang memberikan tugas pembantuan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu ada 2 Kementerian yaitu Kementerian Perdagangan yang pelaksanaannya ada di bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Kementerian Perindustrian yang pelaksanaannya ada di bidang Industri Kecil Menengah dan Pengembangan Akses Industri. Di bidang Perdagangan Dalam Negeri ada 1 program kegiatan tugas pembantuan yaitu Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah dengan anggaran sebesar Rp.154.401.000,-.Di bidang Industri Kecil Menengah dan Pengembangan Akses Industri ada 2 program kegiatan tugas pembantuan yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah dan Aneka dengan anggaran sebesar Rp.2.120.524.000,- dan Program Dukungan Manajemen Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka dengan anggaran sebesar Rp.69.840.000,-.

2.7 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu

Pada Tahun 2024 Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu memperoleh Tugas Pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui beberapa Direktorat Jenderal. Tujuan Tugas Pembantuan ini bertujuan memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah sub sektor Perikanan yakni :

1. Sekretariat Jenderal;
2. Ditjen Perikanan Tangkap;
3. Ditjen Perikanan Budidaya ;
4. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
5. Ditjen Pengelolaan Ruang Laut ;
6. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Secara umum capaian kinerja dari kegiatan/Program Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama yang dilaksanakan di Provinsi Bengkulu merupakan pelaksanaan dari program/kegiatan dari Pemerintah Pusat kepada beberapa kementerian/lembaga, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program /kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) Tahun. Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Bengkulu yang melaksanakan Tugas Pembantuan ini merealisasikan anggaran sesuai dengan target atau sasaran program yang telah di berikan.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi

Tugas Pembantuan Yang dari Kementerian/Lembaga Yang ditugaskan Kepada Daerah Provinsi

3.1.1. Target Kinerja

1. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu

1. Koordinasi : Rp 10.680.000,-
2. Prasarana Bidang KonektivitasDarat : Rp 498.000.000,-

3. Perkara Hukum Kelompok Masyarakat : Rp 39.420.000,-
4. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat : Rp 10.031.000,-
5. Bantuan Keluarga : Rp 52.824.000,-
6. Layanan Dukungan Manajemen Internal : Rp 53.343.000,-

2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu

Pada Tahun 2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu memperoleh Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Tugas Pembantuan ini bertujuan untuk mendukung target kinerja prioritas nasional pada sub-sektor peternakan yaitu :

1. Jumlah Produksi Peternakan (Daging sapi, kerbau, kambing, domba, itik ayam, babi, susu dan telur);
2. Persentase Wilayah Yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis.

3. Dinas Tanaman Pangan, Hotikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu

Adapun rincian dari Program/Kegiatan dan Target Tugas Pembantuan di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rincian Program / Kegiatan dan Target Tugas Pembantuan di Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Tahun 2024

No	Program dan Kegiatan	Target
A	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**	
1	Bantuan Budidaya Padi Kaya gizi (Biofortifikasi)	**1.000 Ha**
	Area Penyaluran Benih Padi	**1.000 Ha**
	Area Penyaluran Benih Jagung	**1.000 Ha**
B	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**	
1	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	**1 Unit**

C	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**	
1	Irigasi Perpipaan	**18 Unit**
	Irigasi Perpompaan Wilayah Barat	**34 Unit**

Sumber : Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, 2025.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

a. SKPD-TP Dinas Pekejaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

Target :

- Preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional fisik 100% dan keuangan sebesar 100% (Rp46.090.594.000)
- Dukungan teknis target fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 100%(Rp. 60.832.000)
- Omprasarana bidang konektifitas darat (jalan) target fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 100% (Rp. 43.327.286.000)
- Omprasarana bidang konektifitas darat (jembatan) target fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 100% (Rp. 2.702.476.000)
- Dukungan managemen Ditjen Binamarga target target fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 100%(Rp. 315.491.000)
- Layanan dukungan managemen internal target fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 100%(Rp. 315.491.000).

b. TP-OP Dinas Pekejaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

Target :

- Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana target fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 100% (Rp. 21.935.932.000)

- OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air target fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 100% (Rp. 21.935.932.000)
- Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air target fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 100% (Rp. 853.178.000)
- Layanan Dukungan Manajemen Internal target fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 100% (Rp. 853.178.000).

5. Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

Adapun target dari Tugas Pembantuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI pada Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

a. Pelatihan bagi Pelatih Kepemanduan Wisata Berbasis Kompetensi Provinsi Bengkulu dengan target peserta sebanyak 30 Orang dan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00.
b. Bimbingan Teknis penyusunan Proposal dan Persentasi Bisnis Ekonomi Kreatif Provinsi Bengkulu dengan target peserta sebanyak 40 Orang/Usaha dan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00.
c. Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional, 1 Kegiatan dan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00.
d. Pendukungan Event Daerah di 2 Kabupaten di Provinsi Bengkulu dan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00.
e. Workshop Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Provinsi Bengkulu dengan target peserta sebanyak 70 Orang dan alokasi anggaran sebesar Rp. 190.000.000,00..
f. Administrasi Tugas Pembantuan, 1 Kegiatan dan alokasi anggaran sebesar Rp. 130.000.000,00.

6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

- Target kinerja pelaksanaan tugas pembantuan untuk Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah adalah:

a. Terlaksananya perlindungan konsumen di daerah (edukasi konsumen dan penyelenggaraan aksi perlindungan konsumen) di daerah provinsi Bengkulu.

b. Terlaksananya pelatihan, pelaporan, dan distribusi komoditas pertanian, peternakan, perikanan dan hasil industri serta barang pokok dan penting di daerah provinsi Bengkulu.

c. Tidak terlaksananya fasilitasi kegiatan pasar murah di daerah provinsi Bengkulu, dikarenakan ada blokir automatic adjustment dari pihak Kementerian Perdagangan sebesar Rp.40.000.000,-

- Target kinerja pelaksanaan tugas pembantuan untuk Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah dan Aneka adalah:

a. untuk indikator kinerja “total jumlah wirausaha yang mengikuti pelatihan teknis/kewirausahaan” mencapai 150 IKM/Orang dari target 150 IKM/Orang sehingga persentase mencapai target yaitu sebesar 100% .

b. untuk indikator kinerja “total jumlah WUB IKM yang mendapatkan ijin industri” mencapai 57 IKM, dengan persentase capaian sebesar 142,5%. Dari target 40 IKM.

c. untuk indikator “Jumlah IKM yang mendapat Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk” mencapai 70 IKM yang terdiri dari fasilitasi merek 20 IKM, pendampingan digital marketing melalui klinik go online 10 IKM, Pendampingan OVOP 20 IKM, Sosialisasi Upakarti 20 orang target pencapaian sebesar 100%. Untuk fasiltasi merek target di tahun 2024 berjumlah 20 IKM sama dengan target tahun 2023 yaitu 20 IKM, target belum berubah karena anggaran yang sama di tahun sebelumnya. Untuk fasilitasi pendaftaran merek alhamdulillah tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Untuk pendampingan OVOP di tahun 2024 mencapai target 20 IKM terealisasi 100%.

d. Indikator “UPL yang diberdayakan sebagai pendamping sentra” sebanyak 1 Lembaga , sedangkan untuk indikator “Penyuluh IKM” berjumlah 3 orang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu. Untuk indikator “Sentra IKM yang dianalisa” berjumlah 4 sentra terealisasi 100% terdiri dari 4 kabupaten yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Lebong.

e. Indikator “IKM yang Masuk SIINAS “ target di tahun 2024 berjumlah 1200 IKM telah tercapai sebanyak 530 IKM dengan persentase 44,2% . target tidak tercapai dikarenakan Sumber Daya Manusia yang kurang, kurangnya Koordinasi antar Kabupaten/Kota.

- Target kinerja pelaksanaan tugas pembantuan untuk Program Dukungan Manajemen Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka adalah:

  >Terlaksananya layanan perkantoran.

7. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu

Secara umum capaian kinerja dari kegiatan/Program Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama yang dilaksanakan di Provinsi Bengkulu merupakan pelaksanaan dari program/kegiatan dari Pemerintah Pusat kepada beberapa Kementerian/lembaga, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program /kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun.

3.1.2. Realisasi

A. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu

Adapun rincian dari Program/Kegiatan dan Realisasi Tugas Pembantuan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perkara Hukum Kelompok Masyarakat : Rp 39.420.000,-
   Realisasi Keuangan : Rp. 39.420.000,- (100 %)
   Fisik : (0 %)
2. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat : Rp 10.031.000,-
   Realisasi Keuangan : Rp. 8.891.000,- (88,635%)
   Fisik : (0 %)
3. Koordinasi : Rp 10.680.000,-
   Realisasi Keuangan : Rp. 10.680.000,- (100 %)
   Fisik : (0 %)
4. Prasarana Bidang Konektivitas Darat : Rp 498.000.000,-
   Realisasi Keuangan : Rp. 497.770.166- (99,5%)
   Fisik : (0 %)
5. Bantuan Keluarga : Rp 52.824.000,-
   Realisasi Keuangan : Rp.52.216.000,- (98,84 %)
   Fisik : (0 %)
6. Layanan Dukungan Manajemen Internal : Rp 53.343.000,-
   Realisasi Keuangan : Rp. 52.859.200,- (99,09 %)
   Fisik : (0 %).

B. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu

Adapun rincian dari **Program/Kegiatan dan Realisasi Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan** di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak.

   Pagu Anggaran : Rp. 435.000.000,-

   Realisasi Keuangan : Rp. 138.684.707,-

   Persentase : 31,88%

   Klasifikasi Rincian Output Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (1 Lembaga) dengan Rincian Ouput Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor (1 Lembaga), yang terdiri dari :

   - Pelayanan Informasi Harga Komoditas Peternakan
   - Pengembangan Kawasan Korporasi Peternakan

- Bimtek / Pendampingan / Koordinasi Pengolahan

Klasifikasi Rincian Output Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (1 Unit) dengan Rincian Ouput Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (1 Unit), yang terdiri dari :

- Sarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak

Klasifikasi Rincian Output Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (1 Unit) dengan Rincian Ouput Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (1 Unit), yang terdiri dari :

- Prasarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan Kegiatan sebagai berikut :

1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.

   Pagu Anggaran : Rp. 750.000.000,-
   Realisasi Keuangan : Rp. 749.925.000,-
   Persentase : 99,99%

   Klasifikasi Rincian Output Pelayanan Publik Lainnya (30.000 Layanan) dengan Rincian Output Layanan Kesehatan Hewan (30.000 Layanan), yang terdiri dari :

   - Layanan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit PMK

2. Penyediaan Benih & Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak.

   Pagu Anggaran : Rp. 206.480.000,-
   Realisasi Keuangan : Rp. 204.578.000,-
   Persentase : 99,08%

   Klasifikasi Rincian Output Pelayanan Publik Lainnya (3.800 Layanan) dengan Rincian Output Layanan Optimalisasi Reproduksi (3.800 Layanan), yang terdiri dari :

   - Pengadaab N2 Cair.

   Klasifikasi Rincian Output Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (2.899 Unit) dengan Rincian Output Ternak yang Didata dan Ditandai (2.899 Unit), yang terdiri dari :

- Operasional dan Koordinasi.

Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan sebagai berikut :

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan.

   Pagu Anggaran : Rp. 266.627.000,-

   Realisasi Keuangan : Rp. 85.130.952,-

   Persentase : 31,93%

   Dengan Rincian Output :

   a. Layanan BMN (1 layanan), yang terdiri dari :
      - Penyelesaian Administrasi Barang Milik Negara

   b. Layanan Data dan Informasi (1 layanan), yang terdiri dari :
      - Layanan Data dan Informasi Propinsi.

   c. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (6 dokumen), yang terdiri dari :
      - Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Propinsi.

   d. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (1 dokumen), yang terdiri dari :
      - Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Propinsi.

   e. Layanan Manajemen Keuangan (4 dokumen), yang terdiri dari :
      - Akuntansi, Verifikasi dan Tindaklanjut Hasil Pengawasan Propinsi.
      - Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Propinsi.

Rincian dari **Program/Kegiatan dan Realisasi Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian** di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

   Pagu Anggaran : Rp. 150.000.000,-

   Realisasi Keuangan : Rp. 49.846.000,-

Persentase : 33,23%

dengan Rincian Ouput Layanan Manajemen Keuangan (1 Dokumen) yaitu Administrasi Pengelola Dana Tugas Pembantuan di Provinsi.

C. Dinas Tanaman Pangan, Hotikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu

Adapun rincian dari Program / Kegiatan dan Realisasi Tugas Pembantuan di Dinas Tanaman Pangan, Hotikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 yakni :

1. Satuan Kerja Tanaman Pangan

1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Pagu Anggaran : Rp. 40.000.000,-

a. Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Pagu Anggaran : Rp.40.000.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 40.000.000 (100%)

Realisasi Fisik : 100 %

2) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Pagu Anggaran : Rp. 2.870.000.000,-

a. Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan

Pagu Anggaran : Rp. 1.610.000.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 1.559.220.000,- (99,50%)

Realisasi Fisik : 100 %

b. Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan

Pagu Anggaran : Rp. 1.260.000.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 1.257.750.000 (99,82%)

Realisasi Fisik : 100 %

3) Program Dukungan Manajemen

a. Kegiatan Dukungan Manajemen & Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan

Pagu Anggaran : Rp. 277.412.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 277.412.000,- (100%)

Realisasi Fisik : 100 %

2. Satuan Kerja Perkebunan

1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Pagu Anggaran : Rp. 2.833.897.000,-

a. Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan

Pagu Anggaran : Rp. 312.900.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 312.037.020 (99,72%)

Realisasi Fisik : 100 %

b. Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Pagu Anggaran : Rp. 1.903.042.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 1.898.695.000,- (99,77%)

Realisasi Fisik : 100 %

c. Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan

Pagu Anggaran : Rp. 617.955.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 578.583.800,- (93,63%)

Realisasi Fisik : 100 %

2) Program Dukungan Manajemen

a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

Pagu Anggaran : Rp. 112.920.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 112.920.000,- (100%)

Realisasi Fisik : 100 %

3. Satuan Kerja Prasarana dan Sarana Pertanian

1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Pagu Anggaran : Rp. 6.348.387.000,-

a. Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian

Pagu Anggaran : Rp. 5.887.567.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 5.886.724.000,- (99,99%)

Realisasi Fisik : 100 %

b. Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

Pagu Anggaran : Rp. 275.000.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 274.024.751,- (99,65%)

Realisasi Fisik : 100 %

2) Program Dukungan Manajemen

Pagu Anggaran : Rp. 185.820.000,-

a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Pagu Anggaran : Rp. 185.820.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 185.820.000,- (100%)

Realisasi Fisik : 100 %.

D. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

Realisasi :

- Preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional fisik 100% dan keuangan sebesar 99,98% (Rp. 46.080.445.000)
- Dukungan teknis target fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 99,98% (Rp. 60.832.000)
- Omprasarana bidang konektifitas darat (jalan) target fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 99,98% (Rp. 43.317.142.000)
- Omprasarana bidang konektifitas darat (jembatan) target fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 100%(Rp. 2.702.471.000)
- Dukungan managemen ditjen binamarga target target fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 99,83% (Rp. 314.948.000)
- Layanan dukungan managemen internal target fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 99,83% (Rp. 314.948.000)
- Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA Serta

Penanggulangan Darurat Akibat Bencana target fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 100% (Rp. 21.935.563.000)

- OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air target fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 100% (Rp. 21.935.563.000)
- Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air target fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 99,58% (Rp. 849.618.000)
- Layanan Dukungan Manajemen Internal target fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 99,58%(Rp.849.618.000).

E. Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

Pada tahun 2024 Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu mampu mencapai target realisasi Tugas Pembantuan sebagai berikut :

a. Terlaksananya Kegiatan Pelatihan bagi Pelatih Kepemanduan Wisata Berbasis Kompetensi Provinsi Bengkulu dengan peserta sebanyak 30 Orang dan realisasi anggaran sebesar Rp. 199,803,982,00 atau 99.92%.
b. Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis penyusunan Proposal dan Persentasi Bisnis Ekonomi Kreatif Provinsi Bengkulu dengan peserta sebanyak 40 Orang/Usaha dan realisasi anggaran sebesar Rp. 199,754,280,00 atau 99,88%.
c. Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional, dengan sub kegiatan sebagai berikut
   i. Bimbingan Teknis Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Berbasis Data (*Data Based Policy*), dengan peserta kegiatan sebanyak sebanyak 40 orang
   ii. Workshop Pemahaman Indikator dan Pengisian Data Kepariwisatan dan Ekonomi Kreatif RI dengan peserta sebanyak 30 orang
   iii. Pengumpulan dan Pembaharuan data Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, dilaksanakan selama 2 bulan mulai dari tanggal 23 Juli s.d 23 September 2024, pada kegiatan ini melibatkan 10 Orang PIC yang bertanggung jawab atas keabsahan data, 10

Orang Surveyor serta 1 orang koordinator surveyor sebagai pengumpul dan penginput pembaharuan data pada aplikasi sisparnas.

Adapun realisasi anggaran pada kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisataan Nasionaladalah sebesar Rp. 299,466,610,00 atau 99,82%.

d. Terlaksananya Kegiatan Pendukungan Event Daerahdi Provinsi Bengkulu, dengan detail sebagai berikut:
   i. Pendukungan Event Festival Ayiak Manna tanggal 10 s,d 11 2024
   ii. Pendukungan Event Festival Bhumi Belirang tanggal 19 s,d 20 Oktober 2024

   Adapun realisasi anggaran pada kegiatan pendukungan event daerah adalah sebesar Rp. 497,577,412,00 atau 99.98%.

e. Terlaksananya Kegiatan Workshop Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Provinsi Bengkulu dengan peserta sebanyak 70 Orang dan realisasi anggaran sebesar Rp. 189,960,965,00 atau sebesar 99.98%.

f. Terlaksananya Kegiatan Administrasi Tugas Pembantuan sebanyak 1 Kegiatan dan alokasi anggaran sebesar Rp. 128,564,659,00atau sebesar 99.90%.

F. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

- Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan untuk Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah adalah :

  Realisasi keuangan dari alokasi anggaran sebesar Rp.154.401.000,- terealisasi sebesar Rp.114.401.000,- atau sebesar 74%.
- Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan untuk Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah dan Aneka adalah :

Realisasi keuangan dari alokasi anggaran sebesar Rp.2.120.524.000,- terealisasi sebesar Rp.2.047.228.000,- atau sebesar 97%.

- Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan untuk Program Dukungan Manajemen Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka adalah: Realisasi keuangan dari alokasi anggaran sebesar Rp.69.840.000,- terealisasi sebesar Rp.69.840.000,- atau sebesar 100%.

F. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu

Adapun rincian dari Program / Kegiatan dan Realisasi Tugas Pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

SEKRETARIAT JENDERAL

Pagu Anggaran : Rp. 199,724,000,-
Realisasi Keuangan : Rp. 188,796,464,-
Persentase : 94.53 %

Rincian Output Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Satker Dekonsentrasi (1 Dokumen), yang terdiri dari :

- Penyusunan Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2024
- Fasilitasi Penyediaan Data Statistik KP
- Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN
- Administrasi Umum Satker Tugas Pembantuan

DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Pagu Anggaran : Rp. 295,768,000,-
Realisasi Keuangan : Rp. 294,522,000,-
Persentase : 99.58 %

Rincian Output Pelayanan (1 Daerah) , yang terdiri dari :

- Pelaksanaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan kewenangan daerah
- Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan

- Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Pengusahaan di Pelabuhan Perikanan
- Supervisi dan Evaluasi Pengelolaan Perizinan Daerah
- Identifikasi penguatan kapasitas Kelembagaan Nelayan
- Pengumpulan dan Verifikasi Data Log Book penangkapan Ikan
- Koordinasi Perencanaan pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
- Penyusunan dokumen perencaanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran
- Pengendalian internal pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA.

Pagu Anggaran : Rp. 311,937,000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 310,387,725,-

Persentase : 99.50 %

Klasifikasi Rincian Output Pelayanan Publik Lainnya (65 sampel) dan Rincian Output Layanan (1 Layanan), yang terdiri dari :

- Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan.
- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya

DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pagu Anggaran : Rp. 171,652,000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 168,116,068,-

Persentase : 97.94 %

Rincian Output Pelayanan (24 Kelompok) dan Rincian Output Layanan (3 Dokumen), yang terdiri dari :

- Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat.
- Layanan Manajemen Kinerja

DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Pagu Anggaran : Rp. 485,600,000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 458,989,784,-

Persentase : 94.52 %

Rincian Output Pelayanan (3 Rekomendasi), Rincian Output Layanan (3 Dokumen) dan peningkatan kapasitas SDM (4 Orang), yang terdiri dari :

- Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan
- Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan
- Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan
- Layanan Manajemen Kinerja Internal

DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pagu Anggaran : Rp. 245,974,000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 241,902,931,-

Persentase : 98.34 %

Rincian Output Publik (1 Promosi), Rincian Output Layanan (1 layanan) dan layanan Publik (30 Industri, IKM), yang terdiri dari :

- Promosi
- Fasilitasi dan Pembinaan Industri
- Layanan Dukungan Manajemen Internal

Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

1. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kementerian Pertanian	1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara								
1		2 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**		DTPHP	40.000.000	40.000.000	100	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman pangan	100
		3 UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA. 2020	**Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan**			40.000.000	40.000.000	100	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman pangan	100
		4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023	Output Koordinasi	Provinsi Bengkulu (Dinas)		40.000.000	40.000.000	100		100
		5 Permentan Nomor: 19/Permentan/OT.140/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**		DTPHP	2.870.000.000	2.859.690.000	99,64	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman pangan	100

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%
			Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan		DTPHP	1.610.000.000	1.601.940.000	99,50	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman pangan	100
			Output Koordinasi	Provinsi Bengkulu (Dinas)	DTPHP	60.000.000	59.990.000	99,98		100
			Output Sarana Pengembangan Kawasan	Kabupaten Kepahiang, Mukomuko dan Bengkulu Utara	DTPHP	1.550.000.000	1.541.950.000	99,48		100
			Rincian Kegiatan: Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	Kabupaten Kepahiang, Mukomuko dan Bengkulu Utara	DTPHP	1.550.000.000	1.541.950.000	99,48		100
		6 Permentan Nomor: 364/Permentan/RC.1 30/12/2016 tentang Penugasan Kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi	**Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan**	Provinsi Bengkulu (Dinas)		1.260.000.000	1.257.750.000	99,82	Terpenuhinya kebutuhan perbenihan tanaman pangan untuk produksi	100
		7 Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: Y. 119.B4 Tahun 2024 tentang KPA Dana Tugas Pembantuan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu TA. 2024	Output Koordinasi	Provinsi Bengkulu (Dinas)		20.000.000	20.000.000	100		100
			Output Sarana Pengembangan Kawasan	Provinsi Bengkulu (Dinas)		1.240.000.000	1.237.750.000	99,82		100

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%
			Rincian Kegiatan Area Penyaluran Benih Padi	Kab.Bengkulu Selatan,		340.000.000	340.000.000	100		100
			Rincian Kegiatan Area Penyaluran Benih Jagung	Provinsi Bengkulu		900.000.000	897.750.000	99,75		100
			Program Dukungan Manajemen		DTPHP	277.412.000	277.412.000	100		100
			Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada DitjenTanaman Pangan			277.412.000	277.412.000	100	Terwujudnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	100
			Output Layanan Manajemen Kinerja Internal	Provinsi Bengkulu (Dinas)		277.412.000	277.412.000	100		100
2.			**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**		DTPHP	6.162.567.000	6.160.748.751	99,97	Penyediaan Prasarana dan Sarana pertanian yang sesuai kebutuhan	100

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%
			Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	Provinsi Bengkulu (Dinas)		5.887.567.000	5.886.724.000	99,99	Meningkatnya efektivitas dan Efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air ke seluruh lahan pertanian	100
			Output Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Kabupaten Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Rejang Lebong dan Seluma		165.000.000	144.900.000	87,82		100
			Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian			275.00.000	274.024.751	99,65	Tersedianya Data dan Informasi Alat Mesin Pertanian	100
			Output Koordinasi	Provinsi Bengkulu		275.00.000	274.024.751	99,65		100
			Program Dukungan Manajemen			185.820.000	185.820.000	100		100
			Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DitjenPrasarana dan Sarana Pertanian	Provinsi Bengkulu (Dinas)		185.820.000	185.820.000	100	Terwujudnya Birokrasi Dirjen PSP yang Efektif dan Efisien	100

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%
			Output Layanan Manajemen Kinerja Internal			185.820.000	185.820.000	100		100
3.			**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**		DTPHP	2.833.897.000	2.789.315.820	98,43		100
			Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan	Provinsi Bengkulu (Dinas)		312.900.000	312.037.020	99,72	Terpenuhinya kebutuhan perlindungan tanaman perkebunan untuk produksi	100
			Output Sertifikasi Produk			312.900.000	312.037.020	99,72		100
			Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran HasilPerkebunan	Provinsi Bengkulu (Dinas)		1.903.042.000	1.898.695.000	99,77	Meningkatnya Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan untuk komoditas ekspor	
			Output Koordinasi	Provinsi Bengkulu (Dinas)		146.000.000	146.00.000	100		100
			Output Promosi	Provinsi Bengkulu (Dinas)		174.800.000	171.700.000	98,23		100
			Output Standarisasi Produk			984.650.000	986.836.000	100		100
			Rincian Kegiatan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang, Kaur, Lebong		984.650.000	986.836.000	100		100
			Output Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			200.000.000	200.000.000	100		100

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%
			Output Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			397.592.000	394.159.000	99,14		100
			Rincian Kegiatan Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	Kab. Kepahiang,		397.592.000	394.159.000	99,14		100
			Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan			617.955.000	578.583.800	93,63	Terpenuhinya kebutuhan perbenihan perkebunan untuk komoditas ekspor dan pengendali impor	50
			Output Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			159.165.000	159.165.000	100		100
			Output Sarana Pengembangan Kawasan	Provinsi Bengkulu		458.790.000	419.418.800	91,42		100
			Rincian Kegiatan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan	Provinsi Bengkulu		458.790.000	419.418.800	91,42		100
			Program Dukungan Manajemen		DTPHP	112.920.000	112.920.000	100		100
			Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DitjenPerkebunan	Provinsi Bengkulu (Dinas)		112.920.000	112.920.000	100	Terwujudnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan	100
			Output Layanan Manajemen Kinerja Internal			112.920.000	112.920.000	100		100

Sumber : Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, 2025.

2. Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

MATRIKS CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT
YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH PROVINSI

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan			Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI	Permenparekraf RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program	:	Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Kota Bengkulu	Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	Rp 200.000.000	Rp 199.803.982	99.92%	Terlaksananya Pelatihan bagi Pelatih Kepemanduan Wisata Berbasis Komputer	100%	
			Kegiatan	:	Pengembangan Sumber Daya								
			Output	:	SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan								
			Rincian Kegiatan	:	Pelatihan Bagi Pelatih Kepemanduan Wisata Berbasis Kompetensi								
			Kegiatan	:	Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Bengkulu	Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	Rp 200.000.000	Rp 199.754.280	99.88%	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Proposal dan Presentasi Bisnis Ekonomi	100%	
			Output	:	SDM Ekonomi Kreatif yang memperoleh Pelatihan untuk								
			Rincian Kegiatan	:	Bimbingan Teknis Penyusunan Proposal dan Presentasi Bisnis Ekonomi Kreatif								
			Kegiatan	:	Pengembangan Tata Kelola Destianasi Pariwisata	Kota Bengkulu	Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	Rp 300.000.000	Rp 299.466.610	99.82%	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan dan Penguatan dan Penguatan Destinasi Pariwisata	100%	
			Output	:	Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata								
			Rincian Kegiatan	:	Fasilitasi Pengembangan dan Penguatan dan Penguatan Destinasi Pariwisata								
			Kegiatan	:	Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	Kota Bengkulu	Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	Rp 500.000.000	Rp 499.897.412	99.98%	Terlaksananya Pendukungan Event Daerah	100%	
			Output	:	Fasilitasi Pendukungan Event Daerah								
			Rincian Kegiatan	:	Pelaksanaan Pendukungan Event Daerah								
			Kegiatan	:	Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen	Kota Bengkulu	Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	Rp 190.000.000	Rp 189.960.965	99.98%	Terlaksananya Workshop Pengembangan Ekosistem Ekraf	100%	
			Output	:	Pelaku Ekraf yang mendapat pengembangan akses kepada ekosistem ekonomi kreatif melalui tugas pembantuan								
			Rincian Kegiatan	:	Workshop Pengembangan Ekosistem Ekraf								
			Kegiatan	:	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	Kota Bengkulu	Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	Rp 130.000.000	Rp 128.564.659	98.90%	Terlaksananya Administrasi Tugas Pembantuan	100%	
			Output	:	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah								
			Rincian Kegiatan	:	Administrasi Tugas Pembantuan								

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, 2025.

3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

No	K/ LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kementerian Perindustrian	1. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri *Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah dan Aneka	Provinsi Bengkulu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu	Rp. 2.120.524.000	Rp. 2.047.228.000	97%	100%	100%	Ada Blokir Autometic atdjustmen dan self bloking sebesar Rp. 73.236.000
		2. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara	2. Program Dukungan Manajemen *Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka	Provinsi Bengkulu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu	Rp. 69.840.000	Rp. 69.840.000	100%	100%	100%	-
		3. UU No. 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggran 2024									

No	K/ LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kementerian Perdagangan	1. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	1. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri *Kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	Provinsi Bengkulu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu	Rp. 154.401.000	114,401,000	74%	100%	100%	Ada Blokir Autometic adjustmen sebesar Rp. 40.000.000
		2. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara									
		3. UU No. 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024									

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, 2025.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

NO	K/Lpnk	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan,Output, dan Rincian Kegaiatan	Lokasi	Skpd Pelaksanaan Tp	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kinerja	(%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**	**SP DIPA-**	**PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS**	**Provinsi Bengkulu**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Provinsi Bengkulu**	**46.406.085**	**46.395.393**	99,98			
			Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	**Provinsi Bengkulu**		**46.090.594**	**46.080.445**	**99,98**			
			- **Dukungan Teknis**			**60.832**	**60.832**				
			- Administrasi Kegiatan			60.832	60.832	**100**			
			- **OM Prasarana bidang Konektifitas Darurat (Jalan)**			**43.327.286**	**43.317.142**	**99,98**			
			- Preservasi Jalan Kerakaf - SP. Nakau (E Katalog)	Kab. Bengkulu Tengah		470.694	470.694	100,00			
			- Preservasi Jalan Kerakaf - SP. Nakau (E Katalog)	Kab. Bengkulu Tengah		4.470.574	4.470.574	100,00			
			- Preservasi Jalan Kerakaf - SP. Nakau (E Katalog)	Kab. Bengkulu Utara		31.961.692	31.961.692	100,00			
			- Penanganan Longsoran Kerkap-SP Nakau (JBT.LEMAU B) E KATALOG	Kab. Bengkulu Utara		5.583.844	5.583.844	100,00			
			- Penanganan Drainase dan Pemasangan Box Culvert (Off Pavement) Ruas Jalan WR. Supratman	Kota Bengkulu		438.472	428.564	97,74			
			- Preservasi Jalan Kerakap - SP. Nakau (SWAKLOLA)	Kab.Bengkulu Tengah		402.010	401.774	99,94			
			- **OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)**			**2.702.476**	**2.702.471**	**100,00**			
			- Preservasi Jalan Kerkap - SP Nakau (SWAKELOLA)	Kab. Bengkulu Utara		2.330.176	2.330.176	100,00			
			- Preservasi Jembatan Kerkap - SP Nakau (SWAKLOLA)	Kab. Bengkulu Utara		372.300	372.295	100,00			
			Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	**Provinsi Bengkulu**		**315.491**	**314.948**	**99,83**			
			Layanan Dukungan Manajemen Internal	**Provinsi Bengkulu**		**315.491**	**314.948**	**99,83**			
			- Persiapan dan Pemutakhiran Data Dasar	Bengkulu		9.950	9.949	99,99			
			- Pengelolaan Keuangan	Bengkulu		147.183	146.677	99,66			
			- Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang milik Negara (BMN)	Bengkulu		18.862	18.862	100,00			
			- Oprasional Satker dan PPK dan SKPD	Bengkulu		139.496	139.460	99,97			
2	**KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**		**PROGRAM KETAHANAN SUMBER DAYA AIR**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Provinsi Bengkulu**	**22.789.110**	**22.785.181**	**99,98**			
			Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana			**21.935.932**	**21.935.563**	**100,00**			
			- **OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air**			**21.935.932**	**21.935.563**	**100,00**			
			- Operasi Rutin D.I Air Manjunto	Kab. Mukomuko		1.246.520	1.246.344	99,99			
			- Operasi Rutin D.I Air Seluma	Kab. Seluma		1.274.389	1.274.314	99,99			
			- Operasi Rutin D.I Air Nipis Seginim	Kab. Bengkulu Selatan		1.035.599	1.035.519	99,99			

			- Operasi Rutin D.I Air Lais Kuro Tidur	Kab. Bengkulu Utara		833.145	833.120	100,00			
			- Operasi Rutin D.I Air Ketahun	Kab. Lebong		644.303	644.303	100,00			
			- Operasi Rutin D.I Air Alas	Kab. Seluma		997.252	997.244	100,00			
			- Pemeliharaan Berkala D.I Air Manjunto	Kab. Mukomuko		825.949	825.949	100,00			
			- Pemeliharaan Berkala D.I Air Seluma	Kab. Seluma		1.014.014	1.014.034	100,00			
			- Pemeliharaan Berkala D.I Air Nipis Seginim	Kab. Bengkulu Selatan		755.111	755.111	100,00			
			- Pemeliharaan Berkala D.I Air Lais Kuro Tidur	Bengkulu		1.092.268	1.092.268	100,00			
			- Pemeliharaan Berkala D.I Air Ketahun	Kab. Lebong		492.793	492.793	100,00			
			- Pemeliharaan Berkala D.I Air Alas	Kab. Seluma		706.371	706.346	100,00			
			- Pemeliharaan Rutin D.I Air Manjunto	Kab. Mukomuko		2.984.732	2.984.732	100,00			
			- Pemeliharaan Rutin D.I Air Seluma	Kab. Seluma		3.214.284	3.214.284	100,00			
			- Pemeliharaan Rutin D.I Air Nipis Seginim	Kab. Bengkulu Selatan		990.361	990.361	100,00			
			- Pemeliharaan Rutin D.I Air Lais Kuro Tidur	Kab. Bengkulu Utara		2.250.844	2.250.844	100,00			
			- Pemeliharaan Rutin D.I Air Ketahun	Kab. Lebong		212.499	212.499	100,00			
			- Pemeliharaan Rutin D.I Air Alas	Kab. Seluma		1.365.498	1.365.498	100,00			
			Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air			**853.178**	**849.618**	**99,58**			
			- Layanan Dukungan Manajemen Internal			**853.178**	**849.618**	**99,58**			
			- Administrasi Kegiatan	Kota Bengkulu		689.858	686.298	99,48			
			- Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Kota Bengkulu		163.320	163.320	100,00			

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, 2025.

5. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu

No	Nama Program, Kegiatan		Pagu (Rp)	Blokir AA (Rp)	Realisasi		%	Hambatan/ Permasalahan
					Anggaran (Rp)	Fisik		
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu			2.163.742.000	449.810.000	1.662.714.972			
A.	**Sekretariat Jenderal**		**346,000,000**	**146,276,000**	**188,796,464**	**1**	**94.53**	
	056	**Penyusunan Perencanaan Satker Dekonsentrasi**	**346,000,000**	**146,276,000**	**188,796,464**	**1**		
	AE 524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	146,276,000	146,276,000	0	0		Blokir AA
B	**Ditjen Perikanan Tangkap**		**405,324,000**	**109,556,000**	**294,522,000**	**1**	**99.58**	
	052	**Pelaksanaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan kewenangan daerah**						
	B 524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan kota	11,300,000	11,300,000	-	0		Blokir AA
	051	**Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan**						
	B 521211	Belanja Bahan	610,000	610,000	-	0		Blokir AA
	B 524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4,000,000	4,000,000	-	0		Blokir AA
	054	**Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Pengusahaan diPelabuhan Perikanan**						
	C 521211	Belanja Bahan	1,525,000	1,525,000	-	0		Blokir AA
	C 524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,250,000	4,250,000	-	0		Blokir AA
	052	**Supervisi dan Evaluasi Pengelolaan Perizinan Daerah**						
	D 521211	Belanja Bahan	4,630,000	4,630,000	-	0		Blokir AA

	D 524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,100,000	5,100,000	-	0		Blokir AA
	B 522151	Belanja Jasa Profesi	1,600,000	1,600,000	-	0		Blokir AA
	B 524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,500,000	4,500,000	-	0		Blokir AA
	051	**Identifikasi penguatan kapasitas Kelembagaan Nelayan**						
	B 521211	Belanja Bahan	5,300,000	5,300,000	-	0		Blokir AA
	B 522151	Belanja Jasa Profesi	1,600,000	1,600,000	-	0		Blokir AA
	051	**Pengumpulan dan Verifikasi Data Log Book penangkapan Ikan**						
	B 524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,795,000	4,795,000	-	0		Blokir AA
	051	**Koordinasi Perencanaan pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap**						
	B 521211	Belanja Bahan	646,000	646,000	-	0		Blokir AA
	B 521213	Belanja Honor Output Kegiatan	5,500,000	5,500,000	-	0		Blokir AA
	B 522151	Belanja Jasa Profesi	1,900,000	1,900,000	-	0		Blokir AA
	B 524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,800,000	5,800,000	-	0		Blokir AA
	B 524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,500,000	3,500,000	-	0		Blokir AA
	052	**Penyusunan dokumen perencaanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap**						
	B 521211	Belanja Bahan	1,500,000	1,500,000	-	0		Blokir AA
	B 524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8,000,000	8,000,000	-	0		Blokir AA

	052	**Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran**						
	B 521211	Belanja Bahan	3,000,000	3,000,000	-	0		Blokir AA
	B 524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,700,000	15,700,000	-	0		Blokir AA
	052	**Pengendalian internal pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap**						
	B 521211	Belanja Bahan	1,700,000	1,700,000	-	0		Blokir AA
	B 524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,500,000	4,500,000	-	0		Blokir AA
	B 524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8,600,000	8,600,000	-	0		Blokir AA
C	**Ditjen Perikanan Budidaya**		**414,470,000**	**102.533.000**	**310,387,725**	1	**99.50**	
	051	**Sampel Monitoring Residu**						
	B 522191	Belanja Jasa Lainnya	18,790,000	18,790,000	-	0		Blokir AA
	051	**Layanan Data dan Informasi**						
	B 524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,877,000	17,877,000	-	0		Blokir AA
	051	**Layanan Perencanaan dan Anggaran**						
	B 524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,456,000	17,456,000	-	0		Blokir AA
	051	**Layanan Pemantauan dan Evaluasi**						
	D 524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37,547,000	37,547,000	-	0		Blokir AA
	051	**Layanan Manajemen Keuangan**						
	B 524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,863,000	10,863,000	-	**0**		Blokir AA
D	**Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**		**171,652,000**	**-**	**168,116,068**	**1**	**97.94**	
E	**Ditjen Pengelolaan Ruang Laut**		**485,600,000**	**-**	**458,989,784**	**1**	**94.52**	

F	**Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**		**340,696,000**	**91,445,000**	**241,902,931**	**1**	**98.34**	
	051	**Kampanye Gemarikan yang dilaksanakan oleh daerah (Dekonsentrasi)**						
	C 521211	Belanja Bahan	21,200,000	21,200,000	-	**0**		Blokir AA
	051	**Pembinaan pra SKP/ GMP sertifikat**						
	B 521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5,567,000	5,567,000	-	**0**		Blokir AA
	052	**Layanan Data dan Informasi oleh Daerah**						
	B 524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34,374,000	34,374,000	-	**0**		Blokir AA
	053	**Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Satker Dekonsentrasi Lingkup Ditjen PDSPKP**						
	B 521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	30,304,000	30,304,000	-	**0**		Blokir AA

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten/Kota

Tugas Pembantuan Dari Daerah Provinsi Yang Ditugaskan Kepada Daerah Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun anggaran 2024 tidak memberikan tugas pembantuan kepada Kabupaten dan Kota se–Provinsi Bengkulu.

3.3. Permasalahan dan Kendala

3.3. 1. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

A. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu

a. Permasalahan

1. Akses jalan di lokasi Transmigrasi belum memadai, hal ini berdampak pada peningkatan taraf hidup warga Trans itu sendiri.
2. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh warga tarnsmigrasi yang baru mengenai cara bercocok tanam yang baik dan benar.
3. Kurangnya informasi mengenai Daerah tujuan bagi warga transmigran.
4. Kurangnya data-data mengenai wilayah-wilayah transmigrasi sebelumnya.

b. Upaya Tindak Lanjut

1. Melakukan Perbaikan jalan agar dapat meningkatkan taraf hidup warga Tansmigrasi.
2. Mengadakan pelatihan-pelatihan bagi warga transmigran.
3. Memberikan informasi mengenai keadaan daerah tujuan baik potensi maupun kekurangan-kekurangan yang dimiliki daerah tujuan.
4. Berusaha mencari data-data mengenai wilayah-wilayah transmigrasi yang ada di Provinsi Bengkulu dengan instansi/lembaga-lembaga lainnya.

B. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu

Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan baik dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ada beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak dapat direalisasikan karena di Blokir sehingga menyebabkan penurunan realisasi fisik dan anggaran.

C. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

1. Secara umum dalam melaksanakan pekerjaan Tahun anggaran 2024 ini SKPD-TP tidak mengalami masalah secara signifikan
2. Kurangnya Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke saluran dan menumpuk sampah di tanggul.
3. Bangunan – bangunan liar masih sulit ditertibkan baik pada saluran primer maupun saluran sekunder.
4. Masih banyaknya masyarakat yang menanam pohon pada tanggul saluran.

D. Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu pada periode Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya realisasi di triwulan I dan II dikarenakan terkendala penyesuaian Rincian Kertas Kerja dengan Petunjuk Teknis Final yang di keluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI serta lambatnya proses administrasi penggantian KPA pada bulan April yang sedikit menghambat proses administrasi keuangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.
2. Jadwal event daerah yang tidak tetap mengakibatkan perencanaan anggaran yang tidak tepat sehingga butuh waktu untuk melaksanakan revisi anggaran pada halaman III DIPA.

E. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu

Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dari seluruh Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan ada beberapa Kegiatan / Sub Kegiatan yang tidak dapat direalisasikan karena di Blokir sehingga menyebabkan penurunan realisasi fisik dan anggaran.

3.4 Saran dan Tidak Lanjut

3.4.1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

Saran dan tindak lanjut dari permasalahan kendala kegiatan Tugas Pembantuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

1. Harapan kami mudah mudahan di tahun depan anggaran yang di berikan kepada SKPD- TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dapat ditingkatkan. Penambahan teknologi informasi sangat kami harapkan mengingat pelaksanaan penyampaian informasi melalui *off meeting*
2. Pengawasan dan Penertiban Melakukan patroli dan inspeksi rutin pada saluran primer dan sekunder
3. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan tanggul secara berkala untuk memastikan stabilitas dan fungsionalitasnya
4. Mengadakan forum atau sosialisasi untuk mendengarkan masukan dan keluhan masyarakat terkait penataan ruang dan pengelolaan saluran air
5. Mengimplementasikan sistem monitoring untuk memantau kondisi saluran air dan tanggul
6. Mengadakan rapat koordinasi secara berkala untuk memastikan semua pihak terlibat dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan dan ketertiban saluran air.

3.4.2. Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

Saran dan tindak lanjut dari permasalahan kendala kegiatan Tugas Pembantuan Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan terkait petunjuk teknis final dari kementerian hendaknya dikeluarkan pada awal tahun sehingga satker dapat menyesuaikan rencana kertas kerja dengan juknis berlaku serta satker terkait untuk lebih intens berkomunikasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI untuk persiapan pelaksanaan kegiatan
2. Pemerintah Daerah hendaknya memiliki ketetapan atas tanggal pelaksanaan event di daerah sehingga dapat terencana dan terorganisir dengan baik.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan di adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Dasar, dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMA/SMK/MA).
2. Pendidikan anak khusus dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 5-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SLB.

4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan pada Peraturan Kementerian Pendidikan Nomor 9 Tahun 2018, sebagai acuan dalam pencapaian yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Target SPM Urusan Pendidikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET	
			2023	2024
1	Pendidikan Menengah	RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI SMA BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	66.63	68.50
		RATA-RATA KOMPETENSI NUMERASI SMA BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	54.08	56,2
		JUMLAH WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPATISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100	100
		IKLIM KEAMANAN SMA	75.80	77.80
		IKLIM KEBINEKAAN SMA	69.12	71.49
		IKLIM INKLUSIF SMA	59.43	62.43
		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUNDALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100	100
		RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI SMK BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	61.04	62.17
		RATA-RATA KOMPETENSI NUMERASI SMK BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	50.77	52.72

		TINGKAT PENYERAPAN KELULUSAN SMK	85.96	88.37
		TINGKAT KEPUASAN DUNIA KERJA TERHADAP KELULUSAN SMK	79.00	79.00
		IKLIM KEAMANAN SMK	72.45	74.45
		IKLIM KEBINEKAAN SMK	66.84	71.49
		IKLIM INKLUSIF SMK	56.90	59.06
2	Pendidikan Khusus	JUMLAH WARGA NEGARA USIA 4-18 TAHUN YANG TERMASUK DALAM PENDUDUK DISABILAH YANG BERPATISIPASI DALAM PENDIDIKAN KHUSUS	100	100
		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 4-18 TAHUN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENDIDIKAN KHUSUS	100	100
		RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI SDLB BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	66.54	67.04
		RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI SMPLB BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	48.31	49.31
		RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI SMALB BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	59.80	60.80
		RATA-RATA KOMPETENSI NUMERASI SDLB DASARKAN ASESMAN NASIONAL	65.30	65.30
		RATA-RATA KOMPETENSI NUMERASI SMPLB DASARKAN ASESMAN NASIONAL	53.84	54.59
		RATA-RATA KOMPETENSI NUMERASI SMALB DASARKAN ASESMAN NASIONAL	51.50	53.48
		IKLIM KEAMANAN SDLB	84.02	84.02
		IKLIM KEAMANAN SMPLB	72.19	73.19
		IKLIM KEAMANAN SMALB	70.75	72.75
		IKLIM KEBINEKAAN SDLB	68.59	69.09
		IKLIM KEBINEKAAN SMPLB	65.33	67.56
		IKLIM KEBINEKAAN SMALB	67.33	69.51
		IKLIM INKLUSIF SDLB	6.57	62.07
		IKLIM INKLUSIF SMPLB	62.14	65.44
		IKLIM INKLUSIF SMALB	66.60	69.96

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, 2025.

4.1.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Realisasi Capaian SPM Urusan Pendidikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2024

NO	INDIKATOR SPM	TARGET CAPAIAN NASIONAL	TARGET CAPAIAN PROVINSI
1	RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI SMA BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	70.34	67,42
2	JUMLAH WARGA NEGARA USIA 4-18 TAHUN YANG TERMASUK DALAM PENDUDUK DISABILAH YANG BERPATISIPASI DALAM PENDIDIKAN KHUSUS	100	100
3	RATA-RATA KOMPETENSI NUMERASI SMA BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	59	57,4
4	JUMLAH WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPATISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100	80,15
5	RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI SMK BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	66	62,3
6	RATA-RATA KOMPETENSI NUMERASI SMK BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	55	53,44
7	RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI SDLB BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	68	67,4

8	RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI SMPLB BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	72	58,49
9	RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI SMALB BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	64	56,35
10	RATA-RATA KOMPETENSI NUMERASI SDLB DASARKAN ASESMAN NASIONAL	55	40,25
11	RATA-RATA KOMPETENSI NUMERASI SMPLB DASARKAN ASESMAN NASIONAL	63.67	50,15
12	RATA-RATA KOMPETENSI NUMERASI SMALB DASARKAN ASESMAN NASIONAL	58	52,45
13	TINGKAT PENYERAPAN KELULUSAN SMK	90	87,23
14	TINGKAT KEPUASAN DUNIA KERJA TERHADAP KELULUSAN SMK	82	81,47
15	IKLIM KEAMANAN SMA	77	71,44
16	IKLIM KEAMANAN SMK	74	68,35
17	IKLIM KEAMANAN SDLB	78	73,15
18	IKLIM KEAMANAN SMPLB	77	65,35
19	IKLIM KEAMANAN SMALB	76	70,37
20	IKLIM KEBINEKAAN SMA	82	72,19
21	IKLIM KEBINEKAAN SMK	77	70,33
22	IKLIM KEBINEKAAN SDLB	75	63,05
23	IKLIM KEBINEKAAN SMPLB	71	63,65
24	IKLIM KEBINEKAAN SMALB	70	69,27
25	IKLIM INKLUSIF SMA	63	58,39
26	IKLIM INKLUSIF SMK	58,83	56,16
27	IKLIM INKLUSIF SDLB	61	56,01
28	IKLIM INKLUSIF SMPLB	70.20	64,15
29	IKLIM INKLUSIF SMALB	68	71,68
30	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUNDALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100	80,49
31	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 4-18 TAHUN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENDIDIKAN KHUSUS	100	75,66

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, 2025.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi angggaran tahun 2024 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dalam rangka pencapaian target SPM bidang pendidikan Provinsi Bengkulu berjumlah 31 terdiri dari program satu (1) dengan jumlah nilai dan program dengan jumlah Rp. 279.531.966.200,-

4.1.5 Dukungan Personil

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di Provinsi Bengkulu pada Tahun 2024 sangat tergantung juga dari dukungan personil sebagai pelaksana program/kegiatan pembangunan kualitas pendidikan. Sampai dengan Desember 2024

Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu telah didukung oleh personil sebangyak 19 personil dengan rincian Kepala Dinas, ketua dan anggota yang terdiri dari 17 personil yang terdiri dari bidang, uptd dan perencanaan.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang ditemui dalam proses pencapaian SPM tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM
Urusan Pendidikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2024

No	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1	RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI SMA BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	Kurangnya Fasilatasi Pendukung,siswa kurang tertarik mendatangi Perpustakaan dan terbatasnya Akses Internet di beberapa Daerah	Meningkatkan Kualitas Perpustakaan
2	JUMLAH WARGA NEGARA USIA 4-18 TAHUN YANG TERMASUK DALAM PENDUDUK DISABILAH YANG BERPATISIPASI DALAM PENDIDIKAN KHUSUS	Kurangnya Saranan dan Prasaranan pendukung siswa disabilitas	Meningkatakan Saranan dan Prasarana disetiap satuan pendidikan Khusus
3	RATA-RATA KOMPETENSI NUMERASI SMA BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	Murid dianggap kurang memiliki bakat dalam Matematika atau mungkin kurang memiliki niat, dan tidak menyukai Matematika dan kurangnya pengmahaman guru terhadap konten matematika yang akan diajarkan kepada murid	Meningkatkan kuatias guru dengan mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik
4	JUMLAH WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPATISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Kurangnya Saranan dan Prasaranan pendukung siswa	Meningkatakan Saranan dan Prasarana disetiap satuan pendidikan Menengah
5	RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI SMK BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	Kurangnya Fasilatasi Pendukung,siswa kurang tertarik mendatangi Perpustakaan dan terbatasnya Akses Internet di beberapa Daerah	Meningkatkan Kualitas Perpustakaan
6	RATA-RATA KOMPETENSI NUMERASI SMK BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	Murid dianggap kurang memiliki bakat dalam Matematika atau mungkin kurang memiliki niat, dan tidak menyukai Matematika dan kurangnya pengmahaman guru terhadap konten matematika yang akan diajarkan kepada murid	Meningkatkan kuatias guru dengan mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik

7	RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI SDLB BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	Kurangnya Fasilatasi Pendukung,siswa kurang tertarik mendatangi Perpustakaan dan terbatasnya Akses Internet di beberapa Daerah	Meningkatkan Kualitas Perpustakaan
8	RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI SMPLB BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	Kurangnya Fasilatasi Pendukung,siswa kurang tertarik mendatangi Perpustakaan dan terbatasnya Akses Internet di beberapa Daerah	Meningkatkan Kualitas Perpustakaan
9	RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI SMALB BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	Kurangnya Fasilatasi Pendukung,siswa kurang tertarik mendatangi Perpustakaan dan terbatasnya Akses Internet di beberapa Daerah	Meningkatkan Kualitas Perpustakaan
10	RATA-RATA KOMPETENSI NUMERASI SDLB DASARKAN ASESMAN NASIONAL	Kurangnya Saranan dan Prasaranan pendukung siswa	Meningkatakan Saranan dan Prasarana disetiap satuan pendidikan
11	RATA-RATA KOMPETENSI NUMERASI SMPLB DASARKAN ASESMAN NASIONAL	Kurangnya Saranan dan Prasaranan pendukung siswa	Meningkatakan Saranan dan Prasarana disetiap satuan pendidikan
12	RATA-RATA KOMPETENSI NUMERASI SMALB DASARKAN ASESMAN NASIONAL	Kurangnya Saranan dan Prasaranan pendukung siswa	Meningkatakan Saranan dan Prasarana disetiap satuan pendidikan
13	TINGKAT PENYERAPAN KELULUSAN SMK	ketidaksinkronan antara kompetensi yang dihasilkan dengan kebutuhan industri lulusan SMK	Meningkatkan sekil, pengetahuan, dan perilaku Siswa
14	TINGKAT KEPUASAN DUNIA KERJA TERHADAP KELULUSAN SMK	masih banyak kesenjangan lulusan SMK dengan kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan	sekolah menengah kejuruan perlu program-program untuk meningkatkan sumber daya pendidikan di SMK yang lebih efisien dan efektif
15	IKLIM KEAMANAN SMA	Iklim keamanan mengalamai penurunan	perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan
16	IKLIM KEAMANAN SMK	Iklim keamanan mengalamai penurunan	perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan
17	IKLIM KEAMANAN SDLB	Iklim keamanan mengalamai penurunan	perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan
18	IKLIM KEAMANAN SMPLB	Iklim keamanan mengalamai penurunan	perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan
19	IKLIM KEAMANAN SMALB	Iklim keamanan mengalamai penurunan	perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan
20	IKLIM KEBINEKAAN SMA	Kurangnya kepedualian terhadap lingkungan	meningkatkan rasa perduli terhadap lingkungan

21	IKLIM KEBINEKAAN SMK	Kurangnya kepedualian terhadap lingkungan	meningkatkan rasa perduli terhadap lingkungan
22	IKLIM KEBINEKAAN SDLB	Kurangnya kepedualian terhadap lingkungan	meningkatkan rasa perduli terhadap lingkungan
23	IKLIM KEBINEKAAN SMPLB	Kurangnya kepedualian terhadap lingkungan	meningkatkan rasa perduli terhadap lingkungan
24	IKLIM KEBINEKAAN SMALB	Kurangnya kepedualian terhadap lingkungan	meningkatkan rasa perduli terhadap lingkungan
25	IKLIM INKLUSIF SMA	kurangnya pengetahuan guru tentang anak berkebutuhan khusus	meningkatkan kuatias guru dengan mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik
26	IKLIM INKLUSIF SMK	kurangnya pengetahuan guru tentang anak berkebutuhan khusus	meningkatkan kuatias guru dengan mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik
27	IKLIM INKLUSIF SDLB	kurangnya pengetahuan guru tentang anak berkebutuhan khusus	meningkatkan kuatias guru dengan mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik
28	IKLIM INKLUSIF SMPLB	kurangnya pengetahuan guru tentang anak berkebutuhan khusus	meningkatkan kuatias guru dengan mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik
29	IKLIM INKLUSIF SMALB	kurangnya pengetahuan guru tentang anak berkebutuhan khusus	meningkatkan kuatias guru dengan mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik
30	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUNDALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Kurangnya Saranan dan Prasaranan pendukung siswa	Meningkatakan Saranan dan Prasarana disetiap satuan pendidikan Menengah
31	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 4-18 TAHUN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENDIDIKAN KHUSUS	Kurangnya Saranan dan Prasaranan pendukung siswa	Meningkatakan Saranan dan Prasarana disetiap satuan pendidikan Menengah

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, 2025.

4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang

selanjutnya menjadi jenis SPM salah satunya adalah SPM Bidang Kesehatan. Terdapat 2 (dua) Jenis Pelayanan dan Indikator SPM Kesehatan Provinsi Bengkulu (Pergub 29 Tahun 2020) yaitu;

1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi dengan Indikator :Jumlah warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat layanan kesehatan
2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) provins dengan Indikator : Jumlah warga Negara pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) provinsi yang mendapat layanan Kesehatan.

4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan pada Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, sebagai acuan dalam pencapaian yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Rencana Capaian dan Indikator Layanan SPM Bidang Kesehatan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target Nasional (%)	Target 2023 (%)	Target 2024 (%)
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100	100	100
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2025.

4.2.3 Realisasi

Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan SPM urusan Kesehatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Realisasi Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Indikator SPM	Target Capaian Nasional (%)	Target Capaian Provinsi (%)	Capaian 2024 (%)
1	Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100	100	100
2	Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2025.

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2024 Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu untuk pelaksanaan SPM kesehatan berjumlah 1.175.000.000,- terdiri dari program kegiatan Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dengan jumlah nilai Rp.125.000.000,- program kegiatan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi dengan nilai Rp.50.000.000,- dan program kegiatan Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dengan nilai 1.000.000,.000,-

4.2.5 Dukungan Personil

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Provinsi Bengkulu pada Tahun 2024 sangat tergantung juga dari dukungan personil sebagai pelaksana program/kegiatan pelayanan Kesehatan. Sampai dengan Desember 2024 Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu telah didukung oleh personil Tim manajemen Krisis Kesehatan, team *Emergency*

Medical Team (EMT) Tingkat Provinsi dan seluruh SDMK jejaring Pelayanan kesehatan yang ada di seluruh Kabupaten/Kota.

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.6
Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan SPM Urusan Kesehatan di Provinsi Bengkulu Tahun 2024

No	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1.	Jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	1. Masih perlu peningkatan anggaran untuk pelayanan yang lebih baik 2. Dinas belum memiliki SDM dan Organisasi Khusus penanggulangan Bencana	1. Peningkatan sarana dan prasarana guna peningkatan mutu pelayanan, Peningkatan SDM/K daerah resiko guna mengurangi Dampak Bencana 2. Pembentukan UPTD/Seksi Khusus yang menangani sistem Bencana dan Kegawatdaruratan terpadu
2.	Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan khusus.	1. Kurangnya keterampilan SDM dan pergantian petugas Kab/Kota 2. Kasus penyakit potensial KLB / wabah Kab/Kota tidak terlapor 3. Jejaring surveilans tidak berjalan hingga ke desa 4. Sarana dan Prasarana yg butuh peningkatan	1. Pelatihan keterampilan untuk para tenaga medis 2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana 3. Komitmen bersama antara Provinsi dengan kabupaten 4. Peningkatan anggaran

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2025.

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan standar pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar dalam PerMen PUPR RI Nomor 13 Tahun 2023, tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Provinsi terdiri atas pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota diberikan melalui Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota. Mutu pelayanan dasar terdiri atas :

a. Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas Air Minum,
b. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas Air Minum dan
c. Mutu Pelayanan Dasar penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik berupa ukuran kuantitas dan kualitas pelayanan.

4.3.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari : 25.988 orang
b. Jaringan Perpipaaan yang terdiri atas :

   Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM : 6.497 SR.

   Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau : 6.497 SR.
c. Bukan Jaringan Perpipaan yang terdiri atas :

Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM : 0 SR.

Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau : 0 SR

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota :

- Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik : 0 orang. Terdiri dari :

  Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik : 0 SR.

  Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T : 0 SR.

  Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar : 0 SR.

4.3.3 Realisasi

Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota :

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari : 25.988 orang untuk **realiasinya 0.**

b. Jaringan Perpipaaan yang terdiri atas :

Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM : 6.497 SR **realiasinya 0.**

Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau : 6.497 SR **realiasinya 0.**

c. Bukan Jaringan Perpipaan yang terdiri atas :

Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM : 0 SR **realiasinya 0.**

Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau : 0 SR **realiasinya 0.**

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota :

a. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik : 0 orang. Terdiri dari :

Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik : 0 SR **realiasinya 0.**

Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T : 0 SR **realiasinya 0.**

Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar : 0 SR **realiasinya 0**

4.3.4 Alokasi Anggaran

a. Untuk alokasi anggaran jenis pelayanan Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota sebesar Rp. 74.911.272.740.
b. Untuk alokasi anggaran jenis Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota sebesar Rp. 1.000.000.000.

4.3.5 Dukungan Personil

Walaupun pelayanan urusan Pekerjaan Umum belum dialokasikan penganggarannya dalam pelaksanaan SPM urusan ini, ada 9 (Sembilan) personil terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf yang melaksanakan jenis pelayanan dasar SPM di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu.

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Untuk permasalahan pada jenis pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota **:**

a. Bangunan fisik dan jaringan perpipaan selesai diakhir tahun 2024, menyisakan 1 rumah offtake yang dianggarkandi tahun anggaran 2025.

b. Keterbatasan anggaran daerah untuk pembangunan SPAM Regional sehingga baru selesai di tahun anggaran 2024.
c. Saat ini masih dalam penyiapan dokumen untuk sanitasi diantaranya adalah Jakstrada SanitasiRegional dan Studi Kelayakan Sanitasi Regional (tahun anggaran 2024).

Untuk solusi pada jenis pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota :

a. Uji comissioning SPAM Regional KOBEMA baru dilaksanakan dari intake menuju IPA di tahun anggaran 2024.
b. Uji comissioning SPAM Regional KOBEMA lanjutan (IPA sampai ke SR) akan dilaksanakan ditahun anggaran 2025.
c. Pada tahun 2025 dilakukan legalisasi dokumen RISPAM yang disusun tahun 2023 menjadi Pergub RISPAM Provinsi Bengkulu.
d. Tahun anggaran 2025 direncanakan penyusunan dokumen Masterplan Sanitasi Provinsi Bengkulu.
e. Pada tahun 2025 dilakukan legalisasi dokumen JASTRADA SANITASI yang disusun tahun 2024 menjadi Perda JAKSTRADA SANITASI Provinsi Bengkulu
f. Pembangunan fisik SPALD Regional akan dianggarkan melalui APBN dan APBD setelah seluruh RC dilengkapi.

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang SPM Bidang PUPR disebutkan bahwa Standar Pelayanan MInimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. untuk Bidang urusan Perumahan rakyat mencakup SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah provinsi dan SPM Perumahan Rakyat daerah Kabupaten/Kota. Adapun jenis Pelayanan Dasar Pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi adalah :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana

provinsi.

2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi msyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi

4.4.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Dalam Peraturan Mentri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang SPM PUPR disebutkan bahwa Penyediaan dan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana dilaksanakan melaui :

a. Rehabilitasi Rumah
b. Pembangunan kembali Rumah (Rekonstruksi)
c. Pemukiman Kembali (Relokasi)
d. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni

Dengan Ketentuan :

a. Dilaksanakan saat masa pasca bencana
b. Terdapat surat penetapan status bencana Provinsi dari Kepala Daerah
c. Sesuai jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dengan demikian target pencapaian SPM Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran berjalan akan ditentukan oleh jumlah unit rumah rusak yang terjadi pada tahun tersebut yang dituangkan dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

4.4.3 Realisasi

Karena pada tahun anggaran 2024 tidak terjadi bencana alam skala provinsi,maka anggaran yang disiapkan untuk penanganan SPM yang meliputi 2 Sub kegiatan tidak direalisasikan dan pada perubahan APBD dialihkan ke sub kegiatan lain.

Tabel 4.7
Sub Kegiatan untuk Penanganan SPM

	Kegiatan	Pagu Awal	APBD Perubahan	Realisasi
1.	Pendataan Tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Rp.70.000.000	Rp.35.000.000	Rp.10.808.000
2.	Pembangunan rumah bagi korban bencana provinsi	Rp.285.000.000 (Untuk Target 13 Unit Rumah)	Rp.6.000.000	Rp. 0

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Prov. Bengkulu, 2025.

Hal ini dilakukan karena tidak ada bencana provinsi yang terjadi, sedangkan berdasarkan Peraturan Mentri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 Pelaksanaan SPM diawali dari penetapan bencana provinsi oleh Gubernur.

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penyelenggaraan 2 (Dua) jenis SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2014 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan provinsi Bengkulu yang bersumber dari APBD dengan total pagu OPD sebesar 16.489.721.867 sedangkan anggaran yang tersedia untuk penyelanggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat sebesar Rp.355.000.000 dengan realisasi Rp.10.808.000 karena tidak terjadi bencana alam skala provinsi.

4.4.5 Dukungan Personil

Dalam pencapayan SPM Bidang Perumahan di dukung oleh personil pada Dinas Perumahan,Kawasan permukiman dan pertanahan provinsi bengkulu sebanyak 52 orang. Dengan rincian 8 orang pejabat struktural,8 orang sub koordinator, pelaksana sebanyak 36 orang dan THL sebanyak 6 orang.

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.8
Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan
SPM Urusan Perumahan Rakyat di Provinsi Bengkulu Tahun 2024

No	INDIKATOR SPM	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Rehabilitasi rumah korban bencana provinsi	Tidak Ada Bencana Skala Provinsi	-
2	Relokasi rumah masyarakat yang terkena relokasi program pemda provinsi	Tidak ada program relokasi oleh pemda provinsi	-

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Prov. Bengkulu, 2025.

4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum/masyarakat dan penegakan perda/perkada sesuai SOP.
- Penanganan terhadap warga yang terkena dampak penegakan perda dan perkada.
- Peningkatan pembinaan dan kapasitas anggota Satpol PP, PPNS dan anggota Satlinmas.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Satpol PP dan Satlinmas.
- Penyediaan dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemenuhan Standar pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana daerah Kabupaten/Kota.
- Penanganan Tanggap darurat Bencana.
- Penangangan pasca bencana.

- Penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran.
- Penyusunan rencana induk sistim proteksi kebakaran.

4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan pada Permendagri 59 Tahun 2021, sebagai acuan dalam pencapaian yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.9
Target SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Bengkulu Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Nasional	Capaian 2024	Target	Rencana Pembiayaan (Rp. 000)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di provinsi	100%	100 %	100 %	820.000.000

Sumber : Satpol PP Provinsi Bengkulu, 2025.

4.5.3 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat pada tahun 2024 tidak terlepas dari peran serta positif dari pemerintah daerah maupun masyarakat di Provinsi Bengkulu terhadap pemenuhan SPM yang direalisasikan sebagai berikut :

Tabel 4.10
Realisasi Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas
di Provinsi Bengkulu Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian Nasional	Target Capaian Provinsi	Capaian 2024
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di provinsi	99%	99 %	781.720.769

Sumber : Satpol PP Provinsi Bengkulu, 2025.

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran di Satpol. PP Provinsi Bengkulu untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada urusan ketentraman, ketertiban Umum, perlindungan masyarakat pada Tahun 2024 sebesar. Rp 820.000.000,-

4.5.5 Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu pada Tahun 2024 didukung oleh personil sebanyak 219 orang. Jumlah pegawai Satpol PP perbulan Desember 2024 adalah sebanyak 219 Orang dengan status sebagai Aparatur Sipil Negara sebanyak 64 orang dan Non Aparatur Sipil Negara sebanyak 155 Orang.

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.11
Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan SPM
Urusan Tratibumlinmas di Provinsi Bengkulu Tahun 2024

No	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di provinsi	1. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan patroli Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu. 2. Kurangnya tenaga SDM yang profesional untuk mendukung kegiatan di lapangan berdasarkan pada bidangnya masing-masing.	1. Mengajukan alokasi anggaran berkaitan sarana prasarana yang belum tersedia dengan berkoordinasi dan berkonsultasi pada pihak Pemerintah Daerah maupun pemerintah pusat melalui bantuan keuangan. 2. Merencanakan bimtek dan diklat untuk mendukung tenaga professional di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu

Sumber : Satpol PP Provinsi Bengkulu, 2025.

4.6. Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Kementerian Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM salah satunya adalah SPM Bidang Sosial. Jenis Pelayanan Dasar Bidang Sosial di adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas didalam panti
2. Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar didalam panti
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia terlantar didalam panti
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial didalam panti

5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi

4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel 4.12
Target SPM Sosial Tahun 2024

No	Indikator SPM	Target Nasional	Capaian Daerah 2023	Target Daerah 2024	Rencana Pembiayaan (Rp)
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	100%	100%	100%	290.390.800,-
2	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	100%	100%	100%	397.180.000,-
3	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%	100%	100%	1.143.960.000,-
4	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	100%	100%	100%	-
5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100%	100%	100%	100.000.000

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, 2025.

4.6.3 Realisasi

Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan SPM bidang Sosial Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13
Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial di Provinsi Bengkulu Tahun 2024

NO	Indikator SPM	Target Daerah 2024	Capaian Daerah	Realisasi Anggaran
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	100%	100%	270..390.800,-
2	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	100%	100%	397.180.000,-
3	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%	100%	1.143.960.000,-
4	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	100%	100%	-
5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100%	100%	100.000.000,-

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, 2025.

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penyelenggaraan 4 (empat) jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial tahun 2024 pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu yang bersumber dari APBD dengan total pagu OPD sebesar Rp. 23.539.763.503,- sedangkan anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan SPM bidang sosial sebesar Rp.1.931.530.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.894.553.800.

4.6.5 Dukungan Personil

Dalam Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Provinsi Bengkulu pada Tahun 2024 sangat tergantung juga dari dukungan personil sebagai pelaksana program/kegiatan pembangunan kesejahteraan

sosial. Sampai dengan Desember 2024, Dinas Sosial Provinsi Bengkulu terlah didukung oleh personil sebangyak 143 personil dengan rincian 14 orang Pejabat struktural, 10 orang Sub Koordinator, Pelaksana sebanyak 88 orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 31 orang.

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.14
Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan SPM
Urusan Sosial di Provinsi Bengkulu Tahun 2024

No	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	- Pemerintah Provinsi Bengkulu belum memiliki panti sosial bagi disabilitas didalam panti, yang selama ini mengaju pada lembaga/panti milik masyarakat wewenang provinsi - Dukungan Pemerintah Daerah dalam pengangganggaran bagi penyandang disabilitas tidak maksimal	- Pembentukan panti sosial bagi penyandang disabilitas - TAPD memaksimalkan anggaran pada OPD Dinas Sosial untuk penerapan SPM
2	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	- Dukungan anggaran pada OPD dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar didalam panti yang sangat tidak maksimal - Sarana dan prasarana yang kurang memadai	- Telah mengajukan penambahan anggaran pada Dinas Sosial provinsi Bengkulu terutama dalam pelaksanaan SPM dalam pemenuhan kebutuhan dasar penyediaan permakanan didalam panti - Telah mengusulkan penambahan anggaran untuk penyediaan asrama yang layak bagi kelayan panti

3	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	- Dukungan anggaran pada OPD dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar didalam panti yang sangat tidak maksimal - Sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga UPTD tidak dapat menambah calon kelayan panti	- Telah mengajukan penambahan anggaran pada Dinas Sosial provinsi Bengkulu terutama dalam pelaksanaan SPM dalam pemenuhan kebutuhan dasar penyediaan permakanan didalam panti - Telah mengusulkan penambahan anggaran untuk penyediaan asrama yang layak bagi kelayan panti
4	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	- Pemerintah Provinsi Bengkulu belum memiliki panti sosial bagi gelandangan dan pengemis didalam panti, yang selama ini mengaju pada rumah singgah kab/kota - Kurangnya dukungan Kab/kota dalam penanganan gelandangan dan pengemis	- Pembentukan panti sosial bagi gelandangan dan pengemis - Telah melakukan koordinasi dan monitoring dengan Dinas Sosial kab/Kota
5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	- Dukungan anggaran yang tidak maksimal dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bancana alam dan sosial	- Telah melakukan koordinasi dangan pihak terkait dalam memaksimalkan anggaran pada OPD dalam penannganan bencana

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, 2025.

4.7 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan SPM di Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15

Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Urusan Trantibbumlinmas Tahun 2024

NO	KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dan Cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan	Persen	50.000.000,-	APBD	49.808.500,-
				Kerja sama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan kejahatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	persen	500.000.000	APBD	499.748.721

				Koordinasi penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan msyarakat tingkat provinsi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, umum dan perlindungan msyarakat tingkat provinsi	persen	6.000.000.000	APBD	5.969.732.803
				Penyediaan layanan dasar dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga yang terdampak penegakan perda dan perkada	persen	50.000.000	APBD	47.953.341
				Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja melalui pelatihan teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Jumlah aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis satuan Polisi Pamong Praja	Persen	50.000.000	APBD	46.009.200

2	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Persen	50.000.000,-	APBD	49.877.000,-
				Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernu	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur	persen	40.000.000	APBD	39.059.000
				Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	persen	50.000.000	APBD	49.573.000

3			**Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil PPNS**	**Pengembangan kapasitas dan dan karir PPNS**	**Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan perda**	**Persen**	**30.000.000**	**APBD**	**29.959.204**

Sumber : Satpol PP Provinsi Bengkulu, 2025.

Tabel 4.16
Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Urusan Sosial Tahun 2024

No	Program	Indikator	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Rehabilitasi sosial	Persentase Kelompok Rentan yang mendapatkan Pelayanan	➢ Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar di dalam Panti ➢ Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar didalam Panti ➢ RehabilitasiSosial Dasar Lanjut Usia Terlantar didalam Panti	270..390.800, 397.180.000,- 1.143.960.000,-

2.	Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani.	Perlindungan sosial korban bencana dan bantuan jaminan sosial	100.000.000

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, 2025.

Tabel 4.17
Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Urusan Perumahan Tahun 2024

NO	Program	Indikator	Kegiatan	Pagu Anggaran	
				Awal	Perubahan
1	Pengembangan Perumahan	Persentase rumah masyarakat korban bencana alam yang di rehabilitasi atau direlokasi	1. Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Rp.70.000.000	Rp.35.000.000
			2. Pembangunan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi	Rp.285.000.000	Rp.6.000.000

Sumber : Dinas Perkimtah Provinsi Bengkulu, 2025.

Tabel 4.18
Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Program	Indikator	Kegiatan	Anggaran
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1.Kaji Cepat kerusakan akibat bencana Bidang kesehatan. 2.Koordinasi dan Pendampingan pelayanan kesehatan kepada penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rp.125.000.000,-
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Koordinasi dan Pendampingan pelayanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Rp.50.000.000,-

3	Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehata	Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan pengurangan resiko krisis kesehatan di Kab/Kota	Pelayanan kesehatan dan sosialisasi kesehatan kepada Penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rp.1.000.000.000,-
	Jumlah			Rp.1.175.000.000,-

Tabel 4.19
Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Urusan Pendidikan Tahun 2024

NO	PROGRAM	INDIDKATOR	KEGIATAN	Subkegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Program Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya Layanan Pendidikan Menengah Atas	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMA	6.370.400.000	6.291.196.532
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	9.376.174.000	9.184.399.627
				Pengadaan Mebel Sekolah	2.670.930.800	2.628.424.800
				Pengadaan Alat Peraga Siswa	11.411.950.000	11.308.615.400
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.450.000.000	2.427.537.466
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SMA	35.436.650.040	35.405.064.870
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan SMA	125.000.000	120.142.000
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	200.000.000	189.764.000
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	470.000.000	420.353.780

				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	83.428.540.000	81.235.605.743
		Meningkatnya Layanan Pendidikan Menengah Kejuruan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	9.874.344.000	9.764.387.221
				Pengadaan Mebel Sekolah	956.062.000	934.580.000
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	35.417.801.203	34.880.414.760
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.080.000.000	1.030.903.755
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SMK	150.000.000	149.274.775
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	1.050.000.000	1.049.599.247
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	51.018.380.000	44.130.653.743
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan SMK	175.000.000	169.000.000
				Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	838.186.650	834.245.572
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.296.000.000	1.284.526.763
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMK	21.821.082.400	21.503.815.251
				Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	540.000.000	539.816.000
		Meningkatnya Layanan Pendidikan Khusus	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.520.594.000	977.490.200
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	150.000.000	96.311.360
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	100.692.250	79.138.546

				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	50.000.000	43.774.904
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	6.110.860.000	5.450.886.773
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Khusus	25.000.000	14.550.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.928.966.400	1.730.053.763
				Pembangunan Ruang Kelas Baru Pendidikan Khusus	1.124.450.870	1.109.826.173
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Pendidikan Khusus	400.000.000	360.536.291
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.416.388.350	4.187.076.940
Total					**291.983.452.963**	**279.531.966.255**

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan di adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Dasar, dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMA/SMK/MA).
2. Pendidikan anak khusus dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 5-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SLB.

4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan pada Peraturan Kementerian Pendidikan Nomor 9 Tahun 2018, sebagai acuan dalam pencapaian yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Target SPM Urusan Pendidikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET	
			2023	2024
1	Pendidikan Menengah	RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI SMA BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	66.63	68.50
		RATA-RATA KOMPETENSI NUMERASI SMA BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	54.08	56,2
		JUMLAH WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPATISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100	100
		IKLIM KEAMANAN SMA	75.80	77.80
		IKLIM KEBINEKAAN SMA	69.12	71.49
		IKLIM INKLUSIF SMA	59.43	62.43
		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUNDALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100	100
		RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI SMK BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	61.04	62.17
		RATA-RATA KOMPETENSI NUMERASI SMK BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	50.77	52.72

		TINGKAT PENYERAPAN KELULUSAN SMK	85.96	88.37
		TINGKAT KEPUASAN DUNIA KERJA TERHADAP KELULUSAN SMK	79.00	79.00
		IKLIM KEAMANAN SMK	72.45	74.45
		IKLIM KEBINEKAAN SMK	66.84	71.49
		IKLIM INKLUSIF SMK	56.90	59.06
2	Pendidikan Khusus	JUMLAH WARGA NEGARA USIA 4-18 TAHUN YANG TERMASUK DALAM PENDUDUK DISABILAH YANG BERPATISIPASI DALAM PENDIDIKAN KHUSUS	100	100
		TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 4-18 TAHUN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENDIDIKAN KHUSUS	100	100
		RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI SDLB BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	66.54	67.04
		RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI SMPLB BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	48.31	49.31
		RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI SMALB BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	59.80	60.80
		RATA-RATA KOMPETENSI NUMERASI SDLB DASARKAN ASESMAN NASIONAL	65.30	65.30
		RATA-RATA KOMPETENSI NUMERASI SMPLB DASARKAN ASESMAN NASIONAL	53.84	54.59
		RATA-RATA KOMPETENSI NUMERASI SMALB DASARKAN ASESMAN NASIONAL	51.50	53.48
		IKLIM KEAMANAN SDLB	84.02	84.02
		IKLIM KEAMANAN SMPLB	72.19	73.19
		IKLIM KEAMANAN SMALB	70.75	72.75
		IKLIM KEBINEKAAN SDLB	68.59	69.09
		IKLIM KEBINEKAAN SMPLB	65.33	67.56
		IKLIM KEBINEKAAN SMALB	67.33	69.51
		IKLIM INKLUSIF SDLB	6.57	62.07
		IKLIM INKLUSIF SMPLB	62.14	65.44
		IKLIM INKLUSIF SMALB	66.60	69.96

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, 2025.

4.1.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Realisasi Capaian SPM Urusan Pendidikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2024

NO	INDIKATOR SPM	TARGET CAPAIAN NASIONAL	TARGET CAPAIAN PROVINSI
1	RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI SMA BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	70.34	67,42
2	JUMLAH WARGA NEGARA USIA 4-18 TAHUN YANG TERMASUK DALAM PENDUDUK DISABILAH YANG BERPATISIPASI DALAM PENDIDIKAN KHUSUS	100	100
3	RATA-RATA KOMPETENSI NUMERASI SMA BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	59	57,4
4	JUMLAH WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPATISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100	80,15
5	RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI SMK BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	66	62,3
6	RATA-RATA KOMPETENSI NUMERASI SMK BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	55	53,44
7	RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI SDLB BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	68	67,4

8	RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI SMPLB BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	72	58,49
9	RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI SMALB BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	64	56,35
10	RATA-RATA KOMPETENSI NUMERASI SDLB DASARKAN ASESMAN NASIONAL	55	40,25
11	RATA-RATA KOMPETENSI NUMERASI SMPLB DASARKAN ASESMAN NASIONAL	63.67	50,15
12	RATA-RATA KOMPETENSI NUMERASI SMALB DASARKAN ASESMAN NASIONAL	58	52,45
13	TINGKAT PENYERAPAN KELULUSAN SMK	90	87,23
14	TINGKAT KEPUASAN DUNIA KERJA TERHADAP KELULUSAN SMK	82	81,47
15	IKLIM KEAMANAN SMA	77	71,44
16	IKLIM KEAMANAN SMK	74	68,35
17	IKLIM KEAMANAN SDLB	78	73,15
18	IKLIM KEAMANAN SMPLB	77	65,35
19	IKLIM KEAMANAN SMALB	76	70,37
20	IKLIM KEBINEKAAN SMA	82	72,19
21	IKLIM KEBINEKAAN SMK	77	70,33
22	IKLIM KEBINEKAAN SDLB	75	63,05
23	IKLIM KEBINEKAAN SMPLB	71	63,65
24	IKLIM KEBINEKAAN SMALB	70	69,27
25	IKLIM INKLUSIF SMA	63	58,39
26	IKLIM INKLUSIF SMK	58,83	56,16
27	IKLIM INKLUSIF SDLB	61	56,01
28	IKLIM INKLUSIF SMPLB	70.20	64,15
29	IKLIM INKLUSIF SMALB	68	71,68
30	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUNDALAM PENDIDIKAN MENENGAH	100	80,49
31	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 4-18 TAHUN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENDIDIKAN KHUSUS	100	75,66

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, 2025.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi angggaran tahun 2024 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dalam rangka pencapaian target SPM bidang pendidikan Provinsi Bengkulu berjumlah 31 terdiri dari program satu (1) dengan jumlah nilai dan program dengan jumlah Rp. 279.531.966.200,-

4.1.5 Dukungan Personil

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di Provinsi Bengkulu pada Tahun 2024 sangat tergantung juga dari dukungan personil sebagai pelaksana program/kegiatan pembangunan kualitas pendidikan. Sampai dengan Desember 2024

Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu telah didukung oleh personil sebangyak 19 personil dengan rincian Kepala Dinas, ketua dan anggota yang terdiri dari 17 personil yang terdiri dari bidang, uptd dan perencanaan.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang ditemui dalam proses pencapaian SPM tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM
Urusan Pendidikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2024

No	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1	RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI SMA BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	Kurangnya Fasilatasi Pendukung,siswa kurang tertarik mendatangi Perpustakaan dan terbatasnya Akses Internet di beberapa Daerah	Meningkatkan Kualitas Perpustakaan
2	JUMLAH WARGA NEGARA USIA 4-18 TAHUN YANG TERMASUK DALAM PENDUDUK DISABILAH YANG BERPATISIPASI DALAM PENDIDIKAN KHUSUS	Kurangnya Saranan dan Prasaranan pendukung siswa disabilitas	Meningkatakan Saranan dan Prasarana disetiap satuan pendidikan Khusus
3	RATA-RATA KOMPETENSI NUMERASI SMA BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	Murid dianggap kurang memiliki bakat dalam Matematika atau mungkin kurang memiliki niat, dan tidak menyukai Matematika dan kurangnya pengmahaman guru terhadap konten matematika yang akan diajarkan kepada murid	Meningkatkan kuatias guru dengan mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik
4	JUMLAH WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPATISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Kurangnya Saranan dan Prasaranan pendukung siswa	Meningkatakan Saranan dan Prasarana disetiap satuan pendidikan Menengah
5	RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI SMK BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	Kurangnya Fasilatasi Pendukung,siswa kurang tertarik mendatangi Perpustakaan dan terbatasnya Akses Internet di beberapa Daerah	Meningkatkan Kualitas Perpustakaan
6	RATA-RATA KOMPETENSI NUMERASI SMK BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	Murid dianggap kurang memiliki bakat dalam Matematika atau mungkin kurang memiliki niat, dan tidak menyukai Matematika dan kurangnya pengmahaman guru terhadap konten matematika yang akan diajarkan kepada murid	Meningkatkan kuatias guru dengan mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik

7	RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI SDLB BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	Kurangnya Fasilatasi Pendukung,siswa kurang tertarik mendatangi Perpustakaan dan terbatasnya Akses Internet di beberapa Daerah	Meningkatkan Kualitas Perpustakaan
8	RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI SMPLB BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	Kurangnya Fasilatasi Pendukung,siswa kurang tertarik mendatangi Perpustakaan dan terbatasnya Akses Internet di beberapa Daerah	Meningkatkan Kualitas Perpustakaan
9	RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI SMALB BERDASARKAN ASESMAN NASIONAL	Kurangnya Fasilatasi Pendukung,siswa kurang tertarik mendatangi Perpustakaan dan terbatasnya Akses Internet di beberapa Daerah	Meningkatkan Kualitas Perpustakaan
10	RATA-RATA KOMPETENSI NUMERASI SDLB DASARKAN ASESMAN NASIONAL	Kurangnya Saranan dan Prasaranan pendukung siswa	Meningkatakan Saranan dan Prasarana disetiap satuan pendidikan
11	RATA-RATA KOMPETENSI NUMERASI SMPLB DASARKAN ASESMAN NASIONAL	Kurangnya Saranan dan Prasaranan pendukung siswa	Meningkatakan Saranan dan Prasarana disetiap satuan pendidikan
12	RATA-RATA KOMPETENSI NUMERASI SMALB DASARKAN ASESMAN NASIONAL	Kurangnya Saranan dan Prasaranan pendukung siswa	Meningkatakan Saranan dan Prasarana disetiap satuan pendidikan
13	TINGKAT PENYERAPAN KELULUSAN SMK	ketidaksinkronan antara kompetensi yang dihasilkan dengan kebutuhan industri lulusan SMK	Meningkatkan sekil, pengetahuan, dan perilaku Siswa
14	TINGKAT KEPUASAN DUNIA KERJA TERHADAP KELULUSAN SMK	masih banyak kesenjangan lulusan SMK dengan kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan	sekolah menengah kejuruan perlu program-program untuk meningkatkan sumber daya pendidikan di SMK yang lebih efisien dan efektif
15	IKLIM KEAMANAN SMA	Iklim keamanan mengalamai penurunan	perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan
16	IKLIM KEAMANAN SMK	Iklim keamanan mengalamai penurunan	perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan
17	IKLIM KEAMANAN SDLB	Iklim keamanan mengalamai penurunan	perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan
18	IKLIM KEAMANAN SMPLB	Iklim keamanan mengalamai penurunan	perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan
19	IKLIM KEAMANAN SMALB	Iklim keamanan mengalamai penurunan	perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan
20	IKLIM KEBINEKAAN SMA	Kurangnya kepedualian terhadap lingkungan	meningkatkan rasa perduli terhadap lingkungan

21	IKLIM KEBINEKAAN SMK	Kurangnya kepedualian terhadap lingkungan	meningkatkan rasa perduli terhadap lingkungan
22	IKLIM KEBINEKAAN SDLB	Kurangnya kepedualian terhadap lingkungan	meningkatkan rasa perduli terhadap lingkungan
23	IKLIM KEBINEKAAN SMPLB	Kurangnya kepedualian terhadap lingkungan	meningkatkan rasa perduli terhadap lingkungan
24	IKLIM KEBINEKAAN SMALB	Kurangnya kepedualian terhadap lingkungan	meningkatkan rasa perduli terhadap lingkungan
25	IKLIM INKLUSIF SMA	kurangnya pengetahuan guru tentang anak berkebutuhan khusus	meningkatkan kuatias guru dengan mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik
26	IKLIM INKLUSIF SMK	kurangnya pengetahuan guru tentang anak berkebutuhan khusus	meningkatkan kuatias guru dengan mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik
27	IKLIM INKLUSIF SDLB	kurangnya pengetahuan guru tentang anak berkebutuhan khusus	meningkatkan kuatias guru dengan mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik
28	IKLIM INKLUSIF SMPLB	kurangnya pengetahuan guru tentang anak berkebutuhan khusus	meningkatkan kuatias guru dengan mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik
29	IKLIM INKLUSIF SMALB	kurangnya pengetahuan guru tentang anak berkebutuhan khusus	meningkatkan kuatias guru dengan mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik
30	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUNDALAM PENDIDIKAN MENENGAH	Kurangnya Saranan dan Prasaranan pendukung siswa	Meningkatakan Saranan dan Prasarana disetiap satuan pendidikan Menengah
31	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 4-18 TAHUN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENDIDIKAN KHUSUS	Kurangnya Saranan dan Prasaranan pendukung siswa	Meningkatakan Saranan dan Prasarana disetiap satuan pendidikan Menengah

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, 2025.

4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang

selanjutnya menjadi jenis SPM salah satunya adalah SPM Bidang Kesehatan. Terdapat 2 (dua) Jenis Pelayanan dan Indikator SPM Kesehatan Provinsi Bengkulu (Pergub 29 Tahun 2020) yaitu;

1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi dengan Indikator :Jumlah warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat layanan kesehatan
2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) provins dengan Indikator : Jumlah warga Negara pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) provinsi yang mendapat layanan Kesehatan.

4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan pada Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, sebagai acuan dalam pencapaian yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Rencana Capaian dan Indikator Layanan SPM Bidang Kesehatan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target Nasional (%)	Target 2023 (%)	Target 2024 (%)
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100	100	100
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2025.

4.2.3 Realisasi

Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan SPM urusan Kesehatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Realisasi Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Indikator SPM	Target Capaian Nasional (%)	Target Capaian Provinsi (%)	Capaian 2024 (%)
1	Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100	100	100
2	Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2025.

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2024 Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu untuk pelaksanaan SPM kesehatan berjumlah 1.175.000.000,- terdiri dari program kegiatan Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dengan jumlah nilai Rp.125.000.000,- program kegiatan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi dengan nilai Rp.50.000.000,- dan program kegiatan Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dengan nilai 1.000.000,.000,-

4.2.5 Dukungan Personil

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Provinsi Bengkulu pada Tahun 2024 sangat tergantung juga dari dukungan personil sebagai pelaksana program/kegiatan pelayanan Kesehatan. Sampai dengan Desember 2024 Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu telah didukung oleh personil Tim manajemen Krisis Kesehatan, team *Emergency*

Medical Team (EMT) Tingkat Provinsi dan seluruh SDMK jejaring Pelayanan kesehatan yang ada di seluruh Kabupaten/Kota.

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.6
Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan SPM Urusan Kesehatan di Provinsi Bengkulu Tahun 2024

No	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1.	Jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	1. Masih perlu peningkatan anggaran untuk pelayanan yang lebih baik 2. Dinas belum memiliki SDM dan Organisasi Khusus penanggulangan Bencana	1. Peningkatan sarana dan prasarana guna peningkatan mutu pelayanan, Peningkatan SDM/K daerah resiko guna mengurangi Dampak Bencana 2. Pembentukan UPTD/Seksi Khusus yang menangani sistem Bencana dan Kegawatdaruratan terpadu
2.	Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan khusus.	1. Kurangnya keterampilan SDM dan pergantian petugas Kab/Kota 2. Kasus penyakit potensial KLB / wabah Kab/Kota tidak terlapor 3. Jejaring surveilans tidak berjalan hingga ke desa 4. Sarana dan Prasarana yg butuh peningkatan	1. Pelatihan keterampilan untuk para tenaga medis 2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana 3. Komitmen bersama antara Provinsi dengan kabupaten 4. Peningkatan anggaran

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2025.

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan standar pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar dalam PerMen PUPR RI Nomor 13 Tahun 2023, tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Provinsi terdiri atas pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota diberikan melalui Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota. Mutu pelayanan dasar terdiri atas :

a. Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas Air Minum,
b. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas Air Minum dan
c. Mutu Pelayanan Dasar penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik berupa ukuran kuantitas dan kualitas pelayanan.

4.3.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari : 25.988 orang
b. Jaringan Perpipaaan yang terdiri atas :

   Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM : 6.497 SR.

   Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau : 6.497 SR.
c. Bukan Jaringan Perpipaan yang terdiri atas :

Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM : 0 SR.

Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau : 0 SR

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota :

- Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik : 0 orang. Terdiri dari :

  Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik : 0 SR.

  Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T : 0 SR.

  Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar : 0 SR.

4.3.3 Realisasi

Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota :

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari : 25.988 orang untuk **realiasinya 0.**

b. Jaringan Perpipaaan yang terdiri atas :

Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM : 6.497 SR **realiasinya 0.**

Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau : 6.497 SR **realiasinya 0.**

c. Bukan Jaringan Perpipaan yang terdiri atas :

Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM : 0 SR **realiasinya 0.**

Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau : 0 SR **realiasinya 0.**

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota :

a. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik : 0 orang. Terdiri dari :

Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik : 0 SR **realiasinya 0.**

Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T : 0 SR **realiasinya 0.**

Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar : 0 SR **realiasinya 0**

4.3.4 Alokasi Anggaran

a. Untuk alokasi anggaran jenis pelayanan Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota sebesar Rp. 74.911.272.740.
b. Untuk alokasi anggaran jenis Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota sebesar Rp. 1.000.000.000.

4.3.5 Dukungan Personil

Walaupun pelayanan urusan Pekerjaan Umum belum dialokasikan penganggarannya dalam pelaksanaan SPM urusan ini, ada 9 (Sembilan) personil terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf yang melaksanakan jenis pelayanan dasar SPM di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu.

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Untuk permasalahan pada jenis pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota **:**

a. Bangunan fisik dan jaringan perpipaan selesai diakhir tahun 2024, menyisakan 1 rumah offtake yang dianggarkandi tahun anggaran 2025.

b. Keterbatasan anggaran daerah untuk pembangunan SPAM Regional sehingga baru selesai di tahun anggaran 2024.
c. Saat ini masih dalam penyiapan dokumen untuk sanitasi diantaranya adalah Jakstrada SanitasiRegional dan Studi Kelayakan Sanitasi Regional (tahun anggaran 2024).

Untuk solusi pada jenis pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota :

a. Uji comissioning SPAM Regional KOBEMA baru dilaksanakan dari intake menuju IPA di tahun anggaran 2024.
b. Uji comissioning SPAM Regional KOBEMA lanjutan (IPA sampai ke SR) akan dilaksanakan ditahun anggaran 2025.
c. Pada tahun 2025 dilakukan legalisasi dokumen RISPAM yang disusun tahun 2023 menjadi Pergub RISPAM Provinsi Bengkulu.
d. Tahun anggaran 2025 direncanakan penyusunan dokumen Masterplan Sanitasi Provinsi Bengkulu.
e. Pada tahun 2025 dilakukan legalisasi dokumen JASTRADA SANITASI yang disusun tahun 2024 menjadi Perda JAKSTRADA SANITASI Provinsi Bengkulu
f. Pembangunan fisik SPALD Regional akan dianggarkan melalui APBN dan APBD setelah seluruh RC dilengkapi.

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang SPM Bidang PUPR disebutkan bahwa Standar Pelayanan MInimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. untuk Bidang urusan Perumahan rakyat mencakup SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah provinsi dan SPM Perumahan Rakyat daerah Kabupaten/Kota. Adapun jenis Pelayanan Dasar Pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi adalah :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana

provinsi.

2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi msyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi

4.4.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Dalam Peraturan Mentri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang SPM PUPR disebutkan bahwa Penyediaan dan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana dilaksanakan melaui :

a. Rehabilitasi Rumah
b. Pembangunan kembali Rumah (Rekonstruksi)
c. Pemukiman Kembali (Relokasi)
d. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni

Dengan Ketentuan :

a. Dilaksanakan saat masa pasca bencana
b. Terdapat surat penetapan status bencana Provinsi dari Kepala Daerah
c. Sesuai jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dengan demikian target pencapaian SPM Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran berjalan akan ditentukan oleh jumlah unit rumah rusak yang terjadi pada tahun tersebut yang dituangkan dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

4.4.3 Realisasi

Karena pada tahun anggaran 2024 tidak terjadi bencana alam skala provinsi,maka anggaran yang disiapkan untuk penanganan SPM yang meliputi 2 Sub kegiatan tidak direalisasikan dan pada perubahan APBD dialihkan ke sub kegiatan lain.

Tabel 4.7
Sub Kegiatan untuk Penanganan SPM

	Kegiatan	Pagu Awal	APBD Perubahan	Realisasi
1.	Pendataan Tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Rp.70.000.000	Rp.35.000.000	Rp.10.808.000
2.	Pembangunan rumah bagi korban bencana provinsi	Rp.285.000.000 (Untuk Target 13 Unit Rumah)	Rp.6.000.000	Rp. 0

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Prov. Bengkulu, 2025.

Hal ini dilakukan karena tidak ada bencana provinsi yang terjadi, sedangkan berdasarkan Peraturan Mentri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 Pelaksanaan SPM diawali dari penetapan bencana provinsi oleh Gubernur.

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penyelenggaraan 2 (Dua) jenis SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2014 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan provinsi Bengkulu yang bersumber dari APBD dengan total pagu OPD sebesar 16.489.721.867 sedangkan anggaran yang tersedia untuk penyelanggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat sebesar Rp.355.000.000 dengan realisasi Rp.10.808.000 karena tidak terjadi bencana alam skala provinsi.

4.4.5 Dukungan Personil

Dalam pencapayan SPM Bidang Perumahan di dukung oleh personil pada Dinas Perumahan,Kawasan permukiman dan pertanahan provinsi bengkulu sebanyak 52 orang. Dengan rincian 8 orang pejabat struktural,8 orang sub koordinator, pelaksana sebanyak 36 orang dan THL sebanyak 6 orang.

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.8
Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan
SPM Urusan Perumahan Rakyat di Provinsi Bengkulu Tahun 2024

No	INDIKATOR SPM	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Rehabilitasi rumah korban bencana provinsi	Tidak Ada Bencana Skala Provinsi	-
2	Relokasi rumah masyarakat yang terkena relokasi program pemda provinsi	Tidak ada program relokasi oleh pemda provinsi	-

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Prov. Bengkulu, 2025.

4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum/masyarakat dan penegakan perda/perkada sesuai SOP.
- Penanganan terhadap warga yang terkena dampak penegakan perda dan perkada.
- Peningkatan pembinaan dan kapasitas anggota Satpol PP, PPNS dan anggota Satlinmas.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Satpol PP dan Satlinmas.
- Penyediaan dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemenuhan Standar pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana daerah Kabupaten/Kota.
- Penanganan Tanggap darurat Bencana.
- Penangangan pasca bencana.

- Penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran.
- Penyusunan rencana induk sistim proteksi kebakaran.

4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan pada Permendagri 59 Tahun 2021, sebagai acuan dalam pencapaian yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.9
Target SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Bengkulu Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Nasional	Capaian 2024	Target	Rencana Pembiayaan (Rp. 000)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di provinsi	100%	100 %	100 %	820.000.000

Sumber : Satpol PP Provinsi Bengkulu, 2025.

4.5.3 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat pada tahun 2024 tidak terlepas dari peran serta positif dari pemerintah daerah maupun masyarakat di Provinsi Bengkulu terhadap pemenuhan SPM yang direalisasikan sebagai berikut :

Tabel 4.10
Realisasi Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas
di Provinsi Bengkulu Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian Nasional	Target Capaian Provinsi	Capaian 2024
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di provinsi	99%	99 %	781.720.769

Sumber : Satpol PP Provinsi Bengkulu, 2025.

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran di Satpol. PP Provinsi Bengkulu untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada urusan ketentraman, ketertiban Umum, perlindungan masyarakat pada Tahun 2024 sebesar. Rp 820.000.000,-

4.5.5 Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu pada Tahun 2024 didukung oleh personil sebanyak 219 orang. Jumlah pegawai Satpol PP perbulan Desember 2024 adalah sebanyak 219 Orang dengan status sebagai Aparatur Sipil Negara sebanyak 64 orang dan Non Aparatur Sipil Negara sebanyak 155 Orang.

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.11
Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan SPM
Urusan Tratibumlinmas di Provinsi Bengkulu Tahun 2024

No	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di provinsi	1. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan patroli Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu. 2. Kurangnya tenaga SDM yang profesional untuk mendukung kegiatan di lapangan berdasarkan pada bidangnya masing-masing.	1. Mengajukan alokasi anggaran berkaitan sarana prasarana yang belum tersedia dengan berkoordinasi dan berkonsultasi pada pihak Pemerintah Daerah maupun pemerintah pusat melalui bantuan keuangan. 2. Merencanakan bimtek dan diklat untuk mendukung tenaga professional di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu

Sumber : Satpol PP Provinsi Bengkulu, 2025.

4.6. Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Kementerian Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM salah satunya adalah SPM Bidang Sosial. Jenis Pelayanan Dasar Bidang Sosial di adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas didalam panti
2. Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar didalam panti
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia terlantar didalam panti
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial didalam panti

5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi

4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel 4.12
Target SPM Sosial Tahun 2024

No	Indikator SPM	Target Nasional	Capaian Daerah 2023	Target Daerah 2024	Rencana Pembiayaan (Rp)
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	100%	100%	100%	290.390.800,-
2	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	100%	100%	100%	397.180.000,-
3	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%	100%	100%	1.143.960.000,-
4	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	100%	100%	100%	-
5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100%	100%	100%	100.000.000

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, 2025.

4.6.3 Realisasi

Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan SPM bidang Sosial Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13
Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial di Provinsi Bengkulu Tahun 2024

NO	Indikator SPM	Target Daerah 2024	Capaian Daerah	Realisasi Anggaran
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	100%	100%	270..390.800,-
2	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	100%	100%	397.180.000,-
3	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%	100%	1.143.960.000,-
4	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	100%	100%	-
5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100%	100%	100.000.000,-

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, 2025.

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penyelenggaraan 4 (empat) jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial tahun 2024 pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu yang bersumber dari APBD dengan total pagu OPD sebesar Rp. 23.539.763.503,- sedangkan anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan SPM bidang sosial sebesar Rp.1.931.530.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.894.553.800.

4.6.5 Dukungan Personil

Dalam Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Provinsi Bengkulu pada Tahun 2024 sangat tergantung juga dari dukungan personil sebagai pelaksana program/kegiatan pembangunan kesejahteraan

sosial. Sampai dengan Desember 2024, Dinas Sosial Provinsi Bengkulu terlah didukung oleh personil sebangyak 143 personil dengan rincian 14 orang Pejabat struktural, 10 orang Sub Koordinator, Pelaksana sebanyak 88 orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 31 orang.

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.14
Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan SPM
Urusan Sosial di Provinsi Bengkulu Tahun 2024

No	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	- Pemerintah Provinsi Bengkulu belum memiliki panti sosial bagi disabilitas didalam panti, yang selama ini mengaju pada lembaga/panti milik masyarakat wewenang provinsi - Dukungan Pemerintah Daerah dalam pengangganggaran bagi penyandang disabilitas tidak maksimal	- Pembentukan panti sosial bagi penyandang disabilitas - TAPD memaksimalkan anggaran pada OPD Dinas Sosial untuk penerapan SPM
2	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	- Dukungan anggaran pada OPD dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar didalam panti yang sangat tidak maksimal - Sarana dan prasarana yang kurang memadai	- Telah mengajukan penambahan anggaran pada Dinas Sosial provinsi Bengkulu terutama dalam pelaksanaan SPM dalam pemenuhan kebutuhan dasar penyediaan permakanan didalam panti - Telah mengusulkan penambahan anggaran untuk penyediaan asrama yang layak bagi kelayan panti

3	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	- Dukungan anggaran pada OPD dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar didalam panti yang sangat tidak maksimal - Sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga UPTD tidak dapat menambah calon kelayan panti	- Telah mengajukan penambahan anggaran pada Dinas Sosial provinsi Bengkulu terutama dalam pelaksanaan SPM dalam pemenuhan kebutuhan dasar penyediaan permakanan didalam panti - Telah mengusulkan penambahan anggaran untuk penyediaan asrama yang layak bagi kelayan panti
4	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	- Pemerintah Provinsi Bengkulu belum memiliki panti sosial bagi gelandangan dan pengemis didalam panti, yang selama ini mengaju pada rumah singgah kab/kota - Kurangnya dukungan Kab/kota dalam penanganan gelandangan dan pengemis	- Pembentukan panti sosial bagi gelandangan dan pengemis - Telah melakukan koordinasi dan monitoring dengan Dinas Sosial kab/Kota
5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	- Dukungan anggaran yang tidak maksimal dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bancana alam dan sosial	- Telah melakukan koordinasi dangan pihak terkait dalam memaksimalkan anggaran pada OPD dalam penannganan bencana

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, 2025.

4.7 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan SPM di Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15

Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Urusan Trantibbumlinmas Tahun 2024

NO	KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dan Cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan	Persen	50.000.000,-	APBD	49.808.500,-
				Kerja sama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan kejahatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	persen	500.000.000	APBD	499.748.721

				Koordinasi penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan msyarakat tingkat provinsi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, umum dan perlindungan msyarakat tingkat provinsi	persen	6.000.000.000	APBD	5.969.732.803
				Penyediaan layanan dasar dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga yang terdampak penegakan perda dan perkada	persen	50.000.000	APBD	47.953.341
				Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja melalui pelatihan teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Jumlah aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis satuan Polisi Pamong Praja	Persen	50.000.000	APBD	46.009.200

2	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Persen	50.000.000,-	APBD	49.877.000,-
				Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernu	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur	persen	40.000.000	APBD	39.059.000
				Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	persen	50.000.000	APBD	49.573.000

3			**Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil PPNS**	**Pengembangan kapasitas dan dan karir PPNS**	**Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan perda**	**Persen**	**30.000.000**	**APBD**	**29.959.204**

Sumber : Satpol PP Provinsi Bengkulu, 2025.

Tabel 4.16
Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Urusan Sosial Tahun 2024

No	Program	Indikator	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Rehabilitasi sosial	Persentase Kelompok Rentan yang mendapatkan Pelayanan	➢ Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar di dalam Panti ➢ Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar didalam Panti ➢ RehabilitasiSosial Dasar Lanjut Usia Terlantar didalam Panti	270..390.800, 397.180.000,- 1.143.960.000,-

2.	Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani.	Perlindungan sosial korban bencana dan bantuan jaminan sosial	100.000.000

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, 2025.

Tabel 4.17
Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Urusan Perumahan Tahun 2024

NO	Program	Indikator	Kegiatan	Pagu Anggaran	
				Awal	Perubahan
1	Pengembangan Perumahan	Persentase rumah masyarakat korban bencana alam yang di rehabilitasi atau direlokasi	1. Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Rp.70.000.000	Rp.35.000.000
			2. Pembangunan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi	Rp.285.000.000	Rp.6.000.000

Sumber : Dinas Perkimtah Provinsi Bengkulu, 2025.

Tabel 4.18
Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Program	Indikator	Kegiatan	Anggaran
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1.Kaji Cepat kerusakan akibat bencana Bidang kesehatan. 2.Koordinasi dan Pendampingan pelayanan kesehatan kepada penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rp.125.000.000,-
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Koordinasi dan Pendampingan pelayanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Rp.50.000.000,-

3	Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehata	Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan pengurangan resiko krisis kesehatan di Kab/Kota	Pelayanan kesehatan dan sosialisasi kesehatan kepada Penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rp.1.000.000.000,-
	Jumlah			Rp.1.175.000.000,-

Tabel 4.19
Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Urusan Pendidikan Tahun 2024

NO	PROGRAM	INDIDKATOR	KEGIATAN	Subkegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Program Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya Layanan Pendidikan Menengah Atas	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMA	6.370.400.000	6.291.196.532
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	9.376.174.000	9.184.399.627
				Pengadaan Mebel Sekolah	2.670.930.800	2.628.424.800
				Pengadaan Alat Peraga Siswa	11.411.950.000	11.308.615.400
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.450.000.000	2.427.537.466
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SMA	35.436.650.040	35.405.064.870
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan SMA	125.000.000	120.142.000
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	200.000.000	189.764.000
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	470.000.000	420.353.780

				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	83.428.540.000	81.235.605.743
		Meningkatnya Layanan Pendidikan Menengah Kejuruan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	9.874.344.000	9.764.387.221
				Pengadaan Mebel Sekolah	956.062.000	934.580.000
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	35.417.801.203	34.880.414.760
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.080.000.000	1.030.903.755
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SMK	150.000.000	149.274.775
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	1.050.000.000	1.049.599.247
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	51.018.380.000	44.130.653.743
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan SMK	175.000.000	169.000.000
				Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	838.186.650	834.245.572
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.296.000.000	1.284.526.763
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMK	21.821.082.400	21.503.815.251
				Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	540.000.000	539.816.000
		Meningkatnya Layanan Pendidikan Khusus	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.520.594.000	977.490.200
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	150.000.000	96.311.360
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	100.692.250	79.138.546

				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	50.000.000	43.774.904
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	6.110.860.000	5.450.886.773
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Khusus	25.000.000	14.550.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.928.966.400	1.730.053.763
				Pembangunan Ruang Kelas Baru Pendidikan Khusus	1.124.450.870	1.109.826.173
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Pendidikan Khusus	400.000.000	360.536.291
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.416.388.350	4.187.076.940
Total					**291.983.452.963**	**279.531.966.255**

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024

2024

PEMERINTAHAN PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2025

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024

1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja Makro	CAPAIAN KINERJA 2024	CAPAIAN KINERJA 2024	Laju Kinerja
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,30	74,91	0,82
2	Angka Kemiskinan (Persen)	14,04	13,56	-3,42
3	Angka Pengangguran (Persen)	3,42	3,11	-9,06
4	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,28	4,62	7,94
5	Pendapatan Per-Kapita (Rupiah)	46.300.486	49.233.121	6,33
6	Ketimpangan Pendapatan (Persen)	0,330	0,342	3,62

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2025

2. Ringkasan Capaian Kinerja urusan Pelayanan Dasar

Capaian kinerja urusan Pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan darah dalam mengukur dan mengurus urusan Pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk di antaranya :

1. Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja Outcame

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian kinerja Tahun 2024
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	99.747	99,943

1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	99.73	81,29

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, 2025.

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2024 sebesar Rp. 279.531.966.200 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Program
1	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Program pengelolaan Pendidikan
2	Afimasi Akses dan Percepatan Wajib Belalar 12 Tahun	Program pengelolaan Pendidikan
3	Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program pengelolaan Pendidikan
4	Penjaminan Mutu Pendidikan	Program pengelolaan Pendidikan
5	Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	Program pengelolaan Pendidikan

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, 2025.

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1	Rata-rata kompetensi literasi sma berdasarkan asesman nasional	Kurangnya Fasilatasi Pendukung,siswa kurang tertarik mendatangi Perpustakaan dan terbatasnya Akses Internet di beberapa Daerah	Meningkatkan Kualitas Perpustakaan
2	Jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilah yang berpatisipasi dalam pendidikan khusus	Kurangnya Saranan dan Prasaranan pendukung siswa disabilitas	Meningkatakan Saranan dan Prasarana disetiap satuan pendidikan Khusus

3	Rata-rata kompetensi numerasi sma berdasarkan asesman nasional	Murid dianggap kurang memiliki bakat dalam Matematika atau mungkin kurang memiliki niat, dan tidak menyukai Matematika dan kurangnya pengmahaman guru terhadap konten matematika yang akan diajarkan kepada murid	Meningkatkan kuatias guru dengan mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik
4	Jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpatisipasi dalam pendidikan menengah	Kurangnya Saranan dan Prasaranan pendukung siswa	Meningkatakan Saranan dan Prasarana disetiap satuan pendidikan Menengah
5	Rata-rata kompetensi literasi smk berdasarkan asesman nasional	Kurangnya Fasilatasi Pendukung,siswa kurang tertarik mendatangi Perpustakaan dan terbatasnya Akses Internet di beberapa Daerah	Meningkatkan Kualitas Perpustakaan
6	Rata-rata kompetensi numerasi smk berdasarkan asesman nasional	Murid dianggap kurang memiliki bakat dalam Matematika atau mungkin kurang memiliki niat, dan tidak menyukai Matematika dan kurangnya pengmahaman guru terhadap konten matematika yang akan diajarkan kepada murid	Meningkatkan kuatias guru dengan mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik
7	Rata-rata kompetensi literasi sdlb berdasarkan asesman nasional	Kurangnya Fasilatasi Pendukung,siswa kurang tertarik mendatangi Perpustakaan dan terbatasnya Akses Internet di beberapa Daerah	Meningkatkan Kualitas Perpustakaan
8	Rata-rata kompetensi literasi smplb berdasarkan asesman nasional	Kurangnya Fasilatasi Pendukung,siswa kurang tertarik mendatangi Perpustakaan dan terbatasnya Akses Internet di beberapa Daerah	Meningkatkan Kualitas Perpustakaan

9	Rata-rata kompetensi literasi smalb berdasarkan asesman nasional	Kurangnya Fasilatasi Pendukung,siswa kurang tertarik mendatangi Perpustakaan dan terbatasnya Akses Internet di beberapa Daerah	Meningkatkan Kualitas Perpustakaan
10	Rata-rata kompetensi numerasi sdlb dasarkan asesman nasional	Kurangnya Saranan dan Prasaranan pendukung siswa	Meningkatakan Saranan dan Prasarana disetiap satuan pendidikan
11	Rata-rata kompetensi numerasi smplb dasarkan asesman nasional	Kurangnya Saranan dan Prasaranan pendukung siswa	Meningkatakan Saranan dan Prasarana disetiap satuan pendidikan
12	Rata-rata kompetensi numerasi smalb dasarkan asesman nasional	Kurangnya Saranan dan Prasaranan pendukung siswa	Meningkatakan Saranan dan Prasarana disetiap satuan pendidikan
13	Tingkat penyerapan kelulusan smk	ketidaksinkronan antara kompetensi yang dihasilkan dengan kebutuhan industri lulusan SMK	Meningkatkan sekil, pengetahuan, dan perilaku Siswa
14	Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap kelulusan smk	masih banyak kesenjangan lulusan SMK dengan kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan	sekolah menengah kejuruan perlu program-program untuk meningkatkan sumber daya pendidikan di SMK yang lebih efisien dan efektif
15	Iklim keamanan sma	Iklim keamanan mengalamai penurunan	perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan
16	Iklim keamanan smk	Iklim keamanan mengalamai penurunan	perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan
17	Iklim keamanan sdlb	Iklim keamanan mengalamai penurunan	perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan

18	Iklim keamanan smplb	Iklim keamanan mengalamai penurunan	perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan
19	Iklim keamanan smalb	Iklim keamanan mengalamai penurunan	perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan
20	Iklim kebinekaan sma	Kurangnya kepedualian terhadap lingkungan	meningkatkan rasa perduli terhadap lingkungan
21	Iklim kebinekaan smk	Kurangnya kepedualian terhadap lingkungan	meningkatkan rasa perduli terhadap lingkungan
22	Iklim kebinekaan sdlb	Kurangnya kepedualian terhadap lingkungan	meningkatkan rasa perduli terhadap lingkungan
23	Iklim kebinekaan smplb	Kurangnya kepedualian terhadap lingkungan	meningkatkan rasa perduli terhadap lingkungan
24	Iklim kebinekaan smalb	Kurangnya kepedualian terhadap lingkungan	meningkatkan rasa perduli terhadap lingkungan
25	Iklim inklusif sma	kurangnya pengetahuan guru tentang anak berkebutuhan khusus	meningkatkan kuatias guru dengan mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik
26	Iklim inklusif smk	kurangnya pengetahuan guru tentang anak berkebutuhan khusus	meningkatkan kuatias guru dengan mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik
27	Iklim inklusif sdlb	kurangnya pengetahuan guru tentang anak berkebutuhan khusus	meningkatkan kuatias guru dengan mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik
28	Iklim inklusif smplb	kurangnya pengetahuan guru tentang anak berkebutuhan khusus	meningkatkan kuatias guru dengan mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik

29	Iklim inklusif smalb	kurangnya pengetahuan guru tentang anak berkebutuhan khusus	meningkatkan kuatias guru dengan mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik
30	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahundalam pendidikan menengah	Kurangnya Saranan dan Prasaranan pendukung siswa	Meningkatakan Saranan dan Prasarana disetiap satuan pendidikan Menengah
31	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	Kurangnya Saranan dan Prasaranan pendukung siswa	Meningkatakan Saranan dan Prasarana disetiap satuan pendidikan Menengah

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, 2025.

2. Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja Outcame

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian kinerja Tahun 2024
1.b.1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1.288	1,290
1.b.2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	38.46	96,15
1.b.3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	100
1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2025.

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Provinsi Bengkulu Tahun 2024 sebesar Rp. 1.175.000.000 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Program
1.		Program kegiatan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi
2.		Program kegiatan Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2025.

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Provinsi Bengkulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1.	Jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	1. Masih perlu peningkatan anggaran untuk pelayanan yang lebih baik 2. Dinas belum memiliki SDM dan Organisasi Khusus penanggulangan Bencana	1. Peningkatan sarana dan prasarana guna peningkatan mutu pelayanan, Peningkatan SDM/K daerah resiko guna mengurangi Dampak Bencana 2. Pembentukan UPTD/Seksi Khusus yang menangani sistem Bencana dan Kegawatdaruratan terpadu
2.	Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan khusus.	1. Kurangnya keterampilan SDM dan pergantian petugas Kab/Kota 2. Kasus penyakit potensial KLB / wabah Kab/Kota tidak terlapor 3. Jejaring surveilans tidak berjalan hingga ke desa 4. Sarana dan Prasarana yg butuh peningkatan	1. Pelatihan keterampilan untuk para tenaga medis 2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana 3. Komitmen bersama antara Provinsi dengan kabupaten 4. Peningkatan anggaran

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2025.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Capaian Kinerja Outcame

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh oleh Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian kinerja Tahun 2024
1.c.1.1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	6,288	6,288
1.c.1.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	6,84	6,84
1.c.2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	44,803	47,874
1.c.3	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	0	17,091
1.c.4	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	0	0
1.c.5	Rasio kemantapan jalan	63,672	62,820
1.c.6	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	5,979	11,216

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, 2025.

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang di Provinsi Bengkulu Tahun 2024 sebesar Rp. 75.911.272.740 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Program
1.	Penyediam Air untuk Pertanian	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
2.	Penyediaan Air Baku untuk Kawasan Prioritas	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum
3.	Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4.	Konektivitas Jalan	Program Penyelenggaran Jalan
5.	Penyediaan Akses Air Minum dan Sanrtasi Layak dan Aman dan Perkotaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, 2025.

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi Bengkulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1.	Pemenuhan kebutuan minum air curah lintas Kabupaten/Kota	1. Bangunan fisik dan jaringan perpipaan selesai diakhir tahun 2024, menyisakan 1 rumah offtake yang dianggarkandi tahun anggaran 2025 2. Keterbatasan anggaran daerah untuk pembangunan SPAM Regional sehingga baru selesai	**1.** Uji comissioning SPAM Regional KOBEMA baru dilaksanakan dari intake menuju IPA di tahun anggaran 2024. **2.** Uji comissioning SPAM Regional KOBEMA lanjutan (IPA sampai ke SR) akan dilaksanakan ditahun anggaran 2025.

		di tahun anggaran 2024	**3.** Pada tahun 2025 dilakukan legalisasi dokumen RISPAM yang disusun tahun 2023 menjadi Pergub RISPAM Provinsi Bengkulu.
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domistik regional lintas Kabupaten/Kota	1. Saat ini masih dalam penyiapan dokumen untuk sanitasi diantaranya adalah Jakstrada SanitasiRegional dan Studi Kelayakan Sanitasi Regional (tahun anggaran 2024).	1. Tahun anggaran 2025 direncanakan penyusunan dokumen Masterplan Sanitasi Provinsi Bengkulu. 2. Pada tahun 2025 dilakukan legalisasi dokumen JASTRADA SANITASI yang disusun tahun 2024 menjadi Perda JAKSTRADA SANITASI Provinsi Bengkulu 3. Pembangunan fisik SPALD Regional akan dianggarkan melalui APBN dan APBD setelah seluruh RC dilengkapi.

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, 2024.

4. Urusan Perumahan Rakyat

A. Capaian Kinerja Outcame

Capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat yang diperoleh oleh Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian kinerja Tahun 2024
1.d.1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	6,288	0
1.d.2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	6,84	0
1.d.3	Persentasi Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	1.312	1,312
1.d.4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100	11,811

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Prov. Bengkulu, 2025.

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat

Alokasi anggaran yang mendukung penyelenggaraan 2 (Dua) jenis SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2014 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan provinsi Bengkulu yang bersumber dari APBD dengan total pagu OPD sebesar 16.489.721.867 sedangkan anggaran yang tersedia untuk penyelanggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat sebesar Rp.355.000.000 dengan realisasi Rp.10.808.000 karena tidak terjadi bencana alam skala provinsi.

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan Rakyat di Provinsi Bengkulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	INDIKATOR SPM	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Rehabilitasi rumah korban bencana provinsi	Tidak Ada Bencana Skala Provinsi	-
2	Relokasi rumah masyarakat yang terkena relokasi program pemda provinsi	Tidak ada program relokasi oleh pemda provinsi	-

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Prov. Bengkulu, 2025.

5. Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Capaian Kinerja Outcame

Capaian kinerja urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh oleh Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian kinerja Tahun 2024
1.e.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100
1.e.3	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	100
1.e.4	Persentase penanganan pra bencana	100	100
1.e.5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	100

Sumber : Satpol PP Provinsi Bengkulu, 2025.

B. Realisasi Belanja Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi belanja Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Bengkulu Tahun 2024 sebesar Rp. 781.720.769 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Program
1.	Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	Program Penanggulangan Bencana
2.	Penanggu-langan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
3.	Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
4.	Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyaakat	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

Sumber : Satpol PP Provinsi Bengkulu, 2025.

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Bengkulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di provinsi	1. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan patroli Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu. 2. Kurangnya tenaga SDM yang profesional untuk mendukung kegiatan di lapangan berdasarkan pada bidangnya masing-masing.	1. Mengajukan alokasi anggaran berkaitan sarana prasarana yang belum tersedia dengan berkoordinasi dan berkonsultasi pada pihak Pemerintah Daerah maupun pemerintah pusat melalui bantuan keuangan. 2. Merencanakan bimtek dan diklat untuk mendukung tenaga professional di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu

Sumber : Satpol PP Provinsi Bengkulu, 2025.

6. Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja Outcame

Capaian kinerja urusan Sosial yang diperoleh oleh Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian kinerja Tahun 2024
1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100
1.f.2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100
1.f.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100
1.f.4	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100

1.f.5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100	100

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, 2025.

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja Urusan Sosial di Provinsi Bengkulu Tahun 2024 sebesar Rp. 1.894.553.800 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Program
1.	Pendampingan dan Layanan Terpadu	Program Pemberdayaan Sosial
2.		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
3.	Sistem Jaminan Sosial Nasional	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4.	Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5.	Perlindungan Sosial Adaptif	Program Penanganan Bencana
6.	Kesejahteraan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
7.	Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, 2025.

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Provinsi Bengkulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	- Pemerintah Provinsi Bengkulu belum memiliki panti sosial bagi disabilitas didalam panti, yang selama ini mengaju pada lembaga/panti milik masyarakat wewenang provinsi - Dukungan Pemerintah Daerah dalam pengangganggaran bagi penyandang disabilitas tidak maksimal	- Pembentukan panti sosial bagi penyandang disabilitas - TAPD memaksimalkan anggaran pada OPD Dinas Sosial untuk penerapan SPM

2	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	- Dukungan anggaran pada OPD dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar didalam panti yang sangat tidak maksimal - Sarana dan prasarana yang kurang memadai	- Telah mengajukan penambahan anggaran pada Dinas Sosial provinsi Bengkulu terutama dalam pelaksanaan SPM dalam pemenuhan kebutuhan dasar penyediaan permakanan didalam panti - Telah mengusulkan penambahan anggaran untuk penyediaan asrama yang layak bagi kelayan panti
3	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	- Dukungan anggaran pada OPD dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar didalam panti yang sangat tidak maksimal - Sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga UPTD tidak dapat menambah calon kelayan panti	- Telah mengajukan penambahan anggaran pada Dinas Sosial provinsi Bengkulu terutama dalam pelaksanaan SPM dalam pemenuhan kebutuhan dasar penyediaan permakanan didalam panti - Telah mengusulkan penambahan anggaran untuk penyediaan asrama yang layak bagi kelayan panti
4	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	- Pemerintah Provinsi Bengkulu belum memiliki panti sosial bagi gelandangan dan pengemis didalam panti, yang selama ini mengaju pada rumah singgah kab/kota - Kurangnya dukungan Kab/kota dalam penanganan gelandangan dan pengemis	- Pembentukan panti sosial bagi gelandangan dan pengemis - Telah melakukan koordinasi dan monitoring dengan Dinas Sosial kab/Kota

5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	- Dukungan anggaran yang tidak maksimal dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bancana alam dan sosial	- Telah melakukan koordinasi dangan pihak terkait dalam memaksimalkan anggaran pada OPD dalam penannganan bencana

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, 2025.

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2024 Provinsi Bengkulu berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 3,17 dan status kinerja sedang untuk LPPD Tahun 2022. Namun Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2023 sampai dengan saat ini belum dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Nomor 298/S/XVIII.BKL/05/2024 Provinsi Bengkulu berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023, yang berarti Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu selama 10 (sepuluh) tahun terakhir mendapatkan 8 (delapan) opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 2 (dua) opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Unaudited Tahun 2024 Realisasi Pendapatan Provinsi Bengkulu Tahun 2024 mencapai sebesar Rp. 3.120.215.806.815 dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 mencapai Rp. 3.073.443.325.390 Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam

tabel berikut :

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%) 2024
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**3,183,123,966,400.00**	**3.120.215.806.815,45**	**98.02**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1,058,394,654,400.00**	**1.064.700.837.650,45**	**100.60**
4.1.01	Pajak Daerah	862,467,018,900.00	888,074,998,043.92	102.97
4.1.02	Retribusi Daerah	156,874,986,900.00	160,553,185,583.00	102.34
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14,028,087,600.00	178,250,872.00	1.27
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	25,024,561,000.00	15,894,403,151.53	63.52
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2,088,700,839,000.00**	**2,019,290,812,165.00**	**96.68**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2,088,700,839,000.00	2,019,290,812,165.00	96.68
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2,063,872,747,000.00	2,003,614,183,165.00	97.08
4.2.01.06	Insentif Fiskal	24,828,092,000.00	15,676,629,000.00	63.14
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**36,028,473,000.00**	**36,224,157,000.00**	**100.54**
4.3.01	Pendapatan Hibah	36,028,473,000.00	36,224,157,000.00	100.54

Sumber : LKPD Provinsi Bengkulu TA 2024.

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%) 2024
5	**BELANJA DAERAH**	**3,252,071,723,464.00**	**3.073.443.325.390,41**	**94.51**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2,462,944,209,646.00**	**2.348.319.941.251,41**	**95.35**
5.1.01	Belanja Pegawai	1,243,223,007,119.00	1,218,219,909,324.00	97.99
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	996,189,588,025.00	913,502,629,186.41	91.70
5.1.05	Belanja Hibah	220,134,114,502.00	213,592,402,741.00	97.03
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3,397,500,000.00	3,005,000,000.00	88.45

	JUMLAH BELANJA OPERASI	**2,462,944,209,646.00**	**2.348.319.941.251,41**	**95.35**
5.2	**BELANJA MODAL**	**475,336,122,709.00**	**413,712,288,429.00**	**87.04**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	0	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	145,299,704,595.00	132,656,432,697.00	91.30
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100,206,681,717.00	96,148,351,062.00	95.95
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200,938,705,340.00	163,562,317,166.00	81.40
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	28,391,031,057.00	20,847,187,504.00	73.43
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	500,000,000.00	498,000,000.00	99.60
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	100,000,000.00	0.00	0.00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**313,691,391,109.00**	**311,411,095,710.00**	**99.27**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	313,691,391,109.00	311,411,095,710.00	99.27
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0

Sumber : LKPD Provinsi Bengkulu TA 2024.

5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Database Inovasi Daerah Tahun 2024 Provinsi Bengkulu memiliki inovasi daerah sebagai berikut :

No	Perangkat Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovas Daerah Provinsi Bengkulu	1. Si Pede Ppd (Sistem Informasi Pengendalian, Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah) 2. Ketupek (Kreativitas Tobo Kito Melalui Produk Dan Teknologi) 3. E-Sakip 4. Lokomotif (Lomba Kreativitas Opd Menuju Bengkulu Inovatif)	
2	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu	1. Simas Tubel (Sistem Administrasi Tugas Belajar) 2. Sikresna Berakhlak (Sistem Informasi Profesional Aparatur Berakhlak)	
3	Badan Pengembangan Sumber Daya	Si Bulat (Sistem Bantu Lacak Surat)	

	Manusia Provinsi Bengkulu		
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu	1. Pusako (Pusat Informasi Pajak Kito) 2. Sipanggar Baja (Sistem Perencanaan Anggaran Hibah Berbasis Kinerja)	
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu	1. Siap Untuk Selamat 2. Rancak Bana (Respon Cepat Bencana) 3. Jitupasna (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana)	
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bengkulu	1. Belajar 2. Agen Wasdin (Agen Kewaspadaan Dini)	
7	Badan Penghubung Provinsi Bengkulu	1. Baso Mas Bedja (Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Bengkulu Di Jakarta Dan Sekitarnya) 2. E-Id Phb (Kartu Identitas Pegawai Badan Penghubung)	
8	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu	1. Goes To Campus 2. One Company One Partnership	
9	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu	1. Kelola Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat 2. Labling (Penggunaan Spektrofometer Portabel Pengujian Kualitas Udara)	
10	Dinas Koperasi Dan Ukm Provinsi Bengkulu	1. Bang Usro Gerot (Pengembangan Usaha Mikro Melalui Gerobak Motor) 2. Bang Wira Cakil (Pengembangan Kewirausahaan, Kecakapan Dan Skill)	
11	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan	1. 3 M (Mekanisasi Merajut Mimpi) 2. Star Sawit (Stabilitas Harga Kelapa Sawit Di Provinsi Bengkulu)	

	Perkebunan Provinsi Bengkulu		
12	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu	1. Sigantas (Siap Siaga Dan Tanggap Lalu Lintas) 2. Alibaba (Pengalihan Angkutan 3. Batubara Melalui Terminal Khusus Batubara)	
13	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Bengkulu	1. Csirt (Computer Security Incident Response Team) 2. Command Center Provinsi Bengkulu	
14	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	1. Sibujank (Siap Bantu Jaminan Kesehatan) 2. Slc (Smart Learning Competence) Rafflesia	
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Bengkulu	1. Apo Buek (Aplikasi Orang Bengkulu E- Perpus Provinsi Bengkulu) 2. Berendo Literasi 3. Pamer Arsip (Pameran Virtual Arsip) 4. Siduku (Sistem Informasi Data Umum Kepegawaian)	
16	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu	1. Bagas (Bantuan Tabung Gas 3 Kg Bagi Masyarakat Miskin) 2. Silalap (Sistem Layanan Laboratorium Dan Peralatan) 3. Sang Meli Gratis (Pemasangan Meteran Listrik Gratis)	
17	Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	1. On-Clip (One Klik Portal) 2. Si-Desti (Sistem Informasi Data Destinasi) Pariwisata 3. Sikola Ke Pantai (Sinergi Kolaborasi 4. Kerjasama Pengelolaan Wisata Tertib Aman Dan Indah)	
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bengkulu	1. Inotek Desa (Inovasi Dan Teknologi Desa) 2. Pakde Saja (Perangkat Desa Jadi Sarjana)	
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu	1. Lapor Rusak Pak (Aplikasi Pengaduan Jalan Rusak) 2. Si Palprot (Modifikasi Aspal Semprot)	

20	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu	1. Sitaran-Selin (Sistem Pendaftaran Perguliran Secara Online) 2. Bangkit Mudaku (Pemberantasan Gangguan Penyakit Mulut Dan Kuku)	
21	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu	1. Silando (Sistem Layanan Dupak Online) 2. Sikejar (Sistem Informasi Kegiatan Belajar Mengajar	
22	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bengkulu	1. Jebol Tuntas 2. Balas (Bantu Lacak Surat)	
23	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bengkulu	1. Sifakepol (Sistem Sertifikat Kelayakan Pengolahan Online) 2. Nelayan Dapek-Dapek Ajo	
24	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu	1. Gapura (Gelar Pangan Murah) 2. Sapa B2sa (Sadar Pangan Beragam Bergizi Seimbang Dan Aman)	
25	Dinas Sosial Provinsi Bengkulu	1. Kbs (Kartu Bengkulu Sejahtera) 2. Lansia Perjaka (Perkebunan, Rohani, Jangkrik, Kambing Dan Ayam)	
26	Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Bengkulu	1. Selpepelda (Seleksi Pemuda Pelopor Daerah)	
27	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Bengkulu	1. Gtra (Gugus Tugas Reformasi Agraria) 2. Rtlh (Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni)	
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu	1. Promag Jepang (Program Magang Ke Jepang) 2. Sipka (Sistem Informasi Pasar Kerja)	
29	Dinas Pemberdayaan	1. Gahwin Melinda (Pencegahan Perkawinan Usia Anak Melalui Mobil	

	Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu	Perlindungan) 2. Santapan Rasa (Stop Kekerasan 3. Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Rumah Amanah Rafflesia)	
30	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu	1. Gol Ikd (Gerakan Optimalisasi Layanan Identitas Kependudukan Digital) 2. Bts Digital (Buku Tamu Sistem Digital)	
31	Inspektorat Provinsi Bengkulu	1. Siduli (Aplikasi Pelaporan Pungli) 2. Sakti (Strategi Akselerasi Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Temuan Pemeriksaan)	
32	Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bengkulu	1. Sadhako (Safari Ramadhan Kolaborasi) 2. E-Mosi Caper (Elektronik-Monitoring 3. Eksekusi Pembiayaan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian)	
33	Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu	1. Oke Menir (Optimalisasi Akses Keuangan Daerah Dalam Memfasilitasi Pembiayaan Melawan Rentenir) 2. Petai Sedap (Pemetaan Tematik Sumber Daya Alam Provinsi Bengkulu)	
34	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu	1. Cakepdah (Aplikasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah) 2. E-Katalog Lokal (Katalog Elektronik Lokal) Provinsi Bengkulu	
35	Biro Organisasi Setda Provinsi Bengkulu	1. Ajak Bestie (Sistem Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Standar Kompetensi Dan Evaluasi Jabatan) 2. Bude Baper (Budaya Kerja Bangun Agen Perubahan)	
36	Biro Umum Setda Provinsi Bengkulu	1. Oppa (Optimalisasi Penggunaan Dan Pemeliharaan Aset)	

		2. Baraseruyat (Balai Raya Semarak Sebagai Rumah Rakyat)	
37	Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu	1. Ngota Kudai (Ngobrolin Peraturan Yang Bisa Dibuka Dengan Ai) 2. Tapai Susan (Tahapan Pencarian Arsip Keputusan)	
38	Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) M.Yunus Bengkulu	1. Leha (Layanan Emergency Hemodialisa) 2. Damping Semangat Kanker	
39	Rumah Sakit Khusus Jiwa (Rskj) Soeprapto Bengkulu	1. Kelas Sahabat Anak 2. E-Reservasi	
40	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu	1. Siap Serentak (Satlinmas Siaga Pantau Pemilu Serentak) 2. Satu Sisi Salah (Satuan Polisi Pamong Praja Masuk Sekolah Mengatasi Masalah)	
41	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Bengkulu	1. Perpus Setwan 2. Jaringan Asmara Dan Pokir	

Semoga Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintahan Provinsi Bengkulu dan Pemerintahan Pusat dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah.

Demikian, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi petunjuk, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin

GUBERNUR BENGKULU

H. HELMI HASAN

	PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU INSPEKTORAT DAERAH			
	CATATAN HASIL REVIU **KK 03**	Dibuat oleh/Tanggal Direviu oleh/Tanggal Disetuju oleh/Tanggal	: : :	Rudi Muslimin, S.IP., MM/ 12-02-2025 Niken Tri AP/13-2-2025 Deddy Erlando, SP., MM

URAIAN CATATAN HASIL REVIU	INDEKS KKR

Penyelenggaraan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) meliputi:

1. Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

   Jumlah IKK pada LPPD Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

   a. IKK Makro sebanyak 6 (enam) IKK
   b. IKK Outcome sebanyak 114 (seratus empat belas) IKK
   c. IKK Output sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) IKK

   IKK ditetapkan berdasarkan:

   a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
   b. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 hal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2024.

2. Tehnik Pengumpulan Data Kinerja

   Tim Penyusun dalam mengumpulkan data kinerja yang berhubungan langsung dengan Perangkat Daerah (PD) terkait, melalui tahapan:

   a. Penyiapan Data
   b. Kompilasi Data

3. Metodelogi Pengukuran Kinerja

   Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan data dukung dari PD berupa data primer dan Data sekunder terkait yang telah terverifikasi dan divalidasi oleh pejabat berwenang.

4. Analisis, Pembobotan dan Interprestasi Kinerja

   a. Bobot nilai perbidang urusan pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Capaian Kinerja	Bobot (%)	Hasil (%)
1	2	3	4	5
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1	Urusan Pendidikan	28,76	6	1,73
2.	Urusan Kesehatan	37,18	6	2,23

3	Urusan Pekerjaan Umum	3,74	6	0,22
4.	Urusan Perumahan Rakyat	1,64	6	0,1
5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	20	6	1,2
6	Urusan Sosial	20	6	1,2
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			
7	Urusan Tenaga Kerja	3,36	3	0,10
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8,13	3	0,24
9	Urusan Pangan	163,62	3	4,91
10	Urusan Pertanahan	33	2	0,66
11	Urusan Lingkungan Hidup	20,36	3	0,61
12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35,42	2	0,71
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14,67	3	0,44
14	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5,7	2	0,11
15	Urusan Perhubungan	0,29	3	0,01
16	Urusan Komunikasi dan Informatika	29,55	3	0,89
17	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	31,59	2	0,63
18	Urusan Penanaman Modal	11,25	3	0,34
19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	7,40	2	0,15
22	Urusan Statistik	50	2	1
23	Urusan Persandian	48,9	2	0,98
24	Urusan Kebudayaan	100	2	2
25	Urusan Perpustakaan	33,70	2	0,67
26	Urusan Kearsipan	43,45	2	0,87
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
27	Urusan Kelautan dan Perikanan	26	2	0,52
28	Urusan Pariwisata	11,26	3	0,34
29	Urusan Pertanian	22,61	3	0,68
30	Urusan Kehutanan	10,98	2	0,22
31	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	50	3	1,5
32	Urusan Perdagangan	8,79	3	0,26
33	Urusan Perindustrian	13,94	3	0,42
34	Urusan Transmigrasi	1,67	2	0,03
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
1	Perencanaan dan Keuangan		30	
2	Pengadaan	-*	10	-*
3	Kepegawaian	19,92	20	3,98
4	Manajemen Keuangan	16,4	20	3,28
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	46,87	20	9,37

**sampai dengan CHR ini dibuat data Pengadaan (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu)*

b. Bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Bobot (%)	Hasil (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	70,415	50	35,20

			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus	44,583	50	22,29		
			Rata-rata hasil			28,745		
	2.	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1,30	25	0,32		
			Persentase RS Rujukan Tingkat Provinsi yang terakreditasi	96	25	24		
			Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	25	25		
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko pada Situasi KLB Provinsi	100	25	25		
			Rata-rata Hasil			37,18		
	3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	6,29	10	0,62		
			Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Pprovinsi	6,84	10	0,684		
			Persentase luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	47,87	15	7,18		
			Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota	17,07	20%	3,41		
			Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	0	20	0		
			Rasio kemantapan jalan	62,82	15	9,42		
			Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	11,22	10	1,12		
			Rata-rata hasil			3,74		
	4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0/1	25			
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0/1	25			
			Persentasi luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	1,31	25	0,32		
			Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	11,82	25	2,95		
			Rata-rata Hasil			1,64		
	5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	25	25		
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	25	25		
			Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	25	25		
			Persentase penanganan pra bencana	20	25	5		
			Persentase penanganan tanggap darurat bencana	0	0	0		
			Rata-rata Hasil			20		
	6.	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	20	20		
			Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	20	20		
			Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	20	20		

			Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	20	20		
			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100	20	20		
			Rata-rata Hasil			20		
	7.	Tenaga Kerja	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	100	0			
			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,2	20	0,24		
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	4,80	20	0,96		
			Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	31,71	20	6,342		
			Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	31,57	20	6,314		
			Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	14,71	20	2,942		
			Rata-rata Hasil			3,36		
	8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	62,12	33	20,49		
			Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	2,70	33	0,891		
			Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	9,13	33	3,01		
			Rata-rata Hasil			8,13		
	9.	Pangan	Persentase cadangan pangan	163,62	100	163,62		
	10.	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	33	33		
			Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100	33	33		
			Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota.	100	33	33		
			Rata-rata Hasil			33		
	11.	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	73,45	50	36,72		
			Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	8	50	4		
			Rata-rata Hasil			20,36		
	12.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	100	50	50		
			Pemanfaatan data kependudukan	41,67	50	20,835		
			Rata-rata Hasil			8,13		
	13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	58,66	50	29,33		
			Persentase peningkatan status desa mandiri	0,0013	50	0,0065		
			Rata-rata Hasil			14,67		
	14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,23	33	0,735		
			Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)	43,25	33	14,27		

			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	6,35	33	2,09		
			Rata-rata Hasil			5,70		
	15.	Perhubungan	Rasio konektivitas provinsi	0,85	50	0,42		
			Kinerja lalu lintas provinsi	0,32	50	0,16		
			Rata-rata Hasil			0,29		
	16.	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	35	35		
			Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	35	35		
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	62,15	30	18,65		
			Rata-rata Hasil			29,55		
	17.	Koperasi dan UKM	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	70,30	50	35,15		
			Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	56,06	50	28,03		
			Rata-rata Hasil			31,59		
	18.	Penanaman Modal	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	11,25	100	11,25		
	19.	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,6	33	0,53		
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	5,57	33	1,88		
			Peningkatan prestasi olahraga	60	33	19,8		
			Rata-rata Hasil			7,40		
	20.	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	50	50		
			Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	50	50		
			Rata-rata Hasil			50		
	21.	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	48,9	100	48,9		
	22.	Kebudayaan	Terlestarikannya cagar budaya	100	100	100		
	23.	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	68,83	50	34,41		
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	65,96	50	32,99		
			Rata-rata Hasil			33,70		
	24.	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Psl 40 dan 59 U 43/2009)	72,65	50	36,32		
			Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	101,15	50	50,57		
			Rata-rata Hasil			43,45		
	25.	Kelautan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	36,968	50	18,49		
			Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	67	50	33,5		
			Rata-rata Hasil			26		
	26.	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per-kebangsaan	19,97	25	4,99		

			Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	102,12	25	25,53		
			Tingkat hunian akomodasi	55,24	25	13,81		
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2,85	25	0,71		
			Rata-rata Hasil			8,13		
	27.	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	57,58	50	28,79		
			Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	32,84	50	16,42		
			Rata-rata Hasil			22,61		
	28.	Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	82,55	33	27,24		
			Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)	15,18	33	5,01		
			Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	2,13	33	0,70		
			Rata-rata Hasil			10,98		
	29.	ESDM	Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar perda	100	50	50		
			Persentase desa yang teraliri listrik	100	50	50		
			Rata-rata Hasil			50		
	30.	Perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	21,24	14	2,97		
			Persentase penanganan pengaduan konsumen	0	14	0		
			Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	100	14	14		
			Tertib usaha	0	14	0		
			Persentase kinerja realisasi pupuk	84,81	14	11,87		
			Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	14	14		
			Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	7,90	14	1,10		
			Rata-rata Hasil			8,79		
	31.	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	1,56	17	0,26		
			Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100,20	17	17,03		
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	200	17	34		
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait		17			
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait		17			
			Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	82	17	13,94		
			Rata-rata Hasil			16,31		
	32.	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	5	35	1,75		

		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	5	35	1,75
		Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	5	30	1,5
		Rata-rata Hasil			1,67

c. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Bobot (%)	Hasil (%)
33.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	Persentase Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	26,95	16,7	4,50
		Persentase PAD	34,37	16,7	5,73
		Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *transfer expenditures*)	46,01	16,7	7,68
		Opini Laporan Keuangan	2 WDP 8 WTP	16,7	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Maturitas SPIP Level 3	16,7	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Kapabilitas APIP Level 3	16,7	
34.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama		33	
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif		33	
		Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan		33	
35.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	90,65	33	29,98
		Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	23,53	33	7,76
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	66,76	33	22,03
		Rata-rata Hasil			19,92
36.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	*Budget execution:* Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	94,51	25	23,62
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	98,62	25	24,65
		Assets management	0	25	
		Cash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	3,70	25	0,92
		Rata-rata Hasil			16,4
37.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (*Information on resources available to frontline service delivery units*)	93,75	50	46,87

URAIAN CATATAN HASIL REVIU	INDEKS KKR

Kesesuaian Sistematika dan Materi

1. Sistematika

a. Pengujian atas kesesuaian Sistematika dan Materi LPPD KK 01

Petunjuk Penyusunan LPPD 2024 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Bengkulu		Keterangan Sesuai/ Tidak
SISTEMATIKA	**MATERI/URAIAN**	**SISTEMATIKA**	**MATERI/URAIAN**	
BAB I PENDAHULUAN				
1.1 Latar Belakang 1.1.1 Penjelasan Umum	a. Undang-undang pembentukan daerah; b. Data geografis wilayah; c. Informasi Umum Data Kependudukan; d. Jumlah kabupaten/ kota (untuk provinsi); e. Rincian perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah serta dasar hukum pembentukan perangkat daerah f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Memuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah) h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja	1.1 Latar Belakang 1.1.1 Penjelasan Umum	a. Undang-undang pembentukan daerah; b. Data geografis wilayah; c. Informasi Umum Data Kependudukan; d. Jumlah kabupaten/ kota (untuk provinsi); e. Rincian perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah serta dasar hukum pembentukan perangkat daerah f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Memuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah) h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja	Sesuai
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Permasalahan strategis pemerintah daerah; b. Visi dan misi kepala daerah c. Program pembangunan	1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Permasalahan strategis pemerintah daerah; b. Visi dan misi kepala daerah c. Program pembangunan	Sesuai

	daerah, berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah, d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan		daerah, berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah, d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan			
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Bagian ini memuat hal- hal terkait dasar penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintah daerah selama satu tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran	1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun Standar Pelayanan Minimal yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: 1. Memastikan akses masyarakat pada pendidikan menengah; 2. Menyiapkan pendidikan khusus bagi masyarakat yang membutuhkan; 3. Memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi; 4. Memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi; 5. Memenuhi kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota; 6. Menyediakan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota; 7. Menyediakan dan	Sesuai		

			merehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi; 8. Memberikan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi; 9. Memberikan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi; 10. Merehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti; 11. Merehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; 12. Merehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti; 13. Merehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan 14. Memberikan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.			
BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH						
2.1 Capaian Kinerja Makro	Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum	BAB II Capaian Kinerja Penyelnggara Pemerintahan Daerah 2.1 Capaian Kinerja Makro	Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum	sesuai		

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>1.</td><td>Indeks Pembangunan Manusia</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Angka Kemiskinan</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Angka Pengangguran</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Pertumbuhan Ekonomi</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Pendapatan Perkapita</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>1.</td><td>Indeks Pembangunan Manusia</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Angka Kemiskinan</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Angka Pengangguran</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Pertumbuhan Ekonomi</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Pendapatan Perkapita</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</td>
<td>2.2.1 Indikator Kinerja Kunci
<table>
<tr><td>No</td><td>Urusan Pemerintahan</td><td>Indikator Kinerja Kunci</td><td>Capaian Kinerja</td><td>Sumber</td></tr>
<tr><td></td><td>Pendidikan</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Kesehatan</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
<table>
<tr><td>No</td><td>Urusan P</td><td>I Kinerja</td><td>Ca K</td><td>Sumb D</td></tr>
<tr><td></td><td>Perencanaa</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Keuangan</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Kepegawaian serta dan</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Penelitian pengemban</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>d</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</td>
<td>2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran
<table>
<tr><td>No</td><td>Urusan Pemerintahan</td><td>Indikator Kinerja Kunci</td><td>Capaian Kinerja</td><td>Sumber Data</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Pendidikan</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kesehatan</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil
<table>
<tr><td>Nomor</td><td>Urusan Pemerintah</td><td>Indikator Kinerja Kunci Hasil</td><td>Capaian Kinerja</td><td>Sumber Data</td></tr>
<tr><td>1.a.1</td><td>Pendidikan</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.a.2</td><td>Pendidikan</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
<table>
<tr><td>Nomor</td><td>Urusan Pemerintah</td><td>Indikator Kinerja Kunci Hasil</td><td>Capaian Kinerja</td><td>Sumber Data</td></tr>
<tr><td>4.a.1</td><td>Pendidikan</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.a.2</td><td>Pendidikan</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>Belum sesuai</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah</td>
<td>Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintahan daerah</td>
<td>2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah</td>
<td>2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja
2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja;
2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjajian Kinerja
2.3.4.Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah
2.3.5.Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber</td>
<td>Belum sesuai</td>
</tr>
</table>

	memuat: **a.** target kinerja dalam perjanjian kinerja; **b.** pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja; **c.** pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya; **d.** pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah; **e.** analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan **f.** analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian		Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai 2.3.6. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja			
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN						
1. Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan	Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh pemerintah daerah provinsi.	1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh pemerintah daerah provinsi.	Sesuai		
2. Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan di Provinsi	Gambaran umum menggambarkan pelaksanaan tugas pembantuan di daerah provinsi, baik yang diterima dari pemerintah pusat maupun yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/ kota yang meliputi jumlah kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang memberikan penugasan, bidang urusan yang ditugaspembantuankan, jumlah kegiatan dan anggaran tugas pembantuan, dan lain-lain pelaksanaan tugas pembantuan.	2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi Bengkulu	Gambaran umum menggambarkan pelaksanaan tugas pembantuan di daerah provinsi, baik yang diterima dari pemerintah pusat maupun yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota yang meliputi jumlah kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang memberikan penugasan, bidang urusan yang ditugaspembantuankan, jumlah kegiatan dan anggaran tugas pembantuan, dan lain-lain pelaksanaan tugas pembantuan.	Sesuai		

<table>
<tr><td>3. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan</td><td>Berisi tentang capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran</td><td>3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan</td><td>Berisi tentang capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran</td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td>3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi Tugas Pembantuan dari kementerian/ Lembaga yang ditugaskan kepada daerah provinsi</td><td>3.1.1 Target Kinerja
Target kinerja adalah target program/ kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan.</td><td>3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi Tugas Pembantuan Yang dari Kementerian / Lembaga Yang ditugaskan Kepada Daerah Provinsi</td><td>3.1.1 Target Kinerja
Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan.</td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td></td><td>3.1.2 Realisasi
Realisasi adalah target program/ kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan
<table><tr><td>No</td><td>K/LPNK</td><td>DASAR PELAKSANAA PENUGASAN</td><td>KEG D</td></tr><tr><td>(</td><td>(</td><td>(3)</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Kementeri</td><td>Peraturan
No… Tahun…</td><td>Prog Kegi
Rinc Kegi</td></tr><tr><td>2</td><td>Dst</td><td></td><td></td></tr></table></td><td></td><td>3.1.2 Realisasi
Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan
<table><tr><td>No</td><td>K/LPNK</td><td>DASAR PELAKSANAA PENUGASAN</td><td>KEG D</td></tr><tr><td>(</td><td>(</td><td>(3)</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Kementeri</td><td>Peraturan
No… Tahun…</td><td>Prog Kegi
Rinc Kegi</td></tr><tr><td>2</td><td>Dst</td><td></td><td></td></tr></table></td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td>3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota Tugas pembantuan dari daerah provinsi yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.</td><td>3.2.1 Target Kinerja
Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan yang tertuang dalam peraturan gubernur atau dokumen/lembar penugasan.</td><td>3.2 Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten/Kota

Tugas Pembantuan Dari Daerah Provinsi Yang Ditugaskan Kepada Daerah Kabupaten/Kota</td><td>Tidak ada</td><td>Tidak sesuai karena data belum diisi</td></tr>
</table>

	3.2.2 Realisasi Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan tugas pembantuan. Matrik capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan provinsi yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota 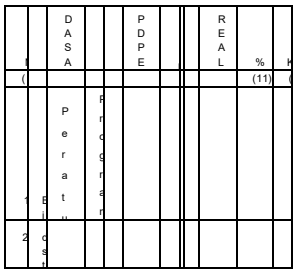 	-	-	**Tidak sesuai karena data belum disi**
3.3 Permasalahan dan kendala mengambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan	Mengambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan.	3.3. Permasalahan dan Kendala	Mengambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan.	Sesuai
3.4 Saran dan Tindak Lanjut	Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan selanjutnya.	3.4. Saran dan Tidak Lanjut	Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan selanjutnya.	sesuai
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL				
4.1 Urusan Pendidikan	4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar 4.1.2 Target Pencapaian	4.1 Urusan Pendidikan	4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar 4.1.2 Target Pencapaian 4.1.3 Realisasi	Sesuai

	4.1.3 Realisasi 4.1.4 Alokasi Anggaran 4.1.5 Dukungan Personil 4.1.6 Permasalahan dan Solusi		4.1.4 Alokasi Anggaran 4.1.5 Dukungan Personil 4.1.6 Permasalahan dan Solusi			
4,2 Urusan Kesehatan		4.2 Urusan Kesehatan	4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar 4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah 4.2.3 Realisasi 4.2.4 Alokasi Anggaran 4.2.5 Dukungan Personil 4.2.6 Permasalahan dan Solusi	Sesuai		
4.3 Urusan Pekerjaan Umum		4.3 Urusan Pekerjaan Umum	4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar 4.3.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah 4.3.3 Realisasi 4.3.4 Alokasi Anggaran 4.3.5 Dukungan Personil 4.3.6 Permasalahan dan Solusi	Sesuai		
4.4 Urusan Permukiman dan Perumahan Rakyat		4.4. Urusan Perumahan Rakyat	4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar 4.4.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah 4.4.3 Realisasi 4.4.4 Alokasi Anggaran 4.4.5 Dukungan Personil 4.4.6 Permasalahan dan Solusi	sesuai		
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar 4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah 4.5.3 Realisasi 4.5.4 Alokasi Anggaran 4.5.5 Dukungan Personil 4.5.6 Permasalahan dan Solusi	Sesuai		
4.6 Urusan Sosial		4.6 Urusan Sosial	4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar 4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah 4.6.3 Realisasi 4.6.4 Alokasi Anggaran 4.6.5 Dukungan Personil 4.6.6 Permasalahan dan Solusi	Sesuai		
4.7 Program dan Kegiatan		4.7 Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan SPM urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat sebagai berikut Tabel 4.17 Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Trantibbumlinmas Tahun 2024	**tambahkan Program dan Kegiatan Pendukung SPM untuk urusan Pendidikan, Kesehatan, PU, PR**		

			<table><tr><th>No</th><th>Program</th><th>Indikator</th><th>Keguatan</th><th>Sub Kegiatan</th><th>Anggaran</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>Sumber : Satpol PP Provinsi Bengkulu, 2024.	
BAB PENUTUP		**BAB V PENUTUP**		

b. Pengujian atas kesesuaian Sistematika dan Materi LKPJ, KK 01

Permendagri nomor 19 Tahun 2024 dan Pedoman Penyusunan LPPD		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPJ) Provinsi Bengkulu		Ket Sesuai/ Tidak
SISTIMATIKA	MATERI/URAIAN	SISTIMATIKA	MATERI/URAIAN	
BAB I PENDAHULUAN		BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Dasar Hukum	(dijelaskan undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan	1.1 Dasar Hukum	a. Nomor 9 Tahun 1967 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Karesidenan Bengkulu; b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008	Sesuai
1.2 Visi dan Misi	1.2.1 Visi 1.2.2 Misi	1.2 Visi dan Misi	1.2.1 Visi 1.2.2 Misi	Sesuai
1.3 Data Umum Daerah	Data umum daerah memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi: 1. Data geografis wilayah; 2. Jumlah Penduduk; 3. Pertumbuhan penduduk; 4. Jumlah PNS; 5. Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan; 6. Realisasi belanja menurut jenis belanja; dan 7. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan.	1.3 Data Umum Daerah	**1.3.1 Data geografis Daerah;** **1.3.2 Jumlah Penduduk;** **1.3.3 Pertumbuhan penduduk;** **1.3.4 Jumlah PNS;** **1.4 Ikhtisar Pencapaian Realisasi APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024;** **1.4.1 Ikhtisar Perkembangan Realisasi dan Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024; dan** **1.4.2 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 Menurut Jenis Pendapatan** **1.4.3 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 Menurut Jenis Belanja** **1.4.4 Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 Menurut Jenis Pembiayaan**	**Tidak Sesuai;**

<table>
<tr><td colspan="5">BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</td></tr>
<tr><td></td><td>Bab ini menjelaskan perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan dalam rangka mencapai target yang telah disepakati dalam dokumen anggaran.</td><td></td><td>-</td><td>Tidak Sesuai karena belum disi</td></tr>
<tr><td colspan="5">BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH</td></tr>
<tr><td>3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan</td><td>Capaian pelaksanaan program dan kegiatan memuat:
1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja;
2. Capaian kinerja urusan masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dukumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja.

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
<table><tr><td>NO</td><td>URUSAN PEMERI</td><td>PERANG</td><td>KEBIJAKAN</td><td></td><td>TARGET</td><td>REALI</td><td>PERMASALAHAN</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Pendidikan</td><td>1. Dinas Pe</td><td></td><td></td><td>.....</td><td></td><td>1.....2...</td><td>1.....</td><td>1.....</td></tr><tr><td>2</td><td>.....</td><td>.....</td><td></td><td></td><td>.....</td><td></td><td>1.....2...</td><td>1.....</td><td>1.....</td></tr></table></td><td>3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan</td><td>-</td><td>Tidak Sesuai karena belum disi</td></tr>
<tr><td></td><td>3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
<table><tr><td>NO</td><td></td><td>RUS</td><td></td><td>KEBIJAKAN</td><td></td><td>REALISASI</td><td>PERMASALAHA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Tenaga Kerja</td><td>Dinas</td><td></td><td></td><td>.....</td><td>1.....2...</td><td>1.....</td><td>1.....</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td>.....</td><td>1.....2...</td><td>1.....</td><td>1.....</td></tr></table></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan
<table>
<tr><td></td><td>RU</td><td>PEP</td><td>KE</td><td>RA</td><td>TA</td><td>RE</td><td>PE</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Kelaua</td><td>Din</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1……</td><td>1……</td><td>1……</td></tr>
<tr><td></td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1……</td><td>1……</td><td>1……</td></tr>
</table></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan</td><td>Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:
<table>
<tr><td>No</td><td>Kebijakan</td><td>Dasar Hukum</td><td>Tujuan/Masalah</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan</td><td>-</td><td>Tidak Sesuai karena data tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah belum diisi</td></tr>
<tr><td>3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya</td><td>Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:
<table>
<tr><td>No</td><td>Rekomendasi DPRD Tahun N-1</td><td>Tindak Lanjut</td><td>Tujuan/Masalah yang Diselesaika</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya</td><td>-</td><td>Tidak Sesuai karena data tentang tindak lanjut pemerintah daerah belum diisi</td></tr>
<tr><td colspan="2">BAB IV. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dan Penugasan</td><td colspan="3">BAB IV. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dan Penugasan</td></tr>
<tr><td>4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas pembantuankan Uraian mengenai identifikasi urusan pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan.</td><td>4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.
4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya.</td><td>Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuan</td><td>-</td><td>Tidak Sesuai karena data belum diisi</td></tr>
<tr><td>4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas</td><td>Memuat uraian hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan serta upaya penyelesaian pada</td><td>-</td><td>-</td><td>Tidak Sesuai karena data belum</td></tr>
</table>

Pembantuan dan Upaya Penyelesaian	setiap tugas pembantuan yang diterima dari permerintah tingkat atasnya maupun tugas pembantuan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya.			**diisi**
BAB V PENUTUP				

c. Pengujian atas kesesuaian Sistematika dan Materi RLPPD, KK 01

<table>
<tr><th colspan="2">Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 dan Pedoman Penyusunan LPPD 2024</th><th colspan="2">Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) Provinsi Bengkulu</th><th>Ket Sesuai/ Tidak</th></tr>
<tr><th>SISTIMATIKA</th><th>MATERI/URAIAN</th><th>SISTIMATIKA</th><th>MATERI/URAIAN</th><th></th></tr>
<tr><td>1. Capaian Kinerja Makro</td><td>Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Format laporan kinerja makro meliputi:
<table>
<tr><th>No</th><th>Indikator Kinerja Makro</th><th>Capaian Kinerja Tahun N-1</th><th>Capaian Kinerja Tahun N</th><th>Perubahan (%)</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Indeks Pembangunan Manusia</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Angka Kemiskinan</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Angka Pengangguran</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pertumbuhan Ekonomi</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Pendapatan Perkapita</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Ketimpangan Pendapatan</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>1. Capaian Kinerja Makro</td><td>Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Np</th><th>Indikator kinerja Makro</th><th>Capaian Kinerja 2023</th><th>Cpaian Kinerja 2024</th><th>Laju Kinerja</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Angka Kemiskinan (Persen)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Angka Pengangguran (Persen)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pertumbuhan Ekonomi (Persen)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Pendapatan Per-Kapita (Rupiah)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Ketimpangan Pendapatan (Persen)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>Tidak sesuai</td></tr>
<tr><td>2. Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar</td><td>(pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat, sosial).</td><td>2.Ringkasan Capaian Kinerja urusan Pelayanan Dasar</td><td>Capaian kinerja urusan Pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan darah dalam mengukur dan mengurus urusan Pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk di antaranya :
1) Urusan Pendidikan
2) Urusan Kesehatan
3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4) Urusan Perumahan Rakyat
5) Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
6) Urusan Sosial</td><td>sesuai</td></tr>
<tr><td>3. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuang</td><td></td><td>3. Hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun</td><td>-</td><td>Tidak sesuai karena hasil EPPD yang dilakuk</td></tr>
</table>

an Pemerintah Daerah tahun sebelumnya.		sebelumnya		**an oleh Kemendagri yang memuat skor kinerja dan status kinerja Tahun 2023 belum *release***
4. Realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah.		4.Ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah	-	**Tidak sesuai karena data realisasi penerimaan dan pengeluaran anggran daerah Bengkulu Tahun 2024 belum dicantumkan**
5. Realisasi penerimaan menurut jenis penerimaan dan realisasi pengeluaran menurut jenis pengeluar an, dan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan.		-	-	**Tidak sesuai karna Realisasi penerimaan menurut jenis penerimaan dan realisasi pengeluaran menurut jenis pengeluaran , dan realisasi pembiayaan belum dicantumkan**
6, Inovasi Daerah	**Tidak ada**	**5.Inovasi Daerah**	**ada**	**Tidak sesuai karena mencantumkan data yang tidak sesuaidengan pedoman umum**

2. Materi

a. Kesesuaian Sistematika dan Materi Penyusunan LPPD

1) Kesesuaian Sistematika dan Materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 terhadap Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 hal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024, berdasarkan hasil reviu, masih terdapat beberapa catatan yang masih harus ditindaklanjuti, yaitu:

a) LPPD Tahun 2024 belum memiliki Judul, Kata Pengantar dan Daftar Isi

b) Pada Bab I Pendahuluan di bagian:

No.	Uraian	Catatan
1.	1.1. Latar Belakang	
	1.1.1. Penjelasan Umum	1. Pada huruf c Informasi Umum Data Kependudukan, data yang disampaikan masih menggunakan data Tahun 2023 2. Tabel pada huruf e Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah belum diisi 3. Tabel pada huruf f Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah belum diisi 4. Tabel pada huruf h Pelaksanaan Program berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja belum diisi
	1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Pada huruf c Program Pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah, belum mencantumkan dokumen jangka menengah b. Pada huruf d kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan, data yang dicantumkan masih data tahun 2022

c) Pada Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No.	Uraian	Catatan
1.	2.1. Capaian Kinerja Makro	Tabel Capaian kinerja makro belum sesuai pedoman umum
2.	2.2. Capaian Kinerja Penyelengaraan Urusan Pemerintahan	Indikator-indikator yang tercantum pada LPPD belum berdasarkan pedoman umum

	2.2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Terdapat beberapa Informasi capaian kinerja akuntabilitas kinerja belum tercantum pada LPPD, yaitu: a. Huruf d: Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah; b. Huruf e: Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan c. Huruf f: Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

d) Pada Bab III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

No.	Uraian	Catatan
1.	3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota	Mencantumkan informasi mengenai tugas pembantuan Tahun 2023 bukan Tahun 2024

2) Menyesuaikan kembali penyajian sistematika dan materi pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 hal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

a) Mencantumkan Judul, Kata Pengantar dan Daftar Isi pada LPPD Tahun 2024
b) Melakukan pengecekan kembali terhadap seluruh data yang tercantum dalam LPPD Tahun 2024, apakah telah menggunakan data Tahun 2024 bukan data tahun-tahun sebelumnya
c) Mengisi tabel yang tercantum pada Bab I diisi sesuai kebutuhannya
d) Capaian kinerja makro harus memuat tabel perubahan (%)
e) Indikator Kinerja Kunci Keluaran, Indikator Kinerja Kunci Hasil, dan Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan harus menjelaskan IKK yang tidak memiliki data/informasi
f) Tabel Indikator Kinerja Kunci Keluaran,dan Indikator Kinerja Kunci Hasil pada kolom capaian kinerja di sesuai dengan ketentuan.

b. Kesesuaian Sistematika dan Materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 dan Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 hal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai

berikut:

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

1) Pada 3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan belum mencantumkan:
   a) Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja
   b) Capaian kinerja urusan masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dukumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.
   c) Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja.

2) Capaian kinerja program dan kegiatan tersebut diatas harus dituangkan menggunakan tabel, akan tetapi berdasarkan LKPj Provinsi Bengkulu masih terdapat ketidaksesuaian, yaitu:
   a) Belum mencantumkan Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada huruf 3.1.1
   b) Tabel yang dibuat tidak mempedomani Permendagri 19 Tahun 2024.
   c) Keterangan pada bawah tabel belum dibuat, yang menyatakan kalimat:
      Target adalah hasil yang dicapai pada tingkat outcome yang segera terlihat setelah output dicapai (*immediate outcome*). Contoh: pembangunan jalan, outputnya adalah: panjang jalan yang terbangun, outcomenya adalah peningkatan sosial dan/atau ekonomi masyarakat. Sedangkan immediate outcomenya antara lain waktu tempuh atau biaya/ongkos angkut pada ruas jalan yang dibangun tersebut.

3) Pada angka 3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dibuat tidak mempedomani Permendagri 19 Tahun 2024
4) Pada angka 3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan yang dibuat tidak mempedomani Permendagri 19 Tahun 2024
5) Pada angka 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya, tabel yang dicantumkan belum mempedomani Permendagri 19 Tahun 2024

c. Kesesuaian Sistematika dan Materi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2024 dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 dan Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 hal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024,

sebagai berikut:

1) Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Format laporan kinerja makro meliputi:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia			
2	Angka Kemiskinan			
3	Angka Pengangguran			
4	Pertumbuhan Ekonomi			
5	Pendapatan Perkapita			
6	Ketimpangan Pendapatan			

2) Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial).
3) Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya.
4) Realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah.
5) Realisasi penerimaan menurut jenis penerimaan dan realisasi pengeluaran menurut jenis pengeluaran, dan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan
6) Inovasi Daerah.

Pengujian Verifikasi dan Validitas Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

A. Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro pada rancangan LPPD tercantum dalam BAB II LPPD Tahun 2024

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tabel Capaian Kinerja Makro Provinsi Bengkulu

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,30	74,91	0,82
2	Angka Kemiskinan	14,04	13,56	-3,42
3	Angka Pengangguran	3,42	3,11	-9,06
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,28	4,62	7,94
5	Pendapatan Per kapita (Rp)	46,300,486	49,233,121	6,33
6	Ketimpangan Pengeluaran (Gini Ratio)	0,330	0,342	3,64

Sumber Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2025

B. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

1. Bobot Nilai Perbidang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Capaian Kinerja	
		Sebelum verifikasi	Setelah verifikasi
1	2	3	
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	URUSAN PENDIDIKAN	57,499	57,499
2.	URUSAN KESEHATAN	74,325	74,325
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM	32,47	32,47
4.	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	3,28	3,28
5	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	64	64
6	URUSAN SOSIAL	100	100
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR		
7	URUSAN TENAGA KERJA	109,92	109,92
8	URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	20,96	20,96
9	URUSAN PANGAN	163,62	163,62
10	URUSAN PERTANAHAN	100	100
11	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	73,45	73,45
12	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	70,84	70,84
13	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	29,33	29,33
14	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17,28	17,28
15	URUSAN PERHUBUNGAN	0,585	0,585
16	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	87,38	87,38
17	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	63,18	63,18
18	URUSAN PENANAMAN MODAL	11,25	59,62
19	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	22,39	22,39
22	URUSAN STATISTIK	100	100
23	URUSAN PERSANDIAN	48,9	48,9
24	URUSAN KEBUDAYAAN	100	100
25	URUSAN PERPUSTAKAAN	67,40	67,40
26	URUSAN KEARSIPAN	86,9	86,9
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
27	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	51,98	51,98
28	URUSAN PARIWISATA	45,045	45.045
29	URUSAN PERTANIAN	45,21	45,21
30	KEHUTANAN	33,29	33,29
31	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	100	100
32	URUSAN PERDAGANGAN	4,485	4,485
33	URUSAN PERINDUSTRIAN	6,370	6,370
34	URUSAN TRANSMIGRASI	5	5
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
1	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	0	0
2	PENGADAAN	0	0
3	KEPEGAWAIAN	60,31	60,31
4	MANAJEMEN KEUANGAN	49,20	49,20
5	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	93,75	93,75

2. Bobot Capaian Kinerja Ikk Hasil Per Bidang Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	
			Sebelum verifikasi	Setelah verifikasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	70,415	70,415
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus	44,583	44,583
2.	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1,30	1,30
		Persentase RS Rujukan Tingkat Provinsi yang terakreditasi	96	96
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	100
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi KLB Provinsi	100	100
3.	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	5	5
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	5	5
		Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	5	5
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	6,29	6,29
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	6,84	6,84
		Persentase luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	47,87	47,87
		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota	17,07	17,07
		Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	0	0
		Rasio kemantapan jalan	62,82	62,82
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	11,22	11,22
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0/1	0/1
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0/1	0/1
		Persentasi Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	1,31	1,31
		Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	11,82	11,82
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	100
		Persentase penanganan pra bencana	20	20
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	0	0

	6.	Sosial	Persentase 1 terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100		
			Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100		
			Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100		
			Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100		
			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100	100		
	7.	Tenaga Kerja	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	100	100		
			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,2	1,2		
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	4,80	4,80		
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	31,71	31,71		
			Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	31,57	31,57		
			Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	14,71	14,71		
	8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	62,12	62,12		
			Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	2,70	2,70		
			Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	9,13	9,13		
	9.	Pangan	Persentase cadangan pangan	163,62	163,62		
	10.	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	100		
			Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100	100		
			Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas Kabupaten/Kota.	100	100		
	11.	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	73,45	73,45		
			Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	0	0		
	12.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	100	100		
			Pemanfaatan data kependudukan	41,67	41,67		
	13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	58,66	58,66		
			Persentase peningkatan status desa mandiri	0,0013	0,0013		
	14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,23	2,23		
			Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	43,25	43,25		
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	6,35	6,35		
	15.	Perhubungan	Rasio konektivitas Provinsi	0,85	0,85		
			Kinerja lalu lintas provinsi	0,32	0,32		
	16.	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100		

			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100		
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	62,15	62,15		
	17.	Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	70,30	70,30		
			Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	56,06	56,06		
	18.	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	11,25	59,62		
	19.	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,6	1,6		
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	5,57	5,57		
			Peningkatan prestasi olahraga	60	60		
	20.	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100		
			Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100		
	21.	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	48,9	48,9		
	22.	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100	100		
	23.	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	68,83	68,83		
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	65,96	65,96		
	24.	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Psl40 dan 59 U 43/2009)	72,65	72,65		
			Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	101,15	101,15		
	25.	Kelautan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi (sumber data: one data KKP)	36,968	36,968		
			Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	67	67		
	26.	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	19,97	19,97		
			Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	102,12	102,12		
			Tingkat hunian akomodasi	55,24	55,24		
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2,85	2,85		
	27.	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	57,58	57,58		
			Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	32,84%	32,84%		
	28.	Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	82,55	82,55		
			Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)	15,18	15,18		
			Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	2,13	2,13		
	29.	ESDM	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	100	100		
			Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	100	100		
	30.	Perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	21,24	21,24		
			Persentase penanganan pengaduan konsumen	0	0		

		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	100	100
		Tertib Usaha	0	0
		Persentase kinerja realisasi pupuk	84,81	84,81
		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	100
		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	7,90	7,90
31.	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	1,56	1,56
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100,20	100,20
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	200	200
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	82	82

Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	
			Sebelum verifikasi	Setelah verifikasi
32.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	26,95	26,95
		Persentase PAD	34,37	34,37
		Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	46,01	46,01
		Opini Laporan Keuangan	2 WDP 8 WTP	2 WDP 8 WTP
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Maturitas SPIP Level 3	Maturitas SPIP Level 3
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Kapabilitas APIP Level 3	Kapabilitas APIP Level 3
33.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	0
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	0	0
		Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	0	0
34.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	90,65	90,65
		Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	23,53	23,53
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	66,76	66,76
35.	Fungsi Penunjang Urusan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	94,51	94,51

	Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	98,62	98,62
		Assets management	0	0
		Cash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	3,70	3,70
36.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	93,75	93,75

C. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahanan Daerah

Belum terdapat data pada akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang menggambarkan informasi capaian keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah.

Seharusnya berdasarkan Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 hal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 pada BAB II Sistematika Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi untuk angka 2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa:

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

1. Target kinerja dalam perjanjian kinerja.
2. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.
3. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
4. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah
5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.
6. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

D. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

D.1 Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh pemerintah provinsi dari pemerintah pusat.

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

NO	K/Lpnk	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan,Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Skpd Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisas Capaian Kinerja	(%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**	**SP DIPA-**	**PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS**	**Provinsi Bengkulu**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Provinsi Bengkulu**	**46.406.085**	**46.395.393**	99,98			
			Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	**Provinsi Bengkulu**		**46.090.594**	**46.080.445**	**99,98**			
			- Dukungan Teknis			**60.832**	**60.832**				
			- Administrasi Kegiatan			60.832	60.832	**100**			
			- OM Prasarana bidang Konektifitas Darurat (Jalan)			**43.327.286**	**43.317.142**	**99,98**			
			- Preservasi Jalan Kerakaf - SP. Nakau (E Katalog)	Kab. Bengkulu Tengah		470.694	470.694	100,00			
			- Preservasi Jalan Kerakaf - SP.	Kab. Bengkulu Tengah		4.470.574	4.470.574	100,00			

			Nakau (E Katalog)									
			- Preservasi Jalan Kerakaf - SP. Nakau (E Katalog)	Kab. Bengkulu Utara		31.961.692	31.961.692	100,00				
			- Penanganan Longsoran Kerkap- SP Nakau (JBT.LEMAU B) E KATALOG	Kab. Bengkulu Utara		5.583.844	5.583.844	100,00				
			- Penanganan Drainase dan Pemasangan Box Culvert (Off Pavement) Ruas Jalan WR. Supratman	Kota Bengkulu		438.472	428.564	97,74				
			- Preservasi Jalan Kerakap - SP. Nakau (SWAKLOLA)	Kab.Bengkulu Tengah		402.010	401.774	99,94				
			- OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)			**2.702.476**	**2.702.471**	**100,00**				
			- Preservasi Jalan Kerkap - SP Nakau (SWAKELOLA)	Kab. Bengkulu Utara		2.330.176	2.330.176	100,00				
			- Preservasi Jembatan Kerkap - SP Nakau (SWAKLOLA)	Kab. Bengkulu Utara		372.300	372.295	100,00				
			Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	**Provinsi Bengkulu**		**315.491**	**314.948**	**99,83**				
			Layanan Dukungan Manajemen Internal	**Provinsi Bengkulu**		**315.491**	**314.948**	**99,83**				
			- Persiapan dan Pemutakhiran Data Dasar	Bengkulu		9.950	9.949	99,99				
			- Pengelolaan Keuangan	Bengkulu		147.183	146.677	99,66				
			- Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang milik Negara (BMN)	Bengkulu		18.862	18.862	100,00				
			- Oprasional Satker dan PPK dan SKPD	Bengkulu		139.496	139.460	99,97				
2	**KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**		**PROGRAM KETAHANAN SUMBER DAYA AIR**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Provinsi Bengkulu**	**22.789.110**	**22.785.181**	**99,98**				
			Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana			**21.935.932**	**21.935.563**	**100,00**				
			- OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air			**21.935.932**	**21.935.563**	**100,00**				
			- Operasi Rutin D.I Air Manjunto	Kab. Mukomuko		1.246.520	1.246.344	99,99				
			- Operasi Rutin D.I Air Seluma	Kab. Seluma		1.274.389	1.274.314	99,99				
			- Operasi Rutin D.I Air Nipis Seginim	Kab. Bengkulu Selatan		1.035.599	1.035.519	99,99				
			- Operasi Rutin D.I Air Lais Kuro Tidur	Kab. Bengkulu Utara		833.145	833.120	100,00				
			- Operasi Rutin D.I Air Ketahun	Kab. Lebong		644.303	644.303	100,00				
			- Operasi Rutin D.I Air Alas	Kab. Seluma		997.252	997.244	100,00				
			- Pemeliharaan Berkala D.I Air Manjunto	Kab. Mukomuko		825.949	825.949	100,00				
			- Pemeliharaan Berkala D.I Air Seluma	Kab. Seluma		1.014.014	1.014.034	100,00				
			- Pemeliharaan Berkala D.I Air Nipis Seginim	Kab. Bengkulu Selatan		755.111	755.111	100,00				
			- Pemeliharaan Berkala D.I Air Lais Kuro Tidur	Bengkulu		1.092.268	1.092.268	100,00				
			- Pemeliharaan Berkala D.I Air Ketahun	Kab. Lebong		492.793	492.793	100,00				
			- Pemeliharaan Berkala D.I Air Alas	Kab. Seluma		706.371	706.346	100,00				
			- Pemeliharaan Rutin D.I Air Manjunto	Kab. Mukomuko		2.984.732	2.984.732	100,00				
			- Pemeliharaan Rutin D.I Air Seluma	Kab. Seluma		3.214.284	3.214.284	100,00				
			- Pemeliharaan Rutin D.I Air Nipis Seginim	Kab. Bengkulu Selatan		990.361	990.361	100,00				
			- Pemeliharaan Rutin D.I Air Lais Kuro Tidur	Kab. Bengkulu Utara		2.250.844	2.250.844	100,00				
			- Pemeliharaan Rutin D.I Air Ketahun	Kab. Lebong		212.499	212.499	100,00				
			- Pemeliharaan Rutin D.I Air Alas	Kab. Seluma		1.365.498	1.365.498	100,00				
			Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air			**853.178**	**849.618**	**99,58**				
			- Layanan Dukungan Manajemen Internal			**853.178**	**849.618**	**99,58**				
			- Administrasi Kegiatan	Kota Bengkulu		689.858	686.298	99,48				
			- Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Kota Bengkulu		163.320	163.320	100,00				

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

No	K/ LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

1	Kementerian Perindustrian	1. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri *Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah dan Aneka	Provinsi Bengkulu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu	Rp. 2.120.524.000	Rp. 2.047.228.000	97%	100%	100%	Ada Blokir Autometic atdjustmen dan self bloking sebesar Rp. 73.236.000
		2. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara	2. Program Dukungan Manajemen *Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka	Provinsi Bengkulu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu	Rp. 69.840.000	Rp. 69.840.000	100%	100%	100%	-
		3. UU No. 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggran 2024									

3. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara									
1		1. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**		DTPHP	40.000.000	40.000.000	100	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman pangan	100	
		2. UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA. 2020	**Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan**			40.000.000	40.000.000	100	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman pangan	100	
		3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023	Output Koordinasi	Provinsi Bengkulu (Dinas)		40.000.000	40.000.000	100		100	
		4. Permentan Nomor: 19/Permentan/OT.140/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**		DTPHP	2.870.000.000	2.859.690.000	99,64	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman pangan	100	
			Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan		DTPHP	1.610.000.000	1.601.940.000	99,50	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman pangan	100	
			Output Koordinasi	Provinsi Bengkulu (Dinas)	DTPHP	60.000.000	59.990.000	99,98		100	
			Output Sarana Pengembangan Kawasan	Kabupaten Kepahiang, Mukomuko dan Bengkulu Utara	DTPHP	1.550.000.000	1.541.950.000	99,48		100	
			Rincian Kegiatan: Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	Kabupaten Kepahiang, Mukomuko dan Bengkulu Utara	DTPHP	1.550.000.000	1.541.950.000	99,48		100	
		5. Permentan Nomor: 364/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan Kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi	**Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan**	Provinsi Bengkulu (Dinas)		1.260.000.000	1.257.750.000	99,82	Terpenuhinya kebutuhan perbenihan tanaman pangan untuk produksi	100	
		6. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: Y. 119.B4 Tahun 2024 tentang KPA Dana Tugas Pembantuan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu TA. 2024	Output Koordinasi	Provinsi Bengkulu (Dinas)		20.000.000	20.000.000	100		100	
			Output Sarana Pengembangan Kawasan	Provinsi Bengkulu (Dinas)		1.240.000.000	1.237.750.000	99,82		100	
			Rincian Kegiatan Area Penyaluran Benih Padi	Kab.Bengkulu Selatan,		340.000.000	340.000.000	100		100	
			Rincian Kegiatan Area Penyaluran Benih Jagung	Provinsi Bengkulu		900.000.000	897.750.000	99,75		100	
			Program Dukungan Manajemen		DTPHP	277.412.000	277.412.000	100		100	
			Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada DitjenTanaman Pangan			277.412.000	277.412.000	100	Terwujudnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	100	
			Output Layanan Manajemen Kinerja Internal	Provinsi Bengkulu (Dinas)		277.412.000	277.412.000	100		100	
2.			**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**		DTPHP	6.162.567.000	6.160.748.751	99,97	Penyediaan Prasarana dan Sarana pertanian yang sesuai kebutuhan	100	
			Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	Provinsi Bengkulu (Dinas)		5.887.567.000	5.886.724.000	99,99	Meningkatnya efektivitas dan Efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air ke seluruh lahan pertanian	100	
			Output Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Kabupaten Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Rejang Lebong dan Seluma		165.000.000	144.900.000	87,82		100	

			Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian			275.00.000	274.024.751	99,65	Tersedianya Data dan Informasi Alat Mesin Pertanian	100	
			Output Koordinasi	Provinsi Bengkulu		275.00.000	274.024.751	99,65		100	
			Program Dukungan Manajemen			185.820.000	185.820.000	100		100	
			Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DitjenPrasarana dan Sarana Pertanian	Provinsi Bengkulu (Dinas)		185.820.000	185.820.000	100	Terwujudnya Birokrasi Dirjen PSP yang Efektif dan Efisien	100	
			Output Layanan Manajemen Kinerja Internal			185.820.000	185.820.000	100		100	
3.			**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**		DTPHP	2.833.897.000	2.789.315.820	98,43		100	
			Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan	Provinsi Bengkulu (Dinas)		312.900.000	312.037.020	99,72	Terpenuhinya kebutuhan perlindungan tanaman perkebunan untuk produksi	100	
			Output Sertifikasi Produk			312.900.000	312.037.020	99,72		100	
			Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran HasilPerkebunan	Provinsi Bengkulu (Dinas)		1.903.042.000	1.898.695.000	99,77	Meningkatnya Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan untuk komoditas ekspor		
			Output Koordinasi	Provinsi Bengkulu (Dinas)		146.000.000	146.00.000	100		100	
			Output Promosi	Provinsi Bengkulu (Dinas)		174.800.000	171.700.000	98,23		100	
			Output Standarisasi Produk			984.650.000	986.836.000	100		100	
			Rincian Kegiatan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang, Kaur, Lebong		984.650.000	986.836.000	100		100	
			Output Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			200.000.000	200.000.000	100		100	
			Output Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			397.592.000	394.159.000	99,14		100	
			Rincian Kegiatan Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	Kab. Kepahiang,		397.592.000	394.159.000	99,14		100	
			Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan			617.955.000	578.583.800	93,63	Terpenuhinya kebutuhan perbenihan perkebunan untuk komoditas ekspor dan pengendali impor	50	
			Output Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			159.165.000	159.165.000	100		100	
			Output Sarana Pengembangan Kawasan	Provinsi Bengkulu		458.790.000	419.418.800	91,42		100	
			Rincian Kegiatan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan	Provinsi Bengkulu		458.790.000	419.418.800	91,42		100	
			Program Dukungan Manajemen		DTPHP	112.920.000	112.920.000	100		100	
			Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DitjenPerkebunan	Provinsi Bengkulu (Dinas)		112.920.000	112.920.000	100	Terwujudnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan	100	
			Output Layanan Manajemen Kinerja Internal			112.920.000	112.920.000	100		100	

D.2 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Yang Diterima Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Dari Pemerintah Pusat Dan/Atau Provinsi Dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun anggaran 2024 tidak memberikan tugas pembantuan kepada kabupaten/kota se–Provinsi Bengkulu.

E. Simpulan

1. Data tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraaan pemerintah daerah karena :
   a. Data tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan
   b. data tidak tersedia pada lembaga yang dinyatakan sebagai sumber data

c. Metode, teknik pengumpulan dan analisis data tidak dapat dijelaskan d. Data tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan pada PD: 1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2) Dinas Kesehatan 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4) Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan e. Data dukung tidak berasal dari sumber yang dapat dipertangungjawabkan pada PD: 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3) Dinas Pemuda dan Olahraga 4) Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan f. Data Dukung belum divalidasi kepala PD dan stempel basah pada PD 1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3) Badan Kepegawaian Daerah 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5) Dinas Kesehatan 6) Dinas Pariwisata 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 9) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 10) Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan g. Kesalahan penginputan pembilang dan pembagi pada rumus 1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Badan Kepegawaian Daerah 2) Dinas Kesehatan 3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 6) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 7) Dinas Ketahanan Pangan 8) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9) Dinas Pemuda dan Olahraga 10) Dinas Koperasi dan UMKM h. Validasi data dukung melebihi 31 Desember 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

2. Data yang dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan catatan agar:

a) Menyesuaikan kembali penamaan maupun formal tabel sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2024 dan Surat Direktur Jenderal Dinamis Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor [illegible] tanggal [illegible] Desember 2024 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024:

1) Menyesuaikan bentuk [illegible] dan [illegible] yang [illegible] pada [illegible] Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

2) Menyesuaikan [illegible] yang [illegible] dari [illegible] dengan dalam [illegible] dan [illegible] unsur pemerintah yang [illegible] [illegible] [illegible] pemerintah daerah.

b) Menyesuaikan [illegible] dalam yang [illegible] pada [illegible] [illegible] Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 dan Surat Direktur Jenderal Dinamis Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor [illegible] tanggal [illegible] Desember 2024 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

c) [illegible] informasi yang dimasukkan pada [illegible] maupun [illegible] dalam LPPD Tahun 2024 yang [illegible].

d) [illegible] [illegible] dalam yang [illegible] dengan [illegible] Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Kesimpulan/Tindak yang belum dilaksanakan dan rapat

[illegible]	[illegible]

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Pembangunan No. 1 Telp. (0736) 23048 – 23049, Fax (0736) 23049
Website: *https://inspektorat.bengkuluprov.go.id* *E-mail: inspektorat@bengkuluprov.go.id*

NOTA DINAS

Yth.	:	Bapak Gubernur Bengkulu Cq. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Dari	:	Inspektur Daerah Provinsi Bengkulu
Tembusan	:	-
Tanggal	:	18 Februari 2025
Nomor	:	700/ 86 /LHR/INP/2025
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	1 eksemplar
Hal	:	Laporan Hasil Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2024

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Bengkulu Nomor: B.700.1/33/ST/INP/2025 tanggal 20 Januari 2025 untuk Melakukan Reviu atas Penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) untuk Tahun Anggaran 2024 pada Biro Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dan Dinas/Instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Pendahuluan

A. Dasar Penugasan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;
7. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor M.732.INP Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 Tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Bengkulu Tahun 2025;
9. Nota Dinas Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu Nomor B/100.2/1/BAG.OTDA/2025 tanggal 13 Januari 2025 hal Nama Tim Pereviu untuk Penyusunan LPPD, LKPj, RLPPD Tahun Anggaran 2025.

B. Ruang Lingkup Reviu

1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

a.1 Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,30	74,91	0,82
2	Angka Kemiskinan	14,04	13,56	-3,42
3	Angka Pengangguran	3,42	3,11	-9,06
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,28	4,62	7,94
5	Pendapatan Per kapita (Rp)	46,300,486	49,233,121	6,33
6	Ketimpangan Pengeluaran (GINI Ratio)	0,330	0,342	3,64

Sumber Data Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2025

a.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

a.2.1. Capaian kinerja IKK hasil per bidang Urusan pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Capaian Kinerja	Bobot (%)	Hasil (%)
1	2	3	4	5
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1	Urusan Pendidikan	28,76	6	1,73
2.	Urusan Kesehatan	37,18	6	2,23
3	Urusan Pekerjaan Umum	3,74	6	0,22
4.	Urusan Perumahan Rakyat	1,64	6	0,1
5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	20	6	1,2

No	Urusan Pemerintahan	Capaian Kinerja	Bobot (%)	Hasil (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
6	Urusan Sosial	20	6	1,2
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			
7	Urusan Tenaga Kerja	3,36	3	0,10
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8,13	3	0,24
9	Urusan Pangan	163,62	3	4,91
10	Urusan Pertanahan	33	2	0,66
11	Urusan Lingkungan Hidup	20,36	3	0,61
12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35,42	2	0,71
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14,67	3	0,44
14	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5,7	2	0,11
15	Urusan Perhubungan	0,29	3	0,01
16	Urusan Komunikasi dan Informatika	29,55	3	0,89
17	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	31,59	2	0,63
18	Urusan Penanaman Modal	11,25	3	0,34
19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	7,40	2	0,15
22	Urusan Statistik	50	2	1
23	Urusan Persandian	48,9	2	0,98
24	Urusan Kebudayaan	100	2	2
25	Urusan Perpustakaan	33,70	2	0,67
26	Urusan Kearsipan	43,45	2	0,87
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
27	Urusan Kelautan dan Perikanan	26	2	0,52
28	Urusan Pariwisata	11,26	3	0,34
29	Urusan Pertanian	22,61	3	0,68
30	Urusan Kehutanan	10,98	2	0,22
31	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	50	3	1,5
32	Urusan Perdagangan	8,79	3	0,26
33	Urusan Perindustrian	13,94	3	0,42
34	Urusan Transmigrasi	1,67	2	0,03
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
1	Perencanaan dan Keuangan		30	
2	Pengadaan	-*	10	-*
3	Kepegawaian	19,92	20	3,98
4	Manajemen Keuangan	16,4	20	3,28
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	46,87	20	9,37

a.2.2 Capaian Kinerja IKK Hasil Per Bidang Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Bobot (%)	Hasil (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	70,415	50	35,20
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus	44,583	50	22,29
		Rata-rata hasil			28,745
2.	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1,30	25	0,32
		Persentase RS Rujukan Tingkat Provinsi yang terakreditasi	96	25	24
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	25	25
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko pada Situasi KLB Provinsi	100	25	25
		Rata-rata Hasil			37,18
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	6,29	10	0,62
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Pprovinsi	6,84	10	0,684
		Persentase luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	47,87	15	7,18
		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota	17,07	20%	3,41
		Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	0	20	0
		Rasio kemantapan jalan	62,82	15	9,42
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	11,22	10	1,12
		Rata-rata hasil			3,74
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0/1	25	
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0/1	25	
		Persentasi luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	1,31	25	0,32
		Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	11,82	25	2,95
		Rata-rata Hasil			1,64
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	25	25
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	25	25
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	25	25
		Persentase penanganan pra bencana	20	25	5
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	0	0	0
		Rata-rata Hasil			20

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Bobot (%)	Hasil (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	20	20
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	20	20
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	20	20
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	20	20
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100	20	20
		Rata-rata Hasil			20
7.	Tenaga Kerja	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	100	0	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,2	20	0,24
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	4,80	20	0,96
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	31,71	20	6,342
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	31,57	20	6,314
		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	14,71	20	2,942
		Rata-rata Hasil			3,36
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	62,12	33	20,49
		Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	2,70	33	0,891
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	9,13	33	3,01
		Rata-rata Hasil			8,13
9.	Pangan	Persentase cadangan pangan	163,62	100	163,62
10.	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	33	33
		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100	33	33
		Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota.	100	33	33
		Rata-rata Hasil			33
11.	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	73,45	50	36,72
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	8	50	4
		Rata-rata Hasil			20,36
12.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	100	50	50
		Pemanfaatan data kependudukan	41,67	50	20,835

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Bobot (%)	Hasil (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Rata-rata Hasil			8,13
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	58,66	50	29,33
		Persentase peningkatan status desa mandiri	0,0013	50	0,0065
		Rata-rata Hasil			14,67
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,23	33	0,735
		Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)	43,25	33	14,27
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	6,35	33	2,09
		Rata-rata Hasil			5,70
15.	Perhubungan	Rasio konektivitas provinsi	0,85	50	0,42
		Kinerja lalu lintas provinsi	0,32	50	0,16
		Rata-rata Hasil			0,29
16.	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	35	35
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	35	35
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	62,15	30	18,65
		Rata-rata Hasil			29,55
17.	Koperasi dan UKM	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	70,30	50	35,15
		Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	56,06	50	28,03
		Rata-rata Hasil			31,59
18.	Penanaman Modal	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	11,25	100	11,25
19.	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,6	33	0,53
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	5,57	33	1,88
		Peningkatan prestasi olahraga	60	33	19,8
		Rata-rata Hasil			7,40
20.	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	50	50
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	50	50
		Rata-rata Hasil			50
21.	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	48,9	100	48,9
22.	Kebudayaan	Terlestarikannya cagar budaya	100	100	100
23.	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	68,83	50	34,41
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	65,96	50	32,99
		Rata-rata Hasil			33,70
24.	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Psl 40 dan 59 U 43/2009)	72,65	50	36,32

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Bobot (%)	Hasil (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	101,15	50	50,57
		Rata-rata Hasil			43,45
25.	Kelautan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	36,968	50	18,49
		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	67	50	33,5
		Rata-rata Hasil			26
26.	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per-kebangsaan	19,97	25	4,99
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	102,12	25	25,53
		Tingkat hunian akomodasi	55,24	25	13,81
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2,85	25	0,71
		Rata-rata Hasil			8,13
27.	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	57,58	50	28,79
		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	32,84	50	16,42
		Rata-rata Hasil			22,61
28.	Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	82,55	33	27,24
		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)	15,18	33	5,01
		Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	2,13	33	0,70
		Rata-rata Hasil			10,98
29.	ESDM	Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar perda	100	50	50
		Persentase desa yang teraliri listrik	100	50	50
		Rata-rata Hasil			50
30.	Perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	21,24	14	2,97
		Persentase penanganan pengaduan konsumen	0	14	0
		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	100	14	14
		Tertib usaha	0	14	0
		Persentase kinerja realisasi pupuk	84,81	14	11,87
		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	14	14
		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	7,90	14	1,10
		Rata-rata Hasil			8,79
31.	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	1,56	17	0,26

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Bobot (%)	Hasil (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100,20	17	17,03
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	200	17	34
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait		17	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait		17	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	82	17	13,94
		Rata-rata Hasil			16,31
32.	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	5	35	1,75
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	5	35	1,75
		Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	5	30	1,5
		Rata-rata Hasil			1,67

a.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Bobot (%)	Hasil (%)
33.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	Persentase Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	26,95	16,7	4,50
		Persentase PAD	34,37	16,7	5,73
		Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *transfer expenditures*)	46,01	16,7	7,68
		Opini Laporan Keuangan	2 WDP 8 WTP	16,7	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Maturitas SPIP Level 3	16,7	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Kapabilitas APIP Level 3	16,7	
34.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama		33	
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif		33	
		Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan		33	
35.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	90,65	33	29,98
		Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	23,53	33	7,76
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	66,76	33	22,03

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Bobot (%)	Hasil (%)
		Rata-rata Hasil			19,92
36.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	*Budget execution:* Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	94,51	25	23,62
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	98,62	25	24,65
		Assets management	0	25	
		Cash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	3,70	25	0,92
		Rata-rata Hasil			16,4
37.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (*Information on resources available to frontline service delivery units*)	93,75	50	46,87

a.3 Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.

Belum terdapat data pada akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang menggambarkan informasi capaian keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah.

Seharusnya berdasarkan Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 hal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 pada BAB II Sistematika Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi untuk angka 2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

1) Target kinerja dalam perjanjian kinerja.
2) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.
3) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
4) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

5) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.
6) Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

2. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

b.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang Diterima Oleh Daerah Provinsi Dari Pemerintah Pusat.

b.1.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

NO	K/Lpnk	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan,Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Skpd Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisas Capaian Kinerja	(%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**	**SP DIPA-**	**PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS**	**Provinsi Bengkulu**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Provinsi Bengkulu**	**46.406.085**	**46.395.393**	99,98			
			Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	**Provinsi Bengkulu**		**46.090.594**	**46.080.445**	**99,98**			
			- **Dukungan Teknis**			**60.832**	**60.832**				
			- Administrasi Kegiatan			60.832	60.832	**100**			
			- **OM Prasarana bidang Konektifitas Darurat (Jalan)**			**43.327.286**	**43.317.142**	**99,98**			
			- Preservasi Jalan Kerakaf - SP. Nakau (E Katalog)	Kab. Bengkulu Tengah		470.694	470.694	100,00			
			- Preservasi Jalan Kerakaf - SP. Nakau (E Katalog)	Kab. Bengkulu Tengah		4.470.574	4.470.574	100,00			
			- Preservasi Jalan Kerakaf - SP. Nakau (E Katalog)	Kab. Bengkulu Utara		31.961.692	31.961.692	100,00			
			- Penanganan Longsoran Kerkap- SP Nakau (JBT.LEMAU B) E KATALOG	Kab. Bengkulu Utara		5.583.844	5.583.844	100,00			
			- Penanganan Drainase dan Pemasangan Box Culvert (Off Pavement) Ruas Jalan WR. Supratman	Kota Bengkulu		438.472	428.564	97,74			
			- Preservasi Jalan Kerakap - SP. Nakau (SWAKLOLA)	Kab.Bengkulu Tengah		402.010	401.774	99,94			
			- **OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)**			**2.702.476**	**2.702.471**	**100,00**			
			- Preservasi Jalan Kerkap - SP Nakau (SWAKELOLA)	Kab. Bengkulu Utara		2.330.176	2.330.176	100,00			
			- Preservasi Jembatan Kerkap - SP Nakau (SWAKLOLA)	Kab. Bengkulu Utara		372.300	372.295	100,00			
			Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	**Provinsi Bengkulu**		**315.491**	**314.948**	**99,83**			
			Layanan Dukungan Manajemen Internal	**Provinsi Bengkulu**		**315.491**	**314.948**	**99,83**			
			- Persiapan dan Pemutakhiran Data Dasar	Bengkulu		9.950	9.949	99,99			
			- Pengelolaan Keuangan	Bengkulu		147.183	146.677	99,66			
			- Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang milik Negara (BMN)	Bengkulu		18.862	18.862	100,00			
			- Oprasional Satker dan PPK dan SKPD	Bengkulu		139.496	139.460	99,97			
2	**KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**		**PROGRAM KETAHANAN SUMBER DAYA AIR**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Provinsi Bengkulu**	**22.789.110**	**22.785.181**	**99,98**			
			Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana			**21.935.932**	**21.935.563**	**100,00**			
			- **OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air**			**21.935.932**	**21.935.563**	**100,00**			
			- Operasi Rutin D.I Air Manjunto	Kab. Mukomuko		1.246.520	1.246.344	99,99			
			- Operasi Rutin D.I Air Seluma	Kab. Seluma		1.274.389	1.274.314	99,99			
			- Operasi Rutin D.I Air Nipis Seginim	Kab. Bengkulu Selatan		1.035.599	1.035.519	99,99			
			- Operasi Rutin D.I Air Lais Kuro Tidur	Kab. Bengkulu Utara		833.145	833.120	100,00			
			- Operasi Rutin D.I Air Ketahun	Kab. Lebong		644.303	644.303	100,00			
			- Operasi Rutin D.I Air Alas	Kab. Seluma		997.252	997.244	100,00			
			- Pemeliharaan Berkala D.I Air Manjunto	Kab. Mukomuko		825.949	825.949	100,00			
			- Pemeliharaan Berkala D.I Air	Kab. Seluma		1.014.014	1.014.034	100,00			

NO	K/Lpnk	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan,Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Skpd Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisas Capaian Kinerja	(%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Seluma								
			- Pemeliharaan Berkala D.I Air Nipis Seginim	Kab. Bengkulu Selatan		755.111	755.111	100,00			
			- Pemeliharaan Berkala D.I Air Lais Kuro Tidur	Bengkulu		1.092.268	1.092.268	100,00			
			- Pemeliharaan Berkala D.I Air Ketahun	Kab. Lebong		492.793	492.793	100,00			
			- Pemeliharaan Berkala D.I Air Alas	Kab. Seluma		706.371	706.346	100,00			
			- Pemeliharaan Rutin D.I Air Manjunto	Kab. Mukomuko		2.984.732	2.984.732	100,00			
			- Pemeliharaan Rutin D.I Air Seluma	Kab. Seluma		3.214.284	3.214.284	100,00			
			- Pemeliharaan Rutin D.I Air Nipis Seginim	Kab. Bengkulu Selatan		990.361	990.361	100,00			
			- Pemeliharaan Rutin D.I Air Lais Kuro Tidur	Kab. Bengkulu Utara		2.250.844	2.250.844	100,00			
			- Pemeliharaan Rutin D.I Air Ketahun	Kab. Lebong		212.499	212.499	100,00			
			- Pemeliharaan Rutin D.I Air Alas	Kab. Seluma		1.365.498	1.365.498	100,00			
			Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air			**853.178**	**849.618**	**99,58**			
			- Layanan Dukungan Manajemen Internal			**853.178**	**849.618**	**99,58**			
			- Administrasi Kegiatan	Kota Bengkulu		689.858	686.298	99,48			
			- Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Kota Bengkulu		163.320	163.320	100,00			

b.1.2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

No	K/ LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
1	Kementerian Perindustrian	1. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri *Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah dan Aneka	Provinsi Bengkulu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu	Rp. 2.120.524.000	Rp. 2.047.228.000	97%	100%	100%	Ada Blokir Autometic atdjustmen dan self bloking sebesar Rp. 73.236.000
		2. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara	2. Program Dukungan Manajemen *Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka	Provinsi Bengkulu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu	Rp. 69.840.000	Rp. 69.840.000	100%	100%	100%	-
		3. UU No. 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggran 2024									

b.1.3 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara									
1		1. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**		DTPHP	40.000.000	40.000.000	100	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman pangan	100	
		2. UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA. 2020	**Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan**			40.000.000	40.000.000	100	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman pangan	100	
		3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023	Output Koordinasi	Provinsi Bengkulu (Dinas)		40.000.000	40.000.000	100		100	
		4. Permentan Nomor: 19/Permentan/OT.140/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**		DTPHP	2.870.000.000	2.859.690.000	99,64	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman pangan	100	
			Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan		DTPHP	1.610.000.000	1.601.940.000	99,50	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman pangan	100	

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
			Output Koordinasi	Provinsi Bengkulu (Dinas)	DTPHP	60.000.000	59.990.000	99,98		100	
			Output Sarana Pengembangan Kawasan	Kabupaten Kepahiang, Mukomuko dan Bengkulu Utara	DTPHP	1.550.000.000	1.541.950.000	99,48		100	
			Rincian Kegiatan: Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	Kabupaten Kepahiang, Mukomuko dan Bengkulu Utara	DTPHP	1.550.000.000	1.541.950.000	99,48		100	
		5. Permentan Nomor: 364/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan Kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi	**Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan**	Provinsi Bengkulu (Dinas)		1.260.000.000	1.257.750.000	99,82	Terpenuhinya kebutuhan perbenihan tanaman pangan untuk produksi	100	
		6. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: Y. 119.B4 Tahun 2024 tentang KPA Dana Tugas Pembantuan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu TA. 2024	Output Koordinasi	Provinsi Bengkulu (Dinas)		20.000.000	20.000.000	100		100	
			Output Sarana Pengembangan Kawasan	Provinsi Bengkulu (Dinas)		1.240.000.000	1.237.750.000	99,82		100	
			Rincian Kegiatan Area Penyaluran Benih Padi	Kab.Bengkulu Selatan,		340.000.000	340.000.000	100		100	
			Rincian Kegiatan Area Penyaluran Benih Jagung	Provinsi Bengkulu		900.000.000	897.750.000	99,75		100	
			Program Dukungan Manajemen		DTPHP	277.412.000	277.412.000	100		100	
			Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada DitjenTanaman Pangan			277.412.000	277.412.000	100	Terwujudnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	100	
			Output Layanan Manajemen Kinerja Internal	Provinsi Bengkulu (Dinas)		277.412.000	277.412.000	100		100	
2.			**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**		DTPHP	6.162.567.000	6.160.748.751	99,97	Penyediaan Prasarana dan Sarana pertanian yang sesuai kebutuhan	100	
			Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	Provinsi Bengkulu (Dinas)		5.887.567.000	5.886.724.000	99,99	Meningkatnya efektivitas dan Efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air ke seluruh lahan pertanian	100	
			Output Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Kabupaten Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Rejang Lebong dan Seluma		165.000.000	144.900.000	87,82		100	
			Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian			275.00.000	274.024.751	99,65	Tersedianya Data dan Informasi Alat Mesin Pertanian	100	
			Output Koordinasi	Provinsi Bengkulu		275.00.000	274.024.751	99,65		100	
			Program Dukungan Manajemen			185.820.000	185.820.000	100		100	
			Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DitjenPrasarana dan Sarana Pertanian	Provinsi Bengkulu (Dinas)		185.820.000	185.820.000	100	Terwujudnya Birokrasi Dirjen PSP yang Efektif dan Efisien	100	
			Output Layanan Manajemen Kinerja Internal			185.820.000	185.820.000	100		100	
3.			**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**		DTPHP	2.833.897.000	2.789.315.820	98,43		100	
			Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan	Provinsi Bengkulu (Dinas)		312.900.000	312.037.020	99,72	Terpenuhinya kebutuhan perlindungan tanaman perkebunan untuk produksi	100	
			Output Sertifikasi Produk			312.900.000	312.037.020	99,72		100	
			Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran HasilPerkebunan	Provinsi Bengkulu (Dinas)		1.903.042.000	1.898.695.000	99,77	Meningkatnya Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan untuk komoditas ekspor		
			Output Koordinasi	Provinsi Bengkulu (Dinas)		146.000.000	146.00.000	100		100	
			Output Promosi	Provinsi Bengkulu (Dinas)		174.800.000	171.700.000	98,23		100	
			Output Standarisasi Produk			984.650.000	986.836.000	100		100	

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
			Rincian Kegiatan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang, Kaur, Lebong		984.650.000	986.836.000	100		100	
			Output Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			200.000.000	200.000.000	100		100	
			Output Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			397.592.000	394.159.000	99,14		100	
			Rincian Kegiatan Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	Kab. Kepahiang,		397.592.000	394.159.000	99,14		100	
			Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan			617.955.000	578.583.800	93,63	Terpenuhinya kebutuhan perbenihan perkebunan untuk komoditas ekspor dan pengendali impor	50	
			Output Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			159.165.000	159.165.000	100		100	
			Output Sarana Pengembangan Kawasan	Provinsi Bengkulu		458.790.000	419.418.800	91,42		100	
			Rincian Kegiatan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan	Provinsi Bengkulu		458.790.000	419.418.800	91,42		100	
			Program Dukungan Manajemen		DTPHP	112.920.000	112.920.000	100		100	
			Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DitjenPerkebunan	Provinsi Bengkulu (Dinas)		112.920.000	112.920.000	100	Terwujudnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan	100	
			Output Layanan Manajemen Kinerja Internal			112.920.000	112.920.000	100		100	

b.2 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Yang Diterima Oleh Daerah Kabupaten/Kota Dari Pemerintah Pusat Dan/Atau Provinsi Dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Pemerintah Provinsi Bengkulu pada Tahun Anggaran 2024 tidak memberikan tugas pembantuan kepada Kabupaten/Kota se–Provinsi Bengkulu.

3. Capaian Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

c.1 Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal

c.1.1 Urusan Pendidikan

NO	INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL	TARGET CAPAIAN NASIONAL (%)	TARGET CAPAIAN PROVINSI (%)	CAPAIAN 2024 (Rp)
1	Jumlah Warga Negara usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100	99,75	260.829.714.841,00
	Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100 100	47,74 54,95	2.479.975.000,00
2	Jumlah Warga Negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus	100	99,73	13.513.900.050,00
	Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100 100	40,95 40,95	100.692.250,00

c.1.2 Urusan Kesehatan

No	Indikator	Rumus	Capaian (%)
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk Terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	$\frac{\text{Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama}} \times 100\%$	100
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	$\frac{\text{Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB}} \times 100\%$	100

c.1.3 Urusan Pekerjaan Umum

Sebagaimana dijelaskan pada uraian sub target pencapaian SPM oleh daerah pada urusan Pekerjaan Umum di atas bahwa pelayanan dasar dimaksud belum dilaksanakan di Provinsi Bengkulu, maka pelayanan tersebut tidak ada realisasi.

c.1.4 Urusan Perumahan Rakyat

Sebagaimana dijelaskan pada uraian sub target pencapaian SPM oleh daerah pada urusan Perumahan Rakyat di atas bahwa pelayanan dasar dimaksud belum dilaksanakan di Provinsi Bengkulu, maka pelayanan tersebut tidak ada realisasi.

c.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian Nasional (%)	Target Capaian Provinsi (%)	Capaian 2024
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di provinsi	100	100	67.330.000,00

c.1.6 Urusan Sosial

NO	Indikator SPM	Target Daerah 2024 (%)	Capaian Daerah (%)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	100	100	-
2	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100	100	396.937.000,00
3	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	100	100	1.088.863.000,00
4	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100	100	0
5	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	100	100	135.653.405,00

c.2 Kendala Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melaksanakan 6 (enam) urusan yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal yaitu:

c.2.1 Urusan Pendidikan

No	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1	Jumlah Warga Negara usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Data Jumlah Warga Negara berdasarkan usia masih susah didapat sehingga perhitungan masih belum efektif.	Melakukan pendataan ulang warga usia 16-18 tahun yang berpartisipasi di pendidikan menengah dan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk data jumlah penduduk berdasarkan usia.

c.2.2 Urusan Kesehatan

No	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1.	Jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	1. Anggaran belum memadai 2. Kurangnya Sarana dan prasarana pelayanan yang memadai 3. Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan Penduduk Daerah Resiko belum memadai	1. Penambahan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat terdampak krisis kesehatan bisa lebih baik lagi 2. Peningkatan sarana dan prasarana guna peningkatan mutu pelayanan 3. Peningkatan SDMK dan Penduduk Daerah Resiko guna mengurangi dampak bencana

No	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
2.	Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan khusus.	1. Kurangnya keterampilan SDM tenaga medis yang memadai 2. Sarana dan Prasarana belum memadai 3. Minimnya anggaran untuk peningkatan mutu pelayanan	1. Pelatihan keterampilan untuk para tenaga medis 2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana 3. Penambahan anggaran

c.2.3 Urusan Pekerjaan Umum

No	Dasar Hukum	Jenis Pelayanan	Target Pencapaian SPM		Permasalahan		Solusi
1	PermenPUPR Nomor 29/PRT/M/2018	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	1	Persentase Akses Air Minum Layak: 93,24%	1	Bangunan fisik belum selesai sehingga belum bisa beroperasi	Mengusulkan dan mengoptimalk an angaran untuk Pembangunan fisik air minum dan sanitasi baik melalui APBD, APBN, maupun Sumber Pendanaan Lainnya.
			2	Persentase Air Minum Aman (SR): 25,81%	2	Anggaran yang dialokasikan untuk pemenuhan SPAM Regional tidak mencukupi	
			3	Persentase Air Minum Aman BJP: 67,43%			
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	1	Persentase Akses Sanitasi Layak : 80,85%	1	Belum tersedianya anggaran untuk pembangunan SPALD Regional	
			2	Persentase Sanitasi Aman : 47,36%	2	Jakstrada Sanitasi baru disusun untuk Tahun Anggaran 2024	

c.2.4 Urusan Perumahan Rakyat

No	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperolah rumah layak huni	Belum dimasukan ke dalam rencana penganggaran APBD dan APBN	Dimasukan ke dalam rencana penganggaran APBD dan APBN
2.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Belum dimasukan ke dalam rencana penganggaran APBD dan APBN	Dimasukan ke dalam rencana penganggaran APBD dan APBN

c.2.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di provinsi	1. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan patroli Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu. 2. Kurangnya tenaga SDM yang profesional untuk mendukung kegiatan di lapangan berdasarkan pada bidangnya masing-masing.	1. Mengajukan alokasi anggaran berkaitan sarana prasarana yang belum tersedia dengan berkoordinasi dan berkonsultasi pada pihak Pemerintah Daerah maupun pemerintah pusat melalui bantuan keuangan. 2. Merencanakan bimtek dan diklat untuk mendukung tenaga professional di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu

c.2.6 Urusan Sosial

No	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	- Pemerintah Provinsi Bengkulu belum memiliki panti sosial bagi disabilitas didalam panti, yang selama ini mengaju pada lembaga/panti milik masyarakat wewenang provinsi - Dukungan Pemerintah Daerah dalam penganggganggaran bagi penyandang disabilitas tidak maksimal	- Pembentukan panti sosial bagi penyandang disabilitas - TAPD memaksimalkan anggaran pada OPD Dinas Sosial untuk penerapan SPM

c.3 Ketersediaan Anggaran Dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal

c.3.1 Urusan Pendidikan

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lainnya yang sah. Alokasi anggaran pada tahun 2024 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dalam rangka pencapaian target SPM urusan pendidikan di Provinsi Bengkulu berjumlah Rp260.829.714.841,00.

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber

dari APBD, APBN dan sumber dana lainnya yang sah. Alokasi anggaran pada tahun 2024 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dalam rangka pencapaian target SPM urusan pendidikan di Provinsi Bengkulu berjumlah Rp260.829.714.841,00

c.3.2 Urusan Kesehatan

Anggaran yang di alokasikan untuk pelaksanaan SPM kesehatan dari setiap jenis pelayanan bidang kesehatan pada tahun 2024 didukung oleh alokasi anggaran yang berasal dari dana APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dengan alokasi sebesar Rp5.900.000.000,00

c.3.3 Urusan Pekerjaan Umum

Pelaksanaan SPM urusan Pekerjaan Umum belum maksimal dialokasikan penganggarannya.

c.3.4 Urusan Perumahan Rakyat

Pelaksanaan SPM urusan perumahan rakyat tidak dialokasikan penganggarannya.

c.3.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran di Satpol PP Provinsi Bengkulu untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada urusan ketentraman, ketertiban Umum, perlindungan masyarakat pada Tahun 2024 sebesar. Rp667.330.000,00

c.3.6 Urusan Sosial

Alokasi anggaran yang mendukung penyelenggaraan 3 (tiga) jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial tahun 2024 pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu yang bersumber dari APBD dengan total pagu PD sebesar Rp22.012.103.700,00 sedangkan anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan SPM bidang sosial sebesar Rp1.878.545.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.680.428.405,00

II. Hasil reviu

A. Pencermatan Kesesuaian Materi Dan Sistematika

1. Sistematika

1.1 Draft LPPD

a. Pengujian atas kesesuaian Sistematika dan Materi LPPD KK 01				
Petunjuk Penyusunan LPPD 2024 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024		**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Bengkulu**		**Keterangan Sesuai/ Tidak**
SISTEMATIKA	**MATERI/URAIAN**	**SISTEMATIKA**	**MATERI/URAIAN**	
BAB I PENDAHULUAN				
1.1 Latar Belakang 1.1.1 Penjelasan Umum	a. Undang-undang pembentukan daerah; b. Data geografis wilayah; c. Informasi Umum Data Kependudukan; d. Jumlah kabupaten/ kota (untuk provinsi); e. Rincian perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah serta dasar hukum pembentukan perangkat daerah f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Memuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah) h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja	1.1 Latar Belakang 1.1.1 Penjelasan Umum	a. Undang-undang pembentukan daerah; b. Data geografis wilayah; c. Informasi Umum Data Kependudukan; d. Jumlah kabupaten/ kota (untuk provinsi); e. Rincian perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah serta dasar hukum pembentukan perangkat daerah f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Memuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah) h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja	Sesuai
1.1.2 Perencanaan Pemban	a. Permasalahan strategis pemerintah daerah; b. Visi dan misi kepala	1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Permasalahan strategis pemerintah daerah; b. Visi dan misi kepala	Sesuai

gunan Daerah	daerah c. Program pembangunan daerah, berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah, d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan		daerah c. Program pembangunan daerah, berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah, d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan	
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Bagian ini memuat hal- hal terkait dasar penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintah daerah selama satu tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran	1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun Standar Pelayanan Minimal yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: 1. Memastikan akses masyarakat pada pendidikan menengah; 2. Menyiapkan pendidikan khusus bagi masyarakat yang membutuhkan; 3. Memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi; 4. Memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi; 5. Memenuhi kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota; 6. Menyediakan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;	Sesuai

			7. Menyediakan dan merehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi; 8. Memberikan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi; 9. Memberikan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi; 10. Merehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti; 11. Merehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; 12. Merehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti; 13. Merehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan 14. Memberikan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.	

<table>
<tr><th colspan="5">BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</th></tr>
<tr>
<td>2.1 Capaian Kinerja Makro</td>
<td>Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum
<table>
<tr><td>1.</td><td>Indeks Pembangunan Manusia</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Angka Kemiskinan</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Angka Pengangguran</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Pertumbuhan Ekonomi</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Pendapatan Perkapita</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)</td></tr>
</table></td>
<td>BAB II Capaian Kinerja Penyelnggara Pemerintahan Daerah

2.1 Capaian Kinerja Makro</td>
<td>Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum
<table>
<tr><td>1.</td><td>Indeks Pembangunan Manusia</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Angka Kemiskinan</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Angka Pengangguran</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Pertumbuhan Ekonomi</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Pendapatan Perkapita</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)</td></tr>
</table></td>
<td>sesuai</td>
</tr>
<tr>
<td>2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</td>
<td>2.2.1 Indikator Kinerja Kunci
<table>
<tr><th>No</th><th>Urusan Pemerintahan</th><th>Indikator Kinerja Kunci</th><th>Capaian Kinerja</th><th>Sumber</th></tr>
<tr><td></td><td>Pendidikan</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Kesehatan</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
<table>
<tr><th>No</th><th>Urusan P</th><th>I Kinerja</th><th>Ca K</th><th>Sumb D</th></tr>
<tr><td></td><td>Perencanaa</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Keuangan</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Kepegawaian serta dan</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Penelitian pengemban</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>d</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td>
<td>2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</td>
<td>2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran
<table>
<tr><th>No</th><th>Urusan Pemerintahan</th><th>Indikator Kinerja Kunci</th><th>Capaian Kinerja</th><th>Sumber Data</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pendidikan</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kesehatan</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil
<table>
<tr><th>Nomor</th><th>Urusan Pemerintah</th><th>Indikator Kinerja Kunci Hasil</th><th>Capaian Kinerja</th><th>Sumber Data</th></tr>
<tr><td>1.a.1</td><td>Pendidikan</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.a.2</td><td>Pendidikan</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
<table>
<tr><th>Nomor</th><th>Urusan Pemerintah</th><th>Indikator Kinerja Kunci Hasil</th><th>Capaian Kinerja</th><th>Sumber Data</th></tr>
<tr><td>4.a.1</td><td>Pendidikan</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.a.2</td><td>Pendidikan</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td>
<td>Belum sesuai</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah</td>
<td>Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas</td>
<td>2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah</td>
<td>2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja
2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja;
2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjajian Kinerja
2.3.4.Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam</td>
<td>Belum sesuai</td>
</tr>
</table>

	pemerintahan daerah memuat: **a.** target kinerja dalam perjanjian kinerja; **b.** pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja; **c.** pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya; **d.** pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah; **e.** analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan **f.** analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian		Pembangunan Jangka Menengah **2.3.5.** Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai 2.3.6. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN				
1. Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan	Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh pemerintah daerah provinsi.	1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh pemerintah daerah provinsi.	Sesuai
2. Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan di Provinsi	Gambaran umum menggambarkan pelaksanaan tugas pembantuan di daerah provinsi, baik yang diterima dari pemerintah pusat maupun yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/ kota yang meliputi jumlah kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang memberikan penugasan, bidang urusan yang ditugaspembantuankan, jumlah kegiatan dan anggaran tugas pembantuan, dan lain-lain pelaksanaan tugas pembantuan.	2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi Bengkulu	Gambaran umum menggambarkan pelaksanaan tugas pembantuan di daerah provinsi, baik yang diterima dari pemerintah pusat maupun yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota yang meliputi jumlah kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang memberikan penugasan, bidang urusan yang ditugaspembantuankan, jumlah kegiatan dan anggaran tugas pembantuan, dan lain-lain pelaksanaan tugas pembantuan.	Sesuai

<table>
<tr><td>3. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan</td><td>Berisi tentang capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran</td><td>3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan</td><td>Berisi tentang capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran</td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td>3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi Tugas Pembantuan dari kementerian/ Lembaga yang ditugaskan kepada daerah provinsi</td><td>3.1.1 Target Kinerja
Target kinerja adalah target program/ kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan.</td><td>3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi Tugas Pembantuan Yang dari Kementerian / Lembaga Yang ditugaskan Kepada Daerah Provinsi</td><td>3.1.1 Target Kinerja
Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan.</td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td></td><td>3.1.2 Realisasi
Realisasi adalah target program/ kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan
<table>
<tr><td>No</td><td>K/LPNK</td><td>DASAR PELAKSANAA PENUGASAN</td><td>KEG D</td></tr>
<tr><td>(</td><td>(</td><td>(3)</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Kementeri</td><td>Peraturan
No… Tahun…</td><td>Prog Kegia
Rinci Kegia</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Dst</td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td></td><td>3.1.2 Realisasi
Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan
<table>
<tr><td>No</td><td>K/LPNK</td><td>DASAR PELAKSANAA PENUGASAN</td><td>KEG D</td></tr>
<tr><td>(</td><td>(</td><td>(3)</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Kementeri</td><td>Peraturan
No… Tahun…</td><td>Prog Kegia
Rinci Kegia</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Dst</td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td>3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota Tugas pembantuan dari daerah provinsi yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.</td><td>3.2.1 Target Kinerja
Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan yang tertuang dalam peraturan gubernur atau dokumen/lembar penugasan.</td><td>3.2 Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten/Kota

Tugas Pembantuan Dari Daerah Provinsi Yang Ditugaskan Kepada Daerah Kabupaten/Kota</td><td>Tidak ada</td><td>Tidak sesuai karena data belum diisi</td></tr>
</table>

	3.2.2 Realisasi Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan tugas pembantuan. Matrik capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan provinsi yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota 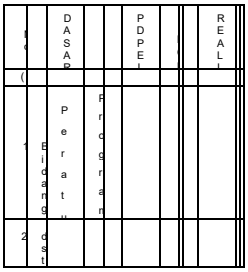	-	-	**Tidak sesuai karena data belum disi**
3.3 Permasalahan dan kendala mengambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan	Mengambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan.	3.3. Permasalahan dan Kendala	Mengambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan.	Sesuai
3.4 Saran dan Tindak Lanjut	Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan selanjutnya.	3.4. Saran dan Tidak Lanjut	Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan selanjutnya.	sesuai
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL				
4.1 Urusan Pendidikan	4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar 4.1.2 Target Pencapaian 4.1.3 Realisasi	4.1 Urusan Pendidikan	4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar 4.1.2 Target Pencapaian 4.1.3 Realisasi 4.1.4 Alokasi Anggaran	Sesuai

	4.1.4 Alokasi Anggaran 4.1.5 Dukungan Personil 4.1.6 Permasalahan dan Solusi		4.1.5 Dukungan Personil 4.1.6 Permasalahan dan Solusi	
4,2 Urusan Kesehatan		4.2 Urusan Kesehatan	4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar 4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah 4.2.3 Realisasi 4.2.4 Alokasi Anggaran 4.2.5 Dukungan Personil 4.2.6 Permasalahan dan Solusi	Sesuai
4.3 Urusan Pekerjaan Umum		4.3 Urusan Pekerjaan Umum	4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar 4.3.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah 4.3.3 Realisasi 4.3.4 Alokasi Anggaran 4.3.5 Dukungan Personil 4.3.6 Permasalahan dan Solusi	Sesuai
4.4 Urusan Permukiman dan Perumahan Rakyat		4.4. Urusan Perumahan Rakyat	4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar 4.4.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah 4.4.3 Realisasi 4.4.4 Alokasi Anggaran 4.4.5 Dukungan Personil 4.4.6 Permasalahan dan Solusi	sesuai
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar 4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah 4.5.3 Realisasi 4.5.4 Alokasi Anggaran 4.5.5 Dukungan Personil 4.5.6 Permasalahan dan Solusi	Sesuai
4.6 Urusan Sosial		4.6 Urusan Sosial	4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar 4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah 4.6.3 Realisasi 4.6.4 Alokasi Anggaran 4.6.5 Dukungan Personil 4.6.6 Permasalahan dan Solusi	Sesuai
4.7 Program dan Kegiatan		4.7 Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan SPM urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat sebagai berikut Tabel 4.17 Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Trantibbumlinmas Tahun 2024	**tambahkan Program dan Kegiatan Pendukung SPM untuk urusan Pendidikan, Kesehatan, PU, PR**

			<table><tr><td>No</td><td>Program</td><td>Indikator</td><td>Keguatan</td><td>Sub Kegiatan</td><td>Anggaran</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Sumber : Satpol PP Provinsi Bengkulu, 2024.	
BAB PENUTUP		**BAB V PENUTUP**		

1.2 Pencermatan Kesesuaian Materi Dan Sistematika Draft LKPJ

Permendagri nomor 19 Tahun 2024 dan Pedoman Penyusunan LPPD		**Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPJ) Provinsi Bengkulu**		**Ket Sesuai/ Tidak**
SISTIMATIKA	**MATERI/URAIAN**	**SISTIMATIKA**	**MATERI/URAIAN**	
BAB I PENDAHULUAN		BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Dasar Hukum	(dijelaskan undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan	1.1 Dasar Hukum	a. Nomor 9 Tahun 1967 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Karesidenan Bengkulu; b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008	Sesuai
1.2 Visi dan Misi	1.2.1 Visi 1.2.2 Misi	1.2 Visi dan Misi	1.2.1 Visi 1.2.2 Misi	Sesuai
1.3 Data Umum Daerah	Data umum daerah memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi: 1. Data geografis wilayah; 2. Jumlah Penduduk; 3. Pertumbuhan penduduk; 4. Jumlah PNS; 5. Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan; 6. Realisasi belanja menurut jenis belanja; dan 7. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan.	1.3 Data Umum Daerah	**1.3.1 Data geografis Daerah;** **1.3.2 Jumlah Penduduk;** **1.3.3 Pertumbuhan penduduk;** **1.3.4 Jumlah PNS;** **1.4 Ikhtisar Pencapaian Realisasi APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024;** **1.4.1 Ikhtisar Perkembangan Realisasi dan Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024; dan** **1.4.2 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 Menurut Jenis Pendapatan** **1.4.3 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 Menurut Jenis Belanja** **1.4.4 Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 Menurut Jenis Pembiayaan**	**Tidak Sesuai;**

<table>
<tr><th colspan="2">Permendagri nomor 19 Tahun 2024 dan Pedoman Penyusunan LPPD</th><th colspan="2">Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPJ) Provinsi Bengkulu</th><th>Ket Sesuai/ Tidak</th></tr>
<tr><th>SISTIMATIKA</th><th>MATERI/URAIAN</th><th>SISTIMATIKA</th><th>MATERI/URAIAN</th><th></th></tr>
<tr><td colspan="5">BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</td></tr>
<tr><td></td><td>Bab ini menjelaskan perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan dalam rangka mencapai target yang telah disepakati dalam dokumen anggaran.</td><td></td><td>-</td><td>Tidak Sesuai karena belum disi</td></tr>
<tr><td colspan="5">BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH</td></tr>
<tr><td>3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan</td><td>Capaian pelaksanaan program dan kegiatan memuat:
1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja;
2. Capaian kinerja urusan masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dukumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja.
3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
<table>
<tr><th>NO</th><th>URUSAN PEMERINTAHAN</th><th>PERANGKAT DAERAH PELAKSANA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pendidikan</td><td>1. Dinas Pendidikan
2. ……</td></tr>
<tr><td>2</td><td>……..</td><td>……..</td></tr>
</table></td><td>3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan</td><td>-</td><td>Tidak Sesuai karena belum disi</td></tr>
<tr><td></td><td>3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
<table>
<tr><th>NO</th><th></th><th>URUSAN PEMERIN</th><th>PERANGKAT</th><th></th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>Tenaga Kerja</td><td>Dinas Tenaga Kerja</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td>……..</td><td>……..</td><td></td></tr>
</table></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Permendagri nomor 19 Tahun 2024 dan Pedoman Penyusunan LPPD</th><th colspan="2">Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPJ) Provinsi Bengkulu</th><th>Ket Sesuai/ Tidak</th></tr>
<tr><th>SISTIMATIKA</th><th>MATERI/URAIAN</th><th>SISTIMATIKA</th><th>MATERI/URAIAN</th><th></th></tr>
<tr><td></td><td>3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan
<table>
<tr><th>NO</th><th>URUSAN PEMERINTAHAN</th><th>PERAN DAE PELAK</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kelauatan dan Perikanan</td><td>Dinas Ke dan Perik</td></tr>
<tr><td>2</td><td>……..</td><td>……</td></tr>
</table></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan</td><td>Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:
<table>
<tr><th>No</th><th>Kebijakan Stra</th><th>Dasar Hukum</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan</td><td>-</td><td>Tidak Sesuai karena data tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah belum diisi</td></tr>
<tr><td>3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya</td><td>Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:
<table>
<tr><th>No</th><th>Rekomendasi DPRD Tahun N-1</th><th>Tindak Lanjut</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya</td><td>-</td><td>Tidak Sesuai karena data tentang tindak lanjut pemerintah daerah belum diisi</td></tr>
<tr><td colspan="2">BAB IV. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dan Penugasan</td><td colspan="3">BAB IV. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dan Penugasan</td></tr>
<tr><td>4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas pembantuankan Uraian mengenai identifikasi urusan pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan.</td><td>4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.
4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya.</td><td>Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuan</td><td>-</td><td>Tidak Sesuai karena data belum diisi</td></tr>
<tr><td>4.2 Hambatan/Perm asalahan dalam</td><td>Memuat uraian hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan</td><td>-</td><td>-</td><td>Tidak Sesuai karena</td></tr>
</table>

Permendagri nomor 19 Tahun 2024 dan Pedoman Penyusunan LPPD		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPJ) Provinsi Bengkulu		Ket Sesuai/ Tidak
SISTIMATIKA	**MATERI/URAIAN**	**SISTIMATIKA**	**MATERI/URAIAN**	
Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian	tugas pembantuan serta upaya penyelesaian pada setiap tugas pembantuan yang diterima dari permerintah tingkat atasnya maupun tugas pembantuan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya.			**data belum diisi**
BAB V PENUTUP				

1.3 Pencermatan Kesesuaian Materi Dan Sistematika Draft RLPPD

<table>
<tr><th colspan="2">Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 dan Pedoman Penyusunan LPPD 2024</th><th colspan="2">Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) Provinsi Bengkulu</th><th>Ket Sesuai/ Tidak</th></tr>
<tr><th>SISTIMATIKA</th><th>MATERI/URAIAN</th><th>SISTIMATIKA</th><th>MATERI/URAIAN</th><th></th></tr>
<tr><td>1. Capaian Kinerja Makro</td><td>Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Format laporan kinerja makro meliputi:
<table>
<tr><th>No</th><th>Indikator Kinerja Makro</th><th>Capaian Kinerja Tahun N-1</th><th>Capaian Kinerja Tahun N</th><th>Perubahan (%)</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Indeks Pembangunan Manusia</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Angka Kemiskinan</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Angka Pengangguran</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pertumbuhan Ekonomi</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Pendapatan Perkapita</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Ketimpangan Pendapatan</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>1. Capaian Kinerja Makro</td><td>Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Np</th><th>Indikator kinerja Makro</th><th>Capaian Kinerja 2023</th><th>Cpaian Kinerja 2024</th><th>Laju Kinerja</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Angka Kemiskinan (Persen)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Angka Pengangguran (Persen)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pertumbuhan Ekonomi (Persen)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Pendapatan Per-Kapita (Rupiah)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Ketimpangan Pendapatan (Persen)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>Tidak sesuai</td></tr>
<tr><td>2. Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar</td><td>(pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat, sosial).</td><td>2.Ringkasan Capaian Kinerja urusan Pelayanan Dasar</td><td>Capaian kinerja urusan Pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan darah dalam mengukur dan mengurus urusan Pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk di antaranya :
1) Urusan Pendidikan
2) Urusan Kesehatan
3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4) Urusan Perumahan Rakyat
5) Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
6) Urusan Sosial</td><td>sesuai</td></tr>
</table>

3. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya.		3. Hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya	-	**Tidak sesuai karena hasil EPPD yang dilakukan oleh Kemendagri yang memuat skor kinerja dan status kinerja Tahun 2023 belum *release***
4. Realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah.		4.Ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah	-	**Tidak sesuai karena data realisasi penerimaan dan pengeluaran anggran daerah Bengkulu Tahun 2024 belum dicantumkan**
5. Realisasi penerimaan menurut jenis penerimaan dan realisasi pengeluaran menurut jenis pengeluar an, dan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan.		-	-	**Tidak sesuai karna Realisasi penerimaan menurut jenis penerimaan dan realisasi pengeluaran menurut jenis pengeluaran , dan realisasi pembiayaan belum dicantumkan**
6, Inovasi Daerah	**Tidak ada**	**5.Inovasi Daerah**	**ada**	**Tidak sesuai karena mencantumkan data yang tidak sesuaidengan pedoman umum**

2. Kesesuaian Materi

a. Kesesuaian Sistematika dan Materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 terhadap Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 hal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024, berdasarkan hasil reviu, masih terdapat beberapa catatan yang masih harus ditindaklanjuti, yaitu:

1) LPPD Tahun 2024 belum memiliki Judul, Kata Pengantar dan Daftar Isi
2) Pada Bab I Pendahuluan di bagian:

No.	Uraian	Catatan
1.	1.1. Latar Belakang	
	1.1.1. Penjelasan Umum	1. Pada huruf c Informasi Umum Data Kependudukan, data yang disampaikan masih menggunakan data Tahun 2023 2. Tabel pada huruf e Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah belum diisi 3. Tabel pada huruf f Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah belum diisi 4. Tabel pada huruf h Pelaksanaan Program berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja belum diisi
	1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Pada huruf c Program Pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah, belum mencantumkan dokumen jangka menengah b. Pada huruf d kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan, data yang dicantumkan masih data tahun 2022

3) Pada Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No.	Uraian	Catatan
1.	2.1. Capaian Kinerja Makro	Tabel Capaian kinerja makro belum sesuai pedoman umum
2.	2.2. Capaian Kinerja Penyelengaraan Urusan Pemerintahan	Indikator-indikator yang tercantum pada LPPD belum berdasarkan pedoman umum
	2.2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Terdapat beberapa Informasi capaian kinerja akuntabilitas kinerja belum tercantum pada LPPD, yaitu: a. Huruf d: Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah; b. Huruf e: Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan c. Huruf f: Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

4) Pada Bab III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

No.	Uraian	Catatan
1.	3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota	Mencantumkan informasi mengenai tugas pembantuan Tahun 2023 bukan Tahun 2024

Menyesuaikan kembali penyajian sistematika dan materi pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 hal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

a) Mencantumkan Judul, Kata Pengantar dan Daftar Isi pada LPPD Tahun 2024
b) Melakukan pengecekan kembali terhadap seluruh data yang tercantum dalam LPPD Tahun 2024, apakah telah menggunakan data Tahun 2024 bukan data tahun-tahun sebelumnya
c) Mengisi tabel yang tercantum pada Bab I diisi sesuai kebutuhannya
d) Capaian kinerja makro harus memuat tabel perubahan (%)
e) Indikator Kinerja Kunci Keluaran, Indikator Kinerja Kunci Hasil, dan Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan

Pemerintahan harus menjelaskan IKK yang tidak memiliki data/informasi

f) Tabel Indikator Kinerja Kunci Keluaran,dan Indikator Kinerja Kunci Hasil pada kolom capaian kinerja di sesuai dengan ketentuan**.**

b. Kesesuaian Sistematika dan Materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 dan Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 hal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

1) Pada 3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan belum mencantumkan:
   a) Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja
   b) Capaian kinerja urusan masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dukumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.
   c) Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja.

2) Capaian kinerja program dan kegiatan tersebut diatas harus dituangkan menggunakan tabel, akan tetapi berdasarkan LKPj Provinsi Bengkulu masih terdapat ketidaksesuaian, yaitu:
   a) Belum mencantumkan Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada huruf 3.1.1
   b) Tabel yang dibuat tidak mempedomani Permendagri 19 Tahun 2024.
   c) Keterangan pada bawah tabel belum dibuat, yang menyatakan kalimat:

Target adalah hasil yang dicapai pada tingkat outcome yang segera terlihat setelah output dicapai (*immediate outcome*). Contoh: pembangunan jalan, outputnya adalah: panjang jalan yang terbangun, outcomenya adalah peningkatan sosial dan/atau ekonomi masyarakat. Sedangkan immediate outcomenya antara lain waktu tempuh atau biaya/ongkos angkut pada ruas jalan yang dibangun tersebut.

3) Pada angka 3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dibuat tidak mempedomani Permendagri 19 Tahun 2024
4) Pada angka 3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan yang dibuat tidak mempedomani Permendagri 19 Tahun 2024
5) Pada angka 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya, tabel yang dicantumkan belum mempedomani Permendagri 19 Tahun 2024

c. Kesesuaian Sistematika dan Materi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2024 dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 dan Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 hal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

1) Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Format laporan kinerja makro meliputi:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan			

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Manusia			
2	Angka Kemiskinan			
3	Angka Pengangguran			
4	Pertumbuhan Ekonomi			
5	Pendapatan Perkapita			
6	Ketimpangan Pendapatan			

2) Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial).
3) Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya.
4) Realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah.
5) Realisasi penerimaan menurut jenis penerimaan dan realisasi pengeluaran menurut jenis pengeluaran, dan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan
6) Inovasi Daerah.

B. Pencermatan Data Dukung IKK

Pencermatan data dukung dilakukan dengan melakukan penelitian mengenai sumber data, akurasi penghitungan dan kebenaran yang meliputi IKK atas:

1. Bobot nilai perbidang urusan pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Capaian Kinerja	Bobot (%)	Hasil (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1	Urusan Pendidikan	28,76	6	1,73
2.	Urusan Kesehatan	37,18	6	2,23
3	Urusan Pekerjaan Umum	3,74	6	0,22
4.	Urusan Perumahan Rakyat	1,64	6	0,1
5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	20	6	1,2
6	Urusan Sosial	20	6	1,2
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			
7	Urusan Tenaga Kerja	3,36	3	0,10

No	Urusan Pemerintahan	Capaian Kinerja	Bobot (%)	Hasil (%)
1	2	3	4	5
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8,13	3	0,24
9	Urusan Pangan	163,62	3	4,91
10	Urusan Pertanahan	33	2	0,66
11	Urusan Lingkungan Hidup	20,36	3	0,61
12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35,42	2	0,71
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14,67	3	0,44
14	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5,7	2	0,11
15	Urusan Perhubungan	0,29	3	0,01
16	Urusan Komunikasi dan Informatika	29,55	3	0,89
17	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	31,59	2	0,63
18	Urusan Penanaman Modal	11,25	3	0,34
19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	7,40	2	0,15
22	Urusan Statistik	50	2	1
23	Urusan Persandian	48,9	2	0,98
24	Urusan Kebudayaan	100	2	2
25	Urusan Perpustakaan	33,70	2	0,67
26	Urusan Kearsipan	43,45	2	0,87
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
27	Urusan Kelautan dan Perikanan	26	2	0,52
28	Urusan Pariwisata	11,26	3	0,34
29	Urusan Pertanian	22,61	3	0,68
30	Urusan Kehutanan	10,98	2	0,22
31	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	50	3	1,5
32	Urusan Perdagangan	8,79	3	0,26
33	Urusan Perindustrian	13,94	3	0,42
34	Urusan Transmigrasi	1,67	2	0,03
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
1	Perencanaan dan Keuangan		30	
2	Pengadaan	-*	10	-*
3	Kepegawaian	19,92	20	3,98
4	Manajemen Keuangan	16,4	20	3,28
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	46,87	20	9,37

2. Bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang Urusan pemerintahan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Bobot (%)	Hasil (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	70,415	50	35,20
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus	44,583	50	22,29
		Rata-rata hasil			28,745
2.	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1,30	25	0,32
		Persentase RS Rujukan Tingkat Provinsi yang terakreditasi	96	25	24

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Bobot (%)	Hasil (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	25	25
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko pada Situasi KLB Provinsi	100	25	25
		Rata-rata Hasil			37,18
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	6,29	10	0,62
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Pprovinsi	6,84	10	0,684
		Persentase luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	47,87	15	7,18
		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota	17,07	20%	3,41
		Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	0	20	0
		Rasio kemantapan jalan	62,82	15	9,42
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	11,22	10	1,12
		Rata-rata hasil			3,74
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0/1	25	
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0/1	25	
		Persentasi luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	1,31	25	0,32
		Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	11,82	25	2,95
		Rata-rata Hasil			1,64
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	25	25
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	25	25
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	25	25
		Persentase penanganan pra bencana	20	25	5
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	0	0	0
		Rata-rata Hasil			20
6.	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	20	20
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	20	20
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	20	20
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	20	20

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Bobot (%)	Hasil (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100	20	20
		Rata-rata Hasil			20
7.	Tenaga Kerja	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	100	0	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,2	20	0,24
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	4,80	20	0,96
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	31,71	20	6,342
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	31,57	20	6,314
		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	14,71	20	2,942
		Rata-rata Hasil			3,36
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	62,12	33	20,49
		Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	2,70	33	0,891
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	9,13	33	3,01
		Rata-rata Hasil			8,13
9.	Pangan	Persentase cadangan pangan	163,62	100	163,62
10.	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	33	33
		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100	33	33
		Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota.	100	33	33
		Rata-rata Hasil			33
11.	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	73,45	50	36,72
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	8	50	4
		Rata-rata Hasil			20,36
12.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	100	50	50
		Pemanfaatan data kependudukan	41,67	50	20,835
		Rata-rata Hasil			8,13
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	58,66	50	29,33
		Persentase peningkatan status desa mandiri	0,0013	50	0,0065
		Rata-rata Hasil			14,67
14.	Pengendalian Penduduk dan	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,23	33	0,735

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Bobot (%)	Hasil (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)	43,25	33	14,27
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	6,35	33	2,09
		Rata-rata Hasil			5,70
15.	Perhubungan	Rasio konektivitas provinsi	0,85	50	0,42
		Kinerja lalu lintas provinsi	0,32	50	0,16
		Rata-rata Hasil			0,29
16.	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	35	35
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	35	35
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	62,15	30	18,65
		Rata-rata Hasil			29,55
17.	Koperasi dan UKM	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	70,30	50	35,15
		Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	56,06	50	28,03
		Rata-rata Hasil			31,59
18.	Penanaman Modal	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	11,25	100	11,25
19.	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,6	33	0,53
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	5,57	33	1,88
		Peningkatan prestasi olahraga	60	33	19,8
		Rata-rata Hasil			7,40
20.	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	50	50
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	50	50
		Rata-rata Hasil			50
21.	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	48,9	100	48,9
22.	Kebudayaan	Terlestarikannya cagar budaya	100	100	100
23.	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	68,83	50	34,41
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	65,96	50	32,99
		Rata-rata Hasil			33,70
24.	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Psl 40 dan 59 U 43/2009)	72,65	50	36,32
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	101,15	50	50,57
		Rata-rata Hasil			43,45
25.	Kelautan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	36,968	50	18,49

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Bobot (%)	Hasil (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	67	50	33,5
		Rata-rata Hasil			26
26.	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per-kebangsaan	19,97	25	4,99
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	102,12	25	25,53
		Tingkat hunian akomodasi	55,24	25	13,81
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2,85	25	0,71
		Rata-rata Hasil			8,13
27.	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	57,58	50	28,79
		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	32,84	50	16,42
		Rata-rata Hasil			22,61
28.	Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	82,55	33	27,24
		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)	15,18	33	5,01
		Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	2,13	33	0,70
		Rata-rata Hasil			10,98
29.	ESDM	Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar perda	100	50	50
		Persentase desa yang teraliri listrik	100	50	50
		Rata-rata Hasil			50
30.	Perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	21,24	14	2,97
		Persentase penanganan pengaduan konsumen	0	14	0
		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	100	14	14
		Tertib usaha	0	14	0
		Persentase kinerja realisasi pupuk	84,81	14	11,87
		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	14	14
		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	7,90	14	1,10
		Rata-rata Hasil			8,79
31.	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	1,56	17	0,26
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100,20	17	17,03
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	200	17	34
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait		17	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Bobot (%)	Hasil (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait		17	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	82	17	13,94
		Rata-rata Hasil			16,31
32.	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	5	35	1,75
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	5	35	1,75
		Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	5	30	1,5
		Rata-rata Hasil			1,67

III. Simpulan dan Rekomendasi

A. Simpulan

Berdasarkan catatan permasalahan hasil reviu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Data tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraaan pemerintah daerah karena :
   a. Data tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan
   b. data tidak tersedia pada lembaga yang dinyatakan sebagai sumber data
   c. Metode, teknik pengumpulan dan analisis data tidak dapat dijelaskan
   d. Data tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan pada PD:
      1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
      2) Dinas Kesehatan
      3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
      4) Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
   e. Data dukung tidak berasal dari sumber yang dapat dipertangungjawabkan pada PD:
      1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
      2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
      3) Dinas Pemuda dan Olahraga
      4) Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan
   f. Data Dukung belum divalidasi kepala PD dan stempel basah pada PD
      1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3) Badan Kepegawaian Daerah
4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5) Dinas Kesehatan
6) Dinas Pariwisata
7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10) Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan

g. Kesalahan penginputan pembilang dan pembagi pada rumus
   1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Badan Kepegawaian Daerah
   2) Dinas Kesehatan
   3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
   5) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
   6) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
   7) Dinas Ketahanan Pangan
   8) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
   9) Dinas Pemuda dan Olahraga
h. Validasi data dukung melebihi 31 Desember 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. Data yang dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan catatan agar:
   a. Menyesuaikan kembali penomoran maupun format tabel sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2024 dan Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 hal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024:
      1) Menyesuaikan bentuk format tabel dan tata cara pengisian yang ada pada Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

2) Mencantumkan uraian yang merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah

b. Menyesuaikan bukti dan data dukung yang disajikan pada IKK berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 dan Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 hal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

c. Agar mencantumkan informasi yang dibutuhkan pada BAB maupun Sub-BAB dokumen LPPD Tahun 2024 yang belum disajikan.

d. Menyesuaikan kembali bukti maupun data dukung yang disajikan dengan mempedomani Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024

B. Rekomendasi

Berdasarkan catatan permasalahan hasil reviu, dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Menyesuaikan kembali penomoran maupun format tabel sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 dan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024
2. Menyesuaikan bentuk format tabel dan tata cara pengisian yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 dan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
3. Mencantumkan uraian yang merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah
4. Menyesuaikan bukti dan data dukung yang disajikan pada IKK berdasarkan peraturan pedoman penyusunan LPPD.
5. Segera mencantumkan informasi yang dibutuhkan pada BAB maupun Sub-BAB dokumen LPPD Tahun 2024 yang belum disajikan.

6. Menyesuaikan kembali bukti maupun data dukung yang disajikan dengan mempedomani Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024

IV. Penutup

Demikian Laporan Hasil Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 kami sampaikan kepada saudara untuk diketahui dan menjadi bahan perbaikan, terima kasih.

INSPEKTUR

Dr. M. H. Heru Susanto, SE., MM, CGCAE,CGRE,CFrA
Pembina Utama Madya
NIP.19700403 199103 1 001

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2024

H. HELMI HASAN, S.E
Gubernur Bengkulu

Ir. H. MIAN
Wakil Gubernur Bengkulu

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2025

Progres.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bengkulu Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik, sesuai pada waktunya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) disampaikan oleh Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bengkulu Tahun 2024 ini telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintahan Daerah. Dengan menguraikan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun pada Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu sebelumnya Tahun 2024, yang mencakup Penyelenggaraan Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum.

Semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bengkulu Tahun 2024 ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan.

Demikian disampaikan, semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita semua, Ammiin.

Bengkulu, 18 Maret 2025
GUBERNUR BENGKULU

H. HELMI HASAN, S.E

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR GRAFIK xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Dasar Hukum Pembentukan Provinsi Bengkulu 1
1.2. Visi dan Misi 2
1.2.1. Visi 2
1.2.2. Misi 3
1.3. Data Umum Provinsi Bengkulu 5
1.3.1. Data Geografisi Daerah 5
1.3.2. Jumlah Penduduk 10
1.3.3. Pertumbuhan Penduduk 11
1.3.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi Bengkulu 12
1.4. Ikhtisar Pencapaian Target APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 14
1.4.1. Ikhtisar Perkembangan Realisasi dan Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024 15
1.4.2. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 Menurut Jenis Pendapatan 16
1.4.3. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 Menurut Jenis Belanja ....., 17
1.4.4. Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 Menurut Jenis Pembiayaan 20

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 21

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH 25
3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 25
1. Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu 25
2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu 34
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu 42
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu 48
5. Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu 56
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu 64
7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Bengkulu 73
8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu 80
9. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu 99
10. Badan Penghubung Provinsi Bengkulu 109
11. Dinas Sosial Provinsi Bengkulu 115
12. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 124
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu..... 133
14. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu 145
15. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu 158
16. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu 166
17. RSKJ Soeprapto Bengkulu 176
18. UPTD Khusus RSUD dr. M. Yunus Bengkulu 179
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu 184

20. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu 191
21. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu 200
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu 211
23. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu …….. 218
24. Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu 230
25. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu 239
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu 266
27. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu 275
28. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Bengkulu 284
29. Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu 294
30. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu 305
31. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu 315
32. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu 327
33. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu 339
34. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu 382
35. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan..... 406
36. Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu 414
37. Biro Organisasi Setda Provinsi Bengkulu 418
38. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi. Bengkulu 421
39. Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu 425
40. Biro Umum Setda Provinsi Bengkulu 427
41. Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu 430

3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan 432
A. Biro Organisasi Setda Provinsi Bengkulu 432
B. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu 433
C. Dinas Sosial Provinsi Bengkulu 433
D. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu 435
E. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu 435

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya 436
A. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu 436
B. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu 437
C. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 439
D. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu..... 439
E. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu 441
F. Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu 443
G. Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu 444
H. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu 446
I. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Bengkulu 447
J. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu 451
K. Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bengkulu 451
L. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu 453
M. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu 453
N. Dinas Peternakan Provinsi Bengkulu 455
O. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu..... 456
P. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu 456
Q. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu 458
R. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu 461

S. Dinas Sosial Provinsi Bengkulu 462
T. Dinas Ketenagkerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu 462
U. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Bengkulu 463
V. UPTD Khusus RSUD dr. M. Yunus Bengkulu 463
W. RSKJ Soeprapto Bengkulu 464

BAB IV **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN** 465
4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan 465
4.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Pusat 465
4.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian 497

BAB V **PENUTUP** 503

DAFTAR TABEL

		Hal.
TABEL 1.1	Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan per-Kabupaten/Kota	1
TABEL 1.2	Luas Wilayah Provinsi Bengkulu	8
TABEL 1.3	Jumlah Penduduk Provinsi Bengkulu menurut Kabupaten Kota dan Jenis kelamin Tahun 2024	10
TABEL 1.4	Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Bengkulu menurut Tingkat Pendidikan	12
TABEL 1.5	Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Bengkulu menurut Jenis Kelamin	13
TABEL 1.6	Laporan Realisasi Anggaran TA 2024 dan 2023 *(dalam Rupiah)*	14
TABEL 1.7	Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2024, 2023 dan 2022 *(dalam Rupiah)*	15
TABEL 1.8	Rincian Laporan Realisasi Anggaran TA 2024 dan 2023 *(dalam Rupiah)*	15
TABEL 1.9	Rincian Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023 *(dalam Rupiah)*	16
TABEL 1.10	Rincian Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023 *(dalam Rupiah)*	17
TABEL 1.11	Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2024 dan 2023 *(dalam Rupiah)*	17
TABEL 1.12	Rincian Belanja Operasi TA 2024 dan 2023 *(dalam Rupiah)*	18
TABEL 1.13	Rincian Belanja Modal TA 2024 dan 2023 *(dalam Rupiah)*	18
TABEL 1.14	Rincian Belanja Tak Terduga TA 2024 dan 2023 *(dalam Rupiah)*	19
TABEL 1.15	Rincian Belanja Transfer TA 2024 dan 2023 *(dalam Rupiah)*	19
TABEL 4.1	Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Tahun 2024	479
TABEL 4.2	Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2024	480
TABEL 4.3	Sumber Pagu dan Realisasi Anggaran Dana Tugas Pembantuan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Tahun 2024	482
TABEL 4.4	Rincian Program/Kegiatan dan Realisasi Tugas Pembantuan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Tahun 2024	483

DAFTAR GAMBAR

		Hal.
GAMBAR 1.1	Peta Administratif Provinsi Bengkulu	2
GAMBAR 4.1	Program Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Pemagangan Dalam Negeri)	466
GAMBAR 4.2	Bangunan Jalan Poros dan Jembatan Kawasan Transmigrasi PUT	467
GAMBAR 4.3	Masjid Islamic Center KPB Lagita Desa Urai Ketahun	468
GAMBAR 4.4	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (SATPEL PK Bengkulu)	469
GAMBAR 4.5	Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi (PBK), UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Bengkulu Selatan	470
GAMBAR 4.6	Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi (PBK), UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Bengkulu Selatan	471
GAMBAR 4.7	Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Petugas Antar Kerja	473
GAMBAR 4.8	Pelaksanaan Pengawasan ke Perusahaan oleh Tenaga Kerja Pengawas dan Pembahasan UMP dan UMK 2025	475
GAMBAR 4.9	Kegiatan Pendataan Ternak dan Distribusi N2 Cair Tahun 2024	480
GAMBAR 4.10	Penyaluran Sarana Produksi Padi Kaya Gizi (Biofortikasi) berupa Benih Padi dan Pupuk NPK di Kecamatan Enggano Kab. Bengkulu Utara yang Merupakan salah satu hasil pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	484
GAMBAR 4.11	Penyaluran Sarana Fasilitasi Pengolahan Kopi di Kabupaten Kepahiang berupa Mesin Sangrai, Mesin Pengemas dan Mesin Pembubuk Kopi di Kab. Kepahiang yang merupakan salah satu hasil pelaksanaan Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	485
GAMBAR 4.12	Penyaluran Prasarana Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat di Kecamatan Sukaraja Kab. Seluma Merupakan salah satu hasil pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	486
GAMBAR 4.13	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air	487
GAMBAR 4.14	Pemeliharaan Rutin Kondisi Preservasi Jalan Kerkap – Sp.Nakau (E-Katalog)	488
GAMBAR 4.15	Rekonstruksi Jalan Preservasi Jalan Kerkap - Sp. Nakau (E-Katalog)	488
GAMBAR 4.16	Penanganan Longsoran Kerkap – SP. Nakau (E-Katalog)	489
GAMBAR 4.17	Penanganan Drainase	489

GAMBAR 4.18	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Preservasi Jalan Kerkap – SP. Nakau (SWAKELOLA)	489
GAMBAR 4.19	Preservasi Jembatan Kerkap – SP. Nakau	490
GAMBAR 4.20	Preservasi Rutin Jembatan Preservasi Jalan Kerkap – SP. Nakau (SWAKELOLA)	490

DAFTAR GRAFIK

Hal.

GRAFIK 1.1 Ketinggian Tempat di Provinsi Bengkulu 7
GRAFIK 1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2024 11

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PROVINSI BENGKULU

Provinsi Bengkulu awalnya merupakan sebuah karesidenan yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dengan status Daerah Administrasi di bawah Koordinasi Gubernur Sumatera Selatan. Pada tanggal 18 November 1968 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Karesidenan Bengkulu diresmikan menjadi salah satu Provinsi yang ke-26 di Republik Indonesia.

Semula Provinsi Bengkulu terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, akan tetapi semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu, Provinsi Bengkulu terbagi menjadi 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.

Selanjutnya pada tahun 2008, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu, maka Provinsi Bengkulu menjadi 9 (sembilan) Kabupaten, 3 (tiga) kabupaten induk dan 6 (enam) kabupaten pemekaran dan 1 (satu) Kota, yang terdiri dari 129 Kecamatan, 172 Kelurahan dan 1.341 Desa.

Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa dapat dilihat pada Tabel 1.1, sedangkan Peta Administratif Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa per Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Nama Ibu Kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa
Bengkulu Selatan	Manna	11	16	142
Rejang Lebong	Curup	15	34	122
Bengkulu Utara	Arga Makmur	19	5	215
Kaur	Bintuhan	15	3	192
Seluma	Tais	14	20	182
Mukomuko	Mukomuko	15	3	148
Lebong	Tubei	12	11	93
Kepahiang	Kepahiang	8	12	105
Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	11	1	142
Kota Bengkulu	Bengkulu	9	67	0
Provinsi Bengkulu		**129**	**172**	**1.341**

Sumber : Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022.

Gambar 1.1
Peta Administratif Provinsi Bengkulu

Sumber : Perda Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032.

1.2 VISI DAN MISI

Visi dan Misi Provinsi Bengkulu pada tahun 2021-2026 tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026.

1.2.1 Visi

Adapun Visi pembangunan Provinsi Bengkulu dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai berikut :

"BENGKULU MAJU, SEJAHTERA DAN HEBAT"

Visi tersebut merupakan kelanjutan dari cita-cita pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021. Visi di atas memiliki substansi nilai (*value*) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi Pembangunan. Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 untuk mencapai :

1. ***BENGKULU SEMAKIN MAJU*** dengan mewujudkan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan infrastruktur dasar yang berkualitas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berintegritas menjadikan Provinsi Bengkulu sejajar dengan provinsi-provinsi maju di Indonesia.
2. ***BENGKULU SEMAKIN SEJAHTERA*** dengan mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, serta kebijakan pembangunan yang adil serta kemudahan akses. menjamin rasa aman dan nyaman dalam keberagaman, toleransi yang kuat dengan landasan keimanan dan ketaqwaan.
3. Dan pada tujuan akhir, ***BENGKULU MENJADI HEBAT*** dengan mewujudkan Bengkulu yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang didukung dengan kebanggaan terhadap potensi yang dimiliki, optimisme dan rasa percaya diri masyarakat, berintegritas serta bermartabat. Mendorong serta melibatkan kaum muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan (SDM maupun Infrastruktur).

1.2.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi Provinsi Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat, maka Misi yang diemban lima tahun ke depan yang menjadi pedoman dalam pembangunan Provinsi Bengkulu adalah :

Misi Pertama : ***Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif;***

Pembangunan infrastruktur di Bengkulu kedepan akan dilanjutkan dengan lebih cepat dan masif dengan pembangunan infrastruktur strategis seperti Jalan Tol, Jalur Kereta Api, Pelabuhan, Bandara, jalan dan jembatan yang menghubungkan kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, membuka akses lebih luas terhadap kawasan pariwisata, memantapkan pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat, memacu pertumbuhan lapangan kerja baru serta mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian berbasis potensi daerah.

Misi Kedua : ***Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan;***

Pembangunan Provinsi Bengkulu perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pengelolaan dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam harus memperhatikan aspek keberlanjutan, sehingga potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Bengkulu akan tetap dapat dirasakan oleh generasi penerus. Selain itu, pembangunan yang dilakukan harus tetap mengedepankan aspek kesiapsiagaan terhadap bencana (*disaster preparedness*). Semua pemanfaatan SDA Bengkulu dilakukan sebesarbesarnya untuk kesejahteraan masyarakat

Misi Ketiga : *Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik;*

Kapasitas kelembagaan pemerintahan yang ada di Bengkulu diperkuat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan tetap mengedepankan kerjasama antar instansi agar dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi Provinsi Bengkulu kedepan difokuskan adalah pada peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, manajemen sumber daya manusia aparatur, peningkatan akuntabilitas pemerintahan serta zero tolerance terhadap praktik-praktik korupsi. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif dilakukan dengan penerapan pelayanan yang cepat, ramah, murah, mudah, berkualitas, serta didukung dengan pemanfaatan inovasi dan teknologi informasi.

Misi Keempat : *Membangun Sumber Daya Manusia menjadi berkualitas, berdaya saing dan berbudaya serta toleran dan religius;*

Sumber Daya Manusia di Provinsi Bengkulu dibentuk dan dibangun agar dapat menjadi manusia yang kuat, sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, beradab budaya, menguasai teknologi, berkarakter, sejahtera sehingga mampu memiliki daya saing yang tinggi. Kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup mulai dari kandungan hingga tumbuh, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas. Selanjutnya pembangunan manusia dilakukan dalam kondisi lingkungan yang aman, nyaman, dan mengimplementasi nilai-nilai religious dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat yang religius dan toleran dengan menciptakan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama

lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Misi Kelima : *Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kelompok Disabilitas secara Terpadu.*

Perempuan di Provinsi Bengkulu diberikan akses dan kontrol yang sama dalam setiap bidang pembangunan serta berhak memperoleh manfaat tanpa terkecuali sehingga tujuan dari kesetaraan gender dapat dicapai. Selain itu pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan dan memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, Pemerintah bersama dengan masyarakat secara terpadu akan hadir untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Tidak hanya perempuan dan anak, Misi kelima ini juga ditujukan untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Bengkulu. Pemenuhan hak-hak disabilitas tersebut merupakan suatu pengarusutamaan yang harus ada dalam setiap aspek pembangunan di Provinsi Bengkulu selama 5 (lima) tahun mendatang.

1.3 DATA UMUM PROVINSI BENGKULU

1.3.1 Data Geografis Daerah

a. Geografis

Provinsi Bengkulu terletak pada 101°01 - 103°41 Bujur Timur serta 2° 16 - 3°31 Lintang Selatan dan terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera, membujur dari Utara ke Selatan, sepanjang Bukit Barisan yang merupakan hutan suaka alam dan hutan lindung di sebelah Timur dan Samudera Indonesia di sebelah Barat dan dataran tinggi yang membentang dari ujung utara sampai ujung selatan dengan lebar ± 50 km. Dataran tinggi merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan.

Provinsi Bengkulu memiliki bentuk wilayah relatif memanjang sejajar garis pantai, dengan panjang garis pantai ± 525 km. Wilayah Provinsi Bengkulu memiliki kontur yang bergelombang dengan ketinggian tempat (altitude) berkisar antara 0 - 1.938 meter di atas permukaan laut (dpl).

Titik terendah dijumpai di sepanjang pantai sedang titik tertinggi terletak di Puncak Gunung Kaba.

Ditinjau berdasarkan kelas ketinggian tempat, maka wilayah Provinsi Bengkulu dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Wilayah dengan ketinggian tempat 0 - 250 m dpl, meliputi areal seluas 976.624 ha yang menyebar disepanjang pantai dari utara sampai bagian selatan yang merupakan dataran *aluvium*.
2) Wilayah dengan ketinggian tempat >250 - 500 m dpl, meliputi areal seluas 338.365 ha yang menyebar disepanjang pantai dari utara sampai bagian selatan yang merupakan peralihan dari *aluvium* ke perbukitan.
3) Wilayah dengan ketinggian tempat >500 - 750 m dpl, meliputi areal seluas 228.881 ha yang menyebar disebagian besar Kabupaten Lebong dan Rejang Lebong.
4) Wilayah dengan ketinggian tempat >750 - 1000 m dpl, meliputi areal seluas 181.548 ha yang menyebar di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Kaur yang merupakan Taman Nasional.
5) Wilayah dengan ketinggian tempat >1.000 - 1.250 m dpl, meliputi areal seluas 128.664 ha di sepanjang bagian bawah pegunungan bukit barisan yang merupakan Taman Nasional.
6) Wilayah dengan ketinggian tempat >1.250 - 1.500 m dpl, meliputi areal seluas 78.630 ha yang sebagian besar menyebar di sepanjang bagian bawah pegunungan bukit barisan di Kabupaten Lebong, Rejang Lebong dan Kaur.
7) Wilayah dengan ketinggian tempat >1.500 - 2.000 m dpl, meliputi areal seluas 70.338 ha yang merupakan puncak gunung-gunung di sepanjang pegunungan Bukit Barisan.

Adapun data ketinggian tempat di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 1.1
Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Provinsi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2024

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Tinggi Wilayah (mdpl) *Altitude (m a.s.l)*	Jarak ke Ibukota Provinsi *Distance to the Capital of Province*
(1)	(2)	(3)
Bengkulu Selatan	25 - 500	138
Rejang Lebong	500 - 1.900	88
Bengkulu Utara	0 - 2.300	42
Kaur	0 - 1.500	200
Seluma	100 - 500	60
Mukomuko	0 - 1.500	273
Lebong	500 - 1.000	114
Kepahiang	350 - 1.200	55
Bengkulu Tengah	0 - 541	20
Kota Bengkulu	0 - 500	0
Provinsi Bengkulu	**0 - 2.300**	**0**

Sumber : Bengkulu Dalam Angka Tahun 2024, BPS 2024.

bengkulu.bps.go.id

b. Batas Administrasi Daerah

Secara administratif Provinsi Bengkulu berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut :

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat;
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Lampung;
3) Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia;
4) Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan

c. Luas Wilayah

Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai ± 32.465,41 Km², terdiri dari luas daratan ± 20.130,21 Km² dan luas perairan (laut) mencapai ± 12.335,2 Km² dengan panjang garis pantai mencapai ± 525 Km yang seluruhnya terletak di bagian barat Provinsi Bengkulu.

Selain itu, Provinsi Bengkulu memiliki beberapa pulau kecil baik yang berpenghuni seperti Pulau Enggano, serta pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni seperti Pulau Dua, Pulau Merbau, Pulau Bangkei, Pulau Satu, Pulau Mega, Pulau Tapakarifin, Pulau Tapakbalai dan Pulau Tikus.

Luas wilayah Provinsi Bengkulu menurut luas Kabupaten dan Kota disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Luas Wilayah Provinsi Bengkulu

No.	Kabupaten / Kota	Luas darat (km²)
1.	Bengkulu Selatan	1.219,218
2.	Rejang Lebong	1.559,419
3.	Bengkulu Utara	4.481,992
4.	Kaur	2.808,556
5.	Seluma	2.432,164
6.	Mukomuko	4.138,677
7.	Lebong	1.666,621
8.	Kepahiang	738,965
9.	Bengkulu Tengah	1.132,380
10.	Kota Bengkulu	150,348
Provinsi Bengkulu		20.128,340

Sumber : Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022

d. Topografi

Berdasarkan topografinya Provinsi Bengkulu terletak pada tiga jalur dengan luas wilayah sebagai berikut:

1) Jalur Pertama

Daerah ini terletak pada ketinggian 0 – 100 m diatas permukaan laut dengan luas mencapai 708.133 Ha (35,78%) diklasifikasikan sebagai daerah *low land.*

2) Jalur Kedua

Daerah ini terletak pada ketinggian 100-1000 m diatas permukaan laut, posisinya berada di sebelah timur dari jalur pertama, daerah tersebut merupakan lereng pegunungan Bukit Barisan dan terklarifikasi sebagai daerah *Bukit Range.* Pada jalur ini Provinsi Bengkulu dibagi dalam kedua kelompok yaitu daerah dengan ketinggian antara 100 – 500 m di atas permukaan laut dengan luas mencapai 625.399 ha (31,60%) dan

ketinggian antara 500 – 1.000 m di atas permukaan laut dengan luas mencapai 406.044 ha (20,52%).

3) Jalur Ketiga

Daerah ini terletak pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, posisinya berada di sebelah Timur jalur kedua sampai ke puncak pegunungan Bukit Barisan, daerah tersebut umumnya merupakan daerah kegiatan vulkanis dan tektonis. Luas daerah pada ketinggian ini mencapai 239.924 ha (12,09%).

e. Klimatologi

1) Suhu dan Kelembaban

Rata-rata suhu udara (temperatur) di Provinsi Bengkulu pada tahun 2021 yaitu pada suhu 28,7° C, lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata suhu pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 29,0° C. Suhu minimum pada tahun 2024 sebesar 22,0° C dengan suhu udara terendah terjadi pada bulan Oktober dan suhu maksimum sebesar 34,8° C dengan suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Mei. Rata-rata kelembaban udara sepanjang tahun 2024 adalah 76,8 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 77,0 persen. Kelembaban udara minimum pada tahun 2021 sebesar 48,0 persen dengan kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Mei dan Juli dan kelembaban udara maksimum sebesar 100 persen dengan kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Juni, Oktober, dan November.

2) Curah Hujan

Iklim di Provinsi Bengkulu menurut Schmid dan Ferguson diklasifikasikan ke dalam tipe iklim B, dengan curah hujan di atas 3.500 mm per tahun dan merupakan salah satu daerah terbasah di Indonesia. Jumlah curah hujan di Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2024 memilki rata-rata sebesar 3.658,1 mm, lebih rendah jika dibandingkan terhadap tahun sebelumnya dengan rata-rata curah hujan 4.272,5 mm. Jumlah curah hujan tertinggi tahun 2021 terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 447,4 mm dan yang terendah terjadi pada bulan April yaitu sebesar 158,9 mm.

f. Flora dan Fauna

Hutan tropis Provinsi Bengkulu memiliki sumber kekayaan flora dan fauna yang dapat dikembangkan menjadi obyek wisata. Kekayaan flora

hutan tropis Provinsi Bengkulu yang sudah terkenal dan telah menjadi objek wisata hutan adalah bunga Rafflesia Arnoldi yang terdapat di hutan Provinsi Bengkulu.

Kekayaan flora yang lain yang cukup menarik dan berpotensi untuk dijadikan objek wisata hutan karena kelengkapannya yaitu : bunga Anggrek Vanda, bunga Bangkai, dan kayu Mermabu. Sementara itu kekayaan fauna yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata adalah Harimau Sumatera, Siamang, Tapir, Kerbau Liar, Rusa, serta penangkaran Gajah Sumatera.

1.3.2 Jumlah Penduduk

Berdasarkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bengkulu, jumlah penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 sebanyak **2.115.024** Jiwa.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.080.018 Jiwa atau 51,06 % dan jenis kelamin Perempuan sebanyak 1.035.006 Jiwa atau 48,93 % penduduk. Sebaran jumlah penduduk Provinsi Bengkulu menurut Kabupaten/Kota dan jenis kelamin pada tahun 2024 dapat dijelaskan dalam tabel ini :

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Provinsi Bengkulu menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Laki – laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1.	BENGKULU SELATAN	89.652	86.807	176.459
2.	REJANG LEBONG	146.641	140.607	287.248
3.	BENGKULU UTARA	157.025	150.482	307.507
4.	KAUR	69.570	65.612	135.182
5.	SELUMA	110.978	104.376	215.354
6.	MUKOMUKO	104.796	98.729	203.525
7.	LEBONG	58.743	56.031	114.774
8.	KEPAHIANG	80.295	75.225	155.520
9.	BENGKULU TENGAH	64.129	61.134	125.263
10.	KOTA BENGKULU	198.189	196.003	394.192
Jumlah		**1.080.018**	**1.035.006**	**2.115.024**

Sumber : Data Kependudukan Semester 2, Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu, 2024.

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk

Sejak Indonesia menyelenggarakan Sensus Penduduk (SP) pada tahun 1971, jumlah penduduk Provinsi Bengkulu terus mengalami peningkatan. Hasil SP 2020 dibandingkan dengan SP 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 295.152 jiwa atau rata-rata sebanyak 24.596 jiwa setiap tahun.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Provinsi Bengkulu sebesar 1,55 persen per tahun. Terdapat perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,12 persen poin jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk periode 2000-2010 yang sebesar 1,67 persen.

Grafik 1.2
Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Bengkulu
Tahun 2010-2024

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%) *Annual Population Growth Rate (%)*		
	2010–2020[3]	2020–2023[4]	2020–2024[4]
(1)	(5)	(6)	(7)
Bengkulu Selatan	1,47	1,13	1,12
Rejang Lebong	1,11	1,18	1,16
Bengkulu Utara	1,37	1,23	1,2
Kaur	1,56	1,28	1,26
Seluma	1,76	1,24	1,21
Mukomuko	1,97	1,56	1,54
Lebong	0,67	1,37	1,34
Kepahiang	1,77	1,18	1,16
Bengkulu Tengah	1,67	1,36	1,34
Kota Bengkulu	1,87	1,68	1,66
Provinsi Bengkulu	**1,55**	**1,35**	**1,32**

Sumber : Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2024, BPS Provinsi Bengkulu 2024

//bengkulu.bps.go.id

1.3.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi Bengkulu

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk dapat mewujudkan visi dan misi suatu organisasi tidak terlepas dari peran serta aktif dari Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi tersebut, demikian pula halnya dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang merupakan satu kesatuan individu yang melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan untuk secara bersama-sama mencapai tujuan yang ditetapkan.

Salah satu prasyarat utama untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan tersedianya PNS yang terampil, mampu, kompeten dan berdayaguna. Berikut disajikan keadaan (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu menurut tingkat pendidikan, umur dan jenis kelamin.

a. Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 1.4
Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Bengkulu
Menurut Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI (orang)	PEREMPUAN (orang)	JUMLAH (orang)
1.	Sekolah Dasar	8	5	13
2.	SLTP	11	1	12
3.	SLTA	340	175	515
4.	Diploma I	4	2	6
5.	Diploma II	6	8	14
6.	Diploma III	174	358	532
7.	Diploma IV	73	159	232
8.	S-1	2.919	4.411	7.330
9.	S-2	826	1.058	1.884
10.	S-3/Doktor	19	1	20
TOTAL		**4.380**	**6.178**	**10.558**

Sumber : BKD Provinsi Bengkulu, 2024.

Dari tabel 1.4 tersebut diketahui bahwa secara umum kondisi PNS Pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan yaitu sebanyak 7.330 orang adalah berpendidikan Sarjana (S1) dan 1.884 orang adalah berpendidikan Magister/Pasca Sarjana (S2), 532 orang berpendidikan Diploma III serta telah 20 orang berpendidikan S-3/Doktor.

Dengan kata lain bahwa pengetahuan, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah cukup baik dan potensial.

b. Jumlah PNS Menurut Katagori dalam Jabatan

PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu kategori dalam jabatan yaitu Jumlah Pegawai Fungsional Tertentu sebanyak 6.085 orang, Jumlah Pegawai Fungsional Tertentu melalui Pengangkatan Penyetaraan (tidak Bersertifikat Kompetensi) sebanyak 540 orang, Jumlah Pegawai Fungsional Tertentu yang Bersertifikat sebanyak 5.545 orang, Jumlah Fungsional Guru sebanyak 3.600 orang dan Jumlah Fungsional Kesehatan sebanyak 1.072 orang.

c. Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin

Keberadaan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu bila dikaitkan dengan isu pengarusutamaan gender (gender mainstreaming), maka perbandingan jumlah pegawai laki-laki dengan perempuan menunjukkan angka yang cukup proporsional dan perempuan lebih dominan, yakni : 4.380 orang pegawai laki-laki atau 41,48 % dan 6.178 orang pegawai perempuan atau 58,51 % dari 10.558 jumlah seluruh PNS.

Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Bengkulu menurut jenis kelamin tersaji pada tabel berikut :

Tabel 1.5
Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Bengkulu
Menurut Jenis Kelamin

LAKI-LAKI (orang)	PEREMPUAN (orang)	JUMLAH (orang)
4.380	**6.178**	**10.558**

Sumber : BKD Provinsi Bengkulu, 2023.

1.4. Ikhtisar Pencapaian Realisasi APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024

APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran TA 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2024 dan Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu TA 2024. Realisasi pencapaian target kinerja APBD TA 2024 dan 2023, diikhtisarkan sebagai berikut :

Tabel 1.6
Laporan Realisasi Anggaran TA 2024 dan 2023 *(dalam Rupiah)*

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran				Ket
	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	
1	2	3	4	5	6
Pendapatan	3.183.123.966.400,-	3.191.854.148.850,-	100,27	2.991.013.990.544,-	
Belanja Daerah	3.252.071.723.464,-	3.140.472.406.450,-	96,57	3.123.414.680.970,-	
Surplus/ (Defisit)	(68.947.757.064,-)	51.381.742.400,-	74,52	(132.400.690.426,-)	
Pembiayaan					
Penerimaan Pembiayaan	68.947.757.064,-	68.947.757.064,-	100	201.348.447.490,-	
Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	
Pembiayaan Neto	68.947.757.064,-	68.947.757.064,-	100	201.348.447.490,-	
SiLPA	**120.329.499.464,-**				

Sumber : LKPD Provinsi Bengkulu TA 2024, 2025.

Tabel di atas menunjukkan pencapaian target APBD TA 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan TA 2024 terealisasi mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp 3.183.123.966.400,- dengan realisasi sebesar Rp 3.191.854.148.850,- atau 100,27 % dari anggaran.
2. Realisasi belanja TA 2024 dibawah pagu anggaran belanja. Pagu belanja TA 2024 sebesar Rp 3.252.071.723.464,- dengan realisasi belanja sebesar Rp 3.140.472.406.450,- atau 96,57 % dari anggaran. Realisasi belanja TA 2024 naik dibandingkan dengan TA 2023.

3. Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp 68.947.757.064,- sedangkan realisasinya sebesar Rp 68.947.757.064,- atau 100 % dari anggaran.
4. SiLPA TA 2024 sebesar Rp 120.329.499.464,-

Tabel 1.7
Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2024, 2023 dan 2022 *(dalam Rupiah)*

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Pendapatan	3.191.854.148.850,-	2.991.013.990.544,34	2.953.744.560.516,20
Belanja Daerah	3.140.472.406.450,-	3.123.418.880.970,81	3.026.385.524.150,94

Sumber : LKPD Provinsi Bengkulu TA 2024, 2025.

1.4.1. Ikhtisar Perkembangan Realisasi dan Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024

Perkembangan realisasi dan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.8
Rincian Laporan Realisasi Anggaran TA 2024 dan 2023 *(dalam Rupiah)*

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran		Kenaikan/Penurunan antara Realisasi 2024 dan 2023	Ket
	Realisasi 2024	Realisasi 2023		
Pendapatan Asli Daerah	1.085.297.962.753,-	1.033.849.518.692,-	51.448.444.061	-
Pendapatan Transfer	2.070.332.029.097,-	1.955.995.641.852,-	114.336.387.245	-
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	36.224.157.000,-	1.168.830.000,-	35.055.327.000	-
Jumlah	**3.191.854.148.850,-**	**2.991.013.990.544,-**	**200.840.158.306,-**	**-**
Belanja Operasi	2.401.947.454.836,-	2.124.119.855.499,-	277.827.599.337,-	-
Belanja Modal	427.113.855.904,-	586.890.214.822,25	(159.776.358.918,-)	-
Belanja Tidak Terduga	0	26.609.031,00	(26.609.031,-)	-
Transfer	311.411.095.710,-	412.378.001.618,00	(100.966.905.908,-)	-
Jumlah	**3.140.472.406.450,-**	**3.123.414.680.970,-**	17.057.725.480,-	**-**
Surplus / (Defisit)	**51.381.742.400,-**	**(132.400.690.426)**		**-**

Sumber : LKPD Provinsi Bengkulu TA 2024, 2025.

1.4.2. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 Menurut Jenis Pendapatan

Berdasarkan Tabel 1.6 di atas dapat dijelaskan bahwa Realisasi Pendapatan TA 2024 telah melebihi target yang telah ditetapkan atau sebesar 100,27 %. Kenaikan pendapatan terjadi secara signifikan pada komponen Pendapatan Transfer dan Pendapatan lain-lain yang sah.

Rincian realisasi Pendapatan TA 2024 menurut jenis pendapatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 1.9
Rincian Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023 *(dalam Rupiah)*

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran		Kenaikan/Penurunan antara Realisasi 2024 dan 2023	Ket
	Realisasi 2024	Realisasi 2023		
Pajak Daerah	893.700.118.084,-	827.784.321.351,-	65.915.796.733,-	-
Retribusi Daerah	160.956.690.831,-	5.123.637.682,-	155.833.053.149,-	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	13.424.641.778,-	15.681.762.799,-	(2.257.121.021,-)	-
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.216.512.059,-	185.259.796.860,-	(168.043.284.801,-)	-
Jumlah	**1.085.297.962.752,-**	**1.033.849.518.692.-**		-

Sumber : LKPD Provinsi Bengkulu TA 2024, 2025.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan TA 2023.

Tabel 1.10
Rincian Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023 *(dalam Rupiah)*

Uraian		Laporan Realisasi Anggaran		Kenaikan/Penurunan antara Realisasi 2024 dan 2023	Ket
		Realisasi 2024	Realisasi 2023		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2.070.332.029.097,-	1.955.995.641.852,-	114.336.387.245,-	-
1	Dana Perimbangan	2.054.655.400.097,-	1.955.995.641.852,-	98.659.758.245,-	-
2	Dana Insentif Fiskal	15.676.629.000	0	-	-

Sumber : LKPD Provinsi Bengkulu TA 2024, 2025.

Pendapatan Transfer TA 2024 terdiri dari komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang mengalami kenaikan dari TA 2023.

Tabel 1.11
Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
TA 2024 dan 2023 *(dalam Rupiah)*

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran		Kenaikan/Penurunan antara Realisasi 2024 dan 2023	Ket
	Realisasi 2024	Realisasi 2023		
Pendapatan Hibah	36.224.157.000	1.168.830.000	35.055.327.000,00	-

Sumber : LKPD Provinsi Bengkulu TA 2024, 2025.

Komponen Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2024 terdiri dari komponen Pendapatan Hibah yang mengalami kenaikan yang signifikan dari TA 2023 dikarenakan adanya Hibah dari Pemerintah Pusat.

1.4.3. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terealisasi mendekati target yang telah ditetapkan. Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.252.071.723.464,-, sedangkan realisasi Rp. 3.140.472.406.450,- atau 96,57 % dari target yang telah ditetapkan.

Pos anggaran Belanja Daerah mengalami fluktuasi hampir pada seluruh komponen Belanja Daerah, Realisasi Belanja Operasi mengalami kenaikan, sedangkan Realisasi Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer mengalami penurunan dibandingkan TA 2023.

Adapun rincian realisasi Belanja TA 2024 menurut jenis belanja dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 1.12
Rincian Belanja Operasi TA 2024 dan 2023 *(dalam Rupiah)*

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran		Kenaikan/Penurunan antara Realisasi 2024 dan 2023	Ket
	Realisasi 2024	Realisasi 2023		
Belanja Pegawai	1.217.313.289.139,-	1.156.821.627.318,-	60.491.661.821,-	-
Belanja Barang dan Jasa	961.649.037.240,-	900.138.801.847,-	61.510.235.393,-	-
Belanja Hibah	219.980.128.457,-	64.938.846.334,-	155.041.282.123,-	-
Belanja Bantuan Sosial	3.005.000.000,-	2.220.580.000,-	784.420.000,-	-
Jumlah	**2.401.947.454.836,-**	**2.124.119.855.499,-**	**277.827.599.337,-**	-

Sumber : LKPD Provinsi Bengkulu TA 2024, 2025.

Serapan Belanja Operasi TA 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Belanja Operasi TA 2023, komponen Belanja Operasi yang mengalami peningkatan yang signifikan yaitu pada komponen Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Tabel 1.13
Rincian Belanja Modal TA 2024 dan 2023 *(dalam Rupiah)*

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran		Kenaikan/Penurunan antara Realisasi 2024 dan 2023	Ket
	Realisasi 2024	Realisasi 2023		
Belanja Modal Tanah	0	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.056.774.321,-	208.166.316.221,-	(68.109.541.900,-)	-

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.262.779.473,-	149.474.189.332,-	(54.211.409.859,-)	-
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	163.562.317.166,-	206.289.760.149,-	(42.727.442.983,-)	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27.733.984.944,-	22.959.949.119,-	4.774.035.825,-	-
Belanja Modal Aset Lainnya	498.000.000,-	0	498.000.000,-	-
Jumlah	**427.113.855.904,-**	**586.890.214.821,-**	**(159.776.358.917,-)**	**-**

Sumber : LKPD Provinsi Bengkulu TA 2024, 2025.

Penyerapan Belanja Modal TA 2024 tercapai 89,86 % dari pagu anggaran, jika dibandingkan dengan tahun 2023 hampir semua komponen Belanja Modal mengalami penurunan.

Tabel 1.14
Rincian Belanja Tak Terduga TA 2024 dan 2023 *(dalam Rupiah)*

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran		Kenaikan/Penurunan antara Realisasi 2024 dan 2023	Ket
	Realisasi 2024	Realisasi 2023		
Belanja Tak Terduga	0	26.609.031,-	-	-

Sumber : LKPD Provinsi Bengkulu TA 2024, 2025

.

Komponen Belanja Tak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2024 tidak terealisasi.

Tabel 1.15
Rincian Belanja Transfer TA 2024 dan 2023 *(dalam Rupiah)*

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran		Kenaikan/Penurunan antara Realisasi 2024 dan 2023	Ket
	Realisasi 2024	Realisasi 2023		
Belanja Bagi Hasil	311.411.095.710,-	412.378.001.618,-	-100.966.905.908,-	-
Belanja Bantuan Keuangan	0	0		
Jumlah	**311.411.095.710,-**	**412.378.001.618,-**	**-100.966.905.908,-**	-

Sumber : LKPD Provinsi Bengkulu TA 2024, 2025.

Komponen Realisasi Belanja Transfer TA 2024 mengalami penurunan dari TA 2023 sebesar Rp. 100.966.905.908,-.

1.4.4. Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 Menurut Jenis Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Penerimaan Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp. 68.947.757.064,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 68.947.757.064,- yang berasal dari penggunaan sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp. 0,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,-

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsinya dalam mengatur dan mengarahkan perekonomian serta menjalankan roda pemerintahan dengan cara mengatur pengeluaran dan pendapatan daerah. Dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan pemerintah yang baik yang diwujudkan dalam *Good Goverment* ditandai dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Dalam rangka keselarasan program pembangunan dan penyesuaian kebijakan Pemerintah Pusat, maka disusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024 dan mengacu pada pedoman penyusunan APBD Tahun 2024.

Perubahan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat hal-hal yang menyebabkan terjadinya perubahan APBD antara lain:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan dan antar jenis belanja;
c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
d. Keadaan darurat; dan/atau
e. Keadaan luar biasa.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 akan dilakukan Perubahan dengan hal-hal yang mendasari sebagai berikut :

1. Penyesuaian terhadap Capaian Makro Perekonomian Provinsi Bengkulu sampai dengan triwulan II Tahun 2024;

2. Perlunya penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2024;
3. Percepatan pelaksanaan Program Prioritas; dan
4. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yaitu tahun anggaran 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut telah disusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024, diarahkan kepada upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pendapatan daerah tetap berupaya dalam peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan agar dapat direalisasikan sesuai dengan target. Pada Perubahan APBD tahun 2024, pendapatan daerah di proyeksikan sebesar Rp. 3.103.556.549.400,- (*tiga triliun seratus tiga miliar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah),* yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan yang telah ditetapkan dan belanja daerah merupakan salah satu instrumen dalam pencapaian visi dan misi. Selain itu, Belanja Daerah juga dipergunakan dalam rangka upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pencapaian target sasaran sesuai tema RKPD Tahun 2024 yaitu “Penguatan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Infrastruktur Ekonomi dan Pengembangan Komoditas Unggulan didukung Oleh SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing”.

Selanjutnya, dalam pengalokasian belanja daerah jika dilihat dari sisi kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 3.172.504.306.464,- (tiga triliun seratus tujuh puluh dua miliar lima ratus empat juta tiga ratus enam ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), yang dialokasikan untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pada Tahun Anggaran 2024, Penerimaan Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp. 68.947.757.064,- (enam puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah), yang bersumber dari Alokasi SiLPA Tahun 2023. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp. 0,-.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 semula sebesar Rp. 3.122.045.218.243 bertambah sebesar Rp. 68.762.014.221 sehingga menjadi Rp. 3.190.807.232.464, dengan rincian sebagai berikut :

I. Pendapatan Daerah

- Sebelum perubahan sebesar ..... Rp. 3.058.045.218.243,-
- Setelah perubahan sebesar ..... Rp. 3.121.859.475.400,-
- Mengalami penambahan sebesar ..... Rp. 63.814.257.157,-

II. Belanja Daerah

- Sebelum perubahan sebesar …… Rp. 3.122.045.218.243,-
- Setelah perubahan sebesar ..... Rp. 3.190.807.232.464,-
- Mengalami penambahan sebesar..... Rp. 68.762.014.221,-

III. Pembiayaan Daerah

A. Penerimaan Pembiayaan :

- Sebelum perubahan sebesar ..... Rp. 65.000.000.000,-
- Setelah perubahan sebesar ..... Rp. 68.947.757.064,-
- Mengalami penambahan sebesar ..... Rp. 3.947.757.064,-

B. Pengeluaran Pembiayaan :

- Sebelum perubahan sebesar ……. Rp. 1.000.000.000,-
- Setelah perubahan sebesar ……. Rp. 1.000.000.000,-
- Tidak mengalami penambahan.

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	68.947.757.064,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan sebesar ……....	Rp.	0,-

Dari rincian di atas, dapat dijelaskan dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 sebelum perubahan sebesar Rp. 3.058.045.218.243,-, setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 3.121.859.475.400,-, mengalami kenaikan sebesar Rp. 63.814.257.157,- atau sebesar 4,8 %.
2. Belanja Daerah pada Perubahan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 sebelum perubahan sebesar Rp. 3.122.045.218.243,-, setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 3.190.807.232.464,-, mengalami kenaikan sebesar Rp. 68.762.014.221,- atau sebesar 4,5 %.
3. Pembiayaan Daerah
   A. Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 sebelum perubahan sebesar Rp. 65.000.000.000,-, setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 68.947.757.064,-, mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.947.757.064,- atau sebesar 1,6 %.
   B. Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 sebelum perubahan sebesar Rp. 1.000.000.000,-, setelah perubahan tetap menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000,-, tidak mengalami kenaikan atau penurunan.
      - Untuk Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan sebesar Rp. 68.947.757.064,-
      - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan sebesar Rp. 0,-.

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam tahun anggaran 2024. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut :

A. Biro Organisasi Setda Provinsi Bengkulu

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	Penataan struktur, fungsi dan tata kerja organisasi untuk mendukung pencapaian Pembangunan daerah	• Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu • Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah • Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 27 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokras	Tujuan: Penataan kelembagaan perangkat daerah bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik Masalah yang diselesaikan: • Tidak terjadi tumpang tindih fungsi dan wewenang antar perangkat daerah • Keselarasan antara struktur organisasi dan kebutuhan Masyarakat • Perintegrasian perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dan terkait • Pengaturan struktur organisasi dan tugas perangkat daerah untuk dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan prioritas Pembangunan daerah

B. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	Revisi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi Bengkulu	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	Tujuan : Memperbaiki isi dari pasal - pasal Masalah Yang diselesaikan : Melakukan Perubahan Peraturan Gubernur No. 26 Tahun 2020 menjadi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi Bengkulu dengan merevisi beberapa pasal yaitu : - Pasal 6 ayat 2 - Pasal 7 ayat 2 - Pasal 9 - Pasal 12 - Pasal 13 ayat 1 - Pasal 14 ayat 3 - Pasal 15 ayat 2 - Pasal 17 bagian ketiga - Pasal 18 bagian keempat - Pasal 19 - Pasal 20
2.	Pembuatan Pedoman Penyelenggaraan SPBE agar terhindar dari gangguan dan ancaman informasi	Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2024 Tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE	Tersediannya kebijakan internal manajemen keamanan informasi SPBE di Pemerintah Provinsi Bengkulu

C. Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1	Pengangkatan Anak antar WNI dan Orang Tua Tunggal	Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No. E.311. Dinsos Tahun 2024 Tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah Provinsi Bengkulu	Tujuan : Membantu Gubernur dalam memberikan Pertimbangan Pemberian Perizinan Pengangkatan Anak Antar WNI dan Orang Tua Tunggal.

2	Program Bantuan Sosial Kartu Bengkulu Sejahtera (KBS)	Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor.D.577.DINSOS Tahun 2024 Tentang: Perubahan atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor B. 150. Dinsos 2024 Tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Masyarakat Tidak Mampu/Rumah Tangga Miskin melalui Kartu Bengkulu Sejahtera Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Oktober 2024.	Tujuan : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat tidak mampu/rumah tangga miskin serta mendorong usaha rakyat untuk mendapatkan pelanggan dan meningkatkan penghasilan dengan melayani KPM Kartu Bengkulu Sejahtera
3	Program Bantuan Sosial Kartu Bengkulu Sejahtera (KBS)	Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor.M.620.DINSOS Tahun 2024 Tentang: Daftar Penerima Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Masyarakat Tidak Mampu/Rumah Tangga Miskin melalui Kartu Bengkulu Sejahtera yang bersumber Dari insentif Fiskal di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024. Tanggal 29 November 2024.	Tujuan : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat tidak mampu/rumah tangga miskin serta mendorong usaha rakyat untuk mendapatkan pelanggan dan meningkatkan penghasilan dengan melayani KPM Kartu Bengkulu Sejahtera
4	Program Bantuan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.	Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor.R.321.DINSOS Tahun 2024 Tentang: Daftar Pekerja Rentan bukan Penerima Upah sebagai sebagai Penerima Perlindungan Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja dan Kematian Melalui Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024. Tanggal 10 Juni 2024.	Terlindungnya Pekerja Rentan bukan penerima upah melalui Program BPJS Ketenagakerjaan.

5	Program Bantuan Sosial Tabung Gas LPG 3 Kg	Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor.U.612.DINSOS Tahun 2024 Tentang: Daftar Penerima Bantuan Sosial Tabung Liquifield Petroleum Gas Tiga Kilogram besrta isi Bagi masyarakat tidak mampu di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 Tanggal 22 November 2024.	Tujuan : Membantu KPM sebagai Penerima bantuan untuk dapat memenuhi kebutuhannya dalam menekan beban pengeluaran Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat tidak mampu / Rumah tangga miskin.

D. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Pemberian Pembebasan Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan BEA Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kepemilikan Kedua dan Seterusnya Terhadap Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Atau Lebih Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu	Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : K.290.BPKD Tahun 2024 Tanggal 30 Mei 2024 Tentang Pemberian Pembebasan Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan BEA Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kepemilikan Kedua dan Seterusnya Terhadap Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Atau Lebih Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu	Tujuan : Mempermudah masyarakat Bengkulu dalam membayar pajak dengan segala keringanan yang diberikan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada masyarakat Provinsi Bengkulu Masalah Yang diselesaikan : Berkurangnya Pajak Kendaraan Motor yang tidak bayar serta meningkatkan PAD Provinsi Bengkulu

E. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim.	Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor : 100.3.4/733/DKKTRANS/ 2024,Tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim.	Tujuan : Untuk dapat mencegah masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh menjadi keluarga miskin baru atau bahkan miskin ekstrem ketika mereka mengalami guncangan ekonomi akibat kecelakaan kerja ataupun krisis ekonomi Masalah yang diselesaikan : Pemerintah terus berupaya untuk

			mewujudkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang mencakup seluruh pekerja melalui Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2.	Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2025	Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.647.DKKTRANS.TAHUN 2024, tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2025	Tujuan : Melindungi upah pekerja / buruh agar tidak turun pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja. Masalah yang diselesaikan : Menyelaraskan kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja
3.	Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2025	Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.632.DKKTRANS.TAHUN 2024, tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2025	Tujuan : Melindungi upah pekerja / buruh agar tidak turun pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja. Masalah yang diselesaikan : Menyelaraskan kebijakan Upah Minimum Provinsi guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran 2024. Laporan tindak lanjut Organisasi Perangkat Daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun 2024 dituangkan dalam format sebagai berikut :

A. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Tahun 2024	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	DPRD berharap agar pemerintah Provinsi Bengkulu mempertahankan kinerja pendapatan daerah serta terus menggali potensi-potensi pendapatan daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah sebagai salah satu indikator dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.	1. Untuk Kinerja BPKD Provinsi Bengkulu terkait Pendapatan Daerah Sudah Mencapai 95,99 % dari target yang ditetapkan. 2. BPKD telah menyelesaikan Perda untuk sektor pajak alat berat untuk menggali salah satu potensi PAD Provinsi Bengkulu. Sudah dilaksanakan sosialisasi pendataan ke pemilik alat berat yg berada di Provinsi Bengkulu	Untuk meningkatkan PAD di sektor pajak alat berat.
2	DPRD Provinsi Bengkulu meminta kepada Pemerintah Daerah harus berinovasi dan kreatif dalam mengelola dan mengembangkan potensi-potensi daerah yang dimiliki melalui OPD terkait dan meningkatkan pengelolaan objek-objek pajak yang ada di Provinsi Bengkulu guna meningkatkan sumber-sumber PAD dalam rangka memperkuat otonomi daerah.	BPKD telah melakukan inovasi dan kretaif dalam mengembangkan dan meningkatkan PAD, diantaranya yang sudah menyelesaikan BPKD Perda untuk sektor pajak alat berat untuk menggali salah satu potensi PAD Provinsi Bengkulu, melakukan pembebasan denda pajak kendaraan.	Untuk meningkatkan PAD di sektor pajak alat berat, tahun 2024 memperoses pergub terkait latar berrat dan pergub tersebut sudah selesai dan di tandatangani oleg gubernur pada tanggal 05 Februari 2025.

B. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Tahun 2024	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Rehab Sekolah atau fasilitas pendukung Pendidikan seperti perpustakaan agar didasarkan atas analis kajian akademik/ ilmiah,seperti misalnya dibuat kajian kondisi baik,kondisi sedang,atau kondisi buruk di masing-masing wilayah sehingga pembangunan atau rehab sekolah dan perpustakaan bisa disesuaikan dengan Anggarannya. DPRD Provinsi Bengkulu melihat dalam anggaran ada ketidak sesuaian anggaran dengan kenyataan yang ada.	Pada tahun anggaran 2024 Terkait Unit Sekolah baru (USB) yang diusulkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, terdapat 2 (dua) unit sekolah yang akan diusulkan antara lain : SMAN 12 Kaur dan SMKN 15 Bengkulu Selatan dengan kebutuhan anggaran : a. SMAN 12 Kaur sebesar 5.340.708.400,- (Lima milyar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus rupiah) (RAB terlampir) b. SMKN 15 Bengkulu Selatan sebesar Rp. 6.225.778.100,0 (Enam milyar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu serratus rupiah) (RAB terlampir) Mengingat telah berlangsungnya system pembelajaran pada sekolah dimaksud yang masih menginduk pada sekolah sekitar, dengan menyesuaikan pada jam pembelajaran. Belum disetujui dan diusulkan Kembali Pada RKPD 2025 dan Renja 2025 masih belum disetujui.	Tujuan Pembangunan Sekolah Baru (USB) : a. Memenuhi Standar Pelayan Publik (SPM) b. Pencegahan dan Penangan Anak Putus Sekolah
2	Dalam Pengembangan Karir pendidik dan Tenaga Kependidikan diprioritaskan pada pendidik untu sekolahn Luar biasa (SLB), DPRD menyarankan agar diberikan pengembangan kompetensi Guru sekolah biasa untuk dapat memiliki ketrampilan atau kompetensi mengajar di SLB. jika diperbolehkan oleh	Satuan Pendidikan pada Pembinaan Pendidikan Khusus terdapat 16 Satuan Pendidikan, yaitu 14 (empat belas) SLB Negeri dan 2 (dua) SLB Swasta. Dari 16 Satuan Pendidikan tersebut masih banyak terdapat tenaga pendidik yang bukan berlatar belakang Pendidikan yang manaungi Pendidikan khusus.	Untuk memenuhi standar kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidkan SLB

	aturan dapat diperbantukan mengajar di SLB.Mengingat saat ini di Provinsi Bengkulu kekurangan guru untuk sekolah luar biasa	Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu bermaksud untuk memberikan kesempatan peningkatan kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan terhadap tenaga pendidik dimaksud secara bertahap. Untuk tahap awal diperkirakan 50 (lima Puluh) tenaga pendidik yang diberangkatkan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi untuk tenaga pendidik pada Pendidikan khusus. Lokasi pembelajaran terdekat yang menyelenggarakan pelatihan dan Pendidikan dimaksud adalah kota Padang Provinsi Sumatra Barat.	
3	Pemerintah Daerah Perlu Menjamin Kualitas sekolah negri agar tetap memiliki daya saing dengan sekolah swasta. Apabila kulitas penyelenggaraan Pendidikan baik, maka besar harapannya dapat menghasilkan siswa-siswa yang berkompetensi.	Peningkatan sarana dan prasarana sekolah dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik	Tujuan: a. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu mengembangkan kemampuan berpikir. b. Meningkatkan Kepuasan Peserta Didik c. Mengoptimalkan teknologi Pendidikan d. Memanfaatkan komunitas belajar dan kelompok diskusi Masalah Yang Diselesaikan : 1. Pemberian Bea Siswa 2. Mengikuti Lomba Kompentensi tingkat Nasional

C. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Tahun 2024	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Pada peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir hingga usia 5 tahun (usia emas) menjadi target perbaikan utama. DPRD Provinsi Bengkulu menyarankan adanya penyuluhan, sosialisasi, dukungan nutrisi maupun vaksinasi dapat menjadi upaya yang dapat diberikan, di samping layanan dan kualitas serta kesiapan sarana prasarana dan tenaga medis yang ditingkatkan.	1. Telah melaksanakan focus grup diskusi (FGD) dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting dan penyerapan PMT Lokal 2. Telah Melaksanakan rapat Evaluasi kematian Ibu dan Anak	1. Menurunnya Prevalensi Stunting 2. Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
2	Dalam perencanaan penganggaran kegiatan direncanakan dengan lebih matang, memperhatikan adanya kegiatan yang realisasinya tidak sesuai pagu anggaran. Alihkan anggaran ke kegiatan yang lebih prioritas.	1. Telah melaksanakan pergeseran anggaran untuk sisa dana yang belum terpakai ke kegiatan yang membutuhkan 2. Untuk sisa anggaran yang belum terrealisasi akan di ajukan masuk dalam APBD perubahan tahun selanjutnya	1. Realisasi anggaran dapat di tingkatkan 2. Program / kegiatan terlaksana lebih efektif dan efisien

D. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Tahun 2024	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur jalan dan jembatan lebih terarah, terencana, dan terukur dalam perhitungan volume pekerjaannya serta tetap memperhatikan mutu dan kualitas sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan.	Pada tahun anggaran 2024 yang telah dilakukan pembangunan jalan, jembatan dan irigasi : a. Pembangunan Jalan - Penanganan Long Segmen (Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Berkala, Peningkatan /Rekonstruksi) Ruas Jalan Lubuk Durian Lubuk Sini (DAK) - Penanganan Long Segmen (Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan	Penguatan pengelolaan jalan, jembatan melalui peningkatan kapasitas dan pembangunan jalan di ruas jalan provinsi serta jalan akses dan penghubung antar Wilayah Pengembangan, Jalan akses

		Berkala, Peningkatan /Rekonstruksi) Ruas Jalan Permu Beringin Tiga (DAK) - Penanganan Long Segmen (Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Berkala,Peningkatan / Rekonstruksi) Ruas Jalan Wisata Air Terjun Curup IX (DAK) b. Pembangunan Jembatan: - Pembangunan Jembatan Air Muring c. Pembangunan Irigasi : - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan ProvinsiDAK) - Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nakai Batu Roto - Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Air Nokan Rama Agung	menuju kawasan industri, pertanian, perkebunan dan perbatasan antar provinsi; dan melaksanakan rehabilitasi/ pemeliharaan rutin jalan agar tetap dalam kondisi permukaan baik dan pemeliharaan rutin jembatan agar tetap dalam kondisi baik;
2	Perlu dilakukan langkah peningkatan anggaran untuk jalan agar dapat diperbaiki dan dipelihara secara maksimal, demikian halnya pembangunan jembatan dan irigasi.	Mengusulkan kembali Alokasi Anggaran Jalan, jembatan,dan Irigasi pada Anggaran APBD dan APBN	1. Meningkatkan Pengelolaan Irigasi, indeks kinerja Sistem irigasi dan Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi 2. Memaksimalkan Anggaran sesuai dengan kebutuhan yang potensial yang mendukung Konektivitas jalan dan jembatan antar daerah serta mendukung kelancaran arus transportasi barang dan orang, mendorong

			aktivitas ekonomi.
3	Di bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang yang berhubungan dengan tenaga teknis, DPRD Provinsi Bengkulu merekomendasikan adanya peningkatan SDM dan kinerja setiap bidang teknis keahlian untuk perbaikan mutu agar bisa menggali dana-dana yang bersumber dari APBN.	Telah diusulkan penambahan ASN pada Anjab di PUPR untuk tambahan formasi tahun 2025	Meningkatkan SDM, Kinerja Bidang melalui Pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial, disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.

E. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Bengkulu

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Tahun 2024	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Agar setiap OPD dapat membuat program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat	Tindak lanjutnya di Renja Bappeda Perubahan 2024 dan Renja 2025. Perencanaan partisipatif melibatkan semua unsur agar kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program pembangunan, memastikan kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran
2	Agar setiap OPD menggunakan anggaran efektif dan efisien agar tidak mengakibatkan ketimpangan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Efektif dan efisien: Perencanaan disandingkan dengan realisasi keuangan dan capaian target. Monitoring dan evaluasi anggaran dilakukan untuk mengurangi ketimpangan antar OPD.	Mencegah inefisiensi dalam penggunaan anggaran serta memastikan distribusi dana yang adil antar OPD sesuai kebutuhan prioritas daerah

3	Agar setiap OPD harus cermat, teliti, dan efisien dalam perencanaan anggaran, agar dana yang dialokasikan dapat terealisasi secara maksimal. Hal ini penting untuk mencegah sisa anggaran yang besar, yang dapat berdampak pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat	Perencanaan berbasis data dan evaluasi program sebelumnya. Penyusunan anggaran dilakukan berbasis kebutuhan prioritas dengan target capaian yang jelas.	Mengurangi potensi sisa anggaran yang tidak terserap dan memastikan realisasi anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
4	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta membuat perencanaan kegiatan yang matang dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Kegiatan tersebut harus disusun berdasarkan skala prioritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Renja mengacu pada RKPD sudah pasti karena menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penyusunan program dilakukan secara terintegrasi dan sinkron dengan prioritas pembangunan daerah.	Memastikan kegiatan pembangunan daerah lebih terarah, sesuai dengan kebijakan yang telah disusun dalam RKPD, serta menghindari program yang tumpang tindih.
5	Agar tercapai Visi dan Misi Gubernur Bengkulu, Setiap tahun penganggaran oleh OPD hendaknya difokuskan pada program-program yang bermanfaat dan tepat sasaran	Program prioritas gubernur diintegrasikan dalam Renja OPD agar fokus pada capaian visi dan misi daerah. Evaluasi dan pemantauan rutin dilakukan agar program tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan daerah.	Menjamin bahwa program pembangunan setiap tahun benar-benar mendukung visi dan misi Gubernur Bengkulu, serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat

F. Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Tahun 2024	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	DPRD Provinsi Bengkulu merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait untuk segera menyusun laporan resmi mengenai pemindahan status PT BIMEX sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan bentuk hukum PD.Bimex menjadi PT.Bimex	Sudah diterbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2021
2	DPRD Provinsi Bengkulu merekomendasikan PT Bengkulu Mandiri untuk segera melaporkan hasil program kerja yang signifikan kepada OPD terkait, guna disampaikan kepada DPRD Provinsi Bengkulu.	Sudah disampaikan surat Permintaan Program Kerja PT. Bengkulu Mandiri	PT. Bengkulu Mandiri belum menyampaikan Program Kerja tersebut.
3	Setoran modal ke PT BIMEX menyebabkan SILPA sebesar Rp.2,75 M. Untuk menghindari hal tersebut, DPRD Provinsi Bengkulu merekomendasikan kepada Biro Ekonomi agar melakukan setoran modal kepada PT BIMEX sesuai dengan aturan yang berlaku.	Pemerintah Daerah sudah menganggarkan Rp. 2,75 M di tahun 2023	Anggaran tersebut tidak direalisasikan karena PT. Bimex tidak memenuhi syarat yaitu tidak menyampaikan laporan keuangan terkait
4	DPRD Provinsi Bengkulu mengharapkan kepada Gubernur agar perlu diselesaikan persoalan penempatan atau penyetoran modal pemerintah provinsi ke PT BIMEX. Rekomendasi lainnya, harus ada forum konfrontir antara PT BIMEX, Biro Ekonomi, dan OPD terkait lainnya terkait permasalahan yang perlu dituntaskan	Gubernur Bengkulu menganggarkan penyertaan modal secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan daerah	Belum dapat direalisasikan karena keterbatasan keuangan daerah
5	DPRD Provinsi Bengkulu merekomendasikan pembubaran PT BIMEX yang lama	Secara otomatis PD.Bimex sudah tidak ada lagi karena sudah menjadi PT.Bimex	Pemerintah Provinsi telah menyampaikan surat kepada pihak perpajakan untuk

			penghapusan NPWP PD.Bimex
6	DPRD Provinsi Bengkulu merekomendasikan evaluasi kinerja PT Bengkulu Mandiri yang tidak berjalan.	Sudah dibentuk Tim Evaluasi untuk melakukan kinerja PT. Bengkulu Mandiri	Tim evaluasi kinerja belum optimal

G. Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Tahun 2024	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Dinas-dinas yang berkaitan dengan tata kelola pariwisata dapat berkolaborasi dalam tata kelola tugas dan kewenangan perangkat daerah untuk pengembangan kawasan wisata di Provinsi Bengkulu.	Dinas-Dinas telah berkolaborasi dalam melaksanakan tata kelola pariwisata di Provinsi Bengkulu melalui : 1. Program unggulan yaitu pembinaan dan pengembangan desa wisata dengan melaksanakan lomba desa wisata dan pemberian reward (hadiah langsung dan bantuan dukungan infrastruktur) 2. Pengembangan Kawasan Pantai Panjang, melibatkan lintas OPD termasuk instansi Vertikal	1. Menggalakkan, menumbuh-kembangkan pembangunan sektor pariwisata daerah di pedesaan. Sudah ditetapkan 310 desa wisata se-provinsi Bengkulu oleh masing-masing kepala daerah kabupaten/kota dan 15 desa wisata yang telah mendapatkan reward pengembangan dan pembinaan desa wisata sejak tahun 2021-2024. 2. Penataan dan Pengelolaan Pantai Panjang: a.Regulasi Pengelolaan (Perda/Pergub dan SK Gub) b.Koordinasi Penataan (SK Tim Pembina Pengawas Pengelolaan

			Pantai Panjang)
2	Diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan Badan Pusat Statistik (BPS) DPRD Provinsi Bengkulu merekomendasikan perlu adanya koordinasi dan kolaborasi antara BPS dan Dinas Pariwisata agar dapat bekerjasama melakukan pendataan baik secara mikro maupun makro. Diharapkan kedua belah pihak mampu menyediakan serta memanfaatkan data dan informasi statistik di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Dukungan data yang lengkap dan akurat menjadi keniscayaan untuk menghasilkan kebijakan pariwisata yang tepat sasaran	1. Dinas Pariwisata selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dalam pemanfaatan data dan informasi yang dirilis BPS terkait data PDRB sektor Pariwisata dalam penghitungan dan pengukuran indikator kinerja Dinas Pariwisata yang bersumber dari BPS. 2. Dinas Pariwisata telah melakukan penjajakan kerjasama dengan BPS terkait penghitungan PDRB sektor Ekonomi Kreatif yang memang belum dilakukan survei oleh BPS mengingat banyak indikator yang perlu disepakati dalam perhitungannya (termasuk di level pusat).	1. Data dan Informasi pariwisata sudah dapat dimanfaatkan dalam perhitungan PDRB sektor Pariwisata khususnya akomodasi (makanan dan minuman), tingkat hunian hotel dan Jumlah Kunjungan Wisatawan. 2. Segera melakukan MoU antara Pemerintah Provinsi Bengkulu (Dinas Pariwisata) dengan BPS terkait survei untuk mendapatkan data dan informasi kegiatan di sektor ekonomi kreatif.
3	Segera dibuat dan diterbitkan Perda tentang Ekonomi Kreatif	Perda tentang Ekonomi Kreatif memang sangat penting sebagai pedoman dalam rangka memberikan arah dalam pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Bengkulu, namun belum terprogram dalam renstra 2021 - 2026. Perda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Bengkulu akan diusulkan pada Renstra 2025-2029 , dalam rangka menunjang Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan Visi	1. Mendorong peningkatan ekonomi, daya saing, dan kreatifitas pengusaha dan pelaku ekonomi kreatif. 2. Adanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah, dunia usaha,

		Misi Gubernur Bengkulu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	Perguruan Tinggi, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, serta pengembangan usaha kreatif dan industri kreatif.

H. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Tahun 2024	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Pihak BKAD untuk mendata seluruh aset barang-barang yang ada di Provinsi Bengkulu	BKAD Sudah dilaksankan rekonsiliasi aset setiap triulan	Agar semua aset provinsi bengkulu terdata dengan baik
2	Perlu percepatan realisasi pendapatan dari sektor pajak alat berat	1. Perda untuk sektor pajak alat berat sudah di terbtkan 2. Pergub terkait pajak alat berat masih dalam proses. 3. Sudah dilaksanakan sosialisasi pendataan ke pemilik alat berat yg berada di Provinsi bengkulu	Untuk meningkatkan PAD di sektor pajak alat berat, tahun 2024 memperoses pergub terkait latar berrat dan pergub tersebut sudah selesai dan di tandatangani oleh gubernur pada tanggal 05 Februari 2025.
3	UPTD-UPTD yang ada di Provinsi Bengkulu, di bawah naungan BKAD, dimohon agar penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien	Untuk UPTD-UPTD yang ada di provinsi Bengkulu, di Bawah nauang BKAD, sudah melaksanakan penggunaan anggaran secara efektif dan efesian sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu.	Penggunaan anggaran dapat dilaksankan secara efektif dan efesian

I. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bengkulu

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Tahun 2024	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Segera membuat kebijakan relokasi atau pengembalian aset provinsi atas tiga unit excavator milik Provinsi Bengkulu, yang saat ini berada di Kabupaten Kaur sebanyak 2 unit dan 1 unit di Kabupaten Bengkulu Selatan	1. Dinas TPHP mengirimkan nota dinas kepada Gubernur Bengkulu, sesuai hasil rapat kerja Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, disarankan untuk melimpahkan pengelolaannya pada instansi teknis terkait. 2. Tahun 2023; Plt. Kadis TPHP berkoordinasi dengan Kadis PUPR dan Ka. UPT Balai Peralatan terkait pengelolaan excavator. 3. Melakukan diskusi ke bidang aset Pemda Provinsi Bengkulu terkait administrasi pengalihan. pengelolaan excavator. 4. Plt. Kadis TPHP melaporkan terkait pengalihan pengelolaan excavator ke Plt. Asissten II Setda Provinsi Bengkulu.	1. Dinas PUPR melalui Balai Peralatan bersedia mengelola excavator milik Dinas TPHP. 2. Pengalihan pengelolaan excavator ke Dinas PUPR, dapat dilakukan setelah Dinas TPHP melakukan penarikan aset dari pihak-pihak yang meminjam. 3. Dinas TPHP memiliki kendala terkait aset (Alat dalam kondisi rusak berat, dana tidak tersedia) sehingga kesulitan dalam menarik aset, dan Pihak yang meminjam tidak bersedia mengembalikan sesuai dengan surat perjanjian.
2	Agar Gubernur Bengkulu memberikan dukungan pemilikan fungsi Balai Sertifikasi, termasuk oleh pemerintah provinsi, diharapkan mulai mengarahkan program belanja	1. Bulan Desember Tahun 2024, Dinas TPHP melalui UPTD Pengawasan, Penelitian dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (PPSBTPHP)	1. Terpenuhinya kebutuhan benih Padi dan Jagung bersertifikat di Provinsi Bengkulu yang

	benih atau bibit agar dipusatkan menjadi program mandiri yang menghasilkan bibit TPHP dan menjadi sentra produksi bibit	bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbenihan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI telah melaksanakan workshop tentang pengembangan bibit insitu di Provinsi Bengkulu dengan memfasilitasi Penangkar/Petani Benih dengan Perusahaan/Produsen Benih agar para petani dapat menghasilkan benih secara mandiri dan mempunyai tempat penyaluran/penjualan benih yang dihasilkan (benih Padi dan Jagung yang bersertifikasi). Dengan adanya program Pengembangan benih insitu. 2. Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan dukungan dana *sharing* atas perencanaan Pembangunan Fisik Rehab Laboratorium Benih dan Rehab Rumah Kaca pada UPTD PPSBTPHP yang bersumber dari DAK Bidang Pertanian. 3. Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui APBD 2024 telah memfasilitasi Laboratorium UPTD PPSBTPHP melaksanakan kegiatan *Surveillance* dalam rangka Akreditasi Laboratorium secara Nasional	merupakan hasil mandiri dari petani/penangkar benih dari Provinsi Bengkulu. Dengan adanya ketersediaan benih insitu ini diharapkan kebutuhan benih Padi dan Jagung bersertifikat di Provinsi Bengkulu akan terpenuhi secara mandiri dan tidak lagi bergantung dari pasokan benih dari luar provinsi. Selain itu, Provinsi Bengkulu dapat ikut mensukseskan program nasional yaitu swasembada pangan yang berkelanjutan. 2. Tersedianya Bangunan Laboratorium Benih yang berstandar SNI (Terkreditasi oleh Lembaga KAN) di Provinsi Bengkulu, sehingga hasil penelitian/Pengujian Mutu Benih yang di keluarkan oleh UPTD PPSB TPHP

			provinsi Bengkulu di akui secara nasional
3	Agar Gubernur Bengkulu memberikan dukungan anggaran untuk perbaikan jaringan irigasi sebagai upaya menjaga stabilitas produksi beras	Telah dilaksanakan kegiatan Irigasi Perpompaan 34 Unit dan Irigasi Perpipaan 18 Unit melalui dana APBN	1. Tujuan Membantu petani untuk meningkatkan Indeks Pertanaman. 2. Masalah yang diselesaikan dapat membantu petani dalam upaya ketersediaan air
4	Kuota pupuk harus diusulkan bertambah, termasuk perlunya pengawasan terhadap para distributor pupuk agar benar-benar sampai kepada petani dan tepat guna. Rekomendasi lainnya, segera tetapkan regulasi bahwa cukup dengan KTP, petani bisa mendapatkan jatah pupuk subsidi	Kuota Pupuk ditetapkan Oleh Pusat, sudah ada penambahan alokasi Pupuk yaitu : Urea alokasi 15.378 Ton menjadi 26.286 Ton, NPK alokasi 17.539 Ton menjadi 37.496 Ton, NPK Formula khusus 2 Ton menjadi 11 Ton	1. Tujuan membantu memenuhi kebutuhan pupuk petani. 2. Masalah yang diselesaikan dapat membantu petani dalam hal kekurangan pupuk
5	Perlu dilakukan pengawasan terhadap pemegang DO, supplier, dan tandan buah sawit (TBS) kepada pabrik-pabrik yang masih tidak patuh pada penetapan harga TBS tertinggi, terutama dengan alasan yang merugikan petani non-kemitraan	1. Membentuk Tim Satuan Tugas Pemantauan Pembelian TBS kelapa sawit Provinsi Bengkulu lintas sektoral yang ditetapkan oleh Gubernur disertai dengan penganggaran yang memadai untuk melaksanakan pemantauan dan monitoring pengawasan. 2. Kepala daerah selaku pemberi izin operasional pabrik kelapa sawit dimana pabrik kelapa sawit berada membuat peraturan terkait pengawasan terhadap kepatuhan PKS dalam	1. Harga pembelian TBS kelapa sawit di tingkat pabrik kelapa sawit yang ditetapkan pemerintah dalam hal ini Gubernur Bengkulu dapat dilaksanakan secara optimal sepanjang waktu dan dipatuhi oleh semua Pabrik

		melaksanakan kewajiban nya termasuk dalam hal kepatuhan melaksanakan pembelian harga TBS kelapa sawit. 3. Kepala daerah selaku pemberi izin operasional pabrik kelapa sawit dimana pabrik kelapa sawit berada melaksanakan reward and punishem terhadap pabrik kelapa sawit yang memenuhi dan tidak mematuhi regulasi yang belaku berdasarkan peraturan yang ada	Kelapa Sawit yang ada di Provinsi Bengkulu. 2. Disparitas harga TBS kelapa sawit di provinsi Bengkulu dapat dikendalikan sehingga harga TBS kelapa sawit di tingkat pabrik disemua wilayah Provini Bengkulu tidak bervariasi. 3. Tim penetapan harga TBS klapa sawit sebagai perpanjangan tangan Gubernur Bengkulu dalam menetapkan harga TBS kelapa sawit dapat lebih aktif dalam mengikuti rapat penetapan harga TBS kelapa sawit. 4. Pabrik Kelapa Sawit sebagai anggota tim penetapan harga TBS kelapa sawit Provinsi Bengkulu dapat lebih

			aktif dalam memberikan data untuk penetapan harga TBS

J. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Tahun 2024	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Memastikan stabilitas harga bahan pokok, dan dalam mengatasi kenaikan harga bahan pokok, perlu dilakukan operasi pasar secara berkala	Kolaborasi dan Koordinasi ke: 1. Distributor Kota Bengkulu 2. Pihak Bank Indonesia 3. Lintas Sektor seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog	Fasilitasi Pasar Murah yang dilakukan secara berkala di setiap Kabupaten /Kota terutama di hari besar Keagamaan atau di bulan ramadhan

K. Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bengkulu

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Tahun 2024	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Program-program UMKM menghasilkan produk yang lebih kreatif dan lebih menyentuh masyarakat, seperti memberdayakan ibu-ibu dalam pengelolaan ikan tanpa harus melalui kelompok tani	1. Program pengembangan UMKM untuk menghasilkan produk yang lebih kreatif sudah dilaksanakan pada sub kegiatan penumbuhan pengembangan kewirausahaan yaitu dengan mengadakan pelatihan keterampilan teknis sebagai berikut : • Pelatihan keterampilan teknis BARISTA sebanyak 4 angkatan dengan jumlah peserta 120 orang • Pelatihan keterampilan teknis Cukur sebanyak 3 angkatan dengan jumlah peserta 90 orang • Pelatihan keterampilan teknis membatik sebanyak 4 angkatan dengan jumlah peserta 120 orang	Meningkatkan Kualitas UMKM agar tumbuh dan berkembang menjadi Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

		• Pelatihan keterampilan teknis MUA sebanyak 6 angkatan dengan jumlah peserta 180 orang • Pelatihan keterampilan teknis olahan makanan MUA sebanyak 8 angkatan dengan jumlah peserta 240 orang	
2.	Dinas Koperasi dan UMKM Untuk menyampaikan data-data atau nama Koperasi dan UMKM yang berada di bawah binaan Provinsi Bengkulu dan koperasi UMKM mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu. Hal ini diperlukan untuk memberikan sosialisasi dari Dinas Koperasi seperti publikasi bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada koperasi-koperasi dan UMKM provinsi Bengkulu.	1. Data Koperasi Binaan Provinsi sebanyak 63 2. Data UMKM terdiri dari : • Bengkulu Selatan : 20.092 • Rejang Lebong : 24.393 • Bengkulu Utara ; 16.945 • Kaur : 11.033 • Kepahiang : 12.930 • Lebong : 12.347 • Mukomuko : 16.128 • Seluma : 23.895 • Bengkulu Tengah : 9.623 • Kota Bengkulu : 40.930 3. Data UKM yang mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu berjumlah 1904 orang dengan rincian : • Provinsi : 125 orang • Kota Bengkulu : 611 orang • Bengkulu Utara : 174 orang • Bengkulu Selatan : 146 orang • Bengkulu Tengah : 72 orang • Rejang Lebong : 122 orang • Lebong : 110 orang • Mukomuko : 70 orang • Seluma : 132 orang • Kaur : 255 orang • Kepahiang : 87 orang	Meningkatkan Kualitas UMKM agar tumbuh dan berkembang menjadi Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi,dan Pengentasan Kemiskinan

L. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Tahun 2024	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Dinas Ketahanan Pangan agar lebih kreatif dalam perencanaan kegiatannya yang berkaitan dengan penanganan masalah stunting dan gizi pada anak di Provinsi Bengkulu	1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bappeda Provinsi Bengkulu 2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder terkait penanganan masalah stunting dan gizi pada anak 3. Meningkatkan SDM Perencana khususnya terkait penanganan masalah stunting dan gizi pada anak.	1. Peningkatan dan pengembangan kompetensi apartur perencana. 2. Meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang pentingnya asupan gizi 3. Tersedianya Informasi terkait pencegahan dan penanganan masalah stunting dan gizi pada anak.

M. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Tahun 2024	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Dinas Kelautan dan Perikanan mendengarkan keluhan para nelayan dan membantu mencari solusi, terutama bagi nelayan yang tidak tergabung dalam kelompok nelayan, agar tetap dapat menerima bantuan	Kegiatan dalam rangka pemberian bantuan kepada nelayan sudah dilaksanakan ditahun 2024 berupa bantuan alat tangkap (mesin dan jarring) dengn hanya menyerahkan copy kartu BPJS dan kartu KUSUKA sebagai syarat penerima bantuan.	Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pendapatan nelayan dan taraf hidup nelayan.
2	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pasar Seluma di Kabupaten Seluma menjadi fokus utama, dimana mendapat tambahan anggaran sebesar Rp7 miliar	Tahun 2024 kegiatan PPN sudah dilaksanakan di TW I s/d TW IV	Guna Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan sebagai tempat bongkar muat kapal perikanan

3	Segera melakukan pengawasan terhadap nelayan, untuk mencegah tindakan ilegal atau melawan hukum terkait budi daya benur atau bayi lobster	1. Yang dilakukan DKP Provinsi hanya sebatas pembinaan th 2024 2. Terkait budidaya benur di Bengkulu belum ada 3. Penetapan penangkapan benur oleh nelayan sesuai dengan kebutuhan kuota KKP yang ditetapkan	1. Memberikan rasa nyaman dan aman untuk para nelayan 2. Agar ekosistem alam tetap terjaga
4	Perlu dukungan untuk Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kabupaten Kaur yang akan berlokasi di Pasar Lama, Bintuhan	Sudah dianggarkan di dana alokasi khusus (DAK) Tahun 2025	Guna Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan sebagai tempat bongkar muat kapal perikanan.
5	DPRD mengapresiasi dibentuknya UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar dan laboratorium yang pada tahun 2024 akan mendapat dana alokasi khusus (DAK), serta perlu dana pendamping dari APBD Provinsi untuk menjadikan potensi lahan dan kolam yang luas sebagai sentra pembibitan ikan dan pusat latihan kemitraan pembudidayaan ikan dalam pengawasan produksi pakan.	Tahun 2024 adapun kegiatan yg bersumber dari dana DAK : 1. Rehab Kolam dengan pagu sebesar Rp. 843.253.295,25 di BBIS 2. Rehab Saluran dengan pagu Rp. 190.694.767,65 3. Pengadaan calon induk Nila berkualitas Rp. 90.000.000 4. Penyediaaan pakan calon induk dengan pagu setara Rp. 90.000.000	1. Kondidi kolam yang mengalami kebocoran pada saaat ini setelah dilakukan rehab dapat di fungsikan dengan baik 2. Penyediaan induk ikan nila berkualitas dapat mendukung produksi benih yang berkualitas dalam rangka pemenuhan benih ikan di perairan Bengkulu dan menambah PAD
6.	Perlu diajukan ke Menteri Keuangan Pusat untuk mendapatkan dana bagi hasil dari sektor perikanan dan kelautan dari ekspor komoditas perikanan dan kelautan.	Proses penjajakan agar Provinsi Bengkulu bias ekspor	Kordinasasi intent dengan dg eksportir

N. Dinas Peternakan Provinsi Bengkulu

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Tahun 2024	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Agar sapi-sapi yang diserahkan didata sebagai aset daerah. Data tersebut juga perlu ditindaklanjuti dengan kewajiban para penerima bantuan sapi untuk mengembalikan anak sapi sebagai bagian dari program bergulir yang akan diberikan kepada kelompok lain. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu lagi melakukan pengadaan sapi, tetapi harus terlebih dahulu menyelamatkan aset sapi yang masih berada di tangan masyarakat.	Sesuai dengan Pergub Nomor 40 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Program Penyebaran dan Pengembangan Ternak Sapi Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu, sesuai dengan pergub tersebut para penerima bantuan sapi wajib mengembalikan ternak sapi betina 1 (satu) ekor selama dalam kurun waktu 3 tahun dan 1 ekor untuk ternak Jantan selama kurun waktu lima tahun. Untuk penyebaran ternak sapi dari tahun 2010 sd 2024 sebanyak 6.590 ekor.	Perguliran ternak pada tahun 2024 dari target 110 ekor realisasi capaian sebanyak 135 ekor. Sapi sapi bantuan yang disebar ke peternak telah tercatat di aset lainnya
2	Untuk mengalokasikan anggaran dan mendukung pembiayaan UPTD guna menyukseskan swasembada bibit unggul, baik sapi, kambing, itik, ayam, dan lainnya, sehingga bibit varietas unggul dapat berkembang dan meningkatkan PAD	Penganggaran untuk mendukung UPTD Inseminasi Buatan tahun 2024 telah dialokasi kan sebanyak 470.000.000.- dan telah direalisasikan untuk perpanjangan LS Pro (Lembaga Sertifikasi Produk) dan pakan konsentrat ternak BULL sedangkan untuk UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak telah di alokasikan anggaran Rp. 478.000.000.- untuk kebutuhan pakan ternak itik dan ternak sapi.	Perpanjangan Lembaga sertifikasi produk LS Pro, penyediaan pakan ternak berkualitas, koordinasi ke Kementerian Pertanian RI dan Lembaga KAN.
3	Untuk memfokuskan perhatian pada masalah PMK dan penyakit hewan lainnya. Saat ini, pemberian vaksin rabies baru terealisasi 5%, baik untuk anjing maupun kucing, sedangkan idealnya satu daerah harus mencapai 70% vaksinasi dari populasi yang ada	Alokasi anggaran untuk vaksinasi PMK pada tahun 2022 sd 2024 difasilitasi dari anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, jumlah kasus PMK dari 11.490 kasus pada 03 Oktober 2022 menjadi o kasus pada Bulan Januari 2023. Untuk alokasi vaksin	Melakukan koordinasi ke Kementerian Pertanian terkait penambahan anggaran dan bantuan-bantuan vaksin serta menjalin kerjasama ke Perusahaan-

		rabies pada tahun 2024 sudah di akomodir sebanyak 10.000 dosis dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu. Data rabies pada tahun 2023 dari 2 kasus kematian turun menjadi 0 kasus pada tahun 2024.	perusahaan untuk mendapatkan bantuan obat dan vaksin secara gratis.

O. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Tahun 2024	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Penyelenggaraan pelatihan mengenai perizinan dan penanaman modal yang dilakukan secara offline untuk ditingkatkan.	Penyelenggaraan pelatihan mengenai perizinan dan penanaman modal yang dilakukan secara ofline telah dilaksanakan sebanyak 1 kali	Pelatihan pegawai mengenai perizinan telah dilakukan.
2	Perusahaan yang akan berinvestasi di Provinsi Bengkulu diharapkan melibatkan BUMD yang ada di Provinsi Bengkulu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu telah menyampaikan ke Perusahan yang akan berinvestasi di Provinsi Bengkulu untuk melibatkan BUMD yang ada di Provinsi Bengkulu	Setiap pertemuan dengan Perusahaan telah disampaikan untuk melibatkan BUMD yang ada
3.	Menyampaikan laporan data investasi yang ada di Provinsi Bengkulu, dan pastikan semua perizinan sesuai dengan Perda Pajak dan Retribusi Daerah serta perda-perda lain yang berkaitan dengan perizinan di Provinsi Bengkulu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu telah menyampaikan laporan data investasi ke Kementerian Dalam Negeri RI dan sesuai dengan peraturan yang ada.	Laporan data investasi telah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri RI

P. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Tahun 2024	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	DPRD Provinsi Bengkulu merekomendasikan Kepegawaian daerah perlu diperhatikan oleh Gubernur Bengkulu. Kebutuhan pegawai	a. BKD Provinsi Bengkulu telah membangun sistem informasi kepegawaian berupa Aplikasi LIKE BKD yang terintegrasi dengan	Data Kepegawaian dapat tersaji secara *realtime*, *up to date* dan

	harus ditata dan disesuaikan dengan perkembangan situasi, seperti adanya pensiun, meninggal, perpindahan antar-OPD, ataupun perpindahan dari kabupaten/kota. Hal ini agar dinas teknis terkait dapat menerapkan sistem kepegawaian yang lebih terstruktur dan transparan melalui sistem elektronik kepegawaian.	Web Service SIASN BKN. Pada tahun 2024 BKD berhasil melakukan integrasi *Web Service* SIASN dua arah (*full duplex*) melalui Aplikasi LIKE BKD. b. Target data riwayat yang telah diselesaikan oleh BKD Provinsi Bengkulu sampai dengan bulan desember 2024 yaitu riwayat data pribadi, riwayat data jabatan, riwayat penghargaan dan riwayat angka kredit hingga saat ini masih terus dilakukan pengembangan penyempurnaan sistem. c. Dengan integrasi *web service* ini seluruh data yang telah diolah oleh setiap bidang yang ada di BKD seperti data pegawai pensiun, meninggal, perpindahan antar-OPD, ataupun perpindahan dari Kabupaten/Kota telah tersaji pada data statistik Pemerintah Provinsi Bengkulu.	transparan dalam data statistik pegawai Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui link https://satudataasn.bengkuluprov.go.id
2	DPRD Provinsi Bengkulu merekomendasikan agar jangan sampai ASN menumpuk pada OPD tertentu saja, sehingga ada OPD yang kekurangan SDM, Gubernur perlu melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala untuk menilai kinerja pejabat. Evaluasi ini harus dijadikan salah satu indikator dalam pengisian suatu jabatan.	Terkait Mutasi/ Penempatan ASN pada OPD dilakukan berdasarkan Kebutuhan dan Ketersediannya Anjab dan ABK pada suatu OPD tertentu dan proses ini juga berdasarkan usulan OPD yang membutuhkan, pada saat ini Proses mutasi disarankan dilaksanakan Per Periode / Per TW untuk melakukan Evaluasi terkait dengan kinerja dan mengedepankan peran Tim Penilai Kinerja Untuk merekomendasikan ASN bisa Melakukan Mutasi Atau Tidak. Merujuk kepada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata	Pengisian/ Pemerataan Jabatan Fungsional dan Pelaksana

		Cara Pelaksanaan Mutasi pasal 5 poin a menyebutkan bahwa “Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS, maka berdasarkan aturan tersebut setiap ada proses mutasi harus mendapatkan persetujuan Tim Penilai Kinerja terlebih dahulu sehingga akan lebih efektif bila proses mutasi ini dilakukan secara periodik dimana setiap periodiknya nanti dibahas dan diputuskan terlebih dahulu oleh TPK (Tim Penilai Kinerja), Bahwa hal ini juga sejalan dengan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Pemanfaatan Aplikasi Integrated Mutasi (I-Mut) dalam rangka Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara yang harus digunakan untuk mendapatkan persetujuan Teknis Oleh BKN yang salah satunya melampirkan persetujuan Tim Penilai Kinerja PNS.	

Q. Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Tahun 2024	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Agar pada saat pembangunan stadion mini, perhatian khusus diberikan pada kekuatan struktur bangunan. Hal ini penting mengingat beberapa waktu lalu terjadi robohnya pagar stadion mini yang berada di Kabupaten Kepahiang	Pada saat survei lokasi pembangunan stadion mini sudah di cek lokasinya yang layak untuk dilaksanakan pembangunan steruktur yang kuat untuk pagar stadion yang roboh sudah dilakukan perbaikan terhadap pagar yang roboh tersebut akibat digunakan sebagai landasan parkir helikopter dalam kegiatan kunjungan presiden jokowi. Kekuatan struktur	1.Agar pembangunan stadion mini tersebut dapat dilakukan secara maksimal dengan anggaran yang tersedia sehingga tidak akan menimbulkan masalah dimasa mendatang.

		pagar tersebut tidak bisa menahan kekuatan angin helicopter puma.	2.Dengan diperbaikinya pagar yang roboh tersebut maka stadion mini dapat digunakan kembali untuk kegiatan pembinaan olahraga bola voli dikabupaen kepahiang .
2	Menyediakan program pembinaan serta pengawasan terhadap organisasi kepemudaan yang menjadi kewenangan provinsi di wilayah Provinsi Bengkulu	Program pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kepemudaan yang menjadi kewenangan provinsi meliputi: # **Pembinaan** 1. Pembinaan Organisasi: Pembentukan, pengembangan, dan pembinaan organisasi kepemudaan di tingkat provinsi. 2. Pengembangan Kepemimpinan: Pelatihan dan pengembangan kepemimpinan bagi pengurus organisasi kepemudaan. 3. Pengembangan Program: Pembinaan dan pengembangan program-program kepemudaan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. 4. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Pelatihan dan pengembangan kemampuan bagi anggota organisasi kepemudaan. # **Pengawasan** 1. Pengawasan Keuangan: Pengawasan penggunaan dana dan keuangan organisasi kepemudaan. 2. Pengawasan Program: Pengawasan pelaksanaan program-program kepemudaan yang dilaksanakan oleh organisasi kepemudaan. 3. Pengawasan Kegiatan: Pengawasan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan	Berikut adalah tujuan dan masalah yang diselesaikan melalui Program Pembinaan serta Pengawasan terhadap Organisasi Kepemudaan yang menjadi kewenangan provinsi: # **Tujuan** 1. Meningkatkan kualitas dan kemampuan organisasi kepemudaan di tingkat provinsi. 2. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan daerah. 3. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pemuda terhadap masalah sosial dan lingkungan. 4. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen organisasi kepemudaan. 5. Meningkatkan kerjasama antara organisasi kepemudaan

		oleh organisasi kepemudaan. 4. Pengawasan Pelaporan: Pengawasan pelaporan kegiatan dan program-program kepemudaan yang dilaksanakan oleh organisasi kepemudaan. # **Kewenangan Provinsi** 1. Pemberian Izin: Pemberian izin kepada organisasi kepemudaan untuk melaksanakan kegiatan di tingkat provinsi. 2. Pemberian Bantuan: Pemberian bantuan kepada organisasi kepemudaan dalam bentuk dana, fasilitas, dan sumber daya lainnya. 3. Pengawasan dan Pembinaan: Pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan di tingkat provinsi. 4. Pengembangan Kebijakan: Pengembangan kebijakan dan program-program kepemudaan di tingkat provinsi.	dan pemerintah daerah. # **Masalah yang Diselesaikan** 1. Kurangnya kemampuan dan kualitas organisasi kepemudaan di tingkat provinsi. 2. Kurangnya partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan daerah. 3. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab pemuda terhadap masalah sosial dan lingkungan. 4. Kurangnya kemampuan kepemimpinan dan manajemen organisasi kepemudaan. 5. Kurangnya kerjasama antara organisasi kepemudaan dan pemerintah daerah. 6. Kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan di tingkat provinsi. 7. Kurangnya sumber daya dan fasilitas untuk mendukung kegiatan organisasi kepemudaan.

3	Untuk menyediakan program pembinaan olahraga khusus disabilitas (PARAGAMES) di Provinsi Bengkulu	sudah dialokasikan anggaran untuk pembinaan disabilitas tetapi dari kepengurusan disabilitas Bengkulu tidak mengirimkan atlet karena kepengurusan disabilitas Bengkulu sedang dibekukan oleh pengurus disabilitas pusat. Untuk itu dari pengurus disabilitas Bengkulu sudah mengurus struktur kepengurusan yang baru agar pembinaan disabilitas Bengkulu dapat dilaksanakan	Dengan sudah terbentuknya kepengurusan NPC Provinsi Bengkulu maka kegiatan pembinaan olahraga disabilitas dapat dilakukan dengan baik dan maksimal.
4	Agar dapat menghormati dan menghadiri Rapat Pembahasan LKPJ	penjabat yang ditunjuk untuk menghadiri rapat tiba-tiba mendadak sakit, dan tidak ada konfirmasi dari yang bersangkutan	Pada tahun berikutnya pada saat hari pelaksanaan rapat kepala dinas akan melakukan konfirmasi langsung dengan penjabat yang ditunjuk dan memastikan kehadirannya pada saat rapat.

R. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Tahun 2024	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Gubernur Bengkulu untuk menyediakan anggaran yang lebih memadai pada Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran yang cukup, diharapkan dapat meningkatkan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Antisipasi dini serta melakukan mitigasi dan efektifitas evakuasi Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang semula ditargetkan 500 orang menjadi 1.000 orang	1. Untuk membantu Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana di Provinsi Bengkulu 2. Untuk Bufferstock Ketersediaan Bahan Logistik Apabila Terjadi Bencana

S. Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Tahun 2024	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	DPRD Provinsi Bengkulu ingin mendapat penjelasan soal kegiatan fasilitas pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak pada Dinas Sosial yang anggarannya terserap 100%. Bukankah ini kewenangan Dukcapil kabupaten/kota? Dan pengeluaran biaya diperuntukkan untuk apa? Bukankah pengurusan administrasi kependudukan digratiskan? Mohon Pemerintah Provinsi memberi jawaban, dikarenakan Dinas Sosial Provinsi tidak menghadiri undangan rapat.	Menanggapi rekomenasi DPRD tersebut bahwa pada sub kegiatan Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak. Adapun anggaran yang tersedia adalah untuk operasional petugas (transportasi, foto copy) dalam mengurus dokumentasi calon anak asuh seperti penelusuran keluarga, pemindahan status anak asuh dari tempat asalnya ke panti PSBR di Kota Bengkulu.	Anak asuh mendapatkan layanan pendidikan (sekolah) melalui jalur zonasi.
2	Agar dapat menghormati dan menghadiri rapat pembahasan LKPJ	Pada dasarnya Dinas Sosial Provinsi Bengkulu mengikuti/menghadiri undangan dimaksud, untuk selanjutnya kami Dinas Sosial Provinsi Bengkulu akan hadir beserta seluruh esselon III selaku pemegang kegiatan.	Menghormati dan menghadiri rapat pembahasan LKPJ

T. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Tahun 2024	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Untuk memperhatikan tenaga kerja lokal dengan cara mengadakan kegiatan job fair atau bursa kerja secara rutin	Melaksanakan Job Fair atau Bursa Kerja	Tujuan: Memfasilitasi 100 Orang Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja Masalah yang diselesaikan :

			Jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 175 Orang melalui pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara

U. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Bengkulu

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Tahun 2024	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Pengelolaan arsip daerah dilakukan oleh tenaga yang berkualitas dan profesional, serta didukung dengan sistem teknologi yang baik untuk memastikan keamanan arsip daerah.	Telah dilaksanakan pendampingan, pembinaan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis	Tertatanya/tertibnya arsip dinamis dan arsip statis

V. UPTD Khusus RSUD DR. M. YUNUS BENGKULU

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Tahun 2024	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Pembangunan kapasitas layanan kesehatan harus diimbangi dengan penyediaan sumber daya manusia (SDM) medis yang berkualifikasi tinggi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat Bengkulu yang sehat dan memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.	• **Peningkatan Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan:** Mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis, baik yang sudah ada maupun yang baru direkrut. • **Kerjasama dengan Perguruan Tinggi:** Menjalin kerjasama dengan fakultas kedokteran untuk mengadakan program residensi atau fellowship, serta penelitian bersama. • **Rekrutmen Tenaga Medis Baru:** Melakukan rekrutmen tenaga medis baru untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis, terutama di bidang-bidang yang masih kekurangan. • **Peningkatan Anggaran:** Mengusulkan tambahan anggaran kepada	Tujuan umumnya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat Bengkulu mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Dengan memiliki SDM medis yang kompeten, RSUD dr. M. Yunus dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, mulai dari diagnosis penyakit hingga

		pemerintah daerah untuk mendukung program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.	penanganan pasien.

W. Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Soeprapto Bengkulu

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023	Tindak Lanjut pada Tahun 2024	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Pemerintah Daerah segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi dokter atau IDI terkait permasalahan keterbatasan tenaga dokter spesialis di RSKJ Suprapto Bengkulu. Saat ini, rumah sakit tersebut belum memiliki tenaga dokter spesialis di bidang anestesi dan rehab medik.	RSKJ Soeprapto sudah berkoorrdinasi dengan IDI terkait kebutuhan dokter spesalis rehabilitasi medik dan dokter spesialis anastesi	1. Sudah dilakukan MoU dengan 1 orang dokter spesialis rehabiltasi medik per bulan agustus 2024 2. Untuk dokter anastesi sedang dalam proses pindah tugas dari kabupaten seluma

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794). **Perangkat Daerah yang mendapatkan Tugas Pembantuan Pada Tahun Anggaran 2024 :** Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

4.1.1. Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Pusat

A. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu memiliki Tugas Pembantuan (TP) yaitu dana dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dana TP ini dipergunakan di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi melalui Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi. Dan dana dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, dana TP ini dipergunakan di Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Program Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

1. Program Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Pemagangan Dalam Negeri).

   Pada Tahun 2024 Jumlah calon peserta seleksi yang **mendaftar sebanyak 132 peserta**. Saat pelaksanaan pembukaan yang hadir sebanyak **114 peserta** dan yang mengikuti serangkaian tes, yang lulus sampai ketahap wawancara sebanyak **33 Orang peserta**. Dibandingkan tahun sebelumnya Tahu 2023 Jumlah calon peserta seleksi yang **mendaftar sebanyak 104 orang peserta,** total terdapat

74 orang calon peserta yang hadir untuk mengikuti serangkaian kegiatan seleksi, yang lulus sebanyak **16 Orang peserta.** Peserta pemagangan di Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak **17 Orang** hal ini disebabkan jumlah angkatan kerja yang tinggi dan serapan tenaga kerja yang menurun mengakibatkan persaingan yang sangat kompetitif, calon tenaga kerja perlu mempersiapkan kompetensi, kecakapan dan kesiapan kerja yang memadai guna memasuki pasar tenaga kerja.

Untuk persiapan sebelum masuk ke dunia kerja, para mahasiswa atau lulusan baru dapat mengikuti program magang yang diadakan oleh perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri. Program magang bertujuan untuk mempersiapkan para lulusan yang siap kerja, yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga dilengkapi dengan keahlian-keahlian yang diperlukan di dunia kerja yang sesungguhnya. Dengan mengikuti program magang, dapat memberikan banyak manfaat bagi para mahasiswa yang masih kuliah atau yang sudah lulus, sehingga dalam mengikuti program magang, peserta dapat belajar sambil bekerja secara nyata di lingkup profesional yang dapat dilakukan di perusahaan dalam dan luar negeri.

Gambar : 4.1

Program Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

(Pemagangan Dalam Negeri)

2. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi. (Disnakertrans Provinsi Bengkulu).

   Provinsi Bengkulu memiliki 5 kawasan yaitu :

   - Kawasan Kawasan Enggano (Bengkulu Utara)
   - Kawasan Lagita (Bengkulu Utara)
   - Kawasan Kedurang (UPT Batu Ampar, Bengkulu Selatan)
   - Kawasan Muara Sahung (Kabupaten Kaur)
   - Kawasan Padang Ulak Tanding (Kabupaten Rejang Lebong)

   Pada Tahun2024 kawasan transmigrasi yang dikembangkan ditargetkan sebanyak 5 kawasan. Diantara 5 kawasan tersebut 4 kawasan Provinsi Bengkulu dan 1 kawasan lainnya merupakan Kawasan Prioritas Nasional yaitu **Kawasan Lagita terletak di Bengkulu Utara**. Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebesar 64,35 persen. Dibandingkan dengan tahun 2023 meningkat sebesar 7,21 persen dimana capaian kinerja pada Tahun 2023 sebesar 57,14 persen. Hal ini dikarenakan terlaksananya pengembangan transmigrasi di Kawasan Padang Ulak Tanding (Kabupaten Rejang Lebong) seperti adanya pembangunan jalan poros dan jembatan sehingga dapat memberikan akses jalan bagi masyarakat transmigrasi dan memudahkan masyarakat beraktifitas dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dapat meningkatkan tarap hidup yang lebih baik.

Gambar : 4.2

Bangunan Jalan Poros dan Jembatan Kawasan Transmigrasi PUT

3. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi. (Disnakertrans Kabupaten Bengkulu Utara).

   Fasilitas Umum yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2024 adalah Sarana Ibadah yang ada di Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Lagita Desa Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Fasilitas Umum tersebut adalah Masjid Islamic Center yang pembangunannya dilaksanakan bertahap sejak tahun 2018, 2019, 2021, 2023 dan 2024. Target yang ingin dicapai pada Tahun 2024 adalah Bangunan Masjid Islamic Center sudah dapat digunakan untuk sarana ibadah di Kawasan KPB Lagita Ketahun dan sekitarnya.

   Gambar : 4.3

   Masjid Islamic Center KPB Lagita Desa Urai Ketahun

4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (SATPEL PK Bengkulu)

   Jumlah peserta pelatihan Tahun 2024 sebanyak 496 Orang dengan jumlah pendaftar sebanyak 577 orang sehingga capaian peserta yang mendaptkan pelatihan sebesar 85,96 persen. Pelaksanaan pelatihan terdiri dari lima tahap, tahap pertama terdiri dari 9 paket, tahap kedua 6 paket, tahap ketiga 7, tahap keempat 6 paket, tahap kelima 3 paket. Jumlah peserta pelatihan untuk setiap paket pelatihan berjumlah 16 Orang, sedangkan minat masyarakat semakin

tinggi sehingga jumlah pendaftar semakin meningkat setiap tahunnya, selain itu Peserta yang mendaftar masih banyak yang belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dari pusat Kementerian Ketenagakerjaaan RI, diantaranya masih banyak pendaftar yang berstatus mahasiswa, dan bekerja tidak tetap, sedangkan peserta harus mengikuti pelatihan dengan efektif, efisien dan akuntabel, pelatihan dilaksanakan setiap hari sehingga tidak dapat menganggu perkerjaan yang lain. 5 (lima) poin manfaat mengikuti pelatihan di BLK tersebut bisa menjadi bekal masuk ke pasar kerja, wirausaha, serta meningkatkan produktivitas. Sebelum memasuki dunia kerja, dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah untuk mengasah soft skill maupun hard skill.

Gambar : 4.4

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (SATPEL PK Bengkulu)

5. Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi (PBK) , UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Bengkulu Selatan

   Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 dengan target peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 208 Orang dengan jumlah paket keseluruhan sebanyak 13 paket pelatihan. Capaian Kinerja dapat terealisasi sebesar 100 persen, dengan 208 Orang Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi. Dalam pelaksanaan kegiatan ini mengalami hambatan yaitu Masih

terbatasnya dana Pelatihan sumber dana APBN tahun 2024 yang hanya mendapat 13 paket jurusan, Sedangkan peminat yang mendaftar lebih banyak dari paket pelatihan yang ada Untuk itu diharapkan ke depannya dana Pelatihan Berbasis Kompetensi dapat ditingkatkan menjadi 18 paket (sebanyak 288 orang).

Gambar : 4.5

Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi (PBK) , UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Bengkulu Selatan

6. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Kabupaten Kepahiang.
   Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dengan kegiatan Pelatihan ditujukan untuk masyarakat/kelompok masyarakat pencari kerja di Desa, wilayah Transmigrasi, anak putus sekolah yang membutuhkan peningkatan keterampilan dan kelompok masyarakat yang membutuhkan di Wilayah Kerja UPTD Pelatihan Kerja Kepahiang, dengan output Melaksanakan pelatihan keterampilan bagi masyarakat pencari kerja dengan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, bagi masyarakat yang membutuhkan, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama dengan pemerintah desa di tiga wilayah kabupaten kepahiang, rejang lebong dan lebong, dengan output Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi masyarakat pencari kerja dengan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja bagi masyarakat yang membutuhkan.

Gambar : 4.6

Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi (PBK) , UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Bengkulu Selatan

7. Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Program Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

   Pembinaan Ketenagakerjaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja dengan terlaksananya pembinaan sosialisasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan Forum Komunikasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Provinsi Bengkulu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Bidang Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, kegiatan ini dilaksanakan dengan cara tatap muka, dihadiri oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan, Perusahaan, instansi yang terkait, perhimpunan disabilitas, para penyandang disabilitas, dan pemangku kepentingan yang ikut berperan dalam penempatan tenaga kerja dalam negeri dengan jumlah peserta sebanyak 75 Orang.

   Dalam melakukan monitoring pelaksanaan penempatan tenaga kerja termasuk penyandang disabilitas sekaligus mengenalkan kegiatan forum komunikasi penempatan tenaga kerja dalam negeri, pejabat fungsional pengantar kerja di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu. Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah terlaksananya forum kemunikasi anatara

pemerintah, dunia usaha, Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri khususnya BKK (Bursa Kerja Khusus), dan Penyandang Disabilitas guna menciptakan wadah konsultasi, informasi, dan edukasi yang mampu mengatasi permasalahan penempatan tenaga kerja, dan menyamakan persepsi serta pola tindak yang sama untuk melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja sebagai upaya menanggulangi pengangguran. Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja, Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 disebutkan bahwa Petugas Antar Kerja adalah dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan Antar Kerja yaitu Petugas yang memilik kompetensi melakukan kegiatan Antar Kerja. Bimbingan teknis dilakukan dengan melibatkan akademisi/praktisi yang berhubungan dengan Penempatan Tenaga Kerja sebagai narasumber, dalam memberikan materi kepada petugas yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia khususnya petugas antar kerja. Dengan petugas antar kerja yang terlatih diharapkan mampu menjembatani fenomena tersebut dalam hal bimbingan karir, informasi lowongan pekerjaan dan program pelatihan bagi peserta JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan). Selain itu, peningkatan SDM dari petugas antar kerja diharapkan dapat mengedukasi, mendesiminasi, dan mendampingi calon pekerja atau Angkatan kerja untuk menyiapkan diri, menyiapkan soft skill dan hard skill sehingga bisa mengakses dan mengisi peluang kerja yang tersedia. Berdasarkan kondisi di atas, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Direktorat Bina Pengantar Kerja secara berkesinambungan berusaha untuk senantiasa meningkatkan kompetensi, keterampilan dan wawasan Petugas Antar Kerja melalui pelatihan maupun bimbingan teknis.

Evalausi Bimtek Petugas Antar Kerja dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja petugas Antar Kerja di instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi/kabuapten/Kota, Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dan BKK (Bursa Kerja khusus) terkait pelayanan antar kerja serta dengan dilaksanakan kegiatan ini dimaksudkan untuk dapat mengukur kinerja petugas antar kerja dalam melaksanakan pelayanan antar kerja, mengetahui kekurangan dan kelebihan kemampuan yang dimiliki dalam melaksanakan pelayanan antar kerja, meningkatkat kinerja petugas antar kerja dalam rangka pelayanan yang lebih baik.

Gambar : 4.7

Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Petugas Antar Kerja

8. Bidang HI dan Pengawasan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Biang HI dan Pengawasan didukung oleh program Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Program Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu sebagai wadah untuk menyelesaikan perselisihan diantara perusahaan dengan pegawai pada perusahaan tersebut. Pada Tahun 2024 jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial **sebanyak 30 kasus**, yang dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama sebanyak 18 kasus, masih dalam proses 11 kasus dan 1 kasus yang ditutup. Pada Tahun 2024 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial **ditargetkan 10 kasus**, dan dapat diselesaikan sebanyak 18 kasus, sehingga **capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 180**

persen. Pada Tahun 2023 capaian kinerja sebesar 100 persen, dimana jumlah kasus yang dihadapi sebanyak **29 kasus** dan dapat terselesaikan sebanyak **14 kasus.**

Meningkatnya capaian kinerja ini **disebabkan karena** semakin bertambahnya kasus perselisihan pada perusahaan yang dapat diselesaikan, dan pekerja mulai memahami tentang berbagai peraturan perundang-undangan khususnya di bidang ketenagakerjaan dan prosedur tata cara penyelesaian masalah hubungan industrial serta berbagai masalah ekonomi perusahaan. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu pada Tahun 2024 dengan permasalahan perselisihan berupa PHK ada 12 (dua belas) kasus, masalah perselisihan hak sebanyak 7 (tujuh) kasus dan masalah perselisihan kepentingan sebanyak 1 (satu) kasus, diantaranya dapat diselesaikan dengan perjanjian Bersama, penyelesaian dalam proses, Ditutup karena pekerja mencabut surat pengaduan. Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu Tahun 2025 Sebesar **Rp. 2.670.039,-** (Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah). Dibandingkan pada tahun sebelumnya Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu **meningkat sebesar Rp. 251.759,-** (Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), dimana Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu Tahun 2024 **sebesar Rp. 2.418.280,-** (Dua Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah). Dengan diteteapkannya Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.632.DKKTRANS.Tahun 2024 tentang Upan Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2025, maka untuk perusahaan yang memberikan upah lebih rendah dari ketentuan Upan Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu, harus menyesuaikan dengan Keputusan Gubernur. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu sebagai Instansi Teknis akan melakukan sosialisasi terhadap Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu Tahun 2025. Jika upah minimum meningkat maka diharapkan produktivitas

tenaga kerja juga akan meningkat. Selain menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), Pemerintah Provinsi Bengkulu juga menetapkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) untuk seluruh kabupaten dan kota. Di antara sejumlah kabupaten dan kota yang terdapat di provinsi tersebut, Kabupaten Mukomuko menjadi wilayah dengan UMK terbesar di tahun 2023 ini, yakni sebesar **Rp 3.052.118,-** (Tiga Juta Lima Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah)**,** UMK ini lebih besar dari UMP Provinsi Bengkulu itu sendiri yang jumlahnya **Rp. 2.670.039,-** (Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

Selain Kabupaten Mukomuko yang mengalami kenaikan UMK, Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara juga dapat meningkatkan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) untuk Tahun 2024. Hal ini tentu dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal, termasuk kondisi perekonomian dan hal lainnya yang berkaitan dengan itu.

Gambar : 4.8

Pelaksanaan Pengawasan ke Perusahaan oleh Tenaga Kerja Pengawas dan Pembahasan UMP dan UMK 2025

B. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU

Pada Tahun 2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu memperoleh Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Tugas Pembantuan ini bertujuan untuk mendukung target kinerja prioritas nasional pada sub-sektor peternakan yaitu :

1. Jumlah Produksi Peternakan (Daging sapi, kerbau, kambing, domba, itik ayam, babi, susu dan telur);
2. Persentase Wilayah Yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis

Adapun rincian dari Program/Kegiatan dan Realisasi Tugas Pembantuan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pembantuan Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan

a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 435.000.000,- sebagai berikut ini :

Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak

Pagu Anggaran : Rp. 235.000.000,-

Pagu Blokir : Rp. 94.215.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 138.684.707,- (59,01%)

Realisasi Fisik : 100%

dengan Rincian Ouput Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor (1 Lembaga), yang terdiri dari :

- Pelayanan Informasi Harga Komoditas Peternakan Rp. 25.000.000,-, realisasi anggaran Rp. 24.997.806,-
- Pengembangan Kawasan Korporasi Peternakan Rp. 80.000.000,-, realisasi anggaran Rp. 55.273.000,-

- Pembinaan/Pendampingan Sistem Organik Peternakan Rp. 60.000.000,-, realisasi anggaran Rp. 58.431.901,-

b. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut ini :

1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan

   Adapun Klasifikasi Rincian Output Pelayan Publik lainnya dengan Rincian Output Pelayanan Kesehatan Hewan dengan pagu anggaran Rp. 750.000.000 berupa operasional vaksinasi penyakit mulut dan kuku untuk petugas di lapangan dengan realisasi keuangan sebesar RP. 749.925.000

   Pagu Anggaran : Rp. 750.000.000,-
   Realisasi Keuangan : Rp. 749.925.000,- (99,99%)
   Realisasi Fisik : 99,99 %

   Dengan Rincian Output Pelayanan Kesehatan Hewan (30.000 layanan),

2. Penyediaan Benih dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Produksi Ternak

   Pagu Anggaran : Rp. 206.480.000,-
   Realisasi Keuangan : Rp. 204.578.000,- (99,08%)
   Realisasi Fisik : 100%

   Dengan Rincian Output :

   a. Ternak yang Didata dan Ditandai (2.899 unit), yang terdiri dari :

      Operasional Pendataan dan Penandaan Rp. 57.980.000,-,
      Realisasi anggaran Rp. 57.860.000,-

   b. Optimalisasi Reproduksi (3.800 ekor), yang terdiri dari :

      Pengadaan N2 Cair Rp. 148.500.000,-,
      Realisasi anggaran Rp. 146.716.000,-

c. Program Dukungan Manajemen Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan.

   Pagu Anggaran : Rp. 266.267.000,-
   Realisasi Keuangan : Rp. 85.130.952,- (31,3%)
   Blokir Anggaran : Rp. 178.499.000
   Realisasi Fisik : 100%

   Dengan Rincian Output :

   - Layanan BMN (1 layanan), yang terdiri dari :
     Pengelolaan Barang Milik Negara Rp. 18.617.000,-,
     Realisasi anggaran Rp. 0,-
   - Layanan Data dan Informasi (1 layanan), yang terdiri dari :
     Layanan Data dan Informasi Rp. 42.100.000,-,
     Realisasi anggaran Rp. 13.330.000,-
   - Layanan Perencanaan dan Penganggaran (1 dokumen), yang terdiri dari :
     Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Provinsi Rp. 75.000.000,-,
     Realisasi anggaran Rp. 18.630.000,-
   - Layanan Pemantauan dan Evaluasi (1 dokumen), yang terdiri dari :
     Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Provinsi Rp. 15.500.000,-,
     Realisasi anggaran Rp. 0,-
   - Layanan Manajemen Keuangan (2 dokumen), yang terdiri dari :
     - Akuntansi, Verifikasi & Tindaklanjut Hasil Pengawasan Propinsi Rp. 21.000.000,-,
       Realisasi anggaran Rp. 16.570.000,-
     - Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Propinsi Rp. 94.410.000,-,
     - Realisasi anggaran Rp. 36.600.000,-

Tabel 4.1

Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

No	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Target	Realisasi	Pelaksana
1	**018.06 .EC**	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**			
	5891	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak			
	QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	Bidang Pengembangan Usaha Peternakan
	RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 Unit	0 Unit	Bidang Pengembangan Usaha Peternakan
	RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 Unit	0 Unit	Bidang Pengembangan Usaha Peternakan
2	**018.06 .HA**	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**			
	1784	*Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan*			
	QAH	Pelayanan Publik Lainnya	30.000 Layanan	29.997 Layanan	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	1785	*Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak*			
	QAH	Pelayanan Publik Lainnya	3.800 Layanan	3.800 Layanan	Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak
	CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.899 Unit	2.899 Unit	Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak
3	**018.06 .WA**	**Program Dukungan Manajemen**			
	1787	*Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan*			
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	2 Layanan	Bidang Sarana dan Prasarana, Tim Satuan Kerja
	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	11 Dokumen	11 Dokumen	Sekretariat, Tim Satuan Kerja

2. Tugas Pembantuan Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian

- Program Dukungan Manajemen

  Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

  Pagu Anggaran : Rp. 150.000.000,-

  Realisasi Keuangan : Rp. 49.846.000,- (33,23%)

  Blokir Anggaran : Rp. 100.000.000,-

  Realisasi Fisik : 100%

  Dengan rincian output :

  - Layanan Dukungan Manajemen Internal 1 layanan

Tabel 4.2
Prasarana dan Sarana Pertanian

No	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan[		Target	Realisasi	Pelaksana
1	**018.08.WA**	**Program Dukungan Manajemen**			
	1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian			
	EBD	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan	1 Layanan	Tim Satuan Kerja

Gambar 4.9

Kegiatan Penandaan, Pendataan Ternak dan Distribusi N2 Cair Tahun 2024

C. DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERTANAIAN PROVINSI BENGKULU

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Tahun 2024 melaksanakan program/kegiatan dana Tugas Pembantuan (TP) dari Kementerian Pertanian, yang bersumber dari 3 (tiga) Direktorat Jenderal, dengan 3 (tiga) program yang total anggarannya sebesar *Rp. 12.482.616.000,- (Dua belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam belas ribu Rupiah)*. Masing-masing sumber anggaran TP dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen serta Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen.

Adapun Porgram dan Kegiatan tersebut dapat di sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3

Sumber, Pagu dan Realisasi Anggaran Dana Tugas Pembantuan

Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Tahun 2024

No	Direktorat Jenderal/Prorgam	Pagu Anggaran Akhir (Rp.)	Bobot	Realisasi Keuangan (Rp.)	% Realisasi
1	Dirjen Tanaman Pangan	3.187.412.000	25,54	3.177.102.000	99,68
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	40.000.000	0,32	40.000.000	100
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.870.000.000	23	2.859.690.000	99,64
	Program Dukungan Manajemen	277.412.000	2,22	277.412.000	100
2	Dirjen Perkebunan	2.946.817.000	23,61	2.902.235.820	98,49
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2.833.897.000	22,70	2.789.315.820	98,43
	Program Dukungan Manajemen	112.920.000	0,91	112.920.000	100
3	Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)	6.348.387.000	50,86	6.346.568.751	99,97
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	6.162.567.000	49,37	6.160.748.751	99,97
	Program Dukungan Manajemen	185.820.000	1,49	185.820.000	100
	Grand Total	12.482.616.000	100,00	12.425.906.571	99,55

Adapun rincian dari Program/Kegiatan dan Realisasi Tugas Pembantuan di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4

Rincian Program/Kegiatan dan Realisasi Tugas Pembantuan di Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Tahun 2024

No	Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
A	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**			
1	Bantuan Budidaya Padi Kaya gizi (Biofortifikasi)	1.000 Ha	1.000 Ha	100%
	Area Penyaluran Benih Padi	1.000 Ha	1.000 Ha	100%
	Area Penyaluran Benih Jagung	1.000 Ha	1.000 Ha	100%
B	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**			
1	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	1 Unit	1 Unit	100%
C	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**			
1	Irigasi Perpipaan	18 Unit	18 Unit	100%
	Irigasi Perpompaan Wilayah Barat	34 Unit	34 Unit	100%

A. Satuan Kerja Tanaman Pangan

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

   Pagu Anggaran : Rp. 40.000.000,-

   Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

   Pagu Anggaran : Rp. 40.000.000,-

   Realisasi Keuangan : Rp. 40.000.000,- (100%)

   Realisasi Fisik : 100 %

2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

   Pagu Anggaran : Rp. 2.870.000.000,-

   a. Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan

      Pagu Anggaran : Rp. 1.610.000.000,-

      Realisasi Keuangan : Rp. 1.559.220.000,- (99,50%)

      Realisasi Fisik : 100 %

b. Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan

Pagu Anggaran : Rp. 1.260.000.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 1.257.750.000 (99,82%)

Realisasi Fisik : 100 %

Gambar 4.10

Penyaluran Sarana Produksi Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) berupa Benih Padi dan Pupuk NPK di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan salah satu hasil pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan

3. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan Dukungan Manajemen & Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan

Pagu Anggaran : Rp. 277.412.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 277.412.000,- (100%)

Realisasi Fisik : 100 %

B. Satuan Kerja Perkebunan

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

   Pagu Anggaran : Rp. 2.833.897.000,-

   a. Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan

      Pagu Anggaran : Rp. 312.900.000,-

      Realisasi Keuangan : Rp. 312.037.020 (99,72%)

      Realisasi Fisik : 100 %

   b. Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan

      Pagu Anggaran : Rp. 1.903.042.000,-

      Realisasi Keuangan : Rp. 1.898.695.000,- (99,77%)

      Realisasi Fisik : 100 %

   c. Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan

      Pagu Anggaran : Rp. 617.955.000,-

      Realisasi Keuangan : Rp. 578.583.800,- (93,63%)

      Realisasi Fisik : 100 %

2. Program Dukungan Manajemen

   Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

   Pagu Anggaran : Rp. 112.920.000,-

   Realisasi Keuangan : Rp. 112.920.000,- (100%)

   Realisasi Fisik : 100 %

Gambar 4.11

Penyaluran Sarana Fasilitasi Pengolahan Kopi di Kabupaten Kepahiang berupa Mesin Sangrai, Mesin Pengemas dan Mesin Pembubuk Kopi di Kabupaten Kepahiang yang merupakan salah satu hasil pelaksanaan Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan

C. Satuan Kerja Prasarana dan Sarana Pertanian

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan BerkualitasPagu Anggaran : Rp. 6.348.387.000,-

   a. Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian

      Pagu Anggaran : Rp. 5.887.567.000,-

      Realisasi Keuangan : Rp. 5.886.724.000,- (99,99%)

      Realisasi Fisik : 100 %

   b. Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

      Pagu Anggaran : Rp. 275.000.000,-

      Realisasi Keuangan : Rp. 274.024.751,- (99,65%)

      Realisasi Fisik : 100 %

Gambar 4.12

Penyaluran Prasarana Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat di Kecamaan Sukaraja Kabupaten Seluma merupakan salah satu hasil pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian

2. Program Dukungan Manajemen

   Pagu Anggaran : Rp. 185.820.000,-

   Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

   Pagu Anggaran : Rp. 185.820.000,-

   Realisasi Keuangan : Rp. 185.820.000,- (100%)

   Realisasi Fisik : 100 %

D. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu memiliki dana Tugas Pembantuan (TP) dari Kementerian Pekerjaan Umum. Dana TP ini dipergunakan di Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Bina Marga melalui Program Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Program Pelaksanaan Preservasi dan Peningkataan Kapasitas.

Gambar 4.13

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air

Gambar 4.14
Pemeliharaan Rutin Kondisi
Preservasi Jalan Kerkap – Sp. Nakau (E_Katalog)

Gambar 4.15

Rekonstruksi Jalan

Preservasi Jalan Kerkap – Sp. Nakau (E_Katalog)

Gambar 4.16

Penanganan Longsoran Kerkap – Sp. Nakau (E_Katalog)

Gambar 4.17

Penanganan Drainase

Gambar 4.18

Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan

Preservasi Jalan Kerkap – Sp. Nakau (SWAKLOLA)

Gambar 4.19

Preservasi Jembatan

Preservasi Jembatan Kerkap – Sp. Nakau

Gambar 4.20

Pemeliharaan Rutin Jembatan

Preservasi Jalan Kerkap – Sp. Nakau (SWAKLOLA)

Adapun rincian dari Program/Kegiatan dan Realisasi Tugas Pembantuan di Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Ketahanan Sumber Daya Air'

   Pagu Anggaran : Rp. 22.789.110.000,-

   Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

   Pagu Anggaran : Rp. 21.935.932.000,-

   Realisasi Keuangan : Rp. 21.935.932.000,- (100%)

   Realisasi Fisik : 100%

2. Program Infrastruktur Konektivitas

   Pagu Anggaran : Rp 46.406.085.000,-

   Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Pagu Anggaran : Rp. 46.090.594.000,-

   Realisasi Keuangan : Rp. 46.080.445.000,- (99,98%)

   Realisasi Fisik : 100%

4.1.2. Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintah di bawahnya.

A. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU

1. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Pada Bidang ini di dukung beberapa kegiatan, seperti :

- Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Sub Kegiatan Lembaga Pelatihan Kerja dan Produktivitas yang Ditingkatkan Kualitas Mutu dan Lembaga. Dengan realisasi sebanyak 10 Lembaga yang, unit kerja yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan dengan pagu sebesar Rp. 172.260.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 171.913.471,- capaian sebesar 99,80 persen.
- Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas, Sub Kegiatan Bimbingan Peningkatan produktivitas, dengan realisasi 10 Kesepakatan peningkatan produktivitas, dengan pagu sebesar Rp. 134.920.000,- dengan realisasi anggaran sebesar dengan Rp. 134.920.000, capaian anggaran sebesar 100 persen, sub kegiatan Pengukuran Peningkatan Produktivitas, dengan realisasi sebanyak 9 Orang yang dapat terukur peningkatan produktivitasnya, dengan jumlah pagu Rp. 169.990.000,- terealisasi sebesar Rp. 161.070.000,- atau capaian anggaran 94,75 persen, sub kegiatan Pelatihan Peningkatan Produktivitas,

dengan realisasi sebanyak 50 Orang yang mendapatkan pelatihan peningkatan produktivitas, jumlah pagu Rp. 133.060.000,- terealisasi sebesar 100 persen.

- Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas, sub kegiatan Peserta yang magang di Perusahaan Dalam Negeri sebanyak 183 Orang, dengan pagu sebesar Rp. 1.367.342.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.365.283.602,- sehingga anggaran dapat terealisasi sebesar 99,85 persen, sub kegiatan Operasional Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan dengan pagu sebesar Rp. 63.588.000,- realisasi anggaran sebesar 100 persen, sub kegiatan Administrasi Dana Tugas Pembantuan dan dekonsentrasi, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 186.280.000,- terealisasi sebesar Rp. 179.465.371,- dengan capaian anggaran 96,34 persen.

2. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi

   Pada Tahun 2024 melaksanakan pengembangan kawasan transmigrasi di Kawasan Padang Ulak Tanding (Kabupaten Rejang Lebong) seperti adanya pembangunan jalan poros serta pembangunan jembatan sehingga dapat memberikan akses jalan bagi masyarakat transmigrasi yang memudahkan masyarakat untuk beraktifitas dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga dapat meningkatkan tarap hidup yang lebih baik. Selain pembangunan jalan dan jembatan juga diberikan bantuan jatah hidup (jaduk) untuk masyarakat di SP Binaan Kedurang (UPT Batu Ampar, Bengkulu Selatan), bantuan berupa beras rata-rata sebanyak 11 - 14 kg per jiwa dalam 1 KK. SP Binaan Kedurang (UPT Batu Ampar, Bengkulu Selatan) pada tahun 2024 bertambahn 11 KK dengan 38 jiwa sehingga jumlah beras yang dapat diberikan sebanyak 420,5 kg selama 1 tahun.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi melalui dana APBN dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam hal ini selalu melakukan pengembangan kawasan transmigrasi setiap tahunnya untuk masyarakat transmgigrasi dapat lebih diperhatikan, dalam hal ini dilakukannya monitoring dan evaluasi ke setiap kawasan transmigrasi di Provinsi Bengkulu untuk melakukan pendataan perkembangan pada setiap kawasan transmigrasi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Tahun 2024, melalui Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi, didukung dengan kegiatan :

- Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan di Kawasan Transmigrasi (UPT. Bukit Merbau) Kab. Rejang Lebong, dengan pagu Rp. 10.680.000,- realisasi anggaran 100 persen, sub kegiatan Jalan Non - Status yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi pagu sebesar Rp. 498.000.000,- realisasi anggaran Rp. 497.770.166,- capaian sebesar 99,95 persen, sub kegiatan Permasalahan Tanah Transmigrasi yang Difasilitasi Penyelesaiannya pagu sebesar Rp. 39.420.000,- terealisasi 100 persen, sub kegiatan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Transmigrasi pagu sebesar Rp. 10.031.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.891.000, capaian sebesar 88,64 persen, sub kegiatan Bantuan Catu Pangan Untuk Transmigrasi pagu sebesar Rp. 52.824.000,- terealisasi sebesar Rp. 52.216.000,- capaian anggaran 98,85 persen.

- Kegiatan Dukungan Manajemen, dengan sub kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi pagu Rp. 53.343.000,-

realisasi anggaran Rp. 52.859.200,- capaian anggaran sebesar 99,09 persen.

3. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi (Kabupaten Bengkulu Utara)
   Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794). Perangkat Daerah yang mendapatkan Tugas Pembantuan Pada Tahun Anggaran 2024 : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara. Didukung dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, yang berlokasi di Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Lagita Desa Urai Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, dengan output capaian berupa Pengembangan Fasiltas Umum di Kawasan Transmigrasi, Dimana telah dilaksanakan Pembangunan lanjutan Masjid Islamic Center, dengan pagu kegiatan sebesar Rp. 1.500.000.000, dapat terealisasi sebesar Rp. 1.499.775.800 atau dengan serapan anggaran sebesar 99,98 persen.

4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, SATPEL PK Bengkulu
   Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalu SATPEL PK Bengkulu pada Tahun 2024 mendapatkan dana Pembantuan berupa Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi & Pemagangan Binalavotas, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.761.822.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 2.719.501.505,- sehingga realisasi anggaran sebesar 98 persen.

5. Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi (PBK) Bengkulu Selatan
   Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, UPTD Pelatihan

Kerja Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 dengan target peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 208 Orang dengan jumlah paket keseluruhan sebanyak 13 paket pelatihan. Capaian Kinerja dapat terealisasi sebesar 100 persen, dengan 208 Orang Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi, dengan pagu Rp. 1.304.778.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.274.934.254,- sehingga anggaran dapat terealisasi sebesar 97,71 persen.

6. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Kepahiang.

   Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Kepahiang dengan output pelaksanaan kegiatan terlaksananya pelatihan keterampilan bagi masyarakat pencari kerja dengan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, bagi masyarakat yang membutuhkan di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Kepahiang, Rejang Lebong dan Lebong, dengan pagu sebesar Rp. 2.589.832.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.185.630.400,-, sehingga realisasi anggaran dapat tercapai sebesar 84,39 persen.

7. Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

   Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Program Pembinaan Ketenagakerjaan didukung dengan beberapa kegiatan diantaranya:

   - Kegiatan Pembinaan Ketenagakerjaan, sub kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri jumlah pagu sebesar Rp. 154.252.000,- dapat direalisasikan sebesar 100 persen, sub kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja, pagu sebesar Rp. 138.815.000,- terealisasi 100 persen.
   - Kegiatan Dukungan Manajemen, sub kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan pagu sebesar Rp. 82.492.000,- dapat terealisasi sebesar 82.205.780,- atau 99,65 persen.

8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Bidang HI dan Pengawasan didukung oleh program Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Program Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut :
   - Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kegiatan Program Pembinaan Ketenagakerjaan, didukung oleh 2 Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan, Peningkatan Kompetensi Mediator Hubungan Industrial dengan pagu Rp. 83.250.000,- terealisasi Rp. 83.250.000,- capaian sebesar 99,91 persen, sub kegiatan Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan pagu Rp. 11.650.000,- realisasi anggaran Rp. 11.590.000,- capaian sebesar Rp. 99,48 persen. Kegiatan Dukungan Manajemen, sub kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pagu Rp. 135.871.000,- realisasi anggaran Rp. 135.374.300,- capaian sebesar 99,63 persen.

   - Program Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan didukung oleh kegiatan Program Pembinaan Ketenagakerjaan, Sub Kegiatan Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan dengan pagu sebesar Rp. 140.279.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 140.274.000,- atau terealisasi 100 persen. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan dengan jumlah pagu sebesar Rp. 83.270.000,- terealisasi sebesar Rp. 83.166.000,- atau terealisasi sebesar 99,88 persen. Kegiatan Program Dukungan Manajemen, dengan Sub Kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja jumlah pagu sebesar Rp. 81.600.000,- dapat terealisasi sebesar 100 persen.

4.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

A. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU

1. Program Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Pemagangan Luar Negeri).
   - Hambatan/permasalahan :

     Jumlah angkatan kerja yang tinggi dan serapan tenaga kerja yang menurun mengakibatkan persaingan yang sangat kompetitif, calon tenaga kerja perlu mempersiapkan kompetensi, kecakapan dan kesiapan kerja yang memadai guna memasuki pasar tenaga kerja.
   - Upaya yang dilakukan :

     Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, melaksanakan Program Pemagangan ke Jepang dapat memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu dan peserta yang lulus bisa meningkatkan kemampuan dibidang teknik dan membantu perekonomian di Bengkulu dengan membangun usaha.
2. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi
   - Hambatan/permasalahan :

     Dari 5 kawasan hanya 1 kawasasn yang merupakan Kawasan Perioritas Nasional yaitu Kawasan Lagita (Bengkulu Utara), sehingga hanya 1 kawasan yang mendapatkan dana Tugas Pembantuan (TP) kawasan yang lain untuk Tahun 2024 hanya 2 kawasan yang dapat dibangun dan dikembangkan yaitu Kawasan Kedurang (UPT Batu Ampar, Bengkulu Selatan) dan Kawasan Kawasan Padang Ulak Tanding (Kabupaten Rejang Lebong) dikarenak keterbatasan dana APBD.
   - Upaya yang dilakukan :

     Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Tahun 2024 melaksanakan pengembangan kawasan transmigrasi di Kawasan Padang Ulak Tanding (Kabupaten Rejang Lebong) seperti adanya pembangunan jalan poros serta pembangunan jembatan sehingga dapat memberikan akses jalan bagi masyarakat transmigrasi yang memudahkan masyarakat untuk beraktifitas dalam memenuhi kebutuhan

hidup sehari-hari sehingga dapat meningkatkan tarap hidup yang lebih baik. Selain pembangunan jalan dan jembatan juga diberikan bantuan jatah hidup (jaduk) untuk masyarakat di SP Binaan Kedurang (UPT Batu Ampar, Bengkulu Selatan), bantuan berupa beras rata-rata sebanyak 11 - 14 kg per jiwa dalam 1 KK.

3. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
   - Hambatan/permasalahan :
     Masih kurangnya tingkat kesadaran Masyarakat dalam menjaga dan merawat tempat ibadah yang sudah disediakan sehingga pihak dari Disnakertrans Kabupaten Bengkulu Utara harus selalu melakukan pendekatan dan sosialisasi ke Masyarakat tentang pentingnya menjaga dan merawat tempat ibadah.
   - Upaya yang dilakukan :
     Pihak Disnakertrans Kabupaten Bengkulu Utara akan selalu melakukan perbaikandan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Masyarakat Transmigrasi sehingga Masyarakat dapat melaksanakan aktifitas kehidupan dengan lebih baik lagi sehingga dapat meningatkan kualitas Masyarakat yang berbudaya dan lebih maju.

4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
   - Hambatan/permasalahan :
     Terbatasnya jumlah peserta pelatihan untuk setiap paket pelatihan, dimana setap paket dibatasi berjumlah 16 Orang, sedangkan minat masyarakat semakin tinggi sehingga jumlah pendaftar semakin meningkat setiap tahunnya, selain itu Peserta yang mendaftar masih banyak yang belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dari pusat Kementerian Ketenagakerjaaan RI, diantaranya masih banyak pendaftar yang berstatus mahasiswa, dan bekerja tidak tetap, sedangkan peserta harus mengikuti pelatihan dengan efektif, efisien dan akuntabel, pelatihan dilaksanakan setiap hari sehingga tidak dapat menganggu perkerjaan yang lain.

- Upaya yang dilakukan :

  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu dengan bantuan dana dari Kementerian Ketenagakerjaan RI memberikan wadah bagi pencari kerja untuk terus berlatih dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dibidang masing-masing sesuai dengan kemampuan yang dimiliki yaitu di Balai Latihan Kerja atau BLK merupakan sebuah tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan khusus atau yang ingin mendalami keahlian di bidangnya masing-masing.

5. Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi (PBK) Bengkulu Selatan
   - Hambatan/permasalahan :

     Terbatasnya dana Pelatihan sumber dana APBN tahun 2024 yang hanya mendapat 13 paket jurusan, Sedangkan peminat yang mendaftar lebih banyak dari paket pelatihan yang ada Untuk itu diharapkan ke depannya dana Pelatihan Berbasis Kompetensi dapat ditingkatkan menjadi 18 paket (sebanyak 288 orang).
   - Upaya yang dilakukan :

     Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu dengan bantuan dana dari Kementerian Ketenagakerjaan RI memberikan wadah bagi pencari kerja untuk terus berlatih dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dibidang masing-masing sesuai dengan kemampuan yang dimiliki yaitu di Balai Latihan Kerja atau BLK merupakan sebuah tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan khusus atau yang ingin mendalami keahlian di bidangnya masing-masing.

6. Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Kepahiang.
   - Hambatan/permasalahan :

     Masih banyak masyarakat/kelompok masyarakat pencari kerja, anak-anak putus sekolah serta masyarakat yang membutuhkan keterampilan.
   - Upaya yang dilakukan :

     Dilaksanakannya pelatihan yang ditujukan untuk masyarakat/kelompok masyarakat pencari kerja di Desa, wilayah Transmigrasi, anak putus

sekolah yang membutuhkan peningkatan keterampilan dan kelompok masyarakat yang membutuhkan di Wilayah Kerja UPTD Pelatihan Kerja Kepahiang.

7. Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
   - Hambatan/permasalahan :
     Kurangnya informasi lowongan kerja bagi pekerja disabilitas yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, dan Perusahaan memiliki keinginan untuk merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas, namun masih ragu akan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dikantor mereka kesulitan untuk menentukan jabatan yang benar-benar sesuai.
   - Upaya yang dilakukan :
     Memberikan pembinaan kepada para difabel tentang dunia kerja dan etos kerja agar bisa menyesuaikan diri dengan budaya kerja pemberi kerja, serta melakukan kunjungan untuk mengecek aksesibilitas kantor penyandang disabilitas sudah layak atau belum unruk mempekerjakan disabilitas serta mengecek apakah sudah diberikan bimbingan atau belum tentang tentang jabatan yang akan diterima waktu kerja.

8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Biang HI dan Pengawasan didukung oleh program Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Program Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
   - Hambatan/permasalahan :
     Semakin bertambahnya kasus perselisihan pada perusahaan, dan masih kurangnya pemahaman pekerja tentang berbagai peraturan perundang-undangan khususnya di bidang ketenagakerjaan dan prosedur tata cara penyelesaian masalah hubungan industrial serta berbagai masalah ekonomi perusahaan.
   - Upaya yang dilakukan :
     Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, dapat menyelesaikan permasalahan perselisihan antara pekerja dan

perusahaan dengan menggunakan metode Perundingan Bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Perundingan Bipartit harus diselesaikan dalam waktu maksimal 30 hari, serta menggunakan motode Perundingan tripartit bisa melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase, gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dapat diajukan apabila upaya tripartit yang meliputi mediasi dan konsiliasi gagal.

B. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah karena kurangnya anggaran untuk data dan informasi dan sudah tidak diakomodirnya lagi honor petugas data sehingga menyulitkan untuk mendapatkan data yang valid.

Upaya Penyelesaian diupayakan penganggaran kembali honorarium untuk petugas pendataan.

C. DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERTANAIAN PROVINSI BENGKULU

Pada Tahun 2024 dalam pelaksanaan anggaran dana Tugas Perbantuan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pertanian Provinsi Bengkulu tidak mengalami hambatan dan permasalahan yang berarti

D. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU

1. Pelaksanaan Program Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Program Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas melalui dana Tugas Pembantuan sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Program dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan Daerah Irigasi di 5 (Lima) Kabupaten di Provinsi Bengkulu yaitu Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Dana terealisasi 100 %.

2. Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional. Pelaksanaan

Preservasi dan Peningkatan Kapasitas sudah dilaksanakan di jalan Kerkap-Sp. Nakau, adapun hambatan/permasalahan yang dihadapi yaitu karena dan fisik yang tidak terserap habis 100% disesuaikan dngan kebutuhan dilapangan Progres Fisik Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Sebesar 100,00 % tidak ada kendala pekerjaan sudah selesai.

BAB V

PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu selama Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu sebelumnya pada Tahun 2024 secara umum dapat berjalan dengan baik yang didukung dengan berbagai kebijakan sesuai tata aturan yang berlaku. Sebagai salah satu bentuk Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut maka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Bengkulu Tahun 2024 ini disusun untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintahan Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan laporan ini maupun dalam praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama Tahun 2024, masih terdapat banyak hal yang perlu menjadi perhatian dan perlu terus dilakukan perbaikan dan peningkatan oleh semua pihak demi kemajuan Provinsi Bengkulu di masa yang akan datang dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, maka diharapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dapat melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi berupa saran dan masukan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Bengkulu Tahun 2024 ini.

Demikian, untuk dapat menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terima kasih.